PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

"CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN"

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 10
2.1 Ekonomi Makro 10
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah 17
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah..... 17
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah..... 25
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 37
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 38
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 69
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 69
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 128
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 130
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 132
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 136
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 137
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah 146
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH..... 166
5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah..... 168

5.1.1 Pendapatan-LRA 168
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 169
5.1.1.1.1 Pajak Daerah 170
5.1.1.1.2 Retribusi Daerah 174
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 187
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 188
5.1.1.2 Pendapatan Transfer 201
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 202
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 205
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 206
5.1.2 Belanja Daerah 207
5.1.2.1 Belanja Operasi 210
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 211
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225
5.1.2.1.3 Belanja Hibah 258
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 263
5.1.2.2 Belanja Modal 264
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 265
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 266
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 274
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 276
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 277
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga 278
5.1.2.4 Transfer 282
5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil 283
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 304
5.1.2.5 Surplus/Defisit 324
5.1.3 Pembiayaan 324
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan 324
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan 325
5.1.3.3 SiLPA 325
5.1.4 Pendapatan-LO 327

5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah-LO 328
5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO 328
5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 330
5.1.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO 332
5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO 332
5.1.4.2 Pendapatan Transfer-LO 335
5.1.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 336
5.1.4.2.2 Pendapatan Transfer antar Daerah-LO 340
5.1.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 341
5.1.5 Beban 346
5.1.5.1 Beban Operasi 347
5.1.5.1.1 Beban Pegawai 348
5.1.5.1.2 Beban Barang Dan Jasa 362
5.1.5.1.2.1 Barang 362
5.1.5.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis 362
5.1.5.1.2.1.2 Beban Barang Tak Habis Pakai 365
5.1.5.1.2.1.3 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 365
5.1.5.1.2.2 Beban Jasa 365
5.1.5.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor 365
5.1.5.1.2.2.2 Beban Premi Asuransi 368
5.1.5.1.2.2.3 Beban Sewa 369
5.1.5.1.2.2.4 Beban Jasa Konsultasi 370
5.1.5.1.2.2.5 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 372
5.1.5.1.2.2.6 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 372
5.1.5.1.2.2.7 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN 373
5.1.5.1.2.2.8 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi 374
5.1.5.1.2.2.9 Beban Pemeliharaan 375
5.1.5.1.2.2.10 Beban Perjalanan Dinas 378

5.1.5.1.2.2.11 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 378
5.1.5.1.2.2.12 Beban Barang dan Jasa BOS 379
5.1.5.1.2.2.13 Beban Barang dan Jasa BLUD 380
5.1.5.1.3 Beban Hibah 380
5.1.5.1.4 Beban Bantuan Sosial 385
5.1.5.1.5 Beban Penyisihan Piutang 386
5.1.5.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi 386
5.1.5.3 Beban Tidak Terduga 387
5.1.5.4 Beban Transfer 388
5.1.5.5 Surplus/Defisit 429
5.1.6 Aset 438
5.1.6.1 Aset Lancar 439
5.1.6.1.1 Kas dan Setara Kas 440
5.1.6.1.2 Piutang 446
5.1.6.1.2.1 Piutang Pajak Daerah 447
5.1.6.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah 448
5.1.6.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 450
5.1.6.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah 451
5.1.6.1.2.5 Piutang Lainnya 451
5.1.6.1.2.6 Penyisihan Piutang 452
5.1.6.1.3 Beban Dibayar Dimuka 456
5.1.6.1.4 Persediaan 457
5.1.6.2 Investasi Jangka Panjang 464
5.1.6.3 Aset Tetap 466
5.1.6.3.1 Tanah 467
5.1.6.3.2 Peralatan dan Mesin 472
5.1.6.3.3 Gedung dan Bangunan 499
5.1.6.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 507
5.1.6.3.5 Aset Tetap Lainnya 517
5.1.6.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan 523
5.1.6.3.7 Akumulasi Penyusutan 529

5.1.6.4 Dana Cadangan 529
5.1.6.5 Aset Lainnya 530
5.1.6.5.1 Tagihan Jangka Panjang 530
5.1.6.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 531
5.1.6.5.3 Aset Tidak Berwujud 535
5.1.6.5.4 Aset Lain-Lain 539
5.1.6.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 545
5.1.6.6 Properti Investasi 546
5.1.7 Kewajiban 546
5.1.8 Ekuitas 556
5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasi Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah 578
5.2.1 Kas 579
5.2.2 Piutang 582
5.2.3 Penyisihan Piutang 592
5.2.4 Beban dibayar dimuka 594
5.2.5 Pendapatan diterima dimuka 594
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 596
BAB VII PENUTUP 621

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023 12
Tabel 2.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2021-2023 13
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 39
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan Tahun 2023 41
Tabel 2.5 Capaian Indikator RPJMD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 43
Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 69
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Pergeseran Kesatu) 72
Tabel 3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Pergeseran Kedua) 74
Tabel 3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Perubahan) 77
Tabel 3.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Kedua) 79
Tabel 3.6 Anggaran Belanja Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 82
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 84
Tabel 3.8 Anggaran Belanja Penurunan Stunting, Penghapusan kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Investasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 89
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 90
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 93
Tabel 3.11 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 97
Tabel 3.12 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 97
Tabel 3.13 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 97
Tabel 3.14 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 98

Tabel 3.15 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 99
Tabel 3.16 Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 99
Tabel 3.17 Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 103
Tabel 3.18 Belanja Daerah Berdasarkan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 103
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 127
Tabel 5.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 168
Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 169
Tabel 5.3 Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 170
Tabel 5.4 Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 174
Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 176
Tabel 5.6 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan Tahun 2023 177
Tabel 5.7 Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 180
Tabel 5.8 Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 186
Tabel 5.9 Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 188
Tabel 5.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 202
Tabel 5.11 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023 202
Tabel 5.12 Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 206
Tabel 5.13 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 206
Tabel 5.14 Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 208
Tabel 5.15 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 210
Tabel 5.16 Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 211

Tabel 5.17 Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023... 211
Tabel 5.18 Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 224
Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 225
Tabel 5.20 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 250
Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024..... 255
Tabel 5.22 Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 264
Tabel 5.23 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 271
Tabel 5.24 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 273
Tabel 5.25 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 276
Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 277
Tabel 5.27 Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024..... 278
Tabel 5.28 Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 283
Tabel 5.29 Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Lebak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 284
Tabel 5.30 Transfer Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Kabupaten Lebak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 294
Tabel 5.31 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 304
Tabel 5.32 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Tahun Anggaran 2024..... 314
Tabel 5.33 Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 324
Tabel 5.34 Rincian SiLPA Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... 326
Tabel 5.35 Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 .. 327

Tabel 5.36 Pendapatan Asli Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 328
Tabel 5.37 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 329
Tabel 5.38 Pendapatan Retribusi - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 331
Tabel 5.39 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 332
Tabel 5.40 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 333
Tabel 5.41 Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 336
Tabel 5.42 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 337
Tabel 5.43 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 341
Tabel 5.44 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dan 2023 342
Tabel 5.45 Beban Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 347
Tabel 5.46 Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 348
Tabel 5.47 Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 ... 362
Tabel 5.48 Beban Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 366
Tabel 5.49 Beban Premi Asuransi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 368
Tabel 5.50 Beban Sewa Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 369
Tabel 5.51 Beban Jasa Konsultasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 371
Tabel 5.52 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 373
Tabel 5.53 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 373
Tabel 5.54 Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN Atas Pemungutan Retribusi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 374
Tabel 5.55 Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 375

Tabel 5.56 Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 378
Tabel 5.57 Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 380
Tabel 5.58 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 385
Tabel 5.59 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 386
Tabel 5.60 Beban Penyusutan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 387
Tabel 5.61 Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 388
Tabel 5.62 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 389
Tabel 5.63 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 399
Tabel 5.64 Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 409
Tabel 5.65 Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 419
Tabel 5.66 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 429
Tabel 5.67 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 437
Tabel 5.68 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 438
Tabel 5.69 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 439
Tabel 5.70 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 442
Tabel 5.71 Sisa Kas Belanja Operasional Sekolah Tahun 2024 444
Tabel 5.72 Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2024 445
Tabel 5.73 Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 446
Tabel 5.74 Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 447
Tabel 5.75 Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 448

Tabel 5.76 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 450
Tabel 5.77 Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 451
Tabel 5.78 Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 452
Tabel 5.79 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 453
Tabel 5.80 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 ... 453
Tabel 5.81 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 454
Tabel 5.82 Penyisihan Piutang Trasnfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 455
Tabel 5.83 Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 456
Tabel 5.84 Persediaan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 458
Tabel 5.85 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 461
Tabel 5.86 Persediaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 462
Tabel 5.87 Investasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 466
Tabel 5.88 Investasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 466
Tabel 5.89 Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 467
Tabel 5.90 Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 468
Tabel 5.91 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 473
Tabel 5.92 Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 500
Tabel 5.93 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 507
Tabel 5.94 Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 518
Tabel 5.95 Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 523

Tabel 5.96 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 529
Tabel 5.97 Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 530
Tabel 5.98 Rincian Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 530
Tabel 5.99 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 533
Tabel 5.100 Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 536
Tabel 5.101 Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 540
Tabel 5.102 Aset Lain-Lain (Rusak Berat) Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 540
Tabel 5.103 Aset Lain-Lain (Rusak Berat) Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 541
Tabel 5.104 Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 549
Tabel 5.105 Utang Belanja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 552
Tabel 5.106 Utang Belanja BLUD Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 555
Tabel 5.107 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dan 2023 556
Tabel 5.108 Penyisihan Piutang dan Nilai bersih Piutang Kabupaten Lebak Tahun 2024 592
Tabel 6.1 PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024 598
Tabel 6.2 PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongan Tahun 2024 599
Tabel 6.3 Data Eselon dan Non Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 600
Tabel 6.4 Penerbitan Perijinan Tahun 2024 602
Tabel 6.5 Prestasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 604
Tabel 6.6 Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 608
Tabel 6.7 Rekapitulasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 611

Tabel 6.8 Rekapitulasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Lebak Dengan Mitra Kerja Sama Tahun 2024 616

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 11
Grafik 2.2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2021-2023..... 16
Grafik 3.1 Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 92
Grafik 3.2 Belanja dan Transfer Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 93

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bagian tak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Di lingkungan pemerintah daerah setiap pengguna anggaran, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disebut entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan, selanjutnya disampaikan ke entitas pelaporan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antargenerasi

   Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung Belanja pengeluaran tersebut.

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hasil yang dicapai secara sistematis. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Tujuan dari Laporan Keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, Belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun meliputi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

   Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Sedangkan tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Dana Bergulir;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 445 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 445);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 446 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 446);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 447);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 448 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 448);
28. Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 72);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 97 Tahun 2024 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);

32. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 19);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Paraturan Bupati Nomor 37 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 57);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing–Masing Pos–Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Pendapatan-LO

5.1.5 Beban

5.1.6 Aset

5.1.7 Kewajiban

5.1.8 Ekuitas

5.2 Pengungkapkan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro menggambarkan ekonomi secara keseluruhan yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal. Ekonomi Makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan..

Kebijakan ekonomi daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan di daerah. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meliputi kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, seperti upaya penguatan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur.

Kabupaten Lebak memiliki arah kebijakan ekonomi yang didukung oleh Belanja yang memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024.

Berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan Kebijakan Makro Tahun 2024 melalui Reformasi beberapa sektor:

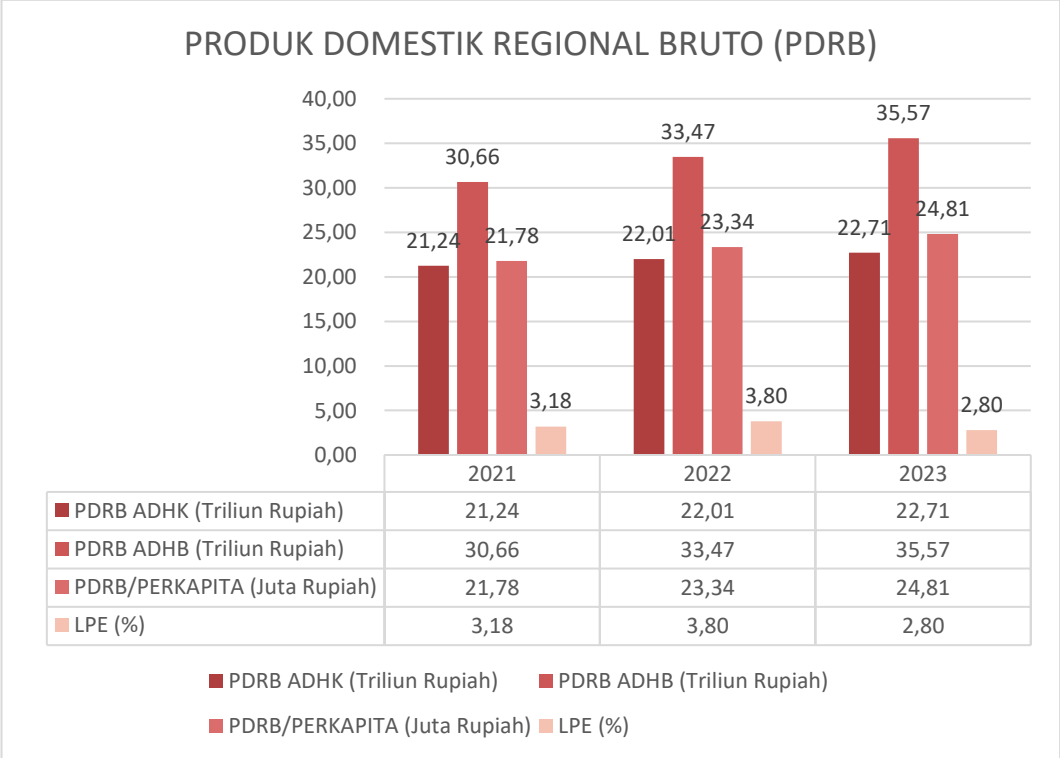
1. Mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan di dalam rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security:
2. Reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan perbaikan sistemnya;

3. Reform di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh Mendikbud, termasuk penggunaan teknologi;
4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari Belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat menjadi sangat penting;
5. Pemerintah juga akan melakukan reform di sisi pendapatan, karena dari sisi pajak PNBP dan kemampuan untuk memberikan insentif sektor usaha akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi penerimaan negara ini.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada Tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga 1 (satu) Tahun dasar tertentu saat ini menggunakan Tahun 2010. PDRB Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2021 – 2023 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut:

Grafik 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	21,24	22,01	22,71
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	30,66	33,47	35,57
PDRB/PERKAPITA (Juta Rupiah)	21,78	23,34	24,81
LPE (%)	3,18	3,80	2,80

Grafik 2.1 Memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak secara total Atas Dasar Harga Konstan di Tahun 2023 sebesar 22,71 Trilliun meningkat menjadi sebesar 0,70 Trilliun atau 3,18% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 22,01 Trilliun. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan ditujukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan sangat sementara PDRB ADHK Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak mencapai 2,80%, tumbuh lebih lambat bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3,80%. Pada Tahun 2023 PDRB atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebak mencapai 35.571,00 miliar rupiah, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 33.474,52 miliar rupiah, angka tersebut mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa pasca pandemi COVID-19, perekonomian Lebak kembali pulih sehingga pendapatan masyarakat meningkat. PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita yaitu kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Distribusi persentase perkategori dalam PDRB dapat menggambarkan struktur perekonomian hasil Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share di atas 25 persen dari total PDRB per Tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan di Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan tipologi daerah yang cocok untuk usaha di bidang pertanian karena masih tersedia wilayah pertanian dan perkebunan yang luas dan tanah yang relative subur serta untuk perikanan tersedianya Kawasan laut yang luas di wilayah selatan. Struktur perekonomian Kabupaten Lebak menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN LEBAK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)
TAHUN 2021-2023

NO	SEKTOR/ SUB SEKTOR/ SUB SUB SEKTOR	TAHUN (%)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,90	27,47	27,36
2	Pertambangan dan Penggalian	6,45	5,95	4,49
3	Industri Pengolahan	8,83	9,06	9,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12

DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN LEBAK ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)
TAHUN 2021-2023

NO	SEKTOR/ SUB SEKTOR/ SUB SUB SEKTOR	TAHUN (%)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	9,17	9,69	9,69
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,06	11,99	12,17
8	Transportasi dan Pergudangan	6,17	6,39	6,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61	4,60	4,80
10	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,56	0,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,80	1,74
12	Real Estate	6,75	6,57	6,64
13	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	5,71	5,47	5,49
15	Jasa Pendidikan	6,64	6,21	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,33	1,39
17	Jasa Lainnya	2,50	2,46	2,67
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka 2024 (BPS Kab.Lebak)

Dari tabel terlihat bahwa 3 (tiga) lapangan usaha yang memberikan konstribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lebak yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,36%.

Selanjutnya kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak Tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2021–2023

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Gini Ratio	0,33	0,312	0,271
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,08	3,86	2,8
3	Tingkat Kemiskinan	10,29	8,91	8,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,86	8,55	7,57
5	Indeks Pembangunan Manusia	64,03	64,71	65,21

Sumber: BPS Kab Lebak

Gini ratio adalah angka ketimpangan kondisi ekonomi antara kelompok miskin dan kaya Gini ratio untuk mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk dengan kisaran 0 untuk pendapatan merata sempurna hingga 1 untuk ketimpangan

pendapatan sempurna. Pada Indikator Gini ratio tingkat capaian Kabupaten Lebak Tahun 2023 adalah sebesar 0,271 lebih rendah dari 2 (dua) Tahun terakhir dimana Tahun 2021 sebesar 0,33 dan Tahun 2022 sebesar 0,312, angka tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian Provinsi Banten sebesar 0,36 maupun nasional sebesar 0,38, gini ratio Kabupaten Lebak masih berada dibawahnya. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Lebak masih relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Banten maupun Nasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) daerah merupakan indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini ekonomi daerah berfokus pada sumber daya manusia, sumber daya buatan dan teknologi sebagai penopang dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin baik kondisi ekonomi daerah, maka semakin baik juga perkembangan daerahnya. Perekonomian daerah dikatakan lebih baik dan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang telah dicapai sebelumnya. Setiap daerah memiliki sektor unggulan yang dapat dijadikan sebagai pendapatan ekonomi wilayah serta bisa digunakan untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Dilihat dari Tabel 2.2. Pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak memiliki capaian sebesar 2,8%, apabila dibandingkan dengan LPE pusat maupun provinsi, angka tersebut masih berada dibawah keduanya dengan masing-masing capaian angka sebesar 5,05% dan 5,31%. Namun angka tersebut menunjukan trend negatif dimana pada tahun sebelumnya capaian LPE Kabupaten Lebak sebesar 3,86%. Kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8%. dinilai berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan, sehingga kondisi tersebut menjelaskan kondisi Ketika LPE Kabupaten Lebak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Laju Pertumbuhan Ekonomi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga capaian pada Tahun selanjutnya ekonomi Kabupaten Lebak dapat tumbuh hingga dua digit serta dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi yang cukup baik diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, serta dapat menurunkan angka kemiskinan.

Jika dilihat dari tabel 2.2 Persentasi penduduk miskin tingkat capaian Kabupaten Lebak mencapai 8,68%, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 sebesar 8,91% penurunannya sebesar 0,23%. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian pusat dan provinsi angka tersebut masih berada di atas angka capaian Pusat dan Provinsi, hal ini tentu menggambarkan bahwa walaupun adanya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada penurunan angka kemiskinan. Tentu ini menjadi pekerjaan yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan, dengan cara pengelolaan APBD secara cermat dimana perencaaan dan pendanaan dapat dialokasi ke program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung guna menekan angka kemiskinan.

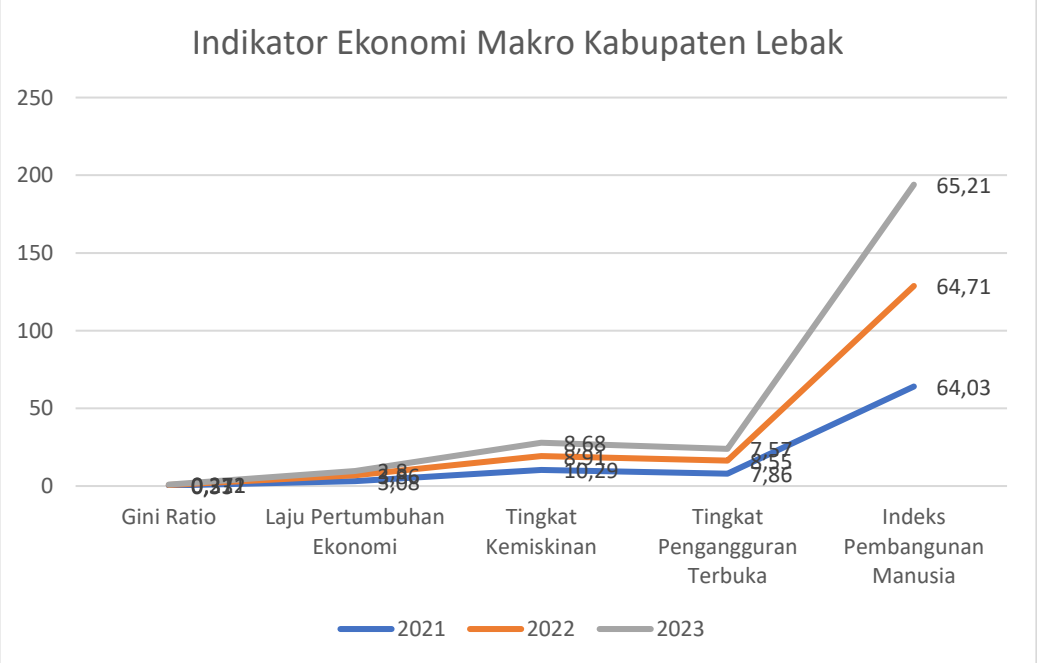
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari Tahun ke Tahun dan dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian Berdasarkan Tabel 2.2 Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukan melalui penyerapan tenaga kerja. Pengangguran TPT Kabupaten Lebak adalah sebesar 7,57% pada Tahun 2023, sedangkan pada Tahun 2022 mencapai 8,55%. Capaian TPT Kabupaten Lebak pada Tahun 2023 yang menurun jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, menunjukan masih terdapat jumlah pengangguran yang terdapat dalam angkatan kerja Kabupaten Lebak yang harus disediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dalam kondisi tersebut, maka perlu adanya pembangunan ekonomi yang ramah ketenagakerjaan, sehingga pembangunan ekonomi yang ada dapat menciptakan dan membuka kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja dapat optimal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Indikator makro pembangunan manusia antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi

Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan bekerja dan lain-lain. Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2023, angka IPM di Kabupaten Lebak tercatat sebesar 65,21 poin. Namun demikian, nilai tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pusat maupun provinsi. Capaian tiga indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah seperti indikator kesehatan dimana realisasi Usia Harapan Hidup pada Tahun 2023 baru mencapai 68,13 Tahun, tingkat pendidikan yang masih rendah, ditunjukkan dengan capaian realisasi rata-rata lama sekolah pada Tahun 2023 hanya mencapai 6,6 Tahun serta indikator ekonomi dimana daya beli penduduk Kabupaten Lebak pada Tahun 2023 sebesar Rp9.130.000,00 capaian tersebut masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan capaian pusat maupun provinsi. Harus adanya perbaikan pada indikator utama yang berkontribusi terhadap capaian IPM Kabupaten Lebak.

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut:

Grafik 2.2



2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan keuangan daerah sebagai bagian integral kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah strategis dalam mengatasi krisis serta menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi dewasa ini, maupun tantangan yang mungkin akan timbul di masa depan. Oleh karenanya, kebijakan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah sehingga mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah yang tercermin dalam format pendapatan, Belanja, maupun pembiayaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pokok-pokok kebijakan di dalam penyusunan APBD Kabupaten Lebak Tahun 2024 meliputi kebijakan pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih periode Tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah Belanja bagi masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan realisasi penerimaan Tahun sebelumnya, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, maupun pertumbuhan rasio perpajakan daerah pada Tahun 2024 yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah Belanja ekonomi masyarakat dan pelaku usaha;

2) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan kegiatan pemungutan, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi;

3) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan;
4) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah;
5) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari:
1) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:
a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) Hasil kerja sama daerah;
d) Jasa giro;
e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
f) Pendapatan bunga;
g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) Pendapatan denda pajak daerah;
l) Pendapatan denda retribusi daerah;
m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) Pendapatan dari pengembalian;
o) Pendapatan dari BLUD; dan

p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan, terdiri atas:

a) Dana Transfer Umum, yang meliputi:

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH 3 (tiga) Tahun terakhir;
- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Cukai Hasil Tembakau, dan DBH-Perikanan, dianggarkan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir;

- Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan usulan yang tertuang dalam KRISNA.

2) Dana Insentif Daerah, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan paling tinggi sebesar anggaran Tahun 2023 dan penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Desa, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan paling tinggi sebesar Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016;

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan hibah, merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah;
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah dan dianggarkan paling tinggi sebesar realisasi pendapatan hibah Dana BOS Tahun 2023.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dihasilkan. Beberapa upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tetap mengoptimalkan penerimaan daerah antara lain:

1. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah (jemput bola) secara berkala;
2. Pemutakhiran data wajib pajak baru yang belum menjadi objek pajak;
3. Monitoring dan evaluasi serta rekon capaian pendapatan daerah secara berkala dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat;
4. Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ke setiap objek retribusi daerah, sekaligus memberikan pembinaan dan himbauan persuasif untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan serta tetap membayar retribusi sesuai dengan yang telah

ditentukan oleh Pemerintah khususnya tim Gugus Tugas Covid 19;

6. Optimalisasi penyebarluasan informasi melalui sarana media sosial maupun brosur, serta sosialisasi terbatas sesuai protokol kesehatan;
7. Mengimplementasikan reward and punishment terhadap aparatur pemungut pajak dan retribusi daerah.;
8. Optimalisasi kinerja BUMD sehingga mampu berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah;
9. Optimalisasi aparatur pemungut serta sarana-prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah pada tahun 2024 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan

memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024. Belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Belanja daerah Tahun 2024 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian Belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain alokasi Belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total Belanja daerah) sesuai III-20 RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2024 amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lebak, Fungsi kesehatan (minimal 10% dari total Belanja daerah diluar Gaji ASN) sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lebak, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% dari total Belanja APBD diluar Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa), Fungsi Pengawasan (0,50% dari total Belanja Daerah), Alokasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia (0,16% dari total Belanja Daerah), Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 903/6397/SJ Tanggal 25 November

2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama. Sementara pemenuhan Belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Pemerintah Provinsi mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten. Selengkapnya mengenai arah kebijakan perencanaan Belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada Belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan perencanaan Belanjanya meliputi:

1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
2) Penganggaran Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
6) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
7) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Adapun arah kebijakan perencanaan Belanjanya meliputi:

1) Penganggaran Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan;
3) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

5) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 III-28 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan;
6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up kepada Bupati/Wakil Bupati maupun Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;
7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat dan staf, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi Banten atau secara virtual berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi,

kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat dengan tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi;

8) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, maupun uji kompetensi dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling sedikit 0,16% dari total Belanja daerah.
9) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11) Pengadaan Belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan, dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Penganggaran Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14) Penganggaran Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil bupati), biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan

dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan mempedomani Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan Belanja modal diarahkan sebagai berikut:

a. Alokasi Belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
b. Penganggaran Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam Belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual;

c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
f. Alokasi anggaran untuk pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan modal transportasi atau peningkatan sarana transportasi umum minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Belanja APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun demikian, besaran Belanja Bagi Hasil untuk Pemerintahan Desa disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana

cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Kebijakan umum pembiayaan daerah ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini merupakan upaya preventif untuk mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD mengalami surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah maupun pembayaran pokok utang;
2. Apabila APBD mengalami defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau mencairkan dana cadangan, dan melakukan rasionalisasi Belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman;
4. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Lebak kepada BUMD yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap entitas pelaporan wajib

menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan misi, tujuan dan sasaran yang terarah karena merupakan suatu indikator pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019- 2024 yaitu:

"Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Tahun 2024 ditetapkan 5 (lima) misi dan tujuan serta 10 sasaran Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.3
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	
1. Mengoptimalkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	1.	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia
		2.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
2. Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
		4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
		5.	Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Inftrastruktur Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas	6.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Publik
		7.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar
		8.	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan
4. Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup	Terpeliharanya Fungsi Ruang Dan Kualitas Lingkungan	9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata	Meningkatnya Tata Kelola	10.	Meningkatnya Kinerja

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	
Kelola Pemerintahan Yang Baik	Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas		penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan Publik

Arah kebijakan pembangunan pada Tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 difokuskan pada upaya peningkatan iklim usaha dan investasi ke dalam maupun keluar, khususnya di sektor kepariwisataan dan di berbagai sektor pendukung kepariwisataan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata yang ada, sekaligus mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dan daerah dalam mendukung implementasi visi kepariwisataan tersebut. Upaya ke dalam dilakukan melalui fasilitasi kebijakan dan program yang makin mendukung kemudahan berinvestasi, termasuk didalamnya adalah beragam program intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata. Upaya ke dalam juga dilakukan dengan mempersiapkan struktur dan aparatur birokrasi guna memiliki pemahaman dan kesiapan yang komprehensif terhadap visi kepariwisataan tersebut. Sedangkan upaya keluar dilakukan dengan melakukan aktivitas promosi secara ekstensif, sehingga mampu mengakselerasi pembangunan kepariwisataan daerah. Arah kebijakan Tahunan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 digunakan sebagai arahan dalam penentuan Tema Pembangunan RKPD. Pada Tahun 2024 tema pembangunan Nasional yaitu;

“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”.

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah pusat menetapkan 7 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Provinsi Banten Tahun 2024, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut: "**Banten Untuk Indonesia Maju**"

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Nasional maka tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2024 yaitu:

"Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Kemandirian Ekonomi"

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatan Kualitas Infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas

Pencapaian target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
MISI 1 : Mengoptimalkan Pembangunan Manusia			
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,33	67,68
	Indeks Pendidikan	0	0,569

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
Sasaran 1. Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	0,7437	0,734
	Indeks Pembangunan Gender	80,75	80,2
Sasaran 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,81	2,3
MISI 2 : Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah			
Tujuan 2. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Gini Ratio	0,257	0.271
	Indeks Williamson	0,4	0,4
Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB Perkapita	24.810.000	23.342.143
	LPE	5,53	3,86
	Daya Beli	1.930.000	9.130.000
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,23	7,57
	Tingkat Kemiskinan	8,44	8,68
Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (%)		71,96
Sasaran 5. Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	4,8	4,6
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah			
Tujuan3. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur wilayah yang berkualiatas	Indeks Infrastruktur Daerah	76,07	73,63
Sasaran 6. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Publik	indeks infrastruktur publik	73,1	69,98
Sasaran 7. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks infrastruktur dasar	79,04	77,28
Sasaran 8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas	4,9	4,35
MISI 4: Memelihara kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan 4. Terpeliharanya Fungsi Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,27	62,52
Sasaran 9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	74,47	79,92
	Indeks Kualitas Air	52,81	57
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,85	39,83
MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76,37	76,37
Sasaran 10. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	78,98	78,04
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,908	1,036

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
	OPINI BPK	WTP	WTP
	IKM terhadap Pelayanan Publik	83,9	79,11
	Indeks SPBE	3,52	2,63
	Sistem Merit	265,5	264
	Maturisasi SPIP	Level 3	Level 3

Sumber:BappelitbangdaKab.Lebak

Tabel 2.5
CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Indeks Pendidikan (Satuan: Poin)	0,556	0,556	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Indeks Kesehatan (Satuan: Poin)	0,7437	0,7405	Dinas Kesehatan
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Indeks infrastruktur dasar (Satuan: %)	79,04	78,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase akses air minum (Satuan: %)	75,24	74,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	73,69	73,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	70,56	71,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	75,24	74,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air Iimbah domestic	73,69	73,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	0	94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	75,64	72,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1201	**TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (Satuan: %)*	6,23	7,57	Dinas Tenaga Kerja
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Poin)	80,75	79,11	DP3AP2KB
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Satuan: %)	1,81	1,81	DP3AP2KB
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Daya Beli (Satuan: Rupiah)	9.130.000	9.130.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM
2002	**PARIWISATA**			
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (Satuan: %)	4,8	4,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**			
1	PDRB Perkapita (Satuan: Juta (Rupiah)	24.810.000,00	2.481.000,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	Indeks Williamson (Satuan: Indeks)	0,4	0,4	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
3	Laju inflasi	0	0	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
4	Indeks Gini	0,257	0,271	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,09	91,32	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	0	0	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
7	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	2,71	9,2	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)*	0,05	0,05	Dinas Pendidikan
2	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)*	96,14	96,21	Dinas Pendidikan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
3	Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)*	0,92	0,92	Dinas Pendidikan
4	Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)*	99,56	99,56	Dinas Pendidikan
5	Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)*	100	98,87	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	83,04	82,46	Dinas Kesehatan/RSUD Adjidarmo
2	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	38,841	33,04	Dinas Kesehatan
3	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	26,5	48,9	Dinas Kesehatan
4	Usia Harapan Hidup (UHH) (Satuan Tahun)	68,34	68,13	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Stunting (Satuan:%)	3,74	3,69	Dinas Kesehatan
1106	**SOSIAL**			
1	Tingkat Kemiskinan (Satuan: %)	8,44	8,6	Dinas Sosial
2	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) (Satuan:%)	94,16	100	Dinas Sosial
1203	**KETAHANAN PANGAN**			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	92,3	93,3	Dinas Ketahanan Pangan
2	Penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan pangan)	0	9.998	Dinas Ketahanan Pangan
3	Penanganan daerah rawan pangan/Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Satuan:%)	8,24	53,66	Dinas Ketahanan Pangan
3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**			
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			
1	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	63,74	63,74	Dinas Pendidikan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
2	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)*	22,88	7,85	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	50,53	50,35	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)*	80,58	91,19	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)*	75,98	77,38	Dinas Pendidikan
6	Angka Kelulusan SD (Satuan: %)*	100	99,95	Dinas Pendidikan
7	Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)*	10,67	12,11	Dinas Pendidikan
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)*	98,86	99,43	Dinas Pendidikan
9	Rata-Rata Lama Sekolah (Satuan : Tahun)	6,61	6,6	Dinas Pendidikan
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	85,02	50,53	Dinas Pendidikan
11	Tingkat partisipasiwarga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	97,61	99,57	Dinas Pendidikan
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi	92,76	96,92	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	73,65	81,4	Dinas Kesehatan
4	Indeks Keluarga sehat (Satuan : Poin)	0,265	0,232	Dinas Kesehatan
5	Persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar (Satuan : %)	100	100	Dinas Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	86,14	89,51	Dinas Kesehatan
7	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	68,87	64,46	Dinas Kesehatan
8	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	97,67	41	Dinas Kesehatan
9	Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	100	100	Dinas Kesehatan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
10	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	2,33	60	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	90	94,17	Dinas Kesehatan
12	Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS) dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	0,81	0,95	Dinas Kesehatan
13	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	60	94	Dinas Kesehatan
14	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	100	100	Dinas Kesehatan
15	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,53	0,91	Dinas Kesehatan
16	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Satuan : %)	100	100	Dinas Kesehatan
17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Satuan : %)	78,24	89,7	Dinas Kesehatan
18	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Satuan : %)	78,89	89,5	Dinas Kesehatan
19	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Satuan : %)	83,4	95,02	Dinas Kesehatan
20	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Satuan : %)	96,31	102,1	Dinas Kesehatan
21	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	100	98,11	Dinas Kesehatan
22	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	52,8	68	Dinas Kesehatan
23	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	93,88	91,35	Dinas Kesehatan
24	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	39,21	62	Dinas Kesehatan
25	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	58,42	91	Dinas Kesehatan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
26	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Satuan : %)	93,9	80	Dinas Kesehatan
27	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Satuan : %)	84,61	93,92	Dinas Kesehatan
28	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (Satuan : %)	92,75	94	Dinas Kesehatan
29	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Satuan : %)	0,53	0,88	Dinas Kesehatan
30	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan: %)	70	100	Dinas Kesehatan
31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)	100	78,5	Dinas Kesehatan
32	Persentase tingkat capaian SPM (Satuan : %)	79,37	91,32	Dinas Kesehatan
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	75	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	83,72	82,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	32,83	32,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	71,93	71,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	85,7	85,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase layanan informasi jasa kontruksi (Satuan: %)	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	persentase kesesuaian tata ruang (Satuan: %)	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata (Satuan: %)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	71,93	71,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Satuan: %)	75,24	74,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan	73,69	73,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (Satuan: %)	0	94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (Satuan: %)	75,64	72,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik (Satuan: %)	70,79	68,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	12,49	12,85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	56,25	37,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
3	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	44,04	44,04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4	Persentase kawasan kumuh di perkotaan	1,14	1,14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (Satuan: %)	89,02	86,59	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (Satuan: %)	86,22	85,73	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
7	Persentasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani (Satuan: %)	44,04	44,04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Satuan: %)	87,5	87,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Satuan: %)	12,85	12,85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
10	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Satuan: %)	86,59	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
11	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten (Satuan: %)	87,5	87,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1105	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	75	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	56,25	91,14	Satpol PP dan Damkar
3	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	90,37	89,06	Satpol PP dan Damkar
4	Persentase Penegakan Perda	100	108,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	80	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	55	28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya berkinerja baik	29	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM dan FKUB	75	61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Cakupan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila	92	64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda	87	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan (Satuan: %)	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
12	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (Satuan: %)	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Persentase penanganan pra bencana (Satuan: %)	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Satuan: %)	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1106	**SOSIAL**			
1	Jumlah Taman Makam terpelihara (Satuan: Unit)	1	1	Dinas Sosial
2	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
3	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
4	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
5	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)	20	20	Dinas Sosial
6	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)	32	20	Dinas Sosial
7	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	7	2	Dinas Sosial
8	Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	0	2	Dinas Sosial
9	Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah (Satuan: %)	0	100	Dinas Sosial
10	Persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan (Satuan: %)	50	100	Dinas Sosial

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
11	Persentase Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
12	persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
13	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyitas korban bencana (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota (Satuan: %)	100	100	Dinas Sosial
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (Satuan: %)	96,43	82,41	Dinas Sosial
2	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1201	**TENAGA KERJA**			
1	Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	0	-	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Penyelesaian hubungan industrial (Satuan: %)	100	100	Dinas Tenaga Kerja
3	Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: Rupiah)	0,00	23.908.636,69	Dinas Tenaga Kerja
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan; %)	0	0	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (Satuan: %)	0	0	Dinas Tenaga Kerja
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Satuan: %)	51,55	51,55	Dinas Tenaga Kerja
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (Satuan: %)	68,36	68,36	Dinas Tenaga Kerja

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (Satuan: %)	20	11,21	Dinas Tenaga Kerja
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100	100	DP3AP2KB
2	Persentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	2,18	2,4	DP3AP2KB
3	Persentase penanganan kasus kekerasan anak (Satuan: %)	100	100	DP3AP2KB
4	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak	100	100	DP3AP2KB
5	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	54,63	79,11	DP3AP2KB
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Satuan: %)	47,97	46	DP3AP2KB
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	40	0,004	DP3AP2KB
8	Persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	77,6	100	DP3AP2KB
9	MCPR (Modern contraceptive prevalancy rate)	74,5	67,9	DP3AP2KB
1203	**KETAHANAN PANGAN**			
1	Persentase Pangan Aman (Satuan: %)	97,18	98,6	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani	8,24	53,66	Dinas Ketahanan Pangan
3	Persentase Angka Kecukupan Gizi berdasarkan ketersediaan pangan (Satuan: %)	101	154,9	Dinas Ketahanan Pangan
1204	**PERTANAHAN**			
1	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	66,67	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (Satuan: %)	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
3	Persentase penyelesaian tanah Garapan (Satuan: %)	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4	Persentase penyelesaian redistribusi tanah serta ganti kerugian prpgram tanah kelebihan dan tanah absente (Satuan: %)	100	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Satuan: %)	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi (satuan:%)	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)*	26,03	25,4	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	20	0	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	1,94	12,5	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)*	3,72	3,72	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)*	19,87	17,28	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	213,33	273,33	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Pendidikan,Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat (Satuan: %)	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah (Satuan: %)	100	133,33	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3 (Satuan: %)	10,67	10,67	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (Satuan: %)	45,91	42,68	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase kesesuaian tata ruang (Satuan: %)	0	100	Dinas Lingkungan Hidup
14	persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan (satuan: %)	36,8	21,74	Dinas Lingkungan Hidup

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
15	Presentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui (Satuan: %)	25	40	Dinas Lingkungan Hidup
16	Persentase terkelolanya Keanekaragaman hayati dalam RTH (satuan:%)	9,5	9,5	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup (satuan:%)	81,75	80,59	Dinas Lingkungan Hidup
1206	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	99,11	98,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)*	64,84	99,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)*	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP (Satuan: %)	30,11	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Satuan: %)	84,56	98,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan (Satuan: %)	100	112,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP (Satuan: %)	99,13	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1207	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	100	70	DPMD
2	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	100	20	DPMD
3	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	44	25	DPMD
4	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)	100	100	DPMD
5	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	25	25	DPMD

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
6	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	100	70	DPMD
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0	0	DPMD
8	Persentase Kelembagaan Tingkat Desa yang aktif	64	0	DPMD
9	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah dalam Kondisi Baik	0	0	DPMD
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	63	45	DPMD
11	Persentase peningkatan status desa Mandiri	0	4,31	DPMD
12	Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa (Satuan: %)	0	24	DPMD
13	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik (Satuan: %)	100	24	DPMD
14	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif (Satuan: %)	100	10	DPMD
15	Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik (Satuan: %)	100	24	DPMD
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	75	78,16	DP3AP2KB
2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	60,84	100	DP3AP2KB
3	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	74,5	78,16	DP3AP2KB
4	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	9.365	12.436	DP3AP2KB
5	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	676	124	DP3AP2KB

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100	100	DP3AP2KB
1209	**PERHUBUNGAN**			
1	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	100	100	Dinas Perhubungan
2	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	100	100	Dinas Perhubungan
3	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	100	100	Dinas Perhubungan
4	Persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	100	100	Dinas Perhubungan
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	46,2	45,53	Dinas Perhubungan
1210	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Persentase pengelolaan aplikasi informatika Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Satuan: %)	0	0	Dinas Kominfo
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Satuan: %)	64,81	100	Dinas Kominfo

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Persentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	12,3	9,5	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Persentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	18,82	5,09	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Persentase koperasi berkinerja baik (Satuan: %)	12,16	9,95	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Rasio Kewirausahaan (Satuan: %)	0,045	0,0496	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten (Satuan: %)	7,3	5,89	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Persentase Koperasi Sehat (Satuan: %)	3,54	3,32	Dinas Koperasi dan UMKM
7	Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil (Satuan: %)		0,014	Dinas Koperasi dan UMKM
1214	**STATISTIK**			
1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	Dinas Kominfo
1215	**PERSANDIAN**			
1	Persentase pengamanan informasi Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
2	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kominfo
1216	**KEBUDAYAAN**			
1	Persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	84,62	76,92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)*	45,16	41,94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional (satuan unit)	4	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Presentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	39,47	28,95	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
6	Persentase kesenian tradisional yang mendapat pengakuan nasional (satuan %)	31,58	31,58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum (Satuan: Point)	84,17	83,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Terlestarikannya Cagar Budaya (Satuan: %)	45,16	41,94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Peresentase sejarah yang dipublikasikan (Satuan: %)	40	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1217	**PERPUSTAKAAN**			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	203496	52628	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	113	297	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)	55	53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Satuan: %)	79,43	62,85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Satuan: %)	5,18	50,26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1218	**KEARSIPAN**			
1	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	100	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	60	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	11	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %)	0	85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I	0	650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**			
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan: Indeks)	60,27	61,03	Dinas Lingkungan Hidup
2	Peningkatan lndeks Kualitas Udara (Satuan: Poin)	74,47	75,48	Dinas Lingkungan Hidup
3	Peningkatan lndeks Kualitas Tutupan Lahan (Satuan: Poin)	46,85	47,53	Dinas Lingkungan Hidup
4	Peningkatan lndeks Kualitas Air (Satuan: Poin)	52,81	53,33	Dinas Lingkungan Hidup
1209	**PERHUBUNGAN**			

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	4,9	4,6	Dinas Perhubungan
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas (Satuan: %)	1,83	0,02	Dinas Perhubungan
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			
1	Persentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	68	78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Persentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	85	85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)*	15	13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Persentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	51	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Persentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	33	60	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Persentase Prestasi Keolahragaan Kabupaten Lebak (Satuan: %)	0	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8	Persentase Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda (Satuan: %)	0	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (Satuan: %)	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Satuan: %)	0	18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Satuan: %)	0	0,29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12	Peningkatan prestasi olahraga (Satuan: Medali)	180	18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	7,43	5,15	Dinas Perikanan
2	Produktivitas Sub Sektor Perikanan (Satuan: Rupiah)	26.377.975	25.187.696	Dinas Perikanan
3	persentase ketaatan usaha perikanan (Satuan: %)	100	100	Dinas Perikanan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (ton) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	6.845,17	10.570,82	Dinas Perikanan
2003	**PERTANIAN**			
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	1	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.015	1.277	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Lanjut (Satuan: Kelompok)	1.298	1.225	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Madya (Satuan: Kelompok)	30	33	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Utama (Satuan: Kelompok)	3	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak bencana alam dan Non-alam (Satuan: %)	89,68	53,76	Dinas Pertanian
7	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	1	1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik (Satuan: %)	89,78	87,3	Dinas Pertanian
9	Jumlah peningkatan kelas kelompok (Satuan: Kelompok)	128	68	Dinas Pertanian
10	Persentase Kelompok Ternak yang dibina (Satuan: %)	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	Persentase Usaha Peternakan yang dibina (Satuan: %)	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2004	**PERDAGANGAN**			
1	Persentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	0	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Indeks Tertib Ukur (Satuan: Point)	68	68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestic (Satuan: %)	0	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Satuan: %)	0	5,6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa (Satuan: %)	0	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (Satuan: %)	0	92	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
7	Persentase perusahaan berizin (Satuan: %)	0	94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007	**PERINDUSTRIAN**			
1	Produktivitas Sektor Industri	0	59,6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	0	75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase Evaluasi Rencana Pengembangan Industri (Satuan: %)	90	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Perusahaan Berijin (Satuan: %)	99	99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Satuan: %)	0	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Pertumbuhan Industri	0	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2008	**TRANSMIGRASI**			
1	Persentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	0	80	Dinas Tenaga Kerja
4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**			
3001	**PERENCANAAN**			
1	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100	76	Bapelitbangda
2	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100	100	Bapelitbangda
3	Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah (Satuan: %)	0	0	Sekretariat Daerah
4	Persentase Capaian Kinerja RKPD (Satuan: %)	100	100	Bapelitbangda
5	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD (Satuan: %)	100	100	Bapelitbangda
3002	**KEUANGAN**			
1	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	-15,78	-0,15	Badan Pendapatan Daerah
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Satuan: %)	0,908		BKAD
3	Rasio Kemandirian Daerah	0	25,97	BKAD
4	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)*	66,41	66,41	Badan Pendapatan Daerah

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
5	OPINI BPK (Satuan: Predikat)	WTP	WTP	BKAD
6	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	86	86	BKAD
7	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	100	94,5	BKAD
8	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	100	100	BKAD
9	Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	45	45	BKAD
10	jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	0	1	BKAD
11	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public (Satuan: %)	0	100	BKAD
12	Kesesuaian Nilai Neraca aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Satuan: %)	100	100	BKAD
3003	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)*	85,82	73,9	BKPSDM
2	Persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)*	88,98	89,83	BKPSDM
3	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	17,57	1,56	BKPSDM
3004	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100	100	Bapelitbangda
3005	**PENGAWASAN**			

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
1	Persentase Audit, Reviu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	100	100	Inspektorat
2	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	100	100	Inspektorat
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Satuan: Predikat)	82,8	82,8	Inspektorat
	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	65	95	Inspektorat
5	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan (Satuan: %)	95	82,8	Inspektorat
6	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan (Satuan: %)	100	100	Inspektorat
7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Inspektorat
8	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Inspektorat
9	Sistem Merit		265,5	Inspektorat
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**			
1	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)*	9	9	Sekretariat Daerah
2	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	3	7	Sekretariat Daerah
3	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)*	82,82	86	Sekretariat DPRD
4	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100	100	Sekretariat Daerah
5	cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100	100	Sekretariat Daerah
6	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100	100	Sekretariat Daerah
7	Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	100	100	Sekretariat DPRD

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
8	Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati (Satuan: %)	100	100	Kecamatan
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (Satuan: %)	100	100	Kecamatan
3007	**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**			
1	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran (Satuan: %)	100	100	Seluruh OPD
2	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100	100	Seluruh OPD
3	IKM (Satuan: Nilai Interval Konversi IKM)	83,9	86,29	Seluruh OPD
4	Presentase kecamatan yang tanggap bencana (Satuan: %)	100	100	Seluruh OPD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (Satuan: Point)	63	79,96	Seluruh OPD
6	Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (Satuan: %)	80,17	100	Seluruh OPD
3	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
1106	**SOSIAL**			
1	LPE (Satuan: %)	5,53	5	Dinas Sosial
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	4.014,44	3.900,29	Dinas Perikanan
2	Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.837,89	6.670,53	Dinas Perikanan
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%)	2,93	1,02	Dinas Perikanan
4	persentase peningkatan produksi ikan tangkap (%)	2,51	2,25	Dinas Perikanan
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Satuan: %)	100	100	Dinas Perikanan
2002	**PARIWISATA**			
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	121	868	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	43,44	83,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
3	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	78,26	78,26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	1.097.814	1.012.230	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	10	19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	76,47	76,47	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Persentase Pertumbuhan Jasa Usaha Pariwisata	112,22	627,65	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	32,14	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,14	1,7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum	84,17	83,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Tingkat hunian akomodasi	30,92	32,58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Satuan: %)	4,8	4,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6,43	85,69	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	28,55	35,73	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,35	0,13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2003	**PERTANIAN**			
1	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	19.896	15.281	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Jumlah Produksi Padi (Satuan: ton)	674.369	611.305	Dinas Pertanian
3	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	2	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Jumlah Produksi Pertanian (Satuan: ton)	1.168.454,00	963.424,39	Dinas Pertanian
5	Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	0	1	Dinas Pertanian
6	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin (Satuan: %)	46,45	38,67	Dinas Pertanian
7	Palawija (Satuan: ton)	29.702,00	24.148,50	Dinas Pertanian
8	Hortikultura (Satuan: ton)	370.105,00	261.851,01	Dinas Pertanian
9	Perkebunan (Satuan: ton)	94278	66.118.88	Dinas Pertanian
10	Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai SNI (Satuan: %)	0	2	Dinas Pertanian

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
11	Nilai tukar petani	0	97,96	Dinas Pertanian
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Satuan : %)	0	40,63	Dinas Pertanian
13	Produktivitas total daerah Satuan: Ribu Rupiah)	0,00	46.769,00	Dinas Pertanian
14	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	0	130	Dinas Pertanian
15	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Satuan: Rupiah)	0,00	23.965.773,18	Dinas Pertanian
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**			
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	100	100	Dinas PUPR
2	Persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	100	100	Dinas PUPR
3	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	100	100	Dinas PUPR
4	Indeks infrastruktur publik (Satuan: %)	73,1	72,09	Dinas PUPR
5	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	57,26	0	Dinas PUPR
6	Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	100	0	Dinas PUPR
7	Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	100	100	Dinas PUPR
8	Persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	49,19	25,34	Dinas PUPR
9	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Satuan:%)	80,29	80,72	Dinas PUPR
10	Persentase pengelolaan sistem drainase (Satuan; %)	70,79	68,66	Dinas PUPR
11	Persentase ketersediaan air untuk irigasi (Satuan: % }	70,56	71,86	Dinas PUPR
12	Persentase penataan bangunan dan lingkungan (Satuan: %)	6,45	3,3	Dinas PUPR
13	persentase jalan dalam kondisi mantap (Satuan: %)	75,64	72,32	Dinas PUPR
2004	**PERDAGANGAN**			
1	Produktivitas Sektor Perdagangan (Satuan: Juta Rupiah)	0	43,42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	0	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2024	2023	
1	2	4	3	5
3	Persentase / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Satuan: %)	0	2,14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase / Jumlah alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Satuan: %)	0,00	4.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**			
1212	**PENANAMAN MODAL**			
1	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	70	61	Dinas Penanaman Modal
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Trilyun Rupiah)	1,9	1,66	Dinas Penanaman Modal
3	Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN (Satuan: Trilyun Rupiah)	2,24	3,19	Dinas Penanaman Modal
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (Satuan: Point)	83,92	83,75	Dinas Penanaman Modal
5	Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100	100	Dinas Penanaman Modal
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Satuan: %)	7,69	7,18	Dinas Penanaman Modal

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian efektivitas dan efisiensi program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan struktur APBD dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	195.100.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	189.751.388.663,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.637.561.840,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.421.262.547,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**466.910.213.050,00**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.898.825.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.234.411.825,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.397.133.236.825,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.887.692.014.875,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204,00
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.271.531.700.135,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**287.748.466.226,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**489.235.251.539,00**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.068.588.901.703,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(180.896.886.828,00)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN DAERAH**	
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.585.386.828,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**185.585.386.828,00**
6.2	**PENGELUARAN DAERAH**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.688.500.000,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.688.500.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**180.896.886.828,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 08 Maret Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pergeseran Tahun Anggaran 2024 untuk menyesuaikan dengan terbitnya beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.
5. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, sehingga Struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun 2024 setelah mengalami pergeseran dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Pergeseran Kesatu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	195.100.000.000,00	195.100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	189.751.388.663,00	189.751.388.663,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.637.561.840,00	6.637.561.840,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.421.262.547,00	75.421.262.547,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**466.910.213.050,00**	**466.910.213.050,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.898.825.000,00	2.211.898.825.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.234.411.825,00	185.234.411.825,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.397.133.236.825,00**	**2.397.133.236.825,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	23.648.565.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**	**23.648.565.000,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.887.692.014.875,00**	**2.887.692.014.875,00**	**0,00**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091,00	1.342.639.183.091,00	(2.860.000,00)	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204,00	713.650.559.904,00	52.322.700,00	0,01
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840,00	201.661.411.840,00	192.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000,00	13.630.200.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.271.531.700.135,00**	**2.271.581.354.835,00**	**49.654.700,00**	**0,01**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000,00	582.700.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980,00	81.159.857.980,00	(36.750.000,00)	(0,05)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422,00	133.279.108.722,00	(6.904.700,00)	(0,01)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324,00	63.495.947.324,00	0,00	0,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Pergeseran Kesatu)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500,00	9.181.197.500,00	(6.000.000,00)	(0,07)
	JUMLAH BELANJA MODAL	**287.748.466.226,00**	**287.698.811.526,00**	**(49.654.700,00)**	**(0,13)**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	20.073.483.803,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**	**20.073.483.803,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339,00	21.923.622.339,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00	467.311.629.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**489.235.251.539,00**	**489.235.251.539,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.068.588.901.703,00**	**3.068.588.901.703,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(180.896.886.828,00)**	**(180.896.886.828,00)**	**0,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.585.386.828,00	138.585.386.828,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**185.585.386.828,00**	**185.585.386.828,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.688.500.000,00**	**4.688.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**180.896.886.828,00**	**180.896.886.828,00**	**0,00**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pergeseran Kedua Tahun Anggaran 2024 untuk

menyesuaikan dengan terbitnya beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung.

Setelah pergeseran kedua struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Pergeseran Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	195.100.000.000,00	195.100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	189.751.388.663,00	258.122.651.210,00	68.371.262.547,00	36,03
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.637.561.840,00	6.637.561.840,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.421.262.547,00	7.050.000.000,00	(68.371.262.547,00)	(90,65)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**466.910.213.050,00**	**466.910.213.050,00**	**0,00**	**(54,62)**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.898.825.000,00	2.211.898.825.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.234.411.825,00	205.234.411.825,00	20.000.000.000,00	10,80
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.397.133.236.825,00**	**2.417.133.236.825,00**	**20.000.000.000,00**	**10,80**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Pergeseran Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	23.648.565.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**	**23.648.565.000,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.887.692.014.875,00**	**2.907.692.014.875,00**	**20.000.000.000,00**	**(43,82)**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091,00	1.342.711.673.091,00	69.630.000,00	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204,00	726.283.907.985,00	12.685.670.781,00	1,78
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840,00	213.806.540.840,00	12.145.321.000,00	6,02
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000,00	13.630.200.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.271.531.700.135,00**	**2.296.432.321.916,00**	**24.900.621.781,00**	**7,81**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000,00	241.327.000,00	(341.373.000,00)	(58,58)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980,00	58.583.838.410,00	(22.612.769.570,00)	(27,85)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422,00	141.720.298.722,00	8.434.285.300,00	6,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324,00	72.721.352.324,00	9.225.405.000,00	14,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500,00	7.756.027.989,00	(1.431.169.511,00)	(15,58)
	JUMLAH BELANJA MODAL	**287.748.466.226,00**	**281.022.844.445,00**	**(6.725.621.781,00)**	**(2,34)**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	20.073.483.803,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**	**20.073.483.803,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339,00	21.923.622.339,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00	467.311.629.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**489.235.251.539,00**	**489.235.251.539,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.068.588.901.703,00**	**3.086.763.901.703,00**	**18.175.000.000,00**	**0,59**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(180.896.886.828,00)**	**(179.071.886.828,00)**	**1.825.000.000,00**	**(1,01)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Pergeseran Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERGESERAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.585.386.828,00	138.585.386.828,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**185.585.386.828,00**	**185.585.386.828,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.688.500.000,00	6.513.500.000,00	1.825.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.688.500.000,00**	**6.513.500.000,00**	**1.825.000.000,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**180.896.886.828,00**	**179.071.886.828,00**	**(1.825.000.000,00)**	**(1,01)**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor Lebak Nomor 37 Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan terbitnya beberapa peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 Atas Hasil Audit BPK-RI Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

3. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 Tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Lebak Telah Melakukan Penyesuaian Pendapatan Yang Berasal Dari Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Pusat Dalam Bentuk *Treasury Deposit Facility* Yang Merupakan Fasilitas Yang Disediakan Oleh Bendahara Umum Negara Bagi Pemda, Berupa Penyimpanan Dana *Overnight* Pada Rekening Bank Indonesia.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	195.100.000.000,00	197.100.000.000,00	2.000.000.000,00	1,03
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	189.751.388.663,00	258.211.176.332,00	68.459.787.669,00	36,08
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.637.561.840,00	6.255.719.809,00	(381.842.031,00)	(5,75)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.421.262.547,00	12.535.612.055,00	(62.885.650.492,00)	(83,38)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**466.910.213.050,00**	**474.102.508.196,00**	**7.192.295.146,00**	**1,54**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.898.825.000,00	2.249.167.332.007,00	37.268.507.007,00	1,68
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.234.411.825,00	207.151.518.591,00	21.917.106.766,00	11,83
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.397.133.236.825,00**	**2.456.318.850.598,00**	**59.185.613.773,00**	**2,47**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	23.648.565.000,00	0,00	0,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**	**23.648.565.000,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.887.692.014.875,00**	**2.954.069.923.794,00**	**66.377.908.919,00**	**2,30**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091,00	1.323.217.198.939,00	(19.424.844.152,00)	(1,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204,00	735.691.843.442,00	22.093.606.238,00	3,10
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840,00	205.948.869.821,00	4.287.649.981,00	2,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000,00	8.086.800.000,00	(5.543.400.000,00)	(40,67)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.271.531.700.135,00**	**2.272.944.712.202,00**	**1.413.012.067,00**	**0,06**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000,00	241.327.000,00	(341.373.000,00)	(58,58)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980,00	57.797.475.919,00	(23.399.132.061,00)	(28,82)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422,00	135.258.706.446,00	1.972.693.024,00	1,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324,00	75.612.246.532,00	12.116.299.208,00	19,08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500,00	7.756.477.989,00	(1.430.719.511,00)	(15,57)
	JUMLAH BELANJA MODAL	**287.748.466.226,00**	**276.666.233.886,00**	**(11.082.232.340,00)**	**(3,85)**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	20.073.483.803,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**	**20.073.483.803,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339,00	21.958.131.975,00	34.509.636,00	0,16
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00	481.039.815.950,00	13.728.186.750,00	2,94
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**489.235.251.539,00**	**502.997.947.925,00**	**13.762.696.386,00**	**2,81**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.068.588.901.703,00**	**3.072.682.377.816,00**	**4.093.476.113,00**	**0,13**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(180.896.886.828,00)**	**(118.612.454.022,00)**	**62.284.432.806,00**	**(34,43)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.585.386.828,00	74.300.954.022,00	(64.284.432.806,00)	(46,39)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	0,00

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**185.585.386.828,00**	**121.300.954.022,00**	**(64.284.432.806,00)**	**(34,64)**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.688.500.000,00	2.688.500.000,00	(2.000.000.000,00)	(42,66)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.688.500.000,00**	**2.688.500.000,00**	**(2.000.000.000,00)**	(42,66)
	PEMBIAYAAN NETTO	**180.896.886.828,00**	**118.612.454.022,00**	**(62.284.432.806,00)**	**(34,43)**
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 Tanggal 25 November 2024 Tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024. Dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak mengalami perubahan, sehingga struktur APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	195.100.000.000,00	197.100.000.000,00	2.000.000.000,00	1,03
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	189.751.388.663,00	258.211.176.332,00	68.459.787.669,00	36,08

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.637.561.840,00	6.255.719.809,00	(381.842.031,00)	(5,75)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.421.262.547,00	12.535.612.055,00	(62.885.650.492,00)	(83,38)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**466.910.213.050,00**	**474.102.508.196,00**	**7.192.295.146,00**	**1,54**
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.211.898.825.000,00	2.273.004.698.494,00	61.105.873.494,00	2,76
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.234.411.825,00	207.151.518.591,00	21.917.106.766,00	11,83
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.397.133.236.825,00**	**2.480.156.217.085,00**	**83.022.980.260,00**	**3,46**
4,3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	23.648.565.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**	**23.648.565.000,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.887.692.014.875,00**	**2.977.907.290.281,00**	**90.215.275.406,00**	**3,12**
5	**BELANJA DAERAH**				
5,1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.342.642.043.091,00	1.347.054.565.426,00	4.412.522.335,00	0,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	713.598.237.204,00	735.691.843.442,00	22.093.606.238,00	3,10
5.1.05	Belanja Hibah	201.661.219.840,00	205.948.869.821,00	4.287.649.981,00	2,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.630.200.000,00	8.086.800.000,00	(5.543.400.000,00)	(40,67)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.271.531.700.135,00**	**2.296.782.078.689,00**	**25.250.378.554,00**	**1,11**
5,2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	582.700.000,00	241.327.000,00	(341.373.000,00)	(58,58)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.196.607.980,00	57.797.475.919,00	(23.399.132.061,00)	(28,82)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.286.013.422,00	135.258.706.446,00	1.972.693.024,00	1,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.495.947.324,00	75.612.246.532,00	12.116.299.208,00	19,08
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.187.197.500,00	7.756.477.989,00	(1.430.719.511,00)	(15,57)
	JUMLAH BELANJA MODAL	**287.748.466.226,00**	**276.666.233.886,00**	**(11.082.232.340,00)**	**(3,85)**
5,3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	20.073.483.803,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**	**20.073.483.803,00**	**0,00**	**0,00**
5,4	**BELANJA TRANSFER**				

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024
(Perubahan Kedua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.923.622.339,00	21.958.131.975,00	34.509.636,00	0,16
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	467.311.629.200,00	481.039.815.950,00	13.728.186.750,00	2,94
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**489.235.251.539,00**	**502.997.947.925,00**	**13.762.696.386,00**	**2,81**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.068.588.901.703,00**	**3.096.519.744.303,00**	**27.930.842.600,00**	**0,91**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(180.896.886.828,00)**	**(118.612.454.022,00)**	**62.284.432.806,00**	**(34,43)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	138.585.386.828,00	74.300.954.022,00	(64.284.432.806,00)	(46,39)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**185.585.386.828,00**	**121.300.954.022,00**	**(64.284.432.806,00)**	**(34,64)**
6,2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.688.500.000,00	2.688.500.000,00	(2.000.000.000,00)	(42,66)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.688.500.000,00**	**2.688.500.000,00**	**(2.000.000.000,00)**	(42,66)
	PEMBIAYAAN NETTO	**180.896.886.828,00**	**118.612.454.022,00**	**(62.284.432.806,00)**	**(34,43)**
6,3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2024 Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran Belanja *Mandatory Spending* yaitu Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan Belanja daerah di

luar gaji (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Daerah wajib mengalokasikan Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD di luar Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 147;
5. Daerah wajib mengalokasikan Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah paling tinggi 30% dari total Belanja APBD sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 146 Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Rincian anggaran Belanja *Mandatory Spending* dapat dilihat pada Tabel 3. 6 berikut:

Tabel 3.6
ANGGARAN BELANJA *MANDATORY SPENDING*
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	% *MANDATORY SPENDING*	ANGGARAN *MANDATORY SPENDING* TAHUN 2024 (Rp)	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	20%	1.225.591.250.536,00	39,89
2	KESEHATAN	10%	526.335.359.400,00	17,13
3	APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH	0,50%	20.642.495.089,00	0,67
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	0,16%	9.119.256.560,00	0,30
5	INFRASTRUKTUR	40%	520.333.267.733,00	20,25

Alokasi anggaran Belanja *Mandatory Spending* infrastruktur tidak memenuhi 40% dari total Belanja APBD di luar Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada

daerah atau desa sesuai dengan amanat dikarenakan Belanja daerah Tahun 2024 telah digunakan untuk pemenuhan Belanja wajib-mengikat yang tidak menjadi perhitungan Belanja infrastruktur, pengawasan dan Belanja pengembangan SDM Aparatur.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani antara lain:

1. Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat diantaranya adalah:
    a. Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
    c. Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rincian anggaran Belanja Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
ANGGARAN BELANJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN PASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan			
1.	Pendidikan Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	340.900.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	38.480.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.540.650.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.745.927.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.446.464.400,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.500.000.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.927.700.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	128.786.050.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	62.922.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.846.645.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	150.000.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	186.300.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	30.000.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	262.388.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	53.335.450.000,00
		Total	269.156.396.400,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.501.440.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	500.000.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
ANGGARAN BELANJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN PASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	404.407.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	18.912.500.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00
		Total	22.518.347.000,00
3.	Pendidikan Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000,00
		Total	10.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			**291.684.743.400,00**
B. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.470.501.800,00
		Total	1.470.501.800,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	250.000.000,00
		Total	250.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00
		Total	0,00
4.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000,00
		Total	100.000.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	720.574.000,00
		Total	720.574.000,00
6.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000,00
		Total	100.000.000,00
7.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.605.082.400,00
		Total	1.605.082.400,00
8.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	765.115.000,00
		Total	765.115.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
ANGGARAN BELANJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN PASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
9.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.087.145.395,00
		Total	1.087.145.395,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	847.841.400,00
		Total	847.841.400,00
11.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.071.187.561,00
		Total	1.071.187.561,00
12.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	99.445.000,00
		Total	99.445.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			**8.116.892.556,00**
C. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	83.058.250,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	522.136.000,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.189.763.750,00
		Total	15.794.958.000,00
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	253.522.250,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	9.453.674.750,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	66.510.000,00
		Total	9.773.707.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**25.568.665.000,00**
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	87.939.000,00
		Total	87.939.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**87.939.000,00**
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	58.975.000,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	187.960.200,00

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
ANGGARAN BELANJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN PASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
		Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
		Total	246.935.200,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	115.088.000,00
		Total	115.088.000,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	104.754.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	37.993.200,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	69.355.050,00
		Total	212.102.250,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.240.796.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79.600.000,00
		Total	1.320.396.000,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.542.000,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.090.100,00
		Total	231.632.100,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**2.126.153.550,00**
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.230.000,00
		Penyediaan Permakanan	171.420.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	18.000.000,00
		Total	211.650.000,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	18.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	171.420.000,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	22.230.000,00
		Total	211.650.000,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.230.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	18.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	171.420.000,00
		Total	211.650.000,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Layanan Kedaruratan	22.230.000,00
		Penyediaan Permakanan	171.420.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	18.000.000,00
		Total	211.650.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
ANGGARAN BELANJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PELAYANAN PASAR	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	286.005.900,00
		Total	286.005.900,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			**1.132.605.900,00**

Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
   a. Pengurangan belanja pengeluaran masyarakat;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
2. Penurunan stunting antara lain:
   a. Kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita;
   b. Kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting;
   c. Kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan.

   Dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
3. Pengendalian inflasi antara lain:
   a. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis;
   b. Pengendalian laju alih fungsi lahan;
   c. Pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;
   d. Penguatan tata kelola logistik daerah;
   e. Pengawasan harga dan operasi pasar.

4. Peningkatan investasi antara lain:
   a. Kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan system Online Single Submission (OSS).
   b. Mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
5. Penguatan kualitas sumber daya manusia;
6. Pembangunan infrastruktur; dan
7. Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

Anggaran Belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
ANGGARAN BELANJA PENURUNAN STUNTING, PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM, PENGENDALIAN INFLASI DAN PENINGKATAN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2024(Rp)	
			JUMLAH	%
1	2	3	4	5
1	PENURUNAN STUNTING	3.096.519.744.303,00	187.309.028.541,00	6,05
2	PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM	3.096.519.744.303,00	427.637.553.713,00	13,81
3	PENGENDALIAN INFLASI	3.096.519.744.303,00	10.998.337.900,00	0,36
4	PENINGKATAN INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA	3.096.519.744.303,00	3.053.636.200,00	0,1

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.977.907.290.281,00 terealisasi sebesar Rp2.924.700.667.833,92 atau 98,21% dan Belanja Daerah dan transfer dianggarkan sebesar Rp3.096.519.744.303,00 terealisasi sebesar Rp2.997.766.952.106,00 atau 96,81%. Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp118.612.454.022,00 terealisasi sebesar Rp118.633.591.364,00 atau 100,02%.

Secara struktur APBD, realisasi APBD Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
ANGGARAN DAN REALISASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	197.100.000.000,00	146.344.492.995,00	(50.755.507.005,00)	74,25
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	258.211.176.332,00	250.029.943.895,00	(8.181.241.437,00)	96,83
04.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.255.719.809,00	6.012.475.617,00	(243.244.192,00)	96,11
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.535.612.055,00	14.895.080.655,92	2.359.468.600,92	118,82
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**474.102.508.196,00**	**417.281.984.162,92**	**(56.820.524.033,08)**	**88,02**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.273.004.698.494,00	2.273.013.906.176,00	9.207.682,00	100,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	207.151.518.591,00	209.535.871.640,00	2.384.353.049,00	101,15
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.480.156.217.085,00**	**2.482.549.777.816,00**	**2.393.560.731,00**	**100,10**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
04.03.01	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	24.760.061.697,00	1.111.496.697,00	104,70
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	108.844.158,00	108.844.158,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.648.565.000,00**	**24.868.905.855,00**	**1.220.340.855,00**	**105,16**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.977.907.290.281,00**	**2.924.700.667.833,92**	**(53.206.622.447,08)**	**98,21**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
05.01.01	Belanja Pegawai	1.347.054.565.426,00	1.309.315.335.469,00	37.739.229.957,00	96,19
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	735.691.843.442,00	691.816.666.032,00	43.875.177.410,00	97,20
05.01.05	Belanja Hibah	205.948.869.821,00	200.056.338.853,00	5.892.530.968,00	94,04
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	8.086.800.000,00	8.067.000.000,00	19.800.000,00	97,14

ANGGARAN DAN REALISASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.296.782.078.689,00**	**2.209.255.340.354,00**	**87.526.738.335,00**	**96,19**
5.2	**BELANJA MODAL**				
05.02.01	Belanja Modal Tanah	241.327.000,00	223.607.000,00	17.720.000,00	92,66
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.797.475.919,00	54.290.255.942,00	3.507.219.977,00	93,93
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.258.706.446,00	130.234.495.550,00	5.024.210.896,00	96,29
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.612.246.532,00	72.723.089.637,00	2.889.156.895,00	96,18
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.756.477.989,00	9.683.356.973,00	(1.926.878.984,00)	124,84
	JUMLAH BELANJA MODAL	**276.666.233.886,00**	**267.154.805.102,00**	**9.511.428.784,00**	**96,56**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	18.659.748.315,00	1.413.735.488,00	92,96
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.073.483.803,00**	**18.659.748.315,00**	**1.413.735.488,00**	**92,96**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	21.958.131.975,00	21.919.382.330,00	38.749.645,00	99,82
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	481.039.815.950,00	480.777.676.005,00	262.139.945,00	99,95
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**502.997.947.925,00**	**502.697.058.335,00**	**300.889.590,00**	**99,94**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.096.519.744.303,00**	**2.997.766.952.106,00**	**98.752.792.197,00**	**96,81**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(118.612.454.022,00)**	**(73.066.284.272,08)**	**(45.546.169.749,92)**	**61,60**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
06.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	74.300.954.022,00	74.322.091.364,00	21.137.342,00	100,03
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**121.300.954.022,00**	**121.322.091.364,00**	**21.137.342,00**	**100,02**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.688.500.000,00	2.688.500.000,00	0,00	100,00

ANGGARAN DAN REALISASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

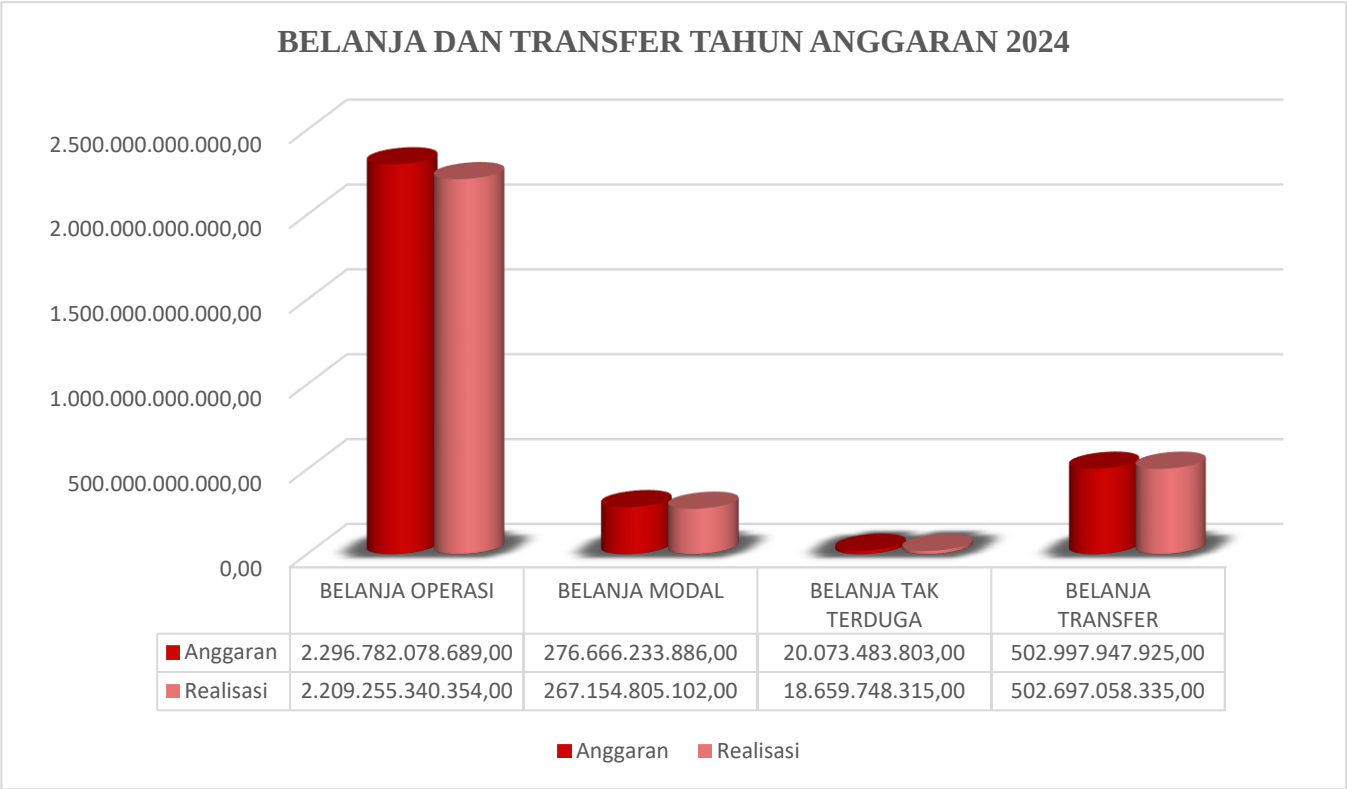
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.688.500.000,00	2.688.500.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	118.612.454.022,00	118.633.591.364,00	(21.137.342,00)	100,02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	0,00	45.567.307.091,92	(45.567.307.091,92)	-

Dalam grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.1



Grafik 3.2



Realisasi pendapatan dan Belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk setiap Perangkat Daerah dapat dilihat padaTabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	1.235.694.613.949,00	1.208.735.693.508,00
2	Dinas Kesehatan	1.763.296.830,00	1.394.023.192,00	208.149.662.117,00	208.260.729.158,00
	Rsud Dr. Adjidarmo	154.000.000.000,00	154.239.759.600,00	195.237.670.369,00	186.540.274.075,00
	Puskesmas Banjarsari	2.452.511.500,00	2.393.627.792,00	3.426.681.377,00	3.015.936.750,00
	Puskesmas Baros	1.171.618.582,00	1.212.801.012,00	2.118.007.634,00	1.968.379.196,00
	Puskesmas Bayah	3.481.332.500,00	3.421.051.619,00	4.396.616.199,00	3.981.293.209,00
	Puskesmas Binuangeun	2.501.851.402,00	2.295.316.747,00	3.422.430.087,00	2.976.847.231,00
	Puskesmas Bojongjuruh	1.202.929.000,00	1.171.138.059,00	2.375.202.030,00	1.741.144.664,00
	Puskesmas Bojongmanik	1.707.705.800,00	1.792.310.126,00	2.605.880.607,00	2.390.464.975,00
	Puskesmas Cibadak	1.649.259.563,00	1.621.516.156,00	2.881.811.622,00	2.359.380.839,00
	Puskesmas Cibeber	1.832.984.260,00	1.844.533.609,00	2.837.044.301,00	2.474.065.595,00
	Puskesmas Cigemblong	1.935.105.453,00	1.083.941.077,00	2.709.794.777,00	1.601.422.566,00
	Puskesmas Cihara	1.995.408.980,00	1.967.554.680,00	3.013.798.411,00	2.737.485.958,00

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Puskesmas Cijaku	2.355.125.500,00	2.088.159.049,00	3.313.786.319,00	2.769.713.250,00
	Puskesmas Cikulur	2.287.300.600,00	2.108.718.909,00	3.410.223.843,00	2.819.346.861,00
	Puskesmas Cileles	1.463.779.191,00	1.336.598.406,00	2.292.186.000,00	1.917.525.394,00
	Puskesmas Cilograng	2.160.268.736,00	1.987.004.200,00	3.120.225.985,00	2.723.856.599,00
	Puskesmas Cimarga	2.235.885.011,00	2.154.685.065,00	3.229.685.966,00	2.939.155.415,00
	Puskesmas Cipanas	4.088.601.011,00	4.023.553.636,00	5.276.037.743,00	4.994.684.354,00
	Puskesmas Cipendeuy	1.431.575.000,00	1.199.952.019,00	2.269.557.438,00	1.873.768.536,00
	Puskesmas Cirinten	1.838.484.750,00	1.879.554.905,00	3.121.689.515,00	2.530.503.698,00
	Puskesmas Cisimeut	1.294.576.247,00	1.123.112.137,00	2.366.028.851,00	1.968.689.989,00
	Puskesmas Cisungsang	947.953.947,00	997.790.795,00	2.042.735.861,00	1.590.348.501,00
	Puskesmas Citorek	1.099.777.700,00	904.132.712,00	2.063.208.175,00	1.758.888.924,00
	Puskesmas Curugbitung	2.763.941.000,00	2.776.982.515,00	3.786.361.701,00	3.621.286.217,00
	Puskesmas Gunungkencana	1.838.482.500,00	1.715.292.945,00	3.237.624.317,00	2.821.809.677,00
	Puskesmas Kalanganyar	1.736.157.157,00	1.464.894.256,00	2.782.701.311,00	2.347.559.589,00
	Puskesmas Kolelet	733.455.920,00	792.744.765,00	1.479.253.845,00	1.395.674.203,00
	Puskesmas Lebakgedong	1.091.648.413,00	925.627.618,00	1.957.495.775,00	1.510.030.400,00
	Puskesmas Leuwidamar	1.489.767.810,00	1.506.111.715,00	2.434.560.264,00	2.304.815.662,00
	Puskesmas Maja	3.760.019.258,00	3.689.177.177,00	4.884.498.503,00	4.590.889.894,00
	Puskesmas Malingping	3.572.500.000,00	2.772.950.671,00	4.835.523.760,00	3.654.513.489,00
	Puskesmas Mandala	1.225.512.000,00	1.366.848.909,00	2.174.306.460,00	2.002.881.945,00
	Puskesmas Mekarsari	1.118.305.000,00	1.201.675.160,00	1.958.966.138,00	1.848.584.671,00
	Puskesmas Muncang	1.984.895.600,00	1.894.898.756,00	3.014.398.226,00	2.734.216.381,00
	Puskesmas Pajagan	1.210.165.000,00	1.255.838.810,00	2.597.446.558,00	2.207.308.230,00
	Puskesmas Pamandegan	1.640.197.344,00	1.682.631.909,00	2.507.048.037,00	2.408.174.072,00
	Puskesmas Panggarangan	2.458.131.512,00	2.180.812.580,00	3.947.907.204,00	3.287.545.046,00
	Puskesmas Parungsari	1.190.000.000,00	1.072.707.533,00	2.000.235.709,00	1.744.173.071,00
	Puskesmas Prabugantungan	1.456.887.500,00	1.522.123.443,00	2.257.506.917,00	2.059.246.051,00
	Puskesmas Rangkasbitung	3.035.899.422,00	2.851.329.310,00	3.994.109.649,00	3.628.426.694,00
	Puskesmas Sajira	1.765.563.635,00	1.743.809.460,00	2.769.756.092,00	2.585.215.694,00
	Puskesmas Sarageni	931.785.885,00	880.879.447,00	1.797.899.642,00	1.589.129.029,00
	Puskesmas Sobang	1.417.637.400,00	1.447.286.469,00	2.495.783.183,00	2.360.701.864,00
	Puskesmas Warunggunung	2.792.022.663,00	2.532.330.240,00	3.742.010.882,00	3.278.222.469,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.732.746.187,00	3.943.299.471,00	182.803.103.947,00	170.845.242.933,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	125.594.406,00	134.512.655,00	9.389.663.159,00	9.151.500.228,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	9.548.155.097,00	9.364.516.047,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	5.456.675.759,00	4.994.013.427,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	11.692.569.714,00	11.383.565.711,00

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Dinas Tenaga Kerja	570.000.000,00	908.542.800,00	5.057.717.431,00	4.584.996.715,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	25.934.397.026,00	24.890.401.804,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	3.602.691.022,00	3.366.760.012,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.068.820.000,00	1.269.800.200,00	21.505.791.941,00	20.701.888.395,00
12	Dinas Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil	0,00	0,00	8.348.144.010,00	8.072.754.807,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	3.602.691.022,00	3.366.760.012,00
14	Dinas Perhubungan	1.589.922.850,00	1.133.646.494,00	25.219.443.295,00	23.918.855.848,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00	8.938.536.199,00	8.613.460.728,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	6.365.862.401,00	6.030.399.467,00
17	Dinas Penanaman Modal	0,00	0,00	7.355.647.798,00	6.695.234.541,00
18	Dinas Kepemudaan Olahraga	210.580.000,00	232.109.000,00	10.291.605.474,00	9.772.789.418,00
19	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	537.770.660,00	594.382.993,00	21.479.502.487,00	20.702.775.398,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	4.900.171.284,00	4.688.415.530,00
21	Dinas Perikanan	1.794.550.000,00	1.809.426.283,00	9.989.552.892,00	9.157.848.710,00
22	Dinas Pertanian	272.850.000,00	279.431.300,00	61.046.682.057,00	59.980.726.864,00
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	159.295.000,00	181.420.000,00	10.615.289.069,00	10.283.802.431,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.060.597.250,00	8.187.099.456,00	19.632.563.548,00	18.284.377.297,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	57.724.877.323,00	52.396.819.387,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	77.103.256.109,00	74.508.163.614,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	11.093.148.996,00	10.591.605.079,00
28	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.522.181.077.737,00	2.527.398.341.538,92	539.033.661.637,00	535.060.947.709,00
29	Badan Pendapatan Daerah	197.493.179.609,00	147.110.866.453,00	15.640.105.937,00	12.537.764.420,00
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	9.119.256.560,00	7.492.328.790,00
31	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	20.642.495.089,00	18.086.021.914,00
32	Kecamatan Banjarsari	0,00	0,00	2.674.954.792,00	2.651.362.755,00
33	Kecamatan Bayah	0,00	0,00	2.453.900.575,00	2.341.092.739,00

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
34	Kecamatan Bojongmanik	0,00	0,00	2.384.954.480,00	2.298.474.391,00
35	Kecamatan Cibadak	0,00	0,00	2.593.493.768,00	2.545.241.482,00
36	Kecamatan Cibeber	0,00	0,00	2.608.159.075,00	2.565.698.740,00
37	Kecamatan Cigemblong	0,00	0,00	2.133.875.502,00	2.065.120.804,00
38	Kecamatan Cihara	0,00	0,00	2.509.196.542,00	2.466.892.631,00
39	Kecamatan Cijaku	0,00	0,00	2.418.633.587,00	2.396.221.187,00
40	Kecamatan Cikulur	0,00	0,00	2.658.352.158,00	2.446.902.161,00
41	Kecamatan Cileles	0,00	0,00	2.472.842.848,00	2.244.907.806,00
42	Kecamatan Cilograng	0,00	0,00	2.037.796.823,00	1.976.847.490,00
43	Kecamatan Cimarga	0,00	0,00	2.357.885.888,00	2.076.597.305,00
44	Kecamatan Cipanas	0,00	0,00	2.212.262.183,00	2.136.314.532,00
45	Kecamatan Cirinten	0,00	0,00	2.513.335.998,00	2.356.970.911,00
46	Kecamatan Curugbitung	0,00	0,00	2.543.856.382,00	2.519.862.513,00
47	Kecamatan Gunungkencana	0,00	0,00	2.370.300.468,00	2.274.035.189,00
48	Kecamatan Kalanganyar	0,00	0,00	2.065.816.756,00	1.999.988.267,00
49	Kecamatan Lebakgedong	0,00	0,00	1.881.155.906,00	1.786.682.764,00
50	Kecamatan Leuwidamar	0,00	0,00	2.177.388.883,00	2.040.152.751,00
51	Kecamatan Maja	0,00	0,00	2.591.718.128,00	2.486.687.130,00
52	Kecamatan Malingping	0,00	0,00	2.336.032.768,00	2.305.789.280,00
53	Kecamatan Muncang	0,00	0,00	2.066.037.351,00	1.892.704.842,00
54	Kecamatan Panggarangan	0,00	0,00	1.964.191.932,00	1.807.806.080,00
55	Kecamatan Rangkasbitung	0,00	0,00	7.785.016.633,00	7.358.885.158,00
56	Kecamatan Sajira	0,00	0,00	2.569.485.393,00	2.462.830.985,00
57	Kecamatan Sobang	0,00	0,00	2.102.584.466,00	1.931.076.171,00
58	Kecamatan Wanasalam	0,00	0,00	2.227.179.486,00	2.062.384.144,00
59	Kecamatan Warunggunung	0,00	0,00	1.879.462.315,00	1.853.056.153,00
60	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	57.795.338.768,00	57.401.206.730,00
Jumlah		**2.977.907.290.281,00**	**2.924.700.667.833,92**	**3.096.519.744.303,00**	**2.997.766.952.106,00**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.977.907.290.281,00 dan terealisasi sebesar Rp2.924.700.667.833,92,00 atau 98,21%. Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp417.281.984.162,92 atau 88,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp474.102.508.196,00. Rincian target dan

realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	197.100.000.000,00	146.344.492.995,00	74,25
2	Retribusi Daerah	258.211.176.332,00	250.029.934.895,00	96,83
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.255.719.809,00	6.012.475.617,00	96,11
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	12.535.612.055,00	14.895.080.655,92	118,82
JUMLAH		**474.102.508.196,00**	**417.281.984.162,92**	**88,02**

Pendapatan Daerah dari Transfer pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar sebesar Rp2.482.549.777.816,00 atau 100.10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.480.156.217.085,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.273.004.698.494,00	2.273.013.906.176,00	100,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	207.151.518.591,00	209.535.871.640,00	101,15
JUMLAH		**2.480.156.217.085,00**	**2.482.549.777.816,00**	**101,10**

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp24.868.905.855,00 atau 105,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp23.648.565.000,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah	23.648.565.000,00	24.760.061.697,00	104,70

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	108.844.158,00	0,00
JUMLAH		**23.648.565.000,00**	**24.868.905.855,00**	**105,16**

Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.096.519.744.303,00 dan terealisasi sebesar Rp2.997.766.952.106,00 atau 96,81% sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja daerah sebesar Rp98.752.792.197,00 atau 3,19%. Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.209.255.340.354,00 atau 96,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.296.782.078.689,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
BELANJA OPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	1.347.054.565.426,00	1.309.315.335.469,00	97,20
2	Belanja Barang dan Jasa	735.691.843.442,00	691.816.666.032,00	94,40
3	Belanja Hibah	205.948.869.821,00	200.056.338.853,00	97,14
4	Belanja Bantuan Sosial	8.086.800.000,00	8.067.000.000,00	99,76
JUMLAH		**2.296.782.078.689,00**	**2.209.255.340.354,00**	**96,19**

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp267.154.805.102,00 atau 96,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp276.666.233.886,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	241.327.000,00	223,607,000.00	92,66
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.797.475.919,00	54,290,255,942.00	93,93
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.258.706.446,00	130,234,495,550.00	96,29
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.612.246.532,00	72,723,089,637.00	96,18
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.756.477.989,00	9,683,356,973.00	124,84
JUMLAH		**276.666.233.886,00**	**267,154,805,102.00**	**96,56**

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp18.659.748.315,00 atau 92,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.073.483.803,00. Rincian Belanja Tidak terduga dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**16.147.744.500,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pembelian Terpal Bagi Pengungsi di Hunian Sementara (Huntara) Blok Cibadung Desa Banjaririgasi Kec. Lebakgedong Kab. Lebak TA. 2024	96.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Jalan Sukahujan - Cigemblong (Ds. Citeupuseun) Kec. CiharaKab. Lebak TA. 2024	203.823.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penangan Bencana Alam Daerah Irigasi (DI) Cisilad Desa Padang Kecamatan Cileles Kab. Lebak TA. 2024	315.218.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Jalan Ciparay - Warungbanten STA.5+200 Kecamatan Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	83.650.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Cirompang Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kab. Lebak TA. 2024	1.028.882.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Cimondene Girang Desa Hariang Kecamatan Sobang Kab. Lebak TA. 2024	767.044.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Citogol Desa Ciapus Kecamatan Cijaku Kab. Lebak TA. 2024	632.591.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Kerusakan Insfrastruktur Jalan Pasir Kuray-Cisitu/CIkidang Desa Kujangjaya Kec. CIbeber Kab. Lebak TA. 2024	254.245.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi SMPN 1 Rangkasbitung Akibat Bencana Hujan deras di Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak TA. 2024	234.676.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan MCK di Hunian Sementara (Huntara) di Desa Banjarsari Kec. Lebakgedong Kab. Lebak TA. 2024	94.969.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Bantuan Kebutuhan Logistik Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di 9 Kecamatan di Kab. Lebak TA. 2024	129.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Ruas Jalan Rangkasbitung - Gajrug STA.10+700 kp. Hantap Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak TA. 2024	589.311.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Ruas Jalan Sampay - Gunungkencana STA.3+140 kp. Cibangkur Ds. Sukadaya Kecamatan Cikulur Kab. Lebak TA. 2024	800.162.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Ciujung, Kampung Dukuh Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles Kab. Lebak TA. 2024	45.954.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Cisawarna, Desa Lebaktipar Kec. Cilograng Kab. Lebak TA. 2024	447.948.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Cisono, Desa Sirnagalih Kec. Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	526.557.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cimasuk, Desa Cikate Kec. Cigemblong Kab. Lebak TA. 2024	396.191.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rahangbelang, Desa Cibeureum Kec. Cijaku Kab. Lebak TA. 2024	460.796.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Turap Penahan Tanah(TPT) pada Kantor BAKESBANGPOL Kab. Lebak TA. 2024	170.438.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabiitasi Jembatan Gantung Sungai Ciujung di Kp. Nangklak Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab. Lebak TA. 2024	73.996.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur SDN 2 Giriharja Kecamatan Cipanas Kab. Lebak TA. 2024	573.550.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur Bantaran Sungai Cidurian (Sampora) Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kab. Lebak TA. 2024/HILIR	994.287.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur SMPN 5 Muncang dan SMPN 5 Sobang Kab. Lebak TA. 2024	372.204.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
24	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur Bantaran Sungai Cidurian (Sampora) Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kab. Lebak TA. 2024/HULU	1.190.108.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan Penunjang Operasional Percepatan Penanganan Pohon Tumbang di Sekitaran Kota Rangkasbitung TA. 2024	164.086.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Belanja pengadaan Buffer Stock Logistik Kebencanaan menghadapi Bencana Alam di Kab. Lebak TA. 2024	360.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan kerusakan infrastruktur SDN Malabar Kec. Cibadak, SDN 1 Kalanganyar Kec. Kalanganyar, dan SMPN 1 Cimarga Kab Lebak TA. 2024	798.297.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Jalan KH. Atim Cijoro Lebak Desa MC. Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak TA. 2024	93.642.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Jalan Raya Ciparay - Warungbanten Kec. Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	360.407.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SMPN 1 Malingping Kab. Lebak TA. 2024	250.999.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SDN 2 Citorek Barat Kab. Lebak TA. 2024	88.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SDN Jatimulya Kab. Lebak TA. 2024	127.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor berdasarkan SK Pj Bupati Lebak Nomor 360/Kep.411-BPBD/2024 tanggal 02 Desember 2024	3.422.013.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DINAS SOSIAL		**1.768.000.000,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Agustus TA. 2023	144.000.000,00	Dinas Sosial
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan September-Oktober TA. 2023	367.000.000,00	Dinas Sosial
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Nopember TA. 2023	186.000.000,00	Dinas Sosial
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Desember 2023 Tahun Anggaran 2024	170.000.000,00	Dinas Sosial
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan JANUARI Sd. FEBRUARI TA. 2024	236.000.000,00	Dinas Sosial
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Maret sd. April TA. 2024	297.000.000,00	Dinas Sosial

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Mei sd. Juli TA. 2024	187.000.000,00	Dinas Sosial
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan AgustuS TA. 2024	38.000.000,00	Dinas Sosial
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan September TA. 2024	110.000.000,00	Dinas Sosial
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Oktober TA. 202	33.000.000,00	Dinas Sosial
RSUD ADJIDARMO		**139.617.617,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) untuk Biaya Pengobatan dan Perawatan pasieun di RSUD Adjidarmo Kab. Lebak bulan Nopember 2023 TA. 2024	105.646.400,00	RSUD Dr. Adjidarmo
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) untuk Biaya Pengobatan dan Perawatan pasien di RSUD Adjidarmo Kab. Lebak bulan Desember 2023 dan Januari 2024 TA. 2024	33.971.217,00	RSUD Dr. Adjidarmo
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		**334.029.900,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pemenuhan belanja tambahan Ribbon Film KTP-EL dan Ribbon Kartu Identitas Anak tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lebak	334.029.900,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LAIN-LAIN		**270.356.298,00**	
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Panwaslu Ad-Hoc Se-Kabupaten Lebak TA. 2024	25.512.300,00	Rekening Perantara BJB 0019260315360
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga (9 pengelola parkir tepi jalan umum) tahun 2024	133.606.058,00	CV. TRIULINA DAN 8 LAINNYA
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga (9 pengelola parkir tepi jalan umum) bulan JULI tahun 2024	54.287.200,00	CV. TRIULINA DAN 8 LAINNYA
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Makan dan Minum	2.025.000,00	KAS DESA CALUNG BUNGUR
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1.440.243,00	SUPRATNO 00800104408453 BRI
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas Kesalahan Transfer ke RKUD	200.000,00	muhamad SOLEH
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Makan dan Minum	2.835.000,00	KAS DESA CALUNG BUNGUR

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga Pengelola Pasar Muncang tahun anggaran 2023	47.856.000,00	KAS DESA CIMINYAK
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas double pembayaran Pajak Air Tanah dari PT. SATWA PRIMAINDO	2.594.497,00	PT. SATWA PRIMAINDO
	JUMLAH	**18.659.748.315,00**	

Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp502.697.058.335,00 atau 99,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp502.997.947.925,00 Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
BELANJA TRANSFER
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	BELANJA TRANSFER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Bagi Hasil	21.958.131.975,00	21.919.382.330,00	99,82
2	Belanja Bantuan Keuangan	481.039.815.950,00	480.777.676.005,00	99,95
JUMLAH		**502.997.947.925,00**	**502.697.058.335,00**	**99,94**

Belanja digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebanyak 126 program. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja daerah berdasarkan program pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut;

Tabel 3.18
BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.644.307.657.040,00**	**1.585.499.185.645,00**	**58.808.471.395,00**	**96,42**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.810.426.550,00	2.487.543.953,00	322.882.597,00	88,51
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.248.154.268.376,00	1.213.207.018.499,00	34.947.249.877,00	97,20
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	557.193.300,00	378.704.530,00	178.488.770,00	67,97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.490.000,00	0,00	9.490.000,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.581.250.914,00	18.675.276.534,00	1.905.974.380,00	90,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.296.296.000,00	2.053.370.000,00	242.926.000,00	89,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.867.788.791,00	57.962.625.865,00	2.905.162.926,00	95,23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.329.184,00	14.492.961.747,00	2.007.367.437,00	87,83
	Peningkatan Pelayanan BLUD	252.333.584.837,00	238.272.977.516,00	14.060.607.321,00	94,43
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.552.996.632,00	995.339.625,00	1.557.657.007,00	38,99
	Penataan Organisasi	766.007.600,00	741.004.303,00	25.003.297,00	96,74
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.853.137.500,00	2.691.573.576,00	161.563.924,00	94,34
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.547.802.356,00	33.098.909.497,00	448.892.859,00	98,66
	Layanan Administrasi DPRD	477.085.000,00	441.880.000,00	35.205.000,00	92,62
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**348.621.732.596,00**	**344.405.905.255,00**	**4.215.827.341,00**	**98,79**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	211.779.600.000,00	208.921.477.954,00	2.858.122.046,00	98,65
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104.197.134.596,00	103.169.029.368,00	1.028.105.228,00	99,01
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.518.347.000,00	22.407.115.208,00	111.231.792,00	99,51
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.126.651.000,00	9.908.282.725,00	218.368.275,00	97,84
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**35.000.000,00**	**32.449.000,00**	**2.551.000,00**	**92,71**
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.000.000,00	32.449.000,00	2.551.000,00	92,71

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**141.869.000,00**	**138.918.400,00**	**2.950.600,00**	**97,92**
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.869.000,00	138.918.400,00	2.950.600,00	97,92
5	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**117.498.927.369,00**	**110.428.411.214,00**	**7.070.516.155,00**	**93,98**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.871.779.482,00	23.855.537.575,00	1.016.241.907,00	95,91
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.522.147.887,00	86.471.444.389,00	6.050.703.498,00	93,46
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.000.000,00	19.223.250,00	776.750,00	96,12
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	82.206.000,00	2.794.000,00	96,71
6	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**12.135.540.041,00**	**10.959.893.729,00**	**1.175.646.312,00**	**90,31**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.366.692.124,00	7.508.117.995,00	858.574.129,00	89,74
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.768.847.917,00	3.451.775.734,00	317.072.183,00	91,59
7	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**381.631.000,00**	**301.330.120,00**	**80.300.880,00**	**78,96**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	53.683.640,00	10.046.360,00	84,24
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	137.387.000,00	116.145.640,00	21.241.360,00	84,54

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	180.514.000,00	131.500.840,00	49.013.160,00	72,85
8	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**593.284.500,00**	**476.946.700,00**	**116.337.800,00**	**80,39**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	593.284.500,00	476.946.700,00	116.337.800,00	80,39
9	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**9.700.137.350,00**	**9.044.221.850,00**	**655.915.500,00**	**93,24**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.538.400.350,00	3.363.967.300,00	174.433.050,00	95,07
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.161.737.000,00	5.680.254.550,00	481.482.450,00	92,19
10	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**15.794.958.000,00**	**15.123.955.006,00**	**671.002.994,00**	**95,75**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.794.958.000,00	15.123.955.006,00	671.002.994,00	95,75
11	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**9.773.707.000,00**	**9.724.851.535,00**	**48.855.465,00**	**99,50**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.773.707.000,00	9.724.851.535,00	48.855.465,00	99,50
12	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**575.927.750,00**	**527.625.850,00**	**48.301.900,00**	**91,61**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	575.927.750,00	527.625.850,00	48.301.900,00	91,61
13	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**2.585.575.500,00**	**2.386.958.726,00**	**198.616.774,00**	**92,32**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.585.575.500,00	2.386.958.726,00	198.616.774,00	92,32
14	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**1.105.659.000,00**	**958.847.250,00**	**146.811.750,00**	86,72
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.105.659.000,00	958.847.250,00	146.811.750,00	86,72
15	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**121.627.803.666,00**	**112.475.818.244,00**	**9.151.985.422,00**	**92,48**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	121.627.803.666,00	112.475.818.244,00	9.151.985.422,00	92,48
16	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**345.146.000,00**	**318.683.500,00**	**26.462.500,00**	**92,33**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	239.930.000,00	235.511.500,00	4.418.500,00	98,16
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.256.000,00	44.515.000,00	1.741.000,00	96,24
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	58.960.000,00	38.657.000,00	20.303.000,00	65,56
17	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**642.207.500,00**	**518.300.100,00**	**123.907.400,00**	**80,71**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	85.350.000,00	55.970.000,00	29.380.000,00	65,58
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	503.017.500,00	446.566.100,00	56.451.400,00	88,78
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	53.840.000,00	15.764.000,00	38.076.000,00	29,28
18	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**217.779.200,00**	**192.742.256,00**	**25.036.944,00**	**88,50**
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	87.939.000,00	81.981.500,00	5.957.500,00	93,23

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	89.810.200,00	77.802.006,00	12.008.194,00	86,63
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	40.030.000,00	32.958.750,00	7.071.250,00	82,34
19	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**4.254.929.200,00**	**4.236.381.610,00**	**18.547.590,00**	**99,56**
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	677.618.000,00	669.523.000,00	8.095.000,00	98,81
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.577.311.200,00	3.566.858.610,00	10.452.590,00	99,71
20	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**704.183.700,00**	**636.205.300,00**	**67.978.400,00**	**90,35**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	704.183.700,00	636.205.300,00	67.978.400,00	90,35
21	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**552.381.200,00**	**535.962.000,00**	**16.419.200,00**	**97,03**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	374.271.200,00	364.952.000,00	9.319.200,00	97,51
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	178.110.000,00	171.010.000,00	7.100.000,00	96,01
22	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**231.632.100,00**	**230.147.750,00**	**1.484.350,00**	**99,36**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.632.100,00	230.147.750,00	1.484.350,00	99,36
23	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.745.846.250,00**	**1.651.934.000,00**	**93.912.250,00**	**94,62**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	115.088.000,00	114.528.000,00	560.000,00	99,51
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	261.402.250,00	215.334.000,00	46.068.250,00	82,38
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.320.396.000,00	1.288.472.000,00	31.924.000,00	97,58

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	48.960.000,00	33.600.000,00	15.360.000,00	68,63
24	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**670.528.000,00**	**641.143.000,00**	**29.385.000,00**	**95,62**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	670.528.000,00	641.143.000,00	29.385.000,00	95,62
25	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**9.000.000,00**	**6.433.750,00**	**2.566.250,00**	**71,49**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	9.000.000,00	6.433.750,00	2.566.250,00	71,49
26	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**502.166.400,00**	**458.353.850,00**	**43.812.550,00**	**91,28**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	211.650.000,00	178.860.750,00	32.789.250,00	84,51
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	290.516.400,00	279.493.100,00	11.023.300,00	96,21
27	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**5.714.433.700,00**	**5.636.601.750,00**	**77.831.950,00**	**98,64**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.714.433.700,00	5.636.601.750,00	77.831.950,00	98,64
28	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**286.005.900,00**	**279.447.250,00**	**6.558.650,00**	**97,71**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	286.005.900,00	279.447.250,00	6.558.650,00	97,71
29	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**307.002.000,00**	**284.818.500,00**	**22.183.500,00**	**92,77**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	263.911.000,00	249.451.500,00	14.459.500,00	94,52
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	43.091.000,00	35.367.000,00	7.724.000,00	82,08
30	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**37.995.000,00**	**33.563.500,00**	**4.431.500,00**	**88,34**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	15.635.000,00	14.132.500,00	1.502.500,00	90,39
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.360.000,00	19.431.000,00	2.929.000,00	86,90
31	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**70.188.000,00**	**63.315.000,00**	**6.873.000,00**	90,21
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.403.000,00	35.430.000,00	2.973.000,00	92,26
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	31.785.000,00	27.885.000,00	3.900.000,00	87,73
32	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**728.500.000,00**	**689.074.955,00**	**39.425.045,00**	**94,59**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	96.210.621,00	3.789.379,00	96,21
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	216.500.000,00	200.008.750,00	16.491.250,00	92,38
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	412.000.000,00	392.855.584,00	19.144.416,00	95,35
33	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**245.260.000,00**	**236.107.907,00**	**9.152.093,00**	**96,27**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000,00	48.636.500,00	2.113.500,00	95,84
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	153.843.157,00	6.156.843,00	96,15
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.000,00	33.628.250,00	881.750,00	97,44

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
34	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**235.710.000,00**	**221.178.500,00**	**14.531.500,00**	**93,84**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.600.000,00	146.239.000,00	8.361.000,00	94,59
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	81.110.000,00	74.939.500,00	6.170.500,00	92,39
35	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**447.793.023,00**	**430.245.997,00**	**17.547.026,00**	96,08
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.098.000,00	80.774.669,00	2.323.331,00	97,20
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	305.480.000,00	292.149.578,00	13.330.422,00	95,64
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.215.023,00	57.321.750,00	1.893.273,00	96,80
36	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**274.507.300,00**	**252.758.750,00**	**21.748.550,00**	92,08
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	109.507.400,00	100.029.500,00	9.477.900,00	91,34
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	164.999.900,00	152.729.250,00	12.270.650,00	92,56
37	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**95.808.200,00**	**82.187.000,00**	**13.621.200,00**	85,78
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	27.459.100,00	26.365.000,00	1.094.100,00	96,02
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.349.100,00	55.822.000,00	12.527.100,00	81,67
38	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**102.671.400,00**	**95.650.250,00**	**7.021.150,00**	93,16

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	102.671.400,00	95.650.250,00	7.021.150,00	93,16
39	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**31.080.500,00**	**30.588.750,00**	**491.750,00**	98,42
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.080.500,00	30.588.750,00	491.750,00	98,42
40	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**72.356.000,00**	**69.470.000,00**	**2.886.000,00**	96,01
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.356.000,00	69.470.000,00	2.886.000,00	96,01
41	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**38.999.500,00**	**38.311.250,00**	**688.250,00**	98,24
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	38.999.500,00	38.311.250,00	688.250,00	98,24
42	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**382.000.000,00**	**378.424.061,00**	**3.575.939,00**	**99,06**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000,00	18.855.000,00	1.145.000,00	94,28
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	362.000.000,00	359.569.061,00	2.430.939,00	99,33
43	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.204.392.100,00**	**2.109.572.481,00**	**94.819.619,00**	**95,70**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.074.706.100,00	1.987.654.481,00	87.051.619,00	95,80
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	49.810.000,00	46.180.000,00	3.630.000,00	92,71
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	79.876.000,00	75.738.000,00	4.138.000,00	94,82

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
44	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**169.300.000,00**	**163.843.930,00**	**5.456.070,00**	**96,78**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	169.300.000,00	163.843.930,00	5.456.070,00	96,78
45	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**30.599.900,00**	**30.410.000,00**	**189.900,00**	**99,38**
	Penyimpanan sementara Limbah B3	30.599.900,00	30.410.000,00	189.900,00	99,38
46	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**80.690.000,00**	**76.755.000,00**	**3.935.000,00**	**95,12**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80.690.000,00	76.755.000,00	3.935.000,00	95,12
47	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**44.840.000,00**	**39.965.000,00**	**4.875.000,00**	89,13
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	44.840.000,00	39.965.000,00	4.875.000,00	89,13
48	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**45.000.000,00**	**44.219.000,00**	**781.000,00**	**98,26**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.219.000,00	781.000,00	98,26

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
49	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**53.984.000,00**	**53.586.000,00**	**398.000,00**	99,26
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.984.000,00	53.586.000,00	398.000,00	99,26
50	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**37.550.000,00**	**37.395.000,00**	**155.000,00**	**99,59**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	37.550.000,00	37.395.000,00	155.000,00	99,59
51	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**6.354.936.100,00**	**5.991.802.464,00**	**363.133.636,00**	**94,29**
	Pengelolaan Sampah	6.354.936.100,00	5.991.802.464,00	363.133.636,00	94,29
52	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**52.491.500,00**	**52.160.500,00**	**331.000,00**	99,37
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	52.491.500,00	52.160.500,00	331.000,00	99,37
53	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**58.205.000,00**	**57.787.193,00**	**417.807,00**	**99,28**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	58.205.000,00	57.787.193,00	417.807,00	99,28
54	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**81.375.000,00**	**75.962.335,00**	**5.412.665,00**	93,35
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	35.295.000,00	30.694.650,00	4.600.350,00	86,97
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	46.080.000,00	45.267.685,00	812.315,00	98,24
55	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**103.162.700,00**	**89.819.750,00**	**13.342.950,00**	**87,07**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	103.162.700,00	89.819.750,00	13.342.950,00	87,07
56	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**24.790.200,00**	**21.022.000,00**	**3.768.200,00**	**84,80**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	24.790.200,00	21.022.000,00	3.768.200,00	84,80
57	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**726.648.400,00**	**634.715.500,00**	**91.932.900,00**	**87,35**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	726.648.400,00	634.715.500,00	91.932.900,00	87,35
58	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN**	**696.134.100,00**	**630.596.052,00**	**65.538.048,00**	**90,59**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	696.134.100,00	630.596.052,00	65.538.048,00	90,59
59	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**650.000.000,00**	**619.992.253,00**	**30.007.747,00**	**95,38**
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	619.992.253,00	30.007.747,00	95,38
60	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**10.026.301.188,00**	**9.551.769.664,00**	**474.531.524,00**	95,27
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.314.800.000,00	2.015.707.500,00	299.092.500,00	87,08
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.035.000.000,00	1.035.000.000,00	0,00	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.208.251.188,00	5.056.874.114,00	151.377.074,00	97,09
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.468.250.000,00	1.444.188.050,00	24.061.950,00	98,36
61	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**7.886.969.000,00**	**7.679.749.000,00**	**207.220.000,00**	97,37
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.158.569.000,00	951.349.000,00	207.220.000,00	82,11
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	6.728.400.000,00	6.728.400.000,00	0,00	100,00

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
62	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**4.933.060.690,00**	**4.343.643.185,00**	**589.417.505,00**	**88,05**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.776.986.150,00	2.619.533.600,00	157.452.550,00	94,33
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	896.655.500,00	830.210.785,00	66.444.715,00	92,59
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	558.990.640,00	219.795.800,00	339.194.840,00	39,32
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	498.870.400,00	472.956.000,00	25.914.400,00	94,81
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	201.558.000,00	201.147.000,00	411.000,00	99,80
63	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**969.464.660,00**	**931.406.636,00**	**38.058.024,00**	**96,07**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	969.464.660,00	931.406.636,00	38.058.024,00	96,07
62	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**2.276.023.500,00**	**2.170.990.562,00**	**105.032.938,00**	**95,39**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	565.075.000,00	480.810.282,00	84.264.718,00	85,09
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.710.948.500,00	1.690.180.280,00	20.768.220,00	98,79
64	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**70.290.600,00**	**69.730.000,00**	**560.600,00**	**99,20**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70.290.600,00	69.730.000,00	560.600,00	99,20
65	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**329.846.268,00**	**326.558.152,00**	**3.288.116,00**	**99,00**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	329.846.268,00	326.558.152,00	3.288.116,00	99,00

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
66	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**84.240.000,00**	**80.695.500,00**	**3.544.500,00**	**95,79**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.240.000,00	80.695.500,00	3.544.500,00	95,79
67	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**556.599.900,00**	**520.871.467,00**	**35.728.433,00**	**93,58**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	556.599.900,00	520.871.467,00	35.728.433,00	93,58
68	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**432.703.400,00**	**402.871.250,00**	**29.832.150,00**	**93,11**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	432.703.400,00	402.871.250,00	29.832.150,00	93,11
69	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**37.225.500,00**	**36.204.550,00**	**1.020.950,00**	**97,26**
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	37.225.500,00	36.204.550,00	1.020.950,00	97,26
70	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**31.120.000,00**	**28.457.000,00**	**2.663.000,00**	91,44
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.120.000,00	28.457.000,00	2.663.000,00	91,44
71	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**142.019.800,00**	**129.514.309,00**	**12.505.491,00**	**91,19**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	142.019.800,00	129.514.309,00	12.505.491,00	91,19
72	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**1.013.650.000,00**	**720.576.360,00**	**293.073.640,00**	**71,09**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	1.013.650.000,00	720.576.360,00	293.073.640,00	71,09

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
73	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**14.350.000,00**	**12.346.840,00**	**2.003.160,00**	**86,04**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.350.000,00	12.346.840,00	2.003.160,00	86,04
74	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**447.703.900,00**	**427.679.000,00**	**20.024.900,00**	**95,53**
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	447.703.900,00	427.679.000,00	20.024.900,00	95,53
75	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**6.149.131.000,00**	**5.935.915.450,00**	**213.215.550,00**	96,53
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	644.004.000,00	622.762.050,00	21.241.950,00	96,70
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.045.557.000,00	2.944.623.400,00	100.933.600,00	96,69
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.309.570.000,00	1.218.530.000,00	91.040.000,00	93,05
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	100,00
76	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
77	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**703.113.000,00**	**667.746.997,00**	**35.366.003,00**	**94,97**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	703.113.000,00	667.746.997,00	35.366.003,00	94,97
78	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**102.290.100,00**	**98.765.000,00**	**3.525.100,00**	**96,55**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102.290.100,00	98.765.000,00	3.525.100,00	96,55
79	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**546.210.000,00**	**543.377.500,00**	**2.832.500,00**	**99,48**
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	546.210.000,00	543.377.500,00	2.832.500,00	99,48
80	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**499.151.000,00**	**474.267.500,00**	**24.883.500,00**	**95,01**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	499.151.000,00	474.267.500,00	24.883.500,00	95,01
81	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**39.000.000,00**	**37.232.500,00**	**1.767.500,00**	**95,47**
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.000.000,00	37.232.500,00	1.767.500,00	95,47
82	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**359.122.300,00**	**349.347.630,00**	**9.774.670,00**	**97,28**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	359.122.300,00	349.347.630,00	9.774.670,00	97,28
83	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**975.000.000,00**	**922.153.256,00**	**52.846.744,00**	**94,58**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	975.000.000,00	922.153.256,00	52.846.744,00	94,58
84	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.023.914.300,00**	**1.015.118.000,00**	**8.796.300,00**	**99,14**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.023.914.300,00	1.015.118.000,00	8.796.300,00	99,14
85	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**181.025.800,00**	**167.542.800,00**	**13.483.000,00**	**92,55**
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	181.025.800,00	167.542.800,00	13.483.000,00	92,55
86	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**820.775.070,00**	**750.686.750,00**	**70.088.320,00**	**91,46**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	788.118.470,00	720.417.750,00	67.700.720,00	91,41
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.656.600,00	30.269.000,00	2.387.600,00	92,69

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
87	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**3.662.302.900,00**	**3.259.027.924,00**	**403.274.976,00**	**88,99**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	46.997.900,00	46.623.000,00	374.900,00	99,20
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.615.305.000,00	3.212.404.924,00	402.900.076,00	88,86
88	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5.867.300,00**	**5.842.750,00**	**24.550,00**	**99,58**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	5.867.300,00	5.842.750,00	24.550,00	99,58
89	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**472.240.000,00**	**453.261.000,00**	**18.979.000,00**	**95,98**
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	472.240.000,00	453.261.000,00	18.979.000,00	95,98
90	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**9.478.866.500,00**	**9.113.213.733,00**	**365.652.767,00**	**96,14**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9.478.866.500,00	9.113.213.733,00	365.652.767,00	96,14
91	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.925.710.000,00**	**1.883.689.360,00**	**42.020.640,00**	**97,82**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.925.710.000,00	1.883.689.360,00	42.020.640,00	97,82
92	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.822.692.700,00**	**1.703.160.740,00**	**119.531.960,00**	**93,44**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.822.692.700,00	1.703.160.740,00	119.531.960,00	93,44
93	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**18.297.614.882,00**	**17.722.568.941,00**	**575.045.941,00**	**96,86**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	74.886.000,00	72.707.500,00	2.178.500,00	97,09
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	17.938.361.982,00	17.368.792.191,00	569.569.791,00	96,82

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.366.900,00	281.069.250,00	3.297.650,00	98,84
94	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**26.321.918.000,00**	**26.186.030.250,00**	**135.887.750,00**	**99,48**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	48.704.000,00	46.378.000,00	2.326.000,00	95,22
	Pembangunan Prasarana Pertanian	26.273.214.000,00	26.139.652.250,00	133.561.750,00	99,49
95	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**317.315.200,00**	**240.327.348,00**	**76.987.852,00**	**75,74**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	76.735.300,00	74.133.873,00	2.601.427,00	96,61
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	240.579.900,00	166.193.475,00	74.386.425,00	69,08
96	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**91.475.000,00**	**85.782.000,00**	**5.693.000,00**	**93,78**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	91.475.000,00	85.782.000,00	5.693.000,00	93,78
97	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**752.659.900,00**	**616.559.250,00**	**136.100.650,00**	**81,92**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	752.659.900,00	616.559.250,00	136.100.650,00	81,92
98	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**1.525.256.116,00**	**1.499.335.880,00**	**25.920.236,00**	**98,30**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.525.256.116,00	1.499.335.880,00	25.920.236,00	98,30
99	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**8.516.344.959,00**	**7.594.946.935,00**	**921.398.024,00**	**89,18**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.056.902.708,00	5.783.422.942,00	273.479.766,00	95,48
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.459.442.251,00	1.811.523.993,00	647.918.258,00	73,66

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
100	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**1.227.416.600,00**	**1.208.311.750,00**	**19.104.850,00**	**98,44**
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.102.188.700,00	1.083.778.500,00	18.410.200,00	98,33
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	125.227.900,00	124.533.250,00	694.650,00	99,45
101	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**290.599.600,00**	**258.747.585,00**	**31.852.015,00**	**89,04**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	290.599.600,00	258.747.585,00	31.852.015,00	89,04
102	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**35.370.000,00**	**35.124.500,00**	**245.500,00**	**99,31**
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	35.370.000,00	35.124.500,00	245.500,00	99,31
103	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**688.956.800,00**	**658.199.446,00**	**30.757.354,00**	**95,54**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	688.956.800,00	658.199.446,00	30.757.354,00	95,54
104	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**52.646.000,00**	**51.600.000,00**	**1.046.000,00**	**98,01**
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	52.646.000,00	51.600.000,00	1.046.000,00	98,01
105	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**21.196.714.000,00**	**20.444.795.064,00**	**751.918.936,00**	96,45
	Administrasi Tata Pemerintahan	544.565.300,00	504.316.509,00	40.248.791,00	92,61
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	19.552.316.000,00	18.931.100.545,00	621.215.455,00	96,82
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	977.868.800,00	892.515.500,00	85.353.300,00	91,27
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	121.963.900,00	116.862.510,00	5.101.390,00	95,82

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
106	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.898.584.700,00**	**1.692.176.002,00**	**206.408.698,00**	**89,13**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	453.569.700,00	380.554.338,00	73.015.362,00	83,90
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	568.447.000,00	537.778.684,00	30.668.316,00	94,60
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	876.568.000,00	773.842.980,00	102.725.020,00	88,28
107	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**36.921.558.900,00**	**35.192.939.163,00**	**1.728.619.737,00**	**95,32**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.391.863.500,00	1.138.506.246,00	253.357.254,00	81,80
	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.110.040.400,00	3.063.698.917,00	46.341.483,00	98,51
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.140.915.000,00	2.884.305.500,00	256.609.500,00	91,83
	Fasilitasi Tugas DPRD	29.278.740.000,00	28.106.428.500,00	1.172.311.500,00	96,00
108	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.421.986.697,00**	**1.245.279.284,00**	**176.707.413,00**	**87,57**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.256.695.897,00	1.094.886.672,00	161.809.225,00	87,12
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111.113.000,00	101.807.500,00	9.305.500,00	91,63
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54.177.800,00	48.585.112,00	5.592.688,00	89,68
109	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.743.167.600,00**	**1.630.937.232,00**	**112.230.368,00**	**93,56**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	287.889.800,00	240.994.487,00	46.895.313,00	83,71
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.327.932.900,00	1.274.410.709,00	53.522.191,00	95,97
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	127.344.900,00	115.532.036,00	11.812.864,00	90,72
110	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**526.632.793.828,00**	**524.617.590.238,00**	**2.015.203.590,00**	99,62
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.020.363.800,00	1.803.603.889,00	216.759.911,00	89,27
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	599.980.700,00	571.128.025,00	28.852.675,00	95,19

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	828.964.700,00	781.111.674,00	47.853.026,00	94,23
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	523.183.484.628,00	521.461.746.650,00	1.721.737.978,00	99,67
111	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.890.291.100,00**	**2.078.075.854,00**	**812.215.246,00**	**71,90**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.890.291.100,00	2.078.075.854,00	812.215.246,00	71,90
112	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**796.953.600,00**	**772.046.185,00**	**24.907.415,00**	**96,87**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	796.953.600,00	772.046.185,00	24.907.415,00	96,87
113	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.838.160.000,00**	**1.702.595.288,00**	**135.564.712,00**	**92,62**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	384.151.000,00	359.593.402,00	24.557.598,00	93,61
	Mutasi dan Promosi ASN	892.213.000,00	875.619.457,00	16.593.543,00	98,14
	Pengembangan Kompetensi ASN	393.700.000,00	318.033.479,00	75.666.521,00	80,78
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	168.096.000,00	149.348.950,00	18.747.050,00	88,85
114	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2.398.272.500,00**	**1.109.141.043,00**	**1.289.131.457,00**	**46,25**
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.398.272.500,00	1.109.141.043,00	1.289.131.457,00	46,25
115	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**689.660.400,00**	**670.460.983,00**	**19.199.417,00**	**97,22**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	268.508.900,00	263.630.526,00	4.878.374,00	98,18
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	229.967.600,00	227.936.250,00	2.031.350,00	99,12
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	191.183.900,00	178.894.207,00	12.289.693,00	93,57
116	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**3.701.770.000,00**	**3.053.382.069,00**	**648.387.931,00**	**82,48**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.925.780.000,00	2.387.750.331,00	538.029.669,00	81,61
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	775.990.000,00	665.631.738,00	110.358.262,00	85,78
117	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**2.472.067.100,00**	**1.278.939.939,00**	**1.193.127.161,00**	**51,74**

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	55.040.000,00	50.616.000,00	4.424.000,00	91,96
	Pendampingan dan Asistensi	2.417.027.100,00	1.228.323.939,00	1.188.703.161,00	50,82
118	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.496.921.940,00**	**1.398.082.357,00**	**98.839.583,00**	**93,40**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	562.209.500,00	530.171.150,00	32.038.350,00	94,30
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.249.840,00	17.849.800,00	400.040,00	97,81
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	916.462.600,00	850.061.407,00	66.401.193,00	92,75
119	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.692.593.219,00**	**2.516.698.786,00**	**175.894.433,00**	93,47
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	228.844.400,00	148.129.400,00	80.715.000,00	64,73
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.559.296.419,00	1.535.476.986,00	23.819.433,00	98,47
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	904.452.400,00	833.092.400,00	71.360.000,00	92,11
120	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**1.419.628.000,00**	**1.383.889.000,00**	**35.739.000,00**	97,48
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.419.628.000,00	1.383.889.000,00	35.739.000,00	97,48
121	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**457.293.100,00**	**376.057.250,00**	**81.235.850,00**	**82,24**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	457.293.100,00	376.057.250,00	81.235.850,00	82,24
122	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.644.457.000,00**	**2.479.422.500,00**	**165.034.500,00**	**93,76**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.644.457.000,00	2.479.422.500,00	165.034.500,00	93,76

BELANJA DAERAH BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
123	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**49.005.571.301,00**	**48.974.326.101,00**	**31.245.200,00**	**99,94**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	49.005.571.301,00	48.974.326.101,00	31.245.200,00	99,94
124	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**958.562.900,00**	**902.814.750,00**	**55.748.150,00**	**94,18**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	958.562.900,00	902.814.750,00	55.748.150,00	94,18
125	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**925.384.300,00**	**885.837.250,00**	**39.547.050,00**	**95,73**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	925.384.300,00	885.837.250,00	39.547.050,00	95,73
126	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**842.179.800,00**	**827.566.000,00**	**14.613.800,00**	**98,26**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	842.179.800,00	827.566.000,00	14.613.800,00	98,26
JUMLAH		**3.096.519.744.303,00**	**2.997.766.952.106,00**	**98.752.792.197,00**	**96,81**

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp121.322.091.364,00 atau 100,02% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp121.300.954.022,00 dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.688.500.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.688.500.000,00, sehingga Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp118.633.591.364,00 atau 100,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp118.612.454.022,00.

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp118.633.591.364,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.322.091.364,00 atau 100,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp121.300.954.022,00. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 (audited) sebesar Rp74.300.954.022,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp74.322.091.364,00 atas Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp6.800.000,00 hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi dan Sisa Kas Sekolah Swasta sebesar Rp14.337.342,00, dan pencairan dana cadangan sebesar Rp47.000.000.000,00;
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.688.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.688.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja mandatoring spending Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
REALISASI BELANJA *MANDATORY SPENDING*
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	1.249.428.617.023,00	1.221.933.444.194,00	97,80
2	KESEHATAN	526.335.359.400,00	501.917.690.800,00	95,36
3	APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH	20.642.495.089,00	18.084.646.914,00	87,61
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	2.398.272.500,00	1.109.141.043,00	46,25
5	INFRASTRUKTUR	520.333.267.733,00	480.124.797.647,00	92,27
JUMLAH		**2.319.138.011.745,00**	**2.223.169.720.598,00**	**95,86**

Belanja Mandatory Spending Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.223.169.720.598,00 atau 95,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.319.138.011.745,00. Meskipun alokasi belanja *mandatory spending* infrastruktur belum terpenuhi diharapkan tujuan dari pengalokasian belanja mandatory spsnding tetap tercapai yaitu untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah akan terwujud di Kabupaten Lebak.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, total realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar Rp2.924.700.667.833,92 atau 98,21% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.977.907.290.281,00. Realisasi pendapatan yang tidak melampaui target yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2024 yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp417.281.984.162.92 atau 88,02%, hal ini dikarenakan:

1. Menurunnya kesadaran Masyarakat membayar Pajak dan retribusi;
2. Menurunnya pemanfaatan fasilitas objek retribusi oleh masyarakat;
3. Berkembangnya media sosial yang sangat pesat, sehingga Masyarakat lebih memilih menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dan jasa yang dijual.

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp2.482.549.777.816,00 atau 100,10% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp24.868.905.855,00 atau 105,16.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 126 program, 224 kegiatan, terealisasi sebesar Rp2.997.766.952.106,00 atau 96,81%. Persentase Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.827.845.303.048,00 atau 96,06%, mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Beberapa hambatan tidak tercapainya realisasi Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;

2. Dinamika regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah membutuhkan waktu untuk penyesuaian regulasi teknis di daerah, penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung sehingga mengakibatkan implementasi di lapangan sedikit tertunda;
3. Penggunaan aplikasi SIPD pada pelaksanaan penganggaran dan penatausahaan yang masih terus disempurnakan modul dan disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
4. Diharuskannya Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dirasa cukup menghambat upaya percepatan penyerapan anggaran akibat ketidaksiapan regulasi teknis dan infrastruktur pendukung, proses sertifikasi TKDN yang lambat serta keterbatasan kemampuan UMKM untuk memenuhi permintaan pasar;
5. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah menggunakan basis akrual.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dan terdiri dari SAL awal SiLPA/SiKPA koreksi dan SAL akhir;
3. Laporan Operasional (LO) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis

akrual sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan - LO, Belanja dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas;

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir;
5. Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP – SAL) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak berdasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang memuat tentang prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

(SAPD) tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Lebak Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang dihasilkannya untuk dikonsolidasikan atau digabungkan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Pelaporan. Entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yaitu Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

1. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen);
2. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kriteria variable teknis Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan, Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Tipe A > 800, Tipe B > 600 s/d 800. Tipe C < 600. Untuk Dinas Tipe A > 800, Tipe B > 600 s/d 800, Tipe C > 400 s/d 600, sedangkan untuk Kecamatan Tipe A > 600 dan Tipe B > 600.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tanggal 28 Desember 2020 yang mulai berlaku efektif pada Tanggal 01 Januari Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Lebak, terdiri dari:
    a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
    c. Dinas Pendidikan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    d. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
    f. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
    g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
    h. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
j. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
k. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
p. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang perdagangan;
r. Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
s. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
u. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan

permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

v. Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

w. DinasTenaga Kerja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

5. Badan Daerah terdiri dari:
   a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
   c. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
   d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
   e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Lebak.
6. Kecamatan terdiri dari 28 Kecamatan denganTipe A yaitu:
   a. Kecamatan Rangkasbitung;
   b. Kecamatan Cibadak;
   c. Kecamatan Warunggunung;
   d. Kecamatan Cikulur;
   e. Kecamatan Cimarga;
   f. Kecamatan Leuwidamar;
   g. Kecamatan Muncang;
   h. Kecamatan Bojongmanik;
   i. Kecamatan Cileles;
   j. Kecamatan Gunungkencana;
   k. Kecamatan Banjarsari;
   l. Kecamatan Cijaku;
   m. Kecamatan Malingping;
   n. Kecamatan Sajira;

o. Kecamatan Cipanas;
p. Kecamatan Maja;
q. Kecamatan Panggarangan;
r. Kecamatan Bayah;
s. Kecamatan Cibeber;
t. Kecamatan Sobang;
u. Kecamatan Curugbitung;
v. Kecamatan Wanasalam;
w. Kecamatan Cilograng;
x. Kecamatan Kalanganyar;
y. Kecamatan Lebakgedong;
z. Kecamatan Cirinten;
aa. Kecamatan Cihara; dan
bb. Kecamatan Cigemblong.

7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan Belanja, pengakuan aset, ekuitas dan kewajiban, sedangkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Basis akrual pada Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Belanja diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas sehingga pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta Belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Basis akrual pada Neraca untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
b. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral;
c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud

dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

d. Belanja diukur dan dicatat sebesar Belanja yang terjadi selama periode pelaporan, Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto;
e. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah;
f. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Sentral pada Tanggal transaksi pembiayaan;
g. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca;
h. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
    1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
    2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
    3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

    Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan,

maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian Pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Contoh piutang yang timbul karena pinjaman adalah piutang dana bergulir;
2) Transaksi Jual Beli Piutang dari transaski jual beli diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian jual beli yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Contoh piutang yang timbul karena transaksi jual beli adalah piutang penjualan angsuran;
3) Kemitraan dengan Pihak ketiga Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh piutang yang timbul karena kemitraan adalah piutang atas kemitraan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah;
4) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. Contoh piutang yang timbul karena pemberian fasilitas/jasa adalah piutang atas pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam;

5) Piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah;
6) Piutang Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SK Pembelanjaan/SKP2K/SKTJM.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal. piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapus tagihan piutang merupakan penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang dibuat

berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

i. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan berupa hewan dan tanaman hasil pengembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

j. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. Pengukuran investasi jangka pendek:

   1) Investasi dalam bentuk surat berharga:
      a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya;
      b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan. Pengukuran investasi jangka panjang:
      a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
      b) Investasi non permanen:
         - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

- Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah bank sentral yang berlaku pada Tanggal transaksi.

Pengukuran saat pengakuan awal properti investasi adalah sebagai berikut:

1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut):
2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran setelah pengakuan awal Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi aset tetap;
2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari menjadi properti investasi menjadi persediaan;
3) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

k. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Khusus honorarium yang meliputi beberapa paket pengadaan aset tetap, maka honorarium diakui pada pengadaan aset tetap yang nilainya paling besar dan/atau yang melekat pada Belanja Modal yang bersangkutan. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

   Nilai Satuan Minimun Kapitalisasi Aset Tetap, Masa Manfaat Aset Tetap dan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan dan atau pemeliharaan terhadap Aset Tetap dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

   Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar aset tetap sejenis pada saat aset tersebut diperoleh.

l. Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Hasil Pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan Dana Cadangan yang telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

m. Pengukuran Aset Lainnya

   1) Tagihan Jangka Panjang

      a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
   a) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
   b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
   c) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
   d) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

4) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
   b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai Belanja tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
   c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi;
   d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5) Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai.

n. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis kewajiban. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

1) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;

2) Pengukuran Utang Bunga Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
3) Pengukuran Utang Pinjaman Jangka Pendek;
4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

o. Pengakuan dan pengukuran atas ekuitas tergantung pada pengakuan aset dan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Peraturan dan Perundang–undangan diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1. Pendapatan

Terdapat 2 (dua) istilah pendapatan yaitu:

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan sebagai berikut:
   1) Pendapatan Operasional yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan/Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2) Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
3) Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang diperoleh karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi BUD;
2) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan di Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah untuk seluruh transaksi Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa cara:

1) pendapatan yang didahului dengan penetapan, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Pendapatan tersebut adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Air Tanah, sedangkan untuk Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah diterima.

Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui padapendapatan-LRA, ketika dokumen SPTPD diterbitkan dan atau kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (bersamaan). Pendapatan tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan-LRA diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LRA. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan–LRA;

2) Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah, baik pada Pendapatan-LO maupun Pendapatan–LRA;
3) Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan-LO maupun Pendapatan–LRA;
4) Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan-LO maupun Pendapatan–LRA;
5) Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah baik Hibah, Bantuan Sosial, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dilakukan pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan - LO maupun Pendapatan–LRA;

6) Pengakuan Pendapatan Pajak Reklame yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan dengan basis akrual dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, pengakuan Pendapatan-LO dilakukan pada saat diakuinya pendapatan dengan cara mendebet akun Pendapatan diterima dimuka dan mengkredit Pendapatan-LO. Sedangkan Pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran diterima;
7) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan Pendapatan-LO diakui ketika kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan tersebut adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Dividen, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan atas Penggunaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Pemanfaatan Hasil Kekayaan Daerah, dan Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan. Sedangkan pengakuan Pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, dan Retribusi lainnya.

2. Belanja

Belanja adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah;
b. Terjadinya konsumsi aset yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Untuk persediaan ada 2 (dua) pendekatan pengakuan yaitu pendekatan aset dimana pengakuan dilakukan

ketika persediaan telah dipakai atau di konsumsi, seperti obat-obatan untuk rumah sakit, bahan/material untuk perolehan aset, dan pendekatan Belanja, dimana pengakuan dilakukan ketika dilakukan pembelian, seperti persediaan bahan habis pakai pada SKPD antara lain alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak;

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja penyusutan aset tetap/amortisasi, Belanja transfer dan Belanja tak terduga.

Belanja diukur dan dicatat sebesar belanja yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja dinilai sebesar akumulasi belanja yang terjadi selama 1 (satu) periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Pengukuran masing-masing belanja berdasarkan klasifikasinya antara lain sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai dicatat sebesar resume tagihan Belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK;
b. Belanja Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun Belanja persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan;
c. Belanja Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset;

d. Belanja Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan;
e. Belanja Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK;
f. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat;
g. Belanja Bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas belanja bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK;
h. Belanja Subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK;
i. Belanja Hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK;
j. Belanja Bantuan Sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK;
k. Belanja Transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer;
l. Belanja Lain-Lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK;

m. Belanja Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud;
n. Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan klasifikasi ekonomi. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
c. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.;
d. Pengembalian Belanja atas Belanja Tahun Anggaran Belanja berjalan diakui sebagai pengurang atas Belanja Tahun Anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian Belanja atas Belanja pada Tahun Anggaran sebelumnya diakui sebagai Pendapatan Lainnya.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk pendapatan transfer dan Belanja transfer. Transfer diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, kecuali untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi diakui pada saat ditetapkannya SK

Gubernur tentang Penetapan Hak Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota. Selain Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi, Transfer diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima/dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

a. Penerimaan Pembiayaan yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5. Kas dan Setara Kas

Kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakanuntuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dan wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Setara Kas adalah investasi jangka pendek (mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya) yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing maka nilainya dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs nilai tengah Bank Sentral. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, atau kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD. Kas yang dikeluarkan untuk Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

6. Piutang

Piutang yaitu hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak

tertagih diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down).* Penetapan besaran penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang Serta Dana Bergulir adalah :

a. Piutang dengan kualitas lancar sebesar 0,5% dari saldo piutang kualitas lancar;
b. Piutang dengan kualitas kurang lancar sebesar 10% dari saldo piutang kualitas kurang lancar;
c. Piutang dengan kualitas diragukan sebesar 50% dari saldo piutang kualitas diragukan; dan
d. Piutang dengan kualitas macet sebesar 100% dari saldo piutang kualitas macet.

7. Persediaan

Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan barang–barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak disajikan sebesar harga perolehan terakhir menggunakan metode pencatatan secara perpetual dan periodik.

8. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi berdasarkan jangka waktunya dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
b. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

a. Metode biaya (kepemilikan kurang dari 20%) dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
b. Metode ekuitas (kepemilikan lebih dari 20%) dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (kepemilikan bersifat non permanen) dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

9. Aset Tetap

Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari:

a. Tanah yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dalam hal tanah dimiliki Pemerintah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan atau digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tanah Wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut;
b. Peralatan dan Mesin mencakup mesin - mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai;
e. Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai;
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh kewajibannya termasuk retensi kecuali bagi penyedia barang yang menyertakan jaminan pemeliharaan.

Aset Tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap yaitu jika Aset Tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan (dijual atau dihibahkan) dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pengguna; dan
f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai belanja operasional/persediaan/aset lainnya dan/atau tetap sebagai Barang Milik Daerah yang diklasifikasikan sebagai ekstra komptabel. Pengadaan Tanah pemerintah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Aset tetap yang dimanfaatkan (Kemitraan dengan pihak ketiga) direklas sebagai aset lainnya dengan tetap memperhitungkan penyusutannya. Setelah masa pemanfaatan (Kemitraan dengan pihak ketiga) berakhir direklas kembali menjadi aset tetap sesuai dengan nilai buku pada saat aset tetap tersebut dialihkan kembali.

Aset tetap yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan direklas sebagai aset lainnya pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penjualan dari Pengelola Barang Milik daerah (BMD). Dan apabila aset lainnya tersebut sudah terjual maka dilakukan penghapusan melalui Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.

Penghapusan sebagian aset tetap dihitung oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan Peraturan Bupati tentang Indeks Harga Satuan Gedung Bangunan untuk memperoleh nilai penghapusan sebagian aset tetap tersebut.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method) tanpa nilai sisa. Waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung setiap bulan pada bulan berikutnya setelah aset tersebut diperoleh. Selain Aset Tetap Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan, seluruh Aset Tetap disusutkan.

Pelepasan Aset Tetap lazim disebut sebagai pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

a. Dijual; dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan Risalah Lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dipertukarkan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan Risalah Lelang atau dokumen pertukaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Dihibahkan; dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah;
c. Dijadikan penyertaan modal daerah; dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.

Aset Tetap hilang dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset Tetap hilang dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai buku dan entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi aset lainnya (Aset Tetap hilang yang masih dalam proses Tuntutan Ganti Rugi). Apabila terdapat Tuntutan Ganti Rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat

tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Belanja.

10. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian Tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pencairan Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait.

11. Properti Investasi.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau;
b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang

lain dalam jangka pendek. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

b. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
c. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya,

biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari pernyataan ini.

BMD properti yang digunakan menghasilkan pendapatan sewa dikecualikan untuk diakui sebagai properti investasi sesuai Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD atau dokumen yang dipersamakan, apabila:

a. Digunakan sendiri dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
b. Digunakan untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
c. Digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
d. Digunakan sendiri tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain;
e. Digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMD-nya tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
    1) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau

2) Intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%). Penetapan Properti Investasi ditetapkan dengan Surat Ketetapan Bupati.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

12. Aset Lainnya

Aset Lainnya yaitu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam aset lainnya yaitu:

a. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
   1) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah;
   2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembelanjaan Penggantian Kerugian (SKP2K).
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Sewa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP, Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut dan Bangun Serah Guna (BSG) dicatat

sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;

c. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Aset Tak Berwujud terdiri atas *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi serta Hasil Kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
d. Aset Lain–lain yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

13. Kewajiban

Kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain Utang Transfer, Utang Kepada Pegawai, Utang Bunga, Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya;
b. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
    1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
    3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap

pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas belanja pemeliharaan (retensi) secara otomatis akan dihapuskan oleh Pemerintah Daerah jika pihak ketiga dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun berturut-turut (dianggarkan dalam APBD) tidak mengajukan permintaan pembayaran atas belanja pemeliharaan (retensi) tersebut, serta nilai aset yang sudah diakui dari belanja modal ersebut akan dikoreksi senilai belanja pemeliharaan (retensi) yang tidak direalisasikan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.

14. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas pada Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tahun 2024 Pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri, sedangkan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Aset Daerah menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) dan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP) untuk pengelolaan persediannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   - Pendapatan Daerah Rp 2.924.700.667.833,92
   - Belanja Daerah Rp 2.997.766.952.106,00
   - Surplus / Defisit Rp (73.066.284.272,08)
   - Pembiayaan Netto Rp 118.633.591.364,00
   - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 45.567.307.091,92
2. Laporan Operasional (LO)
   - Pendapatan-LO Rp 2.987.000.605.606,03
   - Beban Rp 3.141.331.613.785,67
   - Surplus/Defisit dari Operasi-LO Rp (154.331.008.179,64)
   - Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO Rp (4.526.120.037,44)

- Surplus/Defisit Rp (158.857.128.217,08)

3. Neraca
   - Aset Rp 4.164.119.904.404,83
   - Kewajiban Rp 46.401.638.356,05
   - Ekuitas Rp 4.117.718.266.048,78
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   - Ekuitas Awal Rp 4.498.806.391.706,13
   - Surplus / Defisit (LO) Rp (158.857.128.217,08)
   - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Rp (222.230.997.440,28)
   - Ekuitas Akhir Rp 4.117.718.266.048,78
5. Laporan Arus Kas (LAK)
   - Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp 167.888.739.911,92
   - Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Rp (188.410.233.319,00)
   - Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
   - Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp 0,00
   - Penurunan Kas Rp (20.521.493.407,08)
   - Saldo Awal Kas di BUD Rp 49.964.716.165,00
   - Saldo Akhir Kas di BUD Rp 29.443.222.757,92
   - Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
   - Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 93.555.000,00
   - Saldo Akhir Kas di Kas BLUD Rp 12.183.369.009,00
   - Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS Rp 11.278.386,20
   - Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas Rp 3.835.881.939,00
   - Saldo Akhir Kas Rp 45.567.307.092,12
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
   - Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 74.300.954.022,00
   - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 74.322.091.364,00
   - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp 45.567.307.091,92
   - Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 21.137.342,00

- Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 45.567.307.091,92

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penjelasan secara rinci dari masing–masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan jenis laporannya sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.924.700.667.833,92 atau 98,21% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.977.907.290.281,00, mengalami kenaikan sebesar Rp242.694.923.496,92 atau 9,05% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.682.005.744.337,00. Rincian dari masing–masing pos Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**474.102.508.196,00**	**417.281.984.162,92**	**88,02**	**434.292.734.733,00**
	Pajak Daerah	197.100.000.000,00	146.344.492.995,00	74,25	169.434.953.282,00
	Retribusi Daerah	258.211.176.332,00	250.029.934.895,00	96,83	16.650.117.972,00
	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.255.719.809,00	6.012.475.617,00	96,11	6.383.013.937,00
	Lain-Lain PAD Yang Sah	12.535.612.055,00	14.895.080.655,92	118,82	241.824.649.542,00
2	**Pendapatan Transfer**	**2.480.156.217.085,00**	**2.482.549.777.816,00**	**100,10**	**2.229.554.953.182,00**
	Transfer Pemerintah Pusat	2.273.004.698.494,00	2.273.013.906.176,00	100,00	2.026.231.093.778,00
	Transfer Pemerintah Antar Daerah	207.151.518.591,00	209.535.871.640,00	101,15	203.323.859.404,00
3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**23.648.565.000,00**	**24.868.905.855,00**	**105,16**	**18.158.056.422,00**
	PendapatanHibah	23.648.565.000,00	24.760.061.697,00	104,70	18.147.038.422,00

PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	108.844.158,00	0,00	11.018.000,00
	JUMLAH	**2.977.907.290.281,00**	**2.924.700.667.833,92**	**98,21**	**2.682.005.744.337,00**

Dari tabel realisasi pendapatan diatas terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana-dana transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer dari Pemerintah Provinsi yang menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian daerah untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 yang telah diterima di rekening Kas Daerah sebesar Rp417.281.984.162,92 atau 88,02% dari yang ditargetkan sebesar Rp474.102.508.196,00 dengan rincian dapat dilihat padaTabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	197.100.000.000,00	146.344.492.995,00	74,25	169.434.953.282,00
2	Retribusi Daerah	258.211.176.332,00	250.029.934.895,00	96,83	16.650.117.972,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.255.719.809,00	6.012.475.617,00	96,11	6.383.013.937,00
4	Lain -Lain PAD yang Sah	12.535.612.055,00	14.895.080.655,92	118,82	241.824.649.542,00
JUMLAH		**474.102.508.196,00**	**417.281.984.162,92**	88,02	**434.292.734.733,00**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp417.281.984.162,92 jika dibandingkan dengan

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp434.292.734.733,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.010.750.570,08 atau 3.92%.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, bahwa yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Daerah yang dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp146.344.492.995,00 atau 74,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp197.100.000.000,00 Rincian target dan realisasi dari Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	687.835.037,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	8.401.999.663,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	369.227.843,00
4	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.363.503.264,00	104,88	1.216.118.514,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	31.952.168.837,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.140.559.583,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	847.313.631,00	84,73	921.906.922,00

PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Pajak Sarang Burung Walet	27.000.000,00	13.830.000,00	51,22	27.345.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.338.000.000,00	32.935.558.261,00	79,67	42.386.830.183,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	44.220.000.000,00	32.498.044.361,00	73,49	32.203.392.268,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	66.500.000.000,00	31.492.119.253,00	47,36	50.127.569.432,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT],	42.715.000.000,00	47.194.124.225,00	110,49	0,00
JUMLAH		**197.100.000.000,00**	**146.344.492.995,00**	**74,25**	**169.434.953.282,00**

Berdasarkan tabel Pajak Daerah di atas terlihat bahwa realisasi Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 berada dibawah target pendapatan yang ditetapkan. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.344.492.995,00 atau 74,25% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp169.434.953.282,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.090.460.287,00 atau 13,63%.

Rincian dari pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp1.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.363.503.264,00 atau 104,88%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.216.118.514,00 mengalami kenaikan sebesar Rp147.384.750,00 atau 12,12%, tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat penyesuaian nilai penghitungan pada penetapan nilai sewa reklame serta terdapat tambahan wajib pajak baru berdasarkan hasil ekstensifikasi potensi pada wilayah;
2) Pajak Air Tanah yaitu dari Pajak Air Bawah Tanah ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp847.313.631,00 atau 84,73%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp921.906.922,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.593.291,00 atau 8,09% dikarenakan wajib pajak tidak menggunakan meteran pada saat penggunaan air tanah;

3) Pajak Sarang Burung Walet dan sejenisnya ditargetkan sebesar Rp27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.830.000,00 atau 51,22%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.345.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.513.000,00 atau 49,42%, penurunan ini dikarenakan terdapat sejumlah Wajib Pajak Pemanfaatan Sarang Burung Walet yang tidak berproduksi/gagal panen;
4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp41.338.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.935.558.261,00 atau 79,67%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.386.830.183,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.451.271.922,00 atau 22,30%, penurunan ini dikarenakan menurunnya produksi dari beberapa Wajib Pajak sebagai akibat dari mesin produksi yang rusak;
5) PBB–P2 ditargetkan sebesar Rp44.220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.498.044.361,00 atau 73,49%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.203.392.268,00 mengalami kenaikan sebesar Rp294.652.093,00 atau 0,91%, tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan penundaan pembayaran dari beberapa Wajib Pajak Potensial dan Prioritas;
6) BPHTB ditargetkan sebesar Rp66.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.492.119.253,00 atau 47,36%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.127.569.432,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.635.450.179,00 atau 37,18%, tidak tercapainya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dikarenakan terdapat penyesuaian NOPPTKP sebesar Rp80.000.000,00 berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penurunan kegiatan transaksi jual beli tanah/rumah pada kawasan perumahan dan hunian yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya pada Kawasan Citra Maja Raya;
7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ditargetkan sebesar Rp42.715.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.194.124.225,00 atau

110,49%, tercapai melebihi target yang sudah ditetapkan terdiri dari:

a) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran ditargetkan sebesar Rp8.400.000.000,00 trealisasi sebesar Rp8.936.938.974,00 atau 106,39%, tercapainya realisasi melebihi target dikarenakan terdapat penambahan Wajib Pajak baru berdasarkan hasil ekstensifikasi potensi serta berdasarkan kinerja penagihan piutang pajak daerah Tahun 2024;
b) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri ditargetkan sebesar Rp32.500.000.000,00 trealisasi sebesar Rp36.822.065.298,00. atau 113,30%, tercapainya realisasi melebihi target dikarenakan terdapat peningkatan realisasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan atas dampak peningkatan tarif penggunaan listrik serta peningkatan penggunaan tenaga listrik dari sektor bisnis di wilayah Kabupaten Lebak;
c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hotel ditargetkan sebesar Rp615.000.000,00 terealisasi sebesar Rp529.341.554,00 atau 86,07%, tidak tercapai realisasi sesuai target dikarenakan penurunan jumlah wisatawan dan kurang kesadaran wajib pakak membayar pajak;
d) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp643.813.212,00 atau 80,48%, tidak tercapai realisasi sesuai target dikarenakan terdapat penyesuaian tarif (turun) terhadap pengenaan pajak sebagaimana pengaturan Undang-Undang 1 Tahun Tentang 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas penggunaan Jasa Parkir
e) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp261.965.187,00 atau 65,49%, tidak tercapai realisasi sesuai target dikarenakan terdapat penyesuaian tarif (turun) terhadap pengenaan pajak sebagaimana pengaturan Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas penggunaan Jasa Hiburan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Daerah adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp250.029.934.895,00 atau 96,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp258.211.176.332,00 jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.650.117.972,00 mengalami kenaikan sebesar Rp233.379.816.923,00 atau 1.401,67%., kenaikan tersebut dikarenakan pendapatan BLUD menjadi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4
RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Jasa Umum**		**245.076.617.467,00**	**239.760.501.027,00**	**97,83**	**7.003.958.577,00**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	236.110.306.582,00	231.413.671.283,00	98,01	465.309.500,00
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.068.820.000,00	1.192.423.100,00	111,56	956.997.002,00
	c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.317.659.000,00	958.932.644,00	72,78	397.029.000,00
	d	Retribusi Pelayanan Pasar	6.547.831.885,00	6.154.174.000,00	93,99	3.418.710.495,00
	e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	801.621.080,00
	f	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	32.000.000,00	41.300.000,00	129,06	21.900.000,00
	g	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	93.511.500,00
	h	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	0,00	0,00	0,00	848.880.000,00

RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
		Menara Telekomunikasi				
2	**Retribusi Jasa Usaha**		**7.564.558.865,00**	**6.377.877.724,00**	**84,31**	**5.121.418.149,00**
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.281.723.100,00	2.324.209.108,00	101,86	3.123.884.876,00
	b	Retribusi Tempat Pelelangan	1.693.750.000,00	1.704.766.283,00	100,65	1.196.641.270,00
	c	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	315.811.003,00
	d	Retribusi Rumah Potong Hewan	11.500.000,00	11.510.000,00	100,09	10.100.000,00
	e	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.364.333.265,00	1.016.403.500,00	42,99	0,00
	f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	693.107.500,00	771.248.833,00	111,27	309.536.000,00
	g	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	520.145.000,00	549.740.000,00	105,69	165.445.000,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**5.570.000.000,00**	**3.891.556.144,00**	**69,87**	**4.524.741.246,00**
	a	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	565.081.000,00
	c	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	2.983.013.344,00	59,66	3.959.660.246,00
	d	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.000.000,00	908.542.800,00	159,39	0,00
	JUMLAH		**258.211.176.332,00**	**250.029.943.895,00**	**96,83**	**16.650.117.972,00**

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun Anggaran 2024, rekening objek retribusi tidak ada yang melebihi target yang ditetapkan. Secara terinci penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp245.076.617.467,00 terealisasi sebesar Rp239.760.501.027,00 atau 96,83%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.003.958.577,00 mengalami kenaikan sebesar Rp232.756.542.450,00 atau 3.323,21%. Rincian

anggaran dan realisasi dari Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5
RETRIBUSI JASA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**		**236.110.306.582,00**	**231.413.671.283,00**	**98,01**	**465.309.500,00**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	81.660.306.582,00	76.514.940.683,00	93,7	19.899.500,00
	b	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	154.000.000.000,00	154.239.759.600,00	100,16	0,00
	c	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	450.000.000,00	658.971.000,00	146,44	445.410.000,00
2	**Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**		**1.068.820.000,00**	**1.192.423.100,00**	**111,56**	**956.997,002,00**
	a	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.068.820.000,00	1.192.423.100,00	111,56	956.997,002,00
3	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**		**1.317.659.000,00**	**958.932.644,00**	**72,78**	**397.029,000,00**
	a	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.317.659.000,00	958.932.644,00	72.78	397.029,000,00
4	**Retribusi Pelayanan Pasar**		**6.547.831.885,00**	**6.154.174.000,00**	**93,99**	**3.418.710.495,00**
	a	Retribusi Pelataran	3.998.402.135,00	4.047.807.500,00	101,24	1.305.698.495,00
	b	Retribusi Los	1.001.759.750,00	869.362.000,00	86,78	936.034.000,00
	c	Retribusi Kios	1.547.670.000,00	1.237.004.500,00	79,93	1.176.978.000,00
5	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	801.621.080,00
	a	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	801.621.080,00
6	**Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus**		**32.000.000,00**	**41.300.000,00**	**129,06**	**21.900.000,00**
	a	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	32.000.000,00	41.300.000,00	129,06	21.900.000,00
7	**Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.511.500,00**
	a	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	93.511.500,00

RETRIBUSI JASA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	848.880.000,00
	a Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	848.880.000,00
	JUMLAH	**245.076.617.467,00**	**239.760.501.027,00**	**97,83**	**7.003.958.577,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah, ditargetkan sebesar Rp236.110.306.582,00 terealisasi sebesar Rp231.413.671.283,00 atau 98,01%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp465.309.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.948.361.783,00 atau 49.633,28%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebelumnya dikelompokkan pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi pendapatan Retribusi. Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dianggarkan sebesar Rp81.660.306.582,00 terealisasi sebesar Rp76.514.940.683,00 atau 93,70%, rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Rangkasbitung	3.035.899.422,00	2.851.329.310,00	93,92	2.424.751.575,00
2	Puskesmas Kalanganyar	1.736.157.157,00	1.464.894.256,00	84,38	1.546.172.201,00
3	Puskesmas Mekarsari	1.118.305.000,00	1.201.675.160,00	107,46	762.341.104,00
4	Puskesmas Kolelet	733.455.920,00	792.744.765,00	108,08	823.091.508,00
5	Puskesmas Cibadak	1.649.259.563,00	1.621.516.156,00	98,32	1.676.482.481,00
6	Puskesmas Mandala	1.225.512.000,00	1.366.848.909,00	111,53	1.249.956.601,00
7	Puskesmas Warunggunung	2.792.022.663,00	2.532.330.240,00	90,70	2.277.027.872,00

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
8	Puskesmas Baros	1.171.618.582,00	1.212.801.012,00	103,52	1.075.389.031,00
9	Puskesmas Cikulur	2.287.300.600,00	2.108.718.909,00	92,19	1.864.688.850,00
10	Puskesmas Pamandegan	1.640.197.344,00	1.682.631.909,00	102,59	1.418.439.856,00
11	Puskesmas Cimarga	2.235.885.011,00	2.154.685.065,00	96,37	2.151.946.154,00
12	Puskesmas Sarageni	931.785.885,00	880.879.447,00	94,54	829.996.022,00
13	Puskesmas Maja	3.760.019.258,00	3.689.177.177,00	98,12	3.573.938.521,00
14	Puskesmas Curugbitung	2.763.941.000,00	2.776.982.515,00	100,47	2.428.676.943,00
15	Puskesmas Leuwidamar	1.489.767.810,00	1.506.111.715,00	101,10	1.487.638.449,00
16	Puskesmas Pajagan	1.210.165.000,00	1.255.838.810,00	103,77	1.277.004.579,00
17	Puskesmas Sajira	1.765.563.635,00	1.743.809.460,00	98,77	1.642.869.431,00
18	Puskesmas Cisimeut	1.294.576.247,00	1.123.112.137,00	86,76	1.131.741.675,00
19	Puskesmas Cipanas	4.088.601.011,00	4.023.553.636,00	98,41	3.651.589.943,00
20	Puskesmas Lebakgedong	1.091.648.413,00	925.627.618,00	84,79	809.488.632,00
21	Puskesmas Muncang	1.984.895.600,00	1.894.898.756,00	95,47	1.909.130.875,00
22	Puskesmas Bojongmanik	1.707.705.800,00	1.792.310.126,00	104,95	1.497.699.452,00
23	Puskesmas Cirinten	1.838.484.750,00	1.879.554.905,00	102,23	1.828.642.997,00
24	Puskesmas Sobang	1.417.637.400,00	1.447.286.469,00	102,09	1.387.344.195,00
25	Puskesmas Cileles	1.463.779.191,00	1.336.598.406,00	91,31	1.264.500.340,00
26	Puskesmas Prabugantungan	1.456.887.500,00	1.522.123.443,00	104,48	1.254.319.503,00
27	Puskesmas Gunungkencana	1.838.482.500,00	1.715.292.945,00	93,30	1.867.001.726,00
28	Puskesmas Banjarsari	2.452.511.500,00	2.393.627.792,00	97,60	2.095.523.149,00
29	Puskesmas Bojongjuruh	1.202.929.000,00	1.171.138.059,00	97,36	1.138.111.629,00
30	Puskesmas Cijaku	2.355.125.500,00	2.088.159.049,00	88,66	1.983.248.580,00
31	Puskesmas Cigemblong	1.935.105.453,00	1.083.941.077,00	56,01	1.014.772.884,00
32	Puskesmas Malingping	3.572.500.000,00	2.772.950.671,00	77,62	2.519.440.627,00
33	Puskesmas Binuangeun	2.501.851.402,00	2.295.316.747,00	91,74	1.997.869.661,00
34	Puskesmas Parungsari	1.190.000.000,00	1.072.707.533,00	90,14	921.691.422,00
35	Puskesmas Panggarangan	2.458.131.512,00	2.180.812.580,00	88,72	2.145.514.222,00
36	Puskesmas Cihara	1.995.408.980,00	1.967.554.680,00	98,60	1.637.666.384,00
37	Puskesmas Bayah	3.481.332.500,00	3.421.051.619,00	98,27	2.695.048.703,00
38	Puskesmas Cilograng	2.160.268.736,00	1.987.004.200,00	91,98	1.629.922.438,00
39	Puskesmas Cibeber	1.832.984.260,00	1.844.533.609,00	100,63	1.497.643.310,00
40	Puskesmas Cisungsang	947.953.947,00	997.790.795,00	105,26	1.014.088.168,00
41	Puskesmas Citorek	1.099.777.700,00	904.132.712,00	82,21	714.813.191,00
42	Puskesmas Cipendeuy	1.431.575.000,00	1.199.952.019,00	83,82	966.083.335,00
43	Puskesmas Gunungkendeng	1.313.296.830,00	630.934.285,00	48,04	0,00
JUMLAH		**81.660.306.582,00**	**76.514.940.683,00**	**93,70**	**69.083.308.219,00**

2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditargetkan sebesar Rp154.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp154.239.759.600,00 atau 100,16%;
3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp658.971.000,00 atau 146,44%;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar Rp1.068.820.000,00 terealisasi sebesar Rp1.192.423.100,00 atau 111,56%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp956.997.002,00 mengalami kenaikan sebesar Rp235.426.098,00 atau 24,60%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan realisasi melebihi target dikarenakan adanya wajib retribusi baru, penambahan MOU, dan temuan BPK RI terkait kekurangan pembayaran pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Tahun 2022 dan 2023;

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ditargetkan sebesar Rp1.317.659.000,00 terealisasi sebesar Rp958.932.644,00 atau 72,78%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp397.029.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp561.903.644,00 atau 143,53%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikarenakan bertambahnya potensi kendaraan dan para pengelola parkir melaksanakan pengawasan secara rutin sehingga bisa tercapainya kenaikan realisasi parkir tepi jalan umum, namun realisasi tidak sesuai dengan target dikarenakan Jumlah kendaraan yg mengisi SRP di lokasi parkir berkurang, seperti di lokasi parkir Pasar Gajrug, Terminal Bayah, Terminal Sampay, Pasar Malingping dan Pasar Binuangeun dan adanya kegiatan peradatan seperti Bulan Kawaluh Adat Baduy di Terminal Ciboleger yang berlangsung selama 3 bulan;

d. Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ditargetkan sebesar Rp6.547.831.885,00 terealisasi sebesar Rp6.154.174.000,00 atau 93,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp3.418.710.495,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.735.463.505,00 atau 80,01%. Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari:

1) Pelataran/Tampakan ditargetkan sebesar Rp3.998.402.135,00 terealisasi sebesar sebesar Rp4.047.807.500,00 atau 101,24%;
2) Los ditargetkan sebesar Rp1.001.759.750,00 terealisasi sebesar Rp869.362.000,00 atau 86,78%;
3) Kios ditargetkan sebesar Rp1.547.670.000,00 terealisasi sebesar Rp1.237.004.500,00 atau 79,93%.

e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, ditargetkan sebesar Rp32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp41.300.000,00 atau 129,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.400.000,00 atau 88,58%, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan armada penyedotan kakus sebanyak 2 mobil;

2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp7.564.558.865,00 terealisasi sebesar Rp6.377.877.724,00 atau 84,31%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.121.418.149,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.256.459.575,00 atau 24,53%. Rincian target dan realisasi dari Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat padaTabel 5.7 berikut ini:

Tabel 5.7
RETRIBUSI JASA USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**		**2.281.723.100,00**	**2.324.209.108,00**	**101,86**	**3.123.884.876,00**
	a	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.203.672.100,00	1.039.642.256,00	86,37	741.210.700,00
	b	Retribusi Penyewaan Tanah	69.550.000,00	69.550.000,00	100,00	12.875.000,00
	c	Retribusi Penyewaan Bangunan	397.201.000,00	308.099.812,00	77,57	200.474.580,00
	d	Retribusi Pemakaian Laboratorium	311.300.000,00	603.807.040,00	193,96	1,669.114.596,00
	e	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	303.110.000,00	101,04	500.210.000,00
2	**Retribusi Tempat Pelelangan**		**1.693.750.000,00**	**1.704.766.283,00**	**100,65**	**1.196.641.270,00**

RETRIBUSI JASA USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
	a	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.693.750.000,00	1.704.766.283,00	100,65	1.196.641.270,00
3	**Retribusi Terminal**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.811.003,00**
	a	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	315.811.003,00
4		**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**2.364.333.265,00**	**1.016.403.500,00**	**42,99**	**0,00**
	a	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.364.333.265,00	1.016.403.500,00	42,99	0,00
4	**Retribusi Rumah Potong Hewan**		**11.500.000,00**	**11.510.000,00**	**100,09**	**10.100.000,00**
	a	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	11.500.000,00	11.510.000,00	100,09	10,100,000,00
5	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**		**693.107.500,00**	**771.248.833,00**	**111,27**	**309.536.000,00**
	a	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	693.107.500,00	771.248.833,00	111,27	309,536,000,00
6	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**		**520.145.000,00**	**549.740.000,00**	**105,69**	**165.445.000,00**
	a	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	272.850.000,00	276.470.000,00	101,33	64.865.000,00
	b	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.800.000,00	104.660.000,00	103,83	100.580.000,00
	c	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	146.495.000,00	168.610.000,00	115,10	0,00
	JUMLAH		**7.564.558.865,00**	**6.377.877.724,00**	**84,31**	**5.121.418.149,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.281.723.100,00 terealisasi sebesar Rp2.324.209.108,00 atau 101,86%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.123.884.876,00 mengalami penurunan sebesar Rp799.675.768,00 atau 25,60% Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp1.203.672.100,00 terealisasi sebesar Rp1.039.642.256,00 atau 86,37%. merupakan Sewa Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh;
   a) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp55.240.000,00 terealisasi sebesar Rp55.240.000,00 atau 100,00% adalah sewa kios di GOR Pasir Ona Rangkasbitung;
   b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp1.148.432.100,00 terealisasi sebesar Rp984.402.256,00 atau 85,72% adalah sewa kios pasar sekabupaten Lebak;
2) Retribusi Penyewaan Tanah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebesar Rp69.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.550.000,00 atau 100%;
3) Retribusi Penyewaan Bangunan ditargetkan sebesar Rp397.201.000,00 terealisasi sebesar Rp308.099.812,00 atau 77,57% dan terdiri dari:
   a) Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu Sewa Rumah Susun ditargetkan sebesar Rp125.001.000,00 terealisasi sebesar Rp133.499.812,00 atau 106,80%;
   b) Sewa Tanah dan Bangunan untuk Sewa Kios di Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp272.200.000,00 terealisasi sebesar Rp174.600.000,00 atau 64,14%;
4) Retribusi Pemakaian Laboratorium ditargetkan sebesar Rp311.300.000,00 terealisasi sebesar Rp603.807.040,00 atau 193,96%, dan berasal dari laboratorium yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Quality Control yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR);
5) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp303.110.000,00 atau 101,04% dan berasal dari UPT Alat Berat, dan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp500.210.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp197.100.000,00 atau 39,40%. Kenaikan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dikarenakan

Tahun anggaran 2023 ada sewa dari pekerjaan APBD Poros desa.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan ditargetkan sebesar Rp1.693.750.000,00 terealisasi sebesar Rp1.704.766.283,00 atau 100,65%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.196.641.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp508.125.013,00 atau 42,46%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retrubusi Daerah, terdiri dari:
   1) Tempat pelelangan ikan Binuangeun dianggarkan sebesar Rp1.667.450.000,00 terealisasi sebesar Rp1.681.124.283,00 atau 100,82%;
   2) Tempat pelelangan ikan Tanjung Panto dianggarkan sebesar Rp800.000,00 terealisasi sebesar Rp650.000,00 atau 81,25%;
   3) Tempat pelelangan ikan Sukahujan dianggarkan sebesar Rp1.900.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000,00 atau 5,26%;
   4) Tempat pelelangan ikan Cipunaga dianggarkan sebesar Rp1.400.000,00 terealisasi sebesar Rp250.000,00 atau 17,86%;
   5) Tempat pelelangan ikan Panyaungan dianggarkan sebesar Rp1.900.000,00 terealisasi sebesar Rp1.900.000,00 atau 100,00%;
   6) Tempat pelelangan ikan Situregen dianggarkan sebesar Rp1.400.000,00 terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau 35,71%;
   7) Tempat pelelangan ikan Bayah dianggarkan sebesar Rp11.200.000,00 terealisasi sebesar Rp17.342.000,00 atau 154,84%;
   8) Tempat pelelangan ikan Pulomanuk dianggarkan sebesar Rp1.900.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000,00 atau 5,26%;
   9) Tempat pelelangan ikan Sawarna dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 tidak terealisasi;
   10) Tempat pelelangan ikan Citarate dianggarkan sebesar Rp1.900.000,00 terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 94,74%;
   11) Tempat pelelangan ikan Cibareno dianggarkan sebesar Rp1.900.000, terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 52,63%;

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp2.364.333.265,00 terealisasi sebesar Rp1.016.403.500,00 atau 42,99%. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan adanya peralihan penumpang Kereta Api yang sudah tidak melintasi area Pasar Rangkasbitung sejak pertengahan Bulan September dan adanya tarif progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retrubusi Daerah. Dampak Penurunan dari Penitipan Kendaraan yaitu dari pemasangan Gate Parkir di area Pasar Rangkasbitung Masyarakat dan Pedagang banyak memarkirkan kendaraannya di luar area Pasar Rangkasbitung;

d. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas Peternakan, ditargetkan sebesar Rp11.500.000,00 terealisasi sebesar Rp11.510.000,00 atau 100,09%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.100.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.410.000,00 atau 13,96%. Kenaikan tersebut dikarenakan menurunnya populasi kerbau sehingga menurunnya ternak kerbau yang dipotong dan harga daging segar yang dipotong di Rumah Potong Hewan sangat tinggi sehingga Masyarakat beralih ke komoditas daging beku;

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp693.107.500,00 terealisasi sebesar Rp771.248.833,00 atau 111,27%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp309.536.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp461.712.833,00 atau 149,16%. Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut:

   1) Retribusi Tempat Rekreasi dikelola oleh Dinas Pariwisata ditargetkan sebesar Rp537.767.500,00 terealisasi sebesar Rp594.379.833,00 atau 110,51% terdiri dari:

      a) Pemandian Air Panas ditargetkan sebesar Rp74.500.000,00 terealisasi sebesar Rp83.894.000,00 atau 112,61%;

b) Pantai Bagedur ditargetkan sebesar Rp115.415.000,00 terealisasi sebesar Rp95.775.000,00 atau 82,98%;
c) Pantai Sawarna ditargetkan sebesar Rp317.852.500,00 terealisasi sebesar Rp372.475.833,00 atau 117,19%;
d) Museum Multatuli ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp42.235.000,00 atau 140,78%.

2) Pelayanan Tempat Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, ditargetkan sebesar Rp155.340.000,00 terealisasi sebesar Rp176.869.000,00 atau 113,86% yaitu:
a) Tenis Lapang ditargetkan sebesar Rp5.740.000,00 terealisasi sebesar Rp5.740.000,00 atau 100,00%;
b) Stadion Uwes Qorny ditargetkan sebesar Rp17.200.000,00 terealisasi sebesar Rp33.853.000,00 atau 196,82%;
c) GOR Kartanagara/Jayabaya ditargetkan sebesar Rp20.200.000,00 terealisasi sebesar Rp20.388.000,00 atau 100,93%;
d) GOR H.Soepardi/GGM Ona ditargetkan sebesar Rp90.000.000,00 terealisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 100%;
e) GGM (bilyard) ditargetkan sebesar Rp7.200.000,00 terealisasi sebesar Rp7.200.000,00 atau 100%;
f) Area lomba burung ditargetkan sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100%;
g) Padepokan ditargetkan sebesar Rp3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.688.000,00 atau 256,27%;
h) Panggung Revolusi Mental ditargetkan sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 100%;

f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp520.145.000,00 terealisasi sebesar Rp549.740.000,00 atau 105.69%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp165.445.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp384.295.000,00 atau 232,28%. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah terdiri dari:

1) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman dikelola oleh Dinas Pertanian ditargetkan sebesar Rp272.850.000,00 terealisasi sebesar Rp276.470.000,00 atau 101,33% dari Balai Benih Bibit Tanaman Bojong Leles Cibadak;
2) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ditargetkan sebesar Rp146.495.000,00 terealisasi sebesar Rp168.610.000,00 atau 115,10%
3) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dikelola oleh Dinas Perikanan ditargetkan sebesar Rp100.800.000,00 terealisasi sebesar Rp104.660.000,00 atau 103,83% dan terdiri dari:
   a) Retribusi Balai Benih Ikan Cikoncang ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp53.650.000,00 atau 107,30%;
   b) Retribusi Balai Benih Ikan Cipanas ditargetkan sebesar Rp18.800.000,00 terealisasi sebesar Rp14.500.000,00 atau 77,13%;
   c) Retribusi Balai Benih Ikan Cipanas ditargetkan sebesar Rp32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.510.000,00 atau 114,09%

3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp5.570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.891.556.144,00 atau 69,87%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.524.741.246,00 mengalami penurunan sebesar Rp633.185.102,00 atau 13,99%. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,081,000.00**
	a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	565,081,000.00
2	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**5.000.000.000,00**	**2.983.013.344,00**	**59,66**	**3.959.660.246,00**
	a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	2.983.013.344,00	59,66	3.959.660.246,00

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
3	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**570.000.000,00**	**908.542.800,00**	**159,39**	**0,00**
	a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.000.000,00	908.542.800,00	159,39	0,00
	JUMLAH	**5.570.000.000,00**	**3.891.556.144,00**	**69,87**	**4.524.741.246,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.983.013.344,00 atau 59,66%. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan sedikitnya jumlah pemohon.
b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dikelola Dinas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar Rp570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp908.542.800,00 atau 159,39%. Realisasi mencapai target dikarenakan adanya kegiatan pembinaan ke beberapa perusahaan pengguna TKA dan meningkatnya perpanjangan kontrak TKA.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp6.255.719.809,00 terealisasi sebesar Rp6.012.475.617,00 atau 96,11%, jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.383.013.937,00 mengalami penurunan sebesar Rp370.538.320,00 atau 5.81%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Deviden dari Bank BJB sebesar Rp3.820.430.005,00 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada

Tanggal 25 Mei 2023 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada PT.BPR Lebak Sejahtera berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 5 Maret 2024 sebesar Rp1.568.278.125,00 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT.LKM berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 14 Juni 2024 sebesar Rp623.767.487,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada PD Lebak Niaga sampai dengan Tahun 2024 belum memberikan bagian labanya kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dikarenakan PD Lebak Niaga masih mengalami

5.1.1.1.4 Lain–Lain PAD Yang Sah

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan dari Lain–Lain PAD Yang Sah Pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp12.535.612.055,00 terealisasi sebesar Rp14.895.080.655,92 atau 118,28%, jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp241.824.649.542,00 mengalami penurunan sebesar Rp226.929.568.886,08 atau 93,84%. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9
LAIN–LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**750.000.000,00**	**1.409.175.780,00**	**187,89**	**1.610.943.434,00**
	a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.126.972.500,00	0,00	1.264.992.434,00
	b	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	750.000.000,00	244.891.280,00	32,65	325.376.000,00
	c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	37.312.000,00	0,00	20.575.000,00
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**1.776.065.235,00**	**1.585.596.025,00**	**89,28**	**109.812.500,00**
	a	Hasil Sewa BMD	1.776.065.235,00	1.585.596.025,00	89,28	0,00
	b	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0.00	0,00	0,00	0,00
3	**Jasa Giro**		**3.306.702.212,00**	**1.845.668.848,95**	**55,82**	**1.481.355.058,00**
	a	Jasa Giro pada Kas Daerah	900.000.00.00	1.707.451.540,95	189,72	1.377.151.328,00

LAIN–LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	b	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	2.406.702.212,00	28.820.492,00	1,2	42.839.701,00
	c	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	42.029.049,00	0,00	61.364.029,00
	d	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	67.367.767,00	0,00	0,00
4	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**		0,00	**2.961.300,00**	**0,00**	**0,00**
	a	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	2.961.300,00	0,00	0,00
5	**Pendapatan Bunga**		**100.000.000,00**	**994.882.233,47**	**994,88**	**3.798.191.007,00**
	a	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00	994.882.233,47	994,88	3.798.191.007,00
6	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**		**71.433.834,00**	**145.895.006,00**	**204,24**	**1.748.448,00**
	a	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	71.433.834,00	145.895.006,00	204,24	1.748.448,00
7	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**		**4.223.467.480,00**	**4.260.570.480,00**	**100,88**	**7.000.000,00**
	a	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.223.467.480,00	4.260.570.480,00	100,88	7.000.000,00
8	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**		**393.179.609,00**	**766.373.458,00**	**194,92**	**701.073.353,00**
	a	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.838.820,00	4.448.347,00	156,7	18.280.063,00
	b	Pendapatan Denda Pajak Restoran	24.150.365,00	36.989.020,00	153,16	37.029.860,00
	c	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	463.248,00	951.875,00	205,48	905.778,00
	d	Pendapatan Denda Pajak Parkir	43.906,00	59.306,00	135,07	587.206,00
	e	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.149.889,00	5.115.105,00	237,92	2.139.598,00
	f	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	787.972,00	1.135.813,00	144,14	1.474.067,00
	g	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	417.000,00
	h	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.009.785,00	30.744.077,00	128,05	43.000.108,00
	i	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	338.735.624,00	686.929.915,00	202,79	597.239.673,00

LAIN–LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
9	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**		**12.199.204,00**	**12.668.641,00**	**103,85**	**3.235.561,00**
	a	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	63.850,00	45.850,00	71,81	70.120,00
	b	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	596.566,00	1.084.003,00	181,71	1.953.619,00
	c	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	11.538.788,00	11.538.788,00	100	1.211.822,00
10	**Pendapatan dari Pengembalian**		**1.902.564.481,00**	**3.871.288.883,50**	**203,48**	**3.570.591.902,00**
	a	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	441.394.444,00
	b	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.217.720.000,00	1.257.258.020,00	103,25	2.965.812.800,00
	c	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	194.026.198,00	363.552.905,00	187,37	0,00
	d	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja PNS	0,00	24.349.120,00	0,00	0,00
	e	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.183.353.153,50	0,00	7.930.000,00
	f	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	785.000,00	15.249.000,00	1.942,55	30.462.246,00
	g	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	294.710.022,00	305.071.330,00	103.52	57.191.592,00
	h	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	83.908.984,00	0,00	14.452.362,00
	i	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	67.850.000,00	0,00	2.000.000,00

LAIN–LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	j	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	2.721.375,00	2.721.375,00	100,00	0,00
	k	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	6.901.000,00	0,00	3.500.000,00
	l	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.000.000,00	3.865.000,00	193,25	1.000.000,00
	m	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Personal Komputer	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	n	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	190.601.886,00	348.006.796,00	182,58	26.360.225,00
	o	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	38.516.200,00	0.00	15.235.534,00
	0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	8.253.000,00	0,00	0,00
	q	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	160.833.000,00	0,00	5.204.000,00
11	**Pendapatan BLUD**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.196.251.573,00**
	a	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	230.196.251.573,00
	b	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0.00	0.00	97.973.700.00

LAIN–LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	c	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	0.00	0.00	164.763.150,00
	d	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	0.00	0.00	815.103.612,00
12	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.446.706,00**
	a	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	344.446.706,00
JUMLAH			**12.535.612.055,00**	**14.895.080.655,92**	**118,82**	**241.824.649.542,00**

Pada tabel di atas terlihat pendapatan dari Lain–Lain PAD Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp12.535.612.055,00 terealisasi sebesar Rp14.895.080.655,92 atau 118,82%, mengalami penurunan sebesar Rp226.929.568.886,08 atau 93,84%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp241.824.649.542,00. Secara terinci penerimaan hasil Lain–lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.409.175.780,00 atau 187,89%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.610.943.434,00 mengalami penurunan sebesar Rp201.767.654,00 atau 12,52%, penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 penjualan BMD yang tidak dipisahkan lebih banyak dari Tahun 2024. Dasar penetapan penjualan adalah dari usulan dari Perangkat daerah, kemudian dilakukan penelitian oleh Tim Penelitian Usulan Penjualan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan selanjutnya Barang Milik Daerah yang layak untuk dijual dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, terdiri dari:
   a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tidak ditargetkan dan teralisasi sebesar Rp1.126.972.500,00;

1) Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp98.215.000,00;
2) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan tidak ditargetkan dan teralisasi sebesar Rp37.667.000,00;
3) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp226.394.000,00;
4) Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp600.534.000,00;
5) Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp164.162.500,00;

b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp244.891.280,00 merupakan Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp37.312.000,00 merupakan Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Potong.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp1.776.065.235,00 terealisasi sebesar Rp1.585.596.025,00 merupakan Hasil sewa BMD terdiri dari:
   a. Sewa Tanah Seluas 35.900 m2 oleh PT. Radja Udang Malingping untuk pengembangan budidaya udang vanamei (white shrimp) dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) Tahun di Kecamatan WanasaIam sebesar Rp380.446.000,00;
   b. Sewa Tanah seluas 440 m2 oleh Tati Hartati untuk usaha Toko Sembako dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) Tahun di Kecamaan Cibeber sebesar Rp10.990.000,00;

c. Sewa Tanah seluas 197 m2 oleh Ondry untuk keperluan Usaha Pergudangan/Perparkiran di JI. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp16.955.000,00;
d. Sewa Tanah seluas 2.650 m2 oleh CV. ARGA PRATAMA untuk perparkiran kendaraan roda 4 dan roda 2 adapun jangka waktu sewa adalah selama 5 (lima) Tahun di Kecamatan Maja sebesar Rp1.000.000.025,00;
e. Sewa Tanah Seluas 158 m2 oleh Djayadi Setiadi untuk keperluan Rumah Tinggal di JI. Sunan Kalljaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp16.505.000,00;
f. Sewa Tanah seluas 152 m2 oleh Ondry untuk keperluan Usaha Pergudangan/Perparkiran di JI. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp13.080.000,00;
g. Sewa Tanah seluas 370 m2 oleh Jennny Tanusasmita untuk keperluan Usaha Kios di JI. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp38.645.000,00;
h. Sewa Tanah seluas 120 m2 oleh Iing lvana untuk keperluan Usaha Kios di Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan sebesar Rp12.535.000,00;
i. Sewa Tanah seluas 94 m2 oleh Sam Adhiputera untuk keperluan Usaha Kios di Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp9.820.000,00;
j. Sewa Tanah seluas 78 m2 oleh Aminah untuk keperluan Rumah Tinggal di JI. Sunan Kalijaga Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp5.285.000,00;
k. Sewa Tanah seluas 81 m2 oleh Krisnawaty Sentosa untuk keperluan Rumah Tinggal di JI. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar

Rp5.485.000,00;

l. Sewa Tanah seluas 186 m2 oleh Andry Kusuma untuk keperluan Rumah Tinggal di JI. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp12.595.000,00;

m. Sewa Tanah seluas 156 m2 oleh Manda Nona Kusuma untuk keperluan Rumah Tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp10.565.000,00;

n. Sewa Tanah seluas 165 m2 oleh Anih Fatimah untuk keperluan Rumah Tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp11.170.000,00;

o. Sewa Tanah seluas 209 m2 oleh Shanty untuk keperluan Rumah Tinggal di JI. Sunan kalijaga kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, selama 5 (lima) Tahun sebesar Rp31.520.000,00;

p. Sewa Tanah sebesar Rp10.000.000,00 oleh Burger Bangor;

3. Pendapatan Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp3.306.702.212,00 terealisasi sebesar Rp1.845.668.848,95 atau 55,82%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.481.355.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp364.313.790,95 atau 24,59%, pendapatan Jasa Giro terdiri dari:
   a) Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.707.451.540,95 atau 189,72%;
   b) Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ditargetkan sebesar Rp2.406.702.212,00 terealisasi sebesar Rp28.820.492,00 atau 1,20%;
   c) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp42.029.049,00;
   d) Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp67.367.767,00.
4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp2.961.300,00;

5. Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp994.882.233,47 atau 994,88%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.798.191.007,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.803.308.773,53 atau 73,81%, penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2024 penempatan deposito lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2023.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ditargetkan sebesar Rp71.433.834,00 dan terealisasi sebesar Rp145.895.006,00 atau 204,24%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.748.448,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.146.558,00 atau 8.244,26%;
7. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah ditargetkan sebesar Rp4.223.467.480,00 dan terealisasi sebesar Rp4.260.570.480,00 atau 100,88%;
8. Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp393.179.609,00 terealisasi sebesar Rp766.373.458,00 atau 194,92%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp701.073.353,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.300.105,00 atau 9,31% terdiri dari:
   a) Pendapatan Denda Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp2.838.820,00 dan terealisasi sebesar Rp4.448.347,00 atau 156,70%;
   b) Pendapatan Denda Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp24.150.365,00 terealisasi sebesar Rp36.989.020,00 atau 153,16%;
   c) Pendapatan Denda Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp463.248,00 terealisasi sebesar Rp951.875,00 atau 205,48%;
   d) Pendapatan Denda Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp43.906,00 terealisasi sebesar Rp59.306,00 atau 135,07%;
   e) Pendapatan Denda Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp2.149.889,00 dan terealisasi sebesar Rp5.115.105,00 atau 237,92%;
   f) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp787.972,00 dan terealisasi sebesar Rp1.135.813,00 atau 144,14%;
   g) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp24.009.785,00 dan terealisasi sebesar Rp30.744.077,00 atau 128,05%;

h) Pendapatan Denda PBBP2 ditargetkan sebesar Rp338.735.624,00 dan terealisasi sebesar Rp686.929.915,00 atau 202,79%;

9. Pendapatan Denda Retribusi ditargetkan sebesar Rp12.199.204,00 terealisasi sebesar Rp12.668.641,00 atau 103,85% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.235.561,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.433.080,00 atau 291,54%, terdiri dari:
   a. Pendapatan Denda Restribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp63.850,00 dan terealisasi sebesar Rp45.850,00 atau 71,81%;
   b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp596.566,00 dan terealisasi sebesar Rp1.084.003,00 atau 181,71%;
   c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp11.538.788,00 dan terealisasi sebesar Rp11.538.788,00 atau 100,00%.
10. Pendapatan dari Pengembalian ditargetkan sebesar Rp1.902.564.481,00 terealisasi sebesar Rp3.871.288.883,50 atau 203,48%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp3.570.591.902,00 mengalami kenaikan sebesar Rp300.696.981,50 atau 8,42%, yang terdiri dari:
   a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ditargetkan sebesar Rp194.026.198,00 terealisasi sebesar Rp363.552.905,00 atau 187,37% terdiri dari:
      1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS ditargetkan sebesar Rp194.026.198,00 terealisasi sebesar Rp19.540.620,00 atau 10,07%;
      2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp218.480.555,00;
      3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp125.531.730,00;
   b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas ditargetkan sebesar Rp1.217.720.000,00 terealisasi sebesar Rp1.257.258.020,00 atau 103,25%;

c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp24.349.120,00;
d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp1.183.353.153,50 dengan rincian berikut:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.045.202.596,50;
    2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 135.740.557,00.
    3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.410.000,00.
e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang ditargetkan sebesar Rp785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.249.000,00 atau 1.942,55% terdiri dari:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp11.965.000,00;
    2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak ditargetkan sebesar Rp785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.884.000,00 atau 240,00%;
    3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp1.400.000,00.
f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa ditargetkan sebesar Rp294.710.022,00 dan terealisasi sebesar Rp 305.071.330,00 atau 103,52% terdiri dari:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar

Rp2.000.000,00;

2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp1.000.000,00;
3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp5.169.050,00;
4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik ditargetkan sebesar Rp240.584.566,00 dan terealisasi sebesar Rp243.014.184,00 atau 101,01%;
5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan ditargetkan sebesar Rp54.125.456,00 dan terealisasi sebesar Rp53.888.096,00 atau 99,56%

g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp83.908.984,00 terdiri dari:
1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp6.700.000,00;
2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp13.306.833,00;
3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp47.213.035,00;
4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp16.689.116,00;

h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp67.850.000,00;
i. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Angkutan ditargetkan sebesar Rp2.721.375,00 dan terealisasi sebesar Rp2.721.375,00 atau 100%;
j. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah tangga tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp6.901.000,00;
k. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar ditargetkan sebesar Rp2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.865.000,00 atau 193,25%;
l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Komputer tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp1.600.000,00;
m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung ditargetkan sebesar Rp190.601.886,00 dan terealisasi sebesar Rp348.006.796,00 atau 182,58%, terdiri dari:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp3.000,00 dan terealisasi sebesar Rp117.103.088,00 atau 3.903.436,27%;
    2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp32.964.250,00;
    3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya ditargetkan sebesar Rp190.598.886,00 dan terealisasi sebesar Rp197.939.458,00 atau 103,85%;

n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Jalan dan Jembatan tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp38.516.200,00;
o. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp8.253.000,00;
p. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp160.833.000,00 terdiri dari:
    1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp17.333.000,00;
    2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler tidak ditargetkan dan terealisasi sebesar Rp143.500.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.482.549.777.816,00 atau 100,10% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.480.156.217.085,00, Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.229.554.953.182,00 mengalami kenaikan sebesar Rp252.994.824.634,00 atau 11,35%. Rincian Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10
PENDAPATAN TRANSFER
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(RP)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.273.004.698.494,00	2.273.013.906.176,00	100,00	2.026.231.093.778,00
2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	207.151.518.591,00	209.535.871.640,00	101,15	203.323.859.404,00
JUMLAH		**2.480.156.217.085,00**	**2.482.549.777.816,00**	**100,10**	**2.229.554.953.182,00**

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak adalah sebesar Rp2.273.013.906.176,00 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.273.004.698.494,00, rincian pendapatan transfer pusat dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.11
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO		URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1		2	3	4	6	7
1	**Dana Perimbangan**		**1.897.370.277.494,00**	**1.897.379.485.176,00**	**100,00**	**1.671.591.059.778,00**
	a	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)**	**93.880.685.000,00**	**93.883.081.000,00**	**100,00**	**84.452.937.252,00**
		DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.195.443.000,00	10.629.759.000,00	74,88	16.702.239.232,00
		DBH PPh Pasal 21	66.142.929.000,00	63.374.929.000,00	97,33	53.967.338.125,00
		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPDN	0,00	1.768.000.000,00	0,00	3.166.272.472,00
		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	2.396.000,00	0,00	5.328.621,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.271.526.000,00	10.271.526.000,00	100,00	5.450.214.683,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	96.961.000,00	0,00	877.670.070,00
		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Royalty	1.524.474.000,00	1.427.513.000,00	93,64	1.935.127.906,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	261.759.000,00	261.759.000,00	100,00	430.425.932,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.484.554.000,00	1.484.554.000,00	100,00	1.918.320.211,00
		DBH Sawit	0,00	3.565.684.000,00	0,00	0,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO		URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1		2	3	4	6	7
	b.	**Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1.148.525.644.500,00**	**1.158.314.470.908,00**	**100,85**	**1.068.836.537.620,00**
		Dana Alokasi Umum	827.934.191.500,00	848.101.867.000,00	102,44	1.068.836.537.620,00
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.239.008.000,00	21.860.158.908,00	67,81	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	172.170.323.000,00	172.170.323.000,00	100,00	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	92.534.173.000,00	92.534.173.000,00	100,00	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.647.949.000,00	22.647.949.000,00	100,00	0,00
	c.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**151.442.745.000**	**147.338.695.149,00**	**97,29**	**50.208.365.734,00**
		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	401.307.000,00	389.918.000,00	97,16	1.208.438.575,00
		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	60.960.581.000,00	59.265.595.565,00	97,22	15.571.999.720,00
		DAK Fisik -Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	17.092.512.000,00	16.543.237.700,00	96,79	5.932.757.650,00
		DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	3.051.009.000,00	2.973.401.141,00	97,46	1.330.318.080,00
		DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	0,00	0,00	0,00	1.854.387.444,00
		DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	450.150.000,00
		DAK Fisik - Bidan Pertanian - Penugasan - Pembangunan / Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.314.014.000,00	8.191.891.250,00	98,53	0,00
		DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan	1.147.974.000,00	1.094.638.228,00	95,35	2.604.282.000,00
		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.001.617.000,00	3.360.245.399,00	83,97	0,00
		DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	14.696.725.000,00	14.696.725.000,00	100,00	0,00
		DAK Fisik - Bidang Air Minum - Penugasan	13.210.019.000,00	12.738.260.000,00	96,43	12.855.304.000,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO		URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1		2	3	4	6	7
		DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	8.520.842.000,00	8.520.842.000,00	100,00	6.653.151.000,00
		DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Lingkungan Hidup	1.735.271.000,00	1.675.410.900,00	96,55	1.388.000.000,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.285.032.000,00	2.230.568.002,00	97,62	0,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.025.842.000,00	15.657.961.964,00	97,70	0,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	359.577.265,00
	d	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**503.521.202.994,00**	**497.843.238.119,00**	**98,87**	**468.093.219.172,00**
		DAK Non Fisik-BOS Reguler	175.174.000.000,00	175.157.014.898,00	99,99	173.874.645.104,00
		DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.947.500.000,00	6.947.500.000,00	100,00	8.765.000.000,00
		DAK Non Fisik-TPG PNSD	206.802.453.000,00	206.802.453.000,00	100,00	193.941.183.500,00
		DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.833.350.000,00	8.833.350.000,00	100,00	0,00
		DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.564.900.000,00	10.564.900.000,00	100,00	9.863.757.000,00
		DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	685.140.640,00	685.140.640,00	100,00	687.478.000,00
		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.441.283.700,00	1.511.163.472,00	104,85	1.502.785.000,00
		DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	750.042.660,00	750.042.660,00	100,00	390.023.900,00
		DAK Non Fisik - BOKB – KB	14.856.214.914,00	14.843.250.914,00	99,91	33.371.880.377,00
		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	374.252.304,00	374.980.304,00	100,19	413.312.538,00
		DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	674.188.040,00	676.442.840,00	100,33	718.999.500,00
		DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	415.332.000,00	0,00	1.918.156.603,00
		DAK Non-Fisik-PK2UMK	363.964.450,00	0,00	0,00	0,00
		DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	18.599.400.000,00	18.599.400.000,00	100,00	0,00
		DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	18.570.118.000,00
		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	7.977.463.500,00
		DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	0,00
		DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	8.564.600.000,00	8.382.300.000,00	97,87	0,00
		DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO		URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1		2	3	4	6	7
		DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	14.532.821.286,00	13.242.319.891,00	91,12	0,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	16.098.416.150,00
		DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	381.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	33.465.461.000,00	29.547.647.500,00	88,29	0,00
2	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**		**375.634.421.000,00**	**375.634.421.000,00**	**100,00**	**354.640.034.000,00**
		Dana Desa	356.799.183.000,00	356.799.183.000,00	100,00	354.640.034.000,00
		Insentif Fiskal	18.835.238.000,00	18.835.238.000,00	100,00	0,00
		JUMLAH	**2.273.004.698.494,00**	**2.273.013.906.176,00**	**100,00**	**2.026.231.093.778,00**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Akun Pendapatan Transfer antar Daerah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp207.151.518.591,00 dan terealisasi sebesar Rp209.535.871.640,00 atau 101,15%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp203.323.859.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.212.012.236,00 atau 3,06%. Kenaikan tersebut dikarenakan meningkatnya Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten. Adapun rincian penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Antar Daerah dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12
TRANSFER PEMERINTAH ANTAR DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Pendapatan Bagi Hasil**		**187.151.518.591,00**	**191.225.694.268,00**	**102,18**	**173.323.859.404,00**
	a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.151.518.591,00	191.225.694.268,00	102,18	173.323.859.404,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.241.635.800,00	31.182.064.950,00	99,81	31.478.750.571,00
		Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.495.568.030,00	27.675.459.630,00	104,45	29.614.183.736,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.775.088.090,00	49.871.208.135,00	111,38	46.129.090.162,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.972.222.230,00	781.505.300,00	26,29	631.535.883,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	81.667.004.441,00	81.715.456.253,00	100,06	65.470.299.052,00
2	**Bantuan Keuangan**		**20.000.000.000,00**	**18.310.177.372,00**	**91,55**	**30.000.000.000,00**
	a	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.000.000.000,00	18.310.177.372,00	91,55	30.000.000.000,00
	JUMLAH		**207.151.518.591,00**	**209.535.871.640,00**	**101,15**	**203.323.859.404,00**

5.1.1.3 Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun Anggaran 2024 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp23.648.565.000,00 terealisasi sebesar Rp24.868.905.855,00 atau 105,16%, jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.158.056.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.710.849.433,00 atau 36,96%. Rincian dari Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13
LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Hibah**	**23.648.565.000,00**	**24.760.061.697,00**	**104,70**	**18.147.038.422,00**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	23.648.565.000,00	24.760.061.697,00	104,70	17.746.780.662,00

LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00		0,00	400.257.760,00
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**0,00**	**108.844.158,00**	**0,00**	**11.018.000,00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	11.018.000,00
	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	0,00	108.844.158,00	0,00	0,00
JUMLAH		**23.648.565.000,00**	**24.868.905.855,00**	**105,16**	**18.158.056.422,00**

Secara terinci untuk masing–masing Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

   Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp23.648.565.000,00 terealisasi sebesar Rp24.760.061.697,00 atau 104,70% yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp108.844.158,00 yang merupakan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat adalah rekening sub rincian objek untuk menampung pendapatan yang belum dapat ditelusuri sampai dengan 31 Desember Tahun 2024.

5.1.2 Belanja Daerah

Dalam rangka Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memberikan Uang Persediaan kepada seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.452–BKAD/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Adapun besaran Uang Persediaan untuk setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut:

Tabel 5.14
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2024			UANG PERSEDIAAN TAHUN 2023
		BESARAN UANG PERSEDIAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KKPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	190.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	450.000.000,00	270.000.000,00	180.000.000,00	600.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00	350.000.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	110.000.000,00	66.000.000,00	44.000.000,00	105.000.000,00
6	Dinas Sosial	70.000.000,00	42.000.000,00	28.000.000,00	70.000.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	90.000.000,00	54.000.000,00	36.000.000,00	50.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	175.000.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	55.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	175.000.000,00	105.000.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	145.000.000,00
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
19	Dinas Perikanan	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00
21	Dinas Pertanian	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	90.000.000,00	54.000.000,00	36.000.000,00	60.000.000,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	175.000.000,00	105.000.000,00	70.000.000,00	150.000.000,00
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	150.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	175.000.000,00	105.000.000,00	70.000.000,00	145.000.000,00

UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2024			UANG PERSEDIAAN TAHUN 2023
		BESARAN UANG PERSEDIAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KKPD	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00
28	Inspektorat Daerah	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00
29	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	1.000.000.000,00
30	Sekretariat DPRD	3.000.000.000,00	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00	3.000.000.000,00
31	Badan KesatuanBangsa Dan Politik	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	55.000.000,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	54.000.000,00	36.000.000,00	71.000.000,00
33	Kecamatan Rangkasbitung	60.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00	60.000.000,00
34	Kecamatan Kalanganyar	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	17.000.000,00
35	Kecamatan Cibadak	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
36	Kecamatan Warunggunung	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
37	Kecamatan Cimarga	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00
38	Kecamatan Cikulur	30.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00
39	Kecamatan Leuwidamar	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
40	Kecamatan Sajira	30.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
41	Kecamatan Maja	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
42	Kecamatan Curugbitung	30.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
43	Kecamatan Muncang	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
44	Kecamatan Sobang	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
45	Kecamatan Bojongmanik	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
46	Kecamatan Cirinten	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
47	Kecamatan Cipanas	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
48	Kecamatan Lebakgedong	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
49	Kecamatan Gunungkencana	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
50	Kecamatan Cileles	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
51	Kecamatan Banjarsari	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
52	Kecamatan Cijaku	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
53	Kecamatan Cigemblong	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
54	Kecamatan Malingping	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
55	Kecamatan Wanasalam	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
56	Kecamatan Panggarangan	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
57	Kecamatan Cihara	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
58	Kecamatan Bayah	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
59	Kecamatan Cibeber	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00
60	Kecamatan Cilograng	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH		**9.240.000.000,00**	**5.544.000.000,00**	**3.696.000.000,00**	**8.091.000.000,00**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp3.096.519.744.303,00 dan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp2.997.766.952.106,00 atau 96,81%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.827.845.303.048,00 mengalami kenaikan sebesar 169.921.649.058,00 atau 6,01% Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.15
BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	2.296.782.078.689,00	2.209.255.340.354,00	96,19	2.009.197.684.216,00
2	Belanja Modal	276.666.233.886,00	267.154.805.102,00	96,56	292.231.159.082,00
3	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803,00	18.659.748.315,00	92,96	35.437.025.460,00
4	Belanja Transfer	502.997.947.925,00	502.697.058.335,00	99,94	490.979.434.290,00
JUMLAH		**3.096.519.744.303,00**	**2.997.766.952.106,00**	**96,81**	**2.827.845.303.048,00**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan Belanja yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lebak selama satu Tahun Anggaran yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.209.255.340.354,00 atau 96,19% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp2.296.782.078.689,00, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.009.197.684.216,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.057.656.138,00 atau 9,96%. Anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi dapat dilihat padaTabel 5.16 berikut:

Tabel 5.16
BELANJA OPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	1.347.054.565.426,00	1.309.315.335.469,00	97,20	1.051.185.379.520,00
2	Belanja Barang dan Jasa	735.691.843.442,00	691.816.666.032,00	94,04	776.464.851.543,00
3	Hibah	205.948.869.821,00	200.056.338.853,00	97,14	173.668.468.153,00
4	Bantuan Sosial	8.086.800.000,00	8.067.000.000,00	99,76	7.878.985.000,00
JUMLAH		**2.296.782.078.689,00**	**2.209.255.340.354,00**	**96,19**	**2.009.197.684.216,00**

Rincian dari masing–masing Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.347.054.565.426,00 terealisasi sebesar Rp1.309.315.335.469,00 atau 97,20%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.051.185.379.520,00 mengalami kenaikan sebesar Rp258.129.955.949,00 atau 24,56%. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat dari tabel 5.17 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17
BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**		**873.916.999.439,00**	**849.240.781.351,00**	**97,18**	**685.734.641.406,00**
	a	Belanja Gaji Pokok ASN	652.431.936.613,00	650.137.928.808,00	99,65	519.795.362.865,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	63.462.919.677,00	59.168.782.546,00	93,23	50.243.489.830,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.819.985.034,00	7.516.434.988,00	96,12	7.989.087.196,00
	d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.760.082.047,00	32.527.872.000,00	90,96	31.343.833.000,00
	e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.301.869.828,00	13.731.220.032,00	96,01	10.916.227.514,00
	f	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.124.889.705,00	35.212.849.126,00	97,48	31.785.642.230,00

BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	g	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	2.983.638.604,00	2.467.181.020,00	82,69	472.072.729,00
	h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.730.737,00	9.480.136,00	74,47	7.820.252,00
	i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	51.634.364.444,00	43.418.332.065,00	84,09	28.867.243.714,00
	j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.565.837.247,00	1.265.112.742,00	80,79	1.078.225.391,00
	k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.697.510.372,00	3.785.587.888,00	80,59	3.235.636.685,00
	l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.121.235.131,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**		**109.073.292.472,00**	**105.199.784.753,00**	**96,45**	**109.529.279.889,00**
	a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja ASN	102.100.042.472,00	98.722.878.128,00	96,69	103.656.154.889,00
	b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.973.250.000,00	6.476.906.625,00	92,88	5.873.125.000,00
3	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**		**268.260.087.945,00**	**261.744.756.222,00**	**97,57**	**223.450.393.614,00**
	a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.496.251.400,00	4.655.736.745,00	62,11	7.153.061.643,00
	b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.003.657.897,00	582.053.388,00	57,99	719.100.931,00
	c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	226.252.491.020,00	223.464.302.800,00	98,77	193.693.452.940,00
	d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.162.453.895,00	12.062.087.300,00	99,17	8.679.363.100,00
	e	Belanja Tambahan Penghasilan	8.852.500.000,00	8.844.000.000,00	99,90	5.273.000.000,00

BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
		(Tamsil) Guru PNSD				
	f	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.569.949.400,00	2.456.377.989,00	95,58	0,00
	g	Belanja Honorarium	9.922.784.333,00	9.680.198.000,00	97,56	7.929.415.000,00
	h	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	100,00	3.000.000,00
4	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**		**33.003.182.356,00**	**32.607.478.497,00**	**98,80**	**28.180.666.550,00**
	a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.102.815.000,00	98,97	1.114.260.000,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.996.400,00	149.847.600,00	96,06	154.085.400,00
	c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	173.808.000,00	164.683.080,00	94,75	170.331.840,00
	d	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	94.678.500,00	99,13	95.508.000,00
	e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.599.081.750,00	98,97	1.615.677.000,00
	f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.737.200,00	126.276.150,00	82,68	152.737.200,00
	g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.737.300,00	0,00	0,00	9.616.110,00
	h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.247.500.000,00	99,13	6.300.000.000,00
	i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	100,00	1.575.000.000,00
	j	Belanja PemBelanjaan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	159.249.688,00	91.642.281,00	57,55	165.322.232,00
	k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.817.168.768,00	11.635.689.136,00	98,46	9.054.168.768,00
	l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.877.500.000,00	9.873.500.000,00	99,96	7.773.960.000,00
	m	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	471.765.000,00	98,79	0,00
5	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH**		**1.968.791.652,00**	**694.599.315,00**	**35,28**	**160.987.061,00**
	a	Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	54.600.000,00	0,00	0,00	50.700.000,00

BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	7.056.000,00	0,00	0,00	6.552.000,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	98.280.000,00	0,00	0,00	91.260.000,00
	d	Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	7.097.160,00	0,00	0,00	6.590.220,00
	e	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus KDH / WKDH	645.512,00	0,00	0,00	446.101,00
	f	Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	360	0,00	0,00	340,00
	g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	6.397.440,00	0,00	0,00	5.026.560,00
	h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	131.040,00	0,00	0,00	102.960,00
	i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	393.120,00	0,00	0,00	308.880,00
	j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.773.900.000,00	689.789.625,00	38,89	0,00
	k	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	20.291.020,00	4.809.690,00	23,70	0,00
6	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH / WKDH**		**852.000.000,00**	**540.750.000,00**	**63,47**	**766.296.000,00**
	a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	235.200.000,00	93,33	252.000.000,00
	b	Belanja Dana Operasional KDH / WKDH	600.000.000,00	305.550.000,00	50,93	514.296.000,00
7	**Belanja Pegawai BLUD**		**59.980.211.562,00**	**59.287.185.331,00**	**98,84**	**3.363.115.000,00**
	A	Belanja Pegawai BLUD	59.980.211.562,00	59.287.185.331,00	98,84	3.363.115.000,00
JUMLAH			**1.347.054.565.426,00**	**1.309.315.335.469,00**	**97,20**	**1.051.185.379.520,00**

Berdasarkan tabel di atas Belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp873.916.999.439,00 dan terealisasi sebesar Rp849.240.781.351,00 atau 97,18% yang terdiri dari:
   a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan sebesar Rp652.431.936.613,00 terealisasi sebesar Rp650.137.928.808,00 atau 99,65% dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp465.732.662.179,00 terealisasi sebesar Rp463.596.709.508,00 atau sebesar 99,54%;
      2) Belanja Gaji PPPK dianggarkan sebesar Rp186.699.274.434,00 terealisasi sebesar Rp186.541.219.300,00 atau sebesar 99,92%.
   b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan sebesar Rp63.462.919.677,00 terealisasi sebesar Rp59.168.782.546,00 atau 93,23% dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Tunjangan Keluarga PNS dianggarkan sebesar Rp43.465.248.947,00 terealisasi sebesar Rp41.350.957.240,00 atau sebesar 95,14%;
      2) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK dianggarkan sebesar Rp19.997.670.730,00 terealisasi sebesar Rp17.817.825.306,00 atau sebesar 89,17%.
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan sebesar Rp7.819.985.034,00 terealisasi sebesar Rp7.516.434.988,00 atau 96,12%;
   d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan sebesar Rp35.760.082.047,00 terealisasi sebesar Rp32.527.872.000,00 atau 90,96% dengan rincian sebagai berikut:
      1) Belanja Tunjangan Fungsional PNS dianggarkan sebesar Rp35.754.802.047,00 terealisasi sebesar Rp32.523.327.000,00 atau 90,96%;
      2) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dianggarkan sebesar Rp5.280.000,00 terealisasi sebesar Rp4.545.000,00 atau 86,088%.

e. Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan sebesar Rp14.301.869.828,00 terealisasi sebesar Rp13.731.220.032,00 atau 96,01% dengan rincian sebagai berikut:
   1) Tunjangan Fungsional Umum PNS dianggarkan sebesar Rp3.524.605.224,00 terealisasi sebesar Rp2.970.125.032,00 atau sebesar 84,27%;
   2) Tunjangan Fungsional Umum PPPK dianggarkan sebesar Rp10.777.264.604,00 terealisasi sebesar Rp10.761.095.000,00 atau 99,85%.

f. Tunjangan Beras ASN dianggarkan sebesar Rp36.124.889.705,00 terealisasi sebesar Rp35.212.849.126,00 atau 97,48% terdiri dari:
   1) Tunjangan Beras PNS dianggarkan sebesar Rp23.667.810.587,00 terealisasi sebesar Rp22.877.912.626,00 atau 96,66%;
   2) Tunjangan Beras PPPK dianggarkan sebesar Rp12.457.079.118,00 terealisasi sebesar 12.334.936.500,00 atau 99,02%.

g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan sebesar Rp2.983.638.604,00 terealisasi sebesar Rp2.467.181.020,00 atau 82,69%.

h. Pembulatan Gaji ASN dianggarkan sebesar Rp12.730.737,00 terealisasi sebesar Rp9.480.136,00 atau 74,47% terdiri dari:
   1) Pembulatan Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp7.700.129,00 terealisasi sebesar Rp5.594.660,00 atau sebesar 72,66%;
   2) Pembulatan Gaji PPPK dianggarkan sebesar Rp5.030.608,00 terealisasi sebesar Rp3.885.476,00 atau sebesar 77,24%.

i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan sebesar Rp51.634.364.444,00 terealisasi sebesar Rp43.418.332.065,00 atau 84,09% terdiri dari:
   1) Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar Rp40.770.929.966,00 terealisasi sebesar Rp35.381.188.038,00 atau sebesar 86,78%;
   2) Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dianggarkan sebesar Rp10.863.434.478,00 terealisasi sebesar Rp8.037.144.027,00 atau sebesar 73,98%.

j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan sebesar Rp1.565.837.247,00 terealisasi sebesar Rp1.265.112.742,00 atau sebesar 80,79% yang terdiri dari:
   1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp1.076.558.054,00 terealisasi sebesar Rp880.539.063,00 atau sebesar 81,79%;
   2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp489.279.193,00 terealisasi sebesar Rp384.573.679,00 atau sebesar 78,60%.

k. Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan sebesar Rp4.697.510.372,00 terealisasi sebesar Rp3.785.587.888,00 atau sebesar 80,59% terdiri dari:
   1) Iuran Jaminan Kematian PNS dianggarkan sebesar Rp3.230.323.581,00 terealisasi sebesar Rp2.631.519.309,00 atau 81,46%;
   2) Iuran Jaminan Kematian PPPK dianggarkan sebesar Rp1.467.186.791,00 terealisasi sebesar Rp1.154.068.579,00 atau 78,66% .

l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan sebesar Rp3.121.235.131,00 dan tidak terealisasi;

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp109.073.292.472,00 terealisasi sebesar Rp105.199.784.753,00 atau 96,45% terdiri dari:
   a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Belanja Kerja ASN dianggarkan sebesar Rp102.100.042.472,00 terealisasi sebesar Rp98.722.878.128,00 atau 96,69%;
   b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN dianggarkan sebesar Rp6.973.250.000,00 terealisasi sebesar Rp6.476.906.625,00 atau 92,88%;
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp268.260.087.945,00 terealisasi sebesar Rp261.744.756.222,00 atau 97,57%, terdiri dari:
   a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp7.496.251.400,00 terealisasi sebesar Rp4.655.736.745,00 atau 62,11% terdiri dari:

1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp23.871.000,00 terealisasi sebesar Rp16.132.978,00 atau 67,58%;
2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp324.912.000,00 terealisasi sebesar Rp286.568.850,00 atau 88,20%;
3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp15.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.088.190,00 atau 46,05%;
4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp49.604.000,00 terealisasi sebesar Rp22.033.400,00 atau 44,42%;
5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp1.252.532.000,00 terealisasi sebesar Rp961.464.750,00 atau 76,76%;
6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp31.120.000,00 terealisasi sebesar Rp29.663.135,00 atau 95,32%;
7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp38.648.000,00 terealisasi sebesar Rp27.735.886,00 atau 71,77%;
8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp1.073.400,00 terealisasi sebesar Rp485.545,00 atau 45,23%;
9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp1.580.618.000,00 terealisasi sebesar Rp999.260.232,00 atau 63,22%;
10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dianggarkan sebesar Rp1.600.419.000,00 terealisasi sebesar Rp628.507.704,00 atau 39,27%;
11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp2.578.062.000,00 sebesar

Rp1.676.796.075,00 atau 65,04%.

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp1.003.657.897,00 terealisasi sebesar Rp582.053.388,00 atau 57,99% terdiri dari;
   1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp34.226.178,00 terealisasi sebesar Rp34.226.178,00 atau 100%;
   2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp29.526.152,00 terealisasi sebesar R 22.144.614,00 atau 75,00%;
   3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp65.882.950,00 dan tidak terealisasi;
   4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp404.029.967,00 terealisasi sebesar Rp277.946.379,00 atau 68,79%;
   5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp62.794.800,00 terealisasi sebesar Rp40.325.625,00 atau 64,22%;
   6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan dianggarkan sebesar Rp75.371.875,00 terealisasi sebesar Rp42.343.750,00 atau 56,18%;
   7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal dianggarkan sebesar Rp13.610.000,00 dan tidak terealisasi;
   8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp575.000,00 dan tidak terealisasi;
   9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp34.655.375,00 terealisasi sebesar Rp33.042.242,00 atau 95,35%;
   10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp4.485.600,00

terealisasi sebesar Rp4.485.600,00 atau 100%;

11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 40,00%;
12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggarkan sebesar Rp28.500.000,00 terealisasi sebesar Rp27.539.000,00 atau 96,63%.

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dianggarkan sebesar Rp226.252.491.020,00 terealisasi sebesar Rp223.464.302.800,00 atau 98,77%;
d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dianggarkan sebesar Rp12.162.453.895,00 terealisasi sebesar Rp12.062.087.300,00 atau 99,17%;
e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dianggarkan sebesar Rp8.852.500.000,00 terealisasi sebesar Rp8.844.000.000,00 atau 99,90%;
f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN dianggarkan sebesar Rp2.569.949.400,00 terealisasi sebesar Rp2.456.377.989,00 atau 95,58%;
g. Belanja Honorarium dianggarkan sebesar Rp9.922.784.333,00 terealisasi sebesar Rp9.680.198.000,00 atau 97,56% terdiri dari:
    1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp9.400.104.333,00 terealisasi sebesar Rp9.179.158.000,00 atau 97,65%;
    2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp522.680.000,00 terealisasi sebesar Rp501.040.000,00 atau 95,86%;

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp33.003.182.356,00 terealisasi sebesar Rp32.607.478.497,00 atau 98,80% terdiri dari:
    a. Belanja Uang Representasi DPRD dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 terealisasi sebesar Rp1.102.815.000,00 atau 98,97%;
    b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 terealisasi sebesar Rp149.847.600,00 atau 96,06%;

c. Belanja Tunjangan Beras DPRD dianggarkan sebesar Rp173.808.000,00 terealisasi sebesar Rp164.683.080,00 atau 94,75%;
d. Belanja Uang Paket DPRD dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 terealisasi sebesar Rp94.678.500,00 atau 99,13%;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 terealisasi sebesar Rp1.599.081.750,00 atau 98,97%;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dianggarkan sebesar Rp152.737.200,00 terealisasi sebesar Rp126.276.150,00 atau 82,68%;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD dianggarkan sebesar Rp13.737.300,00 dan tidak terealisasi;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp6.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.247.500.000,00 atau 99,17%;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.050.000.000,00 atau 100%;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp159.249.688,00 terealisasi sebesar Rp91.642.281,00 atau 57,55%;
k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp11.817.168.768,00 terealisasi sebesar Rp11.635.689.136,00 atau 98,46% dengan rincian :
    1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dianggarkan sebesar Rp288.000.000,00 terealisasi sebesar Rp285.600.000,00 atau 99,17%;
    2) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD dianggarkan sebesar Rp2.292.192,00 terealisasi sebesar Rp2.272.284,00 atau 99,13%;
    3) Belanja Jaminan Kematian DPRD dianggarkan sebesar Rp6.876.576,00 terealisasi sebesar Rp6.816.852,00 atau 99,13%;
    4) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan sebesar Rp11.520.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.341.000.000,00 atau 98,45%;
l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan sebesar Rp9.877.500.000,00 terealisasi sebesar Rp9.873.500.000,00 atau 99,96%;

m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD dianggarkan sebesar Rp477.540.000,00 terealisasi sebesar Rp471.765.000,00 atau 98,79%;

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp1.968.791.652,00 terealisasi sebesar Rp694.599.315,00 atau 35,28% terdiri dari:
   a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp54.600.000,00 dan tidak terealisasi;
   b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp7.056.000,00 dan tidak terealisasi;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp98.280.000,00 dan tidak terealisasi;
   d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp7.097.160,00 dan tidak terealisasi;
   e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp645.512,00 dan tidak terealisasi;
   f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp360,00 dan tidak tereaslisasi;
   g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp6.397.440,00 dan tidak tereaslisasi;
   h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp131.040,00 dan tidak terealisasi:
   i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp393.120,00 dan tidak terealisasi;
6. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.773.900.000,00 terealisasi sebesar Rp689.789.625,00 atau 38,89% terdiri dari:
   a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp5.535.000,00 terealisasi sebesar Rp2.589.850,00 atau 46,79%;
   b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp75.600.000,00 terealisasi sebesar Rp47.506.250,00 atau 62,84%;

c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp916.250,00 atau 25,45%;
d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp11.700.000,00 terealisasi sebesar Rp2.886.250,00atau 24,67%;
e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp292.500.000,00 terealisasi sebesar Rp125.337.500,00 atau 42,85%;
f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00 terealisasi sebesar Rp4.931.875,00 atau 68,50%;
g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.481.937,00 atau 49,80%;
h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp243.000,00 terealisasi sebesar Rp80.713,00 atau 33,22%;
i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp372.042.000,00 terealisasi sebesar Rp142.735.625,00 atau 38,37%;
j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dianggarkan sebesar Rp397.980.000,00 terealisasi sebesar Rp97.284.000,00 atau 24,44%;
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp598.500.000,00 terealisasi sebesar Rp261.039.375,00 atau 43,62%.

7. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp20.291.020,00 terealisasi sebesar Rp4.809.690,00 atau 23,70% terdiri dari;
   a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar

Rp10.420.995,00 terealisasi sebesar Rp4.809.690,00 atau 46,15%;

b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp554.400,00 tidak terealisasi;

c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan dianggarkan sebesar Rp9.315.625,00 dan tidak terealisasi;

8. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp852.000.000,00 terealisasi sebesar Rp540.750.000,00 atau 63,47% terdiri dari:
   a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan sebesar Rp252.000.000,00 terealisasi sebesar Rp235.200.000,00 atau 93,33%;
   b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp305.550.000,00 atau 50,93%.
9. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dianggarkan sebesar Rp59.980.211.562,00 terealisasi sebesar Rp59.287.185.331,00 atau 98,84%, rincian Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut:

Tabel 5.18
BELANJA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	JUMLAH REALISASI (RP)
1	2	3	5
A		**Belanja Pegawai**	**59.287.185.331,00**
1		**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pegawai BLUD**	**1.416.648.959,00**
	a	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN serta Pegawai BLUD**	**1.416.648.959,00**
	1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.065.216.742,00
	2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	351.432.217,00
2		**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**57.870.536.372,00**
	a	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**54.383.508.151,00**
	1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	54.383.508.151,00
	b	**Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan**	**3.463.778.221,00**
	1	Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	3.322.568.221,00
	2	Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	136.410.000,00
	3	Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.800.000,00

BELANJA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	JUMLAH REALISASI (RP)
1	2	3	5
	c	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**	**23.250.000,00**
	1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	23.250.000,00
		JUMLAH	**59.287.185.331,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp735.691.843.442,00 terealisasi sebesar Rp691.816.666.032,00 atau 94,04%. Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan tugas pokok serta fungsinya. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel 5.19 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19
BELANJA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO		URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1		2	3	4	5	6
1	**Belanja Barang**		**81.616.778.920,00**	**74.634.804.427,00**	**91,45**	**58.550.844.046,00**
	a	Belanja Barang Pakai Habis	81.577.749.520,00	74.634.804.427,00	91,47	58.424.509.046,00
	b	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	126.335.000,00
	c	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	39.029.400,00	17.686.000,00	45,31	0,00
2	**Belanja Jasa**		**204.152.355.921,00**	**189.929.995.747,00**	**93,03**	**207.192.132.002,00**
	a	Belanja Jasa Kantor	118.525.763.441,00	110.081.301.044,00	92,88	129.357.895.581,00
	b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.382.230.888,00	49.217.611.304,00	**97,69**	40.559.242.628,00
	c	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.378.791.500,00	1.236.961.460,00	89,71	1.118.810.100,00
	e	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.032.040.000,00	1.822.775.000,00	89,70	2.488.100.000,00
	f	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	94.500.000,00	88.850.000,00	94,02	157.000.000,00
	g	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.986.842.550,00	15.597.539.966,00	91,82	15.169.462.900,00
	h	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.398.398.700,00	3.365.358.002,00	99,03	3.008.432.841,00
	i	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	85.000.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	j	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.640.798.000,00	8.200.943.000,00	77,07	15.248.187.952,00
	k	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	587.610.600,00	252.190.410,00	42,92	0,00
	l	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	95.380.242,00	36.465.561,00	38,23	0,00
3	**Belanja Pemeliharaan**		**29.631.364.026,00**	**27.165.593.695,00**	**91,68**	**48.755.138.892,00**
	a	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	29.985.000,00
	b	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.666.876.000,00	6.621.615.420,00	86,37	6.366.002.995,00
	c	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.826.256.326,00	6.479.814.075,00	94,92	20.744.420.054,00
	d	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.138.231.700,00	14.064.164.200,00	92,90	21.549.730.843,00
	e	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
4	**Belanja Perjalanan Dinas**		**88.749.709.958,00**	**81.839.752.310,00**	**92,21**	**77.937.019.951,00**
	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.749.709.958,00	81.839.752.310,00	92,91	77.937.019.951,00
5	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**		**1.979.515.000,00**	**1.931.520.000,00**	**97,58**	**1.690.199.500,00**
	a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.979.515.000,00	1.931.520.000,00	97,58	1.669.699.500,00
	b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
6	**Belanja Barang dan Jasa BOS**		**147.018.304.081,00**	**143.412.864.911,00**	**97,55**	**146.776.364.130,00**
	a	Belanja Barang dan Jasa BOS	147.018.304.081,00	143.412.864.911,00	97,55	146.776.364.130,00
7	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**		**182.543.815.536,00**	**172.902.134.942,00**	**94,72**	**235.563.153.022,00**
	a	Belanja Barang dan Jasa BLUD	182.543.815.536,00	172.902.134.942,00	94,72	235.563.153.022,00
	JUMLAH		**735.691.843.442,00**	**691.816.666.032,00**	**94,04**	**776.464.851.543,00**

Berdasarkan tabel 5.19 Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp81.616.778.920.00 terealisasi sebesar Rp74.634.804.427.00 atau 91,45% terdiri dari:
   a. Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp81.577.749.520.00 terealisasi sebesar Rp74.617.118.427,00 atau 91,47% dengan rincian

sebagai berikut:

1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi dianggarkan sebesar Rp89.798.810,00 terealisasi sebesar Rp86.400.000,00 atau 96,22%;
2) Belanja Bahan-bahan Kimia dianggarkan sebesar Rp8.860.605.500,00 terealisasi sebesar Rp8.736.855.802,00 atau 98,60%;
3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dianggarkan sebesar Rp5.570.814.448,00 terealisasi sebesar Rp5.367.177.494,00 atau 96,34%;
4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dianggarkan sebesar Rp4.029.798.000,00 terealisasi sebesar Rp3.934.370.450,00 atau 97,63%;
5) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp13.190.000,00 terealisasi sebesar Rp12.199.000,00 atau 92,49%;
6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00 terealisasi Rp12.000.000,00 atau 100%;
7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.007.274.900,00 terealisasi sebesar Rp834.038.360,00 atau 82,80%;
8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp352.405.500,00 terealisasi sebesar Rp322.947.000,00 atau 91,64%;
9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar dianggarkan sebesar Rp250.407.000,00 terealisasi sebesar Rp233.020.840,00 atau 93,06%;
10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp7.405.600,00 atau 94,94%;
11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp5.941.656.928,00 terealisasi sebesar Rp5.011.662.913,00 atau 84,35%;
12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover dianggarkan sebesar Rp1.543.938.770,00 terealisasi sebesar Rp1.416.241.150,00 atau 91,73%;
13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp152.510.500,00 terealisasi sebesar Rp117.854.500,00 atau

77,28%;

14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dianggarkan sebesar Rp137.350.000,00 terealisasi sebesar Rp133.481.600,00 atau 97,18%;
15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender dianggarkan sebesar Rp298.750.000,00 terealisasi sebesar Rp236.260.000,00 atau 79,08%;
16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dianggarkan sebesar Rp2.716.742.230,00 terealisasi sebesar Rp2.417.691.750,00 atau 88,99%;
17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor dianggarkan sebesar Rp1.093.763.106,00 terealisasi sebesar Rp919.370.363,00 atau 84,06%;
18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dianggarkan sebesar Rp1.372.887.278,00 terealisasi sebesar Rp1.280.283.250,00 atau 93,25%;
19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga dianggarkan sebesar Rp126.150.000,00 terealisasi sebesar Rp117.210.000,00 atau 92,91%;
20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata dianggarkan sebesar Rp364.092.500,00 terealisasi sebesar Rp329.492.500,00 atau 90,50%;
21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp765.205.000,00 terealisasi sebesar Rp696.275.960,00 atau 90,99%;
22) Belanja Obat-Obatan dianggarkan sebesar Rp4.212.500.879,00 terealisasi sebesar Rp4.157.883.726,00 atau 98,70%;
23) Belanja Obat-Obatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.828.077.131,00 terealisasi sebesar Rp8.227.462.062,00 atau 93,20%;
24) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dianggarkan sebesar Rp3.262.696.500,00 terealisasi sebesar Rp3.117.004.100,00 atau 95,53% terdapat pada:

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp714.746.000,00 terealisasi sebesar Rp700.628.000,00 atau 98,02% diserahkan kepada korban terdampak bencana alam;
b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp363.000.000,00 terealisasi sebesar Rp342.500.000,00 atau 94,35% diserahkan kepada Lembaga/komunitas/sanggar berupa Alat kesenian Gamelan Degung sebanyak 6 Set berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 400.6/Kep.31-Disbudpar/2024 dan Alat kesenian Kendang Pencak sebanyak 11 Set Surat Keputusan kepala Dinas Nomor 400.6/Kep.30-Disbudpar/2024;
c) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp20.400.000,00 terealisasi sebesar Rp20.060.000,00 atau 98,33% berupa Handuk Sebanyak 340 Buah untuk Kegiatan POPDA, Handuk diserahkan kepada Peserta, Pelatih dan Official.;
d) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp460.530.000,00 terealisasi sebesar Rp384.707.000,00 atau 83,54% berupa persediaan bahan pokok (susu 150 box dan biskuit anak 300 Pak) sebesar Rp135.036.000 untuk Anak Stunting Kecamatan Cibadak sebanyak 32 Orang, Kecamatan Cimarga sebanyak 12 Orang, Kecamatan Cijaku sebanyak 10 Orang, Kecamatan Leuwidamar sebanyak 69 Orang, Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 10 Orang, Kecamatan Maja sebanyak 17 orang, persediaan bahan pokok (berupa minyak goreng 80 buah, kecap 80 Buah, beras 320 Kg, mie instan 8 dus, sarden 80 buah senilai Rp9.696.000,00 untuk keluarga kemiskinan ekstrem menurut data Badan Perencanaa Penelitian Dan Pengembangan Daerah di kecamatan Panggarangan. dan BKB Kit Stunting 25 Unit senilai Rp239.975.000,00 untuk Kelompok BKB Kecamatan Cimarga 4 unit, Kecamatan Cihara 1 unit, Kecamatan Maja 3 unit, Kecamatan Cibeber 1 unit, Kecamatan Cigemblong 1 unit, Kecamatan Banjarsari 1 unit, Kecamatan Cikulur 1 unit, Kecamatan Sajira 4 unit, Kecamatan Cibadak 1 unit, Kecamatan Leuwidamar 3 unit,

Kecamatan Warunggunung 1 unit, Kecamatan Cileles 1 unit, Kecamatan Kalanganyar 1 unit, Kecamatan Curugbitung 1 unit, Kecamatan Rangkasbitung 1 unit;

e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp Rp894.000.000,00 terealisasi sebesar Rp894.000.000,00 atau 100%, untuk pelaksanaan operasi pasar murah di 28 Kecamatan sekabupaten Lebak.

f) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dianggarkan sebesar Rp124.425.000,00 terealisasi sebesar Rp122.070.000,00 atau 98,11% dalam rangka Pengentasan Kemisikinan Ekstrem sebesar Rp81.075.000,00 berupa domba diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Desa Parungkujang Kecamatan Cileles yaitu Kelompok Dukuh, Kelompok Cipicung, Kelompok Pasirgadung dan Kelompok Kadubojong masing-masing sebesar Rp16.215.000,00 dan Kelompok Masyarakat Desa Maraya Kecamatan Sajira sebesar Rp16.215.00,00, dalam rangka Pengentasan Kemisikinan Ekstrem berupa domba sebesar Rp40.995.000,00 diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB) yaitu KMSB Mulya di Desa Sangiang, KMSB Anggrek 88 di Desa Pasir Tanjung, KMSB Getap di Desa Ciuyah, KMSB Siaga Jaya di Desa Sinar Jaya, KMSB CO'O Tangguh di Desa Lewicoo, KMSB Cahaya Timur di Desa Rangkasbitung dan KMSB Muncang Cemerlang di Desa Muncang;

g) Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp685.595.500,00 terealisasi sebesar Rp653.039.100,00 atau 95,25% merupakan penyediaan permakanan sebesar Rp266.974.000,00 diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak korban bencana alam, sebesar Rp106.786.100 diserahkan kepada Yayasan Bani Syifa untuk 26 ODGJ, penyediaan sandang sebesar Rp12.750.000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 460/Kep.47.1–DINSOS/IX/2024, tanggal 2 September 2024 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Barang tersebut sudah diserahkan kepada Masyarakat sebanyak 5 Unit berupa kursi roda, penyediaan permakanan sebesar Rp13.632.000 diberikan

kepada 180 pasien rujukan pada Rumah Singgah Rangkasbitung dan Rumah Singgah Jakarta, penyediaan permakanan sebesar Rp148.247.000 diserahkan untuk 150 orang/150 paket dan diserahkan kepada 5 (lima) Lembaga Kesehahteraan Sosial (LKS), yaitu Yayasan Uswah Hasanah Perwira Kecamatan Rangkasbitung, Yayasan Endah Jaya Kecamatan. Bayah, Yayasan Islamiyah Kecamatan Muncang, Yayasan Daarutthashihah Kecamatan Rangkasbitung, dan Yayasan Daru Sifa Kecamatan Banjarsari, penyediaan permakanan sebesar Rp104.650.000 diserahkan kepada 35 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

25) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya dianggarkan sebesar Rp32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.000.000,00 atau 96,88% pada Sekretariat Daerah diperuntukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebak berupa peralatan rumah tangga;
26) Belanja Natura dan Pakan-Natura dianggarkan sebesar Rp146.460.000,00 terealisasi sebesar Rp139.515.000,00 atau 95,26%;
27) Belanja Natura dan Pakan-Pakan dianggarkan sebesar Rp364.550.000,00 terealisasi sebesar Rp360.320.000,00 atau 98,84%;
28) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp18.631.118.040,00 terealisasi sebesar Rp16.581.380.207,00 atau 89,00%;
29) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dianggarkan sebesar Rp2.757.858.000,00 terealisasi sebesar Rp2.509.269.500,00 atau 90,99%;
30) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp7.094.822.000,00 terealisasi sebesar Rp5.857.608.900,00 atau 82,56%;
31) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp80.850.000,00 atau 95,12%;
32) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) dianggarkan sebesar Rp36.500.000,00 terealisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau 30,14%;

33) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dianggarkan sebesar Rp205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp175.000.000,00 atau 85,37%;
34) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dianggarkan sebesar Rp178.918.000,00 terealisasi sebesar Rp149.400.000,00 atau 83,50%;
35) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dianggarkan sebesar Rp81.939.000,00 terealisasi sebesar Rp75.830.400,00 atau 92,54%;
36) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) dianggarkan sebesar Rp9.250.000,00 terealisasi Rp5.000.000,00 atau 54,05%;
37) Belanja Pakaian Batik Tradisional dianggarkan sebesar Rp21.600.000,00 terealisasi sebesar Rp19.500.000,00 atau 90,28%;
38) Belanja Pakaian Olahraga dianggarkan sebesar Rp538.250.000,00 terealisasi sebesar Rp518.446.000,00 atau 96,32%;
39) Belanja Pakaian Paskibraka dianggarkan sebesar Rp384.069.500,00 terealisasi sebesar Rp378.410.000,00 atau 98,53%;

b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp39.029.400,00 terealisasi sebesar Rp17.686.000,00 atau 45,31%, terdiri dari:
1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan dianggarkan sebesar Rp3.029.400,00 terealisasi sebesar Rp2.700.000,00 atau 89,13%;
2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.986.000,00 atau 41,63%;

2. Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp204.152.355.921,00 terealisasi sebesar Rp189.929.995.747,00 atau 93,03% terdiri dari:
a. Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp118.525.763.441,00 terealisasi sebesar Rp110.081.301.044,00 atau 92,88% dengan rincian sebagai berikut:
1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dianggarkan sebesar Rp534.250.000,00 terealisasi sebesar Rp533.850.000,00 atau 99,93%;
2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan sebesar Rp4.626.800.000,00 terealisasi sebesar

Rp3.730.832.500,00 atau 80,64%;

3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp5.434.560.000,00 terealisasi sebesar Rp4.885.130.000,00 atau 89,89%;
4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan dianggarkan sebesar Rp1.467.427.000,00 terealisasi sebesar Rp1.450.177.000,00 atau 98,82%;
5) Honorarium Rohaniwan dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp108.500.000,00 atau 98,64%;
6) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dianggarkan sebesar Rp97.170.000,00 terealisasi sebesar Rp96.420.000,00 atau 99,23%;
7) Honorarium Penyelenggara Ujian dianggarkan sebesar Rp92.100.000,00 terealisasi sebesar Rp67.650.000,00 atau 73,45%;
8) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp57.650.000,00 terealisasi sebesar Rp46.900.000,00 atau 81,35%;
9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp585.600.000,00 terealisasi sebesar Rp505.200.000,00 atau 86,27%;
10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dianggarkan sebesar Rp5.056.825.000,00 terealisasi sebesar Rp4.962.091.650,00 atau 98,13%;
11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp17.702.197.104,00 terealisasi sebesar Rp16.423.926.231,00 atau 92,78%;
12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.385.181.561,00 terealisasi sebesar Rp985.244.863,00 atau 71,13%;
13) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp3.748.152.000,00 terealisasi sebesar Rp3.735.649.600,00 atau 99,67%;

14) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 100%;
15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial dianggarkan sebesar Rp22.230.000,00 dan tidak terealisasi;
16) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan sebesar Rp568.500.000,00 terealisasi sebesar Rp534.440.000,00 atau 94,01%;
17) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 atau 100%;
18) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp310.800.000,00 terealisasi sebesar Rp310.300.000,00 atau 99,84%;
19) Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan sebesar Rp21.238.594.000,00 terealisasi sebesar Rp20.773.690.000,00 atau 97,81%;
20) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dianggarkan sebesar Rp2.512.268.000,00 terealisasi sebesar Rp2.462.818.000,00 atau 98,03%;
21) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan sebesar Rp992.120.000,00 terealisasi sebesar Rp963.000.000,00 atau 97,06%;
22) Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan sebesar Rp4.852.825.000,00 terealisasi sebesar Rp4.732.348.500,00 atau 97,52%;
23) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan sebesar Rp5.435.458.000,00 terealisasi sebesar Rp5.290.544.100,00 atau 97,33%;
24) Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan sebesar Rp2.260.147.000,00 terealisasi sebesar Rp2.159.238.000,00 atau 95,54%;
25) Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan sebesar Rp420.552.000,00 terealisasi sebesar Rp402.552.000,00 atau 95,72%;
26) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik dianggarkan sebesar Rp117.500.000,00 terealisasi sebesar Rp85.039.600,00 atau 72,37%;

27) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO dianggarkan sebesar Rp78.920.000,00 terealisasi sebesar Rp76.937.959,00 atau 97,49%;
28) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan dianggarkan sebesar Rp302.550.000,00 terealisasi sebesar Rp302.550.000,00 atau 100%;
29) Belanja Jasa Tata Rias dianggarkan sebesar Rp20.690.000,00 terealisasi sebesar Rp20.690.000,00 atau 100%;
30) Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket dianggarkan sebesar Rp1.766.018.645,00 terealisasi sebesar Rp1.272.701.340,00 atau 72,07%;
31) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik dianggarkan sebesar Rp11.375.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 87,91%;
32) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan dianggarkan sebesar Rp552.475.046,00 terealisasi sebesar Rp406.837.233,00 atau 73,64%;
33) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dianggarkan sebesar Rp549.750.000,00 terealisasi sebesar Rp530.851.414,00 atau 96,56%;
34) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan sebesar Rp4.203.187.500,00 terealisasi sebesar Rp3.938.821.950,00 atau 93,71%;
35) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp86.146.588,00 terealisasi sebesar Rp47.438.000,00 atau 55,07%;
36) Belanja Jasa Kalibrasi dianggarkan sebesar Rp119.769.000,00 terealisasi sebesar Rp33.271.000,00 atau 27,78%;
37) Belanja Jasa Pengolahan Sampah dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00 terealisasi sebesar Rp1.200.000,00 atau 100%;
38) Belanja Jasa Pengukuran Tanah dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp58.298.400,00 atau 22,42%;
39) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dianggarkan sebesar Rp1.717.696.000,00 terealisasi sebesar Rp1.555.130.900,00 atau 90,54%;

40) Belanja Tagihan Telepon dianggarkan sebesar Rp409.452.000,00 terealisasi sebesar Rp316.324.073,00 atau 77,26%;
41) Belanja Tagihan Air dianggarkan sebesar Rp61.575.580,00 terealisasi sebesar Rp41.077.679,00 atau 66,71%;
42) Belanja Tagihan Listrik dianggarkan sebesar Rp16.003.866.347,00 terealisasi sebesar Rp15.158.589.768,00 atau 94,72%;
43) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dianggarkan sebesar Rp436.901.000,00 terealisasi sebesar Rp392.285.649,00 atau 89,79%;
44) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan dianggarkan sebesar Rp7.056.541.470,00 terealisasi sebesar Rp6.448.653.953,00 atau 91,39%;
45) Belanja Paket/Pengiriman dianggarkan sebesar Rp8.820.000,00 terealisasi sebesar Rp6.698.000,00 atau 75,94%;
46) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dianggarkan sebesar Rp1.240.650.000,00 terealisasi sebesar Rp836.701.000,00 atau 67,44%;
47) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp2.312.307.000,00 terealisasi sebesar Rp1.947.403.000,00 atau 84,22%;
48) Belanja Medical Check Up dianggarkan sebesar Rp34.496.000,00 terealisasi sebesar Rp1.761.000,00 atau 5,10%.
49) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp1.596.469.600,00 terealisasi sebesar Rp1.365.536.682,00 atau 85,53%;

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp50.382.230.888,00 terealisasi sebesar Rp49.217.611.304,00 atau 97,69% dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI dianggarkan sebesar Rp1.062.412.400,00 terealisasi sebesar Rp380.728.000,00 atau 35,84%;
   2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan sebesar Rp44.824.134.513,00 terealisasi sebesar Rp44.647.640.313,00 atau 99,61%;

3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp3.109.569.795,00 terealisasi sebesar Rp2.955.816.155,00 atau 95,06%;
4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp263.466.940,00 terealisasi sebesar Rp254.992.248,00 atau 96,78%;
5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp330.047.240,00 terealisasi sebesar Rp319.182.576,00 atau 96,71%;
6) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp792.600.000,00 terealisasi sebesar Rp659.252.012,00 atau 83,18%.

c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp1.378.791.500,00 terealisasi sebesar Rp1.236.961.460,00 atau 89,71%. dengan rincian sebagai berikut:
1) Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya dianggarkan sebesar Rp122.700.000,00 terealisasi sebesar Rp120.976.500,00 atau 98,60%;
2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp741.300.000,00 terealisasi sebesar Rp640.414.960,00 atau 86,39%;
3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dianggarkan sebesar Rp69.480.000,00 terealisasi sebesar Rp60.250.000,00 atau 86,72%;
4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan sebesar Rp61.750.000,00 terealisasi sebesar Rp57.450.000,00 atau 93,04%;
5) Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 100%;
6) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp161.986.000,00 terealisasi sebesar Rp143.686.000,00 atau 88,70%;
7) Belanja Sewa Mebel dianggarkan sebesar Rp29.741.500,00 terealisasi sebesar Rp25.216.500,00 atau 84,79%;
8) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.500.000,00 atau 100%;
9) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dianggarkan sebesar Rp140.000.000,00 terealisasi sebesar Rp139.717.500,00 atau 99,80%;

10) Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp1.134.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 88,18%;
11) Belanja Sewa Personal Computer dianggarkan sebesar Rp16.500.000,00 terealisasi sebesar Rp15.550.000,00 atau 94,24%;
12) Belanja Sewa Peralatan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp18.700.000,00 terealisasi sebesar Rp17.200.000,00 atau 91,98%;
13) Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.000.000,00 atau 100%;

d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp2.032.040.000,00 terealisasi sebesar Rp1.822.775.000,00 atau 89,70% terdiri dari:
   1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp123.000.000,00 terealisasi sebesar Rp121.600.000,00 atau 98,86%;
   2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dianggarkan sebesar Rp206.000.000,00 terealisasi sebesar Rp166.150.000,00 atau 80,66%;
   3) Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.700.000,00 atau 98,33%;
   4) Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III dianggarkan sebesar Rp54.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.600.000,00 atau 56,67%;
   5) Belanja Sewa Hotel dianggarkan sebesar Rp1.481.040.000,00 terealisasi sebesar Rp1.336.725.000,00 atau 90,26%;
   6) Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 100%;

e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp94.500.000,00 terealisasi sebesar Rp88.850.000,00 atau 94,02% terdiri dari:
   1) Belanja Sewa Audio Visual dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau 75,00%;
   2) Belanja Sewa Tanaman dianggarkan sebesar Rp84.500.000,00 terealisasi sebesar Rp81.350.000,00 atau 96,27%.

f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp16.986.842.550,00 terealisasi sebesar Rp15.597.539.966,00 atau 91,82% terdiri dari:
   1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain interior dianggarkan sebesar Rp4.176.550.450,00 terealisasi sebesar Rp3.883.011.910,00 atau 92,97%;
   2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100%;
   3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp391.050.700,00 atau 97,76%;
   4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dianggarkan sebesar Rp2.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.768.966.000,00 atau 78,62%;
   5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang dianggarkan sebesar Rp1.570.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.503.343.215,00 atau 95,75%;
   6) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dianggarkan sebesar Rp112.000.000,00 terealisasi sebesar Rp103.173.024,00 atau 92,12%;
   7) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp6.183.292.100,00 terealisasi sebesar Rp5.914.240.717,00 atau 95,65%;
   8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.699.742.400,00 atau 87,17%;
   9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air dianggarkan sebesar Rp325.000.000,00 terealisasi sebesar Rp314.012.000,00 atau 96,62%;

g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.398.398.700,00 terealisasi sebesar Rp3.365.358.002,00 atau 99,03% terdiri dari:
   1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau100%;
   2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 terealisasi sebesar Rp88.983.705,00 atau 98,87%;
   3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp111.053.935,00 atau 85,43%;
   4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik dianggarkan sebesar Rp255.000.000,00 terealisasi sebesar R255.000.000,00 atau 100%;
   5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen dianggarkan sebesar Rp836.000.000,00 terealisasi sebesar Rp831.008.320,00 atau 99,40%;
   6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan–Jasa Khusus dianggarkan sebesar Rp1.770.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.766.038.042,00 atau 99,78%;
   7) Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp225.000.000,00 atau 100%;
   8) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan dianggarkan sebesar Rp57.398.700,00 terealisasi sebesar Rp53.274.000,00 atau 92,81%;

h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100% merupakan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2;

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp10.640.798.000,00 terealisasi

sebesar Rp8.200.943.000,00 atau 77,07% terdiri dari:

1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dianggarkan sebesar Rp4.415.991.000,00 terealisasi sebesar Rp2.407.396.000,00 atau 54,52%;
2) Belanja Sosialisasi dianggarkan sebesar Rp3.317.650.000,00 terealisasi sebesar Rp3.047.500.000,00 atau 91,86%;
3) Belanja Bimbingan Teknis dianggarkan sebesar Rp2.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.888.890.000,00 atau 92,14%;
4) Belanja Diklat Kepemimpinan dianggarkan sebesar Rp857.157.000,00 terealisasi sebesar Rp857.157.000,00 atau 100%;

j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp587.610.600,00 terealisasi sebesar Rp252.190.410,00 atau 42,92 terdiri dari:

1) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp1.344.000,00 terealisasi sebesar Rp672.000,00 atau 50,00%;
2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp19.488.000,00 terealisasi sebesar Rp9.744.000,00 atau 50,00%;
3) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp1.008.000,00 terealisasi sebesar Rp449.910,00 atau 44,63%;
4) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp3.696.000,00 terealisasi sebesar Rp1.324.800,00 atau 35,84%;
5) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp79.968.000,00 terealisasi sebesar Rp57.834.000,00 atau 72,32%;
6) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp1.680.000,00 terealisasi sebesar Rp840.000,00 atau 50,00%;
7) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp2.352.000,00 terealisasi sebesar

Rp1.176.000,00 atau 50,00%;

8) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp33.600,00 terealisasi sebesar Rp16.800,00 atau 50,00 %;
9) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp Rp114.240.000,00 terealisasi sebesar Rp48.740.700,00 atau 42,67%;
10) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dianggarkan sebesar Rp212.601.000,00 terealisasi sebesar Rp77.150.400,00 atau 36,29%.
11) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp151.200.000,00 terealisasi sebesar Rp54.241.800,00 atau 35,87%.

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp95.380.242,00 terealisasi sebesar Rp36.465.561,00 atau 38,23% terdiri dari:
1) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp13.493.853,00 terealisasi sebesar Rp10.120.389,00 atau 75,00%;
2) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp62.830.212,00 terealisasi sebesar Rp21.990.576,00 atau 35,00%;
3) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp5.984.718,00 terealisasi sebesar Rp2.393.887,00 atau 40,00%;
4) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp13.071.459,00 terealisasi sebesar Rp1.960.709,00 atau 15,00%.

3. Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp29.631.364.026,00 terealisasi sebesar Rp27.165.593.695,00 atau 91,68% terdiri dari:
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp7.666.876.000,00 terealisasi sebesar Rp6.621.615.420,00 atau 86,37%; terdiri dari:

1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya dianggarkan sebesar Rp270.000.000,00 terealisasi sebesar Rp267.227.435,00 atau 98,97%;
2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa dianggarkan sebesar Rp29.500.000,00 terealisasi sebesar Rp14.450.000,00 atau 48,98%;
3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dianggarkan sebesar Rp4.610.358.000,00 terealisasi sebesar Rp3.829.030.105,00 atau 83,05%;
4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.067.000,00 atau 94,13%;
5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp118.103.300,00 atau 87,48%;
6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00 terealisasi sebesar Rp315.078.370,00 atau 95,48%;
7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 83,33%;
8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur Alat Penguji Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp172.707.600,00 terealisasi sebesar Rp169.460.000,00 atau 98,12%;
9) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dianggarkan sebesar Rp15.500.000,00 terealisasi sebesar Rp14.865.000,00 atau 95,90%;
10) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100%;

11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp601.040.000,00 terealisasi sebesar Rp549.012.000,00 atau 91,34%;
12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.794.000,00 atau 65,29%;
13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dianggarkan sebesar Rp311.400.000,00 terealisasi sebesar Rp273.811.200,00 atau 87,93%;
14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp42.000.000,00 terealisasi sebesar Rp34.197.500,00 atau 81,42%;
15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya dianggarkan sebesar Rp302.550.400,00 terealisasi sebesar Rp293.802.468,00 atau 97,11%;
16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Unit-Personal Computer dianggarkan sebesar Rp437.000.000,00 terealisasi sebesar Rp388.182.344,00 atau 88,83%;
17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp288.820.000,00 terealisasi sebesar Rp247.754.698,00 atau 85,78%;
18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.180.000,00 atau 86,33%;
19) Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.600.000,00 atau 96,00%;

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp6.826.256.326,00 terealisasi sebesar Rp6.479.814.075,00 atau 94,92% terdiri dari:
   1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar

Rp5.957.106.326,00 terealisasi sebesar Rp5.624.963.965,00 atau 94,42%;

2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung-Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dianggarkan sebesar Rp824.150.000,00 terealisasi sebesar Rp811.568.500,00 atau 98,47%;
3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.994.110,00 atau 99,94%;
4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp33.287.500,00 atau 95,11%;

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp15.138.231.700,00 terealisasi sebesar Rp14.064.164.200,00 atau 92,90% terdiri dari:
   1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp9.416.279.500,00 terealisasi sebesar Rp8.643.652.000,00 atau 91,79%;
   2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.222.955.650,00 terealisasi sebesar Rp4.933.942.400,00 atau 94,47%;
   3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya dianggarkan sebesar Rp118.195.000,00 terealisasi sebesar Rp112.286.800,00 atau 95,00%;
   4) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik dianggarkan sebesar Rp380.801.550,00 terealisasi sebesar Rp374.283.000,00 atau 98,29%;

4. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp88.749.709.958,00 terealisasi sebesar Rp81.838.170.310,00 atau 92,21% terdiri dari:
   a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp88.749.709.958,00 terealisasi sebesar Rp81.839.752.310,00 atau 92,21%. terdiri dari:

1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp50.129.405.350,00 terealisasi sebesar Rp47.196.085.274,00 atau 94,15%;
2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan sebesar Rp31.418.096.608,00 terealisasi sebesar Rp28.464.108.036,00 atau 90,60%;
3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dianggarkan sebesar Rp2.244.753.000,00 terealisasi sebesar Rp1.925.009.000,00 atau 85,76%;
4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dianggarkan sebesar Rp4.957.455.000,00 terealisasi sebesar Rp4.254.550.000,00 atau 85,82%.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Ketiga dianggarkan sebesar Rp1.979.515.000,00 terealisasi sebesar Rp1.931.520.000,00 atau 97,58%, terdiri dari :
   a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.979.515.000,00 terealisasi sebesar Rp1.931.520.000,00 atau 97,58%, terdiri dari :
      1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan dianggarkan sebesar Rp63.000.000,00 terealisasi sebesar Rp61.735.000,00 atau 97,99%, terdiri dari:
         a) Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100% untuk hadiah doorprize bagi peserta "acara Gebyar Beraksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024";
         b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dianggarkan sebesar Rp500.000,00 terealisasi sebesar Rp485.000,00 atau 97,00% berupa piala untuk Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten;
         c) Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp33.250.000,00 terealisasi sebesar Rp32.500.000,00 atau 97,74% berupa hadiah untuk kegiatan lomba Tingkat SD dan SMP sekabupaten Lebak;

d) Kecamatan Cilograng dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau 100% berupa hadiah untuk penghargaan penyelenggaraan MUSREMBANG terbaik Tingkat Desa;

e) Kecamatan Warunggunung dianggarkan sebesar Rp2.250.000,00 terealisasi sebesar Rp2.250.000,00 atau 100% berupa hadiah penghargaan penyelenggaraan MUSREMBANG terbaik Tingkat Desa;

f) Kecamatan Cigemblong dianggarkan sebesar Rp500.000,00 dan tidak terealisasi;

2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dianggarkan sebesar Rp1.916.515.000,00 terealisasi sebesar Rp1.869.785.000,00 atau 97,56%, terdiri dari:

a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp232.170.000,00 terealisasi sebesar Rp232.170.000,00 atau 100% diberikan sebesar Rp52.920.000,00 kepada anggota Paskibraka Pelajar Kabupaten Lebak 2024 sebanyak 54 orang. sebesar Rp42.750.000,00 pembayaran Belanja uang saku PASKIBRA TNI - POLRI sebanyak 54 orang pada Kegiatan Diklat TC, sebesar Rp7.500.000,00 untuk Peserta Paskibraka tingkat Provinsi Banten kepada 10 orang, sebesar Rp81.000.000,00 untuk Uang kadeudeuh Paskibraka Lebak Tahun 2024 sebanyak 54 Orang;

b) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100% untuk penghargaan MUSREMBANG kepada 3 kantor kecamatan (Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Curugbitung dan Kecamatan Cijaku);

c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp71.500.000,00 terealisasi sebesar Rp71.500.000,00 atau 100% untuk penghargaan lomba edukatif kultural museum kepada 9 orang berupa hadiah uang tunai sejumlah Rp45.000.000,00 dan piala sejumlah Rp4.500.000,00, untuk penghargaan lomba essay Festival

Seni Multatuli 2024 kepada 3 orang berupa hadiah uang tunai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 500/40-Disbudpar/IX/2024 sebesar Rp10.000.000,00, honor juri sebesar Rp9.000.000,00 dan berupa piala sebesar Rp3.000.000,00;

d) Dinas Kepemudaan Olahraga dianggarkan sebesar Rp758.750.000,00 terealisasi sebesar Rp758.570.000,00 atau 99,98% untuk penghargaan/prestasi atlet dan pelatih peraih medali emas, perak dan perunggu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI dan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPAPERDA) VIII Kota Tangerang sebesar Rp696.000.000,00, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja kertas dan cover, Belanja souvenir/cindera mata, Belanja makanan dan minuman rapat, Belanja perjalanan dinas biasa, Belanja perjalanan dinas dalam kota, Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp1.000.000,00. Belanja penghargaan atas suatu prestasi uang penghargaan 6 orang pemuda lebak sebesar Rp25.000.000,00, Belanja piala lomba keterampilan baris-berbaris sebesar Rp5.820.000,00, membayar 12 orang tim juri lomba keterampilan baris berbaris (LKBB) sebesar Rp9.000.000,00, Belanja penghargaan atas suatu prestasi Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) kepada 9 sekolah sebesar Rp21.750.000,00;

e) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp49.500.000,00 terealisasi sebesar Rp49.500.000,00 atau 100%, sebesar Rp12.000.000,00 untuk Santunan Anak Khitan sebanyak 12 orang, sebesar Rp22.500.000,00 diserahkan kepada 14 orang yang menjadi pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024, sebesar Rp15.000.000,00 untuk lomba Jambore Kader Posyandu;

f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggarkan sebesar Rp39.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.000.000,00 atau 100%, diberikan kepada pemenang lomba dalam rangka Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Lebak sebesar Rp27.000.000,00 dan kepada pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak sebesar Rp12.000.000,00;

g) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dianggarkan sebesar Rp39.650.000,00 terealisasi sebesar Rp39.650.000,00 atau 100%, diberikan kepada duta anak/fasilitator anak Mewakili kabupaten Lebak Ke Provinsi Banten dan Nasional sebesar Rp5.000.000,00, kepada pemenang lomba batik beserta pengurus PKK sebesar Rp1.600.000,00, pengargaan kepada pengurus PKK yang sudah lama sebesar Rp13.400.000,00, anak sekolah yang kurang mampu sebesar Rp19.650.000,00;

h) Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp665.945.000,00 terealisasi sebesar Rp624.395.000,00 atau 93,76%, 85.900.000,00 diserahkan kepada Juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SD, 42 orang siswa penerima, dengan 11 cabang perlombaan sebesar Rp46.900.000,00, diserahkan kepada Juara Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) Tingkat SMP, 33 orang siswa penerima, dengan 11 cabang perlombaan sebesar Rp.36.850.000,00, diBelanjakan kepada pihak ke tiga dengan nama toko RAHARJO pemilik Sumartono sebesar Rp15.045.000,00, diserahkan kepada Juara Lomba Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMP, 105 orang siswa penerima, dengan 27 bidang yang di lombakan sebesar Rp190.500.000,00, diserahkan kepada Juara Lomba Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD, 133 orang siswa penerima, dengan 27 bidang yang di lombakan sebesar Rp235.000.000,00, diserahkan kepada juara lomba OSN Kabupaten jenjang SMP dengan 9 orang siswa penerima sebesar Rp10.050.000,00, diserahkan kepada Juara Lomba Apresisi siswa terhadap bahasa dan sastra, 42 orang siswa penerima, dengan 14 bidang yang di lombakan sebesar Rp47.450.000,00, diBelanjakan kepada penyedia piala dan piagam CV insan Suci sebesar Rp12.600.000,00, diberikan kepada juara lomba sekolah sehat 6 sekolah penerima terdiri atas 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama sebesar Rp30.000.000,00;

i) Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi Rp25.000.000,00 atau 100% diserahkan kepada Veteran dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79;

j) Kecamatan Cikulur dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100%, untuk penghargaan penyelenggaraan MUSREMBANG terbaik tingkat Desa;

k) Kecamatan Muncang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 100%, untuk penghargaan lomba UKS tingkat Kecamatan (juara 1 SDN 2 Muncang, juara 2 SDN 1 Sindangwangi dan juara 3 SDN 1 Tangjungwangi);

l) Kecamatan Sobang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 50,00%, untuk penghargaan lomba UKS.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp147.018.304.081,00 terealisasi sebesar Rp143.412.864.911,00 atau 97,55%. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada Tabel 5.20 berikut:

Tabel 5.20
RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
	Belanja Barang dan Jasa	**143.412.864.911,00**
a	**Belanja Barang**	**70.615.587.930,00**
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.671.945.085,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	68.964.345,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.610.500,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	2.012.241.930,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	233.638.440,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.532.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.777.793.879,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	998.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	13.364.294,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.046.650,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	499.500,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.824.268.213,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	341.505.295,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	13.340.198.438,00

RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	204.550.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	466.305.419,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.940.836.835,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.444.934.802,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.297.200,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.248.122.070,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	162.796.840,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	928.556.663,00
23	Belanja Obat-Obat-Obatan	998.060.733,00
24	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	31.600,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.830.740.650,00
26	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	135.935.600,00
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.382.143.100,00
28	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.200.000,00
29	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.750.000,00
30	Belanja Pakaian Teknik	2.700.000,00
31	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	4.000.000,00
32	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.275.511,00
33	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.260.000,00
34	Belanja Pakaian Olahraga	172.993.000,00
35	Belanja Pakaian Paskibraka	116.578.800,00
36	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	118.912.538,00
b	**Belanja Jasa**	**59.520.997.164,00**
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.104.197.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.260.000,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	34.250.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	39.016.750,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	48.100.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.173.811.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	395.947.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	27.435.351.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.430.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	3.536.304.610,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	72.850.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.126.410.844,00
13	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.620.515.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	329.282.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.220.402.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.981.306.544,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	92.502.420,00
18	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.025.000,00

RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
19	Belanja Jasa Tata Rias	14.410.000,00
20	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	32.325.500,00
21	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	397.609.640,00
22	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.185.400,00
23	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	74.945.000,00
24	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.700.000,00
25	Belanja Tagihan Telepon	8.913.000,00
26	Belanja Tagihan Air	96.380.790,00
27	Belanja Tagihan Listrik	1.114.434.196,00
28	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.128.899.500,00
29	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.598.666.587,00
30	Belanja Penambahan Daya	8.921.333,00
31	Belanja Registrasi/Keanggotaan	26.931.000,00
32	Belanja Lembur	793.399.000,00
33	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan/Pendidikan	6.000.000,00
34	Belanja Sewa Alat Pengangkat	15.050.000,00
35	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	21.200.000,00
36	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.000.000,00
37	Belanja Sewa Pompa	800.000,00
38	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	355.408.500,00
39	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	129.215.000,00
40	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.100.000,00
41	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	67.935.000,00
42	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.080.800,00
43	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.800.000,00
44	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	12.006.000,00
45	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	700.000,00
46	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	9.200.000,00
47	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	1.448.000,00
48	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	2.729.000,00
49	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	630.000,00
50	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.180.000,00
51	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	27.650.000,00
52	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	40.054.500,00
53	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	175.000,00
54	Belanja Sewa Peralatan Umum	27.081.250,00
55	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	82.215.000,00
56	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	19.287.000,00
57	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.700.000,00
58	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.060.000,00
59	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.360.000,00

RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
60	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.250.000,00
c	**Belanja Pemeliharaan**	**3.281.886.127,00**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	34.870.250,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan Printer	348.962.730,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	117.463.050,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	98.451.780,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	164.894.050,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.129.500,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.450.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.100.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	40.915.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	8.814.300,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	13.808.750,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	2.345.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	888.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	3.295.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	22.021.500,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	16.947.150,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	125.312.833,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	170.204.670,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	8.275.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	29.742.900,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	164.268.500,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.849.300,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	309.864.609,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	5.610.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	25.926.400,00
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	69.748.546,00
28	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	14.421.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air	2.250.000,00

RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	3
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	219.410.300,00
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	28.574.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	19.045.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	28.000.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	45.668.000,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.740.000,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	215.119.950,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.737.100,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8.856.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	15.033.900,00
40	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	126.935.750,00
41	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	45.698.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	283.274.050,00
43	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	68.435.919,00
44	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	110.989.240,00
45	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	123.236.300,00
46	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	7.850.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	6.672.800,00
48	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	5.580.000,00
d	**Belana Perjalanan Dinas**	**9.994.393.690,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	99.617.250,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	9.627.048.440,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	266.628.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.100.000,00
	JUMLAH	**143.412.864.911,00**

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp182.543.815.536,00 terealisasi sebesar Rp172.902.134.942,00 atau 94,72%. Rincian dari Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut:

Tabel 5.21
BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)
1		2	4
		Belanja Barang dan Jasa	**172.902.134.942,00**
1		**Belanja Barang**	**69.895.993.769,00**
	a	**Belanja Barang Pakai Habis**	**69.895.993.769,00**
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.310.000,00
		Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.263.230.399,00
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	725.877.177,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.039.000,00
		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	214.353.900,00
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.750.131.967,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	268.780.710,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	18.281.000,00
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	157.570.525,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.258.591.703,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	276.095.742,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	597.662.885,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	66.850.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	236.064.657,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	634.548.917,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	289.502.640,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.436.000,00
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.562.900,00
		Belanja Obat-Obatan-Obat	23.527.030.517,00
		Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.848.756.970,00
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	426.323.000,00
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	86.090.560,00
		Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.155.609.100,00
		Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56.310.000,00
		Belanja Pakaian Olahraga	4.983.500,00
2		**Belanja Jasa**	**94.207.661.124,00**
	a	**Belanja Jasa Kantor**	**87.387.933.909,98**
		Belanja Insentif Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.510.882,00
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.445.800.000,00
		Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan	46.111.993.851,00
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.914.519.493,00
		Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.043.396.000,00
		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	785.023.088,98
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	914.277.751,00

BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)
1		2	4
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.184.445.636,00
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.211.728.400,00
		Belanja Jasa Tenaga Supir	275.132.447,00
		Belanja Jasa Tenaga Teknologi dan Informasi	145.052.000,00
		Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.100.000,00
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	231.000.000,00
		Belanja Jasa Pengolahan Sampah	844.387.224,00
		Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	68.991.545,00
		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	340.224.905,00
		Belanja Tagihan Telepon	68.553.907,00
		Belanja Tagihan Air	83.354.920,00
		Belanja Tagihan Listrik	3.458.475.838,00
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.760.000,00
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	815.765.959,00
		Belanja Paket/Pengiriman	11.094.008,00
		Belanja Penambahan Daya	19.667.500,00
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.634.954,00
		Belanja Pengolahan Air Limbah	5.941.600,00
		Belanja Lembur	340.723.000,00
	b	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**1.044.800.351,02**
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	898.305.254,02
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.610.661,00
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	22.986.779,00
		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	103.897.657,00
	c	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.502.445.000,00**
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.850.000,00
		Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.498.845.000,00
		Belanja Sewa Towing Carriage	1.750.000,00
	d	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**204.660.000,00**
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.400.000,00
		Belanja Sewa Hotel	199.260.000,00
	e	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**11.000.000,00**
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	6.000.000,00
		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	5.000.000,00
	f	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**1.692.197.660,00**
		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	278.851.600,00
		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1.392.346.060,00
		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	21.000.000,00
	g	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**2.364.624.203,00**

BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)
1		2	4
		Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.093.124.203,00
		Belanja Sosialisasi	54.000.000,00
		Belanja Bimbingan Teknis	217.500.000,00
3		**Belanja Pemeliharaan**	**4.403.023.086,00**
	a	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**2.644.998.796,00**
		Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	365.650.460,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.160.712,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	59.884.450,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	25.224.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17.775.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	714.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.355.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100.237.150,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.385.682,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.267.600.699,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	480.145.465,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	9.775.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	11.350.000,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	28.658.160,00
		Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	3.316.098,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	7.241.000,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	65.778.000,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.850.000,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	1.200.000,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	10.124.000,00
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	5.170.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)
1		2	4
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	121.403.920,00
	b	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**1.746.044.130,00**
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.327.843.028,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	354.567.002,00
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	63.634.100,00
	c	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**11.980.160,00**
		Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dalam	5.225.160,00
		Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	6.755.000,00
4		**Belana Perjalanan Dinas**	**4.393.206.963,00**
	a	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.393.206.963,00**
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.872.411.781,00
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.786.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.830.000,00
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	394.179.182,00
5		**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**2.250.000,00**
	a	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**2.250.000,00**
		Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.250.000,00
		JUMLAH	**172.902.134.942,00**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp205.948.869.821,00 terealisasi sebesar Rp200.056.338.853,00 atau 97,14%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.668.468.153,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.387.870.700,00 atau 15,19%. Rincian realisasi pos Belanja hibah terdiri dari:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp527.340.000,00 terealisasi sebesar Rp508.554.121,00 atau 96,44% merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung berupa bangunan Gedung parkir;

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp164.103.737.320,00 terealisasi sebesar Rp157.860.084.065,00 atau 96,20% terdiri dari:
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp74.076.400.000,00 terealisasi sebesar Rp74.028.480.000,00 atau 99,94% merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:
      1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp47.120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.106.580.000,00 atau 99,97% diserahkan kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Kabupaten Lebak sebesar Rp300.000.000,00, Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (Fkpt) sebesar Rp200.000.000,00, Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Lebak sebesar Rp230.000.000,00, Forum Pemuda Lintas Agama (Fpla) Kabupaten Lebak sebesar Rp140.000.000,00, Badan Narkotika Kabupaten (Bnk) Lebak sebesar Rp100.000.000,00, Legiun Veteran Republik Indonesia (Lvri) Kabupaten Lebak sebesar Rp50.000.000,00, Forum Pembauran Kebangsaan (Fpk) Kabupaten Lebak sebesar Rp150.000.000,00, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp30.000.000.000,00, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp12.000.000,00, Kepolisian resort Lebak sebesar Rp2.986.580.000,00, dan Komando Dsitrik Militer Kodim sebesar Rp900.000.000,00;
      2) Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dianggarkan sebesar Rp620.700.000,00 terealisasi sebesar Rp620.700.000,00 atau 100% diserahkan kepada Badan Pengelola Gropark Bayah Dome;
      3) Dinas Kepemudaan Olahraga dianggarkan sebesar Rp1.295.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.295.000.000,00 atau 100% diserahkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00m Komite Nasional Pemuda Indonesia sebesar Rp45.000.000,00, Pranuka Karcab Lebak sebesar Rp100.000.000,00, National Paralympic Committee sebesar Rp150.000.000,00;

4) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.000.000,00 diserahkan kepada Palang Merah Indonesia;
5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp450.000.000,00 atau 100% diserahkan kepada radio Multatuli FM;
6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau 100% diserahkan kepada Dewan Koperasi Daerah (DEKOPINDA) sebesar Rp50.000.000,00 dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebesar Rp100.000.000,00;
7) Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.811.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.777.000.000,00 atau 98,10% diserahkan kepada Dewan Pendidikan sebesar Rp43.500.000,00, Forum Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp555.500.000,00, Forum Mahasiswa Kedokteran Tinggi Negeri sebesar Rp1.178.000.000,00;
8) Dinas Pertanian dianggarkan sebesar Rp22.379.200.000,00 terealisasi sebesar Rp22.379.200.000,00 atau 100% diserahkan kepada Kelompok tani sekabupaten Lebak berupa pembangunan irigasi air tanah, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung, pembangunan embung, pembangunan irigasi perpipaan;

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp7.145.489.850,00 terealisasi sebesar Rp6.721.828.467,00 atau 94,07% terdiri dari:
1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp550.000.000,00 atau 100% pada Dinas Pertanian kegiatan pekarangan pangan lestari diberikan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 berupa sarana produksi pertanian pada Kelompok Wanita Tani Melati mekar, Mekar Makmur, Sri Lestari mandiri, Karya mandiri, Mugi Lestari, Melati, Tunas Muda, Kramat Jaya, Parungsari Maju, Cipeundeuy Jaya, Sdap Malam;

2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp6.595.489.850,00 terealisasi sebesar Rp6.171.828.467,00 atau 93,58% terdapat pada:
   a) Dinas Pertanian dianggarkan sebesar Rp5.075.649.850,00 terealisasi sebesar Rp4.675.810.967,00 atau 92,12% diserahkan kepada Kelompok Tani berupa bibit manggis, dolomit, pestisida, NPK, pupuk organic, dan alat-alat pertanian;
   b) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dianggarkan sebesar Rp1.519.840.000,00 terealisasi sebesar Rp1.496.017.500,00 atau 98,43% berupa 1 (satu) paket pembangunan olahan pakan ternak Silase dan diserahkan kepada Kelompok Ternak Rukun Tani yang beralamat di Kp. Babakan Laban RT 013/03 Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana mendapatkan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Tani Ternak Bunga Seroja yang beralamat di Kp. Jahe RT 04/04 Desa Marga Jaya Kecamatan Cimarga mendapatakan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Ternak Bukit Satwa yang beralamat di Kp. Curug Lebak RT 003/006 Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak mendapatakan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Ternak Muda Karya yang beralamat di Kp. Buyut RT 01/01 Desa Kujang Sari Kecamatan Cileles mendapatkan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp82.881.847.470,00 terealisasi sebesar Rp77.109.775.598,00 atau 93,04% terdiri dari:
   1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp27.087.369.500,00 terealisasi sebesar Rp26.924.844.500,00 atau 99,40% terdapat pada:
      a) Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% untuk penanganan HIV;

b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp9.167.293.500,00 teralisasi sebesar Rp9.167.293.500,00 atau 100% diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat berupa Pembangunan tangki septik dan pengadaan tangki bio septik;

c) Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp17.520.076.000,00 terealisasi sebesar Rp17.357.551.000,00 atau 99,07% diserahkan kepada Lembaga keagamaan, madrasah diniyah, pondok pesantrean, majlis ta'lim dan Mesjid berupa bantuan Belanja hibah uang;

d) Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/KEP.114-DINSOS/2024 Tanggal 26 Maret Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang;

2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp55.794.477.970,00 terealisasi sebesar Rp50.184.931.098,00 atau 89,95% terdapat pada:

a) Dinas Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.004.065.570,00 terealisasi sebesar Rp1.888.770.900,00 atau 94,25% diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah Dan Pemasar, Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB);

b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp53.790.412.400,00 terealisasi sebesar Rp48.296.160.198,00 atau 89,79% diserahkan kepada Desa berupa hibah jalan desa sebesar Rp32.508.221.707,00 berupa Jembatan sebesar Rp1.999.390.300,00 Sarana Air Minum sebesar Rp13.788.548.191,00;

3. Belanja Hibah Dana Bos dianggarkan sebesar Rp11.216.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.768.908.166,00 atau 104,92%;
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp2.427.092.501,00 terealisasi Rp2.427.092.501,00 atau 100% diserahkan kepada;

a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar Rp333.454.334,00;
b. Partai Demokrat sebesar Rp365.498.000,00;
c. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp428.332.333,00;
d. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebesar Rp299.519.500,00;
e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp241.416.000,00;
f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp246.550.500,00;
g. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebesar Rp237.482.000,00;
h. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)sebesar Rp64.137.500,00;
i. Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp210.702.334,00.

5. Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan sebesar Rp27.674.000.000,00 terealisasi sebesar Rp27.491.700.000,00 atau 99,34%, terdiri dari:
   a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp18.884.400.000,00 terealisasi sebesar Rp Rp18.884.400.000,00 atau 100%;
   b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp8.789.600.000,00, terealisasi sebesar Rp.8.607.300.000,00 atau 97,93%;

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.086.800.000,00 terealisasi sebesar Rp8.067.000.000,00 atau 99,76% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.878.985.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp188.015.000,00 atau 2,39%. Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tahun Anggaran 2024 Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp5.086.800.000,00 terealisasi sebesar Rp5.067.000.000,00 atau 99,61% pada Dinas Sosial diberikan kepada penyandang disabilitas sekabupaten Lebak;
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100% pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp276.666.233.886,00 dan terealisasi sebesar Rp267.154.805.102,00 atau 96,56%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp292.231.159.082,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.076.353.980,00 atau 8,58%. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.22 sebagai berikut:

Tabel 5.22
BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Tanah**		**241.327.000,00**	**223.607.000,00**	**92,67**	**680.667.000,00**
	a	Belanja Modal Lapangan	241.327.000,00	223.607.000,00	92,67	680,667,000,00
2	**Belanja Peralatan dan Mesin**		**57.797.475.919,00**	**54.290.255.942,00**	**93,93**	**52.961.141.478,00**
	a	Belanja Modal Alat Berat	86.363.200,00	79.500.000,00	92,05	1,545,577,000,00
	b	Belanja Modal Alat Angkutan	7.773.710.500,00	7.367.876.200,00	94,78	5,147,030,300,00
	c	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	190.835.000,00	187.520.000,00	98,26	630,000,00
	d	Belanja Modal Alat Pertanian	287.773.000,00	277.524.000,00	96,44	177,450,000,00
	e	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.698.536.300,00	5.346.317.980,00	93,82	7,773,229,620,00
	f	Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	167.238.400,00	158.790.000,00	94,95	40,050,000,00
	g	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.866.795.800,00	5.707.171.702,00	97,28	1,995,276,959,00
	h	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.106.271.000,00	7.872.938.750,00	97,12	4,148,097,000,00
	i	Belanja Modal Komputer	2.276.361.050,00	2.123.525.000,00	93,29	2,725,102,500,00
	j	Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.840.000,00	3.000.000,00	78,13	0,00
	k	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	55.030.000,00	47.556.000,00	86,42	18,000,000,00
	l	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	673.142.500,00
	m	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.616.076.000,00	1.502.751.000,00	92,99	1,253,426,800,00

BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2		3	4	5	6
	n	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.523.897.930,00	17.641.569.787,00	106,76	18.722.799.938,00
	o	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.144.747.739,00	5.974.215.523,00	65,33	8,741,328,861,00
3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**		**135.258.706.446,00**	**130.234.495.550,00**	**96,29**	**120.796.480.879,00**
	a	Belanja Modal Bangunan Gedung	134.593.896.446,00	130.125.053.830,00	96,68	119,704,474,109,00
	b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	664.810.000,00	109.441.720,00	16,46	1,092,006,770,00
4	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**		**75.612.246.532,00**	**72.723.089.637,00**	**96,18**	**111.582.764.128,00**
	a	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.281.047.674,00	67.577.563.337,00	96,15	107,120,262,071,00
	b	Belanja Modal Bangunan Air	3.116.198.858,00	2.964.226.300,00	95,12	1,854,903,407,00
	c	Belanja Modal Instalasi	2.215.000.000,00	2.181.300.000,00	98,48	0,00
	d	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	461.218.000,00
	e	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	2.146.380.650,00
5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**		**7.756.477.989,00**	**9.683.356.973,00**	**124,84**	**6.210.105.597,00**
	a	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	371.130.000,00	365.363.000,00	98,45	0,00
	b	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	22.750.000,00	19.325.000,00	84,95	0,00
	c	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	18,662,400,00
	d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.362.597.989,00	9.298668.973,00	126,30	6.191.443.197,00
	JUMLAH		**276.666.233.886,00**	**267.154.805.102,00**	**96,56**	**292.231.159.082,00**

Adapun rincian Belanja modal Pemerintah Kabupaten lebak pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp241.327.000,00 terealisasi sebesar Rp223.607.000,00 atau 92,66% pada Belanja Modal Lapangan terdiri dari:

1. Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp182.700.000,00 terealisasi sebesar Rp164.980.000,00 atau 90,30%;
2. Belanja Modal Tanah untuk Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp58.627.000,00 terealisasi sebesar Rp58.627.000,00 atau 100%.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp57.797.475.919,00 terealisasi sebesar Rp54.290.255.942,00 atau 93,93% terdiri dari:

1. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp86.363.200,00 terealisasi sebesar Rp79.500.000,00 atau 92,05% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Besar Darat dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.700.000,00 atau 98.50,% yaitu Belanja Modal Mesin Proses;
   b. Belanja Modal Alat Bantu dianggarkan sebesar Rp66.363.200,00 terealisasi sebesar Rp59.800.000,00 atau 90,11% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Alat Penarik dianggarkan sebesar Rp41.563.200,00 terealisasi sebesar Rp36.500.000,00 atau 87,82%;
      2) Belanja Modal Electric Generating Set dianggarkan sebesar Rp14.300.000,00 terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau 97,90%;
      3) Belanja Modal Pompa dianggarkan sebesar Rp10.500.000,00 terealisasi sebesar Rp9.300.000,00 atau 88,57%.
2. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp7.773.710.500,00 terealisasi sebesar Rp7.367.876.200,00 atau 94,78% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp7.013.354.500,00 terealisasi sebesar Rp6.654.476.200,00 atau 94,88% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dianggarkan sebesar Rp1.998.377.000,00 terealisasi sebesar Rp1.767.945.000,00 atau 88,47%;
      2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dianggarkan sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp307.680.000,00 atau 96,15%;
      3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp161.000.000,00 atau 89,44%;
      4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan sebesar Rp4.514.977.500,00 terealisasi sebesar Rp4.417.851.200,00 atau 97,85%.

b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dianggarkan sebesar Rp760.356.000,00 terealisasi sebesar Rp713.400.000,00 atau 93,82% terdiri dari:
   1) Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang dianggarkan sebesar Rp75.356.000,00 terealisasi sebesar Rp67.800.000,00 atau 89,97%;
   2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya dianggarkan sebesar Rp685.000.000,00 terealisasi sebesar Rp645.600.000,00 atau 94,25%.

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp190.835.000,00 terealisasi sebesar Rp187.520.000,00 atau 98.26% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dianggarkan sebesar Rp1.235.000,00 terealisasi sebesar Rp1.220.000,00 atau 98,79% pada Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya;
   b. Belanja Modal Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp189.600.000,00 terealisasi sebesar Rp186.300.000,00 atau 98,26% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara dianggarkan sebesar Rp46.200.000,00 terealisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau 95,24%;
      2) Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp143.400.000,00 terealisasi sebesar Rp142.300.000,00 atau 99,23%.

4. Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp287.773.000,00 terealisasi sebesar Rp277.524.000,00 atau 96,44% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Pengolahan dianggarkan sebesar Rp287.773.000,00 terealisasi sebesar Rp277.524.000,00 atau 96,44% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak dianggarkan sebesar Rp6.850.000,00 terealisasi sebesar Rp6.724.000,00 atau 98,16%;
      2) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan dianggarkan sebesar Rp262.923.000,00 terealisasi sebesar Rp256.400.000,00 atau 97,52%.;
      3) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.400.000,00 atau 80%.

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp5.698.536.300,00 terealisasi sebesar Rp5.346.317.980,00 atau 93.82%, terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp549.100.000,00 terealisasi sebesar Rp328.443.980,00 atau 59,81% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp24.900.000,00 terealisasi sebesar Rp17.280.000,00 atau 69,40%;
      2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp524.200.000,00 terealisasi sebesar Rp311.163.980,00 atau 59,36%;
   b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.705.188.500,00 terealisasi sebesar Rp4.597.549.000,00 atau 97,71% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Mebel dianggarkan sebesar Rp4.022.418.300,00 terealisasi sebesar Rp3.988.129.000,00 atau 99,15%;
      2) Belanja Modal Alat Pembersih dianggarkan sebesar Rp8.415.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 35,65%;
      3) Belanja Modal Alat Pendingin dianggarkan sebesar Rp337.187.400,00 terealisasi sebesar Rp317.730.000,00 atau 94,23%;
      4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp302.900.800,00 terealisasi sebesar Rp262.480.000,00 atau 86,66%;
      5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp34.267.000,00 terealisasi sebesar Rp26.210.000,00 atau 76,49%.
   c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp444.247.800,00 terealisasi sebesar Rp420.325.000,00 atau 94,61% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dianggarkan sebesar Rp155.779.400,00 terealisasi sebesar Rp136.875.000,00 atau 87,86%;
      2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.250.000,00 atau 91,25%;
      3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat dianggarkan sebesar Rp43.118.400,00 terealisasi sebesar Rp42.160.000,00 atau 97,78%;

4) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dianggarkan sebesar Rp225.350.000,00 terealisasi sebesar Rp223.040.000,00 atau 98,97%;

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp167.238.400,00 terealisasi sebesar Rp158.790.000,00 atau 94,95% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Studio dianggarkan sebesar Rp167.238.400,00 terealisasi sebesar Rp158.790.000,00 atau 94,95% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Peralatan Studio Audio dianggarkan sebesar Rp97.238.400,00 terealisasi sebesar Rp89.090.000,00 atau 91,62%;
      2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar Rp69.700.000,00 atau 99,57%;
7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.866.795.800,00 terealisasi sebesar Rp5.707.171.702,00 atau 97,28% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp3.664.195.800,00 terealisasi sebesar Rp3.509.907.982,00 atau 95,79% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dianggarkan sebesar Rp719.450.000,00 terealisasi sebesar Rp619.207.982,00 atau 86,07%;
      2) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah dianggarkan sebesar Rp723.095.000,00 terealisasi sebesar Rp723.000.000,00 atau 99,99%;
      3) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung dianggarkan sebesar Rp38.680.980,00 dan tidak terealisasi;
      4) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic dianggarkan sebesar Rp2.157.624.020,00 terealisasi sebesar Rp2.148.000.000,00 atau 99,55%;
      5) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya dianggarkan sebesar Rp25.345.800,00 terealisasi sebesar Rp19.700.000,00 atau 77,72%.
   b. Belanja Modal Alat Kesehatan umum dianggarkan sebesar Rp2.202.600.000,00 terealisasi sebesar Rp2.197.263.720,00 atau 99,76% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum lainnya.
8. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp8.106.271.000,00 terealisasi sebesar Rp7.872.938.750,00 atau 97,12%. Terdiri dari:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp7.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.999.338.750,00 atau 97,21% yaitu merupakan Belanja Modal Laboratorium Pendidikan
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp906.271.000,00 terealisasi sebesar Rp873.600.000,00 atau 96,40% terdiri dari:
    1) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah dianggarkan sebesar Rp650.271.000,00 terealisasi sebesar Rp630.000.000,00 atau 96,88%;
    2) Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara dianggarkan sebesar Rp256.000.000,00 terealisasi sebesar Rp243.600.000,00 atau 95,16%.

9. Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp2.276.361.050,00 terealisasi sebesar Rp2.123.525.000,00 atau 93,29% terdiri dari:
    a. Belanja Modal Komputer Unit dianggarkan sebesar Rp1.834.649.050,00 terealisasi sebesar Rp1.703.250.000,00 atau 92,84% yaitu merupakan Belanja Modal Personal Computer;
    b. Belanja Modal Peralatan Komputer dianggarkan sebesar Rp441.712.000,00 terealisasi sebesar Rp420.275.000,00 atau 95,15% terdiri dari:
        1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp272.117.000,00 terealisasi sebesar Rp256.625.000,00 atau 94,31%;
        2) Belanja Modal Peralatan Jaringan dianggarkan sebesar Rp131.530.000,00 terealisasi sebesar Rp130.500.000,00 atau 99,22%;
        3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dianggarkan sebesar Rp38.065.000,00 terealisasi sebesar Rp33.150.000,00 atau 87,09%.
10. Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp3.840.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 78,13% merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi yaitu Belanja Modal Ukur/Instrumen.
11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp55.030.000,00 terealisasi sebesar Rp47.556.000,00 atau 86,42% terdiri dari:
    a. Belanja Modal Alat Pelindung dianggarkan sebesar Rp24.750.000,00 terealisasi sebesar Rp21.000.000,00 atau 84,85% yaitu merupakan Belanja Modal Sepatu Lapangan;

b. Belanja Modal Alat SAR dianggarkan sebesar Rp10.480.000,00 terealisasi sebesar Rp10.156.000,00 atau 96,91% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Penolong;

c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan dianggarkan sebesar Rp19.800.000,00 terealisasi sebesar Rp16.400.000,00 atau 82,83% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik.

12. Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp1.616.076.000,00 terealisasi sebesar Rp1.502.751.000,00 atau 92,99% merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yaitu Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar.

13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp16.523.897.930,00 terealisasi sebesar Rp17.641.569.787,00 atau 106,76%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos dapat dilihat pada tabel 5.23 berikuti:

Tabel 5.23
RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	REALISASIRp)
1	2	3
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1	**Belanja Modal Alat Besar**	**167.747.165,00**
	Belanja Modal Compressor	35.430.000,00
	Belanja Modal Electric Generating Set	10.250.000,00
	Belanja Modal Pompa	122.067.165,00
2	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**14.200.000,00**
	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	14.200.000,00
3	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**10.399.112.122,00**
	Belanja Modal Mesin Ketik	21.231.000,00
	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.700.000,00
	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	22.080.000,00
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	492.361.100,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.865.464.706,00
	Belanja Modal Mebel	4.235.228.406,00
	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.500.000,00
	Belanja Modal Alat Pembersih	23.954.900,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	439.162.210,00
	Belanja Modal Alat Dapur	58.462.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	217.417.800,00
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.550.000,00
4	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**1.078.855.900,00**
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	471.309.350,00

RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	REALISASIRp)
1	2	3
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31.320.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	90.771.000,00
	Belanja Modal Peralatan Cetak	477.800.550,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	6.000.000,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	1.500.000,00
	Belanja Modal Switcher Antena	155.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium	**359.386.250,00**
	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	885.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	6.045.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	2.000.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	5.300.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	13.600.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	7.938.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	15.656.500,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	6.600.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.200.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	7.020.000,00
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama	750.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	16.986.450,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	115.171.500,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	122.812.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	37.421.800,00
	Belanja Modal Komputer	**5.581.651.750,00**
	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.167.179.600,00
	Belanja Modal Personal Computer	2.240.631.800,00
	Belanja Modal Peralatan Mainframe	33.789.000,00
	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	157.555.600,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	322.203.000,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	21.230.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.639.062.750,00
	Belanja Modal Alat Peraga	**6.330.000,00**
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	500.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	5.830.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	**34.286.600,00**
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	17.349.200,00
	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.534.000,00
	Belanja Modal Peralatan Senam	10.093.400,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	800.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	510.000,00
	JUMLAH	**17.641.569.787,00**

14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp9.144.747.739,00 terealisasi sebesar Rp5.974.215.523,00 atau 65,33%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dapat dilihat dari tabel 5.24 berikut:

Tabel 5.24
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI (Rp)
1		2	3
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**5.974.215.523,00**
1		**Belanja Modal Alat Besar**	**75.999.999,00**
	a	**Belanja Modal Alat Bantu**	**75.999.999,00**
		Belanja Modal Electric Generating Set	73.999.999,00
		Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.000.000,00
2		**Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**664.865,00**
	a	**Belanja Modal Alat Ukur**	**664.865,00**
		Belanja Modal Alat Alat Ukur Lainnya	664.865,00
3		**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**2.996.602.045,00**
	a	**Belanja Modal Alat Kantor**	**34.732.500,00**
		Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.700.000,00
		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.032.500,00
	b	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**1.917.265.625,00**
		Belanja Modal Mebel	125.433.500,00
		Belanja Modal Alat Pembersih	2.500.000,00
		Belanja Modal Alat Pendingin	1.457.245.700,00
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	330.511.425,00
		Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.575.000,00
	c	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**1.044.603.920,00**
		Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	596.237.780,00
		Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	425.541.140,00
		Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	17.125.000,00
		Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.700.000,00
4		**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**140.937.000,00**
	a	**Belanja Modal Alat Studio**	**140.937.000,00**
		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	44.759.000,00
		Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.500.000,00
		Belanja Modal Alat Studio Lainnya	89.678.000,00
5		**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**1.198.331.014,00**
	a	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**1.198.331.014,00**
		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.099.669.990,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	25.772.300,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	110.000,00

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI (Rp)
		Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	59.803.724,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.250.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.200.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	475.000,00
		Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.500.000,00
		Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	550.000,00
6		**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**14.177.000,00**
	a	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**12.277.000,00**
		Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	11.492.000,00
		Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	785.000,00
	b	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir**	**1.900.000,00**
		Belanja Modal General Laboratory Tool	1.900.000,00
7		**Belanja Modal Komputer**	**1.535.973.600,00**
	a	**Belanja Modal Komputer Unit**	**1.108.868.000,00**
		Belanja Modal Personal Computer	802.174.000,00
		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	306.694.000,00
	b	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**427.105.600,00**
		Belanja Modal Peralatan Mini Computer	85.368.600,00
		Belanja Modal Peralatan Personal Computer	151.710.300,00
		Belanja Modal Peralatan Jaringan	184476700
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.550.000,00
8		**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**5.670.000,00**
	a	**Belanja Modal Alat Deteksi**	**5.670.000,00**
		Belanja Modal Alat Deteksi Suara	5.670.000,00
9		**Belanja Modal Peralatan Olagraga**	**5.860.000,00**
	a	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**5.860.000,00**
		Belanja Modal Peralatan Permainan	5.860.000,00
		JUMLAH	**5.974.215.523,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp135.258.706.446,00 terealisasi sebesar Rp130.234.495.550,00 atau 96,29% terdiri dari:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp134.593.896.446,00 terealisasi sebesar Rp130.125.053.830,00 atau 96,68%, terdiri dari:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp134.593.896.446,00 terealisasi sebesar Rp130.125.053.830,00 atau

96,68% terdiri dari:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp4.490.044.050,00 terealisasi sebesar Rp4.325.996.999,00 atau 96,35%;
2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.648.200.000,00 terealisasi sebesar Rp5.508.957.540,00 atau 97,53%;
3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dianggarkan sebesar Rp108.760.067.296,00 terealisasi sebesar Rp105.434.791.700,00 atau 96,94%;
4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp291.717.000,00 atau 97,24%;
5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dianggarkan sebesar Rp4.281.190.000,00 terealisasi sebesar Rp4.074.846.577,00 atau 95,18%;
6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan dianggarkan sebesar Rp1.550.507.800,00 terealisasi sebesar Rp1.506.944.000,00 atau 97,19%;
7) Belanja Modal Bangunan Gedung Museum dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp121.608.396,00 atau 97,29%;
8) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara dianggarkan sebesar Rp70.576.000,00 terealisasi sebesar Rp68.128.800,00 atau 96,53%;
9) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.340.412.000,00 terealisasi sebesar Rp1.977.258.000,00 atau 84,48%;
10) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum dianggarkan sebesar Rp7.027.899.300,00 terealisasi sebesar Rp6.814.804.818,00 atau 96,97%.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp664.810.000,00 terealisasi sebesar Rp109.441.720,00 atau 16,46%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dapat dilihat pada tabel 5.25 berikut:

Tabel 5.25
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO		URAIAN	REALISASI (Rp)
1		2	3
A		**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**109.441.720,00**
1		**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**109.441.720,00**
	a	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**109.441.720,00**
		Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	34.941.720,00
		Belanja Modal Bangunan Kesehatan	74.500.000,00
		JUMLAH	**109.441.720,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp75.612.246.532,00 terealisasi sebesar Rp72.723.089.637,00 atau 96,18%, terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp70.281.047.674,00 terealisasi sebesar Rp67.577.563.337,00 atau 96,15% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Jalan dianggarkan sebesar Rp67.794.647.674,00 terealisasi sebesar Rp65.166.644.337,00 atau 96,12% terdiri dari:
      1) Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp65.158.303.974,00 terealisasi sebesar Rp62.739.213.437,00 atau 96,29%;
      2) Belanja Modal Jalan Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.636.343.700,00 terealisasi sebesar Rp2.427.430.900,00 atau 92,08%;
2. Belanja Modal Jembatan dianggarkan sebesar Rp2.486.400.000,00 terealisasi sebesar Rp2.410.919.000,00 atau 96,96% merupakan Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
3. Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp3.116.198.858,00 terealisasi sebesar Rp2.964.226.300,00 atau 95,12% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam dianggarkan sebesar Rp3.009.486.050,00 terealisasi sebesar Rp2.862.004.300,00 atau 95,10%;
   b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor dianggarkan sebesar Rp106.712.808,00 terealisasi sebesar Rp102.222.000,00 atau 95,79% merupakan Belanja Modal

Air Kotor Lainnya.

4. Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp2.215.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.181.300.000 atau 98,48% terdiri dari:
   a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan tidak terealisasi;
   b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.181.300.000,00 atau 99,15% merupakan Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp7.756.477.989,00 terealisasi sebesar Rp9.683.356.973,00 atau 124.84%, terdiri dari:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp371.130.000,00 terealisasi sebesar Rp365.363.000,00 atau 98,45% merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak yaitu Belanja Modal Buku Umum;
2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp22.750.000,00 terealisasi sebesar Rp19.325.000,00 atau 84,95% merupakan Belanja Modal Tanda Penghargaan yaitu Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya;
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp7.362.597.989,00 terealisasi sebesar Rp9.298.668.973,00 atau 126,30%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos dapat dilihat pada tabel 5.26 berikut:

Tabel 5.26
RINCIAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	REALISASIRp)
1	2	3
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**9.034.180.173,00**
	Belanja Modal Buku Umum	7.717.798.352,00
	Belanja Modal Buku Filsafat	5.254.100,00
	Belanja Modal Buku Agama	167.043.800,00
	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	157.732.800,00
	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	362.031.800,00
	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	301.037.000,00

RINCIAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BOSP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN	REALISASIRp)
1	2	3
	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	67.198.000,00
	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	148.752.200,00
	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	15.052.050,00
	Belanja Modal Audio Visual	88.604.571,00
	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	3.675.500,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	**154.720.000,00**
	Belanja Modal Alat Musik	103.671.800,00
	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	38.601.700,00
	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	500.000,00
	Belanja Modal Barang Kerajinan	11.946.500,00
	Belanja Modal Bangunan Air	**16.589.800,00**
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	16.589.800,00
	Belanja Modal Instalasi	**88.181.000,00**
	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	88.181.000,00
	Belanja Modal Jaringan	**4.998.000,00**
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.998.000,00
	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	1.000.000,00
	JUMLAH	**9.298.668.973,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Akun Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi keperluan penanganan atas kerusakan sarana prasarana publik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Lebak. Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.073.483.803,00 dan terealisasi sebesar Rp18.659.748.315,00 atau 92,96%. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat padaTabel 5.27 berikut:

Tabel 5.27
BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**16.147.744.500,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pembelian Terpal Bagi Pengungsi di Hunian Sementara (Huntara) Blok Cibadung Desa Banjaririgasi Kec. Lebakgedong Kab. Lebak TA. 2024	96.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Jalan Sukahujan - Cigemblong (Ds. Citeupuseun) Kec. CiharaKab. Lebak TA. 2024	203.823.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penangan Bencana Alam Daerah Irigasi (DI) Cisilad Desa Padang Kecamatan Cileles Kab. Lebak TA. 2024	315.218.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Jalan Ciparay - Warungbanten STA.5+200 Kecamatan Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	83.650.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Cirompang Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kab. Lebak TA. 2024	1.028.882.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Cimondene Girang Desa Hariang Kecamatan Sobang Kab. Lebak TA. 2024	767.044.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Rehabilitasi Jembatan Citogol Desa Ciapus Kecamatan Cijaku Kab. Lebak TA. 2024	632.591.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanganan Kerusakan Insfrastruktur Jalan Pasir Kuray-Cisitu/CIkidang Desa Kujangjaya Kec. CIbeber Kab. Lebak TA. 2024	254.245.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi SMPN 1 Rangkasbitung Akibat Bencana Hujan deras di Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak TA. 2024	234.676.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan MCK di Hunian Sementara (Huntara) di Desa Banjarsari Kec. Lebakgedong Kab. Lebak TA. 2024	94.969.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Bantuan Kebutuhan Logistik Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di 9 Kecamatan di Kab. Lebak TA. 2024	129.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Ruas Jalan Rangkasbitung - Gajrug STA.10+700 kp. Hantap Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak TA. 2024	589.311.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Rehabilitasi Ruas Jalan Sampay - Gunungkencana STA.3+140 kp. Cibangkur Ds. Sukadaya Kecamatan Cikulur Kab. Lebak TA. 2024	800.162.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Ciujung, Kampung Dukuh Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles Kab. Lebak TA. 2024	45.954.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Cisawarna, Desa Lebaktipar Kec. Cilograng Kab. Lebak TA. 2024	447.948.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Perkuatan Tebing Sungai Cisono, Desa Sirnagalih Kec. Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	526.557.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Cimasuk, Desa Cikate Kec. Cigemblong Kab. Lebak TA. 2024	396.191.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
18	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rahangbelang, Desa Cibeureum Kec. Cijaku Kab. Lebak TA. 2024	460.796.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Turap Penahan Tanah(TPT) pada Kantor BAKESBANGPOL Kab. Lebak TA. 2024	170.438.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabiitasi Jembatan Gantung Sungai Ciujung di Kp. Nangklak Desa Margatirta Kecamatan Cimarga Kab. Lebak TA. 2024	73.996.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur SDN 2 Giriharja Kecamatan Cipanas Kab. Lebak TA. 2024	573.550.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur Bantaran Sungai Cidurian (Sampora) Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kab. Lebak TA. 2024/HILIR	994.287.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur SMPN 5 Muncang dan SMPN 5 Sobang Kab. Lebak TA. 2024	372.204.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infastruktur Bantaran Sungai Cidurian (Sampora) Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kab. Lebak TA. 2024/HULU	1.190.108.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kegiatan Penunjang Operasional Percepatan Penanganan Pohon Tumbang di Sekitaran Kota Rangkasbitung TA. 2024	164.086.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Belanja pengadaan BUFFER STOCK LOGISTIK Kebencanaan menghadapi Bencana Alam di Kab. Lebak TA. 2024	360.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan kerusakan infrastruktur SDN Malabar Kec. Cibadak, SDN 1 Kalanganyar Kec. Kalanganyar, dan SMPN 1 Cimarga Kab Lebak TA. 2024	798.297.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Jalan KH. Atim Cijoro Lebak Desa MC. Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak TA. 2024	93.642.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Jalan Raya Ciparay - Warungbanten Kec. Cibeber Kab. Lebak TA. 2024	360.407.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SMPN 1 Malingping Kab. Lebak TA. 2024	250.999.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SDN 2 Citorek Barat Kab. Lebak TA. 2024	88.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehabilitasi Bangunan akibat terdampak bencana pada SDN Jatimulya Kab. Lebak TA. 2024	127.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
33	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor berdasarkan SK Pj Bupati Lebak Nomor 360/Kep.411-BPBD/2024 tanggal 02 Desember 2024	3.422.013.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
II	**DINAS SOSIAL**	**1.768.000.000,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan AGUSTUS TA. 2023	144.000.000,00	Dinas Sosial
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan SEPTEMBER-OKTOBER TA. 2023	367.000.000,00	Dinas Sosial
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan NOPEMBER TA. 2023	186.000.000,00	Dinas Sosial
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan DESEMBER 2023 Tahun Anggaran 2024	170.000.000,00	Dinas Sosial
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan JANUARI sd. FEBRUARI TA. 2024	236.000.000,00	Dinas Sosial
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan MARET sd. APRIL TA. 2024	297.000.000,00	Dinas Sosial
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan Mei sd. Juli TA. 2024	187.000.000,00	Dinas Sosial
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan AGUSTUS TA. 2024	38.000.000,00	Dinas Sosial
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan SEPTEMBER TA. 2024	110.000.000,00	Dinas Sosial
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak bulan OKTOBER TA. 202	33.000.000,00	Dinas Sosial
III	**RSUD ADJIDARMO**	**139.617.617,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) untuk Biaya Pengobatan dan Perawatan pasieun di RSUD Adjidarmo Kab. Lebak bulan NOPEMBER 2023 TA. 2024	105.646.400,00	RSUD Dr. Adjidarmo
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (Bansos TT) untuk Biaya	33.971.217,00	RSUD Dr. Adjidarmo

BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengobatan dan Perawatan pasieun di RSUD Adjidarmo Kab. Lebak bulan DESEMBER 2023 dan JANUARI 2024 TA. 2024		
IV	**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**334.029.900,00**	
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pemenuhan belanja tambahan Ribbon Film KTP-EL dan Ribbon Kartu Identitas Anak tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lebak	334.029.900,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
V	**LAIN-LAIN**	**270.356.298,00**	
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Panwaslu Ad-Hoc Se-Kabupaten Lebak TA. 2024	25.512.300,00	Rekening Perantara BJB 0019260315360
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga (9 pengelola parkir tepi jalan umum) tahun 2024	133.606.058,00	CV. TRIULINA DAN 8 LAINNYA
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga (9 pengelola parkir tepi jalan umum) bulan JULI tahun 2024	54.287.200,00	CV. TRIULINA DAN 8 LAINNYA
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Makan dan Minum	2.025.000,00	KAS DESA CALUNG BUNGUR
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1.440.243,00	SUPRATNO 00800104408453 BRI
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas Kesalahan Transfer ke RKUD	200.000,00	muhamad SOLEH
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Makan dan Minum	2.835.000,00	KAS DESA CALUNG BUNGUR
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembayaran Belanja Imbal Jasa Pihak ketiga Pengelola Pasar Muncang tahun anggaran 2023	47.856.000,00	KAS DESA CIMINYAK
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian atas double pembayaran Pajak Air Tanah dari PT. SATWA PRIMAINDO	2.594.497,00	PT. SATWA PRIMAINDO
	JUMLAH	**18.659.748.315,00**	

5.1.2.4 Transfer

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lebak ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan untuk Transfer sebesar Rp502.997.947.925,00 dan terealisasi sebesar Rp502.697.058.335,00 atau 99,94%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp490.979.434.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.717.624.045,00 atau

2,39%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel 5.28 berikut:

Tabel 5.28
TRANSFER PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bagi Hasil	**21.958.131.975,00**	**21.919.382.330,00**	**99,82**	**21.546.199.390,00**
1	**Belanja Bagi Hasil**	**21.958.131.975,00**	**21.919.382.330,00**	**99,82**	**21.546.199.390,00**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.710.000.000,00	19.675.217.647,00	99,82	19.389.852.690,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.248.131.975,00	2.244.164.683,00	99,82	2.156.346.700,00
2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**481.039.815.950,00**	**480.777.676.005,00**	**99,95**	**469.433.234.900,00**
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	481.039.815.950,00	480.777.676.005,00	99,95	469.433.234.900,00
JUMLAH		**502.997.947.925,00**	**502.697.058.335,00**	**99,94**	**490.979.434.290,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp21.958.131.975,00 terealisasi sebesar Rp21.919.382.330,00 atau 99,82%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.740.040.231,00 mengalami kenaikan sebesar Rp373.182.940,00 atau 1,73%. Transfer Bagi Hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dianggarkan sebesar Rp19.710.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.675.217.647,00 atau 99,82% dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp2.248.131.975,00 terealisasi sebesar Rp2.244.164.683,00 atau 99,82%. Transfer bagi hasil berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023. Rincian

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.29 sebagai berikut:

Tabel 5.29
TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**941.273.942,00**	**941.273.942,00**	**100**	**925.984.418,00**
1	Cilangkahan	57.360.353,00	57.360.353,00	100	56.428.387,00
2	Pagelaran	87.121.353,00	87.121.353,00	100	85.706.387,00
3	Sukaraja	68.459.353,00	68.459.353,00	100	67.347.387,00
4	Malingping Utara	62.864.353,00	62.864.353,00	100	61.843.387,00
5	Bolang	77.691.353,00	77.691.353,00	100	76.429.387,00
6	Cipeundeuy	72.695.353,00	72.695.353,00	100	71.514.387,00
7	Rahong	51.186.353,00	51.186.353,00	100	50.355.387,00
8	Kadujajar	74.136.353,00	74.136.353,00	100	72.932.387,00
9	Kersaratu	72.025.353,00	72.025.353,00	100	70.855.387,00
10	Malingping Selatan	66.094.353,00	66.094.353,00	100	65.020.387,00
11	Sumberwaras	61.750.353,00	61.750.353,00	100	60.747.387,00
12	Sukamanah	85.123.353,00	85.123.353,00	100	83.740.387,00
13	Senanghati	53.895.353,00	53.895.353,00	100	53.019.387,00
14	Sangiang	50.870.353,00	50.870.353,00	100	50.044.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**685.151.883,00**	**685.151.883,00**	**100**	**674.021.257,00**
1	Panggarangan	64.759.353,00	64.759.353,00	100	63.707.387,00
2	Jatake	61.455.353,00	61.455.353,00	100	60.457.387,00
3	Sogong	64.774.353,00	64.774.353,00	100	63.722.387,00
4	Cimandiri	64.511.353,00	64.511.353,00	100	63.463.387,00
5	Gununggede	68.818.353,00	68.818.353,00	100	67.700.387,00
6	Situregen	63.826.353,00	63.826.353,00	100	62.789.387,00
7	Mekarjaya	67.908.353,00	67.908.353,00	100	66.805.387,00
8	Sindangratu	69.900.353,00	69.900.353,00	100	68.764.387,00
9	Hegarmanah	45.079.353,00	45.079.353,00	100	44.346.387,00
10	Sukajadi	54.514.353,00	54.514.353,00	100	53.629.387,00
11	Cibarengkok	59.604.353,00	59.604.353,00	100	58.635.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**867.745.883,00**	**867.745.883,00**	**100**	**853.654.257,00**
1	Bayah Barat	81.738.353,00	81.738.353,00	100	80.411.387,00
2	Sawarna	101.426.353,00	101.426.353,00	100	99.779.387,00
3	Cidikit	85.343.353,00	85.343.353,00	100	83.957.387,00
4	Suwakan	80.209.353,00	80.209.353,00	100	78.906.387,00
5	Cimancak	65.153.353,00	65.153.353,00	100	64.095.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
6	Darmasari	85.440.353,00	85.440.353,00	100	84.053.387,00
7	Bayah Timur	62.454.353,00	62.454.353,00	100	61.440.387,00
8	Cisuren	65.539.353,00	65.539.353,00	100	64.474.387,00
9	Pasirgombong	51.599.353,00	51.599.353,00	100	50.761.387,00
10	Sawarna Timur	81.565.353,00	81.565.353,00	100	80.240.387,00
11	Pamubulan	107.276.353,00	107.276.353,00	100	105.534.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**739.737.942,00**	**739.737.942,00**	**100**	**727.722.418,00**
1	Cipanas	51.145.353,00	51.145.353,00	100	50.314.387,00
2	Girilaya	48.403.353,00	48.403.353,00	100	47.617.387,00
3	Malangsari	49.023.353,00	49.023.353,00	100	48.226.387,00
4	Bintangresmi	52.381.353,00	52.381.353,00	100	51.531.387,00
5	Talagahiyang	46.397.353,00	46.397.353,00	100	45.643.387,00
6	Luhurjaya	58.549.353,00	58.549.353,00	100	57.598.387,00
7	Haurgajrug	72.036.353,00	72.036.353,00	100	70.866.387,00
8	Giriharja	52.921.353,00	52.921.353,00	100	52.061.387,00
9	Sukasari	63.844.353,00	63.844.353,00	100	62.807.387,00
10	Jayapura	48.471.353,00	48.471.353,00	100	47.684.387,00
11	Sipayung	53.106.353,00	53.106.353,00	100	52.243.387,00
12	Bintangsari	46.242.353,00	46.242.353,00	100	45.491.387,00
13	Pasirhaur	47.478.353,00	47.478.353,00	100	46.707.387,00
14	Harumsari	49.737.353,00	49.737.353,00	100	48.929.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**552.217.236,00**	**552.217.236,00**	**100**	**543.248.644,00**
1	Pasireurih	50.161.353,00	50.161.353,00	100	49.347.387,00
2	Ciminyak	55.157.353,00	55.157.353,00	100	54.261.387,00
3	Muncang	47.392.353,00	47.392.353,00	100	46.622.387,00
4	Leuwicoo	45.046.353,00	45.046.353,00	100	44.314.387,00
5	Sindangwangi	44.051.353,00	44.051.353,00	100	43.336.387,00
6	Cikarang	45.589.353,00	45.589.353,00	100	44.849.387,00
7	Sukanagara	44.932.353,00	44.932.353,00	100	44.202.387,00
8	Pasirnangka	46.229.353,00	46.229.353,00	100	45.478.387,00
9	Jagaraksa	43.418.353,00	43.418.353,00	100	42.713.387,00
10	Tanjungwangi	44.079.353,00	44.079.353,00	100	43.363.387,00
11	Mekarwangi	43.939.353,00	43.939.353,00	100	43.225.387,00
12	Girijagabaya	42.220.353,00	42.220.353,00	100	41.534.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**639.805.236,00**	**605.022.883,00**	**94,56**	**629.413.644,00**
1	Kanekes	34.782.353,00	-	0	34.217.387,00
2	Cisimeut	59.245.353,00	59.245.353,00	100	58.283.387,00
3	Cibungur	66.831.353,00	66.831.353,00	100	65.745.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
4	Leuwidamar	58.474.353,00	58.474.353,00	100	57.525.387,00
5	Lebakparahiang	55.680.353,00	55.680.353,00	100	54.776.387,00
6	Sangkanwangi	54.049.353,00	54.049.353,00	100	53.171.387,00
7	Nayagati	56.019.353,00	56.019.353,00	100	55.109.387,00
8	Bojongmenteng	54.572.353,00	54.572.353,00	100	53.685.387,00
9	Margawangi	45.754.353,00	45.754.353,00	100	45.011.387,00
10	Wantisari	47.263.353,00	47.263.353,00	100	46.495.387,00
11	Jalupangmulya	53.115.353,00	53.115.353,00	100	52.252.387,00
12	Cisimeut Raya	54.017.353,00	54.017.353,00	100	53.140.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**459.504.177,00**	**459.504.177,00**	**100**	**452.039.483,00**
1	Bojongmanik	51.804.353,00	51.804.353,00	100	50.962.387,00
2	Harjawana	53.791.353,00	53.791.353,00	100	52.917.387,00
3	Kadurahayu	46.890.353,00	46.890.353,00	100	46.129.387,00
4	Cimayang	58.515.353,00	58.515.353,00	100	57.564.387,00
5	Parakanbeusi	57.580.353,00	57.580.353,00	100	56.645.387,00
6	Keboncau	48.796.353,00	48.796.353,00	100	48.004.387,00
7	Mekarmanik	55.454.353,00	55.454.353,00	100	54.553.387,00
8	Mekar Rahayu	44.416.353,00	44.416.353,00	100	43.694.387,00
9	Pasirbitung	42.255.353,00	42.255.353,00	100	41.568.387,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**617.995.236,00**	**617.995.236,00**	**100**	**607.956.644,00**
1	Gunungkencana	55.248.353,00	55.248.353,00	100	54.350.387,00
2	Cimanyangray	53.224.353,00	53.224.353,00	100	52.359.387,00
3	Gunungkendeng	46.784.353,00	46.784.353,00	100	46.024.387,00
4	Cisampang	50.023.353,00	50.023.353,00	100	49.211.387,00
5	Ciginggang	56.018.353,00	56.018.353,00	100	55.108.387,00
6	Ciakar	58.869.353,00	58.869.353,00	100	57.913.387,00
7	Cicaringin	54.836.353,00	54.836.353,00	100	53.946.387,00
8	Bulakan	46.965.353,00	46.965.353,00	100	46.202.387,00
9	Sukanegara	49.089.353,00	49.089.353,00	100	48.292.387,00
10	Bojongkoneng	50.137.353,00	50.137.353,00	100	49.322.387,00
11	Kramatjaya	51.014.353,00	51.014.353,00	100	50.185.387,00
12	Tanjungsari Indah	45.784.353,00	45.784.353,00	100	45.040.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**1.009.737.060,00**	**1.009.737.060,00**	**100**	**993.334.740,00**
1	Kerta	48.015.353,00	48.015.353,00	100	47.235.387,00
2	Bojongjuruh	52.923.353,00	52.923.353,00	100	52.063.387,00
3	Leuwiipuh	51.413.353,00	51.413.353,00	100	50.578.387,00
4	Lebakkeusik	47.681.353,00	47.681.353,00	100	46.907.387,00
5	Cilegongilir	55.032.353,00	55.032.353,00	100	54.138.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
6	Keusik	54.639.353,00	54.639.353,00	100	53.751.387,00
7	Cibaturkeusik	45.734.353,00	45.734.353,00	100	44.992.387,00
8	Kumpay	52.593.353,00	52.593.353,00	100	51.738.387,00
9	Jalupanggirang	50.326.353,00	50.326.353,00	100	49.508.387,00
10	Bendungan	53.106.353,00	53.106.353,00	100	52.243.387,00
11	Kertaraharja	54.778.353,00	54.778.353,00	100	53.888.387,00
12	Cisampih	52.087.353,00	52.087.353,00	100	51.241.387,00
13	Gunungsari	48.498.353,00	48.498.353,00	100	47.710.387,00
14	Tamansari	54.689.353,00	54.689.353,00	100	53.801.387,00
15	Cidahu	56.131.353,00	56.131.353,00	100	55.219.387,00
16	Ciruji	50.193.353,00	50.193.353,00	100	49.377.387,00
17	Kaduhauk	41.871.353,00	41.871.353,00	100	41.191.387,00
18	Labanjaya	47.016.353,00	47.016.353,00	100	46.252.387,00
19	Umbuljaya	51.589.353,00	51.589.353,00	100	50.751.387,00
20	Kertarahayu	41.416.353,00	41.416.353,00	100	40.744.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**684.080.236,00**	**684.080.236,00**	**100**	**672.968.644,00**
1	Pasindangan	53.878.353,00	53.878.353,00	100	53.003.387,00
2	Parungkujang	66.547.353,00	66.547.353,00	100	65.466.387,00
3	Cileles	58.823.353,00	58.823.353,00	100	57.868.387,00
4	Cikareo	53.404.353,00	53.404.353,00	100	52.537.387,00
5	Cipadang	60.694.353,00	60.694.353,00	100	59.708.387,00
6	Gumuruh	59.684.353,00	59.684.353,00	100	58.714.387,00
7	Prabugantungan	53.654.353,00	53.654.353,00	100	52.782.387,00
8	Daroyon	47.607.353,00	47.607.353,00	100	46.834.387,00
9	Margamulya	57.343.353,00	57.343.353,00	100	56.412.387,00
10	Mekarjaya	58.304.353,00	58.304.353,00	100	57.357.387,00
11	Kujangsari	55.291.353,00	55.291.353,00	100	54.392.387,00
12	Banjarsari	58.847.353,00	58.847.353,00	100	57.891.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**876.457.001,00**	**876.457.001,00**	**100**	**862.222.579,00**
1	Sarageni	52.410.353,00	52.410.353,00	100	51.559.387,00
2	Gununganten	51.245.353,00	51.245.353,00	100	50.413.387,00
3	Sudamanik	52.856.353,00	52.856.353,00	100	51.998.387,00
4	Tambak	54.751.353,00	54.751.353,00	100	53.862.387,00
5	Cimarga	48.239.353,00	48.239.353,00	100	47.456.387,00
6	Karyajaya	56.959.353,00	56.959.353,00	100	56.034.387,00
7	Margajaya	42.368.353,00	42.368.353,00	100	41.679.387,00
8	Jayamanik	53.231.353,00	53.231.353,00	100	52.367.387,00
9	Margaluyu	43.543.353,00	43.543.353,00	100	42.835.387,00
10	Margatirta	43.658.353,00	43.658.353,00	100	42.949.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
11	Intenjaya	55.517.353,00	55.517.353,00	100	54.615.387,00
12	Mekarjaya	60.091.353,00	60.091.353,00	100	59.115.387,00
13	Jayasari	59.846.353,00	59.846.353,00	100	58.873.387,00
14	Girimukti	56.490.353,00	56.490.353,00	100	55.573.387,00
15	Sangkanmanik	49.417.353,00	49.417.353,00	100	48.614.387,00
16	Sangiangjaya	48.590.353,00	48.590.353,00	100	47.801.387,00
17	Mekarmulya	47.240.353,00	47.240.353,00	100	46.473.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**831.068.295,00**	**831.068.295,00**	**100**	**817.570.805,00**
1	Maraya	49.999.353,00	49.999.353,00	100	49.187.387,00
2	Sajira	48.140.353,00	48.140.353,00	100	47.358.387,00
3	Sukarame	58.345.353,00	58.345.353,00	100	57.398.387,00
4	Calungbungur	58.245.353,00	58.245.353,00	100	57.299.387,00
5	Parungsari	53.924.353,00	53.924.353,00	100	53.048.387,00
6	Sindangsari	57.459.353,00	57.459.353,00	100	56.526.387,00
7	Mekarsari	71.417.353,00	71.417.353,00	100	70.257.387,00
8	Sukamarga	58.964.353,00	58.964.353,00	100	58.006.387,00
9	Pajagan	64.395.353,00	64.395.353,00	100	63.349.387,00
10	Sukajaya	47.011.353,00	47.011.353,00	100	46.247.387,00
11	Sajira Mekar	53.462.353,00	53.462.353,00	100	52.594.387,00
12	Paja	50.792.353,00	50.792.353,00	100	49.967.387,00
13	Margaluyu	49.831.353,00	49.831.353,00	100	49.022.387,00
14	Bungurmekar	51.412.353,00	51.412.353,00	100	50.576.387,00
15	Ciuyah	57.667.353,00	57.667.353,00	100	56.731.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**1.648.507.922,00**	**1.648.507.922,00**	100	**1.621.734.528,00**
1	Tanjungsari	55.938.353,00	55.938.353,00	100	55.029.387,00
2	Maja	82.408.353,00	82.408.353,00	100	81.069.387,00
3	Sangiang	66.897.353,00	66.897.353,00	100	65.811.387,00
4	Binong	73.456.353,00	73.456.353,00	100	72.263.387,00
5	Gubugan Cibeureum	54.111.353,00	54.111.353,00	100	53.232.387,00
6	Mekarsari	81.705.353,00	81.705.353,00	100	80.377.387,00
7	Padasuka	81.808.353,00	81.808.353,00	100	80.479.387,00
8	Curugbadak	349.589.353,00	349.589.353,00	100	343.910.387,00
9	Sindangmulya	70.870.353,00	70.870.353,00	100	69.719.387,00
10	Cilangkap	56.188.353,00	56.188.353,00	100	55.275.387,00
11	Pasirkembang	356.248.333,00	356.248.333,00	100	350.466.497,00
12	Pasirkecapi	55.258.353,00	55.258.353,00	100	54.360.387,00
13	Buyut Mekar	65.068.353,00	65.068.353,00	100	64.011.387,00
14	Maja Baru	198.959.353,00	198.959.353,00	100	195.728.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**753.513.883,00**	**753.513.883,00**	**100**	**741.272.257,00**
1	Pasirtanjung	57.391.353,00	57.391.353,00	100	56.458.387,00
2	Citeras	71.415.353,00	71.415.353,00	100	70.255.387,00
3	Nameng	69.643.353,00	69.643.353,00	100	68.511.387,00
4	Kolelet Wetan	48.134.353,00	48.134.353,00	100	47.352.387,00
5	Jatimulya	65.181.353,00	65.181.353,00	100	64.122.387,00
6	Mekarsari	70.544.353,00	70.544.353,00	100	69.398.387,00
7	Pabuaran	43.356.353,00	43.356.353,00	100	42.652.387,00
8	Rangkasbitung Timur	120.958.353,00	120.958.353,00	100	118.993.387,00
9	Sukamanah	59.864.353,00	59.864.353,00	100	58.891.387,00
10	Cimangeunteung	60.690.353,00	60.690.353,00	100	59.704.387,00
11	Narimbang Mulia	86.334.353,00	86.334.353,00	100	84.932.387,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**645.199.236,00**	**645.199.236,00**	**100**	**634.718.644,00**
1	Sukarendah	69.232.353,00	69.232.353,00	100	68.108.387,00
2	Warunggunung	53.982.353,00	53.982.353,00	100	53.105.387,00
3	Cibuah	46.967.353,00	46.967.353,00	100	46.204.387,00
4	Pasir Tangkil	64.387.353,00	64.387.353,00	100	63.341.387,00
5	Baros	47.104.353,00	47.104.353,00	100	46.339.387,00
6	Banjarsari	41.653.353,00	41.653.353,00	100	40.976.387,00
7	Padasuka	55.822.353,00	55.822.353,00	100	54.915.387,00
8	Sukaraja	47.127.353,00	47.127.353,00	100	46.361.387,00
9	Jagabaya	47.908.353,00	47.908.353,00	100	47.130.387,00
10	Selaraja	69.187.353,00	69.187.353,00	100	68.063.387,00
11	Cempaka	49.618.353,00	49.618.353,00	100	48.812.387,00
12	Sindangsari	52.208.353,00	52.208.353,00	100	51.360.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**534.490.530,00**	**534.490.530,00**	**100**	**525.808.870,00**
1	Mekarjaya	43.307.353,00	43.307.353,00	100	42.604.387,00
2	Cipalabuh	61.336.353,00	61.336.353,00	100	60.339.387,00
3	Cijaku	54.635.353,00	54.635.353,00	100	53.747.387,00
4	Cibeureum	51.774.353,00	51.774.353,00	100	50.933.387,00
5	Ciapus	63.853.353,00	63.853.353,00	100	62.816.387,00
6	Kandangsapi	61.623.353,00	61.623.353,00	100	60.622.387,00
7	Cihujan	51.597.353,00	51.597.353,00	100	50.759.387,00
8	Cimenga	48.935.353,00	48.935.353,00	100	48.140.387,00
9	Kapunduhan	46.615.353,00	46.615.353,00	100	45.858.387,00
10	Sukasenang	50.812.353,00	50.812.353,00	100	49.987.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**664.471.589,00**	**664.471.589,00**	**100**	**653.678.031,00**

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Anggalan	47.596.353,00	47.596.353,00	100	46.823.387,00
2	Muncangkopong	54.415.353,00	54.415.353,00	100	53.531.387,00
3	Sukaharja	44.386.353,00	44.386.353,00	100	43.665.387,00
4	Tamanjaya	46.106.353,00	46.106.353,00	100	45.357.387,00
5	Cigoong Utara	48.399.353,00	48.399.353,00	100	47.612.387,00
6	Muaradua	55.728.353,00	55.728.353,00	100	54.823.387,00
7	Cikulur	49.535.353,00	49.535.353,00	100	48.730.387,00
8	Curugpanjang	65.755.353,00	65.755.353,00	100	64.687.387,00
9	Cigoong Selatan	48.997.353,00	48.997.353,00	100	48.201.387,00
10	Sumurbandung	63.533.353,00	63.533.353,00	100	62.501.387,00
11	Parage	43.859.353,00	43.859.353,00	100	43.147.387,00
12	Sukadaya	51.131.353,00	51.131.353,00	100	50.301.387,00
13	Pasirgintung	45.027.353,00	45.027.353,00	100	44.295.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**799.356.295,00**	**799.356.295,00**	**100**	**786.373.805,00**
1	Tambakbaya	56.085.353,00	56.085.353,00	100	55.174.387,00
2	Kaduagung Timur	67.075.353,00	67.075.353,00	100	65.986.387,00
3	Panancangan	54.724.353,00	54.724.353,00	100	53.835.387,00
4	Cibadak	48.431.353,00	48.431.353,00	100	47.644.387,00
5	Asem	48.116.353,00	48.116.353,00	100	47.334.387,00
6	Cisangu	44.677.353,00	44.677.353,00	100	43.952.387,00
7	Kaduagung Barat	65.289.353,00	65.289.353,00	100	64.229.387,00
8	Bojongcae	47.868.353,00	47.868.353,00	100	47.091.387,00
9	Malabar	43.164.353,00	43.164.353,00	100	42.463.387,00
10	Pasar Keong	49.911.353,00	49.911.353,00	100	49.100.387,00
11	Bojong Leles	57.368.353,00	57.368.353,00	100	56.436.387,00
12	Cimenteng Jaya	40.874.353,00	40.874.353,00	100	40.210.387,00
13	Mekar Agung	56.942.353,00	56.942.353,00	100	56.017.387,00
14	Asem Margaluyu	49.265.353,00	49.265.353,00	100	48.465.387,00
15	Kaduagung Tengah	69.562.353,00	69.562.353,00	100	68.432.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**1.102.071.766,00**	**1.102.071.766,00**	**100**	**1.084.173.514,00**
1	Cibeber	51.075.353,00	51.075.353,00	100	50.246.387,00
2	Citorek Tengah	51.478.353,00	51.478.353,00	100	50.642.387,00
3	Cisungsang	44.731.353,00	44.731.353,00	100	44.004.387,00
4	Kujangjaya	54.079.353,00	54.079.353,00	100	53.201.387,00
5	Kujangsari	41.337.353,00	41.337.353,00	100	40.666.387,00
6	Neglasari	66.051.353,00	66.051.353,00	100	64.978.387,00
7	Mekarsari	52.583.353,00	52.583.353,00	100	51.729.387,00
8	Cikotok	43.309.353,00	43.309.353,00	100	42.605.387,00
9	Sukamulya	54.445.353,00	54.445.353,00	100	53.561.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
10	Citorek Timur	45.366.353,00	45.366.353,00	100	44.629.387,00
11	Warungbanten	58.571.353,00	58.571.353,00	100	57.620.387,00
12	Hegarmanah	59.279.353,00	59.279.353,00	100	58.316.387,00
13	Situmulya	44.597.353,00	44.597.353,00	100	43.873.387,00
14	Citorek Kidul	47.658.353,00	47.658.353,00	100	46.884.387,00
15	Cikadu	55.142.353,00	55.142.353,00	100	54.246.387,00
16	Sirnagalih	45.975.353,00	45.975.353,00	100	45.228.387,00
17	Cihambali	47.932.353,00	47.932.353,00	100	47.154.387,00
18	Citorek Barat	52.494.353,00	52.494.353,00	100	51.642.387,00
19	Gunungwangun	44.520.353,00	44.520.353,00	100	43.796.387,00
20	Wanasari	52.203.353,00	52.203.353,00	100	51.355.387,00
21	Citorek Sabrang	42.956.353,00	42.956.353,00	100	42.258.387,00
22	Ciherang	46.283.353,00	46.283.353,00	100	45.532.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**552.235.530,00**	**552.235.530,00**	**100**	**543.265.870,00**
1	Cilograng	50.114.353,00	50.114.353,00	100	49.300.387,00
2	Cibareno	49.849.353,00	49.849.353,00	100	49.039.387,00
3	Cikamunding	54.888.353,00	54.888.353,00	100	53.996.387,00
4	Cijengkol	70.297.353,00	70.297.353,00	100	69.156.387,00
5	Pasirbungur	51.744.353,00	51.744.353,00	100	50.904.387,00
6	Lebaktipar	66.901.353,00	66.901.353,00	100	65.814.387,00
7	Cikatomas	59.024.353,00	59.024.353,00	100	58.065.387,00
8	Girimukti	44.398.353,00	44.398.353,00	100	43.677.387,00
9	Cireundeu	56.513.353,00	56.513.353,00	100	55.595.387,00
10	Gunungbatu	48.504.353,00	48.504.353,00	100	47.716.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**684.896.589,00**	**684.896.589,00**	**100**	**673.770.031,00**
1	Wanasalam	60.687.353,00	60.687.353,00	100	59.701.387,00
2	Bejod	58.630.353,00	58.630.353,00	100	57.678.387,00
3	Cilangkap	46.050.353,00	46.050.353,00	100	45.302.387,00
4	Cipeucang	48.218.353,00	48.218.353,00	100	47.435.387,00
5	Muara	60.418.353,00	60.418.353,00	100	59.436.387,00
6	Parungpanjang	56.394.353,00	56.394.353,00	100	55.478.387,00
7	Cikeusik	51.705.353,00	51.705.353,00	100	50.865.387,00
8	Katapang	43.727.353,00	43.727.353,00	100	43.016.387,00
9	Cisarap	54.559.353,00	54.559.353,00	100	53.673.387,00
10	Sukatani	54.981.353,00	54.981.353,00	100	54.088.387,00
11	Cipedang	52.726.353,00	52.726.353,00	100	51.869.387,00
12	Parungsari	53.358.353,00	53.358.353,00	100	52.491.387,00
13	Karangpamindangan	43.439.353,00	43.439.353,00	100	42.733.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**461.515.530,00**	**461.515.530,00**	**100**	**454.018.870,00**
1	Ciparasi	46.836.353,00	46.836.353,00	100	46.075.387,00
2	Sobang	45.491.353,00	45.491.353,00	100	44.752.387,00
3	Sukajaya	45.039.353,00	45.039.353,00	100	44.308.387,00
4	Sindanglaya	46.315.353,00	46.315.353,00	100	45.563.387,00
5	Sukamaju	48.366.353,00	48.366.353,00	100	47.580.387,00
6	Hariang	46.263.353,00	46.263.353,00	100	45.512.387,00
7	Majasari	46.310.353,00	46.310.353,00	100	45.557.387,00
8	Sinar Jaya	47.413.353,00	47.413.353,00	100	46.643.387,00
9	Cirompang	44.312.353,00	44.312.353,00	100	43.592.387,00
10	Sukaresmi	45.167.353,00	45.167.353,00	100	44.433.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**727.416.530,00**	**727.416.530,00**	**100**	**715.600.870,00**
1	Guradog	106.070.353,00	106.070.353,00	100	104.347.387,00
2	Curugbitung	70.983.353,00	70.983.353,00	100	69.830.387,00
3	Candi	64.657.353,00	64.657.353,00	100	63.606.387,00
4	Mayak	63.778.353,00	63.778.353,00	100	62.742.387,00
5	Cipining	65.992.353,00	65.992.353,00	100	64.920.387,00
6	Cilayang	94.028.353,00	94.028.353,00	100	92.501.387,00
7	Ciburuy	84.410.353,00	84.410.353,00	100	83.039.387,00
8	Sekarwangi	60.681.353,00	60.681.353,00	100	59.696.387,00
9	Cidadap	60.562.353,00	60.562.353,00	100	59.578.387,00
10	Lebakasih	56.252.353,00	56.252.353,00	100	55.338.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**391.137.471,00**	**391.137.471,00**	**100**	**384.784.709,00**
1	Kalanganyar	45.213.353,00	45.213.353,00	100	44.479.387,00
2	Pasirkupa	55.067.353,00	55.067.353,00	100	54.172.387,00
3	Cilangkap	62.602.353,00	62.602.353,00	100	61.586.387,00
4	Aweh	64.745.353,00	64.745.353,00	100	63.693.387,00
5	Sangiangtanjung	53.936.353,00	53.936.353,00	100	53.060.387,00
6	Sukamekarsari	57.888.353,00	57.888.353,00	100	56.948.387,00
7	Cikatapis	51.684.353,00	51.684.353,00	100	50.844.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**295.749.118,00**	**295.749.118,00**	**100**	**290.944.322,00**
1	Banjaririgasi	50.578.353,00	50.578.353,00	100	49.756.387,00
2	Ciladaeun	45.500.353,00	45.500.353,00	100	44.761.387,00
3	Lebakgedong	52.476.353,00	52.476.353,00	100	51.623.387,00
4	Banjarsari	46.978.353,00	46.978.353,00	100	46.215.387,00
5	Lebaksitu	52.270.353,00	52.270.353,00	100	51.421.387,00
6	Lebaksangka	47.945.353,00	47.945.353,00	100	47.166.387,00

TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**542.750.177,00**	**542.750.177,00**	**100**	**533.932.483,00**
1	Panyaungan	61.519.353,00	61.519.353,00	100	60.520.387,00
2	Cihara	56.849.353,00	56.849.353,00	100	55.925.387,00
3	Ciparahu	57.633.353,00	57.633.353,00	100	56.697.387,00
4	Pondokpanjang	78.873.353,00	78.873.353,00	100	77.591.387,00
5	Citeupuseun	57.841.353,00	57.841.353,00	100	56.901.387,00
6	Lebakpeundeuy	63.239.353,00	63.239.353,00	100	62.212.387,00
7	Mekarsari	74.188.353,00	74.188.353,00	100	72.983.387,00
8	Karangkamulyan	43.981.353,00	43.981.353,00	100	43.266.387,00
9	Barunai	48.624.353,00	48.624.353,00	100	47.834.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**529.579.530,00**	**529.579.530,00**	**100**	**520.977.870,00**
1	Datarcae	51.006.353,00	51.006.353,00	100	50.178.387,00
2	Cirinten	66.973.353,00	66.973.353,00	100	65.885.387,00
3	Karangnunggal	45.663.353,00	45.663.353,00	100	44.921.387,00
4	Kadudamas	55.037.353,00	55.037.353,00	100	54.143.387,00
5	Badur	57.807.353,00	57.807.353,00	100	56.868.387,00
6	Parakanlima	53.978.353,00	53.978.353,00	100	53.101.387,00
7	Nanggerang	47.819.353,00	47.819.353,00	100	47.043.387,00
8	Cempaka	52.913.353,00	52.913.353,00	100	52.053.387,00
9	Karoya	50.883.353,00	50.883.353,00	100	50.056.387,00
10	Cibarani	47.497.353,00	47.497.353,00	100	46.726.387,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**472.334.177,00**	**472.334.177,00**	**100**	**464.660.483,00**
1	Peucangpari	63.358.353,00	63.358.353,00	100	62.329.387,00
2	Cibungur	48.041.353,00	48.041.353,00	100	47.260.387,00
3	Mugijaya	49.412.353,00	49.412.353,00	100	48.609.387,00
4	Cikate	47.202.353,00	47.202.353,00	100	46.435.387,00
5	Cigemblong	56.625.353,00	56.625.353,00	100	55.705.387,00
6	Cikadongdong	61.419.353,00	61.419.353,00	100	60.421.387,00
7	Cikaret	55.218.353,00	55.218.353,00	100	54.321.387,00
8	Wangunjaya	38.246.353,00	38.246.353,00	100	37.625.387,00
9	Cikaratuan	52.810.353,00	52.810.353,00	100	51.952.387,00
JUMLAH		**19.710.000.000,00**	**19.675.217.647,00**	**99,82**	**19.389.852.690,00**

Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.30 sebagai berikut:

Tabel 5.30
TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**107.361.088,00**	**107.361.088,00**	**100**	**102.976.438,00**
1	Cilangkahan	6.542.292,00	6.542.292,00	100	6.275.317,00
2	Pagelaran	9.937.292,00	9.937.292,00	100	9.531.317,00
3	Sukaraja	7.808.292,00	7.808.292,00	100	7.489.317,00
4	Malingping Utara	7.170.292,00	7.170.292,00	100	6.877.317,00
5	Bolang	8.861.292,00	8.861.292,00	100	8.499.317,00
6	Cipeundeuy	8.291.292,00	8.291.292,00	100	7.953.317,00
7	Rahong	5.838.292,00	5.838.292,00	100	5.600.317,00
8	Kadujajar	8.456.292,00	8.456.292,00	100	8.110.317,00
9	Kersaratu	8.215.292,00	8.215.292,00	100	7.879.317,00
10	Malingping Selatan	7.538.292,00	7.538.292,00	100	7.231.317,00
11	Sumberwaras	7.043.292,00	7.043.292,00	100	6.755.317,00
12	Sukamanah	9.709.292,00	9.709.292,00	100	9.312.317,00
13	Senanghati	6.147.292,00	6.147.292,00	100	5.896.317,00
14	Sangiang	5.802.292,00	5.802.292,00	100	5.565.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**78.148.212,00**	**78.148.212,00**	**100**	**74.959.487,00**
1	Panggarangan	7.386.292,00	7.386.292,00	100	7.085.317,00
2	Jatake	7.009.292,00	7.009.292,00	100	6.723.317,00
3	Sogong	7.388.292,00	7.388.292,00	100	7.086.317,00
4	Cimandiri	7.358.292,00	7.358.292,00	100	7.057.317,00
5	Gununggede	7.849.292,00	7.849.292,00	100	7.529.317,00
6	Situregen	7.280.292,00	7.280.292,00	100	6.983.317,00
7	Mekarjaya	7.745.292,00	7.745.292,00	100	7.429.317,00
8	Sindangratu	7.973.292,00	7.973.292,00	100	7.647.317,00
9	Hegarmanah	5.141.292,00	5.141.292,00	100	4.932.317,00
10	Sukajadi	6.218.292,00	6.218.292,00	100	5.964.317,00
11	Cibarengkok	6.798.292,00	6.798.292,00	100	6.521.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**98.974.212,00**	**98.974.212,00**	**100**	**94.934.487,00**
1	Bayah Barat	9.323.292,00	9.323.292,00	100	8.942.317,00
2	Sawarna	11.568.292,00	11.568.292,00	100	11.096.317,00
3	Cidikit	9.734.292,00	9.734.292,00	100	9.337.317,00
4	Suwakan	9.148.292,00	9.148.292,00	100	8.775.317,00
5	Cimancak	7.431.292,00	7.431.292,00	100	7.128.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
6	Darmasari	9.745.292,00	9.745.292,00	100	9.347.317,00
7	Bayah Timur	7.123.292,00	7.123.292,00	100	6.832.317,00
8	Cisuren	7.475.292,00	7.475.292,00	100	7.170.317,00
9	Pasirgombong	5.885.292,00	5.885.292,00	100	5.645.317,00
10	Sawarna Timur	9.303.292,00	9.303.292,00	100	8.923.317,00
11	Pamubulan	12.236.292,00	12.236.292,00	100	11.736.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**84.374.088,00**	**84.374.088,00**	**100**	**80.929.438,00**
1	Cipanas	5.833.292,00	5.833.292,00	100	5.595.317,00
2	Girilaya	5.521.292,00	5.521.292,00	100	5.295.317,00
3	Malangsari	5.591.292,00	5.591.292,00	100	5.363.317,00
4	Bintangresmi	5.974.292,00	5.974.292,00	100	5.730.317,00
5	Talagahiyang	5.292.292,00	5.292.292,00	100	5.076.317,00
6	Luhurjaya	6.678.292,00	6.678.292,00	100	6.405.317,00
7	Haurgajrug	8.216.292,00	8.216.292,00	100	7.881.317,00
8	Giriharja	6.036.292,00	6.036.292,00	100	5.789.317,00
9	Sukasari	7.282.292,00	7.282.292,00	100	6.984.317,00
10	Jayapura	5.528.292,00	5.528.292,00	100	5.303.317,00
11	Sipayung	6.057.292,00	6.057.292,00	100	5.810.317,00
12	Bintangsari	5.274.292,00	5.274.292,00	100	5.059.317,00
13	Pasirhaur	5.415.292,00	5.415.292,00	100	5.194.317,00
14	Harumsari	5.673.292,00	5.673.292,00	100	5.441.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**62.985.504,00**	**62.985.504,00**	**100**	**60.414.804,00**
1	Pasireurih	5.721.292,00	5.721.292,00	100	5.488.317,00
2	Ciminyak	6.291.292,00	6.291.292,00	100	6.034.317,00
3	Muncang	5.405.292,00	5.405.292,00	100	5.185.317,00
4	Leuwicoo	5.138.292,00	5.138.292,00	100	4.928.317,00
5	Sindangwangi	5.024.292,00	5.024.292,00	100	4.819.317,00
6	Cikarang	5.200.292,00	5.200.292,00	100	4.987.317,00
7	Sukanagara	5.125.292,00	5.125.292,00	100	4.915.317,00
8	Pasirnangka	5.273.292,00	5.273.292,00	100	5.057.317,00
9	Jagaraksa	4.952.292,00	4.952.292,00	100	4.750.317,00
10	Tanjungwangi	5.027.292,00	5.027.292,00	100	4.822.317,00
11	Mekarwangi	5.011.292,00	5.011.292,00	100	4.807.317,00
12	Girijagabaya	4.815.292,00	4.815.292,00	100	4.619.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**72.975.504,00**	**69.008.212,00**	**94,56**	**69.994.804,00**
1	Kanekes	3.967.292,00	-	0	3.805.317,00
2	Cisimeut	6.757.292,00	6.757.292,00	100	6.481.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
3	Cibungur	7.622.292,00	7.622.292,00	100	7.311.317,00
4	Leuwidamar	6.669.292,00	6.669.292,00	100	6.397.317,00
5	Lebakparahiang	6.351.292,00	6.351.292,00	100	6.091.317,00
6	Sangkanwangi	6.165.292,00	6.165.292,00	100	5.913.317,00
7	Nayagati	6.389.292,00	6.389.292,00	100	6.128.317,00
8	Bojongmenteng	6.224.292,00	6.224.292,00	100	5.970.317,00
9	Margawangi	5.218.292,00	5.218.292,00	100	5.005.317,00
10	Wantisari	5.391.292,00	5.391.292,00	100	5.170.317,00
11	Jalupangmulya	6.058.292,00	6.058.292,00	100	5.811.317,00
12	Cisimeut Raya	6.161.292,00	6.161.292,00	100	5.909.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**52.409.628,00**	**52.409.628,00**	**100**	**50.271.853,00**
1	Bojongmanik	5.908.292,00	5.908.292,00	100	5.667.317,00
2	Harjawana	6.135.292,00	6.135.292,00	100	5.885.317,00
3	Kadurahayu	5.348.292,00	5.348.292,00	100	5.130.317,00
4	Cimayang	6.674.292,00	6.674.292,00	100	6.401.317,00
5	Parakanbeusi	6.567.292,00	6.567.292,00	100	6.299.317,00
6	Keboncau	5.565.292,00	5.565.292,00	100	5.338.317,00
7	Mekarmanik	6.325.292,00	6.325.292,00	100	6.067.317,00
8	Mekar Rahayu	5.066.292,00	5.066.292,00	100	4.859.317,00
9	Pasirbitung	4.819.292,00	4.819.292,00	100	4.623.317,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**70.486.504,00**	**70.486.504,00**	**100**	**67.610.804,00**
1	Gunungkencana	6.301.292,00	6.301.292,00	100	6.044.317,00
2	Cimanyangray	6.070.292,00	6.070.292,00	100	5.823.317,00
3	Gunungkendeng	5.336.292,00	5.336.292,00	100	5.118.317,00
4	Cisampang	5.705.292,00	5.705.292,00	100	5.472.317,00
5	Ciginggang	6.389.292,00	6.389.292,00	100	6.128.317,00
6	Ciakar	6.714.292,00	6.714.292,00	100	6.440.317,00
7	Cicaringin	6.254.292,00	6.254.292,00	100	5.999.317,00
8	Bulakan	5.357.292,00	5.357.292,00	100	5.138.317,00
9	Sukanegara	5.599.292,00	5.599.292,00	100	5.370.317,00
10	Bojongkoneng	5.718.292,00	5.718.292,00	100	5.485.317,00
11	Kramatjaya	5.818.292,00	5.818.292,00	100	5.581.317,00
12	Tanjungsari Indah	5.222.292,00	5.222.292,00	100	5.009.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**115.170.840,00**	**115.170.840,00**	**100**	**110.470.340,00**
1	Kerta	5.476.292,00	5.476.292,00	100	5.253.317,00
2	Bojongjuruh	6.036.292,00	6.036.292,00	100	5.790.317,00
3	Leuwiipuh	5.864.292,00	5.864.292,00	100	5.624.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
4	Lebakkeusik	5.438.292,00	5.438.292,00	100	5.216.317,00
5	Cilegongilir	6.277.292,00	6.277.292,00	100	6.020.317,00
6	Keusik	6.232.292,00	6.232.292,00	100	5.977.317,00
7	Cibaturkeusik	5.216.292,00	5.216.292,00	100	5.003.317,00
8	Kumpay	5.998.292,00	5.998.292,00	100	5.754.317,00
9	Jalupanggirang	5.740.292,00	5.740.292,00	100	5.506.317,00
10	Bendungan	6.057.292,00	6.057.292,00	100	5.810.317,00
11	Kertaraharja	6.248.292,00	6.248.292,00	100	5.993.317,00
12	Cisampih	5.941.292,00	5.941.292,00	100	5.698.317,00
13	Gunungsari	5.531.292,00	5.531.292,00	100	5.306.317,00
14	Tamansari	6.238.292,00	6.238.292,00	100	5.983.317,00
15	Cidahu	6.402.292,00	6.402.292,00	100	6.141.317,00
16	Ciruji	5.725.292,00	5.725.292,00	100	5.491.317,00
17	Kaduhauk	4.776.292,00	4.776.292,00	100	4.581.317,00
18	Labanjaya	5.362.292,00	5.362.292,00	100	5.143.317,00
19	Umbuljaya	5.884.292,00	5.884.292,00	100	5.644.317,00
20	Kertarahayu	4.724.292,00	4.724.292,00	100	4.531.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**78.025.504,00**	**78.025.504,00**	**100**	**74.839.804,00**
1	Pasindangan	6.145.292,00	6.145.292,00	100	5.894.317,00
2	Parungkujang	7.590.292,00	7.590.292,00	100	7.280.317,00
3	Cileles	6.709.292,00	6.709.292,00	100	6.435.317,00
4	Cikareo	6.091.292,00	6.091.292,00	100	5.842.317,00
5	Cipadang	6.922.292,00	6.922.292,00	100	6.640.317,00
6	Gumuruh	6.807.292,00	6.807.292,00	100	6.529.317,00
7	Prabugantungan	6.120.292,00	6.120.292,00	100	5.870.317,00
8	Daroyon	5.430.292,00	5.430.292,00	100	5.208.317,00
9	Margamulya	6.540.292,00	6.540.292,00	100	6.273.317,00
10	Mekarjaya	6.650.292,00	6.650.292,00	100	6.378.317,00
11	Kujangsari	6.306.292,00	6.306.292,00	100	6.049.317,00
12	Banjarsari	6.712.292,00	6.712.292,00	100	6.438.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**99.969.964,00**	**99.969.964,00**	**100**	**95.887.389,00**
1	Sarageni	5.978.292,00	5.978.292,00	100	5.734.317,00
2	Gununganten	5.845.292,00	5.845.292,00	100	5.606.317,00
3	Sudamanik	6.029.292,00	6.029.292,00	100	5.782.317,00
4	Tambak	6.245.292,00	6.245.292,00	100	5.990.317,00
5	Cimarga	5.502.292,00	5.502.292,00	100	5.277.317,00
6	Karyajaya	6.497.292,00	6.497.292,00	100	6.231.317,00
7	Margajaya	4.832.292,00	4.832.292,00	100	4.635.317,00
8	Jayamanik	6.071.292,00	6.071.292,00	100	5.823.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
9	Margaluyu	4.966.292,00	4.966.292,00	100	4.763.317,00
10	Margatirta	4.979.292,00	4.979.292,00	100	4.776.317,00
11	Intenjaya	6.332.292,00	6.332.292,00	100	6.074.317,00
12	Mekarjaya	6.854.292,00	6.854.292,00	100	6.574.317,00
13	Jayasari	6.826.292,00	6.826.292,00	100	6.547.317,00
14	Girimukti	6.443.292,00	6.443.292,00	100	6.180.317,00
15	Sangkanmanik	5.636.292,00	5.636.292,00	100	5.406.317,00
16	Sangiangjaya	5.542.292,00	5.542.292,00	100	5.316.317,00
17	Mekarmulya	5.388.292,00	5.388.292,00	100	5.168.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**94.794.380,00**	**94.794.380,00**	**100**	**90.922.755,00**
1	Maraya	5.703.292,00	5.703.292,00	100	5.470.317,00
2	Sajira	5.491.292,00	5.491.292,00	100	5.266.317,00
3	Sukarame	6.655.292,00	6.655.292,00	100	6.383.317,00
4	Calungbungur	6.643.292,00	6.643.292,00	100	6.372.317,00
5	Parungsari	6.150.292,00	6.150.292,00	100	5.899.317,00
6	Sindangsari	6.554.292,00	6.554.292,00	100	6.286.317,00
7	Mekarsari	8.146.292,00	8.146.292,00	100	7.813.317,00
8	Sukamarga	6.725.292,00	6.725.292,00	100	6.451.317,00
9	Pajagan	7.345.292,00	7.345.292,00	100	7.045.317,00
10	Sukajaya	5.362.292,00	5.362.292,00	100	5.143.317,00
11	Sajira Mekar	6.098.292,00	6.098.292,00	100	5.849.317,00
12	Paja	5.793.292,00	5.793.292,00	100	5.557.317,00
13	Margaluyu	5.684.292,00	5.684.292,00	100	5.451.317,00
14	Bungurmekar	5.864.292,00	5.864.292,00	100	5.624.317,00
15	Ciuyah	6.577.292,00	6.577.292,00	100	6.309.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**188.030.088,00**	**188.030.088,00**	100	**180.351.358,00**
1	Tanjungsari	6.380.292,00	6.380.292,00	100	6.120.317,00
2	Maja	9.399.292,00	9.399.292,00	100	9.015.317,00
3	Sangiang	7.630.292,00	7.630.292,00	100	7.319.317,00
4	Binong	8.378.292,00	8.378.292,00	100	8.036.317,00
5	Gubugan Cibeureum	6.172.292,00	6.172.292,00	100	5.920.317,00
6	Mekarsari	9.319.292,00	9.319.292,00	100	8.939.317,00
7	Padasuka	9.331.292,00	9.331.292,00	100	8.950.317,00
8	Curugbadak	39.874.292,00	39.874.292,00	100	38.246.317,00
9	Sindangmulya	8.083.292,00	8.083.292,00	100	7.753.317,00
10	Cilangkap	6.409.292,00	6.409.292,00	100	6.147.317,00
11	Pasirkembang	40.634.292,00	40.634.292,00	100	38.972.237,00
12	Pasirkecapi	6.303.292,00	6.303.292,00	100	6.045.317,00
13	Buyut Mekar	7.421.292,00	7.421.292,00	100	7.118.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
14	Maja Baru	22.693.292,00	22.693.292,00	100	21.767.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**85.945.212,00**	**85.945.212,00**	**100**	**82.436.487,00**
1	Pasirtanjung	6.546.292,00	6.546.292,00	100	6.278.317,00
2	Citeras	8.145.292,00	8.145.292,00	100	7.813.317,00
3	Nameng	7.943.292,00	7.943.292,00	100	7.619.317,00
4	Kolelet Wetan	5.490.292,00	5.490.292,00	100	5.266.317,00
5	Jatimulya	7.434.292,00	7.434.292,00	100	7.131.317,00
6	Mekarsari	8.046.292,00	8.046.292,00	100	7.717.317,00
7	Pabuaran	4.945.292,00	4.945.292,00	100	4.743.317,00
8	Rangkasbitung Timur	13.796.292,00	13.796.292,00	100	13.233.317,00
9	Sukamanah	6.828.292,00	6.828.292,00	100	6.549.317,00
10	Cimangeunteung	6.922.292,00	6.922.292,00	100	6.639.317,00
11	Narimbang Mulia	9.847.292,00	9.847.292,00	100	9.445.317,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**73.591.504,00**	**73.591.504,00**	**100**	**70.588.804,00**
1	Sukarendah	7.896.292,00	7.896.292,00	100	7.574.317,00
2	Warunggunung	6.157.292,00	6.157.292,00	100	5.906.317,00
3	Cibuah	5.357.292,00	5.357.292,00	100	5.138.317,00
4	Pasir Tangkil	7.344.292,00	7.344.292,00	100	7.044.317,00
5	Baros	5.372.292,00	5.372.292,00	100	5.153.317,00
6	Banjarsari	4.751.292,00	4.751.292,00	100	4.557.317,00
7	Padasuka	6.367.292,00	6.367.292,00	100	6.107.317,00
8	Sukaraja	5.375.292,00	5.375.292,00	100	5.156.317,00
9	Jagabaya	5.464.292,00	5.464.292,00	100	5.241.317,00
10	Selaraja	7.891.292,00	7.891.292,00	100	7.569.317,00
11	Cempaka	5.659.292,00	5.659.292,00	100	5.428.317,00
12	Sindangsari	5.955.292,00	5.955.292,00	100	5.712.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**60.963.920,00**	**60.963.920,00**	**100**	**58.476.170,00**
1	Mekarjaya	4.939.292,00	4.939.292,00	100	4.738.317,00
2	Cipalabuh	6.996.292,00	6.996.292,00	100	6.710.317,00
3	Cijaku	6.231.292,00	6.231.292,00	100	5.977.317,00
4	Cibeureum	5.905.292,00	5.905.292,00	100	5.664.317,00
5	Ciapus	7.283.292,00	7.283.292,00	100	6.985.317,00
6	Kandangsapi	7.029.292,00	7.029.292,00	100	6.742.317,00
7	Cihujan	5.885.292,00	5.885.292,00	100	5.645.317,00
8	Cimenga	5.581.292,00	5.581.292,00	100	5.353.317,00
9	Kapunduhan	5.317.292,00	5.317.292,00	100	5.100.317,00
10	Sukasenang	5.795.292,00	5.795.292,00	100	5.559.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**75.789.796,00**	**75.789.796,00**	**100**	**72.697.121,00**
1	Anggalan	5.429.292,00	5.429.292,00	100	5.207.317,00
2	Muncangkopong	6.206.292,00	6.206.292,00	100	5.953.317,00
3	Sukaharja	5.062.292,00	5.062.292,00	100	4.856.317,00
4	Tamanjaya	5.259.292,00	5.259.292,00	100	5.044.317,00
5	Cigoong Utara	5.520.292,00	5.520.292,00	100	5.295.317,00
6	Muaradua	6.356.292,00	6.356.292,00	100	6.097.317,00
7	Cikulur	5.650.292,00	5.650.292,00	100	5.419.317,00
8	Curugpanjang	7.500.292,00	7.500.292,00	100	7.194.317,00
9	Cigoong Selatan	5.588.292,00	5.588.292,00	100	5.360.317,00
10	Sumurbandung	7.246.292,00	7.246.292,00	100	6.950.317,00
11	Parage	5.002.292,00	5.002.292,00	100	4.798.317,00
12	Sukadaya	5.832.292,00	5.832.292,00	100	5.594.317,00
13	Pasirgintung	5.136.292,00	5.136.292,00	100	4.926.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**91.177.380,00**	**91.177.380,00**	**100**	**87.454.755,00**
1	Tambakbaya	6.397.292,00	6.397.292,00	100	6.136.317,00
2	Kaduagung Timur	7.650.292,00	7.650.292,00	100	7.338.317,00
3	Panancangan	6.242.292,00	6.242.292,00	100	5.987.317,00
4	Cibadak	5.524.292,00	5.524.292,00	100	5.298.317,00
5	Asem	5.488.292,00	5.488.292,00	100	5.264.317,00
6	Cisangu	5.096.292,00	5.096.292,00	100	4.888.317,00
7	Kaduagung Barat	7.447.292,00	7.447.292,00	100	7.143.317,00
8	Bojongcae	5.460.292,00	5.460.292,00	100	5.237.317,00
9	Malabar	4.923.292,00	4.923.292,00	100	4.722.317,00
10	Pasar Keong	5.693.292,00	5.693.292,00	100	5.460.317,00
11	Bojong Leles	6.543.292,00	6.543.292,00	100	6.276.317,00
12	Cimenteng Jaya	4.662.292,00	4.662.292,00	100	4.472.317,00
13	Mekar Agung	6.495.292,00	6.495.292,00	100	6.229.317,00
14	Asem Margaluyu	5.619.292,00	5.619.292,00	100	5.390.317,00
15	Kaduagung Tengah	7.934.292,00	7.934.292,00	100	7.610.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**125.703.424,00**	**125.703.424,00**	**100**	**120.570.974,00**
1	Cibeber	5.825.292,00	5.825.292,00	100	5.588.317,00
2	Citorek Tengah	5.871.292,00	5.871.292,00	100	5.632.317,00
3	Cisungsang	5.102.292,00	5.102.292,00	100	4.893.317,00
4	Kujangjaya	6.168.292,00	6.168.292,00	100	5.916.317,00
5	Kujangsari	4.715.292,00	4.715.292,00	100	4.522.317,00
6	Neglasari	7.534.292,00	7.534.292,00	100	7.226.317,00
7	Mekarsari	5.997.292,00	5.997.292,00	100	5.752.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
8	Cikotok	4.940.292,00	4.940.292,00	100	4.738.317,00
9	Sukamulya	6.210.292,00	6.210.292,00	100	5.956.317,00
10	Citorek Timur	5.174.292,00	5.174.292,00	100	4.963.317,00
11	Warungbanten	6.680.292,00	6.680.292,00	100	6.408.317,00
12	Hegarmanah	6.761.292,00	6.761.292,00	100	6.485.317,00
13	Situmulya	5.087.292,00	5.087.292,00	100	4.879.317,00
14	Citorek Kidul	5.436.292,00	5.436.292,00	100	5.214.317,00
15	Cikadu	6.289.292,00	6.289.292,00	100	6.032.317,00
16	Sirnagalih	5.244.292,00	5.244.292,00	100	5.030.317,00
17	Cihambali	5.467.292,00	5.467.292,00	100	5.244.317,00
18	Citorek Barat	5.987.292,00	5.987.292,00	100	5.743.317,00
19	Gunungwangun	5.078.292,00	5.078.292,00	100	4.870.317,00
20	Wanasari	5.954.292,00	5.954.292,00	100	5.711.317,00
21	Citorek Sabrang	4.899.292,00	4.899.292,00	100	4.699.317,00
22	Ciherang	5.279.292,00	5.279.292,00	100	5.063.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**62.988.920,00**	**62.988.920,00**	**100**	**60.416.170,00**
1	Cilograng	5.716.292,00	5.716.292,00	100	5.482.317,00
2	Cibareno	5.686.292,00	5.686.292,00	100	5.453.317,00
3	Cikamunding	6.260.292,00	6.260.292,00	100	6.005.317,00
4	Cijengkol	8.018.292,00	8.018.292,00	100	7.691.317,00
5	Pasirbungur	5.902.292,00	5.902.292,00	100	5.661.317,00
6	Lebaktipar	7.630.292,00	7.630.292,00	100	7.319.317,00
7	Cikatomas	6.732.292,00	6.732.292,00	100	6.457.317,00
8	Girimukti	5.064.292,00	5.064.292,00	100	4.857.317,00
9	Cireundeu	6.446.292,00	6.446.292,00	100	6.182.317,00
10	Gunungbatu	5.532.292,00	5.532.292,00	100	5.306.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**78.119.796,00**	**78.119.796,00**	**100**	**74.930.121,00**
1	Wanasalam	6.922.292,00	6.922.292,00	100	6.639.317,00
2	Bejod	6.687.292,00	6.687.292,00	100	6.414.317,00
3	Cilangkap	5.252.292,00	5.252.292,00	100	5.038.317,00
4	Cipeucang	5.500.292,00	5.500.292,00	100	5.275.317,00
5	Muara	6.891.292,00	6.891.292,00	100	6.610.317,00
6	Parungpanjang	6.432.292,00	6.432.292,00	100	6.169.317,00
7	Cikeusik	5.897.292,00	5.897.292,00	100	5.656.317,00
8	Katapang	4.987.292,00	4.987.292,00	100	4.784.317,00
9	Cisarap	6.223.292,00	6.223.292,00	100	5.969.317,00
10	Sukatani	6.271.292,00	6.271.292,00	100	6.015.317,00
11	Cipedang	6.014.292,00	6.014.292,00	100	5.768.317,00
12	Parungsari	6.086.292,00	6.086.292,00	100	5.837.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
13	Karangpamindangan	4.954.292,00	4.954.292,00	100	4.752.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**52.640.920,00**	**52.640.920,00**	**100**	**50.492.170,00**
1	Ciparasi	5.342.292,00	5.342.292,00	100	5.124.317,00
2	Sobang	5.188.292,00	5.188.292,00	100	4.977.317,00
3	Sukajaya	5.137.292,00	5.137.292,00	100	4.927.317,00
4	Sindanglaya	5.282.292,00	5.282.292,00	100	5.067.317,00
5	Sukamaju	5.516.292,00	5.516.292,00	100	5.291.317,00
6	Hariang	5.277.292,00	5.277.292,00	100	5.061.317,00
7	Majasari	5.282.292,00	5.282.292,00	100	5.066.317,00
8	Sinar Jaya	5.408.292,00	5.408.292,00	100	5.187.317,00
9	Cirompang	5.054.292,00	5.054.292,00	100	4.848.317,00
10	Sukaresmi	5.152.292,00	5.152.292,00	100	4.941.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**82.969.920,00**	**82.969.920,00**	**100**	**79.581.170,00**
1	Guradog	12.098.292,00	12.098.292,00	100	11.604.317,00
2	Curugbitung	8.096.292,00	8.096.292,00	100	7.766.317,00
3	Candi	7.375.292,00	7.375.292,00	100	7.073.317,00
4	Mayak	7.274.292,00	7.274.292,00	100	6.977.317,00
5	Cipining	7.527.292,00	7.527.292,00	100	7.219.317,00
6	Cilayang	10.725.292,00	10.725.292,00	100	10.287.317,00
7	Ciburuy	9.628.292,00	9.628.292,00	100	9.235.317,00
8	Sekarwangi	6.921.292,00	6.921.292,00	100	6.638.317,00
9	Cidadap	6.907.292,00	6.907.292,00	100	6.625.317,00
10	Lebakasih	6.416.292,00	6.416.292,00	100	6.154.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**44.614.044,00**	**44.614.044,00**	**100**	**42.792.219,00**
1	Kalanganyar	5.157.292,00	5.157.292,00	100	4.946.317,00
2	Pasirkupa	6.281.292,00	6.281.292,00	100	6.024.317,00
3	Cilangkap	7.140.292,00	7.140.292,00	100	6.849.317,00
4	Aweh	7.385.292,00	7.385.292,00	100	7.083.317,00
5	Sangiangtanjung	6.152.292,00	6.152.292,00	100	5.901.317,00
6	Sukamekarsari	6.602.292,00	6.602.292,00	100	6.333.317,00
7	Cikatapis	5.895.292,00	5.895.292,00	100	5.654.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**33.733.752,00**	**33.733.752,00**	**100**	**32.355.902,00**
1	Banjaririgasi	5.769.292,00	5.769.292,00	100	5.533.317,00
2	Ciladaeun	5.190.292,00	5.190.292,00	100	4.978.317,00
3	Lebakgedong	5.985.292,00	5.985.292,00	100	5.741.317,00

TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
4	Banjarsari	5.358.292,00	5.358.292,00	100	5.139.317,00
5	Lebaksitu	5.962.292,00	5.962.292,00	100	5.718.317,00
6	Lebaksangka	5.468.292,00	5.468.292,00	100	5.245.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**61.906.628,00**	**61.906.628,00**	**100**	**59.377.853,00**
1	Panyaungan	7.017.292,00	7.017.292,00	100	6.730.317,00
2	Cihara	6.484.292,00	6.484.292,00	100	6.219.317,00
3	Ciparahu	6.573.292,00	6.573.292,00	100	6.305.317,00
4	Pondokpanjang	8.996.292,00	8.996.292,00	100	8.629.317,00
5	Citeupuseun	6.597.292,00	6.597.292,00	100	6.328.317,00
6	Lebakpeundeuy	7.213.292,00	7.213.292,00	100	6.918.317,00
7	Mekarsari	8.462.292,00	8.462.292,00	100	8.116.317,00
8	Karangkamulyan	5.016.292,00	5.016.292,00	100	4.811.317,00
9	Barunai	5.546.292,00	5.546.292,00	100	5.319.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**60.403.920,00**	**60.403.920,00**	**100**	**57.937.170,00**
1	Datarcae	5.818.292,00	5.818.292,00	100	5.580.317,00
2	Cirinten	7.639.292,00	7.639.292,00	100	7.327.317,00
3	Karangnunggal	5.208.292,00	5.208.292,00	100	4.995.317,00
4	Kadudamas	6.277.292,00	6.277.292,00	100	6.021.317,00
5	Badur	6.593.292,00	6.593.292,00	100	6.324.317,00
6	Parakanlima	6.157.292,00	6.157.292,00	100	5.905.317,00
7	Nanggerang	5.454.292,00	5.454.292,00	100	5.231.317,00
8	Cempaka	6.035.292,00	6.035.292,00	100	5.789.317,00
9	Karoya	5.803.292,00	5.803.292,00	100	5.566.317,00
10	Cibarani	5.417.292,00	5.417.292,00	100	5.196.317,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**53.877.323,00**	**53.877.323,00**	**100**	**51.675.853,00**
1	Peucangpari	7.226.292,00	7.226.292,00	100	6.931.317,00
2	Cibungur	5.479.292,00	5.479.292,00	100	5.256.317,00
3	Mugijaya	5.636.292,00	5.636.292,00	100	5.406.317,00
4	Cikate	5.384.292,00	5.384.292,00	100	5.164.317,00
5	Cigemblong	6.458.292,00	6.458.292,00	100	6.195.317,00
6	Cikadongdong	7.005.292,00	7.005.292,00	100	6.719.317,00
7	Cikaret	6.298.292,00	6.298.292,00	100	6.041.317,00
8	Wangunjaya	4.365.987,00	4.365.987,00	100	4.184.317,00
9	Cikaratuan	6.023.292,00	6.023.292,00	100	5.777.317,00
JUMLAH		**2.248.131.975,00**	**2.244.164.683,00**	**99,82**	**2.156.346.700,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp481.039.815.950,00 terealisasi sebesar Rp480.777.676.005,00 atau 99,95%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 yaitu Rp469.433.234.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.344.441.105,00 atau 2,42%. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdapat dari dua sumber yaitu Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp356.799.183.000,00 terealisasi sebesar Rp356.799.183.000,00 atau 100%, dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.124.240.632.950,00 terealisasi sebesar Rp.123.978.493.005,00 atau 99,79%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel 5.31 dan tabel 5.32 berikut:

Tabel 5.31
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**14.825.956.000,00**	**14.825.956.000,00**	**100**	**14.498.317.000,00**
1	Cilangkahan	840.215.000,00	840.215.000,00	100	832.561.000,00
2	Pagelaran	1.085.039.000,00	1.085.039.000,00	100	1.078.644.000,00
3	Sukaraja	931.971.000,00	931.971.000,00	100	922.651.000,00
4	Malingping Utara	853.193.000,00	853.193.000,00	100	845.309.000,00
5	Bolang	1.056.356.000,00	1.056.356.000,00	100	1.050.961.000,00
6	Cipeundeuy	1.225.199.000,00	1.225.199.000,00	100	1.221.478.000,00
7	Rahong	1.029.134.000,00	1.029.134.000,00	100	1.021.785.000,00
8	Kadujajar	1.071.097.000,00	1.071.097.000,00	100	1.063.776.000,00
9	Kersaratu	1.248.697.000,00	1.248.697.000,00	100	1.253.057.000,00
10	Malingping Selatan	1.021.950.000,00	1.021.950.000,00	100	759.675.000,00
11	Sumberwaras	1.274.583.000,00	1.274.583.000,00	100	1.267.494.000,00
12	Sukamanah	1.027.671.000,00	1.027.671.000,00	100	1.019.909.000,00
13	Senanghati	993.343.000,00	993.343.000,00	100	988.461.000,00
14	Sangiang	1.167.508.000,00	1.167.508.000,00	100	1.172.556.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**11.393.309.000,00**	**11.393.309.000,00**	**100**	**11.475.746.000,00**
1	Panggarangan	1.381.323.000,00	1.381.323.000,00	100	1.119.506.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2	Jatake	907.624.000,00	907.624.000,00	100	900.468.000,00
3	Sogong	862.619.000,00	862.619.000,00	100	1.255.747.000,00
4	Cimandiri	1.107.784.000,00	1.107.784.000,00	100	1.100.447.000,00
5	Gununggede	1.173.547.000,00	1.173.547.000,00	100	1.032.561.000,00
6	Situregen	1.228.447.000,00	1.228.447.000,00	100	965.652.000,00
7	Mekarjaya	1.096.920.000,00	1.096.920.000,00	100	1.094.228.000,00
8	Sindangratu	909.839.000,00	909.839.000,00	100	1.302.690.000,00
9	Hegarmanah	785.147.000,00	785.147.000,00	100	778.812.000,00
10	Sukajadi	939.776.000,00	939.776.000,00	100	932.466.000,00
11	Cibarengkok	1.000.283.000,00	1.000.283.000,00	100	993.169.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**10.442.987.000,00**	**10.442.987.000,00**	**100**	**10.346.021.000,00**
1	Bayah Barat	1.149.853.000,00	1.149.853.000,00	100	885.782.000,00
2	Sawarna	1.144.909.000,00	1.144.909.000,00	100	1.128.500.000,00
3	Cidikit	1.007.412.000,00	1.007.412.000,00	100	1.261.418.000,00
4	Suwakan	855.724.000,00	855.724.000,00	100	848.619.000,00
5	Cimancak	848.284.000,00	848.284.000,00	100	1.101.258.000,00
6	Darmasari	790.591.000,00	790.591.000,00	100	783.146.000,00
7	Bayah Timur	1.164.858.000,00	1.164.858.000,00	100	901.201.000,00
8	Cisuren	845.650.000,00	845.650.000,00	100	837.567.000,00
9	Pasirgombong	769.866.000,00	769.866.000,00	100	742.174.000,00
10	Sawarna Timur	785.329.000,00	785.329.000,00	100	778.481.000,00
11	Pamubulan	1.080.511.000,00	1.080.511.000,00	100	1.077.875.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**14.705.414.000,00**	**14.705.414.000,00**	**100**	**15.259.673.000,00**
1	Cipanas	1.257.030.000,00	1.257.030.000,00	100	1.247.083.000,00
2	Girilaya	1.409.714.000,00	1.409.714.000,00	100	1.235.289.000,00
3	Malangsari	1.066.662.000,00	1.066.662.000,00	100	1.049.858.000,00
4	Bintangresmi	1.040.712.000,00	1.040.712.000,00	100	917.164.000,00
5	Talagahiyang	899.092.000,00	899.092.000,00	100	747.736.000,00
6	Luhurjaya	1.154.565.000,00	1.154.565.000,00	100	1.136.852.000,00
7	Haurgajrug	834.597.000,00	834.597.000,00	100	1.075.621.000,00
8	Giriharja	1.004.769.000,00	1.004.769.000,00	100	988.007.000,00
9	Sukasari	959.385.000,00	959.385.000,00	100	1.195.824.000,00
10	Jayapura	1.220.345.000,00	1.220.345.000,00	100	1.470.513.000,00
11	Sipayung	1.097.232.000,00	1.097.232.000,00	100	1.096.130.000,00
12	Bintangsari	790.629.000,00	790.629.000,00	100	783.353.000,00
13	Pasirhaur	972.964.000,00	972.964.000,00	100	1.208.723.000,00
14	Harumsari	997.718.000,00	997.718.000,00	100	1.107.520.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**13.083.731.000,00**	**13.083.731.000,00**	**100**	**11.970.389.000,00**
1	Pasireurih	935.347.000,00	935.347.000,00	100	826.010.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2	Ciminyak	827.308.000,00	827.308.000,00	100	783.652.000,00
3	Muncang	1.034.185.000,00	1.034.185.000,00	100	1.028.284.000,00
4	Leuwicoo	1.113.203.000,00	1.113.203.000,00	100	832.529.000,00
5	Sindangwangi	1.026.145.000,00	1.026.145.000,00	100	1.030.181.000,00
6	Cikarang	1.278.116.000,00	1.278.116.000,00	100	1.284.052.000,00
7	Sukanagara	1.126.493.000,00	1.126.493.000,00	100	1.094.272.000,00
8	Pasirnangka	1.183.457.000,00	1.183.457.000,00	100	969.487.000,00
9	Jagaraksa	995.590.000,00	995.590.000,00	100	932.466.000,00
10	Tanjungwangi	1.402.161.000,00	1.402.161.000,00	100	1.189.065.000,00
11	Mekarwangi	1.041.083.000,00	1.041.083.000,00	100	874.981.000,00
12	Girijagabaya	1.120.643.000,00	1.120.643.000,00	100	1.125.410.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**13.368.359.000,00**	**13.368.359.000,00**	**100**	**13.311.189.000,00**
1	Kanekes	-	-	0,00	-
2	Cisimeut	1.468.814.000,00	1.468.814.000,00	100	1.318.488.000,00
3	Cibungur	1.188.031.000,00	1.188.031.000,00	100	1.276.657.000,00
4	Leuwidamar	1.538.001.000,00	1.538.001.000,00	100	1.382.033.000,00
5	Lebakparahiang	1.080.400.000,00	1.080.400.000,00	100	1.070.057.000,00
6	Sangkanwangi	1.166.278.000,00	1.166.278.000,00	100	1.149.963.000,00
7	Nayagati	1.533.413.000,00	1.533.413.000,00	100	1.269.762.000,00
8	Bojongmenteng	1.255.306.000,00	1.255.306.000,00	100	1.137.723.000,00
9	Margawangi	914.907.000,00	914.907.000,00	100	895.010.000,00
10	Wantisari	997.474.000,00	997.474.000,00	100	1.131.021.000,00
11	Jalupangmulya	1.150.956.000,00	1.150.956.000,00	100	1.509.664.000,00
12	Cisimeut Raya	1.074.779.000,00	1.074.779.000,00	100	1.170.811.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**9.476.487.000,00**	**9.476.487.000,00**	**100**	**9.400.423.000,00**
1	Bojongmanik	789.473.000,00	789.473.000,00	100	783.613.000,00
2	Harjawana	1.207.092.000,00	1.207.092.000,00	100	1.213.347.000,00
3	Kadurahayu	1.027.488.000,00	1.027.488.000,00	100	1.032.982.000,00
4	Cimayang	1.101.500.000,00	1.101.500.000,00	100	1.103.832.000,00
5	Parakanbeusi	1.208.088.000,00	1.208.088.000,00	100	1.269.447.000,00
6	Keboncau	1.035.198.000,00	1.035.198.000,00	100	1.038.283.000,00
7	Mekarmanik	1.042.100.000,00	1.042.100.000,00	100	1.045.824.000,00
8	Mekar Rahayu	1.152.662.000,00	1.152.662.000,00	100	995.745.000,00
9	Pasirbitung	912.886.000,00	912.886.000,00	100	917.350.000,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**12.715.037.000,00**	**12.715.037.000,00**	**100**	**12.643.820.000,00**
1	Gunungkencana	1.133.505.000,00	1.133.505.000,00	100	1.131.892.000,00
2	Cimanyangray	912.929.000,00	912.929.000,00	100	1.037.376.000,00
3	Gunungkendeng	809.283.000,00	809.283.000,00	100	803.130.000,00
4	Cisampang	1.154.701.000,00	1.154.701.000,00	100	1.003.472.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
5	Ciginggang	1.122.044.000,00	1.122.044.000,00	100	1.111.187.000,00
6	Ciakar	1.050.537.000,00	1.050.537.000,00	100	1.044.343.000,00
7	Cicaringin	1.353.702.000,00	1.353.702.000,00	100	1.092.937.000,00
8	Bulakan	1.096.049.000,00	1.096.049.000,00	100	1.228.240.000,00
9	Sukanegara	931.859.000,00	931.859.000,00	100	1.065.423.000,00
10	Bojongkoneng	889.632.000,00	889.632.000,00	100	882.978.000,00
11	Kramatjaya	1.401.101.000,00	1.401.101.000,00	100	1.389.714.000,00
12	Tanjungsari Indah	859.695.000,00	859.695.000,00	100	853.128.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**22.991.492.000,00**	**22.991.492.000,00**	**100**	**22.224.291.000,00**
1	Kerta	1.240.690.000,00	1.240.690.000,00	100	1.094.479.000,00
2	Bojongjuruh	1.073.772.000,00	1.073.772.000,00	100	1.183.595.000,00
3	Leuwiipuh	834.768.000,00	834.768.000,00	100	967.133.000,00
4	Lebakkeusik	1.054.711.000,00	1.054.711.000,00	100	1.155.092.000,00
5	Cilegongilir	998.325.000,00	998.325.000,00	100	1.002.794.000,00
6	Keusik	1.376.127.000,00	1.376.127.000,00	100	968.162.000,00
7	Cibaturkeusik	1.029.307.000,00	1.029.307.000,00	100	1.033.951.000,00
8	Kumpay	961.680.000,00	961.680.000,00	100	950.382.000,00
9	Jalupanggirang	1.136.534.000,00	1.136.534.000,00	100	1.141.446.000,00
10	Bendungan	916.738.000,00	916.738.000,00	100	1.170.152.000,00
11	Kertaraharja	1.311.131.000,00	1.311.131.000,00	100	1.315.480.000,00
12	Cisampih	1.438.996.000,00	1.438.996.000,00	100	1.448.146.000,00
13	Gunungsari	1.089.112.000,00	1.089.112.000,00	100	1.083.310.000,00
14	Tamansari	1.223.800.000,00	1.223.800.000,00	100	1.084.015.000,00
15	Cidahu	1.275.838.000,00	1.275.838.000,00	100	868.966.000,00
16	Ciruji	1.264.337.000,00	1.264.337.000,00	100	1.270.605.000,00
17	Kaduhauk	1.021.660.000,00	1.021.660.000,00	100	1.015.341.000,00
18	Labanjaya	1.167.828.000,00	1.167.828.000,00	100	1.026.373.000,00
19	Umbuljaya	1.531.894.000,00	1.531.894.000,00	100	1.395.954.000,00
20	Kertarahayu	1.044.244.000,00	1.044.244.000,00	100	1.048.915.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**14.576.283.000,00**	**14.576.283.000,00**	**100**	**14.311.344.000,00**
1	Pasindangan	1.017.120.000,00	1.017.120.000,00	100	1.114.980.000,00
2	Parungkujang	1.635.753.000,00	1.635.753.000,00	100	1.629.550.000,00
3	Cileles	887.287.000,00	887.287.000,00	100	881.449.000,00
4	Cikareo	1.111.820.000,00	1.111.820.000,00	100	1.110.118.000,00
5	Cipadang	1.460.833.000,00	1.460.833.000,00	100	1.448.751.000,00
6	Gumuruh	1.299.998.000,00	1.299.998.000,00	100	1.274.864.000,00
7	Prabugantungan	1.245.072.000,00	1.245.072.000,00	100	1.241.265.000,00
8	Daroyon	1.174.223.000,00	1.174.223.000,00	100	1.164.678.000,00
9	Margamulya	1.249.156.000,00	1.249.156.000,00	100	977.646.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
10	Mekarjaya	1.019.169.000,00	1.019.169.000,00	100	1.012.298.000,00
11	Kujangsari	956.390.000,00	956.390.000,00	100	1.087.935.000,00
12	Banjarsari	1.519.462.000,00	1.519.462.000,00	100	1.367.810.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**19.339.747.000,00**	**19.339.747.000,00**	**100**	**19.735.406.000,00**
1	Sarageni	1.154.445.000,00	1.154.445.000,00	100	1.409.722.000,00
2	Gununganten	1.025.513.000,00	1.025.513.000,00	100	1.028.435.000,00
3	Sudamanik	1.082.602.000,00	1.082.602.000,00	100	1.076.915.000,00
4	Tambak	1.259.569.000,00	1.259.569.000,00	100	1.359.691.000,00
5	Cimarga	983.275.000,00	983.275.000,00	100	976.577.000,00
6	Karyajaya	1.421.110.000,00	1.421.110.000,00	100	1.157.568.000,00
7	Margajaya	1.191.480.000,00	1.191.480.000,00	100	1.445.617.000,00
8	Jayamanik	1.073.871.000,00	1.073.871.000,00	100	1.171.722.000,00
9	Margaluyu	1.211.771.000,00	1.211.771.000,00	100	1.215.725.000,00
10	Margatirta	1.058.964.000,00	1.058.964.000,00	100	1.157.929.000,00
11	Intenjaya	1.483.528.000,00	1.483.528.000,00	100	1.342.794.000,00
12	Mekarjaya	1.195.345.000,00	1.195.345.000,00	100	1.054.794.000,00
13	Jayasari	862.373.000,00	862.373.000,00	100	792.077.000,00
14	Girimukti	931.603.000,00	931.603.000,00	100	1.186.245.000,00
15	Sangkanmanik	1.305.700.000,00	1.305.700.000,00	100	1.159.761.000,00
16	Sangiangjaya	1.118.862.000,00	1.118.862.000,00	100	1.122.533.000,00
17	Mekarmulya	979.736.000,00	979.736.000,00	100	1.077.301.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**15.994.096.000,00**	**15.994.096.000,00**	**100**	**16.420.429.000,00**
1	Maraya	1.524.079.000,00	1.524.079.000,00	100	1.667.254.000,00
2	Sajira	1.063.101.000,00	1.063.101.000,00	100	1.057.655.000,00
3	Sukarame	1.021.803.000,00	1.021.803.000,00	100	1.021.295.000,00
4	Calungbungur	1.051.756.000,00	1.051.756.000,00	100	1.057.029.000,00
5	Parungsari	1.032.865.000,00	1.032.865.000,00	100	975.664.000,00
6	Sindangsari	1.100.920.000,00	1.100.920.000,00	100	1.004.695.000,00
7	Mekarsari	947.755.000,00	947.755.000,00	100	1.200.549.000,00
8	Sukamarga	1.092.504.000,00	1.092.504.000,00	100	1.056.707.000,00
9	Pajagan	1.126.872.000,00	1.126.872.000,00	100	1.339.748.000,00
10	Sukajaya	926.505.000,00	926.505.000,00	100	1.072.963.000,00
11	Sajira Mekar	1.167.783.000,00	1.167.783.000,00	100	1.044.223.000,00
12	Paja	773.511.000,00	773.511.000,00	100	766.366.000,00
13	Margaluyu	1.268.527.000,00	1.268.527.000,00	100	1.273.979.000,00
14	Bungurmekar	813.823.000,00	813.823.000,00	100	810.215.000,00
15	Ciuyah	1.082.292.000,00	1.082.292.000,00	100	1.072.087.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**14.268.951.000,00**	**14.268.951.000,00**	100	**14.605.456.000,00**
1	Tanjungsari	888.297.000,00	888.297.000,00	100	1.140.204.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2	Maja	2.114.681.000,00	2.114.681.000,00	100	1.857.628.000,00
3	Sangiang	896.437.000,00	896.437.000,00	100	888.499.000,00
4	Binong	966.978.000,00	966.978.000,00	100	1.215.746.000,00
5	Gubugan Cibeureum	870.808.000,00	870.808.000,00	100	863.025.000,00
6	Mekarsari	1.023.805.000,00	1.023.805.000,00	100	1.017.548.000,00
7	Padasuka	959.793.000,00	959.793.000,00	100	945.398.000,00
8	Curugbadak	939.095.000,00	939.095.000,00	100	926.759.000,00
9	Sindangmulya	1.079.403.000,00	1.079.403.000,00	100	1.066.046.000,00
10	Cilangkap	937.388.000,00	937.388.000,00	100	930.343.000,00
11	Pasirkembang	945.342.000,00	945.342.000,00	100	937.757.000,00
12	Pasirkecapi	861.740.000,00	861.740.000,00	100	1.109.769.000,00
13	Buyut Mekar	967.939.000,00	967.939.000,00	100	897.650.000,00
14	Maja Baru	817.245.000,00	817.245.000,00	100	809.084.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**11.478.570.000,00**	**11.478.570.000,00**	**100**	**11.286.772.000,00**
1	Pasirtanjung	1.071.909.000,00	1.071.909.000,00	100	1.201.671.000,00
2	Citeras	987.381.000,00	987.381.000,00	100	1.378.169.000,00
3	Nameng	948.401.000,00	948.401.000,00	100	938.407.000,00
4	Kolelet Wetan	1.119.154.000,00	1.119.154.000,00	100	856.638.000,00
5	Jatimulya	912.834.000,00	912.834.000,00	100	903.327.000,00
6	Mekarsari	1.164.496.000,00	1.164.496.000,00	100	903.244.000,00
7	Pabuaran	1.179.703.000,00	1.179.703.000,00	100	917.341.000,00
8	Rangkasbitung Timur	1.112.711.000,00	1.112.711.000,00	100	1.099.811.000,00
9	Sukamanah	894.277.000,00	894.277.000,00	100	1.146.546.000,00
10	Cimangeunteung	924.021.000,00	924.021.000,00	100	912.489.000,00
11	Narimbang Mulia	1.163.683.000,00	1.163.683.000,00	100	1.029.129.000,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**13.051.975.000,00**	**13.051.975.000,00**	**100**	**12.010.943.000,00**
1	Sukarendah	1.227.722.000,00	1.227.722.000,00	100	1.217.668.000,00
2	Warunggunung	1.125.055.000,00	1.125.055.000,00	100	861.426.000,00
3	Cibuah	892.371.000,00	892.371.000,00	100	883.644.000,00
4	Pasir Tangkil	868.724.000,00	868.724.000,00	100	861.077.000,00
5	Baros	1.001.695.000,00	1.001.695.000,00	100	849.404.000,00
6	Banjarsari	1.167.594.000,00	1.167.594.000,00	100	1.015.016.000,00
7	Padasuka	1.026.062.000,00	1.026.062.000,00	100	1.158.206.000,00
8	Sukaraja	1.139.070.000,00	1.139.070.000,00	100	1.132.677.000,00
9	Jagabaya	1.151.409.000,00	1.151.409.000,00	100	1.002.077.000,00
10	Selaraja	1.165.163.000,00	1.165.163.000,00	100	901.463.000,00
11	Cempaka	1.323.361.000,00	1.323.361.000,00	100	916.173.000,00
12	Sindangsari	963.749.000,00	963.749.000,00	100	1.212.112.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**10.510.420.000,00**	**10.510.420.000,00**	**100**	**10.606.661.000,00**
1	Mekarjaya	876.882.000,00	876.882.000,00	100	774.878.000,00
2	Cipalabuh	1.060.557.000,00	1.060.557.000,00	100	1.314.431.000,00
3	Cijaku	1.006.683.000,00	1.006.683.000,00	100	994.825.000,00
4	Cibeureum	1.042.071.000,00	1.042.071.000,00	100	1.046.471.000,00
5	Ciapus	1.195.141.000,00	1.195.141.000,00	100	991.425.000,00
6	Kandangsapi	1.208.495.000,00	1.208.495.000,00	100	1.301.651.000,00
7	Cihujan	929.134.000,00	929.134.000,00	100	1.027.523.000,00
8	Cimenga	1.077.686.000,00	1.077.686.000,00	100	1.082.073.000,00
9	Kapunduhan	944.693.000,00	944.693.000,00	100	1.043.659.000,00
10	Sukasenang	1.169.078.000,00	1.169.078.000,00	100	1.029.725.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**13.182.214.000,00**	**13.182.214.000,00**	**100**	**13.931.714.000,00**
1	Anggalan	858.103.000,00	858.103.000,00	100	1.110.615.000,00
2	Muncangkopong	872.970.000,00	872.970.000,00	100	865.085.000,00
3	Sukaharja	853.779.000,00	853.779.000,00	100	1.086.591.000,00
4	Tamanjaya	881.125.000,00	881.125.000,00	100	870.255.000,00
5	Cigoong Utara	1.269.136.000,00	1.269.136.000,00	100	1.261.694.000,00
6	Muaradua	1.276.797.000,00	1.276.797.000,00	100	1.146.142.000,00
7	Cikulur	1.301.437.000,00	1.301.437.000,00	100	1.292.624.000,00
8	Curugpanjang	1.209.544.000,00	1.209.544.000,00	100	1.176.633.000,00
9	Cigoong Selatan	819.540.000,00	819.540.000,00	100	811.055.000,00
10	Sumurbandung	1.171.153.000,00	1.171.153.000,00	100	880.126.000,00
11	Parage	810.251.000,00	810.251.000,00	100	1.197.422.000,00
12	Sukadaya	944.537.000,00	944.537.000,00	100	1.186.318.000,00
13	Pasirgintung	913.842.000,00	913.842.000,00	100	1.047.154.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**15.408.186.000,00**	**15.408.186.000,00**	**100**	**15.215.754.000,00**
1	Tambakbaya	1.166.548.000,00	1.166.548.000,00	100	1.412.011.000,00
2	Kaduagung Timur	884.826.000,00	884.826.000,00	100	1.138.368.000,00
3	Panancangan	837.451.000,00	837.451.000,00	100	829.420.000,00
4	Cibadak	1.138.398.000,00	1.138.398.000,00	100	985.955.000,00
5	Asem	998.810.000,00	998.810.000,00	100	845.540.000,00
6	Cisangu	1.134.616.000,00	1.134.616.000,00	100	1.124.706.000,00
7	Kaduagung Barat	946.306.000,00	946.306.000,00	100	918.336.000,00
8	Bojongcae	991.405.000,00	991.405.000,00	100	989.802.000,00
9	Malabar	1.249.459.000,00	1.249.459.000,00	100	1.109.081.000,00
10	Pasar Keong	924.096.000,00	924.096.000,00	100	915.771.000,00
11	Bojong Leles	902.690.000,00	902.690.000,00	100	1.137.391.000,00
12	Cimenteng Jaya	1.120.119.000,00	1.120.119.000,00	100	856.151.000,00
13	Mekar Agung	1.039.809.000,00	1.039.809.000,00	100	888.680.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
14	Asem Margaluyu	958.934.000,00	958.934.000,00	100	1.212.071.000,00
15	Kaduagung Tengah	1.114.719.000,00	1.114.719.000,00	100	852.471.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**19.044.644.000,00**	**19.044.644.000,00**	**100**	**19.421.294.000,00**
1	Cibeber	1.081.750.000,00	1.081.750.000,00	100	1.219.019.000,00
2	Citorek Tengah	978.854.000,00	978.854.000,00	100	825.149.000,00
3	Cisungsang	750.066.000,00	750.066.000,00	100	739.098.000,00
4	Kujangjaya	762.622.000,00	762.622.000,00	100	755.863.000,00
5	Kujangsari	816.016.000,00	816.016.000,00	100	808.361.000,00
6	Neglasari	1.078.065.000,00	1.078.065.000,00	100	927.244.000,00
7	Mekarsari	757.980.000,00	757.980.000,00	100	751.087.000,00
8	Cikotok	757.902.000,00	757.902.000,00	100	751.983.000,00
9	Sukamulya	807.291.000,00	807.291.000,00	100	800.164.000,00
10	Citorek Timur	772.990.000,00	772.990.000,00	100	1.166.386.000,00
11	Warungbanten	908.327.000,00	908.327.000,00	100	839.014.000,00
12	Hegarmanah	913.667.000,00	913.667.000,00	100	902.532.000,00
13	Situmulya	861.878.000,00	861.878.000,00	100	854.541.000,00
14	Citorek Kidul	821.070.000,00	821.070.000,00	100	951.595.000,00
15	Cikadu	823.716.000,00	823.716.000,00	100	915.868.000,00
16	Sirnagalih	854.191.000,00	854.191.000,00	100	846.864.000,00
17	Cihambali	988.365.000,00	988.365.000,00	100	981.795.000,00
18	Citorek Barat	957.927.000,00	957.927.000,00	100	805.421.000,00
19	Gunungwangun	821.757.000,00	821.757.000,00	100	815.600.000,00
20	Wanasari	897.637.000,00	897.637.000,00	100	746.477.000,00
21	Citorek Sabrang	798.352.000,00	798.352.000,00	100	1.191.003.000,00
22	Ciherang	834.221.000,00	834.221.000,00	100	826.230.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**10.629.765.000,00**	**10.629.765.000,00**	**100**	**9.948.203.000,00**
1	Cilograng	880.986.000,00	880.986.000,00	100	875.100.000,00
2	Cibareno	1.306.279.000,00	1.306.279.000,00	100	900.375.000,00
3	Cikamunding	957.765.000,00	957.765.000,00	100	1.212.699.000,00
4	Cijengkol	1.346.514.000,00	1.346.514.000,00	100	1.223.801.000,00
5	Pasirbungur	1.208.313.000,00	1.208.313.000,00	100	1.054.731.000,00
6	Lebaktipar	918.224.000,00	918.224.000,00	100	910.628.000,00
7	Cikatomas	888.542.000,00	888.542.000,00	100	881.208.000,00
8	Girimukti	1.087.310.000,00	1.087.310.000,00	100	1.092.127.000,00
9	Cireundeu	1.251.431.000,00	1.251.431.000,00	100	984.755.000,00
10	Gunungbatu	784.401.000,00	784.401.000,00	100	812.779.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**15.872.474.000,00**	**15.872.474.000,00**	**100**	**15.879.651.000,00**
1	Wanasalam	1.555.257.000,00	1.555.257.000,00	100	1.293.943.000,00
2	Bejod	1.136.191.000,00	1.136.191.000,00	100	1.254.116.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
3	Cilangkap	1.278.111.000,00	1.278.111.000,00	100	1.280.404.000,00
4	Cipeucang	939.354.000,00	939.354.000,00	100	1.032.346.000,00
5	Muara	1.482.165.000,00	1.482.165.000,00	100	1.218.502.000,00
6	Parungpanjang	1.221.964.000,00	1.221.964.000,00	100	1.337.536.000,00
7	Cikeusik	1.214.397.000,00	1.214.397.000,00	100	1.210.470.000,00
8	Katapang	1.238.905.000,00	1.238.905.000,00	100	1.237.603.000,00
9	Cisarap	1.132.498.000,00	1.132.498.000,00	100	1.129.750.000,00
10	Sukatani	1.491.043.000,00	1.491.043.000,00	100	1.626.755.000,00
11	Cipedang	909.635.000,00	909.635.000,00	100	998.515.000,00
12	Parungsari	1.216.471.000,00	1.216.471.000,00	100	1.212.796.000,00
13	Karangpamindangan	1.056.483.000,00	1.056.483.000,00	100	1.046.915.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**9.750.652.000,00**	**9.750.652.000,00**	**100**	**9.659.371.000,00**
1	Ciparasi	861.464.000,00	861.464.000,00	100	993.577.000,00
2	Sobang	1.029.319.000,00	1.029.319.000,00	100	839.741.000,00
3	Sukajaya	881.494.000,00	881.494.000,00	100	752.924.000,00
4	Sindanglaya	1.005.365.000,00	1.005.365.000,00	100	853.433.000,00
5	Sukamaju	887.932.000,00	887.932.000,00	100	874.245.000,00
6	Hariang	1.119.907.000,00	1.119.907.000,00	100	1.458.630.000,00
7	Majasari	933.812.000,00	933.812.000,00	100	899.102.000,00
8	Sinar Jaya	1.078.634.000,00	1.078.634.000,00	100	938.332.000,00
9	Cirompang	816.978.000,00	816.978.000,00	100	1.070.202.000,00
10	Sukaresmi	1.135.747.000,00	1.135.747.000,00	100	979.185.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**9.341.557.000,00**	**9.341.557.000,00**	**100**	**9.529.821.000,00**
1	Guradog	904.390.000,00	904.390.000,00	100	1.157.645.000,00
2	Curugbitung	860.466.000,00	860.466.000,00	100	852.557.000,00
3	Candi	900.584.000,00	900.584.000,00	100	893.468.000,00
4	Mayak	755.460.000,00	755.460.000,00	100	748.391.000,00
5	Cipining	984.307.000,00	984.307.000,00	100	977.701.000,00
6	Cilayang	929.869.000,00	929.869.000,00	100	922.567.000,00
7	Ciburuy	1.130.989.000,00	1.130.989.000,00	100	1.123.295.000,00
8	Sekarwangi	1.171.947.000,00	1.171.947.000,00	100	1.165.426.000,00
9	Cidadap	940.538.000,00	940.538.000,00	100	932.953.000,00
10	Lebakasih	763.007.000,00	763.007.000,00	100	755.818.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**7.866.702.000,00**	**7.866.702.000,00**	**100**	**7.165.496.000,00**
1	Kalanganyar	1.125.128.000,00	1.125.128.000,00	100	863.912.000,00
2	Pasirkupa	1.441.512.000,00	1.441.512.000,00	100	1.181.457.000,00
3	Cilangkap	989.493.000,00	989.493.000,00	100	981.565.000,00
4	Aweh	891.129.000,00	891.129.000,00	100	882.653.000,00
5	Sangiangtanjung	1.124.027.000,00	1.124.027.000,00	100	1.377.240.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
6	Sukamekarsari	1.306.640.000,00	1.306.640.000,00	100	1.043.859.000,00
7	Cikatapis	988.773.000,00	988.773.000,00	100	834.810.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**5.766.198.000,00**	**5.766.198.000,00**	**100**	**5.435.198.000,00**
1	Banjaririgasi	1.046.554.000,00	1.046.554.000,00	100	1.032.418.000,00
2	Ciladaeun	1.005.120.000,00	1.005.120.000,00	100	852.774.000,00
3	Lebakgedong	852.240.000,00	852.240.000,00	100	844.306.000,00
4	Banjarsari	1.019.577.000,00	1.019.577.000,00	100	1.024.298.000,00
5	Lebaksitu	989.578.000,00	989.578.000,00	100	836.325.000,00
6	Lebaksangka	853.129.000,00	853.129.000,00	100	845.077.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**8.863.614.000,00**	**8.863.614.000,00**	**100**	**8.471.196.000,00**
1	Panyaungan	865.852.000,00	865.852.000,00	100	858.059.000,00
2	Cihara	857.503.000,00	857.503.000,00	100	849.931.000,00
3	Ciparahu	1.258.629.000,00	1.258.629.000,00	100	994.227.000,00
4	Pondokpanjang	1.231.675.000,00	1.231.675.000,00	100	965.775.000,00
5	Citeupuseun	906.530.000,00	906.530.000,00	100	912.381.000,00
6	Lebakpeundeuy	881.575.000,00	881.575.000,00	100	779.810.000,00
7	Mekarsari	945.778.000,00	945.778.000,00	100	938.488.000,00
8	Karangkamulyan	881.395.000,00	881.395.000,00	100	1.133.895.000,00
9	Barunai	1.034.677.000,00	1.034.677.000,00	100	1.038.630.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**9.275.841.000,00**	**9.275.841.000,00**	**100**	**9.563.412.000,00**
1	Datarcae	888.735.000,00	888.735.000,00	100	882.043.000,00
2	Cirinten	1.104.916.000,00	1.104.916.000,00	100	1.097.672.000,00
3	Karangnunggal	831.979.000,00	831.979.000,00	100	825.928.000,00
4	Kadudamas	845.968.000,00	845.968.000,00	100	838.805.000,00
5	Badur	904.296.000,00	904.296.000,00	100	899.479.000,00
6	Parakanlima	1.110.381.000,00	1.110.381.000,00	100	1.244.443.000,00
7	Nanggerang	1.058.529.000,00	1.058.529.000,00	100	1.158.780.000,00
8	Cempaka	890.663.000,00	890.663.000,00	100	989.727.000,00
9	Karoya	782.519.000,00	782.519.000,00	100	775.844.000,00
10	Cibarani	857.855.000,00	857.855.000,00	100	850.691.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**9.574.522.000,00**	**9.574.522.000,00**	**100**	**10.312.044.000,00**
1	Peucangpari	1.534.006.000,00	1.534.006.000,00	100	1.541.937.000,00
2	Cibungur	943.893.000,00	943.893.000,00	100	1.077.340.000,00
3	Mugijaya	945.707.000,00	945.707.000,00	100	1.088.965.000,00
4	Cikate	959.512.000,00	959.512.000,00	100	1.155.791.000,00
5	Cigemblong	1.075.417.000,00	1.075.417.000,00	100	1.209.809.000,00
6	Cikadongdong	1.002.882.000,00	1.002.882.000,00	100	1.059.081.000,00
7	Cikaret	966.274.000,00	966.274.000,00	100	969.630.000,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
8	Wangunjaya	1.118.266.000,00	1.118.266.000,00	100	1.176.715.000,00
9	Cikaratuan	1.028.565.000,00	1.028.565.000,00	100	1.032.776.000,00
JUMLAH		**356.799.183.000,00**	**356.799.183.000,00**	**100**	**354.640.034.000,00**

Tabel 5.32
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**5.076.831.614,00**	**5.076.831.614,00**	**100**	**4.690.783.086,00**
1	Cilangkahan	351.701.901,00	351.701.901,00	100	324.958.649,00
2	Pagelaran	369.400.901,00	369.400.901,00	100	341.311.649,00
3	Sukaraja	374.245.901,00	374.245.901,00	100	345.787.649,00
4	Malingping Utara	350.353.901,00	350.353.901,00	100	323.712.649,00
5	Bolang	362.630.901,00	362.630.901,00	100	335.055.649,00
6	Cipeundeuy	358.877.901,00	358.877.901,00	100	331.588.649,00
7	Rahong	350.315.901,00	350.315.901,00	100	323.677.649,00
8	Kadujajar	381.004.901,00	381.004.901,00	100	352.032.649,00
9	Kersaratu	408.543.901,00	408.543.901,00	100	377.477.649,00
10	Malingping Selatan	341.960.901,00	341.960.901,00	100	315.957.649,00
11	Sumberwaras	381.617.901,00	381.617.901,00	100	352.598.649,00
12	Sukamanah	359.938.901,00	359.938.901,00	100	332.568.649,00
13	Senanghati	348.277.901,00	348.277.901,00	100	321.794.649,00
14	Sangiang	337.959.901,00	337.959.901,00	100	312.260.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**4.178.135.911,00**	**4.178.135.911,00**	**100**	**3.860.424.139,00**
1	Panggarangan	372.709.901,00	372.709.901,00	100	344.368.649,00
2	Jatake	369.776.901,00	369.776.901,00	100	341.658.649,00
3	Sogong	373.102.901,00	373.102.901,00	100	344.731.649,00
4	Cimandiri	401.492.901,00	401.492.901,00	100	370.962.649,00
5	Gununggede	385.542.901,00	385.542.901,00	100	356.225.649,00
6	Situregen	409.700.901,00	409.700.901,00	100	378.546.649,00
7	Mekarjaya	399.100.901,00	399.100.901,00	100	368.752.649,00
8	Sindangratu	381.127.901,00	381.127.901,00	100	352.146.649,00
9	Hegarmanah	339.377.901,00	339.377.901,00	100	313.570.649,00
10	Sukajadi	374.284.901,00	374.284.901,00	100	345.823.649,00
11	Cibarengkok	371.917.901,00	371.917.901,00	100	343.636.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**4.302.429.911,00**	**4.302.991.511,00**	**100,01**	**3.975.267.139,00**
1	Bayah Barat	416.766.901,00	416.766.901,00	100	385.075.649,00
2	Sawarna	408.115.901,00	408.115.901,00	100	377.081.649,00
3	Cidikit	408.150.901,00	408.150.901,00	100	377.114.649,00
4	Suwakan	413.944.901,00	413.944.901,00	100	382.468.649,00
5	Cimancak	382.522.901,00	382.522.901,00	100	353.435.649,00
6	Darmasari	362.223.901,00	362.223.901,00	100	334.679.649,00
7	Bayah Timur	416.354.901,00	416.354.901,00	100	384.694.649,00
8	Cisuren	374.385.901,00	374.385.901,00	100	345.916.649,00
9	Pasirgombong	356.512.901,00	356.512.901,00	100	329.403.649,00
10	Sawarna Timur	353.959.901,00	353.959.901,00	100	327.043.649,00
11	Pamubulan	409.490.901,00	410.052.501,00	100,14	378.352.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**5.086.801.614,00**	**5.086.801.614,00**	**100**	**4.699.995.086,00**
1	Cipanas	371.487.901,00	371.487.901,00	100	343.239.649,00
2	Girilaya	370.658.901,00	370.658.901,00	100	342.473.649,00
3	Malangsari	345.357.901,00	345.357.901,00	100	319.096.649,00
4	Bintangresmi	351.252.901,00	351.252.901,00	100	324.543.649,00
5	Talagahiyang	342.151.901,00	342.151.901,00	100	316.134.649,00
6	Luhurjaya	399.727.901,00	399.727.901,00	100	369.331.649,00
7	Haurgajrug	386.178.901,00	386.178.901,00	100	356.813.649,00
8	Giriharja	358.185.901,00	358.185.901,00	100	330.948.649,00
9	Sukasari	391.049.901,00	391.049.901,00	100	361.313.649,00
10	Jayapura	348.207.901,00	348.207.901,00	100	321.729.649,00
11	Sipayung	369.815.901,00	369.815.901,00	100	341.694.649,00
12	Bintangsari	339.641.901,00	339.641.901,00	100	313.814.649,00
13	Pasirhaur	358.273.901,00	358.273.901,00	100	331.030.649,00
14	Harumsari	354.809.901,00	354.809.901,00	100	327.829.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**4.233.515.812,00**	**4.233.515.812,00**	**100**	**3.911.592.788,00**
1	Pasireurih	359.757.901,00	359.757.901,00	100	332.400.649,00
2	Ciminyak	358.504.901,00	358.504.901,00	100	331.243.649,00
3	Muncang	355.928.901,00	355.928.901,00	100	328.863.649,00
4	Leuwicoo	353.248.901,00	353.248.901,00	100	326.387.649,00
5	Sindangwangi	347.364.901,00	347.364.901,00	100	320.950.649,00
6	Cikarang	353.642.901,00	353.642.901,00	100	326.751.649,00
7	Sukanagara	359.425.901,00	359.425.901,00	100	332.094.649,00
8	Pasirnangka	346.161.901,00	346.161.901,00	100	319.838.649,00
9	Jagaraksa	348.627.901,00	348.627.901,00	100	322.117.649,00
10	Tanjungwangi	345.105.901,00	345.105.901,00	100	318.863.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
11	Mekarwangi	349.007.901,00	349.007.901,00	100	322.468.649,00
12	Girijagabaya	356.737.901,00	356.737.901,00	100	329.611.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**4.663.823.422,00**	**4.399.998.677,00**	**94,34**	**4.309.190.028,00**
1	Kanekes	524.926.511,00	261.101.766,00	49,74	485.022.889,00
2	Cisimeut	409.218.901,00	409.218.901,00	100,00	378.100.649,00
3	Cibungur	379.647.901,00	379.647.901,00	100,00	350.778.649,00
4	Leuwidamar	387.209.901,00	387.209.901,00	100,00	357.765.649,00
5	Lebakparahiang	355.122.901,00	355.122.901,00	100,00	328.118.649,00
6	Sangkanwangi	387.768.901,00	387.768.901,00	100,00	358.282.649,00
7	Nayagati	389.083.901,00	389.083.901,00	100,00	359.497.649,00
8	Bojongmenteng	361.785.901,00	361.785.901,00	100,00	334.275.649,00
9	Margawangi	350.397.901,00	350.397.901,00	100,00	323.752.649,00
10	Wantisari	361.452.901,00	361.452.901,00	100,00	333.966.649,00
11	Jalupangmulya	380.227.901,00	380.227.901,00	100,00	351.314.649,00
12	Cisimeut Raya	376.979.901,00	376.979.901,00	100,00	348.313.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**3.235.279.109,00**	**3.235.279.109,00**	**100**	**2.989.263.841,00**
1	Bojongmanik	365.945.901,00	365.945.901,00	100	338.118.649,00
2	Harjawana	363.292.901,00	363.292.901,00	100	335.667.649,00
3	Kadurahayu	337.990.901,00	337.990.901,00	100	312.289.649,00
4	Cimayang	365.028.901,00	365.028.901,00	100	337.271.649,00
5	Parakanbeusi	375.564.901,00	375.564.901,00	100	347.006.649,00
6	Keboncau	372.419.901,00	372.419.901,00	100	344.100.649,00
7	Mekarmanik	377.830.901,00	377.830.901,00	100	349.099.649,00
8	Mekar Rahayu	333.867.901,00	333.867.901,00	100	308.479.649,00
9	Pasirbitung	343.336.901,00	343.336.901,00	100	317.229.649,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**4.295.971.812,00**	**4.295.971.812,00**	**100**	**3.969.300.788,00**
1	Gunungkencana	348.172.901,00	348.172.901,00	100	321.697.649,00
2	Cimanyangray	365.597.901,00	365.597.901,00	100	337.797.649,00
3	Gunungkendeng	340.995.901,00	340.995.901,00	100	315.065.649,00
4	Cisampang	342.943.901,00	342.943.901,00	100	316.865.649,00
5	Ciginggang	381.058.901,00	381.058.901,00	100	352.082.649,00
6	Ciakar	373.365.901,00	373.365.901,00	100	344.974.649,00
7	Cicaringin	367.441.901,00	367.441.901,00	100	339.501.649,00
8	Bulakan	355.493.901,00	355.493.901,00	100	328.461.649,00
9	Sukanegara	348.855.901,00	348.855.901,00	100	322.328.649,00
10	Bojongkoneng	342.406.901,00	342.406.901,00	100	316.369.649,00
11	Kramatjaya	393.297.901,00	393.297.901,00	100	363.390.649,00
12	Tanjungsari Indah	336.339.901,00	336.339.901,00	100	310.764.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**7.112.839.020,00**	**7.113.400.620,00**	**100,01**	**6.571.967.980,00**
1	Kerta	351.790.901,00	351.790.901,00	100	325.039.649,00
2	Bojongjuruh	359.990.901,00	359.990.901,00	100	332.616.649,00
3	Leuwiipuh	358.567.901,00	358.567.901,00	100	331.301.649,00
4	Lebakkeusik	354.704.901,00	354.704.901,00	100	327.732.649,00
5	Cilegongilir	355.451.901,00	355.451.901,00	100	328.422.649,00
6	Keusik	349.484.901,00	349.484.901,00	100	322.909.649,00
7	Cibaturkeusik	336.083.901,00	336.083.901,00	100	310.527.649,00
8	Kumpay	366.756.901,00	366.756.901,00	100	338.867.649,00
9	Jalupanggirang	344.849.901,00	344.849.901,00	100	318.626.649,00
10	Bendungan	366.269.901,00	366.269.901,00	100	338.417.649,00
11	Kertaraharja	411.364.901,00	411.364.901,00	100	380.084.649,00
12	Cisampih	357.511.901,00	357.511.901,00	100	330.326.649,00
13	Gunungsari	351.279.901,00	351.279.901,00	100	324.568.649,00
14	Tamansari	343.147.901,00	343.147.901,00	100	317.054.649,00
15	Cidahu	346.969.901,00	346.969.901,00	100	320.585.649,00
16	Ciruji	357.151.901,00	357.713.501,00	100,16	329.993.649,00
17	Kaduhauk	349.747.901,00	349.747.901,00	100	323.152.649,00
18	Labanjaya	344.744.901,00	344.744.901,00	100	318.530.649,00
19	Umbuljaya	357.691.901,00	357.691.901,00	100	330.492.649,00
20	Kertarahayu	349.275.901,00	349.275.901,00	100	322.715.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**4.462.450.812,00**	**4.462.450.812,00**	**100**	**4.123.118.788,00**
1	Pasindangan	388.635.901,00	388.635.901,00	100	359.083.649,00
2	Parungkujang	373.151.901,00	373.151.901,00	100	344.776.649,00
3	Cileles	354.461.901,00	354.461.901,00	100	327.507.649,00
4	Cikareo	367.152.901,00	367.152.901,00	100	339.234.649,00
5	Cipadang	391.975.901,00	391.975.901,00	100	362.169.649,00
6	Gumuruh	363.315.901,00	363.315.901,00	100	335.688.649,00
7	Prabugantungan	372.693.901,00	372.693.901,00	100	344.353.649,00
8	Daroyon	362.394.901,00	362.394.901,00	100	334.837.649,00
9	Margamulya	366.032.901,00	366.032.901,00	100	338.199.649,00
10	Mekarjaya	362.458.901,00	362.458.901,00	100	334.896.649,00
11	Kujangsari	370.696.901,00	370.696.901,00	100	342.508.649,00
12	Banjarsari	389.478.901,00	389.478.901,00	100	359.861.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**6.263.893.317,00**	**6.263.893.317,00**	**100**	**5.787.577.033,00**
1	Sarageni	338.905.901,00	338.905.901,00	100	313.134.649,00
2	Gununganten	359.844.901,00	359.844.901,00	100	332.482.649,00
3	Sudamanik	389.749.901,00	389.749.901,00	100	360.112.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
4	Tambak	371.798.901,00	371.798.901,00	100	343.526.649,00
5	Cimarga	382.484.901,00	382.484.901,00	100	353.400.649,00
6	Karyajaya	373.566.901,00	373.566.901,00	100	345.160.649,00
7	Margajaya	411.244.901,00	411.244.901,00	100	379.972.649,00
8	Jayamanik	378.128.901,00	378.128.901,00	100	349.375.649,00
9	Margaluyu	356.975.901,00	356.975.901,00	100	329.830.649,00
10	Margatirta	366.462.901,00	366.462.901,00	100	338.596.649,00
11	Intenjaya	360.910.901,00	360.910.901,00	100	333.466.649,00
12	Mekarjaya	353.637.901,00	353.637.901,00	100	326.746.649,00
13	Jayasari	344.456.901,00	344.456.901,00	100	318.264.649,00
14	Girimukti	373.321.901,00	373.321.901,00	100	344.933.649,00
15	Sangkanmanik	361.436.901,00	361.436.901,00	100	333.952.649,00
16	Sangiangjaya	369.935.901,00	369.935.901,00	100	341.804.649,00
17	Mekarmulya	371.028.901,00	371.028.901,00	100	342.814.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**5.444.864.515,00**	**5.444.864.515,00**	**100**	**5.030.830.735,00**
1	Maraya	370.909.901,00	370.909.901,00	100	342.705.649,00
2	Sajira	346.730.901,00	346.730.901,00	100	320.364.649,00
3	Sukarame	379.216.901,00	379.216.901,00	100	350.380.649,00
4	Calungbungur	361.877.901,00	361.877.901,00	100	334.360.649,00
5	Parungsari	366.833.901,00	366.833.901,00	100	338.938.649,00
6	Sindangsari	368.678.901,00	368.678.901,00	100	340.644.649,00
7	Mekarsari	349.474.901,00	349.474.901,00	100	322.899.649,00
8	Sukamarga	370.896.901,00	370.896.901,00	100	342.692.649,00
9	Pajagan	379.603.901,00	379.603.901,00	100	350.738.649,00
10	Sukajaya	352.439.901,00	352.439.901,00	100	325.640.649,00
11	Sajira Mekar	361.666.901,00	361.666.901,00	100	334.165.649,00
12	Paja	329.781.901,00	329.781.901,00	100	304.705.649,00
13	Margaluyu	385.389.901,00	385.389.901,00	100	356.084.649,00
14	Bungurmekar	349.482.901,00	349.482.901,00	100	322.907.649,00
15	Ciuyah	371.878.901,00	371.878.901,00	100	343.600.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**5.012.031.614,00**	**5.012.031.614,00**	100	**4.630.910.086,00**
1	Tanjungsari	347.355.901,00	347.355.901,00	100	320.941.649,00
2	Maja	375.063.901,00	375.063.901,00	100	346.543.649,00
3	Sangiang	363.010.901,00	363.010.901,00	100	335.407.649,00
4	Binong	366.842.901,00	366.842.901,00	100	338.947.649,00
5	Gubugan Cibeureum	335.428.901,00	335.428.901,00	100	309.922.649,00
6	Mekarsari	351.182.901,00	351.182.901,00	100	324.478.649,00
7	Padasuka	378.544.901,00	378.544.901,00	100	349.759.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
8	Curugbadak	371.689.901,00	371.689.901,00	100	343.425.649,00
9	Sindangmulya	363.648.901,00	363.648.901,00	100	335.996.649,00
10	Cilangkap	352.340.901,00	352.340.901,00	100	325.548.649,00
11	Pasirkembang	359.540.901,00	359.540.901,00	100	332.200.649,00
12	Pasirkecapi	344.222.901,00	344.222.901,00	100	318.047.649,00
13	Buyut Mekar	345.514.901,00	345.514.901,00	100	319.241.649,00
14	Maja Baru	357.642.901,00	357.642.901,00	100	330.447.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**4.284.366.911,00**	**4.284.366.911,00**	**100**	**3.958.576.139,00**
1	Pasirtanjung	387.878.901,00	387.878.901,00	100	358.384.649,00
2	Citeras	422.138.901,00	422.138.901,00	100	390.038.649,00
3	Nameng	402.829.901,00	402.829.901,00	100	372.197.649,00
4	Kolelet Wetan	358.443.901,00	358.443.901,00	100	331.187.649,00
5	Jatimulya	390.125.901,00	390.125.901,00	100	360.460.649,00
6	Mekarsari	374.566.901,00	374.566.901,00	100	346.083.649,00
7	Pabuaran	358.380.901,00	358.380.901,00	100	331.128.649,00
8	Rangkasbitung Timur	453.788.901,00	453.788.901,00	100	419.281.649,00
9	Sukamanah	364.883.901,00	364.883.901,00	100	337.137.649,00
10	Cimangeunteung	373.578.901,00	373.578.901,00	100	345.171.649,00
11	Narimbang Mulia	397.749.901,00	397.749.901,00	100	367.503.649,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**4.436.021.812,00**	**4.436.021.812,00**	**100**	**4.098.699.788,00**
1	Sukarendah	388.119.901,00	388.119.901,00	100	358.606.649,00
2	Warunggunung	364.880.901,00	364.880.901,00	100	337.134.649,00
3	Cibuah	382.878.901,00	382.878.901,00	100	353.764.649,00
4	Pasir Tangkil	368.716.901,00	368.716.901,00	100	340.679.649,00
5	Baros	341.852.901,00	341.852.901,00	100	315.857.649,00
6	Banjarsari	389.981.901,00	389.981.901,00	100	360.326.649,00
7	Padasuka	391.933.901,00	391.933.901,00	100	362.130.649,00
8	Sukaraja	391.279.901,00	391.279.901,00	100	361.525.649,00
9	Jagabaya	371.033.901,00	371.033.901,00	100	342.819.649,00
10	Selaraja	360.800.901,00	360.800.901,00	100	333.364.649,00
11	Cempaka	346.769.901,00	346.769.901,00	100	320.401.649,00
12	Sindangsari	337.771.901,00	337.771.901,00	100	312.087.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**3.510.686.010,00**	**3.510.686.010,00**	**100**	**3.243.728.490,00**
1	Mekarjaya	343.940.901,00	343.940.901,00	100	317.786.649,00
2	Cipalabuh	366.201.901,00	366.201.901,00	100	338.354.649,00
3	Cijaku	343.626.901,00	343.626.901,00	100	317.496.649,00
4	Cibeureum	342.565.901,00	342.565.901,00	100	316.516.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
5	Ciapus	360.270.901,00	360.270.901,00	100	332.875.649,00
6	Kandangsapi	374.983.901,00	374.983.901,00	100	346.469.649,00
7	Cihujan	342.944.901,00	342.944.901,00	100	316.867.649,00
8	Cimenga	344.461.901,00	344.461.901,00	100	318.268.649,00
9	Kapunduhan	341.274.901,00	341.274.901,00	100	315.323.649,00
10	Sukasenang	350.413.901,00	350.413.901,00	100	323.768.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**4.622.914.713,00**	**4.623.476.313,00**	**100,01**	**4.271.380.437,00**
1	Anggalan	353.905.901,00	354.467.501,00	100,16	326.993.649,00
2	Muncangkopong	354.980.901,00	354.980.901,00	100	327.987.649,00
3	Sukaharja	334.406.901,00	334.406.901,00	100	308.977.649,00
4	Tamanjaya	344.606.901,00	344.606.901,00	100	318.401.649,00
5	Cigoong Utara	353.379.901,00	353.379.901,00	100	326.508.649,00
6	Muaradua	375.365.901,00	375.365.901,00	100	346.822.649,00
7	Cikulur	352.153.901,00	352.153.901,00	100	325.375.649,00
8	Curugpanjang	369.797.901,00	369.797.901,00	100	341.677.649,00
9	Cigoong Selatan	347.440.901,00	347.440.901,00	100	321.021.649,00
10	Sumurbandung	394.572.901,00	394.572.901,00	100	364.568.649,00
11	Parage	338.383.901,00	338.383.901,00	100	312.652.649,00
12	Sukadaya	363.528.901,00	363.528.901,00	100	335.885.649,00
13	Pasirgintung	340.389.901,00	340.389.901,00	100	314.506.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**5.431.836.515,00**	**5.431.836.515,00**	**100**	**5.018.790.735,00**
1	Tambakbaya	382.947.901,00	382.947.901,00	100	353.828.649,00
2	Kaduagung Timur	381.449.901,00	381.449.901,00	100	352.443.649,00
3	Panancangan	341.999.901,00	341.999.901,00	100	315.993.649,00
4	Cibadak	363.020.901,00	363.020.901,00	100	335.416.649,00
5	Asem	344.186.901,00	344.186.901,00	100	318.014.649,00
6	Cisangu	351.539.901,00	351.539.901,00	100	324.807.649,00
7	Kaduagung Barat	366.509.901,00	366.509.901,00	100	338.639.649,00
8	Bojongcae	345.597.901,00	345.597.901,00	100	319.317.649,00
9	Malabar	350.618.901,00	350.618.901,00	100	323.957.649,00
10	Pasar Keong	363.144.901,00	363.144.901,00	100	335.530.649,00
11	Bojong Leles	410.753.901,00	410.753.901,00	100	379.519.649,00
12	Cimenteng Jaya	326.666.901,00	326.666.901,00	100	301.826.649,00
13	Mekar Agung	378.434.901,00	378.434.901,00	100	349.657.649,00
14	Asem Margaluyu	355.149.901,00	355.149.901,00	100	328.143.649,00
15	Kaduagung Tengah	369.813.901,00	369.813.901,00	100	341.692.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**7.957.231.822,00**	**7.957.793.422,00**	**100,01**	**7.352.151.278,00**
1	Cibeber	386.952.901,00	386.952.901,00	100	357.528.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
2	Citorek Tengah	402.594.901,00	402.594.901,00	100	371.980.649,00
3	Cisungsang	338.636.901,00	338.636.901,00	100	312.885.649,00
4	Kujangjaya	351.926.901,00	351.926.901,00	100	325.165.649,00
5	Kujangsari	347.122.901,00	347.122.901,00	100	320.727.649,00
6	Neglasari	385.923.901,00	385.923.901,00	100	356.577.649,00
7	Mekarsari	370.172.901,00	370.172.901,00	100	342.023.649,00
8	Cikotok	355.081.901,00	355.081.901,00	100	328.080.649,00
9	Sukamulya	357.175.901,00	357.175.901,00	100	330.015.649,00
10	Citorek Timur	361.125.901,00	361.125.901,00	100	333.665.649,00
11	Warungbanten	363.446.901,00	363.446.901,00	100	335.809.649,00
12	Hegarmanah	356.984.901,00	356.984.901,00	100	329.839.649,00
13	Situmulya	355.601.901,00	355.601.901,00	100	328.561.649,00
14	Citorek Kidul	375.156.901,00	375.156.901,00	100	346.629.649,00
15	Cikadu	366.473.901,00	366.473.901,00	100	338.606.649,00
16	Sirnagalih	363.882.901,00	363.882.901,00	100	336.212.649,00
17	Cihambali	348.693.901,00	349.255.501,00	100,16	322.178.649,00
18	Citorek Barat	358.676.901,00	358.676.901,00	100	331.402.649,00
19	Gunungwangun	341.342.901,00	341.342.901,00	100	315.386.649,00
20	Wanasari	357.035.901,00	357.035.901,00	100	329.886.649,00
21	Citorek Sabrang	356.620.901,00	356.620.901,00	100	329.502.649,00
22	Ciherang	356.598.901,00	356.598.901,00	100	329.482.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**3.819.131.010,00**	**3.818.569.410,00**	**99,99**	**3.528.717.490,00**
1	Cilograng	383.240.901,00	380.387.361,00	99,26	354.098.649,00
2	Cibareno	352.795.901,00	352.795.901,00	100	325.968.649,00
3	Cikamunding	379.827.901,00	376.722.521,00	99,18	350.945.649,00
4	Cijengkol	412.093.901,00	397.302.651,00	96,41	380.757.649,00
5	Pasirbungur	432.617.901,00	432.617.901,00	100	399.720.649,00
6	Lebaktipar	372.965.901,00	382.931.251,00	102,67	344.604.649,00
7	Cikatomas	389.337.901,00	385.094.701,00	98,91	359.731.649,00
8	Girimukti	369.662.901,00	374.753.361,00	101,38	341.552.649,00
9	Cireundeu	358.532.901,00	364.711.781,00	101,72	331.269.649,00
10	Gunungbatu	368.054.901,00	371.251.981,00	100,87	340.067.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**4.680.949.713,00**	**4.680.949.713,00**	**100**	**4.325.004.437,00**
1	Wanasalam	383.031.901,00	383.031.901,00	100	353.905.649,00
2	Bejod	379.681.901,00	379.681.901,00	100	350.810.649,00
3	Cilangkap	334.354.901,00	334.354.901,00	100	308.929.649,00
4	Cipeucang	348.135.901,00	348.135.901,00	100	321.663.649,00
5	Muara	404.680.901,00	404.680.901,00	100	373.907.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
6	Parungpanjang	361.343.901,00	361.343.901,00	100	333.866.649,00
7	Cikeusik	347.872.901,00	347.872.901,00	100	321.420.649,00
8	Katapang	348.708.901,00	348.708.901,00	100	322.192.649,00
9	Cisarap	362.950.901,00	362.950.901,00	100	335.351.649,00
10	Sukatani	370.195.901,00	370.195.901,00	100	342.045.649,00
11	Cipedang	357.193.901,00	357.193.901,00	100	330.032.649,00
12	Parungsari	339.124.901,00	339.124.901,00	100	313.337.649,00
13	Karangpamindangan	343.672.901,00	343.672.901,00	100	317.539.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**3.737.955.010,00**	**3.737.955.010,00**	**100**	**3.453.714.490,00**
1	Ciparasi	370.670.901,00	370.670.901,00	100	342.484.649,00
2	Sobang	396.727.901,00	396.727.901,00	100	366.559.649,00
3	Sukajaya	358.719.901,00	358.719.901,00	100	331.441.649,00
4	Sindanglaya	377.323.901,00	377.323.901,00	100	348.631.649,00
5	Sukamaju	400.580.901,00	400.580.901,00	100	370.120.649,00
6	Hariang	393.701.901,00	393.701.901,00	100	363.763.649,00
7	Majasari	373.532.901,00	373.532.901,00	100	345.128.649,00
8	Sinar Jaya	355.556.901,00	355.556.901,00	100	328.519.649,00
9	Cirompang	353.541.901,00	353.541.901,00	100	326.658.649,00
10	Sukaresmi	357.597.901,00	357.597.901,00	100	330.405.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**3.508.035.010,00**	**3.508.035.010,00**	**100**	**3.241.279.490,00**
1	Guradog	354.431.901,00	354.431.901,00	100	327.480.649,00
2	Curugbitung	340.284.901,00	340.284.901,00	100	314.409.649,00
3	Candi	344.631.901,00	344.631.901,00	100	318.425.649,00
4	Mayak	338.747.901,00	338.747.901,00	100	312.988.649,00
5	Cipining	354.386.901,00	354.386.901,00	100	327.438.649,00
6	Cilayang	348.597.901,00	348.597.901,00	100	322.090.649,00
7	Ciburuy	376.348.901,00	376.348.901,00	100	347.730.649,00
8	Sekarwangi	354.772.901,00	354.772.901,00	100	327.795.649,00
9	Cidadap	354.922.901,00	354.922.901,00	100	327.933.649,00
10	Lebakasih	340.908.901,00	340.908.901,00	100	314.985.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**2.576.878.307,00**	**2.576.878.307,00**	**100**	**2.380.928.543,00**
1	Kalanganyar	362.032.901,00	362.032.901,00	100	334.503.649,00
2	Pasirkupa	379.630.901,00	379.630.901,00	100	350.763.649,00
3	Cilangkap	367.521.901,00	367.521.901,00	100	339.575.649,00
4	Aweh	365.494.901,00	365.494.901,00	100	337.701.649,00
5	Sangiangtanjung	373.531.901,00	373.531.901,00	100	345.127.649,00
6	Sukamekarsari	379.936.901,00	379.936.901,00	100	351.045.649,00
7	Cikatapis	348.728.901,00	348.728.901,00	100	322.210.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**2.116.710.406,00**	**2.116.710.406,00**	**100**	**1.955.752.894,00**
1	Banjaririgasi	349.023.901,00	349.023.901,00	100	322.483.649,00
2	Ciladaeun	357.150.901,00	357.150.901,00	100	329.992.649,00
3	Lebakgedong	361.507.901,00	361.507.901,00	100	334.018.649,00
4	Banjarsari	337.225.901,00	337.225.901,00	100	311.582.649,00
5	Lebaksitu	360.931.901,00	360.931.901,00	100	333.485.649,00
6	Lebaksangka	350.869.901,00	350.869.901,00	100	324.189.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**3.303.354.109,00**	**3.303.354.109,00**	**100**	**3.052.162.841,00**
1	Panyaungan	391.765.901,00	391.765.901,00	100	361.975.649,00
2	Cihara	347.202.901,00	347.202.901,00	100	320.800.649,00
3	Ciparahu	379.334.901,00	379.334.901,00	100	350.489.649,00
4	Pondokpanjang	382.794.901,00	382.794.901,00	100	353.686.649,00
5	Citeupuseun	346.785.901,00	346.785.901,00	100	320.415.649,00
6	Lebakpeundeuy	355.521.901,00	355.521.901,00	100	328.487.649,00
7	Mekarsari	386.465.901,00	386.465.901,00	100	357.078.649,00
8	Karangkamulyan	367.024.901,00	367.024.901,00	100	339.116.649,00
9	Barunai	346.456.901,00	346.456.901,00	100	320.111.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**3.712.053.010,00**	**3.712.053.010,00**	**100**	**3.429.782.490,00**
1	Datarcae	353.786.901,00	353.786.901,00	100	326.883.649,00
2	Cirinten	411.660.901,00	411.660.901,00	100	380.357.649,00
3	Karangnunggal	344.639.901,00	344.639.901,00	100	318.433.649,00
4	Kadudamas	388.688.901,00	388.688.901,00	100	359.131.649,00
5	Badur	365.764.901,00	365.764.901,00	100	337.951.649,00
6	Parakanlima	403.255.901,00	403.255.901,00	100	372.591.649,00
7	Nanggerang	378.633.901,00	378.633.901,00	100	349.842.649,00
8	Cempaka	353.034.901,00	353.034.901,00	100	326.189.649,00
9	Karoya	353.796.901,00	353.796.901,00	100	326.893.649,00
10	Cibarani	358.789.901,00	358.789.901,00	100	331.506.649,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**3.173.640.109,00**	**3.173.640.109,00**	**100**	**2.932.309.841,00**
1	Peucangpari	363.286.901,00	363.286.901,00	100	335.661.649,00
2	Cibungur	340.438.901,00	340.438.901,00	100	314.550.649,00
3	Mugijaya	341.468.901,00	341.468.901,00	100	315.502.649,00
4	Cikate	351.877.901,00	351.877.901,00	100	325.120.649,00
5	Cigemblong	357.167.901,00	357.167.901,00	100	330.008.649,00
6	Cikadongdong	353.020.901,00	353.020.901,00	100	326.176.649,00
7	Cikaret	354.961.901,00	354.961.901,00	100	327.969.649,00
8	Wangunjaya	353.592.901,00	353.592.901,00	100	326.704.649,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Rp
1	2	3	4	5	6
9	Cikaratuan	357.823.901,00	357.823.901,00	100	330.614.649,00
JUMLAH		**124.240.632.950,00**	**123.978.493.005,00**	**99,79**	**114.793.200.900,00**

5.1.2.5 Surplus/Defisit

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024, mengalami defisit anggaran sebesar Rp118.612.454.022,00 dan terealisasi sebesar Rp73.066.284.272,08 dengan rincian defisit dapat dilihat pada tabel 5.33 sebagai berikut:

Tabel 5.33
SURPLUS/DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN ALEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	2.977.907.290.281,00	2.924.700.667.833,92	98,21	2.682.005.744.337,00
2	Belanja Daerah dan Transfer	3.096.519.744.303,00	2.997.766.952.106,00	96.81	2.827.845.303.048,00
SURPLUS/DEFISIT		**(118.612.454.022,00)**	**(73.066.284.272,08)**	**(61,60)**	**(145.839.558.711,00)**

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lebak terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp121.322.091.364,00 yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) audited Tahun Anggaran 2023 dan terealisasi sebesar Rp74.322.091.364,00 dan Pencairan Dana Cadangan yang diperuntukan utuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp47.000.000.000,00. Realisasi melebihi yang ditargetkan dikarenakan ada koreksi penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dari sisa Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp6.800.000,00 hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Banten dan Sisa Kas Sekolah Swasta sebesar Rp14.337.342,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.688.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.688.500.000,00 atau 100%.

Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.688.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.688.500.000,00 atau 100%. Pengeluaran Pembiayaan penyertaan modal Tahun 2024 diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya Lebak Banten sebesar Rp1.893.500.000,00 dan PT. LKM Rangkasbitung Rp795.000.000,00.

5.1.3.3 SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Angaran 2024. SiLPA untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.567.307.091,92 apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.300.954.022,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.733.646.930,08 atau 38,67%. Rincian SiLPA untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.34 berikut:

Tabel 5.34
RINCIAN SILPA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
1	**Pelampauan Penerimaan PAD**	**(56.820.524.033,08)**	**(15.488.409.943,00)**
	Pelampauan Penerimaan PAD - Pendapatan Pajak Daerah	(50.755.507.005,00)	(12.765.046.718,00)
	Pelampauan Penerimaan PAD - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	(8.181.241.437,00)	(3.676.114.162,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(243.244.192,00)	222.541.091,00
	Lain-Lain Pad Yang Sah	2.359.468.600,92	730.209.846,00
2	**Pelampauan Penerimaan Transfer**	**2.393.560.731,00**	**(21.225.562.498,00)**
	Transfer Pemerintah Pusat	9.207.682,00	(6.712.379.466,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.384.353.049,00	(14.513.183.032,00)
3	**Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.220.340.855,00**	**(4.942.699.578,00)**
	Pendapatan Hibah	1.111.496.697,00	(4.953.717.578,00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.844.158,00	11.018.000,00
4	**Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya**	**98.451.902.607,00**	**115.964.914.829,00**
	Pegawai	37.739.229.957,00	46.117.898.066,00
	Belanja Barang Dan Jasa	43.875.177.410,00	22.080.460.274,00
	Belanja Hibah	5.892.530.968,00	7.831.290.291,00
	Belanja Bantuan Sosial	19.800.000,00	552.275.000,00
	Belanja Modal	9.511.428.784,00	38.712.965.869,00
	Belanja Tidak Terduga	1.413.735.488,00	670.025.329,00
5	**Sisa Penghematan Transfer**	**300.889.590,00**	**0,00**
	Belanja Bagi Hasil	38.749.645,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	262.139.945,00	0,00
6	**SisaPembiayaanNetto**	**(21.137.342,00)**	**(7.288.788,00)**
	JUMLAH	**45.567.307.091,92**	**74.300.954.022,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp45.567.307.091,92 sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

   Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp74.300.954.022,00;

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

   Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan SiLPA Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 yang telah digunakan dan dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran dan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp74.322.091.364,00;

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp 45.567.307.091,92 dapat diuraikan sebagai berikut:

Defisit	Rp	73.066.284.272,08;
Pembiayaan Netto	Rp	118.633.591.364,00;
SiLPATahun berjalan	Rp	45.567.307.091,92.

4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

   Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar SiLPA yaitu Rp45.567.307.091,92.

5.1.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan yang akan diterima dalam periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar sebesar Rp2.987.000.605.606,03 mengalami kenaikan sebesar Rp241.857.549.393,29 atau 8,81% jika dibandingkan dengan Pendapatan–LO pada Tahun 2023 sebesar Rp2.745.143.056.212,74. Rincian Pendapatan–LO dapat dilihat pada tabel 5.35 berikut:

Tabel 5.35
PENDAPATAN–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN–LO	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	425.359.537.646,37	422.299.074.386,40	3.060.463.259,97	0,72
2	Pendapatan Transfer	2.478.079.814.683,60	2.231.321.508.641,00	246.758.306.042,60	11,06
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	83.561.253.276,06	91.522.473.185,34	(7.961.219.909,28)	(8,70)
JUMLAH		**2.987.000.605.606,03**	**2.745.143.056.212,74**	**241.857.549.393,29**	**8,81**

5.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah–LO

Pendapatan Asli Daerah–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar sebesar Rp425.359.537.646,37, jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah–LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp422.299.074.386,40 mengalami kenaikan sebesar Rp3.060.463.259,97 atau 0,72%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.36 sebagai berikut:

Tabel 5.36
PENDAPATAN ASLI DAERAH–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	160.119.691.340,12	168.342.280.136,40	(8.222.588.796,28)	(4,88)
2	Retribusi Daerah	251.748.835.242,00	16.786.524.872,00	234.962.310.370,00	1399,71
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.012.475.617,00	6.383.013.937,00	(370.538.320,00)	(5,81)
4	Lain Lain PAD yang Sah	7.478.535.447,25	230.787.255.441,00	(223.308.719.993,75)	(96,76)
JUMLAH		**425.359.537.646,37**	**422.299.074.386,40**	**3.060.463.259,97**	**0,71**

5.1.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah–LO

Pendapatan Pajak Daerah–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SPPT PBB yang telah diterbitkan. Pendapatan Pajak Daerah–LO Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar sebesar Rp160.119.691.340,12 mengalami penurunan sebesar Rp8.222.588.796,28 atau 4,88%, jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp168.342.280.136,40. Rincian dari masing–masing obyek Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat di lihat pada table 5.37 berikut:

Tabel 5.37
PENDAPATAN PAJAK DAERAH–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**Pajak Hotel–LO**	**0,00**	**639.348.438,00**	**(639.348.438,00)**	**(100)**
	Hotel–LO	0,00	539.159.989,00	(539.159.989,00)	0,00
	Wisma Pariwisata–LO	0,00	3.166.184,00	(3.166.184,00)	0,00
	Rumah Penginapan dan sejenisnya–LO	0,00	56.928.265,00	(56.928.265,00)	0,00
	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)–LO	0,00	40.094.000,00	(40.094.000,00)	0,00
2	**Pajak Restoran–LO**	**0,00**	**8.080.984.011,00**	**(8.080.984.011,00)**	**(100)**
	Rumah Makan–LO	0,00	2.729.230.045,00	(2.729.230.045,00)	(100)
	Warung–LO	0,00	43.240.500,00	(43.240.500,00)	(100)
	Jasa Boga/Katering–LO	0,00	5.308.513.466,00	(5.308.513.466,00)	(100)
3	**Pajak Hiburan–LO**	**0,00**	**327.157.113,00**	**(327.157.113,00)**	**(100)**
	Tontonan Film/Bioskop-LO	0,00	38.549.000,00	(38.549.000,00)	(100)
	Diskotik. Karaoke. Klab Malam dan sejenisnya–LO	0,00	13.986.700,00	(13.986.700,00)	(100)
	Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor. Permainan Ketangkasan–LO	0,00	249.848.413,00	(249.848.413,00)	(100)
	Pertandingan Olahraga–LO	0,00	24.773.000,00	(24.773.000,00)	(100)
4	**Pajak Reklame–LO**	**1.246.187.508,00**	**1.172.412.127,40**	**73.775.380,60**	**6,29**
	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron–LO	1.246.187.508,00	1.172.412.127,40	73.775.380,60	6,29
5	**Pajak Penerangan Jalan-LO**	**0,00**	**31.952.168.837,00**	**(31.952.168.837,00)**	**(100)**
	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri–LO	0,00	31.952.168.837,00	(31.952.168.837,00)	(100)
6	**Pajak Parkir–LO**	**0,00**	**1.056.648.267,00**	**(1.056.648.267,00)**	**(100)**
	Pajak Parkir–LO	0,00	1.056.648.267,00	(1.056.648.267,00)	(100)
7	**Pajak Air Tanah–LO**	**755.449.499,00**	**827.549.510,00**	**(72.100.011,00)**	**(8,71)**
	Pajak Air Bawah Tanah–LO	755.449.499,00	827.549.510,00	(72.100.011,00)	(8,71)
8	**Pajak Sarang Burung Walet–LO**	**13.830.000,00**	**27.345.000,00**	**(13.515.000,00)**	**(49,42)**
	Pajak Sarang Burung Walet–LO	13.830.000,00	27.345.000,00	(13.515.000,00)	(49,42)
9	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LO**	**32.924.437.101,00**	**32.446.362.180,00**	**478.074.921,00**	**1,47**
	Batu Kapur–LO	0,00	24.477.926.760,00	(24.477.926.760,00)	(0,00)
	Bentonit–LO	0,00	680.099.120,00	(680.099.120,00)	(0,00)
	Granit/Andesit-LO	0,00	3.125.250,00	(3.125.250,00)	(0,00)
	Pasir Kuarsa–LO	0,00	2.084.710.596,00	(2.084.710.596,00)	(0,00)
	Tanah Liat–LO	0,00	3.771.749.377,00	(3.771.749.377,00)	(0,00)
	Zeolit–LO	0,00	2.593.500,00	(2.593.500,00)	(0,00)
	Tanah/Pasir Urug-LO	0,00	76.817.877,00	(76.817.877,00)	(0,00)
	Pasir Darat–LO	0,00	1.349.339.700,00	(1.349.339.700,00)	(0,00)

PENDAPATAN PAJAK DAERAH–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	32.924.437.101,00	0,00	32.924.437.101,00	0,00
10	**Pajak Bumi dan Bangunan PeDesa an dan Perkotaan (PBB P2)–LO**	**47.029.389.388,00**	**41.684.735.221,00**	**5.344.654.167,00**	**12,82**
	PBB P2–LO	47.029.389.388,00	41.684.735.221,00	5.344.654.167,00	12,82
11	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)–LO**	**31.492.119.253,00**	**50.127.569.432,00**	**(18.635.450.179,00)**	**(37,18)**
	BPHTB Pemindahan Hak–LO	31.492.119.253,00	50.127.569.432,00	(18.635.450.179,00)	(37,18)
12	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO**	**46.658.278.591,12**	**0,00**	**46.658.278.591,12**	**0,00**
	PBJT-Restoran-LO	8.529.098.482,21	0,00	8.529.098.482,21	0,00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO	36.822.065.298,00	0,00	36.822.065.298,00	0,00
	PBJT-Hotel-LO	563.739.005,00	0,00	563.739.005,00	0,00
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	525.676.374,91	0,00	525.676.374,91	0,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	217.699.431,00	0,00	217.699.431,00	0,00
	JUMLAH	**160.119.691.340,12**	**168.342.280.136,40**	**(8.222.588.796,28)**	**(4,88)**

5.1.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang dihitung berdasarkan retribusi atas jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebesar Rp251.748.835.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp234.962l310.370,00 atau 1.399,71%,, jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah–LO pada Tahun 2023 sebesar Rp16.786.524.872,00. Rincian dari masing–masing obyek retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5.38 berikut:

Tabel 5.38
PENDAPATAN RETRIBUSI–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
			(Rp)	(RP)	(Rp)	
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Jasa Umum–LO**		**241.621.027.313,00**	**7.000.948.577,00**	**234.620.078.736,00**	**3351,26**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO	233.276.197.569,00	465.309.500,00	232.810.888.069,00	50033,56
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan–LO	1.192.423.100,00	956.997.002,00	235.426.098,00	24,60
	c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO	956.932.644,00	394.019.000,00	562.913.644,00	142,86
	d	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.154.174.000,00	3.418.710.495,00	2.735.463.505,00	80,01
	e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor–LO	0,00	801.621.080,00	(801.621.080,00)	(100)
	f	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus–LO	41.300.000,00	21.900.000,00	19.400.000,00	88,58
	g	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang–LO	0,00	93.511.500,00	(93.511.500,00)	(100)
	h	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi–LO	0,00	848.880.000,00	(848.880.000,00)	(100)
2	**Retribusi Jasa Usaha-LO**		**6.236.251.785,00**	**5.260.835.049,00**	**975.416.736,00**	**18,54**
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.259.716.502,00	3.227.571.776,00	(967.855.274,00)	(29,99)
	b	Retribusi Tempat Pelelangan–LO	1.704.766.283,00	1.196.641.270,00	508.125.013,00	42,46
	c	Retribusi Terminal–LO	0,00	315.811.003,00	(315.811.003,00)	(100)
	d	Retribusi Rumah Potong Hewan–LO	11.510.000,00	10.100.000,00	1.410.000,00	13,96
	e	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga–LO	698.415.500,00	345.266.000,00	353.149.500,00	102,28
	f	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah–LO	545.440.000,00	165.445.000,00	379.995.000,00	229,68
	g	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.016.403.500,00	0,00	1.016.403.500,00	0,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu–LO**		**3.891.556.144,00**	**4.524.741.246,00**	**(633.185.102,00)**	**(13,99)**
	a	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum–LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	565.081.000,00	(565.081.000,00)	(100,00)
	c	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.983.013.344,00	3.959.660.246,00	(976.646.902,00)	(24,66)
	d	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	908.542.800,00	0,00	908.542.800,00	0,00
	JUMLAH		**251.748.835.242,00**	**16.786.524.872,00**	**234.962.310.370,00**	**1399,71**

5.1.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.012.475.617,00 mengalami penurunan sebesar Rp370.538.320,00 atau 5,81%, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp6.383.013.937,00. Rincian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO dapat dilihat pada Tabel 5.39 sebagai berikut:

Tabel 5.39
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN–LO TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Bank Jabar Banten	3.820.430.005,00	4.202.272.036,00	(381.842.031,00)	(9,09)
2	PT.BPR Lebak Sejahtera	1.568.278.125,00	1.661.571.338,00	(93.293.213,00)	(5,61)
3	PT. LKM Rangkasbitung	623.767.487,00	519.170.563,00	104.596.924,00	20,15
JUMLAH		**6.012.475.617,00**	**6.383.013.937,00**	**(370.538.320,00)**	**(5,81)**

5.1.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah–LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan Lain–Lain PAD Yang Sah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp7.478.535.447,25 mengalami penurunan sebesar Rp223.308.719.993,75 atau 96,76% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp230.787.255.441,00. Rincian dari masing–masing obyek Pendapatan Lain–Lain FPAD Yang Sah dapat di lihat pada Tabel 5.40 berikut:

Tabel 5.40
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH–LO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(RP)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**243.682.600,00**	**330.903.532,00**	**(87.220.932,00)**	**(26,36)**
	a Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.159.600,00	5.527.532,00	(3.367.932,00)	(60,93)
	b Hasil Penjualan Bangunan Gedung	241.523.000,00	325.376.000,00	(83.853.000,00)	(25,77)
	c Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO**	**281.926.058,33**	**109.812.500,00**	**172.113.558,33**	**156,73**
	a. Hasil Sewa BMD- LO	281.926.058,33	109.812.500,00	172.113.558,33	156,73
	b Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	**Jasa Giro**	**1.845.668.848,95**	**1.481.355.058,00**	**364.313.790,95**	**24,59**
	a Jasa Giro pada Kas Daerah	1.707.451.540,95	1.377.151.328,00	330.300.212,95	23,98
	b Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	28.820.492,00	42.839.701,00	(14.019.209,00)	(32,72)
	c Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	42.029.049,00	0,00	42.029.049,00	0,00
	d Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	67.367.767,00	61.364.029,00	6.003.738,00	9,78
4	**Pendapatan Bunga**	**994.882.233,47**	**3.793.321.116,00**	**(2.798.438.882,53)**	**(73,77)**
	a Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	973.704.098,23	3.793.321.116,00	(2.819.617.017,77)	(74,33)
5	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**145.895.006,00**	**1.748.448,00**	**144.146.558,00**	**8244,26**
	a Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	72.314.034,00	1.748.448,00	70.565.586,00	4035,90
6	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**80.279.776,00**	**103.833.680,00**	**(23.553.904,00)**	**(22,68)**
	a Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.448.347,00	18.280.063,00	(13.831.716,00)	(75,67)
	b Pendapatan Denda Pajak Restoran	36.989.020,00	37.029.860,00	(40.840,00)	(0,11)
	c Pendapatan Denda Pajak Hiburan	951.875,00	905.778,00	46.097,00	5,09
	d Pendapatan Denda Pajak Parkir	59.306,00	2.139.598,00	(2.080.292,00)	(97,23)
	e Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.115.105,00	587.206,00	4.527.899,00	771,09
	f Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.135.813,00	1.474.067,00	(338.254,00)	(22,95)
	g Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	417.000,00	(417.000,00)	(100)
	h Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.744.077,00	43.000.108,00	(12.256.031,00)	(28,50)
	i Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	836.233,00	0,00	836.233,00	0,00
7	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**12.668.641,00**	**3.235.561,00**	**9.433.080,00**	**291,54**
	a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	45.850,00	70.120,00	(24.270,00)	(34,61)
	b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.084.003,00	1.953.619,00	(869.616,00)	(44,51)
	c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	11.538.788,00	1.211.822,00	10.326.966,00	852,19

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH–LO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (RP)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6
8	**Pendapatan dari Pengembalian**		**3.873.532.283,50**	**777.235.902,00**	**3.096.296.381,50**	**398,17**
	a.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	363.552.905,00	441.394.444,00	(77.841.539,00)	(17,64)
	b.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.257.258.020,00	172.456.800,00	1.084.801.220,00	629,03
	c.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN	0,00	48.699,00	(48.699,00)	(100)
	d.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja PNS	24.349.120,00	0,00	24.349.120,00	0,00
	e.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.183.353.153,50	7.930.000,00	1.175.423.153,50	14822,49
	f.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	15.249.000,00	30.462.246,00	(15.213.246,00)	(49,94)
	g.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	305.071.330,00	57.191.592,00	247.879.738,00	433,42
	h.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	83.908.984,00	14.452.362,00	69.456.622,00	480,59
	i.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	67.850.000,00	2.000.000,00	65.850.000,00	3292,50
	m.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	2.721.375,00	0,00	2.721.375,00	0,00
	k.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.901.000,00	3.500.000,00	3.401.000,00	97,17
	l.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.865.000,00	1.000.000,00	2.865.000,00	286,50
	m.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	n.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	348.003.796,00	26.360.225,00	321.643.571,00	1220,19

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH–LO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(RP)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	38.516.200,00	15.235.534,00	23.280.666,00	(100)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO	160.833.000,00	0,00	160.833.000,00	0,00
o.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	5.204.000,00	(5.204.000,00)	(100)
10	**Pendapatan BLUD**	**0,00**	**223.841.362.938,00**	**(223.841.362.938,00)**	**(100,00)**
a.	Pendapatan BLUD	0,00	223.841.362.938,00	(223.841.362.938,00)	(100,00)
11	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**0,00**	**344.446.706,00**	**(344.446.706,00)**	**(100,00)**
a.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	344.446.706,00	(344.446.706,00)	(100,00)
	JUMLAH	**7.478.535.447,25**	**230.787.255.441,00**	**(223.308.719.993,75)**	**(96,76)**

5.1.4.2 Pendapatan Transfer–LO

Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat

diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi dalam hal kaitannya dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp2.478.079.814.683,60 mengalami kenaikan sebesar Rp246.758.306.042,60 atau 11,06% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp2.231.321.508.641,00. Rincian masing–masing obyek dari Pendapatan Transfer–LO dapat dilihat pada Tabel 5.41 sebagai berikut:

Tabel 5.41
PENDAPATAN TRANSFER–LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.273.263.168.176,00	2.036.783.809.526,00	236.479.358.650,00	11,61
2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	204.816.646.507,60	194.537.699.115,00	10.278.947.392,60	5,28
JUMLAH		**2.478.079.814.683,60**	**2.231.321.508.641,00**	**246.758.306.042,60**	**11,06**

5.1.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.273.263.168.176,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2023 sebesar Rp2.036.783.809.526,00 mengalami kenaikan sebesar atau 1,61%. Rincian masing-masing obyek Transfer Dana Perimbangan-LO dapat dilihat pada Tabel 5.42 sebagai berikut:

Tabel 5.42
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT–LO
PEMERINTAH LABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (RP)	KENAIAKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6
1	**Dana Perimbangan–LO**		**1.897.628.747.176,00**	**1.682.143.775.526,00**	**215.484.971.650,00**	**12,80**
	a	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) -LO**	**94.132.343.000,00**	**95.005.653.000,00**	**(873.310.000,00)**	**(0,92)**
		DBH Pajak Bumi dan Bangunan–LO	6.103.892.000,00	17.722.840.000,00	(11.618.948.000,00)	(65,56)
		DBH PPh Pasal 21–LO	65.213.834.000,00	62.551.421.000,00	2.662.413.000,00	4,26
		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN–LO	1.630.179.000,00	2.904.837.000,00	(1.274.658.000,00)	(43,88)
		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00	0,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) –Pengusahaan Panas Bumi–LO	14.605.293.000,00	7.572.748.000,00	7.032.545.000,00	92,87
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara-Landrent–LO	59.640.000,00	283.074.800,00	(223.434.800,00)	(78,93)
		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara-Royalty–LO	1.205.112.000,00	1.846.967.200,00	(641.855.200,00)	(34,75)
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)–LO	261.759.000,00	417.198.000,00	(155.439.000,00)	(37,26)
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan–LO	1.484.554.000,00	1.706.567.000,00	(222.013.000,00)	(13,01)
		DBH Sawit-LO	3.565.684.000,00	0,00	3.565.684.000,00	0,00
	b	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)–LO**	**1.158.314.470.908,00**	**1.068.836.537.620,00**	**89.477.933.288,00**	**8,37**
		Dana Alokasi Umum -LO	848.101.867.000,00	1.068.836.537.620,00	(220.734.670.620,00)	(20,65)
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	21.860.158.908,00	0,00	21.860.158.908,00	0,00
		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.239.008.000,00	0,00	32.239.008.000,00	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	172.170.323.000,00	0,00	172.170.323.000,00	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	92.534.173.000,00	0,00	92.534.173.000,00	0,00
		DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	22.647.949.000,00	0,00	22.647.949.000,00	0,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT–LO
PEMERINTAH LABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIAKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(RP)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	c Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik–LO	**147.338.695.149,00**	**50.208.365.734,00**	**97.130.329.415,00**	**193,45**
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD–LO	389.918.000,00	1.208.438.575,00	(818.520.575,00)	(67,73)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	59.265.595.565,00	15.571.999.720,00	43.693.595.845,00	280,59
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP–LO	16.543.237.700,00	5.932.757.650,00	10.610.480.050,00	178,85
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM–LO	0,00	450.150.000,00	(450.150.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	2.973.401.141,00	1.330.318.080,00	1.643.083.061,00	123,51
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB–LO	0,00	1.854.387.444,00	(1.854.387.444,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian–LO	8.191.891.250,00	0,00	8.191.891.250,00	100
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan–LO	1.094.638.228,00	2.604.282.000,00	(1.509.643.772,00)	(57,97)
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.360.245.399,00	0,00	3.360.245.399,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan–LO	14.696.725.000,00	0,00	14.696.725.000,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	12.738.260.000,00	0,00	12.738.260.000,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan–LO	0,00	12.855.304.000,00	(12.855.304.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan–LO	0,00	6.653.151.000,00	(6.653.151.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.520.842.000,00	0,00	8.520.842.000,00	0,00
	DAK Fisik – Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan – Lingkungan Hidup-LO	1.675.410.900,00	1.388.000.000,00	287.410.900,00	20,71
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	2.230.568.002,00	0,00	2.230.568.002,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	359.577.265,00	(359.577.265,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.657.961.964,00	0,00	15.657.961.964,00	0,00

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT–LO
PEMERINTAH LABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (RP)	KENAIAKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	d Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik–LO	**497.843.238.119,00**	**468.093.219.172,00**	**29.750.018.947,00**	**6,36**
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	206.802.453.000,00	193.941.183.500,00	12.861.269.500,00	6,63
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	8.833.350.000,00	0,00	8.833.350.000,00	0,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.564.900.000,00	9.863.757.000,00	701.143.000,00	7,11
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	685.140.640,00	687.478.000,00	(2.337.360,00)	(0,34)
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan–LO	1.511.163.472,00	1.502.785.000,00	8.378.472,00	0,56
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal–LO	750.042.660,00	390.023.900,00	360.018.760,00	92,31
	DAK Non Fisik - BOKB –KB-LO	14.843.250.914,00	33.371.880.377,00	(18.528.629.463,00)	(55,52)
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	374.980.304,00	413.312.538,00	(38.332.234,00)	(9,27)
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	676.442.840,00	718.999.500,00	(42.556.660,00)	(5,92)
	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	415.332.000,00	1.918.156.603,00	(1.502.824.603,00)	(78,35)
	DAK Non Fisik - BOS Reguler-LO	175.157.014.898,00	173.874.645.104,00	1.282.369.794,00	0,74
	DAK Non Fisik - BOS Kinerja-LO	6.947.500.000,00	8.765.000.000,00	(1.817.500.000,00)	(20,74)
	DAK Non Fisik-BOP PAUD–LO	18.599.400.000,00	18.570.118.000,00	29.282.000,00	0,16
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	225.000.000,00	7.977.463.500,00	(7.752.463.500,00)	(97,18)
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK–LO	13.242.319.891,00	16.098.416.150,00	(2.856.096.259,00)	(17,74)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	8.382.300.000,00	0,00	8.382.300.000,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	29.547.647.500,00	0,00	29.547.647.500,00	0,00
2	**Dana Desa – LO**	**356.799.183.000,00**	**354.640.034.000,00**	**2.159.149.000,00**	**0,61**
	a Dana Desa-LO	356.799.183.000,00	354.640.034.000,00	2.159.149.000,00	0,61
3	**Insentif Fiskal–LO**	**18.835.238.000,00**	**0,00**	**18.835.238.000,00**	**0,00**
	a Insentif–LO	18.835.238.000,00	0,00	18.835.238.000,00	0,00
	JUMLAH	**2.273.263.168.176,00**	**2.036.783.809.526,00**	**236.479.358.650,00**	**11,61**

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lebak menerima Transfer Bagi Hasil sebesar Rp94.132.343.000,00. Dari realisasi Tahun Anggaran 2024 terdapat

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 yang diakui sebagai *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp27.028.040.000,00 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 dan tidak diakui sebagai Pendapatan Transfer Bagi Hasil-LO pada Tahun 2024 karena sudah dicatat sebagai Pendapatan Trasfer Bagi Hasil-LO Tahun 2023, Rincian *Treasury Deposit Facility* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp17.101.685.000,00;
2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.062.132.000,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp6.187.728.000,00;
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp2.137.169.000,00;
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Landrent sebesar Rp83.342.000,00;
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Royalty sebesar Rp455.984.000,00;

Dan terdapat Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 Yang Diakui Sebagai *Treasury Deposit Facility* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil, dan pada Tahun 2024 diakui sebagai Pendapatan Transfer Bagi Hasil-LO sebesar Rp27.277.302.000,00. Rincian *Treasury Deposit Facility* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp17.940.590.000,00;
2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp924.311.000,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.661.861.000,00;
4. Dana Bagi Hasil Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp6.470.936.000,00;
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Landrent sebesar Rp46.021.000,00;
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Royalty sebesar Rp233.583.000,00.

5.1.4.2.2 Pendapatan Transfer antar Daerah–LO

Pendapataan Transfer antar Daerah–LO Merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kepada Kota/Kabupaten. Pendapatan Transfer antar Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp204.816.646.507,60 jika dibandingkan dengan pendapatan Transfer–LO Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp194.537.699.115,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.278.947.392,60 atau 5,28%, kenaikan tersebut dikarenakan adanya hak pendapatan transfer daerah pemerintah kabupaten lebak yang lebih besar dari Tahun sebelumnya pada Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.43 sebagai berikut:

Tabel 5.43
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
			Rp	Rp	Rp	%
1	2		3	4	5	6
1		**Pendapatan Bagi Hasil**	**186.506.469.135,60**	**164.537.699.115,00**	**21.968.770.020,60**	**13,35**
	a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	186.506.469.135,60	164.537.699.115,00	21.968.770.020,60	13,35
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	30.582.570.930,00	28.074.468.090,00	2.508.102.840,00	8,93
		Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.259.521.600,00	27.264.395.400,00	(4.873.800,00)	(0,02)
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.194.761.552,60	43.108.847.273,00	3.085.914.279,60	7,16
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	754.158.800,00	619.689.300,00	134.469.500,00	21,70
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	81.715.456.253,00	65.470.299.052,00	16.245.157.201,00	24,81
2		**Bantuan Keuangan**	**18.310.177.372,00**	**30.000.000.000,00**	**(11.689.822.628,00)**	**(38,97)**
	a	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	18.310.177.372,00	30.000.000.000,00	(11.689.822.628,00)	(38,97)
	JUMLAH		**204.816.646.507,60**	**194.537.699.115,00**	**10.278.947.392,60**	**5,28**

5.1.4.3 Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp83.561.253.276,06 mengalami penurunan sebesar Rp7.961.219.909,28 atau 8,70%, jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO Tahun 2023 sebesar Rp91.522.473.185,34. Rincian dapat dilihat pada Tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.44
LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK dar TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah	83.452.409.118,06	91.518.757.185,34	(8.066.348.067,28)	(8,81)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.844.158,00	3.716.000,00	105.128.158,00	2829,07
	JUMLAH	**83.561.253.276,06**	**91.522.473.185,34**	**(7.961.219.909,28)**	**(8,70)**

Secara terinci untuk masing–masing Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah-LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp83.452.409.118,06, terdiri dari:
   a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp Rp46.095.807.225,32 terdiri dari:
      1) Pendapatan Hibah Upland area dari Kementerian Pertanian sebesar Rp24.760.061.697,00;
      2) Pendapatan Hibah Barang Milik Negara Program Korean E Learning Inprovement Cooperation (KLIC) dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi sebesar Rp4.546.060.831,00, terdiri dari buku sebesar Rp4.344.244.281,00, Alat Kantor Lainnya (Papan Tuir Sebesar Rp16.081.000,00, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use/Televisi) sebesar Rp16.081.000,00, Peralatan Studio Audio (Celling Mount Bracket) sebesar Rp6.432.400,00, Personal Komputer (Laptop dan Tablet PC) sebesar Rp163.222.150,00;
      3) Hibah dari Kementrian Kesehatan sebesar Rp11.093.048.588,32,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.01.08/C.I/4861-764/2024 Tanggal 7 Juni 2024 dan Nomor KN.01.08/C.I/7293/2023 Tanggal 10 Juli 2023 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
         a) 1 (satu) buah Laptop sebesar Rp15.590.000,00 dan 1 (satu) buah BD Max System & Accessories Non UPT sebesar Rp1.826.500.000,00;
         b) 3 Unit Mesin Ganexpert IV Modul TCM sebesar Rp1.663.999.998,00;
         c) 55 Unit Alat Pemantau Suhu sebesar Rp77.473.660,00;

d) 17 Unit Alat Perekam dan Pemantau Suhu Elektronik (VAXTAG) sebesar Rp23.946.404,00;
e) 7 Unit Alat Perekam dan Pemantau Suhu Elektronik (Interface Cradle-USB) sebesar Rp16.202.904,00;
f) 11 Unit Lemari Es Tenaga Listrik A sebesar Rp1.084.510.603,00;
g) 3 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik TCW 3000AC sebesar Rp293.821.578,00;
h) 5 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik RCW 50AC sebesar Rp402.982.085,00;
i) 42 Unit Vaccine Carrier ke Dinas sebesar Rp76.884.417,00;
j) 45 Unit Alat Pemantau Suhu Vaksin Kontinyu sebesar Rp63.360.000,00;
k) 2 Unit Cold Box sebesar Rp21.224.716,00;
l) 3 Unit Kabinet Pendingin Vaksin Heir sebesar Rp70.785.000,00;
m) 1 Unit Vaccine Refrigerator Freezer sebesar Rp112.508.064,00;
n) 3 Unit TB: Mikroskop Binokuler sebesar Rp33.370.425,00;
o) 2 Unit Mesin TCM (Ganexpert) sebesar Rp1.148.521.212,00;
p) 2 Unit KRIOTERAPI sebesar Rp156.556.000,00;
q) 16 Unit IVA KIT sebesar Rp167.859.648,00;
r) 14 Unit Klinik Sanitasi Kit sebesar Rp1.372.246.078,00;
s) 1 Buag Alat Pembersih sebesar Rp15.925.360,00;
t) 1 Unit RTMS 1xWIC Beyondwireless BC141E006/036 sebesar Rp25.105.300,00;
u) 108 Unit Nilkamal Limited Vaccine Carrier (9000 Unit) Model BCV43A with 4 Ice Pack sebesar Rp15.029.928,00;
v) 109 Unit Nilkamal Limited Vaccine Carrier (6000 Unit) Model BCV43A with 4 Ice Pack sebesar Rp14.972.567,00;
w) 1 Unit Genset & ATS (Automatic Transfer Switch) Sebesar Rp171.275.677,00;
x) 1 Unit Voltage Stabilizer 15 KVAThree Phase sebesar Rp103.481.975,00;
y) 1 Unit Coldroom 30m Zhendre sebesar Rp395.759.313,00;

z) Obat-obatan sebesar Rp638.425.163,08;

aa) Obat-obatan lainnya sebesar Rp892.315.013,24;

bb) Bahan Cetak sebesar Rp192.415.500,00

4) Pendapatan Hibah Dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp5.696.636.109,00 kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berupa alat lainnya dengan rincian berikut:

a) Berita Acara Serah Terima No. 0566/SP.03.06/J.1/2024 tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp119.977.288,00;

b) Berita Acara Serah Terima No.1179/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 7 Maret 2024 sebesar Rp1.119.465.353,00;

c) Berita Acara Serah Terima No.1376/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 19 April 2024 sebesar Rp1.683.648.058,00;

d) Berita Acara Serah Terima No.2352/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp259.419.520,00;

e) Berita Acara Serah Terima No.2819/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp50.335.000,00;

f) Berita Acara Serah Terima No.3164/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 8 Juni 2024 sebesar Rp505.610.200,00;

g) Berita Acara Serah Terima No.3549/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 23 Juli 2024 sebesar Rp142.120.000,00;

h) Berita Acara Serah Terima No.3961/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp6.427.200,00;

i) Berita Acara Serah Terima No.4611/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 sebesar Rp477.116.240,00;

j) Berita Acara Serah Terima No.5121/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 17 September 2024 sebesar Rp126.246.400,00;

k) Berita Acara Serah Terima No.6035/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 sebesar Rp1.148.440.850,00;

l) Berita Acara Serah Terima No.7117/SP.03.06/J.1/2024 Tanggal 29 November 2024 sebesar Rp57.830.000,00;

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp26.759.894.265,31,00 terdiri dari:

1) Hibah dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten berupa obat-obatan sebesar Rp19.021.126.170,99 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp7.726.418.094,32 kepada Dinas Kesehatan;
2) Hibah dari Pemerintah Provinsi Banten berupa Motor sebanyak 1 (satu) merupakan hadiah pengelolaan keuangan dan aset tingkat Provinsi Banten dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/01.919.C/BAST/BPKAD/2024 Tanggal 21 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000,00 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp15.872.000,00 dari saudara Sarta berupa Tanah Bangunan Pendidikan Dan Pelatihan di Sekolah Dasar Negeri Kadujajar 3 Kecamatan Malingping;
d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp10.580.835.627,43, terdiri dari:
   1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp10.200.000,00 adalah Pendapatan Hibah dari Bank Banten sebagai apresiasi yang diberikan kepada pengeloaan keuagan daerah terbaik diserahkan kepada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.900.000,00 berupa Personal Komputer dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/25-BKAD/2024/24-01-2024/1160, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.3.300.000,00 Berita Acara Serah Terima Nomor 032/26-BKAD/2024/24-01-2024/ berupa Alat Pendingin;
   2) Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp10.570.635.627,43 dengan rincian berikut:
      a) Pendapatan Hibah dari Universitas Serang Raya sebesar Rp2.500.000,00 berupa Freezer (Alat Laboratorium Perikanan diberikan ke Dinas Perikanan;
      b) Pendapatan Hibah sebesar Rp10.568.135.627,43 diserahkan kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
         - PT. Faujan Putra Jaya sebesar Rp1.251.458.056,65 untuk Jalan Khusus Kompleks Perumahan Griya Barokah Persada, Berita Acara

Serah Terima Nomor 845/ /BASTP/DPRKPP/X/2024 Tanggal 26 Juni 2024 terdiri dari Tanah untuk Jalan sebesar Rp349.027.860,00, Jalan Khusus Rp585.428.384,65, Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp317.001.812,00;

- Perumahan Royal Green Land sebesar Rp5.205.797.852,63 Berita Acara Serah Terima Nomor 845/546/BAST/DPRKPP/VII/2024/08-07-2024/ terdiri dari Tanah untuk Jalan sebesar Rp1.472.205.265,00, Jalan Khusus sebesar Rp2.927.116.944,63, Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp806.475.643,00;
- Perumahan Mabu Park sebesar Rp3.037.854.027,44 terdiri dari Tanah untuk Jalan sebesar Rp167.894.500,00, Jalan Khusus sebesar Rp2.471.803.547,14, Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp398.155.980,30;
- Perumahan Griya Oteng Residence sebesar Rp617.726.710,89 terdiri dari Tanah untuk Jalan sebesar Rp 16.303.420,00, Jalan Khusus sebesar Rp532.567.292,27, Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp 68.855.998,62;
- Perumahan Riverra Village sebesar Rp 455.298.979,82 terdiri dari Tanah untuk Jalan sebesar Rp 41.029.200,00, Jalan Khusus sebesar Rp 335.458.950,80, Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp 78.810.829,02.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar Rp108.844.158,00 adalah rekening sub rincian objek Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat untuk menampung pendapatan yang belum dapat ditelusuri sampai dengan 31 Desember Tahun 2024

5.1.5 Beban

Beban merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Rp3.141.331.613.785,59 mengalami kenaikan sebesar Rp267.273.152.468,68 atau 9,30% jika dibandingkan dengan Beban pada Tahun

2023 sebesar Rp2.874.058.461.316,91 Rincian Beban Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.45 sebagai berikut:

Tabel 5.45
BEBAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**BEBAN OPERASI**	**2.297.759.595.338,05**	**2.022.435.360.144,50**	**275.324.235.193,55**	**13,61**
	Beban Pegawai	1.308.986.113.418,00	1.051.266.591.075,16	257.719.522.342,84	24,51
	Beban Barang dan Jasa	792.350.417.193,01	835.395.863.005,01	(43.045.445.812,00)	(5,15)
	Beban Hibah	181.846.480.646,26	118.200.298.602,00	63.646.182.044,26	53,85
	Beban Bantuan Sosial	8.067.000.000,00	7.878.985.000,00	188.015.000,00	2,39
	Beban Penyisihan Piutang	8.199.783.580,78	9.693.622.462,33	(1.493.838.881,55)	(15,41)
2	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**336.997.076.848**	**353.851.029.928**	**(16.853.953.080,77)**	**(4,76)**
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.210.579.758,65	71.107.373.270,69	(6.896.793.512,04)	(9,70)
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.783.402.293,24	45.196.592.891,09	6.586.809.402,15	14,57
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	220.557.972.698,94	236.987.196.912,06	(16.429.224.213,12)	(6,93)
	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	243.724.514,18	16.164.514,30	227.559.999,88	(1407,78)
	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	201.397.582,53	543.702.340,17	(342.304.757,64)	(62,96)
3	**BEBAN TRANSFER**	**502.712.411.185,00**	**489.720.302.784,10**	**12.992.108.400,90**	**2,65**
	Beban Bagi Hasil	21.919.382.330,00	20.287.067.884,10	1.632.314.445,90	8,05
	Beban Bantuan Keuangan	480.793.028.855,00	469.433.234.900,00	11.359.793.955,00	2,42
4	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**3.862.530.415,00**	**8.051.768.460,00**	**(4.189.238.045,00)**	**(52,03)**
	Beban Tidak terduga	3.862.530.415,00	8.051.768.460,00	(4.189.238.045,00)	(52,03)
JUMLAH		**3.141.331.613.785,59**	**2.874.058.461.316,91**	**267.273.152.468,68**	**9,30**

5.1.5.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp2.297.759.595.338,05 mengalami kenaikan sebesar Rp275.324.235.193,55 atau 13,61% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.022.435.360.144,50.

5.1.5.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp1.308.986.113.418,00 mengalami kenaikan sebesar Rp257.719.552.342,84 atau 24,52%, jika di bandingkan dengan Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar Rp1.051.266.591.075,16. Rincian dari masing–masing Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.46 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.46
BEBAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(RP)
1	2		3	4	5
1	**Beban Gaji dan Tunjangan ASN**		**849.277.058.333,00**	**685.734.641.406,00**	**163.542.416.927,00**
	a	Beban Gaji Pokok ASN	650.137.928.808,00	519.795.362.865,00	130.342.565.943,00
	b	Beban Tunjangan Keluarga ASN	59.168.782.546,00	50.243.489.830,00	8.925.292.716,00
	c	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.516.434.988,00	7.989.087.196,00	(472.652.208,00)
	d	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.548.332.000,00	31.343.833.000,00	1.204.499.000,00
	e	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.731.220.032,00	10.916.227.514,00	2.814.992.518,00
	f	Beban Tunjangan Beras ASN	35.212.849.126,00	31.785.642.230,00	3.427.206.896,00
	g	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	2.482.914.655,00	472.072.729,00	2.010.841.926,00
	h	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.480.428,00	7.820.252,00	1.660.176,00
	i	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.418.414.104,00	28.867.243.714,00	14.551.170.390,00
	j	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.265.113.758,00	1.078.225.391,00	186.888.367,00
	k	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.785.587.888,00	3.235.636.685,00	549.951.203,00
2	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**		**105.199.784.753,00**	**109.529.279.889,00**	**(4.329.495.136,00)**
	a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	98.722.878.128,00	103.656.154.889,00	(4.933.276.761,00)
	b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.476.906.625,00	5.873.125.000,00	603.781.625,00
3	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**		**261.377.168.365,00**	**223.227.313.170,16**	**38.149.855.194,84**
	a	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.334.698.977,00	7.005.112.250,00	(2.670.413.273,00)
	b	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	555.343.299,00	759.939.881,00	(204.596.582,00)
	c	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	223.464.302.800,00	193.693.452.940,00	29.770.849.860,00
	d	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.062.087.300,00	8.679.363.100,00	3.382.724.200,00

BEBAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(RP)
1	2		3	4	5
	e	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.844.000.000,00	5.273.000.000,00	3.571.000.000,00
	f	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.456.377.989,00	0,00	2.456.377.989,00
	g	Beban Honorarium	9.660.358.000,00	7.813.444.999,16	1.846.913.000,84
	h	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
4	**Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**		**32.607.478.497,00**	**28.180.666.550,00**	**4.426.811.947,00**
	a	Beban Uang Representasi DPRD	1.102.815.000,00	1.114.260.000,00	(11.445.000,00)
	b	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	149.847.600,00	154.085.400,00	(4.237.800,00)
	c	Beban Tunjangan Beras DPRD	164.683.080,00	170.331.840,00	(5.648.760,00)
	d	Beban Uang Paket DPRD	94.678.500,00	95.508.000,00	(829.500,00)
	e	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.599.081.750,00	1.615.677.000,00	(16.595.250,00)
	f	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.276.150,00	152.737.200,00	(26.461.050,00)
	g	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	9.616.110,00	(9.616.110,00)
	h	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.247.500.000,00	6.300.000.000,00	(52.500.000,00)
	i	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.050.000.000,00	1.575.000.000,00	(525.000.000,00)
	j	Beban PemBebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	91.642.281,00	165.322.232,00	(73.679.951,00)
	k	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.635.689.136,00	9.054.168.768,00	2.581.520.368,00
	L	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	9.873.500.000,00	7.773.960.000,00	2.099.540.000,00
	m	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	471.765.000,00	0,00	471.765.000,00
5	**Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**		**586.236.840,00**	**465.279.060,00**	**120.957.780,00**
	a	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	50.700.000,00	(50.700.000,00)
	b	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	6.552.000,00	(6.552.000,00)
	c	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	91.260.000,00	(91.260.000,00)
	d	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	6.590.220,00	(6.590.220,00)
	e	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	446.101,00	(446.101,00)
	f	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	340	(340,00)
	g	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	5.026.560,00	(5.026.560,00)
	h	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	102.960,00	(102.960,00)
	i	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	308.880,00	(308.880,00)

BEBAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(RP)
1	2		3	4	5
	j	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	581.427.150,00	304.291.999,00	277.135.151,00
	k	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.809.690,00	0,00	4.809.690,00
6	**Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**		**540.750.000,00**	**766.296.000,00**	**(225.546.000,00)**
	a	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	0,00	235.200.000,00
	b	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	305.550.000,00	0,00	305.550.000,00
7	**Beban Pegawai BLUD**		**59.397.636.630,00**	**3.363.115.000,00**	**56.034.521.730,00**
	a	Beban Pegawai BLUD	59.397.636.630,00	3.363.115.000,00	56.034.521.730,00
JUMLAH			**1.308.986.113.418,00**	**1.051.266.591.075,16**	**257.719.522.442,84**

Berdasarkan tabel di atas Beban Pegawai pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.849.277.058.333,00 mengalami kenaikan sebesar Rp163.542.416.927,00 atau 25,08%, jika dibandingkan dengan Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 sebesar Rp685.734.641,406,00. Beban Gaji dan Tunjangan tersebut terdiri dari:
   a. Beban Gaji Pokok ASN sebesar Rp.650.137.928.808,00 mengalami kenaikan sebesar Rp130.342.565.943,00 atau 25,08% jika dibandingkan dengan Beban Gaji Pokok ASN Tahun 2023 sebesar Rp519.795.362.865,00 dengan rincian sebagai berikut:
      1) Beban Gaji PNS sebesar Rp463.596.709.508,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.862.885.771,00 atau sebesar 11,51% Jika dibandingkan dengan Beban Gaji PNS Tahun 2023 sebesar Rp415.733.823.737,00, mengalami kenaikan dikaranekan banyaknya PNS yang memasuki masa purna bakti dan adanya PNS yang mutasi antar daerah;
      2) Beban Gaji PPPK sebesar Rp186.541.219.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp82.479.680.172,00 atau sebesar 79,26%, Jika dibandingkan dengan Beban Gaji PPPk Tahun 2023 sebesar Rp104.061.539.128,00, mengalami kenaikan dikarenakan pengangkatan PPPK Tahun 2024;

b. Beban Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp59.168.782.546,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.925.292.716,00 atau 17,76% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 sebesar Rp50.243.489.830,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Beban Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp41.350.957.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.377.573.884,00 atau 3,45% dari Beban Tunjangan Keluarga PNS Tahun 2023 sebesar Rp39.973.383.356,00;
   2) Beban Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp17.817.825.306,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.547.718.832,00 atau 73,49% dari Beban Tunjangan Keluarga PNS Tahun 2023 sebesar Rp10.270.106.474,00
c. Beban Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.516.434.988,00 mengalami penurunan sebesar Rp472.652.208,00 atau 5,92% dari Beban Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2023 sebesar Rp7.989.087.196,00;
d. Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp32.548.332.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.204.499.000,00 atau 3,84% dari Beban Tunjangan Fungsional PNS Tahun 2023 sebesar Rp31.343.833.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp32.543.787.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.199.954.000,00 atau 31,87% dari Beban Tunjangan Fungsional PNS Tahun 2023 sebesar Rp31.343.833.000,00;
   2) Beban Tunjangan Fungsional PPPK Tahun 2024 Rp10.761.095.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.545.000,00 atau 64.13% dari Beban Tunjangan Fungsional PPPK Tahun 2023.
e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp13.731.220.032,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.814.992.518,00 atau 31,87% dari Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2023 sebesar Rp10.916.227.514,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp2.970.125.032,00. Mengalami penurunan sebesar Rp1.389.657.488,00 atau 46,79% dari Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Tahun 2023 sebesar Rp4.359.782.520,00;

2) Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebesar Rp10.761.095.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.204.650.006,00 atau 64,13% dari Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS Tahun 2023 sebesar Rp6.556.444.994,00.

f. Beban Tunjangan Beras ASN sebesar Rp35.212.849.126,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.427.206.896,00 atau 10,78% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras ASN Tahun 2023 sebesar Rp31.785.642.230,00 terdiri dari:
   1) Beban Tunjangan Beras PNS Rp22.877.912.626,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.290.231.906,00 atau 5,34% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras PNS Tahun 2023 sebesar Rp24.168.144.532,00;
   2) Beban Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp12.334.936.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.717.438.802,00 atau 61,93% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras PNS Tahun 2023 sebesar Rp7.617.497.698,00.
g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp2.482.914.655,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.010.841.926,00 atau 425,96% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2023 sebesar Rp472.072.729,00;
h. Beban Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp9.480.266,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.660.014,00 atau 17,51% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji ASN Tahun 2023 sebesar Rp7.820.252,00 terdiri dari:
   1) Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp5.594.952,00 mengalami penurunan sebesar Rp316.226,00 atau 5,35% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji PNS Tahun 2023 sebesar Rp5.911.178,00;
   2) Beban Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp3.885.476,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.976.402,00 atau 103,53% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji PNS Tahun 2023 sebesar Rp1.909.074,00.
i. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp43.418.414.104,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.551.170.390,00 atau 50,41% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023

sebesar Rp28.867.243.714,00 terdiri dari:

1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp35.381.270.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.567.515.464,00 atau 48,57% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kesehatan PNS Tahun 2023 sebesar Rp23.813.754.613,00;
2) Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp8.037.144.027,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.983.654.926,00 atau 59,04% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2023 sebesar Rp5.053.489.101,00.

j. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.265.113.758,00 mengalami kenaikan sebesar Rp186.888.367,00 atau 17,33% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 sebesar Rp1.078.225.391,00 terdiri dari:
   1) Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp880.539.063,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.889.446,00 atau 3,27% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 sebesar Rp852.649.617,00;
   2) Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp384.574.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp158.998.921,00 atau 70,49% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 sebesar Rp225.575.774,00.

k. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2024 sebesar Rp3.785.587.888,00 mengalami kenaikan sebesar Rp549.951.203,00 atau 17% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 sebesar Rp3.235.636.685 terdiri dari:
   1) Beban Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp2.631.519.309,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.553.230,00 atau 2,84% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 sebesar Rp2.558.966.079,00;
   2) Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp1.154.068.579,00 mengalami kenaikan sebesar Rp477.397.973,00 atau 41,37% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023

sebesar Rp676.670.606,00;

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp105.199.784.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.329.495.136,00 atau 3,95% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 sebesar Rp109.529.279.889,00 terdiri dari:
   a. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp98.722.878.128,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.933.276.761,00 atau 4,76% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 sebesar Rp103.656.154.889,00;
   b. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp6.476.906.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp603.781.625,00 atau 10,28% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun 2023 sebesar Rp5.873.125.000,00.
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp261.377.168.365,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.153.275.194,84,00 atau 17,09% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya PNS Tahun 2023 sebesar Rp223.227.313.170,16 terdiri dari:
   a. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp4.334.698.977,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.670.413.273,00 atau 38,12% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.005.112.250,00 terdiri dari:
      1) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebesar Rp10.234.953,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.788.509,00 atau 64,74% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp29.023.462,00;
      2) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebesar Rp143.217.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp171.094.900,00 atau 54,43% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp314.312.500,00;

3) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebesar Rp6.283.190,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.396.810,00 atau 62,33% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2023 Rp16.680.000,00;
4) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebesar Rp49.636.610,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.785.360,00 atau 8,26% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp45.851.250,00;
5) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp951.739.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp246.422.750,00 atau 20,57% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp1.198.162.500,00;
6) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebesar Rp12.953.760,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.889.990,00 atau 74,01% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp50.734.375,00;
7) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebesar Rp28.251.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.187.375,00 atau 24,54% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp37.438.375,00;
8) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp197.757,00 mengalami penurunan sebesar Rp719.781,00 atau 78,45% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 sebesar Rp917.538,00;
9) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.194.298.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp797.430.094,00 atau 40,04% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp1.991.728.625,00;

10) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp628.507.704,00 mengalami penurunan sebesar Rp909.572.403,00 atau 59,14% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebesar Rp1.538.080.107,00;
11) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp856.294.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp926.779.193,00 atau 51,98% jika dibandingkan dengan Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp1.783.074.143,00;
12) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp453.083.172,00.

b. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp555.343.299,00 mengalami penurunan sebesar Rp204.596.582,00 atau 26,92% jika dibandingkan dengan Beban Daerah Tahun 2023 sebesar Rp759.939.881,00 terdiri dari:
1) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebesar Rp34.226.178,00 mengalami kenaikan Rp3.132.738,00 atau 10,08% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp31.093.440,00;
2) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp22.144.614,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.435.127,00 atau 44,05% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 sebesar Rp39.579.741,00;
3) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebesar Rp221.406.479,00 mengalami kenaikan sebesar Rp59.490.075,00 atau 36,74% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan

Pasar Tahun 2023 sebesar Rp161.916.604,00;

4) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp63.802.714,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.030.507,00 atau 48,48% jika di bandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp123.833.221,00;
5) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan sebesar Rp42.343.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.826.564,00 atau 32,97% jika di bandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Tempat Pelelangan Tahun 2023 sebesar Rp63.170.314,00;
6) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebesar Rp6.352.522,00;
7) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp33.042.242,00 mengalami kenaikan penurunan sebesar Rp20.581.242,00 atau 165,17% jika di bandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha–Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 sebesar Rp12.461.000,00;
8) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2024 sebesar Rp4.485.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.728.650,00 atau 60% jika di bandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha–Penjualan Produk Usaha Daerah Tahun 2023 sebesar Rp11.214.250,00;
9) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp100.000.000,00;
10) Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp27.539.000,00.

c. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp223.464.302.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.770.849.860,00 atau 15,37% jika di bandingkan dengan Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun 2023 sebesar Rp Rp193.693.452.940,00;

d. Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp12.062.087.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.382.724.200,00 atau 38,97% jika di bandingkan dengan Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Tahun 2023 sebesar Rp8.679.363.100,00;
e. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp8.844.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.571.000.000,00 atau 67,72% jika di bandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Tahun 2023 sebesar Rp5.273.000.000,00 dikarenakan Tahun 2024 adanya penambahan Guru dari pengangkatan PPPK;
f. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.456.377.989,00;
g. Beban Honorarium sebesar sebesar Rp9.660.358.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.846.913.000,84 atau 23,64% jika di bandingkan dengan Beban Honorarium Tahun 2023 sebesar Rp Rp7.813.444.999,16 terdiri dari:
    1) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp9.179.158.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.784.233.000,00 atau 24,13% jika di bandingkan dengan Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp7.394.925.000,00;
    2) Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp481.200.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.680.000,84,00 atau 14,98%, jika dibandingkan dengan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 sebesar Rp418.519.999,16;

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp32.607.478.497,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.426.811.947,00 atau 15,71% jika dibandingkan dengan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp28.180.666.550,,00 terdiri dari:
    a. Beban Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.102.815.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.445.000,00 atau 1,03% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.114.260.000,00;
    b. Beban Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp149.847.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.237.800,00 atau 2,75% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Keluarga DPRD Tahun 2023 sebesar Rp154.085.400,00;

c. Beban Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp164.683.080,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.648.760,00 atau 3,32% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras DPRD Tahun 2023 sebesar Rp170.331.840,00;
d. Beban Uang Paket DPRD sebesar Rp94.678.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp829.500,00 atau 0,87% jika dibandingkan dengan Beban Uang Paket DPRD Tahun 2023 sebesar Rp95.508.000,00;
e. Beban Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.599.081.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.595.250,00 atau 1,03% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Jabatan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp1.615.677.000,00;
f. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp126.276.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.461.050,00 atau 17,32% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp152.737.200,00;
g. Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.247.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.500.000,00 atau 0,83% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 sebesar Rp6.300.000.000,00;
h. Beban Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.050.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp525.000.000,00 atau 33,33% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Reses DPRD Tahun 2023 sebesar Rp1.575.000.000,00;
i. Beban PemBebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp91.642.281,00 mengalami penurunan sebesar Rp73.679.951,00 atau 44,57% jika dibandingkan dengan Beban PemBebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 sebesar Rp165.322.232,00;
j. Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp11.635.689.136,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.581.520.368,00 atau 28,51% jika dibandingkan dengan dengan Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2023 sebesar Rp9.054.168.768,00 dengan rincian:
    1) Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp285.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.400.000,00 atau 0,83% jika dibandingkan dengan Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Tahun

2023 sebesar Rp288.000.000,00;

2) Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp2.272.284,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.908,00 atau 0,87% jika dibandingkan dengan Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Tahun 2023 sebesar Rp2.292.192,00;

3) Beban Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp6.816.852,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.724,00 atau 0,87% jika dibandingkan dengan Beban Jaminan Kematian DPRD Tahun 2023 sebesar Rp6.876.576,00;

4) Beban Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp11.341.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.584.000.000,00 atau 29,51% jika dibandingkan Beban Tunjangan Perumahan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp8.757.000,000.00;

k. Beban Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp9.873.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.099.540.999,00 atau 27,01% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Transportasi DPRD Tahun 2023 sebesar Rp7.773.960.000,00;

l. Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp471.765.000,00.

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp586.236.840,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.957.780,00 atau 26% jika dibandingkan dengan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 sebesar Rp465.279.060,00. Terdiri dari:

a. Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp581.427.150,00 terdiri dari:

1) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebesar Rp2.536.875,00;

2) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebesar Rp45.320.000,00;

3) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebesar Rp771.250,00;

4) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebesar Rp6.772.500,00;

5) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp161.687.500,00;
6) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir sebesar Rp3.300.000,00;
7) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebesar Rp4.125.000,00;
8) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp28.875,00;
9) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp159.276.150,00;
10) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp97.284.000,00;
11) Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp100.325.000,00;

b. Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp4.809.690,00;

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp540.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp225.546.000,00 atau 29,43% jika dibandingkan dengan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2023 sebesar Rp766.296.000,00 terdiri dari:
   1) Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp235.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.800.000,00 atau 6,67% dengan Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp252.000.000,00;
   2) Beban Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp305.550.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp208.746.000,00 atau 40,59% jika dibandingkan dengan Beban Dana Operasional KDH/WKDH Tahun 2023 sebesar Rp514.296.000,00,
7. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp59.397.636.630,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.034.521.630,00 atau 1.666,15% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2023 sebesar Rp3.363.115.000,00.

5.1.5.1.2 Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp790.660.217.693,01 mengalami penurunan sebesar Rp44.735.645.312,00 atau 5,36% jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp835.395.863.005,01. Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

5.1.5.1.2.1 Barang

Beban Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp123.359.562.234,36 mengalami penurunan sebesar Rp25.025.459.990,33 atau 16,86% jika dibandingkan dengan Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp148.385.002.224,69. Beban Barang terdiri dari:

5.1.5.1.2.1.1 Beban Barang Pakai Habis

Beban Barang Pakai Habis Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp114.079.315.452,36 mengalami penurunan sebesar Rp11.141.926.455,48 atau 8,90%, jika dibandingkan dengan Beban Barang Pakai Habis Tahun 2023 sebesar Rp125.221.241.907,84, Rincian Beban Barang Pakai Habis dapat dilihat dari Tabel 5.47 berikut:

Tabel 5.47
BEBAN BARANG PAKAI HABIS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	247.668.715,00	48.442.965,00	199.225.750,00	411,26
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.377.748.181,64	1.503.614.428,00	6.874.133.753,64	457,17
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.339.428.920,00	4.508.287.147,00	831.141.773,00	18,44
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	2.117.000,00	(2.117.000,00)	(100)
5	Beban Bahan-Bahan/BibitTanaman	3.934.370.450,00	142.909.500,00	3.791.460.950,00	2653,05
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.199.000,00	800.000,00	10.399.000,00	1299,88
7	Beban Bahan - Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00

BEBAN BARANG PAKAI HABIS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
8	Beban Bahan - Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	120.622.000,00	120.822.400,00	(200.400,00)	(0,17)
9	Beban Bahan – Bahan Lainnya	834.764.360,00	626.164.224,71	208.600.135,29	33,31
10	Beban Suku Cadang– Suku Cadang Alat Angkutan	309.557.000,00	158.214.750,00	151.342.250,00	95,66
11	Beban Suku Cadang– Suku Cadang Alat Besar	227.712.940,00	427.400.260,00	(199.687.320,00)	(46,72)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	77.275.220,00	0,00	77.275.220,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	2.760.000,00	(2.760.000,00)	(100)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	8.147.600,00	69.564.000,00	(61.416.400,00)	(88,29)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.936.390.559,17	3.792.637.131,83	1.143.753.427,34	30,16
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.405.993.000,00	1.169.671.960,00	236.321.040,00	20,20
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	234.630.992,00	2.515.177.055,00	(2.280.546.063,00)	(90,67)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	132.131.600,00	96.532.500,00	35.599.100,00	36,88
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	236.260.000,00	278.640.000,00	(42.380.000,00)	(15,21)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.820.068.803,00	3.323.567.581,00	(503.498.778,00)	(15,15)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.081.391.563,00	998.437.670,00	82.953.893,00	8,31
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.297.407.925,00	1.515.723.071,00	(218.315.146,00)	(14,4)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan PendukungOlahraga	117.210.000,00	161.650.000,00	(44.440.000,00)	(27,49)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	312.752.500,00	516.316.000,00	(203.563.500,00)	(39,43)

BEBAN BARANG PAKAI HABIS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	526.008.885,00	994.208.875,00	(468.199.990,00)	(47,09)
26	Beban Obat-Obatan-Obat	2.074.441.923,49	23.786.762.342,00	(21.712.320.418,51)	(91,28)
27	Beban Obat-Obatan Obat Obatan Lainnya	4.397.842.958,06	32.309.195.313,30	(27.911.352.355,24)	(86,39)
28	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48.137.072.850,00	23.143.005.064,00	24.994.067.786,00	108,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	31.000.000,00	0,00	31.000.000,000	0,00
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	139.515.000,00	10.038.000,00	129.477.000,00	1289,87
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	256.092.000,00	306.161.240,00	(50.069.240,00)	(16,35)
32	Beban Natura dan Pakan - Pakan Lainnya	92.915.500,00	83.733.950,00	9.181.550,00	10,97
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	16.581.380.207,00	17.328.503.980,00	(747.123.773,00)	(4,31)
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.509.269.500,00	3.047.576.000,00	(538.306.500,00)	(17,66)
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.857.608.900,00	502.162.500,00	5.355.446.400,00	1066,48
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100)
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	80.850.000,00	0,00	80.850.000,00	0,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	11.000.000,00	188.300.000,00	(177.300.000,00)	(94,16)
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	175.000.000,00	26.500.000,00	(148.500.000,00)	560,38
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	149.400.000,00	231.997.000,00	(82.597.000,00)	(35,60)
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	75.830.400,00	338.283.500,00	(262.453.100,00)	(77,58)
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	112.500.000,00	(112.500.000,00)	(100)
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000,00	18.175.000,00	(13.175.000,00)	(72,49)
44	Beban Pakaian Batik Tradisional	19.500.000,00	52.300.000,00	(32.800.000,00)	(62,72)
45	Beban Pakaian Olahraga	518.446.000,00	459.807.500,00	58.638.500,00	12,75

BEBAN BARANG PAKAI HABIS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
46	Beban Pakaian Paskibraka	378.410.000,00	297.482.000,00	80.928.000,00	27,20
JUMLAH		**114.079.315.452,36**	**125.221.241.907,84**	**(11.141.926.455,48)**	**(8,90)**

5.1.5.1.2.1.2 Beban Barang Tak Habis Pakai

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 tidak terdapat Beban Barang Tak Habis Pakai.

5.1.5.1.2.1.3 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Taun 2024 adalah sebesar Rp 9.280.246.782,00 terdidir dari:

1. Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor Sebesar Rp9.262.560.782,00;
2. Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan sebesar Rp2.700.000,00;
3. Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi sebesar Rp14.986.000,00.

5.1.5.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yaitu sebesar Rp183.787.268.529,45 mengalami penurunan sebesar Rp9.565.660.714,73 atau 4,95% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Kantor pada Tahun 2023 sebesar Rp193.352.929.244,48. Rincian dari Beban jasa kantor sebagai berikut:

5.1.5.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yaitu sebesar Rp109.697.006.956,80 mengalami penurunan sebesar Rp14.103.174.116,20 atau 11,39% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Kantor pada Tahun 2023 sebesar Rp123.800.181.073,00. Rincian dari Beban jasa kantor dapat dilihat pada Tabel 5.48 sebagai berikut:

Tabel 5.48
BEBAN JASA KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	533.850.000,00	510.620.000,00	23.230.000,00	4,55
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.730.832.500,00	7.295.472.030,00	(3.564.639.530,00)	(48,86)
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.885.130.000,00	5.134.590.000,00	(249.460.000,00)	(4,86)
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100)
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.450.177.000,00	1.076.500.000,00	373.677.000,00	34,71
6	Honorarium Rohaniwan	108.500.000,00	131.100.000,00	(22.600.000,00)	(17,24)
7	Honorarium Tim PenyusunanJurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknolog iInformasi dan Pengelola Website	96.420.000,00	79.350.000,00	17.070.000,00	21,51
8	Honorarium Penyelenggara Ujian	67.650.000,00	9.550.000,00	58.100.000,00	608,38
9	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100)
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	46.900.000,00	63.600.000,00	(16.700.000,00)	(26,26)
11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	505.200.000,00	494.400.000,00	10.800.000,00	2,18
12	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.962.091.650,00	10.025.510.120,00	(5.063.418.470,00)	(50,51)
13	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	16.423.926.231,00	19.482.638.835,00	(3.058.712.604,00)	(15,70)
14	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	985.244.863,00	642.005.440,00	343.239.423,00	53,46
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.735.649.600,00	1.014.825.000,00	2.720.824.600,00	268,11
17	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	48.000.000,00	217.550.000,00	(169.550.000,00)	(77,94)
18	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0.00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(100)
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	534.440.000,00	268.519.200,00	265.920.800,00	99,03
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	18.000.000,00	55.000.000,00	(37.000.000,00)	(67,27)

BEBAN JASA KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	310.300.000,00	290.400.000,00	19.900.000,00	6,85
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	20.774.416.000,00	20.584.880.081,00	189.535.919,00	0,92
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.462.818.000,00	2.211.508.000,00	251.310.000,00	11,36
24	Beban Jasa Tenaga PelayananUmum	963.000.000,00	719.146.500,00	243.853.500,00	33,91
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.703.148.500,00	9.887.038.583,00	(5.183.890.083,00)	(52,43)
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.290.544.100,00	5.693.409.000,00	(402.864.900,00)	(7,08)
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.159.238.000,00	1.590.555.000,00	568.683.000,00	35,75
28	Beban Jasa Tenaga Supir	402.552.000,00	362.448.000,00	40.104.000,00	11,06
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	85.039.600,00	0,00	85.039.600,00	0,00
30	Beban Jasa Audit/ Surveillance ISO	76.937.959,00	154.810.000,00	(77.872.041,00)	(50,30)
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	302.550.000,00	57.000.000,00	245.550.000,00	430,79
32	Beban Jasa Tata Rias	20.690.000,00	15.240.000,00	5.450.000,00	35,76
33	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	38.400.000,00	(38.400.000,00)	(100)
34	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	1.272.701.340,00	0,00	1.272.701.340,00	0,00
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	252.695.100,00	(242.695.100,00)	(96,04)
36	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	406.837.233,00	0,00	406.837.233,00	0,00
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	290.287.414,00	442.828.562,00	(152.541.148,00)	(34,45)
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.938.821.950,00	4.799.806.889,00	(860.984.939,00)	(17,94)
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100)
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	47.438.000,00	106.015.000,00	(58.577.000,00)	(55,25)
41	Beban Jasa Kalibrasi	33.271.000,00	75.741.500,00	(42.470.500,00)	(56,07)
42	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	6.661.333,00	(5.461.333,00)	(81,99)
43	Beban Jasa Pengukuran Tanah	58.298.400,00	0,00	58.298.400,00	0,00
44	Beban Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan	1.555.130.900,00	1.929.202.400,00	(374.071.500,00)	(19,39)
45	Beban Tagihan Telepon	316.772.793,00	381.523.208,00	(64.750.415,00)	(16,97)
46	Beban Tagihan Air	39.501.331,00	43.810.175,00	(4.308.844,00)	(9,84)
47	Beban Tagihan Listrik	15.073.437.139,00	15.618.224.644,00	(544.397.427,00)	(3,49)
48	Beban Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	392.285.649,00	420.438.708,00	(28.153.059,00)	(6,70)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	6.419.678.122,80	5.943.765.862,00	475.522.182,80	8,00

BEBAN JASA KANTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
50	Beban Paket/Pengiriman	6.698.000,00	16.326.000,00	(9.628.000,00)	(58,97)
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	4.840.000,00	(4.840.000,00)	(100)
52	Beban PembayaranPajak, Bea, dan Perizinan	836.701.000,00	799.991.373,00	36.709.627,00	4,59
53	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Lembur	1.947.403.000,00	4.502.506.000,00	(2.555.103.000,00)	(56,75)
55	Beban Medical Check Up	1.761.000,00	5.000.000,00	(3.239.000,00)	(64,78)
56	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.365.536.682,00	298.938.530,00	1.066.598.152,00	356,80
JUMLAH		**109.697.006.956,80**	**123.800.181.073,00**	**(14.103.174.116,20)**	**(11,39)**

5.1.5.1.2.2.2 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp49.080.120.641,98 mengalami kenaikan sebesar Rp8.964.584.360,98 atau 22,35% jika dibandingkan dengan Beban Premi Asuransi pada Tahun 2023 sebesar Rp40.115.536.281,00. Rincian dari Beban Premi Asuransi dapat dilihat pada Tabel 5.49 dengan rincian berikut:

Tabel 5.49
BEBAN PREMI ASURANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	380.728.000,00	0,00	380.728.000,00	0,00
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	44.647.640.313,00	30.541.722.000,00	14.105.918.313,00	46,186
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	3.839.409.400,00	(3.839.409.400,00)	(100,00)
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.964.036.172,00	4.828.096.874,00	(1.864.060.702,00)	(38,61)
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	255.556.728,00	188.730.655,00	66.826.073,00	35,41
6	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	319.804.176,00	235.918.288,00	83.885.888,00	35,56
7	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	512.355.252,98	481.659.064,00	30.696.188,98	6,37
JUMLAH		**49.080.120.641,98**	**40.115.536.281,00**	**8.964.584.360,98**	**22,35**

5.1.5.1.2.2.3 Beban Sewa

Beban Sewa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp3.141.015.626,67 mengalami penurunan sebesar Rp624.131.973,34 atau 16,58% jika dibandingkan dengan Beban Sewa pada Tahun 2023 sebesar Rp3.765.147.600,00. Terdapat Beban sewa Tahun 2024 direklas menjadi Beban dibayar Dimuka yaitu Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp73.833.333,33 dan reklas dari Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp66.262.500,00. Rincian Beban Sewa dapat dilihat pada Tabel 5.50 sebagai berikut:

Tabel 5.50
BEBAN SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN SEWA		TAHUN 2024 (RP)	TAHUN 2023 (RP)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6
1	**Beban Sewa Tanah**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a	Beban Sewa Tanah untuk Latihan	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**		**1.236.961.460,00**	**1.118.810.100,00**	**118.151.360,00**	**10,56**
	a	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	120.976.500,00	157.463.000,00	(36.486.500,00)	(23,17)
	b	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	640.414.960,00	477.979.000,00	162.435.960,00	33,98
	c	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	60.250.000,00	56.300.000,00	3.950.000,00	7,02
	d	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	57.450.000,00	0,00	57.450.000,00	0,00
	e	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	f	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	143.686.000,00	322.649.100,00	(178.963.100,00)	(55,47)
	g	Beban Sewa Mebel	25.216.500,00	0,00	25.216.500,00	100,00
	h	Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	11.880.000,00	(11.880.000,00)	(100,00)
	i	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	9.729.000,00	(9.729.000,00)	(100,00)
	j	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	k	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	139.717.500,00	79.310.000,00	60.407.500,00	76,17
	l	Beban Sewa Sumber Tenaga	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
	m	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	n	Beban Sewa Personal Computer	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	0,00

BEBAN SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN SEWA		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
			(RP)	(RP)	(Rp)	
1	2		3	4	5	6
	0	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	0,00
	p	Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**		**1.815.204.166,67**	**2.489.337.500,00**	**(674.133.333,33)**	**(27,08)**
	a	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	114.029.166,67	149.587.500,00	(35.558.333,33)	(23,77)
	b	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	166.150.000,00	485.755.000,00	(319.605.000,00)	(65,80)
	c	Beban Sewa Taman	0,00	8.350.000,00	(8.350.000,00)	(100,00)
	d	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	17.700.000,00	111.222.000,00	(93.522.000,00)	(84,09)
	e	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	30.600.000,00	51.000.000,00	(20.400.000,00)	(40,00)
	f	Beban Sewa Hotel	1.336.725.000,00	1.446.815.000,00	(110.090.000,00)	(7,61)
	g	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	h	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	86.608.000,00	(86.608.000,00)	(100,00)
4	**Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**		**88.850.000,00**	**157.000.000,00**	**(68.150.000,00)**	**(43,41)**
	a	Beban Sewa Audio Visual	7.500.000,00	72.000.000,00	(64.500.000,00)	(89,58)
	b	Beban Sewa Tanaman	81.350.000,00	85.000.000,00	(3.650.000,00)	(4,29)
JUMLAH			**3.141.015.626,67**	**3.765.147.600,01**	**(624.131.973,34)**	**(16,58)**

5.1.5.1.2.2.4 Beban Jasa Konsultasi

Beban Jasa Konsultasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp13.293.300.333,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.954.423.994,52 atau 28,58% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Konsultasi pada Tahun 2023 sebesar Rp10.338.876.338,48. Tahun 2024 terdapat Beban Jasa Konsultasi yang direklas menjadi asset yaiu Beban Jasa Konsultansi Konstruksi .Rincian Beban Jasa Konsultasi dapat dilihat pada Tabel 5.51 sebagai berikut:

Tabel 5.51
BEBAN JASA KONSULTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN JASA KONSULTASI	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**9.981.216.331,00**	**7.330.443.497,48**	**2.650.772.833,52**	**36,16**
a	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	384.129.930,00	(384.129.930,00)	(100,00)
b	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	935.909.594,00	(935.909.594,00)	(100,00)
c	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	718.998.443,00	(718.998.443,00)	(100,00)
d	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	3.274.490.675,00	0,00	3.274.490.675,00	0,00
e	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
f	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	391.050.700,00	0,00	391.050.700,00	0,00
g	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.768.966.000,00	0,00	1.768.966.000,00	0,00
h	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	1.381.877.150,00	(1.381.877.150,00)	(100,00)
i	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	517.321.000,00	(517.321.000,00)	(100,00)
j	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.406.872.005,00	1.014.086.459,00	392.785.546,00	38,73
k	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	103.173.024,00	954.328.892,00	(851.155.868,00)	(89,19)
l	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.107.067.927,00	8.681.682,48	1.098.386.244,52	12.651,77
m	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.659.268.000,00	1.020.619.347,00	638.648.653,00	62,57
n	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	250.328.000,00	394.491.000,00	(144.163.000,00)	(36,54)
2	**Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**3.312.084.002,00**	**3.008.432.841,00**	**303.651.161,00**	**10,09**
a	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
b	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	88.983.705,00	28.500.000,00	60.483.705,00	212,22
c	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	111.053.935,00	117.450.000,00	(6.396.065,00)	(5,45)

BEBAN JASA KONSULTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BEBAN JASA KONSULTASI	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
d	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	24.639.600,00	(24.639.600,00)	(100,00)
e	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	255.000.000,00	40.000.000,00	215.000.000,00	537,50
f	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	831.008.320,00	199.322.700,00	631.685.620,00	316,92
g	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.766.038.042,00	2.598.520.541,00	(832.482.499,00)	(32,04)
h	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00
JUMLAH		**13.293.300.333,00**	**10.338.876.338,48**	**2.954.423.994,52**	**28,58**

5.1.5.1.2.2.5 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.000.000,00 atau 183,33% jika dibandingkan dengan Beban Beasiswa Pendidikan PNS pada Tahun 2023 sebesar Rp85.000.000,00 merupakan Beban Beasiswa Tugas Belajar S2.

5.1.5.1.2.2.6 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp8.200.943.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.047.244.952,00 atau 46,22% jika dibandingkan dengan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2023 sebesar Rp15.248.187.952,00. Rincian Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada Tabel 5.52 sebagai berikut:

Tabel 5.52
BEBAN KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Kursus Singkat/ Pelatihan	2.407.396.000,00	10.863.610.952,00	(8.456.214.952,00)	(77,84)
2	Beban Sosialisasi	3.047.500.000,00	1.453.900.000,00	1.593.600.000,00	109,61
3	Beban Bimbingan Teknis	1.888.890.000,00	2.599.987.000,00	(711.097.000,00)	(27,35)
4	Beban Diklat Kepemimpinan	857.157.000,00	330.690.000,00	526.467.000,00	159,20
JUMLAH		**8.200.943.000,00**	**15.248.187.952,00**	**(7.047.244.952,00)**	**(46,22)**

5.1.5.1.2.2.7 Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp308.416.410,00. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN dapat dilihat pada Tabel 5.53 berikut:

Tabel 5.53
BEBAN JASA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI PEGAWAI NON ASN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	9.744.000,00	0,00	9.744.000,00	0,00
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	449.910,00	0,00	449.910,00	0,00
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.996.800,00	0,00	2.996.800,00	0,00
5	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	57.834.000,00	0,00	57.834.000,00	0,00
6	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00

BEBAN JASA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI PEGAWAI NON ASN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
7	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00
8	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
9	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	74.920.700,00	0,00	74.920.700,00	0,00
10	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	77.150.400,00	0,00	77.150.400,00	0,00
11	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	54.241.800,00	0,00	54.241.800,00	0,00
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	0,00
JUMLAH		**308.416.410,00**	**0,00**	**308.416.410,00**	**0,00**

5.1.5.1.2.2.8 Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi

Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp36.465.561,00. Rincian Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN dapat dilihat pada Tabel 5.54 berikut:

Tabel 5.54
BEBAN JASA INSENTIF BAGI PEGAWAI NON ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.120.389,00	0,00	10.120.389,00	0,00
2	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	21.990.576,00	0,00	21.990.576,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar				
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.393.87,00	0,00	2.393.87,00	0,00
4	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.960.709,00	0,00	1.960.709,00	0,00
JUMLAH		**36.465.561,00**	**0,00**	**36.465.561,00**	**0,00**

5.1.5.1.2.2.9 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp26.120.566.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.604.754.430,00 atau 14,98% jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 sebesar Rp30.725.320.849,00. Rincian Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 5.55 sebagai berikut:

Tabel 5.55
BEBAN PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
Beban Pemeliharaan Tanah		**0,00**	**29.985.000,00**	**(29.985.000,00)**	**(100,00)**
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	29.985.000,00	(29.985.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		**6.621.615.420,00**	**6.366.002.995,00**	**255.612.425,00**	**4,02**
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Besar Darat - Alat Besar Darat Lainnya	267.227.435,00	199.863.329,00	67.364.106,00	33,71
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	7.104.000,00	(7.104.000,00)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa	14.450.000,00	11.631.000,00	2.819.000,00	24,24
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.829.030.105,00	3.683.997.208,00	145.032.897,00	3,94

BEBAN PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	47.067.000,00	148.175.000,00	(101.108.000,00)	(68,24)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	118.103.300,00	220.392.588,00	(102.289.288,00)	(46,41)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	20.956.000,00	(20.956.000,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	315.078.370,00	294.875.661,00	20.202.709,00	6,85
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Ukur - Alat Penguji Kendaraan Bermotor	169.460.000,00	129.957.690,00	39.502.310,00	30,40
11	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	14.865.000,00	13.195.000,00	1.670.000,00	12,66
12	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	0,00	59.772.000,00	(59.772.000,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	11.025.780,00	(11.025.780,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	549.012.000,00	530.754.423,00	18.257.577,00	3,44
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.794.000,00	8.195.600,00	1.598.400,00	19,50
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	273.811.200,00	291.615.600,00	(17.804.400,00)	(6,11)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.197.500,00	21.000.000,00	13.197.500,00	62,85
19	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat - Alat Sandi	0,00	19.877.880,00	(19.877.880,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	293.802.468,00	44.706.634,00	249.095.834,00	557,18

BEBAN PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
21	Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	388.182.344,00	396.735.001,00	(8.552.657,00)	(2,16)
22	Beban Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	247.754.698,00	246.372.601,00	1.382.097,00	0,56
23	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.180.000,00	0,00	5.180.000,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	5.800.000,00	(5.800.000,00)	(100,00)
25	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		**6.356.804.575,00**	**2.794.337.604,00**	**3.562.466.971,00**	**127,49**
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	5.501.954.465,00	2.759.337.604,00	2.742.616.861,00	99,39
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	811.568.500,00	0,00	811.568.500,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	9.994.110,00	0,00	9.994.110,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	33.287.500,00	35.000.000,00	(1.712.500,00)	(4,89)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		**13.142.146.424,00**	**21.469.995.250,00**	**(8.327.848.826,00)**	**(38,79)**
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Kabupaten	7.753.476.224,00	13.892.896.250,00	(6.139.420.026,00)	(44,19)
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Air Irigasi - Bangunan Pengambilan Irigasi	4.902.100.400,00	5.206.219.000,00	(304.118.600,00)	(5,84)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	1.056.476.000,00	(1.056.476.000,00)	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air - Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder - Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	112.286.800,00	749.125.000,00	(636.838.200,00)	(85,01)
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	528.024.000,00	(528.024.000,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	37.255.000,00	(37.255.000,00)	(100,00)

BEBAN PEMELIHARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	374.283.000,00	0,00	374.283.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		**0,00**	**65.000.000,00**	(65.000.000,00)	(100,00)
1	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga - Alat Bercorak Kebudayaan - Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH		**26.120.566.419,00**	**30.725.320.849,00**	**(4.604.754.430,00)**	**(14,98)**

5.1.5.1.2.2.10 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 Rp81.839.752.310,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.902.732.359,00 atau 5,01% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 sebesar Rp77.937.019.951,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 5.56 sebagai berikut:

Tabel 5.56
BEBAN PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	KENAIKAN / PENURUNAN Rp	KENAIKAN / PENURUNAN %
1	2	3	4	5	6
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.196.085.274,00	71.636.324.034,00	(24.440.238.760,00)	(34,12)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	2.391.852.985,00	(2.391.852.985,00)	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.464.108.036,00	0,00	28.464.108.036,00	100,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.925.009.000,00	930.000.000,00	995.009.000,00	106,99
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.254.550.000,00	2.978.842.932,00	1.275.707.068,00	42,83
JUMLAH		**81.839.752.310,00**	**77.937.019.951,00**	**3.902.732.359,00**	**5,01**

5.1.5.1.2.2.11 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp1.939.020.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Tahun 2024 sebesar Rp69.235.000,00, terdiri dari:
   a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp25.000.000,00;
   b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp7.985.000,00, dari Beban Tahun 2024 sebesar Rp485.000,00 dan reklas dari asset berupa piala sebesar Rp7.500.000,00;
   c. Dinas Pendidikan sebesar Rp32.500.000,00;
   d. Kecamatan Cilograng sebesar Rp1.500.000,00;
   e. Kecamatan Warunggunung sebesar Rp2.250.000,00;
2. Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp1.869.785.000,00, terdiri dari:
   a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp232.170.000,00;
   b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp10.000.000,00;
   c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp71.500.000,00;
   d. Dinas Kepemudaan Olahraga sebesar Rp758.570.000,00;
   e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp39.000.000,00
   f. Dinas Kesehatan sebesar Rp49.500.000,00
   g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp39.650.000,00;
   h. Dinas Pendidikan sebesar Rp624.395.000,00;
   i. Kecamatan Cikulur sebesar Rp10.000.000,00;
   j. Kecamatan Muncang sebesar Rp5.000.000,00
   k. Kecamatan Sobang sebesar Rp5.000.000,00;
   l. Sekretariat Daerah sebesar Rp25.000.000,00.

5.1.5.1.2.2.12 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang Dana Bos milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp143.138.089.891,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.151.510.607,00 atau 1,48% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp145.289.600.498,00.

5.1.5.1.2.2.13 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp230.475.958.309,20 mengalami penurunan sebesar Rp7.541.101.900,64 atau 3,17%, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp Rp238.015.594.737,84. Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Beban barang dan jasa dari RSUD dr.Adjidarmo dan 42 Puskesmas.

5.1.5.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2024 sebesar Rp181.846.480.646,26 jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.200.298.602,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.646.182.044,26 atau 53,85%Rincian pos Beban Hibah dapat dilihat pada tabel 5.57 sebagai berikut:

Tabel 5.57
BEBAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIAKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(RP)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	**Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**27.636.686.920,38**	**520.000.000,00**	**27.116.686.920,38**	**5214,75**
	a Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	27.636.686.920,38	450.000.000,00	27.186.686.920,38	6041,49
	b Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
2	**Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**111.109.353.095,88**	**115.393.556.102,00**	**(4.284.203.006,12)**	**(3,71)**
	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**74.028.480.000,00**	**50.645.421.124,00**	**23.383.058.876,00**	**46,17**
	a. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	74.028.480.000,00	50.645.421.124,00	23.383.058.876,00	46,17
	Beban Hibahkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat KeteranganTerdaftar	**8.267.257.695,88**	**38.285.760.229,00**	**(30.018.502.533,12)**	**(78,41)**
	a. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat KeteranganTerdaftar	550.000.000,00	31.011.575.000,00	(30.461.575.000,00)	-98,23

BEBAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (RP)	KENAIAKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6
	b	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat KeteranganTerdaftar	7.717.257.695,88	7.274.185.229,00	443.072.466,88	6,09
	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		**28.813.615.400,00**	**26.462.374.749,00**	**2.351.240.651,00**	**8,89**
	a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, SukarelaBersifatSosialKemasyarakatan	26.924.844.500,00	26.242.574.749,00	682.269.751,00	2,60
	b	Beban HibahBarangkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.888.770.900,00	219.800.000,00	1.668.970.900,00	759,31
3	**Beban Hibah Dana BOS**		**11.768.908.166,00**	**0,00**	**11.768.908.166,00**	**100,00**
	a	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.768.908.166,00	0,00	11.768.908.166,00	100,00
4	**Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**		**2.427.092.501,00**	**2.286.742.500,00**	**140.350.001,00**	**6,14**
	a	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.427.092.501,00	2.286.742.500,00	140.350.001,00	6,14
5	**Beban Hibah Dana BOSP**		**28.904.376.963,00**	**0,00**	**28.904.376.963,00**	**100,00**
	a	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	20.297.139.963,00	0,00	20.297.139.963,00	100,00
	b	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.607.300.000,00	0,00	8.607.300.000,00	100,00
		JUMLAH	**181.846.480.646,26**	**118.200.298.602,00**	**63.646.182.044,26**	**53,85**

Rincian Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp27.636.686.920,38 adalah hibah aset kepada Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 600.1/1127-NPHD/DPUPR/VIII/2024 dan Nomor 84/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 berupa Aset Tanah sebesar Rp8.123.000.000,00 dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.513.686.920,38;
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp111.109.353.095,88 terdiri dari:
   a. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp74.028.480.000,00 merupakan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp47.106.580.000,00 diserahkan kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Fkdm) Kabupaten Lebak sebesar Rp350.000.000,00, Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (Fkpt) sebesar Rp200.000.000,00, Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Lebak sebesar Rp230.000.000,00, Forum Pemuda Lintas Agama (Fpla) Kabupaten Lebak sebesar Rp140.000.000,00, Badan Narkotika Kabupaten (Bnk) Lebak sebesar Rp100.000.000,00, Legiun Veteran Republik Indonesia (Lvri) Kabupaten Lebak sebesar Rp50.000.000,00, Forum Pembauran Kebangsaan (Fpk) Kabupaten Lebak sebesar Rp150.000.000,00, Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp30.000.000.000,00, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp12.000.000.000,00, Kepolisian resort Lebak sebesar Rp2.986.580.000,00, dan Komando Dsitrik Militer Kodim sebesar Rp900.000.000,00;
2) Badan Prencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp620.700.000,00 atau 100% diserahkan kepada Badan Pengelola Gropark Bayah Dome;
3) Dinas Kepemudaan Olahraga sebesar Rp1.295.000.000,00 diserahkan ke Komite Olahraga Nasional sebesar Rp1.000.000.000,00, Pramuka Kwarcab Lebak sebesar Rp100.000.000,00, National Paralympic Committee sebesar Rp150.000.000,00, Komite Nasional Pemuda Indoesia sebesar Rp45.000.000,00;
4) Dinas Kesehatan sebesar Rp250.000.000,00 diserahkan kepada Palang Merah Indonesia;
5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp450.000.000,00 diserahkan kepada radio Multatuli FM;
6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp150.000.000,00 diserahkan kepada Dewan Koperasi Daerah (DEKOPINDA) sebesar Rp50.000.000,00 dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah sebesar Rp100.000.000,00;

7) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.777.000.000,00 diserahkan kepada Dewan Pendidikan sebesar Rp43.500.000,00, Forum Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp555.500.000,00, Forum Mahasiswa Kedokteran Tinggi Negeri sebesar Rp1.178.000.000,00;
8) Dinas Pertanian sebesar Rp22.379.200.000,00 diserahkan kepada Kelompok tani sekabupaten Lebak berupa pembangunan irigasi air tanah, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung, pembangunan irigasi perpipaan;

b. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp8.267.257.695,88 terdiri dari:
1) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp550.000.000,00 pada Dinas Pertanian kegiatan pekarangan pangan lestari diberikan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 berupa sarana produksi pertanian pada Kelompok Wanita Tani Melati mekar, Mekar Makmur, Sri Lestari mandiri, Karya mandiri, Mugi Lestari, Meelati, Tunas Muda, Kramat Jaya, Parungsari Maju, Cipeundeuy Jaya, Sdap Malam;
2) Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp7.717.257.695,88 terdapat pada:
a) Dinas Pertanian sebesar Rp4.675.810.967,00 diserahkan kepada Kelompok Tani berupa bibit manggis, dolomit, pestisida, NPK, pupuk organic, dan alat-alat pertanian;
b) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.496.017.500,00 berupa 1 (satu) paket pembangunan olahan pakan ternak Silase dan diserahkan kepada Kelompok Ternak Rukun Tani yang beralamat di Kp. Babakan Laban RT 013/03 Desa Ciakar Kecamatan Gunungkencana mendapatkan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Tani Ternak Bunga Seroja yang beralamat di Kp. Jahe RT 04/04 Desa Marga Jaya Kecamatan Cimarga mendapatkan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Ternak Bukit

Satwa yang beralamat di Kp. Curug Lebak RT 003/006 Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak mendapatakan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase, Kelompok Ternak Muda Karya yang beralamat di Kp. Buyut RT 01/01 Desa Kujang Sari Kecamatan Cileles mendapatakan 1 paket pembangunan olahan pakan ternak Silase;

c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.545.429.228,88 diserahkan kepada klinik swasta berupa obat-obatan lainnya.

c. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp28.813.615.400,00 terdiri dari:

1) Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp26.924.844.500,00 terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00 untuk penanganan HIV;

b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp9.167.293.500,00 merupakan pembangunan tangki septik dan pengadaan tangki bio septik yang diserahkan kepada Kelompok Swadaya;

c) Sekretariat Daerah sebesar Rp17.357.551.000,00 diserahkan kepada Lembaga keagamaan, madrasah diniyah, pondok pesantrean, majlis ta'lim dan Mesjid berupa bantuan Beban hibah uang;

d) Dinas Sosial sebesar Rp200.000.000,00 diberikan kepada Karang Taruna Kabupaten Lebak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/KEP.114-DINSOS/2024 Tanggal 26 MaretTahun 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang;

2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.888.770.900,00 terdapat pada Dinas Perikanan diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Pengolah Dan Pemasar, Kelompok Masyarakat Siaga Bencana (KMSB);

d. Beban Hibah Dana Bos sebesar Rp11.768.908.166,00;

e. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.427.092.501,00 diserahkan kepada:
   1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar Rp333.454.334,00;
   2) Partai Demokrat sebesar Rp365.498.000,00;
   3) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp428.332.333,00;
   4) Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebesar Rp299.519.500,00;
   5) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp241.416.000,00;
   6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp246.550.500,00;
   7) Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebesar Rp237.482.000,00;
   8) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)sebesar Rp64.137.500,00;
   9) Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp210.702.334,00.

f. Beban Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp28.904.439.963,00 terdiri dari:
   1) Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp20.297.139.963,00;
   2) Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp8.607.300.000,00;

5.1.5.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yaitu sebesar Rp8.067.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp188.015.000,00 atau 2,39% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar Rp7.878.985.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel 5.58 berikut:

Tabel 5.58
BEBAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
			Rp	Rp	Rp	%
1	2		3	4	5	6
1	**Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**		**5.067.000.000,00**	**2.496.300.000,00**	**2.570.700.000,00**	**102,98**
	a	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.067.000.000,00	2.496.300.000,00	2.570.700.000,00	102,98
2	**Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga**		**3.000.000.000,00**	**5.382.685.000,00**	**(2.382.685.000,00)**	**(44,27)**
	a	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.000.000.000,00	5.320.000.000,00	(2.320.000.000,00)	(43,61)
	b	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	62.685.000,00	(62.685.000,00)	(100,00)
		JUMLAH	**8.067.000.000,00**	**7.878.985.000,00**	**188.015.000,00**	**2,39**

5.1.5.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp8.199.783.580,78 yang merupakan beban penyisihan atas piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1.493.838.881,55, atau 15,41% jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2023 sebesar Rp9.693.622.462,33. Adapun rincian Beban penyisihan piutang dapat dilihat pada Tabel 5.59 sebagai berikut:

Tabel 5.59
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIAKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.171.715.276,24	3.599.624.494,94	2.572.090.781,30	71,45
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	509.141.538,19	160.103.806,50	349.037.732,69	218,01
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.498.440.539,40	1.508.323.809,29	(9.883.269,89)	(0,66)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	20.486.225,95	44.082.351,61	(23.596.125,66)	(54)
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	4.381.488.000,00	(4.381.488.000,00)	(100)
JUMLAH		**8.199.783.580,78**	**9.693.622.462,33**	**(1.493.838.881,56)**	**(15,41)**

5.1.5.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Lainnya pada Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Lebak yang terdapat pada seluruh Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp336.997.076.847,62 mengalami penurunan sebesar Rp16.853.953.080,69 atau 4,76%. jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp353.851.029.928,31. Beban Penyusutan per jenis aset dapat dilihat pada Tabel 5.60 sebagai berikut:

Tabel 5.60
BEBAN PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	JENIS ASET	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.210.579.758,65	71.096.818.704,59	(6.896.793.512,04)	(9,70)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.783.402.293,24	45.207.147.457,19	6.586.809.402,15	14,57
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	220.557.972.698,94	236.987.196.912,06	(16.429.224.213,12)	(6,93)
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	243.724.514,26	16.164.514,30	227.559.999,96	1407,78
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	201.397.592,53	543.702.340,17	(342.304.757,64)	(62.96)
JUMLAH		**336.997.076.847,62**	**353.851.029.928,31**	**(16.853.953.080,69)**	**(4,76)**

5.1.5.3 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp3.862.530.415,00 yaitu merupakan Beban tidak terduga yang diperuntukan dalam rangka penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor, pembayaran penanganan orang sakit yang tidak mampu dan pengembalian-pengembalian yang tidak bertujuan untuk menambah Aset Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan Beban tidak terduga Tahun 2023 sebesar Rp8.051.768.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.189.238.045,00 atau 52,03%. Dari Beban Tidak Terduga di reklas sebesar Rp14.797.217.900,00 menjadi aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas Beban Tidak Terduga menjadi aset Aset Lancar Persediaan sebesar Rp334.029.900,00 dan dimutasikan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berupa personal computer;
2. Reklas Beban Tidak Terduga menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.974.423.000,00;
3. Reklas Beban Tidak Terduga menjadi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp12.488.765.000,00.

5.1.5.4 Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp502.712.411.185,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.992.108.400,90 atau 2,65% jika dibandingkan dengan Beban Transfer pada Tahun 2023 sebesar Rp489.720.302.784,10 dengan rincian dapat di lihat pada Tabel 5.61 sebagai berikut:

Tabel 5.61
BEBAN TRANSFER
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	
			Rp	Rp	Rp	%
1	2		3	4	5	6
1	**Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**		**21.919.382.330,00**	**20.287.067.884,10**	**1.632.314.445,90**	**8,05**
	a.	**Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**	**19.675.217.647,00**	**18.219.999.999,90**	**1.455.217.647,10**	**7,99**
		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.675.217.647,00	18.219.999.999,90	1.455.217.647,10	7,99
	b.	**Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**2.244.164.683,00**	**2.067.067.884,20**	**177.096.798,80**	**8,57**
		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota KepadaPemerintahDesa	2.244.164.683,00	2.067.067.884,20	177.096.798,80	8,57
2	**Beban Bantuan Keuangan**		**480.793.028.855,00**	**469.433.234.900,00**	**11.359.793.955,00**	**2,42**
	a.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	469.433.234.900,00	(469.433.234.900,00)	(100,00)
	b.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	356.799.183.000,00	0,00	356.799.183.000,00	100,00
	c.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	123.993.845.855,00	0,00	123.993.845.855,00	100,00
		JUMLAH	**502.712.411.185,00**	**489.720.302.784,10**	**12.992.108.400,90**	**2,65**

Beban Transfer Bagi Hasil pendapatan kepada Pemerintah Desa pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp21.919.382.330,00 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp20.287.067.884,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.632.314.445,90 atau 8,05%. Beban Transfer bagi hasil terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. Beban Bagi Hasil Pajak untuk setiap Pemerintah Desa pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp19.675.217.647,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp18.219.999.999,90 mengalami kenaikan sebesar Rp1.455.217.647,10 atau 7,99%, rincian Beban Bagi Hasil Pajak untuk setiap Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel 5.62 sebagai berikut:

Tabel 5.62
BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**941.273.942,00**	**870.351.174,00**	**70.922.768,00**
1	Cilangkahan	57.360.353,00	53.047.941,00	4.312.412,00
2	Pagelaran	87.121.353,00	80.520.941,00	6.600.412,00
3	Sukaraja	68.459.353,00	63.257.941,00	5.201.412,00
4	Malingping Utara	62.864.353,00	58.108.941,00	4.755.412,00
5	Bolang	77.691.353,00	71.814.941,00	5.876.412,00
6	Cipeundeuy	72.695.353,00	67.203.941,00	5.491.412,00
7	Rahong	51.186.353,00	47.329.941,00	3.856.412,00
8	Kadujajar	74.136.353,00	68.446.941,00	5.689.412,00
9	Kersaratu	72.025.353,00	66.555.941,00	5.469.412,00
10	Malingping Selatan	66.094.353,00	61.109.941,00	4.984.412,00
11	Sumberwaras	61.750.353,00	57.440.941,00	4.309.412,00
12	Sukamanah	85.123.353,00	78.698.941,00	6.424.412,00
13	Senanghati	53.895.353,00	49.797.941,00	4.097.412,00
14	Sangiang	50.870.353,00	47.015.941,00	3.854.412,00
	Pemerintahan Desa di KecamatanPanggarangan	**685.151.883,00**	**633.417.351,00**	**51.734.532,00**
1	Panggarangan	64.759.353,00	59.844.941,00	4.914.412,00
2	Jatake	61.455.353,00	56.792.941,00	4.662.412,00
3	Sogong	64.774.353,00	59.824.941,00	4.949.412,00
4	Cimandiri	64.511.353,00	59.615.941,00	4.895.412,00
5	Gununggede	68.818.353,00	64.220.941,00	4.597.412,00
6	Situregen	63.826.353,00	59.021.941,00	4.804.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
7	Mekarjaya	67.908.353,00	62.594.941,00	5.313.412,00
8	Sindangratu	69.900.353,00	64.587.941,00	5.312.412,00
9	Hegarmanah	45.079.353,00	41.687.941,00	3.391.412,00
10	Sukajadi	54.514.353,00	50.141.941,00	4.372.412,00
11	Cibarengkok	59.604.353,00	55.082.941,00	4.521.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**867.745.883,00**	**802.177.351,00**	**65.568.532,00**
1	Bayah Barat	81.738.353,00	75.528.941,00	6.209.412,00
2	Sawarna	101.426.353,00	93.764.941,00	7.661.412,00
3	Cidikit	85.343.353,00	78.882.941,00	6.460.412,00
4	Suwakan	80.209.353,00	74.129.941,00	6.079.412,00
5	Cimancak	65.153.353,00	60.221.941,00	4.931.412,00
6	Darmasari	85.440.353,00	78.960.941,00	6.479.412,00
7	Bayah Timur	62.454.353,00	57.740.941,00	4.713.412,00
8	Cisuren	65.539.353,00	60.579.941,00	4.959.412,00
9	Pasirgombong	51.599.353,00	47.707.941,00	3.891.412,00
10	Sawarna Timur	81.565.353,00	75.488.941,00	6.076.412,00
11	Pamubulan	107.276.353,00	99.169.941,00	8.106.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**739.737.942,00**	**683.834.174,00**	**55.903.768,00**
1	Cipanas	51.145.353,00	47.286.941,00	3.858.412,00
2	Girilaya	48.403.353,00	44.734.941,00	3.668.412,00
3	Malangsari	49.023.353,00	45.308.941,00	3.714.412,00
4	Bintangresmi	52.381.353,00	48.430.941,00	3.950.412,00
5	Talagahiyang	46.397.353,00	42.947.941,00	3.449.412,00
6	Luhurjaya	58.549.353,00	54.107.941,00	4.441.412,00
7	Haurgajrug	72.036.353,00	66.572.941,00	5.463.412,00
8	Giriharja	52.921.353,00	48.723.941,00	4.197.412,00
9	Sukasari	63.844.353,00	59.253.941,00	4.590.412,00
10	Jayapura	48.471.353,00	44.796.941,00	3.674.412,00
11	Sipayung	53.106.353,00	49.077.941,00	4.028.412,00
12	Bintangsari	46.242.353,00	42.740.941,00	3.501.412,00
13	Pasirhaur	47.478.353,00	43.880.941,00	3.597.412,00
14	Harumsari	49.737.353,00	45.968.941,00	3.768.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**552.217.236,00**	**510.379.292,00**	**41.837.944,00**
1	Pasireurih	50.161.353,00	46.359.941,00	3.801.412,00
2	Ciminyak	55.157.353,00	50.966.941,00	4.190.412,00
3	Muncang	47.392.353,00	43.801.941,00	3.590.412,00
4	Leuwicoo	45.046.353,00	41.633.941,00	3.412.412,00
5	Sindangwangi	44.051.353,00	40.715.941,00	3.335.412,00
6	Cikarang	45.589.353,00	42.136.941,00	3.452.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
7	Sukanagara	44.932.353,00	41.528.941,00	3.403.412,00
8	Pasirnangka	46.229.353,00	42.726.941,00	3.502.412,00
9	Jagaraksa	43.418.353,00	40.130.941,00	3.287.412,00
10	Tanjungwangi	44.079.353,00	40.740.941,00	3.338.412,00
11	Mekarwangi	43.939.353,00	40.611.941,00	3.327.412,00
12	Girijagabaya	42.220.353,00	39.023.941,00	3.196.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**605.022.883,00**	**591.343.292,00**	**13.679.591,00**
1	Kanekes	-	32.152.941,00	-32.152.941,00
2	Cisimeut	59.245.353,00	54.747.941,00	4.497.412,00
3	Cibungur	66.831.353,00	61.772.941,00	5.058.412,00
4	Leuwidamar	58.474.353,00	54.038.941,00	4.435.412,00
5	Lebakparahiang	55.680.353,00	51.467.941,00	4.212.412,00
6	Sangkanwangi	54.049.353,00	49.950.941,00	4.098.412,00
7	Nayagati	56.019.353,00	51.775.941,00	4.243.412,00
8	Bojongmenteng	54.572.353,00	50.438.941,00	4.133.412,00
9	Margawangi	45.754.353,00	42.288.941,00	3.465.412,00
10	Wantisari	47.263.353,00	43.689.941,00	3.573.412,00
11	Jalupangmulya	53.115.353,00	49.094.941,00	4.020.412,00
12	Cisimeut Raya	54.017.353,00	49.922.941,00	4.094.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**459.504.177,00**	**424.734.469,00**	**34.769.708,00**
1	Bojongmanik	51.804.353,00	47.927.941,00	3.876.412,00
2	Harjawana	53.791.353,00	49.712.941,00	**4.078.412,00**
3	Kadurahayu	46.890.353,00	43.337.941,00	3.552.412,00
4	Cimayang	58.515.353,00	54.073.941,00	4.441.412,00
5	Parakanbeusi	57.580.353,00	53.223.941,00	4.356.412,00
6	Keboncau	48.796.353,00	45.097.941,00	3.698.412,00
7	Mekarmanik	55.454.353,00	51.250.941,00	4.203.412,00
8	Mekar Rahayu	44.416.353,00	41.051.941,00	3.364.412,00
9	Pasirbitung	42.255.353,00	39.056.941,00	3.198.412,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**617.995.236,00**	**570.902.292,00**	**47.092.944,00**
1	Gunungkencana	55.248.353,00	51.055.941,00	4.192.412,00
2	Cimanyangray	53.224.353,00	49.187.941,00	4.036.412,00
3	Gunungkendeng	46.784.353,00	43.235.941,00	3.548.412,00
4	Cisampang	50.023.353,00	46.231.941,00	3.791.412,00
5	Ciginggang	56.018.353,00	51.769.941,00	4.248.412,00
6	Ciakar	58.869.353,00	54.399.941,00	4.469.412,00
7	Cicaringin	54.836.353,00	50.690.941,00	4.145.412,00
8	Bulakan	46.965.353,00	43.406.941,00	3.558.412,00
9	Sukanegara	49.089.353,00	45.373.941,00	3.715.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
10	Bojongkoneng	50.137.353,00	46.338.941,00	3.798.412,00
11	Kramatjaya	51.014.353,00	46.893.941,00	4.120.412,00
12	Tanjungsari Indah	45.784.353,00	42.315.941,00	3.468.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**1.009.737.060,00**	**933.240.820,00**	**76.496.240,00**
1	Kerta	48.015.353,00	44.373.941,00	3.641.412,00
2	Bojongjuruh	52.923.353,00	48.909.941,00	4.013.412,00
3	Leuwiipuh	51.413.353,00	47.530.941,00	3.882.412,00
4	Lebakkeusik	47.681.353,00	44.068.941,00	3.612.412,00
5	Cilegongilir	55.032.353,00	50.858.941,00	4.173.412,00
6	Keusik	54.639.353,00	50.487.941,00	4.151.412,00
7	Cibaturkeusik	45.734.353,00	42.270.941,00	3.463.412,00
8	Kumpay	52.593.353,00	48.604.941,00	3.988.412,00
9	Jalupanggirang	50.326.353,00	46.512.941,00	3.813.412,00
10	Bendungan	53.106.353,00	49.096.941,00	4.009.412,00
11	Kertaraharja	54.778.353,00	50.638.941,00	4.139.412,00
12	Cisampih	52.087.353,00	48.138.941,00	3.948.412,00
13	Gunungsari	48.498.353,00	44.819.941,00	3.678.412,00
14	Tamansari	54.689.353,00	50.549.941,00	4.139.412,00
15	Cidahu	56.131.353,00	51.873.941,00	4.257.412,00
16	Ciruji	50.193.353,00	46.386.941,00	3.806.412,00
17	Kaduhauk	41.871.353,00	38.702.941,00	3.168.412,00
18	Labanjaya	47.016.353,00	43.453.941,00	3.562.412,00
19	Umbuljaya	51.589.353,00	47.676.941,00	3.912.412,00
20	Kertarahayu	41.416.353,00	38.281.941,00	3.134.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**684.080.236,00**	**632.164.292,00**	**51.915.944,00**
1	Pasindangan	53.878.353,00	49.791.941,00	4.086.412,00
2	Parungkujang	66.547.353,00	61.491.941,00	5.055.412,00
3	Cileles	58.823.353,00	54.358.941,00	4.464.412,00
4	Cikareo	53.404.353,00	49.337.941,00	4.066.412,00
5	Cipadang	60.694.353,00	56.088.941,00	4.605.412,00
6	Gumuruh	59.684.353,00	55.153.941,00	4.530.412,00
7	Prabugantungan	53.654.353,00	49.584.941,00	4.069.412,00
8	Daroyon	47.607.353,00	43.999.941,00	3.607.412,00
9	Margamulya	57.343.353,00	52.993.941,00	4.349.412,00
10	Mekarjaya	58.304.353,00	53.881.941,00	4.422.412,00
11	Kujangsari	55.291.353,00	51.096.941,00	4.194.412,00
12	Banjarsari	58.847.353,00	54.382.941,00	4.464.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**876.457.001,00**	**810.485.997,00**	**65.971.004,00**
1	Sarageni	52.410.353,00	48.441.941,00	3.968.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
2	Gununganten	51.245.353,00	47.161.941,00	4.083.412,00
3	Sudamanik	52.856.353,00	48.602.941,00	4.253.412,00
4	Tambak	54.751.353,00	50.981.941,00	3.769.412,00
5	Cimarga	48.239.353,00	43.899.941,00	4.339.412,00
6	Karyajaya	56.959.353,00	53.146.941,00	3.812.412,00
7	Margajaya	42.368.353,00	38.100.941,00	4.267.412,00
8	Jayamanik	53.231.353,00	49.195.941,00	4.035.412,00
9	Margaluyu	43.543.353,00	40.244.941,00	3.298.412,00
10	Margatirta	43.658.353,00	39.801.941,00	3.856.412,00
11	Intenjaya	55.517.353,00	51.676.941,00	3.840.412,00
12	Mekarjaya	60.091.353,00	55.744.941,00	4.346.412,00
13	Jayasari	59.846.353,00	55.820.941,00	4.025.412,00
14	Girimukti	56.490.353,00	53.053.941,00	3.436.412,00
15	Sangkanmanik	49.417.353,00	45.740.941,00	3.676.412,00
16	Sangiangjaya	48.590.353,00	45.204.941,00	3.385.412,00
17	Mekarmulya	47.240.353,00	43.663.941,00	3.576.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**831.068.295,00**	**767.919.115,00**	**63.149.180,00**
1	Maraya	49.999.353,00	46.209.941,00	3.789.412,00
2	Sajira	48.140.353,00	44.318.941,00	3.821.412,00
3	Sukarame	58.345.353,00	54.000.941,00	4.344.412,00
4	Calungbungur	58.245.353,00	53.840.941,00	4.404.412,00
5	Parungsari	53.924.353,00	49.846.941,00	4.077.412,00
6	Sindangsari	57.459.353,00	53.092.941,00	4.366.412,00
7	Mekarsari	71.417.353,00	65.981.941,00	5.435.412,00
8	Sukamarga	58.964.353,00	54.469.941,00	4.494.412,00
9	Pajagan	64.395.353,00	59.542.941,00	4.852.412,00
10	Sukajaya	47.011.353,00	43.326.941,00	3.684.412,00
11	Sajira Mekar	53.462.353,00	49.407.941,00	4.054.412,00
12	Paja	50.792.353,00	46.917.941,00	3.874.412,00
13	Margaluyu	49.831.353,00	46.059.941,00	3.771.412,00
14	Bungurmekar	51.412.353,00	47.570.941,00	3.841.412,00
15	Ciuyah	57.667.353,00	53.329.941,00	4.337.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**1.648.507.922,00**	**1.526.177.284,00**	**122.330.638,00**
1	Tanjungsari	55.938.353,00	51.711.941,00	4.226.412,00
2	Maja	82.408.353,00	76.158.941,00	6.249.412,00
3	Sangiang	66.897.353,00	61.613.941,00	5.283.412,00
4	Binong	73.456.353,00	67.886.941,00	5.569.412,00
5	Gubugan Cibeureum	54.111.353,00	50.061.941,00	4.049.412,00
6	Mekarsari	81.705.353,00	74.800.941,00	6.904.412,00
7	Padasuka	81.808.353,00	75.638.941,00	6.169.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
8	Curugbadak	349.589.353,00	324.224.941,00	25.364.412,00
9	Sindangmulya	70.870.353,00	65.512.941,00	5.357.412,00
10	Cilangkap	56.188.353,00	51.225.941,00	4.962.412,00
11	Pasirkembang	356.248.333,00	329.726.051,00	26.522.282,00
12	Pasirkecapi	55.258.353,00	51.140.941,00	4.117.412,00
13	Buyut Mekar	65.068.353,00	60.155.941,00	4.912.412,00
14	Maja Baru	198.959.353,00	186.316.941,00	12.642.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**753.513.883,00**	**697.128.351,00**	**56.385.532,00**
1	Pasirtanjung	57.391.353,00	53.096.941,00	4.294.412,00
2	Citeras	71.415.353,00	66.109.941,00	5.305.412,00
3	Nameng	69.643.353,00	64.454.941,00	5.188.412,00
4	Kolelet Wetan	48.134.353,00	44.490.941,00	3.643.412,00
5	Jatimulya	65.181.353,00	60.215.941,00	4.965.412,00
6	Mekarsari	70.544.353,00	65.259.941,00	5.284.412,00
7	Pabuaran	43.356.353,00	39.884.941,00	3.471.412,00
8	Rangkasbitung Timur	120.958.353,00	112.190.941,00	8.767.412,00
9	Sukamanah	59.864.353,00	55.401.941,00	4.462.412,00
10	Cimangeunteung	60.690.353,00	56.126.941,00	4.563.412,00
11	Narimbang Mulia	86.334.353,00	79.894.941,00	6.439.412,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**645.199.236,00**	**596.267.292,00**	**48.931.944,00**
1	Sukarendah	69.232.353,00	64.122.941,00	5.109.412,00
2	Warunggunung	53.982.353,00	49.953.941,00	4.028.412,00
3	Cibuah	46.967.353,00	43.270.941,00	3.696.412,00
4	Pasir Tangkil	64.387.353,00	59.526.941,00	4.860.412,00
5	Baros	47.104.353,00	43.551.941,00	3.552.412,00
6	Banjarsari	41.653.353,00	38.308.941,00	3.344.412,00
7	Padasuka	55.822.353,00	51.615.941,00	4.206.412,00
8	Sukaraja	47.127.353,00	43.562.941,00	3.564.412,00
9	Jagabaya	47.908.353,00	44.260.941,00	3.647.412,00
10	Selaraja	69.187.353,00	63.974.941,00	5.212.412,00
11	Cempaka	49.618.353,00	45.864.941,00	3.753.412,00
12	Sindangsari	52.208.353,00	48.251.941,00	3.956.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**534.490.530,00**	**493.967.410,00**	**40.523.120,00**
1	Mekarjaya	43.307.353,00	40.027.941,00	3.279.412,00
2	Cipalabuh	61.336.353,00	56.681.941,00	4.654.412,00
3	Cijaku	54.635.353,00	50.497.941,00	4.137.412,00
4	Cibeureum	51.774.353,00	47.848.941,00	3.925.412,00
5	Ciapus	63.853.353,00	59.005.941,00	4.847.412,00
6	Kandangsapi	61.623.353,00	56.945.941,00	4.677.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
7	Cihujan	51.597.353,00	47.685.941,00	3.911.412,00
8	Cimenga	48.935.353,00	45.207.941,00	3.727.412,00
9	Kapunduhan	46.615.353,00	43.085.941,00	3.529.412,00
10	Sukasenang	50.812.353,00	46.978.941,00	3.833.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**664.471.589,00**	**614.121.233,00**	**50.350.356,00**
1	Anggalan	47.596.353,00	43.990.941,00	3.605.412,00
2	Muncangkopong	54.415.353,00	50.290.941,00	4.124.412,00
3	Sukaharja	44.386.353,00	41.026.941,00	3.359.412,00
4	Tamanjaya	46.106.353,00	42.613.941,00	3.492.412,00
5	Cigoong Utara	48.399.353,00	44.727.941,00	3.671.412,00
6	Muaradua	55.728.353,00	51.506.941,00	4.221.412,00
7	Cikulur	49.535.353,00	45.770.941,00	3.764.412,00
8	Curugpanjang	65.755.353,00	60.763.941,00	4.991.412,00
9	Cigoong Selatan	48.997.353,00	45.284.941,00	3.712.412,00
10	Sumurbandung	63.533.353,00	58.728.941,00	4.804.412,00
11	Parage	43.859.353,00	40.538.941,00	3.320.412,00
12	Sukadaya	51.131.353,00	47.259.941,00	3.871.412,00
13	Pasirgintung	45.027.353,00	41.615.941,00	3.411.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**799.356.295,00**	**739.122.115,00**	**60.234.180,00**
1	Tambakbaya	56.085.353,00	51.829.941,00	4.255.412,00
2	Kaduagung Timur	67.075.353,00	62.071.941,00	5.003.412,00
3	Panancangan	54.724.353,00	50.594.941,00	4.129.412,00
4	Cibadak	48.431.353,00	44.771.941,00	3.659.412,00
5	Asem	48.116.353,00	44.469.941,00	3.646.412,00
6	Cisangu	44.677.353,00	41.318.941,00	3.358.412,00
7	Kaduagung Barat	65.289.353,00	60.347.941,00	4.941.412,00
8	Bojongcae	47.868.353,00	44.237.941,00	3.630.412,00
9	Malabar	43.164.353,00	39.901.941,00	3.262.412,00
10	Pasar Keong	49.911.353,00	46.097.941,00	3.813.412,00
11	Bojong Leles	57.368.353,00	53.175.941,00	4.192.412,00
12	Cimenteng Jaya	40.874.353,00	37.779.941,00	3.094.412,00
13	Mekar Agung	56.942.353,00	52.630.941,00	4.311.412,00
14	Asem Margaluyu	49.265.353,00	45.530.941,00	3.734.412,00
15	Kaduagung Tengah	69.562.353,00	64.360.941,00	5.201.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**1.102.071.766,00**	**1.017.923.702,00**	**84.148.064,00**
1	Cibeber	51.075.353,00	47.161.941,00	3.913.412,00
2	Citorek Tengah	51.478.353,00	47.566.941,00	3.911.412,00
3	Cisungsang	44.731.353,00	41.349.941,00	3.381.412,00
4	Kujangjaya	54.079.353,00	49.973.941,00	4.105.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
5	Kujangsari	41.337.353,00	38.208.941,00	3.128.412,00
6	Neglasari	66.051.353,00	60.591.941,00	5.459.412,00
7	Mekarsari	52.583.353,00	48.596.941,00	3.986.412,00
8	Cikotok	43.309.353,00	40.028.941,00	3.280.412,00
9	Sukamulya	54.445.353,00	50.318.941,00	4.126.412,00
10	Citorek Timur	45.366.353,00	41.929.941,00	3.436.412,00
11	Warungbanten	58.571.353,00	54.127.941,00	4.443.412,00
12	Hegarmanah	59.279.353,00	54.793.941,00	**4.485.412,00**
13	Situmulya	44.597.353,00	41.216.941,00	3.380.412,00
14	Citorek Kidul	47.658.353,00	44.049.941,00	3.608.412,00
15	Cikadu	55.142.353,00	50.959.941,00	4.182.412,00
16	Sirnagalih	45.975.353,00	42.491.941,00	3.483.412,00
17	Cihambali	47.932.353,00	44.301.941,00	3.630.412,00
18	Citorek Barat	52.494.353,00	48.433.941,00	4.060.412,00
19	Gunungwangun	44.520.353,00	41.169.941,00	3.350.412,00
20	Wanasari	52.203.353,00	48.246.941,00	3.956.412,00
21	Citorek Sabrang	42.956.353,00	39.703.941,00	3.252.412,00
22	Ciherang	46.283.353,00	42.697.941,00	3.585.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**552.235.530,00**	**510.076.410,00**	**42.159.120,00**
1	Cilograng	50.114.353,00	46.116.941,00	3.997.412,00
2	Cibareno	49.849.353,00	46.077.941,00	3.771.412,00
3	Cikamunding	54.888.353,00	50.725.941,00	4.162.412,00
4	Cijengkol	70.297.353,00	64.962.941,00	5.334.412,00
5	Pasirbungur	51.744.353,00	47.827.941,00	3.916.412,00
6	Lebaktipar	66.901.353,00	61.820.941,00	5.080.412,00
7	Cikatomas	59.024.353,00	54.465.941,00	4.558.412,00
8	Girimukti	44.398.353,00	41.035.941,00	3.362.412,00
9	Cireundeu	56.513.353,00	52.220.941,00	4.292.412,00
10	Gunungbatu	48.504.353,00	44.820.941,00	3.683.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**684.896.589,00**	**632.534.233,00**	**52.362.356,00**
1	Wanasalam	60.687.353,00	55.753.941,00	4.933.412,00
2	Bejod	58.630.353,00	54.182.941,00	4.447.412,00
3	Cilangkap	46.050.353,00	42.561.941,00	3.488.412,00
4	Cipeucang	48.218.353,00	44.564.941,00	3.653.412,00
5	Muara	60.418.353,00	55.807.941,00	4.610.412,00
6	Parungpanjang	56.394.353,00	52.118.941,00	4.275.412,00
7	Cikeusik	51.705.353,00	47.787.941,00	3.917.412,00
8	Katapang	43.727.353,00	40.414.941,00	3.312.412,00
9	Cisarap	54.559.353,00	50.327.941,00	4.231.412,00
10	Sukatani	54.981.353,00	50.822.941,00	4.158.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
11	Cipedang	52.726.353,00	48.727.941,00	3.998.412,00
12	Parungsari	53.358.353,00	49.311.941,00	4.046.412,00
13	Karangpamindangan	43.439.353,00	40.149.941,00	3.289.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**461.515.530,00**	**426.724.410,00**	**34.791.120,00**
1	Ciparasi	46.836.353,00	43.265.941,00	3.570.412,00
2	Sobang	45.491.353,00	42.268.941,00	3.222.412,00
3	Sukajaya	45.039.353,00	41.685.941,00	3.353.412,00
4	Sindanglaya	46.315.353,00	42.614.941,00	3.700.412,00
5	Sukamaju	48.366.353,00	44.414.941,00	3.951.412,00
6	Hariang	46.263.353,00	42.836.941,00	3.426.412,00
7	Majasari	46.310.353,00	42.870.941,00	3.439.412,00
8	Sinar Jaya	47.413.353,00	43.699.941,00	3.713.412,00
9	Cirompang	44.312.353,00	41.052.941,00	3.259.412,00
10	Sukaresmi	45.167.353,00	42.012.941,00	3.154.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**727.416.530,00**	**672.558.410,00**	**54.858.120,00**
1	Guradog	106.070.353,00	98.000.941,00	8.069.412,00
2	Curugbitung	70.983.353,00	65.610.941,00	5.372.412,00
3	Candi	64.657.353,00	59.752.941,00	4.904.412,00
4	Mayak	63.778.353,00	58.953.941,00	4.824.412,00
5	Cipining	65.992.353,00	61.030.941,00	4.961.412,00
6	Cilayang	94.028.353,00	86.896.941,00	7.131.412,00
7	Ciburuy	84.410.353,00	78.119.941,00	6.290.412,00
8	Sekarwangi	60.681.353,00	56.203.941,00	4.477.412,00
9	Cidadap	60.562.353,00	55.976.941,00	4.585.412,00
10	Lebakasih	56.252.353,00	52.010.941,00	4.241.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**391.137.471,00**	**361.604.587,00**	**29.532.884,00**
1	Kalanganyar	45.213.353,00	41.836.941,00	3.376.412,00
2	Pasirkupa	55.067.353,00	50.889.941,00	4.177.412,00
3	Cilangkap	62.602.353,00	57.881.941,00	4.720.412,00
4	Aweh	64.745.353,00	59.905.941,00	4.839.412,00
5	Sangiangtanjung	53.936.353,00	49.862.941,00	4.073.412,00
6	Sukamekarsari	57.888.353,00	53.452.941,00	4.435.412,00
7	Cikatapis	51.684.353,00	47.773.941,00	3.910.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**295.749.118,00**	**273.331.646,00**	**22.417.472,00**
1	Banjaririgasi	50.578.353,00	46.744.941,00	3.833.412,00
2	Ciladaeun	45.500.353,00	42.053.941,00	3.446.412,00
3	Lebakgedong	52.476.353,00	48.496.941,00	3.979.412,00
4	Banjarsari	46.978.353,00	43.418.941,00	3.559.412,00
5	Lebaksitu	52.270.353,00	48.305.941,00	3.964.412,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
6	Lebaksangka	47.945.353,00	44.310.941,00	3.634.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**542.750.177,00**	**501.573.469,00**	**41.176.708,00**
1	Panyaungan	61.519.353,00	56.853.941,00	4.665.412,00
2	Cihara	56.849.353,00	52.544.941,00	4.304.412,00
3	Ciparahu	57.633.353,00	53.272.941,00	4.360.412,00
4	Pondokpanjang	78.873.353,00	72.853.941,00	6.019.412,00
5	Citeupuseun	57.841.353,00	53.445.941,00	4.395.412,00
6	Lebakpeundeuy	63.239.353,00	58.440.941,00	4.798.412,00
7	Mekarsari	74.188.353,00	68.554.941,00	5.633.412,00
8	Karangkamulyan	43.981.353,00	40.666.941,00	3.314.412,00
9	Barunai	48.624.353,00	44.938.941,00	3.685.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**529.579.530,00**	**489.443.410,00**	**40.136.120,00**
1	Datarcae	51.006.353,00	47.138.941,00	3.867.412,00
2	Cirinten	66.973.353,00	61.909.941,00	5.063.412,00
3	Karangnunggal	45.663.353,00	42.203.941,00	3.459.412,00
4	Kadudamas	55.037.353,00	50.861.941,00	4.175.412,00
5	Badur	57.807.353,00	53.420.941,00	4.386.412,00
6	Parakanlima	53.978.353,00	49.884.941,00	4.093.412,00
7	Nanggerang	47.819.353,00	44.196.941,00	3.622.412,00
8	Cempaka	52.913.353,00	48.901.941,00	4.011.412,00
9	Karoya	50.883.353,00	47.024.941,00	3.858.412,00
10	Cibarani	47.497.353,00	43.898.941,00	3.598.412,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**472.334.177,00**	**436.496.418,90**	**35.837.758,10**
1	Peucangpari	63.358.353,00	58.524.941,00	4.833.412,00
2	Cibungur	48.041.353,00	44.399.941,00	3.641.412,00
3	Mugijaya	49.412.353,00	45.666.941,00	3.745.412,00
4	Cikate	47.202.353,00	43.625.941,00	3.576.412,00
5	Cigemblong	56.625.353,00	52.330.941,00	4.294.412,00
6	Cikadongdong	61.419.353,00	56.758.941,00	4.660.412,00
7	Cikaret	55.218.353,00	51.029.941,00	4.188.412,00
8	Wangunjaya	38.246.353,00	35.352.890,90	2.893.462,10
9	Cikaratuan	52.810.353,00	48.805.941,00	4.004.412,00
JUMLAH		**19.675.217.647,00**	**18.219.999.999,90**	**1.455.217.647,10**

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Pemerintah Desa pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.244.164.683,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.067.067.884,20 mengalami kenaikan sebesar Rp177.096.798,80 atau

8,57%, rincian Beban Bagi Hasil Pajak untuk setiap Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel 5.63 sebagai berikut:

Tabel 5.63
BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**107.361.088,00**	**98.730.724,00**	**8.630.364,00**
1	Cilangkahan	6.542.292,00	6.017.766,00	524.526,00
2	Pagelaran	9.937.292,00	9.135.766,00	801.526,00
3	Sukaraja	7.808.292,00	7.176.766,00	631.526,00
4	Malingping Utara	7.170.292,00	6.592.766,00	577.526,00
5	Bolang	8.861.292,00	8.146.766,00	714.526,00
6	Cipeundeuy	8.291.292,00	7.624.766,00	666.526,00
7	Rahong	5.838.292,00	5.369.766,00	468.526,00
8	Kadujajar	8.456.292,00	7.767.766,00	688.526,00
9	Kersaratu	8.215.292,00	7.550.766,00	664.526,00
10	Malingping Selatan	7.538.292,00	6.932.766,00	605.526,00
11	Sumberwaras	7.043.292,00	6.502.766,00	540.526,00
12	Sukamanah	9.709.292,00	8.927.766,00	781.526,00
13	Senanghati	6.147.292,00	5.650.766,00	496.526,00
14	Sangiang	5.802.292,00	5.333.766,00	468.526,00
	Pemerintahan Desa di KecamatanPanggarangan	**78.148.212,00**	**71.860.426,00**	**6.287.786,00**
1	Panggarangan	7.386.292,00	6.790.766,00	595.526,00
2	Jatake	7.009.292,00	6.443.766,00	565.526,00
3	Sogong	7.388.292,00	6.788.766,00	599.526,00
4	Cimandiri	7.358.292,00	6.763.766,00	594.526,00
5	Gununggede	7.849.292,00	7.263.766,00	585.526,00
6	Situregen	7.280.292,00	6.695.766,00	584.526,00
7	Mekarjaya	7.745.292,00	7.107.766,00	637.526,00
8	Sindangratu	7.973.292,00	7.328.766,00	644.526,00
9	Hegarmanah	5.141.292,00	4.729.766,00	411.526,00
10	Sukajadi	6.218.292,00	5.697.766,00	520.526,00
11	Cibarengkok	6.798.292,00	6.249.766,00	548.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**98.974.212,00**	**91.006.426,00**	**7.967.786,00**
1	Bayah Barat	9.323.292,00	8.569.766,00	753.526,00
2	Sawarna	11.568.292,00	10.637.766,00	930.526,00
3	Cidikit	9.734.292,00	8.949.766,00	784.526,00
4	Suwakan	9.148.292,00	8.410.766,00	737.526,00
5	Cimancak	7.431.292,00	6.832.766,00	598.526,00
6	Darmasari	9.745.292,00	8.958.766,00	786.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
7	Bayah Timur	7.123.292,00	6.549.766,00	573.526,00
8	Cisuren	7.475.292,00	6.872.766,00	602.526,00
9	Pasirgombong	5.885.292,00	5.412.766,00	472.526,00
10	Sawarna Timur	9.303.292,00	8.560.766,00	742.526,00
11	Pamubulan	12.236.292,00	11.250.766,00	985.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**84.374.088,00**	**77.581.724,00**	**6.792.364,00**
1	Cipanas	5.833.292,00	5.364.766,00	468.526,00
2	Girilaya	5.521.292,00	5.075.766,00	445.526,00
3	Malangsari	5.591.292,00	5.140.766,00	450.526,00
4	Bintangresmi	5.974.292,00	5.493.766,00	480.526,00
5	Talagahiyang	5.292.292,00	4.870.766,00	421.526,00
6	Luhurjaya	6.678.292,00	6.138.766,00	539.526,00
7	Haurgajrug	8.216.292,00	7.553.766,00	662.526,00
8	Giriharja	6.036.292,00	5.534.766,00	501.526,00
9	Sukasari	7.282.292,00	6.712.766,00	569.526,00
10	Jayapura	5.528.292,00	5.082.766,00	445.526,00
11	Sipayung	6.057.292,00	5.568.766,00	488.526,00
12	Bintangsari	5.274.292,00	4.849.766,00	424.526,00
13	Pasirhaur	5.415.292,00	4.978.766,00	436.526,00
14	Harumsari	5.673.292,00	5.215.766,00	457.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**62.985.504,00**	**57.907.192,00**	**5.078.312,00**
1	Pasireurih	5.721.292,00	5.260.766,00	460.526,00
2	Ciminyak	6.291.292,00	5.782.766,00	508.526,00
3	Muncang	5.405.292,00	4.969.766,00	435.526,00
4	Leuwicoo	5.138.292,00	4.723.766,00	414.526,00
5	Sindangwangi	5.024.292,00	4.619.766,00	404.526,00
6	Cikarang	5.200.292,00	4.780.766,00	419.526,00
7	Sukanagara	5.125.292,00	4.711.766,00	413.526,00
8	Pasirnangka	5.273.292,00	4.847.766,00	425.526,00
9	Jagaraksa	4.952.292,00	4.552.766,00	399.526,00
10	Tanjungwangi	5.027.292,00	4.621.766,00	405.526,00
11	Mekarwangi	5.011.292,00	4.607.766,00	403.526,00
12	Girijagabaya	4.815.292,00	4.427.766,00	387.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**69.008.212,00**	**67.089.192,00**	**1.919.020,00**
1	Kanekes	-	3.647.766,00	- 3.647.766,00
2	Cisimeut	6.757.292,00	6.211.766,00	545.526,00
3	Cibungur	7.622.292,00	7.007.766,00	614.526,00
4	Leuwidamar	6.669.292,00	6.130.766,00	538.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
5	Lebakparahiang	6.351.292,00	5.838.766,00	512.526,00
6	Sangkanwangi	6.165.292,00	5.667.766,00	497.526,00
7	Nayagati	6.389.292,00	5.873.766,00	515.526,00
8	Bojongmenteng	6.224.292,00	5.722.766,00	501.526,00
9	Margawangi	5.218.292,00	4.797.766,00	420.526,00
10	Wantisari	5.391.292,00	4.955.766,00	435.526,00
11	Jalupangmulya	6.058.292,00	5.570.766,00	487.526,00
12	Cisimeut Raya	6.161.292,00	5.663.766,00	497.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**52.409.628,00**	**48.188.894,00**	**4.220.734,00**
1	Bojongmanik	5.908.292,00	5.435.766,00	472.526,00
2	Harjawana	6.135.292,00	5.640.766,00	494.526,00
3	Kadurahayu	5.348.292,00	4.917.766,00	430.526,00
4	Cimayang	6.674.292,00	6.134.766,00	539.526,00
5	Parakanbeusi	6.567.292,00	6.037.766,00	529.526,00
6	Keboncau	5.565.292,00	5.116.766,00	448.526,00
7	Mekarmanik	6.325.292,00	5.815.766,00	509.526,00
8	Mekar Rahayu	5.066.292,00	4.657.766,00	408.526,00
9	Pasirbitung	4.819.292,00	4.431.766,00	387.526,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**70.486.504,00**	**64.783.192,00**	**5.703.312,00**
1	Gunungkencana	6.301.292,00	5.792.766,00	508.526,00
2	Cimanyangray	6.070.292,00	5.581.766,00	488.526,00
3	Gunungkendeng	5.336.292,00	4.905.766,00	430.526,00
4	Cisampang	5.705.292,00	5.244.766,00	460.526,00
5	Ciginggang	6.389.292,00	5.873.766,00	515.526,00
6	Ciakar	6.714.292,00	6.171.766,00	542.526,00
7	Cicaringin	6.254.292,00	5.750.766,00	503.526,00
8	Bulakan	5.357.292,00	4.924.766,00	432.526,00
9	Sukanegara	5.599.292,00	5.147.766,00	451.526,00
10	Bojongkoneng	5.718.292,00	5.257.766,00	460.526,00
11	Kramatjaya	5.818.292,00	5.329.766,00	488.526,00
12	Tanjungsari Indah	5.222.292,00	4.801.766,00	420.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**115.170.840,00**	**105.884.320,00**	**9.286.520,00**
1	Kerta	5.476.292,00	5.034.766,00	441.526,00
2	Bojongjuruh	6.036.292,00	5.549.766,00	486.526,00
3	Leuwiipuh	5.864.292,00	5.391.766,00	472.526,00
4	Lebakkeusik	5.438.292,00	4.999.766,00	438.526,00
5	Cilegongilir	6.277.292,00	5.769.766,00	507.526,00
6	Keusik	6.232.292,00	5.728.766,00	503.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
7	Cibaturkeusik	5.216.292,00	4.795.766,00	420.526,00
8	Kumpay	5.998.292,00	5.514.766,00	483.526,00
9	Jalupanggirang	5.740.292,00	5.277.766,00	462.526,00
10	Bendungan	6.057.292,00	5.569.766,00	487.526,00
11	Kertaraharja	6.248.292,00	5.745.766,00	502.526,00
12	Cisampih	5.941.292,00	5.461.766,00	479.526,00
13	Gunungsari	5.531.292,00	5.085.766,00	445.526,00
14	Tamansari	6.238.292,00	5.734.766,00	503.526,00
15	Cidahu	6.402.292,00	5.885.766,00	516.526,00
16	Ciruji	5.725.292,00	5.262.766,00	462.526,00
17	Kaduhauk	4.776.292,00	4.391.766,00	384.526,00
18	Labanjaya	5.362.292,00	4.929.766,00	432.526,00
19	Umbuljaya	5.884.292,00	5.409.766,00	474.526,00
20	Kertarahayu	4.724.292,00	4.343.766,00	380.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**78.025.504,00**	**71.725.192,00**	**6.300.312,00**
1	Pasindangan	6.145.292,00	5.648.766,00	496.526,00
2	Parungkujang	7.590.292,00	6.976.766,00	613.526,00
3	Cileles	6.709.292,00	6.167.766,00	541.526,00
4	Cikareo	6.091.292,00	5.597.766,00	493.526,00
5	Cipadang	6.922.292,00	6.363.766,00	558.526,00
6	Gumuruh	6.807.292,00	6.257.766,00	549.526,00
7	Prabugantungan	6.120.292,00	5.626.766,00	493.526,00
8	Daroyon	5.430.292,00	4.991.766,00	438.526,00
9	Margamulya	6.540.292,00	6.012.766,00	527.526,00
10	Mekarjaya	6.650.292,00	6.112.766,00	537.526,00
11	Kujangsari	6.306.292,00	5.797.766,00	508.526,00
12	Banjarsari	6.712.292,00	6.170.766,00	541.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**99.969.964,00**	**91.937.022,00**	**8.032.942,00**
1	Sarageni	5.978.292,00	5.496.766,00	481.526,00
2	Gununganten	5.845.292,00	5.357.766,00	487.526,00
3	Sudamanik	6.029.292,00	5.522.766,00	506.526,00
4	Tambak	6.245.292,00	5.770.766,00	474.526,00
5	Cimarga	5.502.292,00	5.005.766,00	496.526,00
6	Karyajaya	6.497.292,00	6.010.766,00	486.526,00
7	Margajaya	4.832.292,00	4.361.766,00	470.526,00
8	Jayamanik	6.071.292,00	5.581.766,00	489.526,00
9	Margaluyu	4.966.292,00	4.565.766,00	400.526,00
10	Margatirta	4.979.292,00	4.535.766,00	443.526,00
11	Intenjaya	6.332.292,00	5.849.766,00	482.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
12	Mekarjaya	6.854.292,00	6.316.766,00	537.526,00
13	Jayasari	6.826.292,00	6.314.766,00	511.526,00
14	Girimukti	6.443.292,00	5.987.766,00	455.526,00
15	Sangkanmanik	5.636.292,00	5.186.766,00	449.526,00
16	Sangiangjaya	5.542.292,00	5.117.766,00	424.526,00
17	Mekarmulya	5.388.292,00	4.953.766,00	434.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**94.794.380,00**	**87.133.490,00**	**7.660.890,00**
1	Maraya	5.703.292,00	5.242.766,00	460.526,00
2	Sajira	5.491.292,00	5.034.766,00	456.526,00
3	Sukarame	6.655.292,00	6.123.766,00	531.526,00
4	Calungbungur	6.643.292,00	6.108.766,00	534.526,00
5	Parungsari	6.150.292,00	5.654.766,00	495.526,00
6	Sindangsari	6.554.292,00	6.024.766,00	529.526,00
7	Mekarsari	8.146.292,00	7.486.766,00	659.526,00
8	Sukamarga	6.725.292,00	6.181.766,00	543.526,00
9	Pajagan	7.345.292,00	6.754.766,00	590.526,00
10	Sukajaya	5.362.292,00	4.920.766,00	441.526,00
11	Sajira Mekar	6.098.292,00	5.605.766,00	492.526,00
12	Paja	5.793.292,00	5.324.766,00	468.526,00
13	Margaluyu	5.684.292,00	5.224.766,00	459.526,00
14	Bungurmekar	5.864.292,00	5.394.766,00	469.526,00
15	Ciuyah	6.577.292,00	6.049.766,00	527.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**188.030.088,00**	**173.059.644,00**	**14.970.444,00**
1	Tanjungsari	6.380.292,00	5.866.766,00	513.526,00
2	Maja	9.399.292,00	8.640.766,00	758.526,00
3	Sangiang	7.630.292,00	6.998.766,00	631.526,00
4	Binong	8.378.292,00	7.702.766,00	675.526,00
5	Gubugan Cibeureum	6.172.292,00	5.678.766,00	493.526,00
6	Mekarsari	9.319.292,00	8.513.766,00	805.526,00
7	Padasuka	9.331.292,00	8.580.766,00	750.526,00
8	Curugbadak	39.874.292,00	36.743.766,00	3.130.526,00
9	Sindangmulya	8.083.292,00	7.432.766,00	650.526,00
10	Cilangkap	6.409.292,00	5.838.766,00	570.526,00
11	Pasirkembang	40.634.292,00	37.389.686,00	3.244.606,00
12	Pasirkecapi	6.303.292,00	5.799.766,00	503.526,00
13	Buyut Mekar	7.421.292,00	6.823.766,00	597.526,00
14	Maja Baru	22.693.292,00	21.048.766,00	1.644.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**85.945.212,00**	**79.066.426,00**	**6.878.786,00**

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasirtanjung	6.546.292,00	6.021.766,00	524.526,00
2	Citeras	8.145.292,00	7.496.766,00	648.526,00
3	Nameng	7.943.292,00	7.309.766,00	633.526,00
4	Kolelet Wetan	5.490.292,00	5.047.766,00	442.526,00
5	Jatimulya	7.434.292,00	6.832.766,00	601.526,00
6	Mekarsari	8.046.292,00	7.401.766,00	644.526,00
7	Pabuaran	4.945.292,00	4.531.766,00	413.526,00
8	Rangkasbitung Timur	13.796.292,00	12.713.766,00	1.082.526,00
9	Sukamanah	6.828.292,00	6.282.766,00	545.526,00
10	Cimangeunteung	6.922.292,00	6.366.766,00	555.526,00
11	Narimbang Mulia	9.847.292,00	9.060.766,00	786.526,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**73.591.504,00**	**67.655.192,00**	**5.936.312,00**
1	Sukarendah	7.896.292,00	7.269.766,00	626.526,00
2	Warunggunung	6.157.292,00	5.665.766,00	491.526,00
3	Cibuah	5.357.292,00	4.914.766,00	442.526,00
4	Pasir Tangkil	7.344.292,00	6.752.766,00	591.526,00
5	Baros	5.372.292,00	4.940.766,00	431.526,00
6	Banjarsari	4.751.292,00	4.353.766,00	397.526,00
7	Padasuka	6.367.292,00	5.855.766,00	511.526,00
8	Sukaraja	5.375.292,00	4.942.766,00	432.526,00
9	Jagabaya	5.464.292,00	5.022.766,00	441.526,00
10	Selaraja	7.891.292,00	7.257.766,00	633.526,00
11	Cempaka	5.659.292,00	5.203.766,00	455.526,00
12	Sindangsari	5.955.292,00	5.474.766,00	480.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**60.963.920,00**	**56.046.660,00**	**4.917.260,00**
1	Mekarjaya	4.939.292,00	4.541.766,00	397.526,00
2	Cipalabuh	6.996.292,00	6.430.766,00	565.526,00
3	Cijaku	6.231.292,00	5.729.766,00	501.526,00
4	Cibeureum	5.905.292,00	5.428.766,00	476.526,00
5	Ciapus	7.283.292,00	6.694.766,00	588.526,00
6	Kandangsapi	7.029.292,00	6.461.766,00	567.526,00
7	Cihujan	5.885.292,00	5.410.766,00	474.526,00
8	Cimenga	5.581.292,00	5.129.766,00	451.526,00
9	Kapunduhan	5.317.292,00	4.888.766,00	428.526,00
10	Sukasenang	5.795.292,00	5.329.766,00	465.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**75.789.796,00**	**69.675.958,00**	**6.113.838,00**
1	Anggalan	5.429.292,00	4.990.766,00	438.526,00
2	Muncangkopong	6.206.292,00	5.705.766,00	500.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
3	Sukaharja	5.062.292,00	4.654.766,00	407.526,00
4	Tamanjaya	5.259.292,00	4.834.766,00	424.526,00
5	Cigoong Utara	5.520.292,00	5.074.766,00	445.526,00
6	Muaradua	6.356.292,00	5.843.766,00	512.526,00
7	Cikulur	5.650.292,00	5.193.766,00	456.526,00
8	Curugpanjang	7.500.292,00	6.894.766,00	605.526,00
9	Cigoong Selatan	5.588.292,00	5.137.766,00	450.526,00
10	Sumurbandung	7.246.292,00	6.662.766,00	583.526,00
11	Parage	5.002.292,00	4.598.766,00	403.526,00
12	Sukadaya	5.832.292,00	5.361.766,00	470.526,00
13	Pasirgintung	5.136.292,00	4.721.766,00	414.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**91.177.380,00**	**83.848.490,00**	**7.328.890,00**
1	Tambakbaya	6.397.292,00	5.880.766,00	516.526,00
2	Kaduagung Timur	7.650.292,00	7.039.766,00	610.526,00
3	Panancangan	6.242.292,00	5.739.766,00	502.526,00
4	Cibadak	5.524.292,00	5.078.766,00	445.526,00
5	Asem	5.488.292,00	5.045.766,00	442.526,00
6	Cisangu	5.096.292,00	4.687.766,00	408.526,00
7	Kaduagung Barat	7.447.292,00	6.846.766,00	600.526,00
8	Bojongcae	5.460.292,00	5.019.766,00	440.526,00
9	Malabar	4.923.292,00	4.526.766,00	396.526,00
10	Pasar Keong	5.693.292,00	5.230.766,00	462.526,00
11	Bojong Leles	6.543.292,00	6.027.766,00	515.526,00
12	Cimenteng Jaya	4.662.292,00	4.286.766,00	375.526,00
13	Mekar Agung	6.495.292,00	5.970.766,00	524.526,00
14	Asem Margaluyu	5.619.292,00	5.166.766,00	452.526,00
15	Kaduagung Tengah	7.934.292,00	7.299.766,00	634.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**125.703.424,00**	**115.515.852,00**	**10.187.572,00**
1	Cibeber	5.825.292,00	5.352.766,00	472.526,00
2	Citorek Tengah	5.871.292,00	5.397.766,00	473.526,00
3	Cisungsang	5.102.292,00	4.690.766,00	411.526,00
4	Kujangjaya	6.168.292,00	5.669.766,00	498.526,00
5	Kujangsari	4.715.292,00	4.334.766,00	380.526,00
6	Neglasari	7.534.292,00	6.891.766,00	642.526,00
7	Mekarsari	5.997.292,00	5.512.766,00	484.526,00
8	Cikotok	4.940.292,00	4.541.766,00	398.526,00
9	Sukamulya	6.210.292,00	5.708.766,00	501.526,00
10	Citorek Timur	5.174.292,00	4.757.766,00	416.526,00
11	Warungbanten	6.680.292,00	6.141.766,00	538.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
12	Hegarmanah	6.761.292,00	6.216.766,00	544.526,00
13	Situmulya	5.087.292,00	4.676.766,00	410.526,00
14	Citorek Kidul	5.436.292,00	4.997.766,00	438.526,00
15	Cikadu	6.289.292,00	5.781.766,00	507.526,00
16	Sirnagalih	5.244.292,00	4.821.766,00	422.526,00
17	Cihambali	5.467.292,00	5.026.766,00	440.526,00
18	Citorek Barat	5.987.292,00	5.498.766,00	488.526,00
19	Gunungwangun	5.078.292,00	4.669.766,00	408.526,00
20	Wanasari	5.954.292,00	5.473.766,00	480.526,00
21	Citorek Sabrang	4.899.292,00	4.504.766,00	394.526,00
22	Ciherang	5.279.292,00	4.846.766,00	432.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**62.988.920,00**	**57.885.660,00**	**5.103.260,00**
1	Cilograng	5.716.292,00	5.239.766,00	476.526,00
2	Cibareno	5.686.292,00	5.227.766,00	458.526,00
3	Cikamunding	6.260.292,00	5.755.766,00	504.526,00
4	Cijengkol	8.018.292,00	7.371.766,00	646.526,00
5	Pasirbungur	5.902.292,00	5.426.766,00	475.526,00
6	Lebaktipar	7.630.292,00	7.014.766,00	615.526,00
7	Cikatomas	6.732.292,00	6.182.766,00	549.526,00
8	Girimukti	5.064.292,00	4.655.766,00	408.526,00
9	Cireundeu	6.446.292,00	5.924.766,00	521.526,00
10	Gunungbatu	5.532.292,00	5.085.766,00	446.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**78.119.796,00**	**1.781.958,00**	**76.337.838,00**
1	Wanasalam	6.922.292,00	6.337.766,00	584.526,00
2	Bejod	6.687.292,00	6.147.766,00	539.526,00
3	Cilangkap	5.252.292,00	4.828.766,00	423.526,00
4	Cipeucang	5.500.292,00	5.055.766,00	444.526,00
5	Muara	6.891.292,00	6.333.766,00	557.526,00
6	Parungpanjang	6.432.292,00	5.912.766,00	519.526,00
7	Cikeusik	5.897.292,00	5.421.766,00	475.526,00
8	Katapang	4.987.292,00	4.585.766,00	401.526,00
9	Cisarap	6.223.292,00	5.713.766,00	509.526,00
10	Sukatani	6.271.292,00	5.765.766,00	505.526,00
11	Cipedang	6.014.292,00	5.528.766,00	485.526,00
12	Parungsari	6.086.292,00	5.594.766,00	491.526,00
13	Karangpamindangan	4.954.292,00	4.554.766,00	399.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**52.640.920,00**	**48.409.660,00**	**4.231.260,00**
1	Ciparasi	5.342.292,00	4.909.766,00	432.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
2	Sobang	5.188.292,00	4.787.766,00	400.526,00
3	Sukajaya	5.137.292,00	4.726.766,00	410.526,00
4	Sindanglaya	5.282.292,00	4.842.766,00	439.526,00
5	Sukamaju	5.516.292,00	5.049.766,00	466.526,00
6	Hariang	5.277.292,00	4.856.766,00	420.526,00
7	Majasari	5.282.292,00	4.861.766,00	420.526,00
8	Sinar Jaya	5.408.292,00	4.962.766,00	445.526,00
9	Cirompang	5.054.292,00	4.654.766,00	399.526,00
10	Sukaresmi	5.152.292,00	4.756.766,00	395.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**82.969.920,00**	**76.296.660,00**	**6.673.260,00**
1	Guradog	12.098.292,00	11.119.766,00	978.526,00
2	Curugbitung	8.096.292,00	7.444.766,00	651.526,00
3	Candi	7.375.292,00	6.778.766,00	596.526,00
4	Mayak	7.274.292,00	6.687.766,00	586.526,00
5	Cipining	7.527.292,00	6.922.766,00	604.526,00
6	Cilayang	10.725.292,00	9.859.766,00	865.526,00
7	Ciburuy	9.628.292,00	8.859.766,00	768.526,00
8	Sekarwangi	6.921.292,00	6.371.766,00	549.526,00
9	Cidadap	6.907.292,00	6.350.766,00	556.526,00
10	Lebakasih	6.416.292,00	5.900.766,00	515.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**44.614.044,00**	**41.024.362,00**	**3.589.682,00**
1	Kalanganyar	5.157.292,00	4.744.766,00	412.526,00
2	Pasirkupa	6.281.292,00	5.773.766,00	507.526,00
3	Cilangkap	7.140.292,00	6.566.766,00	573.526,00
4	Aweh	7.385.292,00	6.794.766,00	590.526,00
5	Sangiangtanjung	6.152.292,00	5.657.766,00	494.526,00
6	Sukamekarsari	6.602.292,00	6.066.766,00	535.526,00
7	Cikatapis	5.895.292,00	5.419.766,00	475.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**33.733.752,00**	**31.012.596,00**	**2.721.156,00**
1	Banjaririgasi	5.769.292,00	5.303.766,00	465.526,00
2	Ciladaeun	5.190.292,00	4.771.766,00	418.526,00
3	Lebakgedong	5.985.292,00	5.502.766,00	482.526,00
4	Banjarsari	5.358.292,00	4.925.766,00	432.526,00
5	Lebaksitu	5.962.292,00	5.480.766,00	481.526,00
6	Lebaksangka	5.468.292,00	5.027.766,00	440.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**61.906.628,00**	**56.909.894,00**	**4.996.734,00**
1	Panyaungan	7.017.292,00	6.450.766,00	566.526,00
2	Cihara	6.484.292,00	5.961.766,00	522.526,00

BEBAN TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
3	Ciparahu	6.573.292,00	6.043.766,00	529.526,00
4	Pondokpanjang	8.996.292,00	8.267.766,00	728.526,00
5	Citeupuseun	6.597.292,00	6.064.766,00	532.526,00
6	Lebakpeundeuy	7.213.292,00	6.630.766,00	582.526,00
7	Mekarsari	8.462.292,00	7.778.766,00	683.526,00
8	Karangkamulyan	5.016.292,00	4.612.766,00	403.526,00
9	Barunai	5.546.292,00	5.098.766,00	447.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**60.403.920,00**	**55.529.660,00**	**4.874.260,00**
1	Datarcae	5.818.292,00	5.348.766,00	469.526,00
2	Cirinten	7.639.292,00	7.023.766,00	615.526,00
3	Karangnunggal	5.208.292,00	4.787.766,00	420.526,00
4	Kadudamas	6.277.292,00	5.770.766,00	506.526,00
5	Badur	6.593.292,00	6.060.766,00	532.526,00
6	Parakanlima	6.157.292,00	5.659.766,00	497.526,00
7	Nanggerang	5.454.292,00	5.013.766,00	440.526,00
8	Cempaka	6.035.292,00	5.548.766,00	486.526,00
9	Karoya	5.803.292,00	5.334.766,00	468.526,00
10	Cibarani	5.417.292,00	4.980.766,00	436.526,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**53.877.323,00**	**49.521.418,20**	**4.355.904,80**
1	Peucangpari	7.226.292,00	6.640.766,00	585.526,00
2	Cibungur	5.479.292,00	5.037.766,00	441.526,00
3	Mugijaya	5.636.292,00	5.181.766,00	454.526,00
4	Cikate	5.384.292,00	4.949.766,00	434.526,00
5	Cigemblong	6.458.292,00	5.937.766,00	520.526,00
6	Cikadongdong	7.005.292,00	6.439.766,00	565.526,00
7	Cikaret	6.298.292,00	5.789.766,00	508.526,00
8	Wangunjaya	4.365.987,00	4.007.290,20	358.696,80
9	Cikaratuan	6.023.292,00	5.536.766,00	486.526,00
JUMLAH		**2.244.164.683,00**	**2.067.067.884,20**	**177.096.798,80**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2024 sebesar Rp480.793.028.855,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.359.793.955,00 atau 2,42%, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp469.433.234.900,00, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.64 berikut:

Tabel 5.64
BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**14.825.956.000,00**	**14.498.317.000,00**	**327.639.000,00**
1	Cilangkahan	840.215.000,00	832.561.000,00	7.654.000,00
2	Pagelaran	1.085.039.000,00	1.078.644.000,00	6.395.000,00
3	Sukaraja	931.971.000,00	922.651.000,00	9.320.000,00
4	Malingping Utara	853.193.000,00	845.309.000,00	7.884.000,00
5	Bolang	1.056.356.000,00	1.050.961.000,00	5.395.000,00
6	Cipeundeuy	1.225.199.000,00	1.221.478.000,00	3.721.000,00
7	Rahong	1.029.134.000,00	1.021.785.000,00	7.349.000,00
8	Kadujajar	1.071.097.000,00	1.063.776.000,00	7.321.000,00
9	Kersaratu	1.248.697.000,00	1.253.057.000,00	(4.360.000,00)
10	Malingping Selatan	1.021.950.000,00	759.675.000,00	262.275.000,00
11	Sumberwaras	1.274.583.000,00	1.267.494.000,00	7.089.000,00
12	Sukamanah	1.027.671.000,00	1.019.909.000,00	7.762.000,00
13	Senanghati	993.343.000,00	988.461.000,00	4.882.000,00
14	Sangiang	1.167.508.000,00	1.172.556.000,00	(5.048.000,00)
	Pemerintahan Desa di KecamatanPanggarangan	**11.393.309.000,00**	**11.475.746.000,00**	**(82.437.000,00)**
1	Panggarangan	1.381.323.000,00	1.119.506.000,00	261.817.000,00
2	Jatake	907.624.000,00	900.468.000,00	7.156.000,00
3	Sogong	862.619.000,00	1.255.747.000,00	(393.128.000,00)
4	Cimandiri	1.107.784.000,00	1.100.447.000,00	7.337.000,00
5	Gununggede	1.173.547.000,00	1.032.561.000,00	140.986.000,00
6	Situregen	1.228.447.000,00	965.652.000,00	262.795.000,00
7	Mekarjaya	1.096.920.000,00	1.094.228.000,00	2.692.000,00
8	Sindangratu	909.839.000,00	1.302.690.000,00	(392.851.000,00)
9	Hegarmanah	785.147.000,00	778.812.000,00	6.335.000,00
10	Sukajadi	939.776.000,00	932.466.000,00	7.310.000,00
11	Cibarengkok	1.000.283.000,00	993.169.000,00	7.114.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**10.442.987.000,00**	**10.346.021.000,00**	**96.966.000,00**
1	Bayah Barat	1.149.853.000,00	885.782.000,00	264.071.000,00
2	Sawarna	1.144.909.000,00	1.128.500.000,00	16.409.000,00
3	Cidikit	1.007.412.000,00	1.261.418.000,00	(254.006.000,00)
4	Suwakan	855.724.000,00	848.619.000,00	7.105.000,00
5	Cimancak	848.284.000,00	1.101.258.000,00	(252.974.000,00)
6	Darmasari	790.591.000,00	783.146.000,00	7.445.000,00
7	Bayah Timur	1.164.858.000,00	901.201.000,00	263.657.000,00
8	Cisuren	845.650.000,00	837.567.000,00	8.083.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
9	Pasirgombong	769.866.000,00	742.174.000,00	27.692.000,00
10	Sawarna Timur	785.329.000,00	778.481.000,00	6.848.000,00
11	Pamubulan	1.080.511.000,00	1.077.875.000,00	2.636.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**14.705.414.000,00**	**15.259.673.000,00**	**(554.259.000,00)**
1	Cipanas	1.257.030.000,00	1.247.083.000,00	9.947.000,00
2	Girilaya	1.409.714.000,00	1.235.289.000,00	174.425.000,00
3	Malangsari	1.066.662.000,00	1.049.858.000,00	16.804.000,00
4	Bintangresmi	1.040.712.000,00	917.164.000,00	123.548.000,00
5	Talagahiyang	899.092.000,00	747.736.000,00	151.356.000,00
6	Luhurjaya	1.154.565.000,00	1.136.852.000,00	17.713.000,00
7	Haurgajrug	834.597.000,00	1.075.621.000,00	(241.024.000,00)
8	Giriharja	1.004.769.000,00	988.007.000,00	16.762.000,00
9	Sukasari	959.385.000,00	1.195.824.000,00	(236.439.000,00)
10	Jayapura	1.220.345.000,00	1.470.513.000,00	(250.168.000,00)
11	Sipayung	1.097.232.000,00	1.096.130.000,00	1.102.000,00
12	Bintangsari	790.629.000,00	783.353.000,00	7.276.000,00
13	Pasirhaur	972.964.000,00	1.208.723.000,00	(235.759.000,00)
14	Harumsari	997.718.000,00	1.107.520.000,00	(109.802.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**13.083.731.000,00**	**11.970.389.000,00**	**1.113.342.000,00**
1	Pasireurih	935.347.000,00	826.010.000,00	109.337.000,00
2	Ciminyak	827.308.000,00	783.652.000,00	43.656.000,00
3	Muncang	1.034.185.000,00	1.028.284.000,00	5.901.000,00
4	Leuwicoo	1.113.203.000,00	832.529.000,00	280.674.000,00
5	Sindangwangi	1.026.145.000,00	1.030.181.000,00	(4.036.000,00)
6	Cikarang	1.278.116.000,00	1.284.052.000,00	(5.936.000,00)
7	Sukanagara	1.126.493.000,00	1.094.272.000,00	32.221.000,00
8	Pasirnangka	1.183.457.000,00	969.487.000,00	213.970.000,00
9	Jagaraksa	995.590.000,00	932.466.000,00	63.124.000,00
10	Tanjungwangi	1.402.161.000,00	1.189.065.000,00	213.096.000,00
11	Mekarwangi	1.041.083.000,00	874.981.000,00	166.102.000,00
12	Girijagabaya	1.120.643.000,00	1.125.410.000,00	(4.767.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**13.368.359.000,00**	**13.311.189.000,00**	**57.170.000,00**
1	Kanekes	-	-	0,00
2	Cisimeut	1.468.814.000,00	1.318.488.000,00	150.326.000,00
3	Cibungur	1.188.031.000,00	1.276.657.000,00	(88.626.000,00)
4	Leuwidamar	1.538.001.000,00	1.382.033.000,00	155.968.000,00
5	Lebakparahiang	1.080.400.000,00	1.070.057.000,00	10.343.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
6	Sangkanwangi	1.166.278.000,00	1.149.963.000,00	16.315.000,00
7	Nayagati	1.533.413.000,00	1.269.762.000,00	263.651.000,00
8	Bojongmenteng	1.255.306.000,00	1.137.723.000,00	117.583.000,00
9	Margawangi	914.907.000,00	895.010.000,00	19.897.000,00
10	Wantisari	997.474.000,00	1.131.021.000,00	(133.547.000,00)
11	Jalupangmulya	1.150.956.000,00	1.509.664.000,00	(358.708.000,00)
12	Cisimeut Raya	1.074.779.000,00	1.170.811.000,00	(96.032.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**9.476.487.000,00**	**9.400.423.000,00**	**76.064.000,00**
1	Bojongmanik	789.473.000,00	783.613.000,00	5.860.000,00
2	Harjawana	1.207.092.000,00	1.213.347.000,00	(6.255.000,00)
3	Kadurahayu	1.027.488.000,00	1.032.982.000,00	(5.494.000,00)
4	Cimayang	1.101.500.000,00	1.103.832.000,00	(2.332.000,00)
5	Parakanbeusi	1.208.088.000,00	1.269.447.000,00	(61.359.000,00)
6	Keboncau	1.035.198.000,00	1.038.283.000,00	(3.085.000,00)
7	Mekarmanik	1.042.100.000,00	1.045.824.000,00	(3.724.000,00)
8	Mekar Rahayu	1.152.662.000,00	995.745.000,00	156.917.000,00
9	Pasirbitung	912.886.000,00	917.350.000,00	(4.464.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**12.715.037.000,00**	**12.643.820.000,00**	**71.217.000,00**
1	Gunungkencana	1.133.505.000,00	1.131.892.000,00	1.613.000,00
2	Cimanyangray	912.929.000,00	1.037.376.000,00	(124.447.000,00)
3	Gunungkendeng	809.283.000,00	803.130.000,00	6.153.000,00
4	Cisampang	1.154.701.000,00	1.003.472.000,00	151.229.000,00
5	Ciginggang	1.122.044.000,00	1.111.187.000,00	10.857.000,00
6	Ciakar	1.050.537.000,00	1.044.343.000,00	6.194.000,00
7	Cicaringin	1.353.702.000,00	1.092.937.000,00	260.765.000,00
8	Bulakan	1.096.049.000,00	1.228.240.000,00	(132.191.000,00)
9	Sukanegara	931.859.000,00	1.065.423.000,00	(133.564.000,00)
10	Bojongkoneng	889.632.000,00	882.978.000,00	6.654.000,00
11	Kramatjaya	1.401.101.000,00	1.389.714.000,00	11.387.000,00
12	Tanjungsari Indah	859.695.000,00	853.128.000,00	6.567.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**22.991.492.000,00**	**22.224.291.000,00**	**767.201.000,00**
1	Kerta	1.240.690.000,00	1.094.479.000,00	146.211.000,00
2	Bojongjuruh	1.073.772.000,00	1.183.595.000,00	(109.823.000,00)
3	Leuwiipuh	834.768.000,00	967.133.000,00	(132.365.000,00)
4	Lebakkeusik	1.054.711.000,00	1.155.092.000,00	(100.381.000,00)
5	Cilegongilir	998.325.000,00	1.002.794.000,00	(4.469.000,00)
6	Keusik	1.376.127.000,00	968.162.000,00	407.965.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
7	Cibaturkeusik	1.029.307.000,00	1.033.951.000,00	(4.644.000,00)
8	Kumpay	961.680.000,00	950.382.000,00	11.298.000,00
9	Jalupanggirang	1.136.534.000,00	1.141.446.000,00	(4.912.000,00)
10	Bendungan	916.738.000,00	1.170.152.000,00	(253.414.000,00)
11	Kertaraharja	1.311.131.000,00	1.315.480.000,00	(4.349.000,00)
12	Cisampih	1.438.996.000,00	1.448.146.000,00	(9.150.000,00)
13	Gunungsari	1.089.112.000,00	1.083.310.000,00	5.802.000,00
14	Tamansari	1.223.800.000,00	1.084.015.000,00	139.785.000,00
15	Cidahu	1.275.838.000,00	868.966.000,00	406.872.000,00
16	Ciruji	1.264.337.000,00	1.270.605.000,00	(6.268.000,00)
17	Kaduhauk	1.021.660.000,00	1.015.341.000,00	6.319.000,00
18	Labanjaya	1.167.828.000,00	1.026.373.000,00	141.455.000,00
19	Umbuljaya	1.531.894.000,00	1.395.954.000,00	135.940.000,00
20	Kertarahayu	1.044.244.000,00	1.048.915.000,00	(4.671.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**14.576.283.000,00**	**14.311.344.000,00**	**264.939.000,00**
1	Pasindangan	1.017.120.000,00	1.114.980.000,00	(97.860.000,00)
2	Parungkujang	1.635.753.000,00	1.629.550.000,00	6.203.000,00
3	Cileles	887.287.000,00	881.449.000,00	5.838.000,00
4	Cikareo	1.111.820.000,00	1.110.118.000,00	1.702.000,00
5	Cipadang	1.460.833.000,00	1.448.751.000,00	12.082.000,00
6	Gumuruh	1.299.998.000,00	1.274.864.000,00	25.134.000,00
7	Prabugantungan	1.245.072.000,00	1.241.265.000,00	3.807.000,00
8	Daroyon	1.174.223.000,00	1.164.678.000,00	9.545.000,00
9	Margamulya	1.249.156.000,00	977.646.000,00	271.510.000,00
10	Mekarjaya	1.019.169.000,00	1.012.298.000,00	6.871.000,00
11	Kujangsari	956.390.000,00	1.087.935.000,00	(131.545.000,00)
12	Banjarsari	1.519.462.000,00	1.367.810.000,00	151.652.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**19.339.747.000,00**	**19.735.406.000,00**	**(395.659.000,00)**
1	Sarageni	1.154.445.000,00	1.409.722.000,00	(255.277.000,00)
2	Gununganten	1.025.513.000,00	1.028.435.000,00	(2.922.000,00)
3	Sudamanik	1.082.602.000,00	1.076.915.000,00	5.687.000,00
4	Tambak	1.259.569.000,00	1.359.691.000,00	(100.122.000,00)
5	Cimarga	983.275.000,00	976.577.000,00	6.698.000,00
6	Karyajaya	1.421.110.000,00	1.157.568.000,00	263.542.000,00
7	Margajaya	1.191.480.000,00	1.445.617.000,00	(254.137.000,00)
8	Jayamanik	1.073.871.000,00	1.171.722.000,00	(97.851.000,00)
9	Margaluyu	1.211.771.000,00	1.215.725.000,00	(3.954.000,00)
10	Margatirta	1.058.964.000,00	1.157.929.000,00	(98.965.000,00)

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
11	Intenjaya	1.483.528.000,00	1.342.794.000,00	140.734.000,00
12	Mekarjaya	1.195.345.000,00	1.054.794.000,00	140.551.000,00
13	Jayasari	862.373.000,00	792.077.000,00	70.296.000,00
14	Girimukti	931.603.000,00	1.186.245.000,00	(254.642.000,00)
15	Sangkanmanik	1.305.700.000,00	1.159.761.000,00	145.939.000,00
16	Sangiangjaya	1.118.862.000,00	1.122.533.000,00	(3.671.000,00)
17	Mekarmulya	979.736.000,00	1.077.301.000,00	(97.565.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**15.994.096.000,00**	**16.420.429.000,00**	**(426.333.000,00)**
1	Maraya	1.524.079.000,00	1.667.254.000,00	(143.175.000,00)
2	Sajira	1.063.101.000,00	1.057.655.000,00	5.446.000,00
3	Sukarame	1.021.803.000,00	1.021.295.000,00	508.000,00
4	Calungbungur	1.051.756.000,00	1.057.029.000,00	(5.273.000,00)
5	Parungsari	1.032.865.000,00	975.664.000,00	57.201.000,00
6	Sindangsari	1.100.920.000,00	1.004.695.000,00	96.225.000,00
7	Mekarsari	947.755.000,00	1.200.549.000,00	(252.794.000,00)
8	Sukamarga	1.092.504.000,00	1.056.707.000,00	35.797.000,00
9	Pajagan	1.126.872.000,00	1.339.748.000,00	(212.876.000,00)
10	Sukajaya	926.505.000,00	1.072.963.000,00	(146.458.000,00)
11	Sajira Mekar	1.167.783.000,00	1.044.223.000,00	123.560.000,00
12	Paja	773.511.000,00	766.366.000,00	7.145.000,00
13	Margaluyu	1.268.527.000,00	1.273.979.000,00	(5.452.000,00)
14	Bungurmekar	813.823.000,00	810.215.000,00	3.608.000,00
15	Ciuyah	1.082.292.000,00	1.072.087.000,00	10.205.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**14.268.951.000,00**	**14.605.456.000,00**	**(336.505.000,00)**
1	Tanjungsari	888.297.000,00	1.140.204.000,00	(251.907.000,00)
2	Maja	2.114.681.000,00	1.857.628.000,00	257.053.000,00
3	Sangiang	896.437.000,00	888.499.000,00	7.938.000,00
4	Binong	966.978.000,00	1.215.746.000,00	(248.768.000,00)
5	Gubugan Cibeureum	870.808.000,00	863.025.000,00	7.783.000,00
6	Mekarsari	1.023.805.000,00	1.017.548.000,00	6.257.000,00
7	Padasuka	959.793.000,00	945.398.000,00	14.395.000,00
8	Curugbadak	939.095.000,00	926.759.000,00	12.336.000,00
9	Sindangmulya	1.079.403.000,00	1.066.046.000,00	13.357.000,00
10	Cilangkap	937.388.000,00	930.343.000,00	7.045.000,00
11	Pasirkembang	945.342.000,00	937.757.000,00	7.585.000,00
12	Pasirkecapi	861.740.000,00	1.109.769.000,00	(248.029.000,00)
13	Buyut Mekar	967.939.000,00	897.650.000,00	70.289.000,00
14	Maja Baru	817.245.000,00	809.084.000,00	8.161.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**11.478.570.000,00**	**11.286.772.000,00**	**191.798.000,00**
1	Pasirtanjung	1.071.909.000,00	1.201.671.000,00	(129.762.000,00)
2	Citeras	987.381.000,00	1.378.169.000,00	(390.788.000,00)
3	Nameng	948.401.000,00	938.407.000,00	9.994.000,00
4	Kolelet Wetan	1.119.154.000,00	856.638.000,00	262.516.000,00
5	Jatimulya	912.834.000,00	903.327.000,00	9.507.000,00
6	Mekarsari	1.164.496.000,00	903.244.000,00	261.252.000,00
7	Pabuaran	1.179.703.000,00	917.341.000,00	262.362.000,00
8	Rangkasbitung Timur	1.112.711.000,00	1.099.811.000,00	12.900.000,00
9	Sukamanah	894.277.000,00	1.146.546.000,00	(252.269.000,00)
10	Cimangeunteung	924.021.000,00	912.489.000,00	11.532.000,00
11	Narimbang Mulia	1.163.683.000,00	1.029.129.000,00	134.554.000,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**13.051.975.000,00**	**12.010.943.000,00**	**1.041.032.000,00**
1	Sukarendah	1.227.722.000,00	1.217.668.000,00	10.054.000,00
2	Warunggunung	1.125.055.000,00	861.426.000,00	263.629.000,00
3	Cibuah	892.371.000,00	883.644.000,00	8.727.000,00
4	Pasir Tangkil	868.724.000,00	861.077.000,00	7.647.000,00
5	Baros	1.001.695.000,00	849.404.000,00	152.291.000,00
6	Banjarsari	1.167.594.000,00	1.015.016.000,00	152.578.000,00
7	Padasuka	1.026.062.000,00	1.158.206.000,00	(132.144.000,00)
8	Sukaraja	1.139.070.000,00	1.132.677.000,00	6.393.000,00
9	Jagabaya	1.151.409.000,00	1.002.077.000,00	149.332.000,00
10	Selaraja	1.165.163.000,00	901.463.000,00	263.700.000,00
11	Cempaka	1.323.361.000,00	916.173.000,00	407.188.000,00
12	Sindangsari	963.749.000,00	1.212.112.000,00	(248.363.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**10.510.420.000,00**	**10.606.661.000,00**	**(96.241.000,00)**
1	Mekarjaya	876.882.000,00	774.878.000,00	102.004.000,00
2	Cipalabuh	1.060.557.000,00	1.314.431.000,00	(253.874.000,00)
3	Cijaku	1.006.683.000,00	994.825.000,00	11.858.000,00
4	Cibeureum	1.042.071.000,00	1.046.471.000,00	(4.400.000,00)
5	Ciapus	1.195.141.000,00	991.425.000,00	203.716.000,00
6	Kandangsapi	1.208.495.000,00	1.301.651.000,00	(93.156.000,00)
7	Cihujan	929.134.000,00	1.027.523.000,00	(98.389.000,00)
8	Cimenga	1.077.686.000,00	1.082.073.000,00	(4.387.000,00)
9	Kapunduhan	944.693.000,00	1.043.659.000,00	(98.966.000,00)
10	Sukasenang	1.169.078.000,00	1.029.725.000,00	139.353.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**13.182.214.000,00**	**13.931.714.000,00**	**(749.500.000,00)**
1	Anggalan	858.103.000,00	1.110.615.000,00	(252.512.000,00)
2	Muncangkopong	872.970.000,00	865.085.000,00	7.885.000,00
3	Sukaharja	853.779.000,00	1.086.591.000,00	(232.812.000,00)
4	Tamanjaya	881.125.000,00	870.255.000,00	10.870.000,00
5	Cigoong Utara	1.269.136.000,00	1.261.694.000,00	7.442.000,00
6	Muaradua	1.276.797.000,00	1.146.142.000,00	130.655.000,00
7	Cikulur	1.301.437.000,00	1.292.624.000,00	8.813.000,00
8	Curugpanjang	1.209.544.000,00	1.176.633.000,00	32.911.000,00
9	Cigoong Selatan	819.540.000,00	811.055.000,00	8.485.000,00
10	Sumurbandung	1.171.153.000,00	880.126.000,00	291.027.000,00
11	Parage	810.251.000,00	1.197.422.000,00	(387.171.000,00)
12	Sukadaya	944.537.000,00	1.186.318.000,00	(241.781.000,00)
13	Pasirgintung	913.842.000,00	1.047.154.000,00	(133.312.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**15.408.186.000,00**	**15.215.754.000,00**	**192.432.000,00**
1	Tambakbaya	1.166.548.000,00	1.412.011.000,00	(245.463.000,00)
2	Kaduagung Timur	884.826.000,00	1.138.368.000,00	(253.542.000,00)
3	Panancangan	837.451.000,00	829.420.000,00	8.031.000,00
4	Cibadak	1.138.398.000,00	985.955.000,00	152.443.000,00
5	Asem	998.810.000,00	845.540.000,00	153.270.000,00
6	Cisangu	1.134.616.000,00	1.124.706.000,00	9.910.000,00
7	Kaduagung Barat	946.306.000,00	918.336.000,00	27.970.000,00
8	Bojongcae	991.405.000,00	989.802.000,00	1.603.000,00
9	Malabar	1.249.459.000,00	1.109.081.000,00	140.378.000,00
10	Pasar Keong	924.096.000,00	915.771.000,00	8.325.000,00
11	Bojong Leles	902.690.000,00	1.137.391.000,00	(234.701.000,00)
12	Cimenteng Jaya	1.120.119.000,00	856.151.000,00	263.968.000,00
13	Mekar Agung	1.039.809.000,00	888.680.000,00	151.129.000,00
14	Asem Margaluyu	958.934.000,00	1.212.071.000,00	(253.137.000,00)
15	Kaduagung Tengah	1.114.719.000,00	852.471.000,00	262.248.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**19.044.644.000,00**	**19.421.294.000,00**	**(376.650.000,00)**
1	Cibeber	1.081.750.000,00	1.219.019.000,00	(137.269.000,00)
2	Citorek Tengah	978.854.000,00	825.149.000,00	153.705.000,00
3	Cisungsang	750.066.000,00	739.098.000,00	10.968.000,00
4	Kujangjaya	762.622.000,00	755.863.000,00	6.759.000,00
5	Kujangsari	816.016.000,00	808.361.000,00	7.655.000,00
6	Neglasari	1.078.065.000,00	927.244.000,00	150.821.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
7	Mekarsari	757.980.000,00	751.087.000,00	6.893.000,00
8	Cikotok	757.902.000,00	751.983.000,00	5.919.000,00
9	Sukamulya	807.291.000,00	800.164.000,00	7.127.000,00
10	Citorek Timur	772.990.000,00	1.166.386.000,00	(393.396.000,00)
11	Warungbanten	908.327.000,00	839.014.000,00	69.313.000,00
12	Hegarmanah	913.667.000,00	902.532.000,00	11.135.000,00
13	Situmulya	861.878.000,00	854.541.000,00	7.337.000,00
14	Citorek Kidul	821.070.000,00	951.595.000,00	(130.525.000,00)
15	Cikadu	823.716.000,00	915.868.000,00	(92.152.000,00)
16	Sirnagalih	854.191.000,00	846.864.000,00	7.327.000,00
17	Cihambali	988.365.000,00	981.795.000,00	6.570.000,00
18	Citorek Barat	957.927.000,00	805.421.000,00	152.506.000,00
19	Gunungwangun	821.757.000,00	815.600.000,00	6.157.000,00
20	Wanasari	897.637.000,00	746.477.000,00	151.160.000,00
21	Citorek Sabrang	798.352.000,00	1.191.003.000,00	(392.651.000,00)
22	Ciherang	834.221.000,00	826.230.000,00	7.991.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**10.629.765.000,00**	**9.948.203.000,00**	**681.562.000,00**
1	Cilograng	880.986.000,00	875.100.000,00	5.886.000,00
2	Cibareno	1.306.279.000,00	900.375.000,00	405.904.000,00
3	Cikamunding	957.765.000,00	1.212.699.000,00	(254.934.000,00)
4	Cijengkol	1.346.514.000,00	1.223.801.000,00	122.713.000,00
5	Pasirbungur	1.208.313.000,00	1.054.731.000,00	153.582.000,00
6	Lebaktipar	918.224.000,00	910.628.000,00	7.596.000,00
7	Cikatomas	888.542.000,00	881.208.000,00	7.334.000,00
8	Girimukti	1.087.310.000,00	1.092.127.000,00	(4.817.000,00)
9	Cireundeu	1.251.431.000,00	984.755.000,00	266.676.000,00
10	Gunungbatu	784.401.000,00	812.779.000,00	(28.378.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**15.872.474.000,00**	**15.879.651.000,00**	**(7.177.000,00)**
1	Wanasalam	1.555.257.000,00	1.293.943.000,00	261.314.000,00
2	Bejod	1.136.191.000,00	1.254.116.000,00	(117.925.000,00)
3	Cilangkap	1.278.111.000,00	1.280.404.000,00	(2.293.000,00)
4	Cipeucang	939.354.000,00	1.032.346.000,00	(92.992.000,00)
5	Muara	1.482.165.000,00	1.218.502.000,00	263.663.000,00
6	Parungpanjang	1.221.964.000,00	1.337.536.000,00	(115.572.000,00)
7	Cikeusik	1.214.397.000,00	1.210.470.000,00	3.927.000,00
8	Katapang	1.238.905.000,00	1.237.603.000,00	1.302.000,00
9	Cisarap	1.132.498.000,00	1.129.750.000,00	2.748.000,00
10	Sukatani	1.491.043.000,00	1.626.755.000,00	(135.712.000,00)

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
11	Cipedang	909.635.000,00	998.515.000,00	(88.880.000,00)
12	Parungsari	1.216.471.000,00	1.212.796.000,00	3.675.000,00
13	Karangpamindangan	1.056.483.000,00	1.046.915.000,00	9.568.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**9.750.652.000,00**	**9.659.371.000,00**	**91.281.000,00**
1	Ciparasi	861.464.000,00	993.577.000,00	(132.113.000,00)
2	Sobang	1.029.319.000,00	839.741.000,00	189.578.000,00
3	Sukajaya	881.494.000,00	752.924.000,00	128.570.000,00
4	Sindanglaya	1.005.365.000,00	853.433.000,00	151.932.000,00
5	Sukamaju	887.932.000,00	874.245.000,00	13.687.000,00
6	Hariang	1.119.907.000,00	1.458.630.000,00	(338.723.000,00)
7	Majasari	933.812.000,00	899.102.000,00	34.710.000,00
8	Sinar Jaya	1.078.634.000,00	938.332.000,00	140.302.000,00
9	Cirompang	816.978.000,00	1.070.202.000,00	(253.224.000,00)
10	Sukaresmi	1.135.747.000,00	979.185.000,00	156.562.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**9.341.557.000,00**	**9.529.821.000,00**	**(188.264.000,00)**
1	Guradog	904.390.000,00	1.157.645.000,00	(253.255.000,00)
2	Curugbitung	860.466.000,00	852.557.000,00	7.909.000,00
3	Candi	900.584.000,00	893.468.000,00	7.116.000,00
4	Mayak	755.460.000,00	748.391.000,00	7.069.000,00
5	Cipining	984.307.000,00	977.701.000,00	6.606.000,00
6	Cilayang	929.869.000,00	922.567.000,00	7.302.000,00
7	Ciburuy	1.130.989.000,00	1.123.295.000,00	7.694.000,00
8	Sekarwangi	1.171.947.000,00	1.165.426.000,00	6.521.000,00
9	Cidadap	940.538.000,00	932.953.000,00	7.585.000,00
10	Lebakasih	763.007.000,00	755.818.000,00	7.189.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**7.866.702.000,00**	**7.165.496.000,00**	**701.206.000,00**
1	Kalanganyar	1.125.128.000,00	863.912.000,00	261.216.000,00
2	Pasirkupa	1.441.512.000,00	1.181.457.000,00	260.055.000,00
3	Cilangkap	989.493.000,00	981.565.000,00	7.928.000,00
4	Aweh	891.129.000,00	882.653.000,00	8.476.000,00
5	Sangiangtanjung	1.124.027.000,00	1.377.240.000,00	(253.213.000,00)
6	Sukamekarsari	1.306.640.000,00	1.043.859.000,00	262.781.000,00
7	Cikatapis	988.773.000,00	834.810.000,00	153.963.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**5.766.198.000,00**	**5.435.198.000,00**	**331.000.000,00**
1	Banjaririgasi	1.046.554.000,00	1.032.418.000,00	14.136.000,00
2	Ciladaeun	1.005.120.000,00	852.774.000,00	152.346.000,00
3	Lebakgedong	852.240.000,00	844.306.000,00	7.934.000,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
4	Banjarsari	1.019.577.000,00	1.024.298.000,00	(4.721.000,00)
5	Lebaksitu	989.578.000,00	836.325.000,00	153.253.000,00
6	Lebaksangka	853.129.000,00	845.077.000,00	8.052.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**8.863.614.000,00**	**8.471.196.000,00**	**392.418.000,00**
1	Panyaungan	865.852.000,00	858.059.000,00	7.793.000,00
2	Cihara	857.503.000,00	849.931.000,00	7.572.000,00
3	Ciparahu	1.258.629.000,00	994.227.000,00	264.402.000,00
4	Pondokpanjang	1.231.675.000,00	965.775.000,00	265.900.000,00
5	Citeupuseun	906.530.000,00	912.381.000,00	(5.851.000,00)
6	Lebakpeundeuy	881.575.000,00	779.810.000,00	101.765.000,00
7	Mekarsari	945.778.000,00	938.488.000,00	7.290.000,00
8	Karangkamulyan	881.395.000,00	1.133.895.000,00	(252.500.000,00)
9	Barunai	1.034.677.000,00	1.038.630.000,00	(3.953.000,00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**9.275.841.000,00**	**9.563.412.000,00**	**(287.571.000,00)**
1	Datarcae	888.735.000,00	882.043.000,00	6.692.000,00
2	Cirinten	1.104.916.000,00	1.097.672.000,00	7.244.000,00
3	Karangnunggal	831.979.000,00	825.928.000,00	6.051.000,00
4	Kadudamas	845.968.000,00	838.805.000,00	7.163.000,00
5	Badur	904.296.000,00	899.479.000,00	4.817.000,00
6	Parakanlima	1.110.381.000,00	1.244.443.000,00	(134.062.000,00)
7	Nanggerang	1.058.529.000,00	1.158.780.000,00	(100.251.000,00)
8	Cempaka	890.663.000,00	989.727.000,00	(99.064.000,00)
9	Karoya	782.519.000,00	775.844.000,00	6.675.000,00
10	Cibarani	857.855.000,00	850.691.000,00	7.164.000,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**9.574.522.000,00**	**10.312.044.000,00**	**(737.522.000,00)**
1	Peucangpari	1.534.006.000,00	1.541.937.000,00	(7.931.000,00)
2	Cibungur	943.893.000,00	1.077.340.000,00	(133.447.000,00)
3	Mugijaya	945.707.000,00	1.088.965.000,00	(143.258.000,00)
4	Cikate	959.512.000,00	1.155.791.000,00	(196.279.000,00)
5	Cigemblong	1.075.417.000,00	1.209.809.000,00	(134.392.000,00)
6	Cikadongdong	1.002.882.000,00	1.059.081.000,00	(56.199.000,00)
7	Cikaret	966.274.000,00	969.630.000,00	(3.356.000,00)
8	Wangunjaya	1.118.266.000,00	1.176.715.000,00	(58.449.000,00)
9	Cikaratuan	1.028.565.000,00	1.032.776.000,00	(4.211.000,00)
JUMLAH		**356.799.183.000,00**	**354.640.034.000,00**	**2.159.149.000,00**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa pada Tahun 2024 sebesar Rp123.993.845.855,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.200.644.955,00 atau 8,01%, jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp114.793.200.900,00, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.65 berikut:

Tabel 5.65
BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**5.076.831.614,00**	**4.690.783.086,00**	**386.048.528,00**
1	Cilangkahan	351.701.901,00	324.958.649,00	26.743.252,00
2	Pagelaran	369.400.901,00	341.311.649,00	28.089.252,00
3	Sukaraja	374.245.901,00	345.787.649,00	28.458.252,00
4	Malingping Utara	350.353.901,00	323.712.649,00	26.641.252,00
5	Bolang	362.630.901,00	335.055.649,00	27.575.252,00
6	Cipeundeuy	358.877.901,00	331.588.649,00	27.289.252,00
7	Rahong	350.315.901,00	323.677.649,00	26.638.252,00
8	Kadujajar	381.004.901,00	352.032.649,00	28.972.252,00
9	Kersaratu	408.543.901,00	377.477.649,00	31.066.252,00
10	Malingping Selatan	341.960.901,00	315.957.649,00	26.003.252,00
11	Sumberwaras	381.617.901,00	352.598.649,00	29.019.252,00
12	Sukamanah	359.938.901,00	332.568.649,00	27.370.252,00
13	Senanghati	348.277.901,00	321.794.649,00	26.483.252,00
14	Sangiang	337.959.901,00	312.260.649,00	25.699.252,00
	Pemerintahan Desa di KecamatanPanggarangan	**4.178.135.911,00**	**3.860.424.139,00**	**317.711.772,00**
1	Panggarangan	372.709.901,00	344.368.649,00	28.341.252,00
2	Jatake	369.776.901,00	341.658.649,00	28.118.252,00
3	Sogong	373.102.901,00	344.731.649,00	28.371.252,00
4	Cimandiri	401.492.901,00	370.962.649,00	30.530.252,00
5	Gununggede	385.542.901,00	356.225.649,00	29.317.252,00
6	Situregen	409.700.901,00	378.546.649,00	31.154.252,00
7	Mekarjaya	399.100.901,00	368.752.649,00	30.348.252,00
8	Sindangratu	381.127.901,00	352.146.649,00	28.981.252,00
9	Hegarmanah	339.377.901,00	313.570.649,00	25.807.252,00
10	Sukajadi	374.284.901,00	345.823.649,00	28.461.252,00
11	Cibarengkok	371.917.901,00	343.636.649,00	28.281.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**4.302.991.511,00**	**3.975.267.139,00**	**327.724.372,00**
1	Bayah Barat	416.766.901,00	385.075.649,00	31.691.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
2	Sawarna	408.115.901,00	377.081.649,00	31.034.252,00
3	Cidikit	408.150.901,00	377.114.649,00	31.036.252,00
4	Suwakan	413.944.901,00	382.468.649,00	31.476.252,00
5	Cimancak	382.522.901,00	353.435.649,00	29.087.252,00
6	Darmasari	362.223.901,00	334.679.649,00	27.544.252,00
7	Bayah Timur	416.354.901,00	384.694.649,00	31.660.252,00
8	Cisuren	374.385.901,00	345.916.649,00	28.469.252,00
9	Pasirgombong	356.512.901,00	329.403.649,00	27.109.252,00
10	Sawarna Timur	353.959.901,00	327.043.649,00	26.916.252,00
11	Pamubulan	410.052.501,00	378.352.649,00	31.699.852,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**5.086.801.614,00**	**4.699.995.086,00**	**386.806.528,00**
1	Cipanas	371.487.901,00	343.239.649,00	28.248.252,00
2	Girilaya	370.658.901,00	342.473.649,00	28.185.252,00
3	Malangsari	345.357.901,00	319.096.649,00	26.261.252,00
4	Bintangresmi	351.252.901,00	324.543.649,00	26.709.252,00
5	Talagahiyang	342.151.901,00	316.134.649,00	26.017.252,00
6	Luhurjaya	399.727.901,00	369.331.649,00	30.396.252,00
7	Haurgajrug	386.178.901,00	356.813.649,00	29.365.252,00
8	Giriharja	358.185.901,00	330.948.649,00	27.237.252,00
9	Sukasari	391.049.901,00	361.313.649,00	29.736.252,00
10	Jayapura	348.207.901,00	321.729.649,00	26.478.252,00
11	Sipayung	369.815.901,00	341.694.649,00	28.121.252,00
12	Bintangsari	339.641.901,00	313.814.649,00	25.827.252,00
13	Pasirhaur	358.273.901,00	331.030.649,00	27.243.252,00
14	Harumsari	354.809.901,00	327.829.649,00	26.980.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**4.233.515.812,00**	**3.911.592.788,00**	**321.923.024,00**
1	Pasireurih	359.757.901,00	332.400.649,00	27.357.252,00
2	Ciminyak	358.504.901,00	331.243.649,00	27.261.252,00
3	Muncang	355.928.901,00	328.863.649,00	27.065.252,00
4	Leuwicoo	353.248.901,00	326.387.649,00	26.861.252,00
5	Sindangwangi	347.364.901,00	320.950.649,00	26.414.252,00
6	Cikarang	353.642.901,00	326.751.649,00	26.891.252,00
7	Sukanagara	359.425.901,00	332.094.649,00	27.331.252,00
8	Pasirnangka	346.161.901,00	319.838.649,00	26.323.252,00
9	Jagaraksa	348.627.901,00	322.117.649,00	26.510.252,00
10	Tanjungwangi	345.105.901,00	318.863.649,00	26.242.252,00
11	Mekarwangi	349.007.901,00	322.468.649,00	26.539.252,00
12	Girijagabaya	356.737.901,00	329.611.649,00	27.126.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**4.399.998.677,00**	**4.309.190.028,00**	**90.808.649,00**
1	Kanekes	261.101.766,00	485.022.889,00	-223.921.123,00
2	Cisimeut	409.218.901,00	378.100.649,00	31.118.252,00
3	Cibungur	379.647.901,00	350.778.649,00	28.869.252,00
4	Leuwidamar	387.209.901,00	357.765.649,00	29.444.252,00
5	Lebakparahiang	355.122.901,00	328.118.649,00	27.004.252,00
6	Sangkanwangi	387.768.901,00	358.282.649,00	29.486.252,00
7	Nayagati	389.083.901,00	359.497.649,00	29.586.252,00
8	Bojongmenteng	361.785.901,00	334.275.649,00	27.510.252,00
9	Margawangi	350.397.901,00	323.752.649,00	26.645.252,00
10	Wantisari	361.452.901,00	333.966.649,00	27.486.252,00
11	Jalupangmulya	380.227.901,00	351.314.649,00	28.913.252,00
12	Cisimeut Raya	376.979.901,00	348.313.649,00	28.666.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**3.235.279.109,00**	**2.989.263.841,00**	**246.015.268,00**
1	Bojongmanik	365.945.901,00	338.118.649,00	27.827.252,00
2	Harjawana	363.292.901,00	335.667.649,00	27.625.252,00
3	Kadurahayu	337.990.901,00	312.289.649,00	25.701.252,00
4	Cimayang	365.028.901,00	337.271.649,00	27.757.252,00
5	Parakanbeusi	375.564.901,00	347.006.649,00	28.558.252,00
6	Keboncau	372.419.901,00	344.100.649,00	28.319.252,00
7	Mekarmanik	377.830.901,00	349.099.649,00	28.731.252,00
8	Mekar Rahayu	333.867.901,00	308.479.649,00	25.388.252,00
9	Pasirbitung	343.336.901,00	317.229.649,00	26.107.252,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**4.295.971.812,00**	**3.969.300.788,00**	**326.671.024,00**
1	Gunungkencana	348.172.901,00	321.697.649,00	26.475.252,00
2	Cimanyangray	365.597.901,00	337.797.649,00	27.800.252,00
3	Gunungkendeng	340.995.901,00	315.065.649,00	25.930.252,00
4	Cisampang	342.943.901,00	316.865.649,00	26.078.252,00
5	Ciginggang	381.058.901,00	352.082.649,00	28.976.252,00
6	Ciakar	373.365.901,00	344.974.649,00	28.391.252,00
7	Cicaringin	367.441.901,00	339.501.649,00	27.940.252,00
8	Bulakan	355.493.901,00	328.461.649,00	27.032.252,00
9	Sukanegara	348.855.901,00	322.328.649,00	26.527.252,00
10	Bojongkoneng	342.406.901,00	316.369.649,00	26.037.252,00
11	Kramatjaya	393.297.901,00	363.390.649,00	29.907.252,00
12	Tanjungsari Indah	336.339.901,00	310.764.649,00	25.575.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**7.113.400.620,00**	**6.571.967.980,00**	**541.432.640,00**

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	Kerta	351.790.901,00	325.039.649,00	26.751.252,00
2	Bojongjuruh	359.990.901,00	332.616.649,00	27.374.252,00
3	Leuwiipuh	358.567.901,00	331.301.649,00	27.266.252,00
4	Lebakkeusik	354.704.901,00	327.732.649,00	26.972.252,00
5	Cilegongilir	355.451.901,00	328.422.649,00	27.029.252,00
6	Keusik	349.484.901,00	322.909.649,00	26.575.252,00
7	Cibaturkeusik	336.083.901,00	310.527.649,00	25.556.252,00
8	Kumpay	366.756.901,00	338.867.649,00	27.889.252,00
9	Jalupanggirang	344.849.901,00	318.626.649,00	26.223.252,00
10	Bendungan	366.269.901,00	338.417.649,00	27.852.252,00
11	Kertaraharja	411.364.901,00	380.084.649,00	31.280.252,00
12	Cisampih	357.511.901,00	330.326.649,00	27.185.252,00
13	Gunungsari	351.279.901,00	324.568.649,00	26.711.252,00
14	Tamansari	343.147.901,00	317.054.649,00	26.093.252,00
15	Cidahu	346.969.901,00	320.585.649,00	26.384.252,00
16	Ciruji	357.713.501,00	329.993.649,00	27.719.852,00
17	Kaduhauk	349.747.901,00	323.152.649,00	26.595.252,00
18	Labanjaya	344.744.901,00	318.530.649,00	26.214.252,00
19	Umbuljaya	357.691.901,00	330.492.649,00	27.199.252,00
20	Kertarahayu	349.275.901,00	322.715.649,00	26.560.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**4.462.450.812,00**	**4.123.118.788,00**	**339.332.024,00**
1	Pasindangan	388.635.901,00	359.083.649,00	29.552.252,00
2	Parungkujang	373.151.901,00	344.776.649,00	28.375.252,00
3	Cileles	354.461.901,00	327.507.649,00	26.954.252,00
4	Cikareo	367.152.901,00	339.234.649,00	27.918.252,00
5	Cipadang	391.975.901,00	362.169.649,00	29.806.252,00
6	Gumuruh	363.315.901,00	335.688.649,00	27.627.252,00
7	Prabugantungan	372.693.901,00	344.353.649,00	28.340.252,00
8	Daroyon	362.394.901,00	334.837.649,00	27.557.252,00
9	Margamulya	366.032.901,00	338.199.649,00	27.833.252,00
10	Mekarjaya	362.458.901,00	334.896.649,00	27.562.252,00
11	Kujangsari	370.696.901,00	342.508.649,00	28.188.252,00
12	Banjarsari	389.478.901,00	359.861.649,00	29.617.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**6.263.893.317,00**	**5.787.577.033,00**	**476.316.284,00**
1	Sarageni	338.905.901,00	313.134.649,00	25.771.252,00
2	Gununganten	359.844.901,00	332.482.649,00	27.362.252,00
3	Sudamanik	389.749.901,00	360.112.649,00	29.637.252,00
4	Tambak	371.798.901,00	343.526.649,00	28.272.252,00
5	Cimarga	382.484.901,00	353.400.649,00	29.084.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
6	Karyajaya	373.566.901,00	345.160.649,00	28.406.252,00
7	Margajaya	411.244.901,00	379.972.649,00	31.272.252,00
8	Jayamanik	378.128.901,00	349.375.649,00	28.753.252,00
9	Margaluyu	356.975.901,00	329.830.649,00	27.145.252,00
10	Margatirta	366.462.901,00	338.596.649,00	27.866.252,00
11	Intenjaya	360.910.901,00	333.466.649,00	27.444.252,00
12	Mekarjaya	353.637.901,00	326.746.649,00	26.891.252,00
13	Jayasari	344.456.901,00	318.264.649,00	26.192.252,00
14	Girimukti	373.321.901,00	344.933.649,00	28.388.252,00
15	Sangkanmanik	361.436.901,00	333.952.649,00	27.484.252,00
16	Sangiangjaya	369.935.901,00	341.804.649,00	28.131.252,00
17	Mekarmulya	371.028.901,00	342.814.649,00	28.214.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**5.444.864.515,00**	**5.030.830.735,00**	**414.033.780,00**
1	Maraya	370.909.901,00	342.705.649,00	28.204.252,00
2	Sajira	346.730.901,00	320.364.649,00	26.366.252,00
3	Sukarame	379.216.901,00	350.380.649,00	28.836.252,00
4	Calungbungur	361.877.901,00	334.360.649,00	27.517.252,00
5	Parungsari	366.833.901,00	338.938.649,00	27.895.252,00
6	Sindangsari	368.678.901,00	340.644.649,00	28.034.252,00
7	Mekarsari	349.474.901,00	322.899.649,00	26.575.252,00
8	Sukamarga	370.896.901,00	342.692.649,00	28.204.252,00
9	Pajagan	379.603.901,00	350.738.649,00	28.865.252,00
10	Sukajaya	352.439.901,00	325.640.649,00	26.799.252,00
11	Sajira Mekar	361.666.901,00	334.165.649,00	27.501.252,00
12	Paja	329.781.901,00	304.705.649,00	25.076.252,00
13	Margaluyu	385.389.901,00	356.084.649,00	29.305.252,00
14	Bungurmekar	349.482.901,00	322.907.649,00	26.575.252,00
15	Ciuyah	371.878.901,00	343.600.649,00	28.278.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**5.012.031.614,00**	**4.630.910.086,00**	**381.121.528,00**
1	Tanjungsari	347.355.901,00	320.941.649,00	26.414.252,00
2	Maja	375.063.901,00	346.543.649,00	28.520.252,00
3	Sangiang	363.010.901,00	335.407.649,00	27.603.252,00
4	Binong	366.842.901,00	338.947.649,00	27.895.252,00
5	Gubugan Cibeureum	335.428.901,00	309.922.649,00	25.506.252,00
6	Mekarsari	351.182.901,00	324.478.649,00	26.704.252,00
7	Padasuka	378.544.901,00	349.759.649,00	28.785.252,00
8	Curugbadak	371.689.901,00	343.425.649,00	28.264.252,00
9	Sindangmulya	363.648.901,00	335.996.649,00	27.652.252,00
10	Cilangkap	352.340.901,00	325.548.649,00	26.792.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
11	Pasirkembang	359.540.901,00	332.200.649,00	27.340.252,00
12	Pasirkecapi	344.222.901,00	318.047.649,00	26.175.252,00
13	Buyut Mekar	345.514.901,00	319.241.649,00	26.273.252,00
14	Maja Baru	357.642.901,00	330.447.649,00	27.195.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**4.284.366.911,00**	**3.958.576.139,00**	**325.790.772,00**
1	Pasirtanjung	387.878.901,00	358.384.649,00	29.494.252,00
2	Citeras	422.138.901,00	390.038.649,00	32.100.252,00
3	Nameng	402.829.901,00	372.197.649,00	30.632.252,00
4	Kolelet Wetan	358.443.901,00	331.187.649,00	27.256.252,00
5	Jatimulya	390.125.901,00	360.460.649,00	29.665.252,00
6	Mekarsari	374.566.901,00	346.083.649,00	28.483.252,00
7	Pabuaran	358.380.901,00	331.128.649,00	27.252.252,00
8	Rangkasbitung Timur	453.788.901,00	419.281.649,00	34.507.252,00
9	Sukamanah	364.883.901,00	337.137.649,00	27.746.252,00
10	Cimangeunteung	373.578.901,00	345.171.649,00	28.407.252,00
11	Narimbang Mulia	397.749.901,00	367.503.649,00	30.246.252,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**4.436.021.812,00**	**4.098.699.788,00**	**337.322.024,00**
1	Sukarendah	388.119.901,00	358.606.649,00	29.513.252,00
2	Warunggunung	364.880.901,00	337.134.649,00	27.746.252,00
3	Cibuah	382.878.901,00	353.764.649,00	29.114.252,00
4	Pasir Tangkil	368.716.901,00	340.679.649,00	28.037.252,00
5	Baros	341.852.901,00	315.857.649,00	25.995.252,00
6	Banjarsari	389.981.901,00	360.326.649,00	29.655.252,00
7	Padasuka	391.933.901,00	362.130.649,00	29.803.252,00
8	Sukaraja	391.279.901,00	361.525.649,00	29.754.252,00
9	Jagabaya	371.033.901,00	342.819.649,00	28.214.252,00
10	Selaraja	360.800.901,00	333.364.649,00	27.436.252,00
11	Cempaka	346.769.901,00	320.401.649,00	26.368.252,00
12	Sindangsari	337.771.901,00	312.087.649,00	25.684.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**3.510.686.010,00**	**3.243.728.490,00**	**266.957.520,00**
1	Mekarjaya	343.940.901,00	317.786.649,00	26.154.252,00
2	Cipalabuh	366.201.901,00	338.354.649,00	27.847.252,00
3	Cijaku	343.626.901,00	317.496.649,00	26.130.252,00
4	Cibeureum	342.565.901,00	316.516.649,00	26.049.252,00
5	Ciapus	360.270.901,00	332.875.649,00	27.395.252,00
6	Kandangsapi	374.983.901,00	346.469.649,00	28.514.252,00
7	Cihujan	342.944.901,00	316.867.649,00	26.077.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
8	Cimenga	344.461.901,00	318.268.649,00	26.193.252,00
9	Kapunduhan	341.274.901,00	315.323.649,00	25.951.252,00
10	Sukasenang	350.413.901,00	323.768.649,00	26.645.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**4.623.476.313,00**	**4.271.380.437,00**	**352.095.876,00**
1	Anggalan	354.467.501,00	326.993.649,00	27.473.852,00
2	Muncangkopong	354.980.901,00	327.987.649,00	26.993.252,00
3	Sukaharja	334.406.901,00	308.977.649,00	25.429.252,00
4	Tamanjaya	344.606.901,00	318.401.649,00	26.205.252,00
5	Cigoong Utara	353.379.901,00	326.508.649,00	26.871.252,00
6	Muaradua	375.365.901,00	346.822.649,00	28.543.252,00
7	Cikulur	352.153.901,00	325.375.649,00	26.778.252,00
8	Curugpanjang	369.797.901,00	341.677.649,00	28.120.252,00
9	Cigoong Selatan	347.440.901,00	321.021.649,00	26.419.252,00
10	Sumurbandung	394.572.901,00	364.568.649,00	30.004.252,00
11	Parage	338.383.901,00	312.652.649,00	25.731.252,00
12	Sukadaya	363.528.901,00	335.885.649,00	27.643.252,00
13	Pasirgintung	340.389.901,00	314.506.649,00	25.883.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**5.431.836.515,00**	**5.018.790.735,00**	**413.045.780,00**
1	Tambakbaya	382.947.901,00	353.828.649,00	29.119.252,00
2	Kaduagung Timur	381.449.901,00	352.443.649,00	29.006.252,00
3	Panancangan	341.999.901,00	315.993.649,00	26.006.252,00
4	Cibadak	363.020.901,00	335.416.649,00	27.604.252,00
5	Asem	344.186.901,00	318.014.649,00	26.172.252,00
6	Cisangu	351.539.901,00	324.807.649,00	26.732.252,00
7	Kaduagung Barat	366.509.901,00	338.639.649,00	27.870.252,00
8	Bojongcae	345.597.901,00	319.317.649,00	26.280.252,00
9	Malabar	350.618.901,00	323.957.649,00	26.661.252,00
10	Pasar Keong	363.144.901,00	335.530.649,00	27.614.252,00
11	Bojong Leles	410.753.901,00	379.519.649,00	31.234.252,00
12	Cimenteng Jaya	326.666.901,00	301.826.649,00	24.840.252,00
13	Mekar Agung	378.434.901,00	349.657.649,00	28.777.252,00
14	Asem Margaluyu	355.149.901,00	328.143.649,00	27.006.252,00
15	Kaduagung Tengah	369.813.901,00	341.692.649,00	28.121.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**7.957.793.422,00**	**7.352.151.278,00**	**605.642.144,00**
1	Cibeber	386.952.901,00	357.528.649,00	29.424.252,00
2	Citorek Tengah	402.594.901,00	371.980.649,00	30.614.252,00
3	Cisungsang	338.636.901,00	312.885.649,00	25.751.252,00
4	Kujangjaya	351.926.901,00	325.165.649,00	26.761.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
5	Kujangsari	347.122.901,00	320.727.649,00	26.395.252,00
6	Neglasari	385.923.901,00	356.577.649,00	29.346.252,00
7	Mekarsari	370.172.901,00	342.023.649,00	28.149.252,00
8	Cikotok	355.081.901,00	328.080.649,00	27.001.252,00
9	Sukamulya	357.175.901,00	330.015.649,00	27.160.252,00
10	Citorek Timur	361.125.901,00	333.665.649,00	27.460.252,00
11	Warungbanten	363.446.901,00	335.809.649,00	27.637.252,00
12	Hegarmanah	356.984.901,00	329.839.649,00	27.145.252,00
13	Situmulya	355.601.901,00	328.561.649,00	27.040.252,00
14	Citorek Kidul	375.156.901,00	346.629.649,00	28.527.252,00
15	Cikadu	366.473.901,00	338.606.649,00	27.867.252,00
16	Sirnagalih	363.882.901,00	336.212.649,00	27.670.252,00
17	Cihambali	349.255.501,00	322.178.649,00	27.076.852,00
18	Citorek Barat	358.676.901,00	331.402.649,00	27.274.252,00
19	Gunungwangun	341.342.901,00	315.386.649,00	25.956.252,00
20	Wanasari	357.035.901,00	329.886.649,00	27.149.252,00
21	Citorek Sabrang	356.620.901,00	329.502.649,00	27.118.252,00
22	Ciherang	356.598.901,00	329.482.649,00	27.116.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**3.833.922.260,00**	**3.528.717.490,00**	**305.204.770,00**
1	Cilograng	383.240.901,00	354.098.649,00	29.142.252,00
2	Cibareno	352.795.901,00	325.968.649,00	26.827.252,00
3	Cikamunding	379.827.901,00	350.945.649,00	28.882.252,00
4	Cijengkol	412.093.901,00	380.757.649,00	31.336.252,00
5	Pasirbungur	432.617.901,00	399.720.649,00	32.897.252,00
6	Lebaktipar	383.492.851,00	344.604.649,00	38.888.202,00
7	Cikatomas	389.337.901,00	359.731.649,00	29.606.252,00
8	Girimukti	369.662.901,00	341.552.649,00	28.110.252,00
9	Cireundeu	358.532.901,00	331.269.649,00	27.263.252,00
10	Gunungbatu	368.054.901,00	340.067.649,00	27.987.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**4.680.949.713,00**	**4.325.004.437,00**	**355.945.276,00**
1	Wanasalam	383.031.901,00	353.905.649,00	29.126.252,00
2	Bejod	379.681.901,00	350.810.649,00	28.871.252,00
3	Cilangkap	334.354.901,00	308.929.649,00	25.425.252,00
4	Cipeucang	348.135.901,00	321.663.649,00	26.472.252,00
5	Muara	404.680.901,00	373.907.649,00	30.773.252,00
6	Parungpanjang	361.343.901,00	333.866.649,00	27.477.252,00
7	Cikeusik	347.872.901,00	321.420.649,00	26.452.252,00
8	Katapang	348.708.901,00	322.192.649,00	26.516.252,00
9	Cisarap	362.950.901,00	335.351.649,00	27.599.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
10	Sukatani	370.195.901,00	342.045.649,00	28.150.252,00
11	Cipedang	357.193.901,00	330.032.649,00	27.161.252,00
12	Parungsari	339.124.901,00	313.337.649,00	25.787.252,00
13	Karangpamindangan	343.672.901,00	317.539.649,00	26.133.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**3.737.955.010,00**	**3.453.714.490,00**	**284.240.520,00**
1	Ciparasi	370.670.901,00	342.484.649,00	28.186.252,00
2	Sobang	396.727.901,00	366.559.649,00	30.168.252,00
3	Sukajaya	358.719.901,00	331.441.649,00	27.278.252,00
4	Sindanglaya	377.323.901,00	348.631.649,00	28.692.252,00
5	Sukamaju	400.580.901,00	370.120.649,00	30.460.252,00
6	Hariang	393.701.901,00	363.763.649,00	29.938.252,00
7	Majasari	373.532.901,00	345.128.649,00	28.404.252,00
8	Sinar Jaya	355.556.901,00	328.519.649,00	27.037.252,00
9	Cirompang	353.541.901,00	326.658.649,00	26.883.252,00
10	Sukaresmi	357.597.901,00	330.405.649,00	27.192.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**3.508.035.010,00**	**3.241.279.490,00**	**266.755.520,00**
1	Guradog	354.431.901,00	327.480.649,00	26.951.252,00
2	Curugbitung	340.284.901,00	314.409.649,00	25.875.252,00
3	Candi	344.631.901,00	318.425.649,00	26.206.252,00
4	Mayak	338.747.901,00	312.988.649,00	25.759.252,00
5	Cipining	354.386.901,00	327.438.649,00	26.948.252,00
6	Cilayang	348.597.901,00	322.090.649,00	26.507.252,00
7	Ciburuy	376.348.901,00	347.730.649,00	28.618.252,00
8	Sekarwangi	354.772.901,00	327.795.649,00	26.977.252,00
9	Cidadap	354.922.901,00	327.933.649,00	26.989.252,00
10	Lebakasih	340.908.901,00	314.985.649,00	25.923.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**2.576.878.307,00**	**2.380.928.543,00**	**195.949.764,00**
1	Kalanganyar	362.032.901,00	334.503.649,00	27.529.252,00
2	Pasirkupa	379.630.901,00	350.763.649,00	28.867.252,00
3	Cilangkap	367.521.901,00	339.575.649,00	27.946.252,00
4	Aweh	365.494.901,00	337.701.649,00	27.793.252,00
5	Sangiangtanjung	373.531.901,00	345.127.649,00	28.404.252,00
6	Sukamekarsari	379.936.901,00	351.045.649,00	28.891.252,00
7	Cikatapis	348.728.901,00	322.210.649,00	26.518.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**2.116.710.406,00**	**1.955.752.894,00**	**160.957.512,00**
1	Banjaririgasi	349.023.901,00	322.483.649,00	26.540.252,00
2	Ciladaeun	357.150.901,00	329.992.649,00	27.158.252,00
3	Lebakgedong	361.507.901,00	334.018.649,00	27.489.252,00

BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
4	Banjarsari	337.225.901,00	311.582.649,00	25.643.252,00
5	Lebaksitu	360.931.901,00	333.485.649,00	27.446.252,00
6	Lebaksangka	350.869.901,00	324.189.649,00	26.680.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**3.303.354.109,00**	**3.052.162.841,00**	**251.191.268,00**
1	Panyaungan	391.765.901,00	361.975.649,00	29.790.252,00
2	Cihara	347.202.901,00	320.800.649,00	26.402.252,00
3	Ciparahu	379.334.901,00	350.489.649,00	28.845.252,00
4	Pondokpanjang	382.794.901,00	353.686.649,00	29.108.252,00
5	Citeupuseun	346.785.901,00	320.415.649,00	26.370.252,00
6	Lebakpeundeuy	355.521.901,00	328.487.649,00	27.034.252,00
7	Mekarsari	386.465.901,00	357.078.649,00	29.387.252,00
8	Karangkamulyan	367.024.901,00	339.116.649,00	27.908.252,00
9	Barunai	346.456.901,00	320.111.649,00	26.345.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**3.712.053.010,00**	**3.429.782.490,00**	**282.270.520,00**
1	Datarcae	353.786.901,00	326.883.649,00	26.903.252,00
2	Cirinten	411.660.901,00	380.357.649,00	31.303.252,00
3	Karangnunggal	344.639.901,00	318.433.649,00	26.206.252,00
4	Kadudamas	388.688.901,00	359.131.649,00	29.557.252,00
5	Badur	365.764.901,00	337.951.649,00	27.813.252,00
6	Parakanlima	403.255.901,00	372.591.649,00	30.664.252,00
7	Nanggerang	378.633.901,00	349.842.649,00	28.791.252,00
8	Cempaka	353.034.901,00	326.189.649,00	26.845.252,00
9	Karoya	353.796.901,00	326.893.649,00	26.903.252,00
10	Cibarani	358.789.901,00	331.506.649,00	27.283.252,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**3.173.640.109,00**	**2.932.309.841,00**	**241.330.268,00**
1	Peucangpari	363.286.901,00	335.661.649,00	27.625.252,00
2	Cibungur	340.438.901,00	314.550.649,00	25.888.252,00
3	Mugijaya	341.468.901,00	315.502.649,00	25.966.252,00
4	Cikate	351.877.901,00	325.120.649,00	26.757.252,00
5	Cigemblong	357.167.901,00	330.008.649,00	27.159.252,00
6	Cikadongdong	353.020.901,00	326.176.649,00	26.844.252,00
7	Cikaret	354.961.901,00	327.969.649,00	26.992.252,00
8	Wangunjaya	353.592.901,00	326.704.649,00	26.888.252,00
9	Cikaratuan	357.823.901,00	330.614.649,00	27.209.252,00
JUMLAH		**123.993.845.855,00**	**114.793.200.900,00**	**9.200.644.955,00**

5.1.5.5 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan selisih antara Surplus/Defisit kegiatan Operasional dengan Surplus/Defisit kegiatan Non Operasional. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami defisit sebesar Rp158.857.128.217,08 yang diperoleh dari:

1. Defisit dari Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp154.331.008.179,64 diperoleh dari Pendapatan-LO dikurangi dengan Beban;
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO sebesar Rp4.526.120.037,44 diperoleh dari surplus non operasional-LO sebesar Rp1.456.172.013,24, defisit non operasional-LO sebesar Rp5.982.292.050,68. Surplus non operasional-LO sebesar Rp1.456.172.013,24 diperoleh dari:
   a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.084.936.100,00, rinciannya dapat dilihat pada tebel 5.66 berikut:

Tabel 5.66
SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
1	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Nissan / Terrano Granroad G 1	231.500.000,00	231.500.000,00	0,00	20.034.000,00	20.034.000,00
2	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: TOYOTA/KIJANG STANDART KF 70 SHORT	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	17.783.000,00	17.783.000,00
3	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kf 60 Standart	144.587.596,08	144.587.596,08	0,00	6.214.000,00	6.214.000,00
4	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Hylux	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	18.099.000,00	18.099.000,00
5	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang)	144.195.047,49	144.195.047,49	0,00	16.474.000,00	16.474.000,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
	Merk / Tipe: Toyota / KF 60 Standart					
6	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / P.U 1.8 Solid Kijang Standard KF 60	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	16.219.000,00	16.219.000,00
7	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / KF60 Standart	145.895.950,00	145.895.950,00	0,00	10.804.000,00	10.804.000,00
8	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Suzuki Mopen Jeep	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	26.491.000,00	26.491.000,00
9	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: SUZUKI / APV	116.510.000,00	116.510.000,00	0,00	6.742.990,00	6.742.990,00
10	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / P.U 1.8 Solid/ Standard KF 60	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	7.697.340,00	7.697.340,00
11	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: TOYOTA / KIJANG	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	6.308.350,00	6.308.350,00
12	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / KF 60 Standart	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	7.755.220,00	7.755.220,00
13	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / KF 60 Standart	146.405.800,00	146.405.800,00	0,00	8.473.200,00	8.473.200,00
14	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Hylux	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	7.755.220,00	7.755.220,00
15	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang)	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	6.308.350,00	6.308.350,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
	Merk / Tipe: TOYOTA / KIJANG 70 STD SHORT					
16	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: MITSUBISHI / COLT L 300	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	2.604.360,00	2.604.360,00
17	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kijang Pick up	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	1.215.370,00	1.215.370,00
18	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Pick Up	91.050.000,00	91.050.000,00	0,00	5.269.500,00	5.269.500,00
19	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kijang Pick Up	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	1.273.240,00	1.273.240,00
20	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kijang Pick Up	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	1.099.620,00	1.099.620,00
21	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kijang Pick Up	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	1.215.370,00	1.215.370,00
22	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Toyota / Kijang SX	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	5.787.480,00	5.787.480,00
23	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: Terrano / Nisan Spirit	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	10.243.830,00	10.243.830,00
24	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Penumpang) Merk / Tipe: TOYOTA / KIJANG STANDART	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	6.308.350,00	6.308.350,00
25	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	8.218.210,00	8.218.210,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
	Penumpang) Merk / Tipe: Suzuki ST 100					
26	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda / Megapro	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
27	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: VIAR KARYA / Roda Tiga	30.077.697,77	30.077.697,77	0,00	2.029.100,00	2.029.100,00
28	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: VIAR KARYA / Roda Tiga	30.077.697,77	30.077.697,77	0,00	2.029.100,00	2.029.100,00
29	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA / MEGA PRO	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	1.214.300,00	1.214.300,00
30	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	404.800,00	404.800,00
31	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
32	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: yamaha / Vega	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	809.500,00	809.500,00
33	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI / SMASH	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
34	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
35	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda MCB / Honda MCB	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	775.800,00	775.800,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
36	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
37	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
38	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Smash	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
39	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
40	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
41	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
42	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
43	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: suzuki / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
44	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI FL 125 SD / SUZUKI FL 125 SD	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	897.200,00	897.200,00
45	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI FL 125 SD / SUZUKI FL 125 SD	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	897.200,00	897.200,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
46	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI FL 125 SD / SUZUKI FL 125 SD	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	897.200,00	897.200,00
47	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI FL 125 SD / SUZUKI FL 125 SD	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	897.200,00	897.200,00
48	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: SUZUKI FL 125 SD / SUZUKI FL 125 SD	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	897.200,00	897.200,00
49	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA MEGAPRO / HONDA MEGAPRO	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
50	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA / MEGAPRO	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
51	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA / WIN	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	653.700,00	653.700,00
52	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda / Mega Pro	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
53	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda / Mega Pro	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
54	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda GL180D	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00
55	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
	Merk / Tipe: Suzuki / Thunder					
56	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: HONDA / WIN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	607.200,00	607.200,00
57	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda Win	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00
58	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda Win / Honda Win	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	640.900,00	640.900,00
59	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: sUZUKI / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
60	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Yamaha / VEGA RD	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
61	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: sUZUKI / Smash	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
62	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: sUZUKI / Thunder	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
63	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: Honda / Win	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
64	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: -	349.427.500,00	349.427.500,00	0,00	104.015.200,00	104.015.200,00
65	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: ISUZU	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	58.939.300,00	58.939.300,00
66	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	52.092.800,00	52.092.800,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
	Angkutan Barang) Merk / Tipe: HINO/WU342R-HKMQBD3/130 MD / M. BEBAN / LIGHT TRUCK DUMP					
67	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: HINO/WU342R-HKMQBD3/130 MD / M. BEBAN / LIGHT TRUCK DUMP	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	52.092.800,00	52.092.800,00
68	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: HINO/WU342R-HKMQBD3/130 MD / M. BEBAN / LIGHT TRUCK DUMP	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	52.092.800,00	52.092.800,00
69	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: HINO / FM1JNPD-RGJ (6X4) / Dump Truck	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	104.185.600,00	104.185.600,00
70	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: HINO / FM1JNPD-RGJ (6X4)/Dump Truck	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	104.185.600,00	104.185.600,00
71	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang) Merk / Tipe: Mitsubishi/FE 349 / Light Truck Dump	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	37.209.100,00	37.209.100,00
72	Peralatan dan Mesin (Alat Berat) Merk / Tipe: KOMATSU	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	54.563.900,00	54.563.900,00
73	Peralatan dan Mesin (Alat Berat) Merk / Tipe: KOMATSU / GD 305	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	43.651.100,00	43.651.100,00

SURPLUS PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	SURPLUS
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
74	Inventaris Kantor sebanyak 596 Unit	15.822.240.321,16	15.822.240.321,16	0,00	156.288.100,00	156.288.100,00
75	Bongkaran dari Gedung di RSUD dr. Adjidarmo	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00
JUMLAH		**22.945.557.610,27**	**22.945.557.610,27**	**0,00**	**1.084.936.100,00**	**1.084.936.100,00**

b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp371.235.913,24, terdiri dari:

1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp56.450.000,00 dengan rincian berikut;

a) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp51.000.000,00 adalah surplus perubahan nilai persediaan bibit ternak karena beranak;

b) Dinas Perikanan sebesar Rp5.450.000,00 adalah surplus perubahan nilai persediaan bibit ikan karena beranak

2) Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp314.785.913,24.

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp5.982.292.050,68 terdiri dari

a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesr Rp379.227.539,66 rinciannya dapat dilihat pada tebel 5.67 berikut:

Tabel 5.67
DEFISIT PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO
PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	DEFISIT
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
1	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Perorangan) Merk / Tipe: VIAR KARYA 150 L-2017 73161600-KDR-000217634	24.802.000,00	19.782.547,63	5.019.452,37	1.673.200,00	(3.346.252,37)
2	Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Berpenumpang) Merk / Tipe: TOYOTA	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	35.720.800,00	(84.279.200,00)

DEFISIT PENJUALAN/PERTUKARAN/PELEPASAN ASET NON LANCAR-LO PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PENJUALAN	DEFISIT
1	2	3	4	5=3-4	6	7=6-5
3	Inventaris Kantor sebanyak 100 Unit	578.611.507,01	440.266.127,05	138.345.379,96	5.714.800,00	(132.630.579,96)
4	Bongkaran dari Gedung di Kecamatan Lebakgedong	168.000.000,00	73.266.666,67	94.733.333,33	1.108.000,00	(93.625.333,33)
5	Hewan Ternak Potong	67.329.087,00	0,00	67.329.087,00	37.312.000,00	(65.346.174,00)
JUMLAH		**958.742.594,01**	**533.315.341,35**	**425.427.252,66**	**81.528.800,00**	**(379.227.539,66)**

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO (penurunan nilai investasi) sebesar Rp5.603.064.511,02

5.1.6 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 4.164.119.904.404,83 mengalami penurunan sebesar Rp356.947.208.786,55 atau 7,90% jika dibandingkan dengan nilai asset pada Tahun 2023 sebesar Rp4.521.067.113.191,39. Rincian asset dapat dilihat pada Tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
RINCIAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	215.101.419.937,53	216.787.031.179,64	(1.685.611.242,11)	(0,78)
2	Investasi Jangka Panjang	124.755.099.907,18	126.501.030.077,59	(1.745.930.170,41)	(1,38)
3	Aset Tetap	3.777.762.483.801,57	4.079.391.419.207,60	(301.628.935.406,03)	(7,39)
4	Dana Cadangan	0.00	47.000.000.000,00	(47.000.000.000,00)	(100,00)
5	Aset Lainnya	46.310.965.758,55	51.387.632.726,56	(5.076.666.968,01)	(9,88)

RINCIAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
6	Properti Investasi	189.935.000,00	0.00	189.935.000,00	100,00
JUMLAH		**4.164.119.904.404,83**	**4.521.067.113.191,39**	**(356.947.208.786,55)**	**(7,90)**

5.1.6.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp215.101.419.937,53 mengalami penurunan sebesar Rp1.685.611.242,11 atau 0,78% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar Tahun 2023 sebesar Rp216.787.031.179,64 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.69 sebagai berikut:

Tabel 5.69
RINCIAN ASET LANCAR
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	**Kas dan Setara Kas**	**45.586.207.092,12**	**74.349.041.364,20**	**(28.762.834.272,08)**	**(38,69)**
	a. Kas di Kas Daerah	29.443.222.757,92	48.118.166.745,00	(18.674.943.987,08)	(38,81)
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	112.455.000,00	112.444.635,00	10.365,00	0,01
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Kas di BLUD	12.183.369.009,00	20.332.580.527,00	(8.149.211.518,00)	(40,08)
	e. Kas Dana BOS	0,00	28.775.325,20	(28.775.325,20)	(100,00)
	f. Kas Lainnya	0,00	5.757.074.132,00	(5.757.074.132,00)	(100,00)
	g. Kas Dana BOSP	11.278.386,20	0,00	11.278.386,20	0,00
	h. Kas Dana BOK Puskesmas	3.835.881.939,00	0,00	3.835.881.939,00	0,00
2	**Piutang**	**69.899.184.519,05**	**51.067.888.735,61**	**18.831.295.783,40**	**36,88**
	a. Piutang Pajak Daerah	64.521.694.506,72	46.246.928.944,60	18.274.765.562,12	39,52
	b. Piutang Retribusi Daerah	14.483.055.054,00	380.775.800,00	14.102.279.254,00	3.703,56
	c. Piutang Lain- lain PAD yang Sah	9.723.382.124,64	11.075.387.960,64	(1.352.005.836,00)	(12,21)

RINCIAN ASET LANCAR
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
	d. Piutang Transfer Antar Daerah	4.097.245.190,00	8.816.470.322,40	(4.719.225.132,40)	(53,53)
	f. Piutang Lainnya	122.917.520,00	4.381.488.000,00	(4.258.570.480,00)	(97,19)
	g. Penyisihan Piutang	(23.049.109.876,31)	(19.833.162.291,03)	(3.215.947.584,32)	16,22
3	**Beban dibayar dimuka**	**560.716.426,35**	**406.248.834,00**	**154.467.592,35**	**38,02**
4	**Persediaan**	**99.055.311.900,01**	**90.963.852.245,82**	**8.091.459.654,19**	**8,90**
J U M L A H		**215.101.419.937,53**	**216.787.031.179,64**	**(1.685.611.242,11)**	**(0,78)**

5.1.6.1.1 Kas dan Setara Kas

Akun Kas dan Setara Kas meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas Di Bendahara BLUD, dan Kas di Kas Lainnya. Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp45.586.207.092,12, rincian Kas tersebut adalah:

1. Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp29.443.222.757,92 merupakan saldo pada Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Banten Cabang Rangkasbitung dengan Nomor rekening 0827777773. Silpa pada Kas di Kas Daerah terdapat kas yang dibatasi *(resrictedcash)* sebesar Rp4.039.980.666 yaitu:
   a. Silpa DAK Fisik sebesar Rp8.326.875,00 terdiri dari;
      1) DAK Penugasan Bidang Pendidikan sebesar Rp893.512,00;
      2) DAK Penugasan Bidang Kesehatan sebesar Rp1.500.554,00;
      3) DAK Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp3.620.000;
      4) DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.317.000;
      5) DAK Penugasan Bidang Air Minum sebesar Rp995.809,00.
   b. Silpa DAK Non Fisik sebesar Rp4.031.653.791 terdiri dari:
      1) Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp2.888.554.815,00;
      2) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah sebesar Rp8.500.000,00;
      3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya sebesar Rp38.042.140,00;

4) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp501.536.199,00;
5) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebesar Rp4.814.175,00;
6) Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp167.837.562,00;
7) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp49.160.690,00;
8) Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp287.936.640,00;
9) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp85.271.570,00;

2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Kas yang masih terdapat di bendahara penerimaan sampai Tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp112.455.000,00 yaitu:
   a. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp950.000,00 adalah atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya di lingkungan terminal;
   b. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas retribusi pelayanan pasar sebesar Rp90.533.000,00 terdiri dari Retribusi pelataran sebesar Rp43.954.635,00, Retribusi Kios sebesar Rp6.190.000, Retribusi Los sebesar Rp3.305.000, Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp46.946.000, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp34.092.000;
   c. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp96.000,00 adalah atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
   d. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp776.000,00 adalah atas Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
   e. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.200.000,00 adalah atas Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
   f. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp18.900.000,00 merupakan uang

jaminan sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dari penyewa yang di setorkan ke rekening kas bendahara penerimaan sebelum penyewa tersebut menempatinya.

3. Kas di BLUD Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.183.369.009,00 terdiri dari:
   a. Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Adjidarmo sebesar Rp4.391.353.728,00 terdapat pada:
      1) Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung dengan Rekening Nomor 0072438401001 sebesar Rp3.388.124.559,00;
      2) Bank Rakyat Indonesia cabang Rangkasbitung dengan Rekening Nomor 008001019088532 sebesar Rp486.180394,00;
      3) Bank Rakyat Indonesia cabang Rangkasbitung dengan Rekening Nomor 008001002653304 sebesar Rp499.000,00;
      4) Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank Jabar Banten cabang Rangkasbitung Rekening Nomor 0190010034243 sebesar Rp505.671.203,00;
      5) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.878.572,00.
   b. Kas di Badan Layanan Umum Daerah 42 Puskesmas sebesar Rp7.792.015.281,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.70 sebagai berikut:

Tabel 5.70
KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	SISA KAS 2024	SISA KAS 2023
1	2	3	4
1	Banjarsari	324.278.838,00	305.267.877,00
2	Baros	162.899.344,00	143.597.052,00
3	Bayah	305.580.402,00	127.654.699,00
4	Binuangeun	185.524.662,00	135.174.685,00
5	Bojongjuruh	519.372.974,00	537.619.030,00
6	Bojongmanik	181.718.405,00	147.019.807,00
7	Cibadak	365.020.892,00	505.096.059,00
8	Cibeber	210.914.637,00	188.180.041,00
9	Cigemblong	58.421.573,00	67.339.324,00
10	Cihara	148.783.910,00	141.416.431,00
11	Cijaku	98.470.504,00	104.888.819,00
12	Cikulur	281.665.866,00	300.660.243,00
13	Cileles	90.026.066,00	86.101.809,00
14	Cilograng	137.488.984,00	182.735.249,00

KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	SISA KAS 2024	SISA KAS 2023
1	2	3	4
15	Cimarga	124.794.042,00	141.340.955,00
16	Cipanas	150.296.043,00	340.110.732,00
17	Cipeundeuy	63.486.213,00	76.834.438,00
18	Cirinten	553.465.753,00	540.795.765,00
19	Cisimeut	136.945.849,00	175.727.604,00
20	Cisungsang	435.045.208,00	321.926.914,00
21	Citorek	85.570.309,00	81.597.475,00
22	Curugbitung	142.879.477,00	173.456.701,00
23	Gunungkencana	85.459.000,00	680.881.817,00
24	Kalanganyar	150.475.321,00	218.105.154,00
25	Kolelet	107.301.194,00	46.329.925,00
26	Lebakgedong	127.765.680,00	88.665.362,00
27	Leuwidamar	45.070.592,00	84.458.454,00
28	Maja	191.440.528,00	281.823.245,00
29	Malingping	264.314.131,00	374.894.260,00
30	Mandala	184.910.255,00	213.201.460,00
31	Mekarsari	187.881.627,00	141.466.138,00
32	Muncang	161.386.441,00	349.787.626,00
33	Pajagan	367.465.505,00	581.726.558,00
34	Pamandegan	113.314.755,00	80.001.693,00
35	Panggarangan	283.335.867,00	695.640.692,00
36	Parungsari	81.593.195,00	89.447.709,00
37	Prabugantungan	131.141.197,00	85.272.417,00
38	Rangkasbitung	160.987.213,00	143.370.227,00
39	Sajira	61.923.376,00	209.378.457,00
40	Sarageni	48.196.013,00	79.609.757,00
41	Sobang	112.026.140,00	320.691.783,00
42	Warunggunung	163.377.300,00	251.083.219,00
JUMLAH		**7.792.015.281,00**	**9.840.377.662,00**

Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CPA yaitu Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari RSUD dr. Adjidarmo dan 40 Puskesmas, tidak semua diaudit BLUD Puskesmas dikarenakan keterbatasan anggaran.

4. Kas Dana BOSP sebesar Rp11.278.386,20 merupakan kas Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri yang terdapat di Kabupaten Lebak dan dapat dilihat pada tabel 5.71 sebagai berikut:

Tabel 5.71
SISA KAS BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2024

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR KAS BOS TAHUN 2024
1	2	3	4
	SEKOLAH DASAR		
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Cimanyangray	Gunung Kencana	17.000,00
2	Sekolah Dasar Negeri 2 Kramatjaya	Gunung Kencana	24.000,00
3	Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja	Warunggunung	186.000,00
4	Sekolah Dasar Negeri 2 Sukarendah	Warunggunung	440,00
5	Sekolah Dasar Negeri 1 Kapunduh	Cijaku	350.520,00
6	Sekolah Dasar Negeri 2 Cibeureum	Cijaku	20.000,00
7	Sekolah Dasar Negeri 2 Parakanlima	Cirinten	820.300,00
8	Sekolah Dasar Negeri 1 Koleletwetan	Rangkasbitung	162.130,00
9	Sekolah Dasar Negeri 4 Rangkasbitung Barat	Rangkasbitung	6.000,00
10	Sekolah Dasar Negeri 1 Kersaratu	Malingping	26.250,00
11	Sekolah Dasar Negeri 2 Cipeundeuy	Malingping	26.250,00
12	Sekolah Dasar Negeri 2 Sanghiang	Malingping	26.250,00
13	Sekolah Dasar Negeri 3 Kadujajar	Malingping	26.250,00
14	Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari	Banjarsari	25.978,00
15	Sekolah Dasar Negeri 2 Kaduhauk	Banjarsari	105.296,00
16	Sekolah Dasar Negeri 3 Lebak Keusik	Banjarsari	77.735,00
17	Sekolah Dasar Negeri 1 Cisuren	Bayah	93.600,00
18	Sekolah Dasar Negeri 1 Sawarna	Bayah	167.000,00
19	Sekolah Dasar Negeri 3 Suwakan	Bayah	2.500,00
20	Sekolah Dasar Negeri 3 Kaduagung Timur	Cibadak	80.000,00
21	Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarsari	Maja	2.216,00
	Jumlah Sekolah Dasar Negeri		**2.245.715,00**
	Sekolah Menengah Pertama		
1	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Wanasalam	Wanasalam	440.000,00
2	Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Warunggunung	Warunggunung	454,00
3	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Muncang	Muncang	1.302.652,00
4	Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Muncang	Muncang	191,00
5	Sekolah Menegah Pertama Negeri 6 Satap Muncang	Muncang	450.400,00
6	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Sajira	Sajira	440.000,00
7	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Sajira	Sajira	652.100,00
8	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Cipanas	Cipanas	440.000,00
9	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Curugbitung	Curug Bitung	332,00
10	Sekolah Menegah Pertama Negeri 5 Satu Atap Curugbitung	Curug Bitung	246,00
11	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Cibeber	Cibeber	2.178.000,00
12	Sekolah Menegah Pertama Negeri 7 Cibeber	Cibeber	3.900,00
13	Sekolah Menegah Pertama Negeri 10 Cibeber	Cibeber	20.300,00
14	Sekolah Menegah Pertama Negeri 4 Cirinten	Cirinten	0,20
15	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Rangkasbitung	Rangkasbitung	440.000,00

SISA KAS BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2024

NO	SEKOLAH	KECAMATAN	SALDO AKHIR KAS BOS TAHUN 2024
1	2	3	4
16	Sekolah Menegah Pertama Negeri 5 Rangkasbitung	Rangkasbitung	440.000,00
17	Sekolah Menegah Pertama Negeri 8 Rangkasbitung	Rangkasbitung	348,00
18	Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Bayah	Bayah	1.568.452,00
19	Sekolah Menegah Pertama Negeri 7 Satu Atap Bayah	Bayah	110.000,00
20	Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 Cileles	Cileles	296,00
21	Sekolah Menegah Pertama Negeri 6 Satu Atap Cileles	Cileles	105.000,00
22	Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Maja	Maja	440.000,00
	Jumlah Sekolah Pertama Negeri		**9.032.671,20**
	JUMLAH SD + SMP		**11.278.386,20**

5. Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.835.881.939,00, rincian Pendapatan, Belanja dan Sisa Kas BOK dapat dilihat pada tabel 5.72 berikut:

Tabel 5.72
SISA KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN	BELANJA	SISA KAS 2024
1	2	3	4	5
1	Banjarsari	668.902.000,00	641.319.919,00	27.582.081,00
2	Baros	802.792.000,00	774.880.476,00	27.911.524,00
3	Bayah	787.629.000,00	738.167.293,00	49.461.707,00
4	Binuangeun	785.404.000,00	731.880.461,00	53.523.539,00
5	Bojongjuruh	634.654.000,00	551.760.549,00	82.893.451,00
6	Bojongmanik	751.155.000,00	632.853.447,00	118.301.553,00
7	Cibadak	727.456.000,00	597.789.516,00	129.666.484,00
8	Cibeber	815.880.000,00	652.266.582,00	163.613.418,00
9	Cigemblong	707.350.000,00	508.563.738,00	198.786.262,00
10	Cihara	876.973.000,00	777.298.757,00	99.674.243,00
11	Cijaku	853.772.000,00	675.135.886,00	178.636.114,00
12	Cikulur	822.263.000,00	691.633.575,00	130.629.425,00
13	Cileles	742.305.000,00	584.851.245,00	157.453.755,00
14	Cilograng	777.222.000,00	691.606.134,00	85.615.866,00
15	Cimarga	852.460.000,00	767.923.437,00	84.536.563,00
16	Cipanas	847.326.000,00	781.316.029,00	66.009.971,00
17	Cipeundeuy	761.148.000,00	660.468.292,00	100.679.708,00
18	Cirinten	742.409.000,00	663.618.781,00	78.790.219,00
19	Cisimeut	895.725.000,00	806.796.097,00	88.928.903,00
20	Cisungsang	772.855.000,00	705.676.000,00	67.179.000,00
21	Citorek	881.833.000,00	858.729.046,00	23.103.954,00
22	Curug bitung	848.964.000,00	813.726.478,00	35.237.522,00
23	Gunungkencana	718.260.000,00	511.093.915,00	207.166.085,00
24	Kalanganyar	828.439.000,00	815.035.500,00	13.403.500,00

SISA KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN	BELANJA	SISA KAS 2024
1	2	3	4	5
25	Kolelet	699.468.000,00	663.900.707,00	35.567.293,00
26	Lebakgedong	777.182.000,00	623.503.100,00	153.678.900,00
27	Leuwidamar	860.334.000,00	759.316.085,00	101.017.915,00
28	Maja	842.656.000,00	811.330.000,00	31.326.000,00
29	Malingping	899.248.000,00	770.982.689,00	128.265.311,00
30	Mandala	735.593.000,00	607.741.831,00	127.851.169,00
31	Mekarsari	699.195.000,00	693.325.000,00	5.870.000,00
32	Muncang	679.715.000,00	650.916.440,00	28.798.560,00
33	Pajagan	805.555.000,00	737.208.367,00	68.346.633,00
34	Pamandegan	786.849.000,00	758.855.225,00	27.993.775,00
35	Panggarangan	794.135.000,00	694.427.641,00	99.707.359,00
36	Parungsari	720.788.000,00	663.611.024,00	57.176.976,00
37	Prabugantungan	715.347.000,00	582.991.388,00	132.355.612,00
38	Rangkasbitung	814.840.000,00	794.714.370,00	20.125.630,00
39	Sajira	794.814.000,00	693.951.153,00	100.862.847,00
40	Sarageni	786.504.000,00	676.835.838,00	109.668.162,00
41	Sobang	757.454.000,00	704.749.752,00	52.704.248,00
42	Warunggunung	698.905.000,00	658.186.310,00	40.718.690,00
43	Gunungkendeng	693.703.000,00	448.640.988,00	245.062.012,00
JUMLAH		**33.465.461.000,00**	**29.629.579.061,00**	**3.835.881.939,00**

5.1.6.1.2 Piutang

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Total Piutang Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp92.948.294.395,36 mengalami kenaikan sebesar Rp22.047.243.367,72 atau 31,10% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp70.901.051.027,64 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.73 terdiri dari:

Tabel 5.73
PIUTANG PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	JENIS PIUTANG	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	
		Rp	Rp	JUMLAH	%
1	Piutang Pajak Daerah	64.521.694.506,72	46.246.928.944,60	18.274.765.562,12	39,52
2	Piutang Retribusi	14.483.055.054,00	380.775.800,00	14.102.279.254,00	3703,56

3	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	9.723.382.124,64	11.075.387.960,64	(1.352.005.836,00)	(12,21)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	4.097.245.190,00	8.816.470.322,40	(4.719.225.132,40)	(53,53)
5	Piutang Lainnya	122.917.520,00	4.381.488.000,00	(4.258.570.480,00)	(97,19)
JUMLAH		**92.948.294.395,36**	**70.901.051.027,64**	**22.047.243.367,72**	**31,10**

5.1.6.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak yaitu akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.521.694.506,72 mengalami kenaikan sebesar Rp18.274.765.562,12 atau 39,52% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp46.246.928.944,60 Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel 5.74 sebagai berikut:

Tabel 5.74
PIUTANG PAJAK
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	MUTASI		SALDO AKHIR TAHUN 2024
			TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	407.203.196,00	47.297.519.064,92	47.194.124.224,80	510.598.036,12
	a. PBJT - Hotel	117.542.610,00	630.118.084,00	529.341.554,00	218.319.140,00
	b. PBJT - Restoran	257.969.586,00	8.936.648.754,01	8.936.938.973,80	257.679.366,21
	c. PBJT - Hiburan	22.746.500,00	264.773.717,00	261.965.187,00	25.555.030,00
	d. PBJT - Penerangan Jalan	0,00	36.822.065.298,00	36.822.065.298,00	0,00
	e. PBJT - Parkir	8.944.500,00	643.913.211,91	643.813.212,00	9.044.499,91
2	Pajak Air Tanah	76.718.639,60	846.317.789,00	847.313.631,00	75.722.797,60
3	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	317.010.367,00	35.722.645.642,00	32.935.558.261,00	3.104.097.748,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan	45.445.996.742,00	47.883.323.544,00	32.498.044.361,00	60.831.275.925,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	31.492.119.253,00	31.492.119.253,00	0,00
JUMLAH		**46.246.928.944,60**	**163.255.755.292,92**	**144.980.989.730,80**	**64.521.694.506,72**

Perubahan atas kenaikan dan penurunan piutang diperoleh dari jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan Tahun 2024 sebesar Rp155.961.352.256,92, koreksi penambahan ketetapan Tahun sebelumnya sebesar Rp7.294.403.036,00, koreksi pengurangan ketetapan Tahun sebelumnya sebesar Rp8.838.157.712,00 dan realisasi Pajak Tahun 2024 sebesar Rp136.142.832.018,80.

5.1.6.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp14.483.055.054,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.102.279.254,00 atau 3.703,56% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp380.775.800,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.75 sebagai berikut:

Tabel 5.75
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	JENIS RETRIBUSI	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	MUTASI		SALDO AKHIR TAHUN 2024
			TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	00.00	789.798.000,00	00.00	789.798.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	00.00	160.061.067.194,00	146.821.347.667,00	13.239.719.527,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.655.000,00	958.932.644,00	961.032.644,00	14.555.000,00
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.383.296,00	00.00	00.00	26.383.296,00
5	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	206.648.750,00	1.155.089.406,00	1.062.732.012,00	299.006.144,00
6	Retribusi Penyewaan Bangunan	86.358.754,00	136.009.355,00	138.359.355,00	84.008.754,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	44.730.000,00	579.234.166,00	594.379.833,00	29.584.333,00
JUMLAH		**380.775.800,00**	**163.680.130.765,00**	**149.577.851.511,00**	**14.483.055.054,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp789.798.000,00 adalah piutang pada Badan Layanan Umum Puskesmas sekabupaten Lebak;
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp13.239.719.527,00;
3. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.555.000,00;
4. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 sebesar Rp26.383.296,00 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak mengalami kenaikan dan penurunan, dikarenakan penambahan piutang sudah terbayar pada Tahun berjalan, sedangkan piutang Tahun 2023 tidak terdapat pengurangan;
5. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp299.006.144,00 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp299.006.144,00 yang terdapat pada Pasar Rangkasbitung sebesar Rp14.024.330,00, Pasar Bayah sebesar Rp49.696.664,00, Pasar Cikotok sebesar Rp49.330.000,00, Pasar Cilograng sebesar Rp5.000.000,00, Pasar Maja sebesar Rp45.609.150,00, Pasar Binuangeun sebesar Rp35.825.000,00, Pasar Malingping sebesar Rp1.256.000,00, Pasar Cipanas sebesar Rp42.455.000,00, Pasar Banjarsari sebesar Rp55.810.000,00. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp92.357.394,00 atau 44,69% jika dibandingkan dengan piutang Tahun 2023 sebesar Rp206.648.750,00;
6. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan (RUSUNAWA) pada Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Pertanahan sebesar Rp84.008.754,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.350.000,00 atau 2,72% jika dibandingkan dengan piutang Tahun 2023 sebesar Rp86.358.754,00;
7. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata sebesar Rp29.584.333,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.145.667,00 atau 33,86% jika dibandingkan dengan piutang Tahun 2023 sebesar Rp44.730.000,00;

5.1.6.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 Piutang lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.723.382.124,64 mengalami penurunan sebesar Rp1.352.005.836,00 atau 12,21% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp11.075.387.960,64 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.76 sebagai berikut**:**

Tabel 5.76
PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	MUTASI		SALDO AKHIR TAHUN 2024
			TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	971.720,00	0,00	971.720,00
2	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2) – Pajak Bumi dan Bangunan, PeDesa an dan	9.916.484.219,64	490.609.700,00	686.929.915,00	9.720.164.004,64
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	2.246.400,00	0,00	2.246.400,00
5	Piutang Pendapatan BLUD	1.158.900.741,00	0,00	1.158.900.741,00	0,00
JUMLAH		**11.075.387.960,64**	**493.827.820,00**	**1.845.833.656,00**	**9.723.382.124,64**

Piutang Denda Pajak merupakan akun untuk menampung saldo tagihan denda Pajak. Piutang denda Pajak sampai dengan 31 desember 2024 adalah sebesar Rp9.720.164.004,64 mengalami penurunan sebesar Rp196.320.215,00 atau 1.98% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp9.916.484.219,64 Penambahan piutang denda pajak merupakan koreksi penambahan ketetapan tahun sebelumnya sebesar Rp489.773.467,00 dan ketetapan Tahun 2024 sebesar Rp836.233,00 sedangkan pengurangan piutang ini merupakan koreksi pengurangan piutang sebesar Rp686.093.682,00 dan realisasi sebesar Rp836.233,00.

5.1.6.1.2.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp4.097.245.190,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 Tanggal 3 Pebruari 2025 Tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2024, Kurang Salur Periode September Sampai Dengan Desember Tahun 2024 Dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Saldo Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.097.245.190,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.719.225.132,00 atau 53,53% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp8.816.470.322,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.77 sebagai berikut:

Tabel 5.77
PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	SALDO PIUTANG TAHUN 2023	MUTASI		SALDO AKHIR TAHUN 2024
			TAMBAH	KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.844.172.860,00	30.582.570.930,00	31.182.064.950,00	2.244.678.840,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.203.927.530,00	27.259.521.600,00	27.675.459.630,00	1.787.989.500,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.676.446.582,00	46.194.761.553,00	49.871.208.135,00	0,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	91.923.350,00	754.158.800,00	781.505.300,00	64.576.850,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	81.715.456.253,00	81.715.456.253,00	0,00
JUMLAH		**8.816.470.322,00**	**186.506.469.136,00**	**191.225.694.268,00**	**4.097.245.190,00**

5.1.6.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.917.520,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.258.570.480,00 atau 97,19% jika dibandingkan dengan Piutang Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp4.381.488.000,00. Saldo Piutang Lainnya tersebut adalah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pejabat lain merupakan pernyataan kesanggupan dari 54 orang pelaksana kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang terdiri dari Anggota DPRD dan pelaksana pada Sekretariat

DPRD atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Ketidaksesuaian belanja perjalanan dinas berupa ketidak sesuaian dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi, biaya penginapan, uang harian dan uang representasi. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023, dan pada Tahun 2024 hanya 3 orang.yang belum melunasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut.

5.1.6.1.2.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan terhadap piutang daerah agar aset daerah berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan piutang pertanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp23.049.109.876,31 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.78 sebagai berikut:

Tabel 5.78
PENYISIHAN PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	
		(Rp)	(Rp)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	16.536.833.910,99	10.675.544.993,55	5.861.288.917,44	54,90
2	Penyisihan Piutang Retribusi	691.795.063,19	235.820.950,00	455.974.113,19	193,36
3	Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	5.677.077.156,18	4.496.225.996,83	1.180.851.159,35	26,26
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	20.486.225,95	44.082.351,61	(23.596.125,66)	(53,53)
5	Penyisihan Piutang Lainnya	122.917.520,00	4.381.488.000,00	(4.258.570.480,00)	(97,19)
JUMLAH		**23.049.109.876,31**	**19.833.162.291,99**	**3.215.947.584,32**	**16,22**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.536.833.910,99 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.79 sebagai berikut:

Tabel 5.79
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Hotel	218.319.140,00	87.892.217,00	105.141.511,00	17.848.900,00	7.436.512,00	27.314.574,19
2	Pajak Restoran	257.679.366,21	2.726.600,21	5.990.000,00	187.692.697,00	61.270.069,00	155.729.050,50
3	Pajak Hiburan	25.555.030,00	4.173.530,00	17.500,00	14.020.000,00	7.344.000,00	14.376.617,65
4	Pajak Parkir	9.044.499,91	99.999,91	844.500,00	0,00	8.100.000,00	8.184.950,00
5	Pajak Air Tanah	75.722.797,60	22.999.140,00	1.192.390,00	12.166.013,60	39.365.254,00	45.682.495,69
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3.104.097.748,00	2.859.579.348,00	17.962.500,00	119.790.500,00	106.765.400,00	182.754.796,74
7	Pajak Bumi dan Bangunan	60.831.275.925,00	16.841.049.403,00	19.581.072.817,00	20.697.349.615,00	3.711.804.090,00	16.102.791.426,22
JUMLAH		**64.521.694.506,72**	**19.818.520.238,12**	**19.712.221.218,00**	**21.048.867.725,60**	**3.942.085.325,00**	**16.536.833.910,99**

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Retribusi. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp691.795.063,19 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.80 sebagai berikut:

Tabel 5.80
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	789.798.000,00	789.798.000,00	0,00	0,00	0,00	3.948.990,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	13.239.719.527,00	12.806.217.298,00	88.989.414,00	99.715.061,00	244.797.754,00	367.585.312,39

PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.555.000,00	0,00	0,00	0,00	14.555.000,00	14.555.000,00
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.383.296,00	0,00	0,00	0,00	26.383.296,00	26.383.296,00
5	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	299.006.144,00	114.610.000,00	0,00	0,00	184.396.144,00	184.969.194,00
6	Retribusi Penyewaan Bangunan	84.008.754,00	1.496.700,00	0,00	0,00	82.512.054,00	82.519.537,50
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.584.333,00	0,00	7.396.083,00	22.188.250,00	0,00	11.833.733,30
JUMLAH		**14.483.055.054,00**	**13.712.121.998,00**	**96.385.497,00**	**121.903.311,00**	**552.644.248,00**	**691.795.063,19**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang Denda Pajak dari Denda Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Perdesaan, Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel 5.81 sebagai berikut:

Tabel 5.81
PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	971.720,00	971.720,00	0,00	0,00	0,00	4.858,60
2	Denda (PBBP2) – Pajak Bumi dan Bangunan, PeDesa an dan Perkotaan	9.720.164.004,64	0,00	175.037.273,12	7.771.138.786,52	1.773.987.945,00	5.677.061.065,58

PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00
JUMLAH		**9.723.382.124,64**	**3.218.120,00**	**175.037.273,12**	**7.771.138.786,52**	**1.773.987.945,00**	**5.677.077.156,18**

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dari pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pelampauan Tahun 2023 yang belum di terima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp20.486.225,95 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.82 sebagai berikut:

Tabel 5.82
PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			(0 – 1 TAHUN)	(1–3 TAHUN)	(2–5 TAHUN)	(> 5 TAHUN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.244.678.840,00	2.244.678.840,00	0,00	0,00	0,00	11.223.394,20
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.787.989.500,00	1.787.989.500,00	0,00	0,00	0,00	8.939.947,50
3	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	64.576.850,00	64.576.850,00	0,00	0,00	0,00	322.884,25
JUMLAH		**4.097.245.190,00**	**4.097.245.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.486.225,95**

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp122.917.520,00.

5.1.6.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya pada Tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp560.716.426,35 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.83 sebagai berikut:

Tabel 5.83
BEBAN DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TANGGAL KONTRAK	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	
			(Rp)	(Rp)	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Sewa Gedung (3 Kantor UPT Bapenda)	24 Oktober 2024 – 24 Oktober 2025	73.833.333,33	66.262.500,00	7.570.833,33	11,43
2	Asuransi BMD (Asuransi Kendaraan Bermotor, Gedung Negara dan Jembatan Sementara)	Terdapat pada Lampiran	486.883.093,02	339.986.333,67	146.896.759,35	43,21
JUMLAH			**560.716.426,35**	**406.248.833,67**	**154.467.592,68**	**38,02**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban Dibayar Dimuka Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah asuransi kendaraan, bangunan negara dan jembatan sementara sebesar Rp486.883.093,02 mengalami penurunan sebesar Rp146.896.759,35 atau 43,21% jika dibandingkan dengan belanja dibayar dimuka Tahun 2023 sebesar Rp339.986.333,67, terdiri dari:
   a. Asuransi Barang Milik Daerah roda 4 (empat) pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Kontrak Nomor 027/496-SP/BKAD/2024 Tanggal 9 Juli 2024 sebesar Rp394.293.755640 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp230.004.690,77;

b. Asuransi Barang Milik Daerah Gedung Pemerintah pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan Surat Perintah Kerja nomor 027/1154-BKAD/SP/2024 Tanggal 14 Nopember 2024 sebesar Rp96.958.257,00 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp88.878.402,25;
c. Asuransi Jaminan Struktur Pekerjaan Teknik Sipil setelah selesai dibangun (jembatan, jalan tol, dermaga, kereta api) pada PT. Bumiputera Muda 1967 dengan surat pesanan nomor 027/1274-SP/BKAD/2024 Tanggal 12 Desember sebesar Rp168.000.000,00 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp168.000.000,00;

2. Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pendapatan Daerah adalah sewa tanah dan bangunan untuk operasional Unit Pelaksana Teknis sebesar Rp73.833.333,33, terdiri dari:
   a. Unit Pelaksana Teknis Wilayah 1 beralamat di Kp. Bahbul Pasir RT. 13 RW 04 Desa Cikulur Kecamatan Cikulur dengan nomor kontrak B.000.3.1/16-sekrt/X/2024 sebesar Rp29.500.000,00 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp24.583.333,33;
   b. Unit Pelaksana Teknis Wilayah 1I beralamat di Kampung Kandang Timur RT 003 RW 002 Desa Sukamanah Kecamatan Malingping dengan nomor kontrak B.000.3.1/18-sekrt/X/2024 sebesar Rp28.800.000,00 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp24.833.333,33;
   c. Unit Pelaksana Teknis Wilayah III beralamat di Kampung Harapan Jaya RT 002 RW 007 Desa Pajagan Kecamatan Sajira dengan nomor kontrak B.000.3.1/17-sekrt/X/2024 sebesar Rp29.300.000,00 dan yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp24.416.666,67.

5.1.6.1.4 Persediaan

Persediaan merupakan catatan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lebak dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) Tahun. Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31

Desember 2024 sebesar Rp99.055.311.900,01. Persediaan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.84 sebagai berikut:

Tabel 5.84
PERSEDIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	URAIAN		JUMLAH
1	2		3
1	Saldo Awal		90.963.852.245,82
2	Koreksi Saldo Awal		19.799.900,00
	Jumlah		**90.983.652.145,82**
3	Mutasi Tambah		
	a.	Pengadaan	169.152.480.760,00
	b.	Hibah	34.167.336.050,63
	c.	Koreksi	0,00
	d.	Reklas	49.243.784.319,00
	e.	Perubahan Nilai Persediaan	56.450.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**252.620.051.129,63**
4	Mutasi Kurang		
	a.	Beban Persediaan	242.966.662.146,56
	b.	Hibah	1.545.429.228,88
	c.	Koreksi	0,00
	d.	Reklas	32.000.000,00
	e.	Penjualan	4.300.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang		**244.548.391.375,44**
5	**Saldo Akhir Persediaan**		**99.055.311.900,01**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal merupakan persediaan awal yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.799.900,00 berupa:
   a. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp100.000,00;
   b. Bahan Lainnya sebesar Rp1.342.400,00;
   c. Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp360.000,00;
   d. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp30.000,00;
   e. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp10.114.000,00;
   f. Persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp778.500,00;
   g. Persediaan Bahan Cetak sebesar Rp160.000,00;
   h. Benda Pos sebesar Rp330.000,00;
   i. Bahan Komputer sebesar Rp2.365.000,00;
   j. Persediaan Perabot Kantor sebesar Rp2.940.000,00;

k. Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering) sebesar Rp320.000,00;
l. Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp575.000,00;
m. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp385.000,00.

2. Mutasi tambah merupakan penambahan Persediaan sebesar Rp252.620.051.129,63 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp169.152.480.760,00;
   b. Pendapatan Hibah Persediaan sebesar Rp34.167.336.050,63 terdapat pada:
      1) Dinas Kesehatan sebesar Rp28.470.699.941,63 merupakan:
         a) Hibah dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 830.840.663,08 berupa Obat-Obatan sebesar Rp638.425.163,08 dan Bahan Cetak sebesar Rp192.415.500,00;
         b) Hibah dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp26.747.544.265,31 berupa obat-obatan sebesar Rp19.021.126.170,99 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp7.726.418.094,32
      2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.696.636.109,00 merupakan hibah dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional berupa Obat-Obatan Lainnya
   c. Reklas sebesar Rp49.243.784.319,00 terdiri dari:
      1) Aset Tetap sebesar Rp439.070.000,00 terdapat pada:
         a) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp237.630.000,00 merupakan Reklas dari Aset Tetap menjadi Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi terdiri dari:
            - Reklas dari Tanah Lapangan Penimbunan Barang menjadi Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp164.980.000,00;

- Reklas Alat Pengolahan Lainnya menjadi Persediaan menjadi Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp14.400.000,00;
- Reklas Kendaraan Bermotor Beroda Tiga menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp40.250.000,00;
- Reklas Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang menjadi Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp18.000.000,00;

b) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp8.800.000,00 merupakan Reklas dari Tanda Penghargaan Bidang Lainnya menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;

c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp192.640.000,00 merupakan reklas dari Alat Musik menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

2) Reklas dari Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp508.554.121,00 dan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp48.296.160.198,00 menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO akibat dari meningkatnya nilai persediaan berupa Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp56.450.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan sebesar Rp5.450.000,00 dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp51.000.000,00.

3. Mutasi Kurang merupakan pengurangan Persediaan sebesar Rp244.548.391.375,44 berasal dari:
   a. Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp242.966.662.146,56;
   b. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.545.429.228,88 terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana;

c. Reklas dari Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kerin) ke Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp32.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

d. Penjualan Bibit atau Benih Ikan Rp4.300.000,00 pada Dinas Perikanan

Rincian Persediaan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.85 sebagai berikut:

Tabel 5.85
RINCIAN PERSEDIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URIAAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	88.543.080,00	70.431.795,00	18.111.285,00	25,71
2	Persediaan Bahan Kimia	1.147.669.063,36	1.465.025.931,61	(317.356.868,25)	(21,66)
3	Bahan Baku	15.173.600,00	14.629.900,00	543.700,00	14,85
4	Isi Tabung Gas	4.500.000,00	3.434.000,00	1.066.000,00	3,72
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6	Bahan Lainnya	3.498.934.770,00	1.389.980.896,00	2.108.953.874,00	100
7	Bahan Bakar dan Pelumas	214.548.300,00	186.799.726,00	27.748.574,00	31,04
8	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	(33,70)
9	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	111.116.400,00	167.588.400,00	(56.472.000,00)	151,73
10	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	14.200.000,00	810.000,00	13.390.000,00	1.653,09
11	SukuCadang Alat Besar	123.062.460,00	117.754.560,00	5.307.900,00	4,51
12	Suku Cadang Alat Pertanian	12.249.050,00	89.524.270,00	(77.275.220,00)	(86,32)
13	Suku Cadang Alat Bengkel	1.788.000,00	2.530.000,00	(742.000,00)	(29,33)
14	Persediaan Alat Tulis Kantor	212.709.257,50	216.955.002,17	(4.245.744,67)	(1,96)
15	Persediaan Kertas dan Cover	64.777.022,00	41.314.350,00	23.462.672,00	56,79
16	Persediaan Bahan Cetak	857.674.660,33	956.911.574,00	(99.236.913,67)	(10,37)
17	Benda Pos	5.050.000,00	2.460.000,00	2.590.000,00	105,28
18	Persediaan Bahan Komputer	48.474.459,00	114.483.540,00	(66.009.081,00)	(57,66)
19	Persediaan Perabot Kantor	61.714.870,00	226.235.380,00	(164.520.510,00)	(72,72)
20	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering)	61.913.800,00	115.824.000,00	(53.910.200,00)	(46,54)
21	Suvenir/Cendera Mata	16.740.000,00	0,00	16.740.000,00	100,00
22	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.639.000,00	2.814.125,00	19.824.875,00	704,48
23	Persediaan Obat	14.773.854.361,89	13.613.739.899,00	1.160.114.462,89	8,52
24	Persediaan Obat-Obatan Lainnya	15.481.795.976,93	13.996.438.197,04	1.485.357.779,89	10,61
25	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	62.110.955.769,00	58.075.251.200,00	4.035.704.569,00	6,95

RINCIAN PERSEDIAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URIAAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
26	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	0,00	92.915.500,00	(92.915.500,00)	(100,00)
27	Pakan	104.228.000,00	0,00	104.228.000,00	100
JUMLAH		**99.055.311.900,01**	**90.963.852.245,82**	**8.091.459.654,19**	**8,90**

Persediaan pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.86 berikut:

Tabel 5.86
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	4.034.000,00	3.607.250,00	426.750,00	11,83
2	Dinas Kesehatan	33.386.946.719,89	28.195.581.836,65	5.191.364.883,24	18,41
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.243.589.479,00	58.158.126.410,00	4.085.463.069,00	7,02
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	3.478.500,00	4.535.800,00	(1.057.300,00)	(23,31)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	317.000,00	149.500,00	167.500,00	112,04
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	18.340.000,00	(18.340.000,00)	(100)
7	Dinas Sosial	21.619.250,00	24.038.500,00	(2.419.250,00)	(10,06)
8	Dinas Tenaga Kerja	583.000,00	2.235.900,00	(1.652.900,00)	(73,93)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	286.716.970,12	1.142.169.486,00	(855.452.515,88)	(74,90)
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.372.756.496,00	1.369.826.296,00	2.930.200,00	0,21
11	Dinas Lingkungan Hidup	303.556.870,00	229.513.726,00	74.043.144,00	32,26
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	734.403.782,00	856.173.782,00	(121.770.000,00)	(14,22)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.161.900,00	2.155.375,00	3.006.525,00	139,49
14	Dinas Perhubungan	122.056.000,00	197.769.975,00	(75.713.975,00)	(38,28)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	420.000,00	0,00	420.000,00	100
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal	0,00	157.900,00	(157.900,00)	(100)
18	Dinas Kepemudaan Olahraga	6.386.400,00	7.521.304,00	(1.134.904,00)	(15,09)

PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.138.000,00	3.250.000,00	17.888.000,00	550,40
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Perikanan	113.074.400,00	107.333.900,00	5.740.500,00	5,35
22	Dinas Pertanian	101.172.717,00	154.930.770,00	(53.758.053,00)	(34,70)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	105.190.000,00	180.290.600,00	(75.100.600,00)	(41,66)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.152.000,00	40.647.875,00	(1.495.875,00)	(3,68)
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	15.880.000,00	(15.880.000,00)	(100)
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.208.500,00	(1.208.500,00)	(100)
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	100.430.930,00	84.082.795,00	16.348.135,00	19,44
29	Badan Pendapatan Daerah	6.082.886,00	46.153.864,67	(40.070.978,67)	(86,82)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.301.000,00	88.312.000,00	(35.011.000,00)	(39,64)
31	Inspektorat Daerah	700.000,00	4.049.800,00	(3.349.800,00)	(82,72)
32	Kecamatan Rangkasbitung	837.800,00	236.000,00	601.800,00	255
33	Kecamatan Kalanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Cibadak	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	100
35	Kecamatan Warunggunung	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Cimarga	1.361.550,00	0,00	1.361.550,00	100
37	Kecamatan Cikulur	3.367.000,00	1.051.500,00	2.315.500,00	220,21
38	Kecamatan Leuwidamar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Sajira	1.201.800,00	1.149.800,00	52.000,00	4,52
40	Kecamatan Maja	8.061.150,00	15.684.700,00	(7.623.550,00)	(48,61)
41	Kecamatan Curugbitung	429.800,00	298.500,00	131.300,00	43,99
42	Kecamatan Muncang	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Sobang	500.000,00	100.000,00	400.000,00	400
44	Kecamatan Bojongmanik	701.600,00	3.439.000,00	(2.737.400,00)	(79,60)
45	Kecamatan Cirinten	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100)
46	Kecamatan Cipanas	922.300,00	801.000,00	121.300,00	15,14
47	Kecamatan Lebakgedong	620.000,00	475.400,00	144.600,00	30,42
48	Kecamatan Gunung Kencana	0,00	293.700,00	(293.700,00)	(100)
49	Kecamatan Cileles	310.000,00	190.000,00	120.000,00	63,16
50	Kecamatan Banjarsari	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Cijaku	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Cigemblong	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
53	Kecamatan Malingping	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kecamatan Wanasalam	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kecamatan Panggarangan	314.000,00	257.750,00	56.250,00	21,82
56	Kecamatan Cihara	180.000,00	0,00	180.000,00	100
57	Kecamatan Bayah	235.800,00	354.750,00	(118.950,00)	(33,53)
58	Kecamatan Cibeber	0,00	1.325.000,00	(1.325.000,00)	(100)
59	Kecamatan Cilograng	1.672.800,00	0,00	1.672.800,00	100
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.000,00	102.000,00	16.000,00	15,69
JUMLAH		**99.055.311.900,01**	**90.963.852.245,82**	**8.091.459.654,19**	**8,90**

Persediaan Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.84, merupakan hasil olah data dari aplikasi SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Persediaan) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pelaporan Barang Persediaan. Namun demikian belum semua Perangkat Daerah bisa menggunakan aplikasi tersebut, terutama Dinas Kesehatan melalui RSUD dr. Adjidarmo yang pelaporannya masih menggunakan aplikasi sendiri melalui billing system RSUD yang pelaporannya dipisahkan, mengingat perlakuan obat berdasarkan expired date memerlukan perlakuan sendiri dalam pengelolaan aplikasinya.

Dalam melaksanakan olah data barang persediaan, tidak semua kode rekening Belanja Barang Pakai Habis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicatatkan kedalam aplikasi SIAP, dikarenakan terdapat belanja barang yang tidak diperlakukan stock, sehingga tidak dilaporkan dalam pencatatan laporan barang persediaan.

5.1.6.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Penambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.688.500.000,00 yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Kalimaya Lebak Banten sebesar Rp1.893.500.000,00 dan PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp795.000.000,00.

Salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yaitu PD. Lebak Niaga yang bergerak di bidang pertambangan yaitu "*Stone Crusher*" sejak Tahun 2015 izin pertambangan yang dimiliki berada di Blok Gunung Panggo Desa Luhur Jaya sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi karena terdapat perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Agar PD. Lebak Niaga bisa beroperasi kembali maka dilakukan diversifikasi usaha selain pertambangan dan Tahun 2018 telah dilakukan kajian investasi usaha bidang pertanian. kembali beroperasi pada bulan Mei Tahun 2024. Dari Bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 PD. Lebak Niaga mendapatkan pendapatan atas usahanya sebesar Rp915.828.500,00 dan Pendapatan di luar usaha sebesar Rp45.253.877,00 yang diperoleh dari Pendapatan Jasa giro, Pendapatan Bunga Deposito dan Pendapatan Bunga Usaha lainnya. Akan tetapi mengalami Kerugian yang dikarenakan Margin Keuntungan yang di peroleh belum bisa menutupi biaya operasional usaha, sehingga Lebak Niaga mengalami kerugian sebesar Rp153.919.028,00.

Nilai investasi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan metode ekuitas untuk nilai investasi lebih dari 20% dan metode biaya untuk nilai investasi kurang dari 20%. Nilai investasi sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp124.755.099.907,18 adalah hasil perhitungan ekuitas laporan keuangan Badan Umum Milik Daerah dengan rincian Investasi Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.87 sebagai berikut:

Tabel 5.87
INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

BUMD	SALDO AWAL INVESTASI	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL INVESTASI SETELAH KOREKSI	PENYERTAAN MODAL 2024	SALDO AKHIR INVESTASI 2024	SALDO EKUITAS 2024 (AUDITED)	SURPLUS/DEFISIT INVESTASI (AUDITED)
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8 = 7-6
Bank Jabar	15.713.509.680,00	0,00	15.713.509.680,00	0,00	15.713.509.680,00	15.713.509.680,00	0,00
PERUMDA Kalimaya	68.915.665.005,00	853.848.427,37	69.769.513.432,38	1.893.500.000,00	71.663.013.432,38	66.237.395.192,57	(5.425.618.239,81)
PD Lebak Niaga	2.750.116.897,00	0,00	2.750.116.897,00	0,00	2.750.116.897,00	2.596.197.869,00	(153.919.028,00)
PD. BPR Lebak Sejahtera	21.607.851.874,55	0,00	21.607.851.874,55	0,00	21.607.851.874,55	21.584.324.631,34	(23.527.243,21)
PT. LKM Rangkasbitung	17.513.886.621,03	0,00	17.513.886.621,03	795.000.000,00	18.308.886.621,03	18.623.672.534,28	314.785.913,24
JUMLAH	**126.501.030.077,59**	**853.848.427,37**	**127.354.878.504,96**	**2.688.500.000,00**	**130.043.378.504,96**	**124.755.099.907,19**	**(5.288.278.597,77)**

Berdasarkan tabel di atas investasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp130.043.378.504,96, tetapi berdasarkan perhitungan metode biaya dan ekuitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lebak menjadi sebesar Rp124.755.099.907,19, sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp314.785.913,24. Dicatat sebagai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional dari PT. LKM Rangkasbitung, dan kerugian pada PDAM sebesar Rp5.425.618.239,81, PD Lebak Niaga Sebesar Rp153.919.028,00 dan PD BPR Lebak Sejahtera sebesar Rp23.527.243,21 yang dicatat pada defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Laporan Operasional.

Investasi Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar Rp124.755.099.907,19, jika dibandingkan dengan Investasi Tahun 2023 sebesar Rp126.501.030.077,59 mengalami penurunan sebesar Rp1.745.930.170,40 atau 1,38%. Rincian Invesatasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.88 berikut:

Tabel 5.88
INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

BUMD	KEPEMILIKAN SAHAM %	METODE PENILAIAN	SALDO EKUITAS 2024	SALDO EKUITAS 2023	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/5
Bank Jabar	<20	Cost method	15.713.509.680,00	15.713.509.680,00	0,00	0,00
PERUMDA Kalimaya	90,17	Equity method	66.237.395.192,57	68.915.665.005,00	(2.678.269.812,43)	(3,89)
PD Lebak Niaga	100	Equity method	2.596.197.869,00	2.750.116.897,00	(153.919.028,00)	(5,60)
PD. BPR Lebak Sejahtera	85,69	Equity method	21.584.324.631,34	21.607.851.874,55	(23.527.243,21)	(0,11)
PT. LKM Rangkasbitung	91,44	Equity method	18.623.672.534,28	17.513.886.621,03	1.109.785.913,25	0,88
JUMLAH			**124.755.099.907,19**	**126.501.030.077,59**	**(1.745.930.170,39)**	(1,38)

5.1.6.3 Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.375.297.934.920,60, mengalami kenaikan sebesar Rp135.321.368.420,10 atau 1,46%, jika dibandingkan dengan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp9.239.976.566.500,50. Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan Aset Tetap dan Aset lainnya pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 hal ini dikarenakan:

1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap dan Aset Lainnya karena terdapat beberapa anggaran dengan kode rekening Belanja

Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perbahan Nupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka barang yang tidak menjadi aset di kelompokkan dalam barang inventaris.

2. Masih terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa yang tidak ditempatkan pada Belanja Modal untuk menjadi bagian nilai perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.89 berikut:

Tabel 5.89
NILAI BUKU ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024			31 DEEMBER 2023
		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	559.073.003.786,67	0,00	559.073.003.786,67	566.233.996.716,67
2	Peralatan dan Mesin	850.136.196.618,99	729.914.566.448,30	120.221.630.170,69	812.264.090.169,49
3	Gedung dan Bangunan	1.806.926.269.076,57	658.383.864.369,39	1.148.542.404.707,18	1.659.425.421.292,11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.936.950.662.034,17	4.209.237.020.301,34	1.727.713.641.732,83	5.972.387.268.323,77
5	Aset Tetap Lainnya	219.972.881.704,20	0,00	219.972.881.704,20	201.248.003.210,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.238.921.700,00	0,00	2.238.921.700,00	28.417.786.788,00
JUMLAH		**9.375.297.934.920,60**	**5.597.535.451.119,03**	**3.777.762.483.801,57**	**9.239.976.566.500,50**

Nilai mutasi untuk masing–masing aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai walaupun belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanah tersebut dikuasai dan atau digunakan oleh pemerintah maka tanah tersebut dicatat

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp559.073.003.786,67. Tanah Pemerintah Kabupaten Lebak sebanyak 1.853 bidang seluas 19.988.388m^2, sudah bersertifikat sebanyak 1.326 bidang dengan luas 7.751.885,23m^2, yang belum bersertifikat 463 bidang dengan luas 12.131.206,05m^2, dan yang masih proses bersertifikat sebanyak 60 bidang dengan luas 105.296,72m.^{2} Tahun 2025 direncanakan 80 bidang yang akan disertifikati. Adapun rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.90 sebagai berikut:

Tabel 5.90
SALDO ASET TETAP TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		566.233.996.716,67	546.715.029.046,74	19.518.967.669,93
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**566.233.996.716,67**	**546.715.029.046,74**	**19.518.967.669,93**
3	Mutasi Tambah		0,00	0,00	0,00
	a.	Pengadaan	223.607.000,00	680.667.000,00	(457.060.000,00)
	b.	Hibah	2.062.332.245,00	6.879.324.990,00	(4.816.992.745,00)
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	140.958.200,00	5.718.196.291,00	(5.577.238.091,00)
	d.	Koreksi	120.426.200,00	10.100.475.500,00	(9.980.049.300,00)
	e.	Reklas	104.841.700,00	5.702.465.660,00	(5.597.623.960,00)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**2.652.165.345,00**	**29.081.129.441,00**	**(26.428.964.096,00)**
4	Mutasi Kurang				0,00
	a.	Hibah	8.123.100.000,00	70.000.000,00	8.053.100.000,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	140.958.200,00	5.718.196.291,00	(5.577.238.091,00)
	c.	Penghapusan	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	1.286.740.075,00	3.633.628.480,00	(2.346.888.405,07)
	e.	Reklas	262.360.000,00	140.337.000,00	122.023.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**9.813.158.275,00**	**9.562.161.771,07**	**250.996.503,93**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(7.160.992.930,00)**	**19.518.967.669,93**	**(26.679.960.599,93)**
5	Penyajian Aset Tetap		559.073.003.786,67	566.233.996.716,67	(7.160.992.930,00)
	Pengurangan		0,00	0,00	0,00

SALDO ASET TETAP TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		559.073.003.786,67	566.233.996.716,67	(7.160.992.930,00)
7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember		**559.073.003.786,67**	**566.233.996.716,67**	**(7.160.992.930,00)**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp2.652.165.345,00 merupakan penambahan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja modal Tanah Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp223.607.000,00;
   b. Penerimaan Hibah sebesar Rp2.062.332.245,00 terdapat pada:
      1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berupa Tanah Untuk Jalan sebesar Rp2.046.460.245,00 terdiri dari:
         a) Perumahan Griya Barokah Persada Nomor Berita Acara Serah Terima 845/ /BASTP/DPRKPP/X/2024 Tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp349.027.860,00;
         b) Perumahan Royal Green Land Nomor Berita Acara Serah Terima 845/546/BAST/DPRKPP/VII/2024 Tanggal 8 Juli 2024 sebesar Rp1.472.205.265,00;
         c) Perumahan Mabu Park Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1123/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp167.894.500,00;

d) Perumahan Griya Oteng Residence Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1121/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp16.303.420,00;

e) Perumahan Riverra Village Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1122/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp41.029.200,00;

2) Dinas Pendidikan berupa Tanah Kering (Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan) sebesar Rp15.872.000,00 di Blok Cihagaru Desa Kadujajar Kecamatan Malingping, Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanggal 24 Agustus 2024, Penetapan Status Penggunaan Bupati Lebak Nomor: 032/Kep.491-BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

c. Penerimaan Aset akibat pindah antar SKPD sebesar Rp140.958.200,00 terdapat pada:

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp100.000.000,00;

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp40.958.200,00

d. Koreksi Atas Aset Tanah sebesar Rp120.426.200,00 dikarenakan hasil Penetapan Status berdasarkan Nomor Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/Kep.491-BKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024 terdapat pada:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp112.817.200,00 terdiri dari:

a) Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp4.907.700,00 di Kp. Bulakan Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar;

b) Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp26.316.000,00 di Jalan Leuwidamar Km 15 Kp. Bondol Rt 01 Rw 01 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga;

c) Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp18.396.000,00 di Kp. Kandangsapi Rt 03 Rw 01 Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku;

d) Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp60.929.500,00 di Jalan Raya Bayah Malingping Kp. Cimangpang Rt 01 Rw 03 Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan;

e) Tanah Kosong yang sudah diperuntukan sebesar Rp1.284.000,00 di Kp. Sindangsari Rt 01 Rw 01 Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam ;

f) Tanah Kosong yang sudah diperuntukan sebesar Rp984.000,00 di Kp. Sindangsari Rt 01 Rw 01 Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam.

2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.609.000,00 berupa Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama di Jalan Cihampelas Gang Margalaksana No 25 Desa Tamansari Kota Bandung;

e. Reklas dari Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ketiga) berupa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp104.841.700,00 terdapat pada:

1) Kecamatan Kalanganyar sebesar Rp3.516.800,00;

2) Kecamatan Malingping sebesar Rp28.665.000,00;

3) Kecamatan Bayah sebesar Rp72.660.320,00.

2. Mutasi berkurang sebesar Rp9.813.158.275,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Hibah ke Pemerintah Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490/BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 600.1/1127-NPHD/DPUPR/VIII/2024 dan Nomor 84/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp8.123.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Aset Tetap Tanah berkurang akibat perpindahan antar SKPD sebesar Rp140.958.200,00 terdapat pada:

1) Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp100.000.000,00;

2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp40.958.200,00.

c. Koreksi Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.286.740.075,00 terdapat pada:

1) Dinas Kesehatan, sudah diserahkan pada Tahun 2012 ke Pemerintahan Desa Prabugantungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490-BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 032/Perj.76-Dinkes/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp441.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Prabugantungan dan Puskesmas Muncang

sebesar Rp540.000 berdasarkan NPHD Nomor: 032/Perj.1321-BKAD/2024 dan Nomor: 593/21/DS.CKR/XII/2024, Tanggal 19 Desember 2024 ke Desa Cikarang Kecamatan Muncang;

2) Sekretariat Daerah ke Kementrian Kesehatan (Politeknik Kesehatan) berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan sesuai sebesar Rp355.799.075,00 dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490-BKAD/2024 Tanggal 31 Desemeber 2024 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900.1/Perj.34/BKAD/XII/ 2024 dan ke Pemerintah Provinsi Banten (SMK Negeri 1 Cibeber) Nomor HK.03.01/2.3/10655/2022 Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp929.960.000,00 Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490-BKAD/2024 tanggal 31 Desemeber 2024.

d. Reklas dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp262.360.000,00, terdiri dari:

1) Reklas ke Beban Bahan-Bahan Lainnya berupa tanah urug untuk menimbun tanah TPA Dengung pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 164.980.000,00;

2) Reklas dari Aset Tanah ke Kemitraan Pihak ketiga berupa Tanah Bangunan Gudang dan Tanah Kering sebesar Rp97.380.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.1.6.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp850.136.196.618,99 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.91 sebagai berikut:

Tabel 5.91
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		812.264.090.169,49	793.315.843.049,99	18.948.247.119,50
2	Koreksi Saldo Awal		0	0	0
	Jumlah		**812.264.090.169,49**	**793.315.843.049,99**	**18.948.247.119,50**
3	Mutasi Tambah				
	a.	Pengadaan	54.290.255.942,00	52.961.141.478,00	1.329.114.464,00
	b.	Hibah	9.596.759.462,00	1.554.285.641,00	8.042.473.821,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	3.095.939.811,00	4.592.807.716,59	(1.496.867.905,59)
	d.	Koreksi	1.181.671.869,58	0	1.181.671.869,58
	e.	Reklas	826.031.516,00	965.988.352,00	(139.956.836,00)
	f.	Penetapan Status	0	0	0
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**68.990.658.600,58**	**60.074.223.187,59**	**8.916.435.412,99**
4	Mutasi Kurang				
	a.	Hibah	0	4.200.000,00	(4.200.000,00)
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	3.095.939.811,00	4.592.807.716,59	(1.496.867.905,59)
	c.	Penghapusan	0	3.363.631.422,01	(3.363.631.422,01)
	d.	Koreksi	0	4.200.000,00	(4.200.000,00)
	e.	Reklas	89.118.000,00	926.592.404,00	(837.474.404,00)
	JUMLAH MUTASI KURANG		**3.185.057.811,00**	**8.891.431.542,60**	**(5.706.373.731,60)**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**65.805.600.789,58**	**51.182.791.644,99**	**14.622.809.144,59**
5	Penyajian Aset Tetap		878.069.690.959,07	844.498.634.694,98	33.571.056.264,09
	Pengurangan				
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0	0	0
	b.	Ekstra Komptabel	9.118.329.062,00	11.811.801.989,86	(2.693.472.927,86)
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	18.815.165.278,08	20.422.742.535,63	(1.607.577.257,55)
	d.	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
	JUMLAH PENGURANG		**27.933.494.340,08**	**32.234.544.525,49**	**(4.301.050.185,41)**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		850.136.196.618,99	812.264.090.169,49	37.872.106.449,50
7	Akumulasi Penyusutan		729.914.566.448,30	642.855.649.158,92	87.058.917.289,38
8	Nilai Buku Per 31 Desember		120.221.630.170,69	**169.408.441.010,57**	(49.186.810.839,88)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 54.290.255.942,00;
   b. Penerimaan Hibah sebesar Rp9.596.759.462,00 terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah dari Provinsi Banten berupa 1 (satu) Buah Laptop merupakan hadiah pengelolaan keuangan dan aset tingkat Provinsi Banten dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/01A.936-C/BAST/BPKAD/2024 Tanggal 21 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2) Pendapatan Hibah diterima oleh Dinas Kesehatan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI nilai total sebesar Rp9.369.892.912,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.01.08/C.I/4861-764/2024 Tanggal 7 Juni 2024 dan Nomor KN.01.08/C.I/7293/2023 Tanggal 10 Juli 2023 terdiri dari:
   a) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular berupa:
      - 1 (satu) buah Laptop sebesar Rp15.590.000,00 dan 1 (satu) buah BD Max System & Accessories Non UPT sebesar Rp1.826.500.000,00;
      - 3 Unit Mesin Ganexpert IV Modul TCM sebesar Rp1.663.999.998,00;
      - 55 Unit Alat Pemantau Suhu sebesar Rp77.473.660,00
      - 17 Unit Alat Perekam dan Pemantau Suhu Elektronik (VAXTAG) sebesar Rp23.946.404,00;
      - 17 Unit Alat Perekam dan Pemantau Suhu Elektronik (Interface Cradle-USB) sebesar Rp16.202.904,00;
      - 11 Unit Lemari Es Tenaga Listrik A sebesar Rp1.084.510.603,00;
      - 3 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik TCW 3000AC sebesar Rp293.821.578,00;
      - 5 Unit Vaccine Refrigerator Tenaga Listrik RCW 50AC sebesar Rp402.982.085,00;
      - 42 Unit Vaccine Carrier ke Dinas sebesar Rp461.788.068,00;
      - 45 Unit Alat Pemantau Suhu Vaksin Kontinyu sebesar Rp63.360.000,00;
      - 2 Unit Cold Box sebesar Rp21.224.716,00;
      - 3 Unit Kabinet Pendingin Vaksin Heir sebesar Rp70.785.000,00;
      - 1 Unit Vaccine Refrigerator Freezer sebesar Rp112.508.064,00;
      - 3 Unit TB: Mikroskop Binokuler sebesar Rp33.370.425,00;

- 2 Unit Mesin TCM (Ganexpert) sebesar Rp1.148.521.212,00;
- 2 Unit KRIOTERAPI sebesar Rp156.556.000,00;
- 16 Unit IVA KIT sebesar Rp167.859.648,00;
- 14 Unit Klinik Sanitasi Kit sebesar Rp1.372.246.078,00;
- 1 Buag Alat Pembersih sebesar Rp15.925.360,00.

b) Direktorat Imunisasi berupa 1 (satu) unit RTMS 1xWIC Beyondwireless BC141E006/036 sebesar Rp25.105.300,00, 108 (seratus delapan) unit Nilkamal Limited Vaccine Carrier(9000 unit) Model BCV43A With 4 Ice packs sebesar Rp15.029.928,00, 109 (seratus sembilan) unit Nilkamal Limited Vaccine Carrier(6000 unit) Model BCV43A With 4 Ice packs sebesar Rp14.972.567,00, 1 (satu) unit Genset & ATS (Automatic Transfer Switch) sebesar Rp171.275.677,00, 1 (satu) unit Voltage Stabilizer 15 KVAThree Phase sebesar Rp103.481.975,00 dan 1 (satu) unit Coldroom 30m Zhendre sebesar Rp395.759.313,00;

3) Pendapatan hibah diterima oleh Dinas Pendidikan dengan nilai total sebesar Rp201.816.550,00 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi CSR dari Hibah Barang Milik Negara Program Korean E-Learning Improvement Cooperation (Klic) untuk UPTD Satuan Pendidikan SMPN 3 Warunggunung terdiri dari:
   a) 1 Unit Papan Tulis Type Elecktric Blackboard Samsung WM85AUHD85 sebesar Rp16.081.000,00;
   b) 1 unit Televisi Samsung 75 inch size sebesar Rp 16.081.000,00;
   c) 1 Unit Celling Mount Bracket For TV sebesar Rp1.608.100,00;
   d) 1 Unit Celling Mount Bracket for Electric Blackboard Samsung LFD Wall Mount sebesar Rp4.824.300,00;
   e) 1 Unit Tablet PC Samsung Galaxy Tab A8 sebesar Rp10.452.650,00;
   f) 10 Unit Personal Komputer (Laptop) SAMSUNG GALAXY BOOT NT751XFG sebesar Rp 152.769.500,00.
4) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.900.000,00 dari Bank Banten sebagai apresiasi Perangkat Daerah terbaik kedua berupa asset Personal Komputer dengan Nomor Berita

Acara Serah Terima Nomor 032/25-BKAD/2024 Tanggal 24 Januari 2024;

5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.3.300.000,00 dari Bank Banten sebagai apresiasi Perangkat Daerah terbaik ketiga dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/26-BKAD/2024 pada Tanggal 24 Januari 2024 berupa Alat Pendingin;
6) Dinas Perikanan sebesar Rp2.500.000,00 berupa Alat Laboratorium Pertanian (Freezer) Hibah dari LPPM Universitas Serang Raya dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 23-04-2024/01/Rk-STA/LPPM/V/2024 Tanggal 23 April 2024.

c. Koreksi Aset Peralatan Mesin sebesar Rp1.181.671.869,58 terdiri dari:
1) Koreksi terhadap pencatatan Hibah Tahun sebelumnya sebesar Rp452.899.038,00 pada
   a) Kecamatan Maja sebesar Rp2.490.000,00 dari Sdr. Edi Nurhedi, S.Sos, faktur pembelian dan pemasangan Tanggal 26 Mei 2021 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/26-BKAD/2024 tanggal 24 Januari 2024 berupa Alat Kantor Lainnya;
   b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp450.409.038,00 berupa;
      - Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp65.115.038,00;
      - Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp365.285.000,00;
      - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp5.665.000,00;
      - Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.067.000,00;
      - Sumber Tenaga sebesar Rp3.047.000,00;
      - Personal Computer sebesar Rp10.230.000,00.
2) Koreksi Kapitalisasi Aset Ekstrakomptabel menjadi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp728.772.831,58 terdapat pada:
   a) Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp126.950.000,00;
   b) Dinas Administrai Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Komputer Jaringan sebesar Rp5.600.000,00;
   c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Rambu Tidak Bersuar sebesar Rp27.720.000,00;

d) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.738.250,00 pada:
- Puskesmas Mekarsari berupa Flood Lights sebesar Rp 8.700.000,00;
- Puskesmas Pamandegan berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp5.500.000,00;
- Puskesmas Muncang berupa Alat kantor Lainnya sebesar Rp6.500.000 dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp4.300.000;
- Puskesmas Cipanas berupa Rambu Tidak Bersuar sebesar Rp1.738.250,00.

e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp92.787.000,00 berupa:
- Compacting Equipment sebesar Rp72.787.000,00;
- Alat Kantor Lainnya sebesar Rp10.000.000,00;
- Sumur Pemboran sebesar Rp10.000.000,00.

f) Dinas Pendidikan sebesar Rp19.533.000,00 berupa:
- Pompa sebesar Rp6.000.000,00;
- Komputer Jaringan sebesar Rp1.500.000,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp3.033.000,00;
- Transport And Storage Equipment For Liquid sebesar Rp4.800.000,00;
- Peralatan Permainan sebesar Rp4.200.000,00.

g) Dinas Perhubungan berupa Rambu Tidak Bersuar sebesar Rp420.944.581,58;

h) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp 8.500.000,00.

d. Reklas sebesar Rp826.031.516,00 terdiri dari:

1) Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp4.230.000,00 terdapat pada:

a) Badan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp1.310.000,00, menambah nilai aset tetap Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp524.000,00, Personal Komputer sebesar Rp759.800,00 dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp26.200,00;

b) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp1.610.000,00, menambah nilai aset tetap Kendaraan Bermotor Penumpang;

c) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.310.000,00, menambah nilai aset tetap;
- Mebel sebesar Rp52.400,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp275.100,00;
- Alat Rumah Tangga lainnya sebesar Rp52.400,00;
- Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp13.100,00;
- Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp26.200,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp13.100,00;
- Personal Komputer sebesar Rp707.400,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp144.100,00;
- Peralatan Jaringan sebesar Rp26.200,00.

2) Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan sebesar Rp9.056.580,00 menambah aset tetap Mebel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp32.000.000,00 menambah aset tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

4) Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp 206.846.520,00 terdapat pada Dinas Pendidikan di sekolah:

a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kalanganyar sebesar Rp5.550.000,00 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian dan sebesar Rp2.500.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gunungkencana sebesar Rp11.435.000,00 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;

c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Leuwidamar sebesar Rp4.012.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rangkasbitung sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya, sebesar Rp1.250.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan sebesar Rp1.000.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cipanas sebesar Rp1.000.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya, Sebesar Rp4.018.020,00 berupa Alat Pendingin dan sebesar Rp1.225.500,00 berupa Peralatan Personal Komputer;
f) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Cibadak sebesar Rp 4.440.000,00 berupa Mebel;
g) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wanasalam sebesar Rp12.000.000,00 berupa Mebel, sebesar Rp10.000.000,00 berupa Alat Pendingin, sebesar Rp3.000.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), sebesar Rp2.220.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Matematika dan sebesar Rp3.250.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;
h) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wanasalam sebesar Rp6.000.000,00 berupa Peralatan Studio Vidio dan Film;
i) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Warunggunung sebesar Rp7.000.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;
j) Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Rangkasbitung sebesar Rp6.032.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;
k) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malingping sebesar Rp1.400.000,00 berupa Peralatan Permainan;
l) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Maja sebesar Rp1.950.000,00 berupa Peralatan Permainan;
m) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cimarga sebesar Rp1.500.000,00 berupa Peralatan Permainan;
n) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satap Cihara sebesar Rp4.799.000,00 berupa Peralatan Permainan;
o) Sekolah Dasar Negeri 1 Tambakbaya sebesar Rp3.000.000,00 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
p) Sekolah Dasar Negeri 1 Narimbang Mulya sebesar Rp3.000.000,00 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Mebel sebesar Rp4.000.000,00, sebesar Rp1.500.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Ipa Lanjutan dan sebesar Rp4.000.000,00 berupa Peralatan

Personal Komputer;

q) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipalabuh sebesar Rp6.000.000,00 berupa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dan sebesar Rp2.300.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

r) Sekolah Dasar Negeri 3 Citorek Tengah sebesar Rp4.800.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

s) Sekolah Dasar Negeri 1 Suka Rendah sebesar Rp2.800.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

t) Sekolah Dasar Negeri 1 Luhurjaya sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Kantor lainnya;

u) Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja Malingping sebesar Rp1.500.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

v) Sekolah Dasar Negeri 1 Kapunduhan sebesar Rp4.995.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya;

w) Sekolah Dasar Negeri 1 Asem sebesar Rp1.500.000,00 berupa Alat Pembersih dan sebesar Rp1.950.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

x) Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Cae sebesar Rp1.250.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

y) Sekolah Dasar Negeri 1 Cirompang sebesar Rp1.500.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

z) Sekolah Dasar Negeri Curugbadak sebesar Rp4.440.000,00 berupa Peralatan Studio Audio;

aa) Sekolah Dasar Negeri 1 Sipayung sebesar Rp2.500.000,00 berupa Peralatan Studio Audio;

bb) Sekolah Dasar Negeri 3 Bojongjuruh sebesar Rp3.330.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

cc) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipedang sebesar Rp5.500.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

dd) Sekolah Dasar Negeri 3 Kaduagung Timur sebesar Rp4.700.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

ee) Sekolah Dasar Negeri 1 Cikadu sebesar Rp3.000.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

ff) Sekolah Dasar Negeri 2 Muncangkopong sebesar Rp3.500.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

gg) Sekolah Dasar Negeri 1 Curugbitung sebesar Rp5.000.000,00 Peralatan Personal Komputer;

hh) Sekolah Dasar Negeri 1 Cipanas sebesar Rp4.500.000,00 Peralatan Personal Komputer;

ii) Sekolah Dasar Negeri 1 Wanasari sebesar Rp6.500.000,00 Peralatan Personal Komputer;

jj) Sekolah Dasar Negeri 1 Cireundeu sebesar Rp3.100.000,00 Peralatan Personal Komputer;

kk) Sekolah Dasar Negeri 1 Mayak sebesar Rp3.000.000,00 berupa Alat Pendukung Pencarian;

ll) Sekolah Dasar Negeri 2 Mekarsari Rangkasbitung sebesar Rp5.000.000,00 berupa Peralatan Permaianan;

mm) Sekolah Dasar Negeri 3 Sukasari sebesar Rp5.600.000,00 berupa Peralatan Senam;

nn) Sekolah Dasar Negeri 3 Curugpanjang sebesar Rp1.500.000,00 berupa Peralatan Senam;

5) Reklas Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp19.582.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan di sekolah:

a) Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Cibadak sebesar Rp3.582.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya dan sebesar Rp3.500.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

b) Taman Kanak-kanak Negeri Syeh Malka sebesar Rp1.500.000,00 berupa Alat Kantor lainnya dan sebesar Rp1.300.000,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);

c) Taman Kanak-kanak Negeri Pelita Kencana sebesar Rp6.200.000,00 berupa Personal Komputer;

d) Taman Kanak-kanak Negeri Budi Asih sebesar Rp3.500.000,00 berupa Peralatan Personal Komputer;

6) Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin karena barang tersebut masuk dalam kategori Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp553.316.416,00 terdapat pada:
   a) Puskesmas Cilograng sebesar Rp74.500.000,00 berupa Personal Komputer;
   b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp177.026.962,00 berupa Mebel;
   c) Dinas Pendidikan sebesar Rp301.789.454,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
7) Reklas Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 karena barang tersebut masuk dalam kategori Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Alat kantor Lainnya;

2. Mutasi berkurang merupakan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Reklas sebesar Rp89.118.000,00 terdiri dari:
      1) Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa Bos sebesar Rp16.468.000,00 pada Dinas Pendidikan;
      2) Reklas Aset Peralatan dan Mesin menjadi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp72.650.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
   b. Reklas Aset Peralatan dan Mesin ke Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp9.118.329.062,00 terdiri dari:
      1) Dinas Pendidikan sebesar Rp8.760.293.234,00 terdiri dari:
         a) Pompa sebesar Rp34.477.000,00;
         b) Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp650.000,00;
         c) Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi sebesar Rp1.100.000,00;
         d) Perkakas Kontruksi Logan Yang Transportable (Berpindah) sebesar Rp1.500.000,00;
         e) Pekakas Bengkel Kayu sebesar Rp800.000,00;
         f) Perkakas Bengkel Kerja sebesar Rp4.000,00;
         g) Peralatan Tukang Kayu sebesar Rp675.000,00;

h) Peralatan Bengkel Khusus Peladam sebesar Rp300.000,00;
i) Alat Ukur Lain-Lain sebesar Rp45.000,00;
j) Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebesar Rp2.500.000,00;
k) Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebesar Rp2.700.000,00;
l) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp257.992.000,00;
m) Alat kantor Lainnya sebesar Rp354.674.544,00;
n) Mebel sebesar Rp7.413.502.786,00;
o) Alat Pembersih sebesar Rp270.000,00;
p) Alat Pendingin sebesar Rp379.147.600,00;
q) Alat Dapur sebesar Rp19.156.300,00;
r) Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp122.481.199,00;
s) Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp9.000.000,00;
t) Meja Rapat Pejabat sebesar Rp499.500,00;
u) Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp21.375.000,00;
v) Peralatan Studio Audio sebesar Rp14.316.500,00;
w) Peralatan Studio Vidio dan Film sebesar Rp15.562.930,00;
x) Peralatan Cetak sebesar Rp351.107,00;
y) Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebesar Rp900.000,00;
z) Alat Kedokteran Umum sebesar Rp450.000,00;
aa) Alat Kesehatan Umum lainnya sebesar Rp1.695.998,00;
bb) Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas sebesar Rp700.000,00;
cc) Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp70.000,00;
dd) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika sebesar Rp1.500.000,00;
ee) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian sebesar Rp7.220.100,00;
ff) Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN sebesar Rp1.730.000,00;
gg) Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebesar Rp2.625.000,00;
hh) Personal Komputer sebesar Rp1.386.450,00;
ii) Peralatan Mini Komputer sebesar Rp4.000.000,00;

jj) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp9.498.000,00;
kk) Peralatan Jaringan sebesar Rp33.514.620,00;
ll) Produksi Lainnya sebesar Rp1.200.000,00;
mm) Alat Penolong sebesar Rp1.650.000,00;
nn) Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp16.250.000,00;
oo) Peralatan Alat Olahraga Atletik sebesar Rp799.200,00;
pp) Peralatan Permainan sebesar Rp13.210.000,00;
qq) Peralatan Senam sebesar Rp8.813.400,00.

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp239.020.628,00 tedapat pada:
   a) Dinas Kesehatan Induk sebesar Rp17.840.800,00 terdiri dari:
      - Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp6.500.000,00;
      - Alat Kedokteran Umum sebesar Rp9.564.800,00;
      - Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp1.776.000,00;
   b) RUD Dr. Adjidarmo sebesar Rp59.997.429,00 terdiri dari
      - Mebel sebesar Rp37.400.000,00;
      - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp12.055.366,00;
      - Alat Kedokteran Umum sebesar Rp214.200,00;
      - Peralatan Jaringan sebesar Rp10.327.863,00.
   c) Puskesmas Rangkasbitung sebesar Rp4.769.570,00 terdiri dari:
      - Mebel sebesar Rp2.169.570,00;
      - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp900.000,00;
      - Personal Komputer sebesar Rp250.000,00;
      - Peralatan Mini Komputer sebesar Rp200.000,00;
      - Peralatan Personal Komputer sebesar Rp1.250.000,00.
   d) Puskesmas Mekarsari sebesar Rp8.490.000,00 berupa Mebel;
   e) Puskesmas kalanganyar sebesar Rp5.889.120,00 terdiri dari:
      - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp270.000,00;
      - Alat Kedokteran Umum sebesar Rp3.635.560,00;
      - Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp1.100.000,00;
      - Alat Kedokteran Nuklir sebesar Rp883.560,00.

f) Puskesmas Cibadak sebesar Rp9.560.000,00 terdiri dari:
- Mebel sebesar Rp5.750.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp2.210.000,00;
- Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp1.600.000,00;

g) Puskesmas Warunggunung sebesar Rp17.533.700,00 terdiri dari:
- Mebel sebesar Rp4.440.000,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp2.969.700,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp80.000,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp8.759.000,00;
- Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp110.000,00;
- Alat Kedokteran THT sebesar Rp150.000,00;
- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp475.000,00;
- Alat Kedokteran Gawat Darurat sebesar Rp550.000,00.

h) Puskesmas Baros sebesar Rp750.000,00 berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;

i) Puskesmas Cimarga sebesar Rp5.684.000,00 terdiri dari:
- Alat Pendingin sebesar Rp420.000,00;
- Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp3.000.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp2.264.000,00;

j) Puskesmas Cikulur sebesar Rp6.564.055,00 terdiri dari:
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp265.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp3.245.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp1.325.000,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp944.055,00;
- Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp785.000,00.

k) Puskesmas Cisimeut sebesar Rp12.120.580,00 terdiri dari:
- Mebel sebesar Rp6.838.800,00;
- Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp5.281.780,00.

l) Puskesmas Pajagan sebesar Rp14.688.000,00 terdiri dari:
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp6.300.000,00;

- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp5.580.000,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp1.190.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp829.000,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp200.000,00;
- Alat Laboratorium Umum sebesar Rp199.000,00;
- Alat Labitraorium Lainnya sebsar Rp390.000,00.

m) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp1.950.000,00 berupa Pompa;

n) Puskesmas Cirinten sebesar Rp3.635.560,00 berupa Alat Kedokteran Umum;

o) Puskesmas Gunungkencana sebesar Rp35.780.075,00 terdiri dari:

- Alat Pendingin sebesar Rp5.250.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.000.000,00;
- Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp11.375.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp13.440.075,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp375.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp1.400.000,00;
- Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp103.000,00;
- Alat laboratorium Umum sebesar Rp837.000,00.

p) Puskesmas Banjarsari sebesar Rp1.538.739,00 terdiri dari:

- Alat Pengukur Keadaan Alam sebesar Rp664.866,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp873.873,00.

q) Puskesmas Sobang sebesar Rp1.970.000,00 berupa Peralatan Jaringan;

r) Puskesmas Cihara sebesar Rp2.280.000,00 berupa Alat Pendingin;

s) Puskesmas Bayah sebesar Rp4.804.000,00 terdiri dari:

- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.454.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp2.350.000,00.

t) Puskesmas Gunungkendeng sebesar Rp23.175.000,00 terdiri dari:

- Mebel sebesar Rp16.675.000,00;

- Alat Pendingin sebesar Rp2.650.000,00;
- Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp3.850.000,00;

3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp21.830.000,00 terdiri dari:
   a) Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp15.900.000,00;
   b) Kursi Rapat Pejabat sebesar Rp3.180.000,00;
   c) Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.750.000,00.
4) Inspektorat aset tetap Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp14.280.000,00;
5) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp13.800.000,00 terdiri dari;
   a) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp10.800.000,00;
   b) Ukur/Instrument sebesar Rp3.000.000,00.
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.350.000,00 dari aset tetap Mebel;
7) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp28.724.000,00 terdiri dari:
   a) Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebesar Rp1.100.000,00;
   b) Alat Pengolahan lainnya sebesar Rp3.200.000,00;
   c) Alat Kantor Lainnya sebesar Rp1.000.000,00;
   d) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.424.000,00;
   e) Sepatu Lapangan sebesar Rp21.000.000,00;
8) Kecamatan Banjarsari sebesar Rp560.000,00 berupa Peralatan Studio Audio;
9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp6.830.000,00 terdiri dari:
   a) Mebel sebesar Rp3.600.000,00;
   b) Meja Rapat Pejabat sebesar Rp1.330.000,00;
   c) Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp600.000,00;
   d) Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp1.300.000,00.
10) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp3.000.000,00 berupa Mebel.
11) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp3.200.000,00 terdiri dari Alat Prosesing sebesar Rp2.250.000,00 dan Peralatan Jaringan sebesar Rp950.000,00;
12) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.606.200,00 terdiri dari:

a) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp980.000,00;
b) Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp6.626.200,00.

13) Dinas Perhubungan aset tetap Rambu Tidak Bersuar sebesar Rp15.400.000,00.
14) Dinas Perikanan sebesar Rp850.000,00 berupa Peralatan Jaringan;
15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.585.000,00 terdiri dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.060.000,00 dan Personal Komputer sebesar Rp525.000,00.

c. Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain karena kondisinya sudah rusak berat sebesar Rp18.815.165.278,08 terdapat pada:

1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.561.901,68 terdiri dari:
   a) Mesin Ketik sebesar Rp2.159.000,00;
   b) Alat kantor Lainnya sebesar Rp4.124.724,00;
   c) Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp1.278.177,68.
2) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp96.375.462,00 terdiri dari:
   a) Electric Generating Set sebesar Rp10.945.000,00;
   b) Alat Pendingin sebesar Rp9.244.286,00;
   c) Alat laboratorium Microbiologi sebesar Rp1.700.000,00;
   d) Personal Komputer sebesar Rp11.700.000,00;
   e) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp56.392.978,00;
   f) Peralatan Jaringan sebesar Rp6.393.198,00.
3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp171.302.074,00 terdiri dari:
   a) Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus sebesar Rp115.750.000,00;
   b) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp7.445.000,00;
   c) Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.071.124,00;
   d) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.248.000,00;
   e) Peralatan Studio Audio sebesar Rp8.988.000,00;
   f) Personal Komputer sebesar Rp29.304.950,00;

g) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp6.495.000,00;

4) Kecamatan Lebakgedong sebesar Rp18.495.000,00 terdiri dari:
   a) Personal Komputer sebesar Rp16.090.000,00;
   b) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp2.405.000,00.
5) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp112.488.154,03 terdiri dari:
   a) Mebel Sebesar Rp3.000.000,00;
   b) Alat Pendingin sebesar Rp15.188.270,28;
   c) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp5.437.500,00;
   d) Personal Komputer sebesar Rp46.153.650,00;
   e) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp42.708.733,75.
6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp59.625.099,00 terdiri dari:
   a) Alat Pendingin sebesar Rp10.392.318,00;
   b) Personal Komputer sebesar Rp49.232.781,00.
7) Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp40.991.855,00 terdiri dari:
   a) Mebel sebesar Rp7.142.855,00;
   b) Alat Dapur sebesar Rp3.000.000,00;
   c) Personal Komputer sebesar Rp23.849.000,00;
   d) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp7.000.000,00.
8) Kecamatan Bayah sebesar Rp15.600.000,00 terdiri dari:
   a) Personal Komputer sebesar Rp11.900.000,00;
   b) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp3.700.000,00.
9) Kecamatan Bojongmanik sebesar Rp28.675.000,00 terdiri dari:
   a) Alat Penyimpan Pelengkapan Kantor sebesar Rp3.000.000,00;
   b) Mebel sebesar Rp1.000.000,00;
   c) Alat Pembersih sebesar Rp2.200.000,00;
   d) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp2.400.000,00;
   e) Alat Komunikasi Radio VHF sebesar Rp8.865.000,00;
   f) Alat Laboratorium Umum sebesar Rp2.000.000,00;
   g) Pesonal Komputer sebesar Rp6.250.000,00;
   h) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp2.960.000,00.

10) Kecamatan Leuwidamar sebesar Rp16.400.000,00 berupa aset tetap Kendaraan Bermotor Beroda Dua.
11) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp161.427.480,00 terdiri dari:
    a) Alat Pendingin sebesar Rp7.870.771,00;
    b) Alat laboratorium Pertanian sebesar Rp7.500.000,00;
    c) Personal Komputer sebesar Rp132.402.709,00;
    d) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp13.654.000,00.
12) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp113.653.297,55 terdiri dari:
    a) Alat Pendingin sebesar Rp3.500.000,00;
    b) Peralatan Studio Vidio dan Film sebesar Rp2.229.268,29;
    c) Personal Komputer sebesar Rp45.825.000,00;
    d) Peralatan Mainframe sebesar Rp53.999.550,00;
    e) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp8.099.479,26.
13) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp181.987.122,17 berupa Aset tetap Personal Komputer;
14) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp79.790.489,00 terdiri dari:
    a) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.015.644,00;
    b) Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp2.983.300,00;
    c) Personal Komputer sebesar Rp9.005.500,00;
    d) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp5.266.045,00;
    e) Alat Pendukung Pencarian sebesar Rp59.520.000,00.
15) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp653.541.519,18 terdiri dari:
    a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp18.000.000,00;
    b) Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebesar Rp84.957.395,54;
    c) Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp14.826.000,00;
    d) Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp2.082.900,00;
    e) Universal Tester sebesar Rp1.456.660,00;
    f) Alat-alat Peternakan sebesar Rp238.967.295,00;
    g) Alat Kantor Lainnya sebesar Rp90.207.000,00;
    h) Mebel sebesar Rp1.046.331,00;
    i) Alat Pendingin sebesar Rp8.659.537,00;

j) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp24.640.675,64;
k) Peralatan Studio Audio sebesar Rp15.663.450,00;
l) Alat Laboratorium Penunjang sebesar Rp95.670.300,00;
m) Personal Komputer sebesar Rp37.396.825,00;
n) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp19.967.150,00.

16) Sekretariat DPRD sebesar Rp24.415.396,32 terdiri dari:
a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp9.000.000,00;
b) Mebel sebesar Rp14.244.000,00;
c) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp1.171.396,32.

17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp12.784.107,55 terdiri dari:
a) Mebel sebesar Rp3.734.676,00;
b) Peralatan Deteksi Intel sebesar Rp9.049.431,55.

18) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp213.520.218,95 terdiri dari:
a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp71.361.100,00;
b) Mebel sebesar Rp6.212.655,00;
c) Alat Pendingin sebesar Rp4.986.000,00;
d) Pesonal Komputer sebesar Rp108.965.714,95;
e) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp21.994.749,00.

19) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp50.178.000,00 terdiri dari:
a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp26.090.000,00;
b) Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp1.760.000,00;
c) Personal Komputer sebesar Rp14.850.000,00;
d) Peralatan Mini Komputer sebesar Rp5.700.000,00;
e) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp1.778.000,00;

20) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp48.037.108,16 terdiri dari:
a) Alat Ukur/Pembanding sebesar Rp6.910.000,00;
b) Alat Pendingin sebesar Rp25.272.856,05;
c) Kursi Kerja Pejabat sebesar Rp1.415.000,00;

d) Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp2.457.222,22;
e) Alat laboratorium Umum sebesar Rp4.847.654,32;
f) Personal Komputer sebesar Rp6.000.000,00;
g) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp1.134.375,57.

21) Sekretariat Daerah sebesar Rp246.717.907,38 terdiri dari:
a) Alat Pengangkat sebesar Rp19.430.000,00;
b) Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp109.000.000,00;
c) Mebel sebesar Rp10.692.400,00;
d) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp3.000.000,00;
e) Personal Komputer sebesar Rp49.921.200,00;
f) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp54.674.307,38.

22) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.026.036.003,84 terdiri dari:
a) Grader sebesar Rp800.000.000,00;
b) Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp109.000.000,00;
c) Alat Pendingin sebesar Rp3.000.000,00;
d) Peralatan Studio Audio sebesar Rp1.540.000,00;
e) Alat Komunikasi Telephon sebesar Rp1.500.000,00;
f) Personal Komputer sebesar Rp22.000.000,00;
g) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp88.996.003,84.

23) Dinas Perhubungan sebesar Rp42.545.548,63 terdiri dari:
a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp16.400.000,00;
b) Personal Komputer sebesar Rp21.119.371,63;
c) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp5.026.177,00.

24) Dinas Kesehatan sebesar Rp14.952.512.000,66 terdiri dari:
a) Dinas Kesehatan Induk sebesar Rp95.986.110,80 berupa:
- Alat Kantor Lainnya sebesar Rp15.154.878,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp9.528.750,00;
- Alat Dapur sebesar Rp1.500.000,00;
- Peralatan Cetak sebesar Rp2.100.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp61.283.720,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp6.418.762,80.

b) RSUD. Dr. Adjidarmo sebesar Rp11.490.361.034,50 terdiri dari:

- Perkakas Bengkel Listrik sebesar Rp177.002.375,00;
- Mesin Tik sebesar Rp1.100.000,00;
- Mebel sebesar Rp219.753.650,30;
- Alat Pendingin sebesar Rp51.913.367,00;
- Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) sebesar Rp3.920.000,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.910.896,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp147.688.646,40;
- Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp611.222.538,12;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp8.672.500,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp76.222.462,80;
- Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebesar Rp1.386.000,00;
- Alat Kesehatan Patalogi Anatomy sebesar Rp8.714.904.000,00;
- Alat Kedokteran Gawat Darurat sebesar Rp377.878.131,88;
- Alat Kesehatan Perawatan sebesar Rp1.075.084.467,00;
- Alat laboratorium Umum sebesar Rp4.202.000,00;
- Alat laboratorium Makanan sebesar Rp16.500.000,00;

d) Puskesmas Rangkasbitung sebesar Rp174.461.067,47 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp4.192.741,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp107.290.133,00;
- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp39.728.193,47;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp10.250.000,00.

e) Puskesmas Mekarsari sebesar Rp179.708.643,60 terdiri dari:

- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp1.650.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp9.191.082,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp88.000.000,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp5.940.000,00;
- Alat Kedokteran Jantung sebesar Rp28.881.619,00;

- Alat Laboratorium Lain sebesar Rp10.692.304,00;
- Personal Komputer sebesar Rp27.964.943,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp7.388.695,60.

f) Puskesmas Kolelet sebesar Rp46.937.000,00 terdiri dari:

- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp4.973.800,00;
- Personal Komputer sebesar Rp37.963.200,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp4.000.000,00.

g) Puskesmas Kalanganyar sebesar Rp174.870.000,00 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp39.000.000,00;
- Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp134.000.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.870.000,00.

h) Puskesmas Cibadak sebesar Rp95.540.000,00 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp3.950.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp60.390.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp18.200.000,00.

i) Puskesmas Baros sebesar Rp120.290.133,00 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp107.290.133,00.

j) Puskesmas Sarageni sebesar Rp83.478.361,26 terdiri dari:

- Alat kantor Lainnya sebesar Rp1.672.500,00;
- Alat Dapur sebesar Rp9.300.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp15.018.164,00;
- Personal Komputer sebesar Rp57.487.697,26.

k) Puskesmas Cikulur sebesar Rp145.519.214,00 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp5.585.720,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp6.181.400,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp107.290.133,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar

Rp5.318.323,00;

- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp8.143.638,00.

l) Puskesmas Leuwidamar sebesar Rp250.663.010,45 terdiri dari:

- Alat Timbangan/Biara sebesar Rp5.487.875,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp23.463.641,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp3.850.000,00;
- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp107.871.718,65;
- Alat laboratorium Umum sebesar Rp87.213.881,00;
- Alat Laboratorium Microbiologi sebesar Rp5.429.339,00;
- Alat Laboratorium Lain sebesar Rp10.692.308,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp6.654.247,80.

m) Puskesmas Cisimeut sebesar Rp74.972.940,53 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Mebel sebesar Rp1.980.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp5.585.720,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp1.499.147,80;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp4.021.700,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp1.094.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp31.840.677,13;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp15.951.695,60.

n) Puskesmas Sajira sebesar Rp115.772.522,78 terdiri dari:

- Peralatan Studio Audio sebesar Rp1.450.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp11.885.000,00;
- Alat Kedokteran Jantung sebesar Rp50.590.502,65;
- Personal Komputer sebesar Rp51.847.020,13.

o) Puskesmas Maja sebesar Rp19.030.000,00 terdiri dari:

- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.030.000,00;
- Komputer Jaringan sebesar Rp18.000.000,00;

p) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp554.966.306,91 terdiri dari:

- Pompa sebesar Rp2.899.000,00;

- Alat Kalibrasi sebesar Rp6.467.000,00;
- Alat Dapur sebesar Rp10.700.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp10.004.770,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp5.800.000,00;
- Peralatan Studio Vidio dan Film sebesar Rp6.445.370,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp49.537.108,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp183.372.474,00;
- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp1.234.200,00;
- Alat Kedokteran Anak sebesar Rp45.437.303,00;
- Alat Kedokteran Poliklinik sebesar Rp19.397.744,00;
- Alat Kedokteran Jantung sebesar Rp50.590.502,65;
- Alat Laboratorium Kimia sebesar Rp47.207.738,00;
- Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp16.806.284,00;
- Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp6.217.200,00;
- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis sebesar Rp3.014.801,00;
- Alat Laboratorium Lain sebesar Rp10.692.308,00;
- Personal Komputer sebesar Rp58.194.040,26;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp20.948.464,00.

q) Puskesmas Muncang sebesar Rp68.508.536,57 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp25.000.000,00;
- Alat Dapur sebesar Rp3.083.928,57;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp3.950.000,00;
- Alat laboratorium Lain sebesar Rp10.692.308,00;
- Personal Komputer sebesar Rp25.782.300,00.

r) Puskesmas Bojongmanik sebesar Rp 42.114.269,00 terdiri dari:

- Mebel sebesar Rp23.931.328,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp5.482.900,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp12.700.041,00.

s) Puskesmas Cipanas sebesar Rp489.214.722,65 terdiri dari:
- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp26.000.000,00;
- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp1.077.301,00;
- Alat kantor Lainnya sebesar Rp1.570.000,00;
- Mebel sebesar Rp12.120.000,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp2.500.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp18.125.000,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.998.294,00;
- Sumber Tenaga sebesar Rp7.500.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp88.942.385,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp14.900.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp84.077.970,00;
- Alat Kedokteran Jantung sebesar Rp50.590.502,65;
- Alat laboratorium Umum sebesar Rp6.000.000,00;
- Alat laboratorium Kimia sebesar Rp103.726.720,00;
- Komputer Jaringan sebesar Rp18.000.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp25.782.300,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp25.304.250,00.

t) Puskesmas Prabugantungan sebesar Rp42.194.040,26 terdiri dari Personal Komputer;

u) Puskesmas Cigemblong sebesar Rp53.837.213,13 terdiri dari Personal Komputer sebesar Rp44.511.963,13 dan Peralatan Personal Komputer sebesar Rp9.325.250,00;

v) Puskesmas Malingping sebesar Rp46.495.793,74 terdiri dari:
- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp3.583.352,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp4.721.241,74;
- Alat Laboratorium Umum sebesar Rp2.000.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp18.200.000,00;

- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp4.991.200,00.

w) Puskesmas Binuangeun sebesar Rp170.218.406,00 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Kantor Lainnya sebesar Rp23.000.000,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp7.500.000,00;
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp8.885.720,00;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp2.900.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp40.871.356,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp18.527.000,00;
- Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp6.875.000,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp9.181.030,00;
- Alat Laboratorium Umum sebesar Rp18.940.000,00;
- Personal Komputer sebesar Rp18.200.000,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp2.338.300,00.

x) Puskesmas Parungsari sebesar Rp14.168.500,0 terdiri dari aset Personal Komputer;

y) Puskesmas Panggarangan sebesar Rp403.204.174,01 terdiri dari:

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp13.000.000,00;
- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp4.742.100,00;
- Alat Pendingin sebesar Rp18.447.760,01;
- Peralatan Studio Audio sebesar Rp5.800.000,00;
- Alat Kedokteran Umum sebesar Rp43.201.035,00;
- Alat Kedokteran Gigi sebesar Rp107.290.133,00;
- Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar Rp1.500.000,00;
- Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp57.687.578,00;
- Alat Kedokteran Nuklir sebesar Rp16.904.714,00;
- Alat Laboratorium Umum sebesar Rp113.754.354,00;
- Personal Komputer sebesar Rp9.100.000,00;
- Peralatan Personal Komputer sebesar Rp11.776.500,00.

25) Dinas Pendidikan sebesar Rp112.500.000,00 terdiri dari:
    a) Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp91.200.000,00;
    b) Kendaraan bermotor beroda Dua sebesar Rp21.300.000,00;
26) Perikanan sebesar Rp74.145.308,98,00 terdiri dari:
    a) Alat Pendingin sebesar Rp10.032.098,00;
    b) Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp15.080.521,00
    c) Personal Computer sebesar Rp28.362.722,00;
    d) Peralatan Personal Computer sebesar Rp20.669.967,98
27) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp16.400.000,00 berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
28) Kecamatan Wanasalam sebesar Rp237.459.224,00 terdiri dari:
    a) Alat Ukur Universal sebesar Rp2.185.900,00;
    b) Alat Pemeliharaan/ Tanaman/ Ikan/ Ternak sebesar Rp1.200.000,00;
    c) Mesin Ketik sebesar Rp2.150.000,00;
    d) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp3.000.000,00;
    e) Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.071.124,00;
    f) Mebel sebesar Rp2.000.000,00;
    g) Alat Pembersih sebesar Rp1.250.000,00;
    h) Alat Dapur sebesar Rp3.920.000,00;
    i) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp10.533.750,00;
    j) Peralatan Studio Audio sebesar Rp10.000.000,00;
    k) Peralatan Studio Video dan Film sebesar Rp3.000.000,00;
    l) Witsher/Menara Antena sebesar Rp15.602.000,00;
    m) Alat Laboratorium Umum sebesar Rp5.468.750,00;
    n) Alat Peraga Praktek Sekolah Studi: Ipa Lanjutan sebesar Rp5.625.000,00;
    o) Personal Komputer sebesar Rp136.518.500,00;
    p) Peralatan Personal Komputer sebesar Rp32.934.200,00.

5.1.6.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang di peroleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai, terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (Lift, Instalansi listrik beserta generator) atau asset yang melekat pada aset tetap (suatu aset tetap yang alokasinya melekat pada aset lain). Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp1.806.926.269.076,57 dapat dilihat pada tabel 5.92 berikut:

Tabel 5.92
SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		1.659.425.421.292,11	1.546.524.927.288,34	112.900.494.003,77
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**1.659.425.421.292,11**	**1.546.524.927.288,34**	**112.900.494.003,77**
3	Mutasi Tambah				
	a.	Pengadaan	130.234.495.550,00	120.796.480.879,00	9.438.014.671,00
	b.	Hibah	0,00	1.109.088.500,00	(1.109.088.500,00)
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	17.711.140.365,00	53.158.392.197,00	(35.447.251.832,00)
	d.	Koreksi	0,00	81.059.615,00	(81.059.615,00)
	e.	Reklas	27.173.757.237,10	27.292.863.352,52	(119.106.115,42)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	g.	Retensi			
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**175.119.393.152,10**	**202.437.884.543,52**	**(27.318.491.391,42)**
4	Mutasi Kurang				
	a.	Hibah	0,00	1.585.970.300,00	(1.585.970.300,00)
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	17.711.140.365,00	53.158.392.197,00	(35.447.251.832,00)
	c.	Penghapusan	105.000.000,00	1.927.679.063,90	(1.822.679.063,90)
	d.	Koreksi	5.761.843.449,64	0,00	5.761.843.449,64
	e.	Reklas	3.896.329.833,00	21.441.148.060,00	(17.544.818.227,00)
	JUMLAH MUTASI KURANG		**27.474.313.647,64**	**78.113.189.620,90**	**(50.638.875.973,26)**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**147.645.079.504,46**	**124.324.694.922,62**	**23.320.384.581,84**
5	Penyajian Aset Tetap		1.807.070.500.796,57	1.670.849.622.210,96	136.220.878.585,61
	Pengurangan				
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	144.231.720,00	11.424.200.918,85	(11.279.969.198,85)
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		**144.231.720,00**	**11.424.200.918,85**	**(11.279.969.198,85)**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		1.806.926.269.076,57	1.659.425.421.292,11	147.500.847.784,46
7	Akumulasi Penyusutan		658.383.864.369,39	576.735.586.879,35	81.648.277.490,04

SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
8	Nilai Buku Per 31 Desember	**1.148.542.404.707,18**	**1.082.689.834.412,76**	**65.852.570.294,42**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp175.119.393.152,10 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp130.234.495.550,00;
   b. Reklas sebesar Rp27.173.757.237,10 terdiri dari:
      1) Reklas dari Beban Tidak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.974.423.000,00 untuk penanganan rehabilitasi akibat bencana alam terdapat pada:
         a) Rehabilitasi Ruangan Guru SMPN 1 Rangkasbitung, jenis pekerjaan Rehab Bagian Atas Ruang Guru sebesar Rp234.676.000,00, dikarenakan bencana hujan deras/cuaca ekstrim;
         b) Rehabilitasi Ruang Kelas Kelas (6 Ruangan) SDN 1 Situregen Kecamatan Panggarangan sebesar Rp480.000.000,00, dikarenakan bencana hujan deras/cuaca ekstrim;
         c) Rehabilitasi Ruang Kelas Kelas SDN 2 Giriharja Kecamatan Cipanas, Kp Cikaak. Desa Giriharja Kecamatan Cipanas sebesar Rp573.550.000,00, dikarenakan bencana hujan deras dan tanah longsor;
         d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pagar Sekolah SMPN 1 Cimarga Jalan Raya Leuwidamar Km 09, Desa Margajaya Kecamatan Cimarga sebesar Rp117.147.000,00, dikarenakan bencana gempa bumi;
         e) Rehabilitasi 4 Ruang Kelas sebesar Rp377.365.000,00 dan Rehabilitasi Ruangan Perpustakaan SDN 1 Malabar Kp. Malabar Desa Malabar Kecamatan Cibadak sebesar Rp 191.685.000,00 dikarenakan bencana pergeseran tanah akibat hujan deras;

2) Reklas dari Beban Barang dan Jasa karena termasuk kapitalisasi aset sebesar Rp5.604.139.537,10 terdiri dari:
   a) Beban Pemaliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp48.920.000,00 direklas ke Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
   b) Beban Honorarium Pengadaan barang dan Jasa sebesar Rp1.010.000,00 dan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.089.500,00 direklas ke Bangunan Gedung Kantor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   c) Beban Honorarium Pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.310.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp.5.000.000,00 serta Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp5.000.000,04 direklas ke Pagar pada; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   d) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp84.412.309,00, Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp219.224.873,10 dan Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp44.217.420,00 direklas ke :
      - Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebasar Rp38.592.403,00;
      - Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp21.842.340,00;
      - Bangunan Gedung tempat Ibadah sebesar Rp85.652.274,10;
      - Taman sebesar Rp22.375.080,00;
      - Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp179.392.505,00.
   e) Beban Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp29.000.000,00 dan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp97.617.840,00 direklas ke Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

f) Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp35.550.000,00, Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp36.631.000,00, dan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp5.730.000 00 di reklas ke Bangunan Gedung Pemotong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

g) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp2.756.000,00direklas ke Tugu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

h) Beban Honorarium Pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.010.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.910.000,00 direklas ke Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya pada Dinas Perikanan;

i) Dinas Kesehatan sebesar Rp902.866.485,00 terdiri dari:

- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp113.028.025,00 reklas dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp60.930.452,00 dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp52.097.573,00;
- Bangunan Kesehatan sebesar Rp579.443.365,00 reklas dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp268.120.000,00 dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp311.323.365,00.
- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp182.125.470,00 reklas dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp96.112.125,00 dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebesar Rp86.013.345,00;

- Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp28.269.625,00 reklas dari Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

j) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.007.884.110,00 reklas dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung terdiri dari:

- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp405.315.428,00;
- Bangunan Gudang sebesar Rp45.164.178,00;
- Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp299.043.709,00;
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp43.776.219,00;
- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp2.987.855.819,00;
- Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp221.816.507,00;
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp4.912.250,00.

3) Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.480.000,00 berupa Pagar pada Dinas Perhubungan;

4) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp19.570.714.700,00 terdiri dari:

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp771.874.000,00 berupa:

- Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 40.965.000,00;
- Taman sebesar Rp118.057.000,00;
- Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp 612.852.000,00.

b) RSUD Dr.Adjidarmo berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp18.106.994.700,00;

c) Puskesmas Kalanganayar berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp9.756.200,00;

d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp97.257.900,00;

e) Sekretariat DPRD berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp102.333.000,00;

f) Kecamatan Sajira berupa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp431.169.900,00;

g) Kecamatan Panggarangan berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar

Rp51.329.000,00.

2. Mutasi kurang sebesar Rp27.474.313.647,64 merupakan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Penghapusan sebesar Rp105.000.000,00 berdasarkan Surat Akta Jual Beli BMD Nomor 032/755.2-BKAD/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 berupa Penghapusan Barang Milik Daerah dan bongkaran bangunan tersebut dijual bongkaran bangunan kantor lainnya pada RSUD Dr. Adjidarmo;
   b. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan Pencatatan Hibah Tahun lalu dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor: 032/Kep.490-BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.761.843.449,64 pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:
      1) Puskesmas Banjarsari sebesar Rp184.714.952,93;
      2) Puskesmas Bojongmanik sebesar Rp182.613.636,00;
      3) Puskesmas Cibeber sebesar Rp367.379.450,28;
      4) Puskesmas Cigemblong sebesar Rp182.999.336,00;
      5) Puskesmas Cihara sebesar Rp290.777.300,00;
      6) Puskesmas Cijaku sebesar Rp290.340.000,00;
      7) Puskesmas Cileles sebesar Rp182.659.236,00;
      8) Puskesmas Cilograng sebesar Rp612.878.000,00;
      9) Puskesmas Cimarga sebesar Rp139.165.000,00;
      10) Puskesmas Cipanas sebesar Rp183.123.344,00;
      11) Puskesmas Cirinten sebesar Rp138.900.000,00;
      12) Puskesmas Cisungsang sebesar Rp151.298.900,00
      13) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp353.302.000,00;
      14) Puskesmas Gunungkencana sebesar Rp159.129.000,00;
      15) Puskesmas Kolelet sebesar Rp 456.087.487,43;
      16) Puskesmas Maja sebesar Rp159.110.000,00;
      17) Puskesmas Mekarsari sebesar Rp182.655.436,00;
      18) Puskesmas Muncang sebesar Rp564.364.686,00;
      19) Puskesmas Pamandegan sebesar Rp182.908.136,00;
      20) Puskesmas Panggarangan sebesar Rp183.082.936,00;
      21) Puskesmas Parungsari sebesar Rp174.019.797,00;

22) Puskesmas Prabugantungan sebesar Rp73.014.000,00;
23) Puskesmas Sarageni sebesar Rp184.252.130,00;
24) Puskesmas Sobang sebesar Rp183.068.686,00.

c. Reklas sebesar Rp4.040.561.553,00 terdiri dari:
   1) Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan karena termasuk jenis aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.796.616.108,00 pada:
      a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Jalan Khusus sebesar Rp42.996.577,00;
      b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Jalan Khusus dan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp1.753.619.531,00.
   2) Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin karena barang tersebut masuk dalam kategori Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp301.789.454,00 berupa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pada Dinas Pendidikan, Personal Komputer sebesar Rp74.500.00,00 pada Puskesmas Cilograng dan sebesar Rp177.026.962,00 berupa Mebel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
   3) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap lainnya karena barang tersebut masuk dalam kategori asset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa Buku Umum sebesar Rp114.075.346,00:
   4) Reklas ke Beban Gedung dan Bangunan karena tidak termasuk dalam nilai kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.231.720,00 terdapat pada:
      a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Aset Tetap Bangunan Gedung Museum sebesar Rp49.210.000,00.
      b) Dinas Perhubungan dari Aset Tetap Pagar sebesar Rp24.480.000,00;
      c) Dinas Kesehatan terdapat pada Puskesmas Gunungkencana dari Aset Tetap Bangunan Gedung Instalasi sebesar Rp34.941.720,00;
      d) Dinas Pendidikan sebesar Rp35.600.000,00 dari Aset Tetap Pagar sebesar Rp23.600.000,00 dan Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp12.000.000,00;

5) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.432.321.963,00.

5.1.6.3.4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap di pakai. Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.936.950.662.034,17 dapat dilihat pada Tabel 5.93 sebagai berikut:

Tabel 5.93
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		5.972.387.268.323,77	5.726.388.111.673,72	245.999.156.650,05
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**5.972.387.268.323,77**	**5.726.388.111.673,72**	**245.999.156.650,05**
3	Mutasi Tambah				
	a.	Pengadaan	72.723.089.637,00	111.582.764.128,00	(38.859.674.491,00)
	b.	Hibah	8.521.675.382,43	18.651.778.674,05	(10.130.103.291,62)
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	12.488.765.000,00	35.022.360.555,00	(22.533.595.555,00)
	d.	Koreksi	23.936.435.547,86	40.947.450,00	23.895.488.097,86
	e.	Reklas	22.704.198.289,90	174.989.876.261,00	(152.285.677.971,10)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	g.	Retensi	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**140.374.163.857,19**	**340.287.727.068,05**	**(199.913.563.210,86)**
4	Mutasi Kurang				
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	12.488.765.000,00	35.022.360.555,00	(22.533.595.555,00)
	c.	Penghapusan	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	163.322.005.146,79	59.168.449.403,00	104.153.555.743,79
	JUMLAH MUTASI KURANG		**175.810.770.146,79**	**94.190.809.958,00**	**81.619.960.188,79**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(35.436.606.289,60)**	**246.096.917.110,05**	**(281.533.523.399,65)**
5	Penyajian Aset Tetap		5.936.950.662.034,17	5.972.485.028.783,77	(35.534.366.749,60)
	Pengurangan				
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00

SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
	d. Aset Tidak Berwujud	0,00	97.760.460,00	(97.760.460,00)
	JUMLAH PENGURANG	**0,00**	**97.760.460,00**	**(97.760.460,00)**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap	5.936.950.662.034,17	5.972.387.268.323,77	(35.436.606.289,60)
7	Akumulasi Penyusutan	4.209.237.020.301,34	3.940.993.911.254,64	268.243.109.046,70
8	Nilai Buku Per 31 Desember	**1.727.713.641.732,83**	**2.031.393.357.069,13**	**(303.679.715.336,30)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp140.374.163.857,19 merupakan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.723.089.637,00;
   b. Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan sebesar Rp8.521.675.382,43 terdiri dari:
      1) Perumahan Griya Barokah Persada Nomor Berita Acara Serah Terima 845//BASTP/DPRKPP/X/2024 Tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp902.430.196,65;
      2) Perumahan Royal Green Land Nomor Berita Acara Serah Terima 845/546/BAST/DPRKPP/VII/2024 Tanggal 8 Juli 2024 sebesar Rp3.733.592.587,63;
      3) Perumahan Mabu Park Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1123/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp2.869.959.527,44;
      4) Perumahan Griya Oteng Residence Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1121/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp601.423.290,89;
      5) Perumahan Riverra Village Nomor Berita Acara Serah Terima 845/1122/BAST/DPRKPP/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 sebesar Rp414.269.779,82.

c. Koreksi sebesar Rp23.936.435.547,86 terdiri dari:

1) Koreksi kapitalisasi Aset Ekstrakomptabel menjadi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp23.137.377.552,86 terdapat pada

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Jaringan Transmisi sebesar Rp6.000.000,00;

a) Dinas Ketahanan Pangan berupa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp3.000.000,00;

b) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp350.744.067,80 berupa:

- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp8.000.000,00;
- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp13.000.000,00;
- Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp19.257.675,00;
- Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp181.371.100,00;
- Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp129.115.292,80;

d) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp20.975.685.879,59 berupa:

- Jalan Desa sebesar Rp841.398.500,80;
- Jembatan Pada Jalan Desa sebesar Rp3.626.199.845,00;
- Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp92.566.500,00;
- Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp1.633.054.194,76;
- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp8.002.602.002,36;
- Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp94.319.700,00;
- Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp1.783.164.936,67;
- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp58.958.050,00;
- Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai sebesar Rp4.719.683.400,00;
- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp14.755.750,00;
- Instalasi Air Sumber / Mata Air sebesar Rp20.288.400,00;
- Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp70.226.700,00;
- Instalasi Pusat Pengatur Listrik sebesar Rp9.617.900,00;

- Jaringan Telepon Diatas Tanah sebesar Rp8.850.000,00;

e) Dinas Pendidikan sebesar Rp924.538.581,34 berupa:

- Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp900.000,00;
- Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp845.000,00;
- Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp6.133.954,22;
- Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp6.059.884,16;
- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp3.800.000,00;
- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp2.065.000,00;
- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku sebesar Rp1.052.000,00;
- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku sebesar Rp875.000,00;
- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku sebesar Rp4.200.000,00;
- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp874.723.407,00;
- Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp806,600,00;
- Instalasi Air Permukaan sebesar Rp1.000.000,00;
- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp1.250.000,00;
- Instalasi Pengolahan Sampah Organik sebesar Rp4.069.456,00;
- Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp3.458.427,50;
- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp20.000,00;
- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg) sebesar Rp1.200.000,00;
- Instalasi Pusat Pengatur Listrik sebesar Rp868.052,46;
- Instalasi Lain sebesar Rp8.031.300,00;
- Jaringan Transmisi sebesar Rp1.500.000,00;
- Jaringan Distribusi sebesar Rp750.000,00;
- Jaringan Pipa Gas Transmisi sebesar Rp930.500,00;

f) Dinas Perhubungan sebesar Rp685.950.315,95 berupa:

- Jaringan Transmisi sebesar Rp13.237.900,00;

- Jaringan Distribusi sebesar Rp672.712.415,95;

g) Dinas Perikanan sebesar Rp23.520.142,00 berupa:

- Jalan Khusus sebesar Rp8.912.825,00;
- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp658.986,00;
- angunan Pembawa Pasang Surut sebesar Rp442.236,00;
- Instalasi Air Tanah Dangkal sebesar Rp1.230.043,00;
- Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp4.968.700,00;
- Jaringan Transmisi sebesar Rp7.307.352,00;

h) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan berupa Jaringan Transmisi sebesar Rp5.000.000,00;

i) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan berupa Instalasi Lain sebesar Rp803.433,00;

j) Dinas Pertanian sebesar Rp40.051.707,38 berupa:

- Jalan Khusus sebesar Rp15.863.942,25;
- Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp21.235.500,00;
- Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp2.952.265,13;

k) Sekretariat Daerah sebesar Rp5.817.925,80 berupa:

- Jaringan Distribusi sebesar Rp2.450.000,00;
- Jaringan Telepon Diatas Tanah sebesar Rp3.367.925,80;

l) Kecamatan Gunungkencana berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp49.469.500,00;

m) Kecamatan Leuwidamar berupa Instalasi Air Permukaan sebesar Rp1.500.000,00

n) Kecamatan Rangkasbitung berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp46.696.000,00;

o) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cipanas berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp18.600.000,00;

2) Koreksi Harga terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp799.057.995,00 berupa:

a) Jalan Kabupaten sebesar Rp435.346.960,00;

b) Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp363.711.035,00.

d. Reklas sebesar Rp22.704.198.289,90 terdiri dari:

1) Reklas dari Beban Tidak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp12.488.765.000,00 terdiri dari:

a) Jalan Kabupetan sebesar Rp3.785.659.000,00, dengan rincian berikut:

- Jalan Sukahujan-Cigemblong (Ds. Citeupuseun) Kecamatan Cihara Kab.Lebak sebesar Rp203.823.000,00;
- Jalan Ciparay-Warungbanten Kecamatan Cibeber sebesar Rp444.057.000,00;
- Jalan Rangkasbituung-Gajrug (Kp. Hantap) sebesar Rp589.311.000,00;
- Jalan Pasirkuray-Cisitu/Cikidang sebesar Rp254.245.000,00;
- Jalan Sampay–Gunungkencana (Kp. Cibangkur) sebesar Rp800.162.000,00;
- Jalan Desa Kp. Parigi-Kp. Cijahe Ds. Karangnunggal sebesar Rp130.898.000,00;
- Jalan KH. Atim Cijoro Lebak Desa Muara Ciujung Timur sebesar Rp93.642.000,00;
- Jalan Kp. Cangkeuteuk-Kp. Ciseel Ds. Pasirnangka sebesar Rp169.992.000,00;
- Jalan Ciminyak-Cigemblong dan Jalan Lebaksiuh-Pasarkupa sebesar Rp87.060.000,00;
- Jalan Leuwidamar-Pasarkupa (Bojongmanik-Cirinten) sebesar Rp120.384.000,00;
- Jalan Kp. Suwakan Ds. Suwakan dan Jalan Kp. Bugel Ds. Bayah Barat sebesar Rp258.993.000,00;
- Jalan Aweh (Cibeureum)-Cikapek sebesar Rp104.046.000,00;
- Jalan Talaga Pangasaman sebesar Rp145.366.000,00;
- Drainase Jalan Kihajar Dewantara (Arah Ponpes Darel Azhar) sebesar Rp383.680.000,00;

b) Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp1.172.205.000,00, denga rincian berikut:

- Jaringan Irigasi DI. Cisilad Ds. Cipadang Kecamatan Cileles sebesar Rp315.218.000,00;

- Jaringan Irigasi DI. Rahangbelang Ds. Cibeureum sebesar Rp460.796.000,00;
- Jaringan Irigasi DI. Cimasuk Ds. Cikate sebesar Rp396.191.000,00;

c) Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai sebesar Rp3.158.900.000,00 dengan rincian berikut:

- Perkuatan Lereng Terjal Sungai Cisono sebesar Rp526.557.000,00;
- Perkuatan Lereng Terjal Sungai Cisawarna sebesar Rp447.948.000,00;
- Perkuatan Lereng Terjal Sungai Cidurian (Sampora) sebesar Rp2.184.395.000,00;

d) Bangunan Penguat Tebing/Pantai sebesar Rp1.181.503.000,00, dengan rincian berikut:

- Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) SMPN 5 Muncang sebesar Rp203.484.000,00;
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) pada SMPN 5 Sobang Sebesar Rp168.720.000,00;
- Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah (Turap) Sekolah SDN 1 Kalanganyar Kec Kalanganyar Sebesar Rp122.100.000,00;
- Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah dan Pagar Sekolah, SDN 1 Jatimulya Kec Rangkasbitung Kab Lebak sebesar Rp127.700.000,00;
- Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah (Turap) (Sekolah, SDN 2 Citorek Barat, Kec Cibeber sebesar Rp88.500.000,00;
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah (SMPN 7 Panggarangan) sebesar Rp220.000.000,00;
- Pembangunan Sarana Prasarana Pagar dan Dinding Penahan Tanah Sekolah (SMPN 1 Malingping) sebesar Rp250.999.000,00.

e) Jembatan sebesar Rp3.095.529.000,00 dengan rincian berikut:

- Jembatan Cirompang Kp. Cirompang sebesar Rp1.028.882.000,00;
- Jembatan Citogol Ds. Ciapus sebesar Rp632.591.000,00;
- Jembatan Cimodene Girang sebesar Rp767.044.000,00;
- Jembatan Gantung Sungai Ciujung Kp. Dukuh sebesar

Rp45.954.000,00;

- Jembatan Gantung Sungai Ciujung Kp. Cinangklak sebesar Rp73.996.000,00;
- Jembatan Cimeundeut Ds.Cimancak sebesar Rp229.241.000,00;
- Jembatan Ciboleger Ds. Nayagati (Jembatan Sementara) sebesar Rp62.818.000,00;
- Jembatan Ciujung Ds. Kaduagung Timur sebesar Rp87.854.000,00;
- Jembatan Gantung Belendung Ds. Nayagati sebesar Rp167.149.000,00.

f) Pembangunan MCK di Hunian Sementara sebesar Rp94.969.000,00;

2) Reklas dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.146.038.793,90 karena beban tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset tetap, terdiri dari:

a) Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 890.175.776,00 pada Jalan Kabupaten sebesar Rp792.992.776,00 dan Jembatan Pada jalan Kabupaten sebesar Rp97.183.000,00;

b) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung berupa Jalan lainnya sebesar Rp36.697.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c) Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp95.526.000,00 reklas dari Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebesar Rp63.684.000,00 dan Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp31.842.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebesar Rp5.000.000,00 dan Beban Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp5.000.000,00 berupa Instalasi Buangan Air Domestik sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

e) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebesar

Rp40.474.400,00 dan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp4.640.000,00 berupa Jalan Desa sebesar Rp45.114.400,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

f) Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang berupa Jalan Khusus sebesar Rp39.010.716,90 dan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp29.514.901,00 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan jenis sebesar Rp1.796.616.108,00 terdapat pada:

a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Jalan Khusus sebesar Rp1.564.576.367,00 dan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp189.043.164,00;

b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp42.996.577,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik.

4) Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.272.778.388,00 terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan sebesar Rp490.448.900,00 terdiri dari:

- Puskesmas Mandala sebesar Rp23.405.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Maja sebesar Rp22.745.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Cileles sebesar Rp 23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Cigemblong sebesar Rp 23.535.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Panggarangan sebesar Rp 23.535.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Citorek sebesar Rp 22.542.300,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;

- Puskesmas Binuangeun sebesar Rp23.348.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Warunggunung sebesar Rp24.010.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Cibadak sebesar Rp23.405.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Leuwidamar sebesar Rp24.519.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Cisimeut sebesar Rp24.595.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Sajira sebesar Rp22.750.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Curugbitung sebesar Rp23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Muncang sebesar Rp22.745.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Bojongmanik sebesar Rp22.750.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Cirinten sebesar Rp23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Gunungkencana sebesar Rp22.942.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Banjarsari sebesar Rp23.348.600,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Bojongjuruh sebesar Rp23.348.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Malingping sebesar Rp23.248.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
- Puskesmas Parungsari sebesar Rp23.964.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik.

b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.782.329.488,00 berupa:

- Jalan Kabupaten sebesar Rp3.592.025.200,00;
- Jalan Desa sebesar Rp372.241.000,00;
- Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp1.752.665.965,00;
- Jembatan Pada jalan Desa sebesar Rp265.472.815,00;
- Jembatan Penyeberangan sebesar Rp585.249.800,00;
- Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp214.674.708,00.

2. Mutasi kurang merupakan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Reklas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Hibah merupakan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya berupa Aset Jalan Kabupaten dan Jembatan Pada Jalan Kabupaten yang diserahkan kepada Provinsi Banten akibat Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490/BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 600.1/1127-NPHD/DPUPR/VIII/2024 dan Nomor 84/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 sebesar Rp163.297.525.146,79 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   b. Reklas Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp24.480.000 berupa Pagar.

5.1.6.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan dan tanaman. Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp219.972.881.704,20 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.94 sebagai berikut:

Tabel 5.94
SALDO ASET TETAP LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		201.248.003.210,46	194.837.789.023,62	6.410.214.186,84
2	Koreksi Saldo Awal		(0,44)	0,00	(0,44)
	Jumlah		**201.248.003.210,02**	**194.837.789.023,62**	**6.410.214.186,40**
3	Mutasi Tambah				0,00
	a.	Pengadaan	9.683.356.973,00	6.210.105.597,00	3.473.251.376,00
	b.	Hibah	4.344.244.281,00	0,00	4.344.244.281,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	15.532.500,00	(15.532.500,00)
	d.	Koreksi	4.869.634.732,18	155.325.000,00	4.714.309.732,18
	e.	Reklas	220.296.746,00	334.138.440,84	(113.841.694,84)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**19.117.532.732,18**	**6.715.101.537,84**	**12.402.431.194,34**
4	Mutasi Kurang				0,00
	a.	Hibah	0,00	60.783.300,00	(60.783.300,00)
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	15.532.500,00	(15.532.500,00)
	c.	Penghapusan	35.329.087,00	15.532.500,00	19.796.587,00
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	209.940.000,00	213.039.051,00	(3.099.051,00)
	f.	Retensi	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**245.269.087,00**	**304.887.351,00**	**(59.618.264,00)**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**18.872.263.645,18**	**6.410.214.186,84**	**12.462.049.458,34**
5	Penyajian Aset Tetap		220.120.266.855,20	201.248.003.210,46	18.872.263.644,74
	Pengurangan				0,00
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	145.360.151,00	0,00	145.360.151,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		**147.385.151,00**	**0,00**	**147.385.151,00**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		219.972.881.704,20	201.248.003.210,46	18.724.878.493,74
7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**219.972.881.704,20**	**201.248.003.210,46**	**18.724.878.493,74**

Berdasarkan tabel diatas terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp(0,44) menyesuaikan dengan aplikasi atisisbada selama Tahun 2024, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah merupakan penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.117.532.732,18 berasal dari:
   a. Pengadaan belanja modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.683.356.973,00;
   b. Pendapatan Hibah Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan berupa Buku Umum Dari Badan Bahasa Kemdikbudristek Kepada 359 Sekolah Negeri Dan 6 Sekolah Swasta sebesar Rp4.344.244.281,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: ...../CR/BAST-GLNV/2024 Tanggal 14 Mei 2024;
   c. Koreksi sebesar Rp4.869.634.732,18 terdiri daei:
      1) Pembukuan akibat dari Kapitalisasi Aset Tahun Sebelumnya sebesar Rp64.000.000,00 hasil temuan dari Inpektorat Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
      2) Koreksi Aset Ekstrakomptabel ke Ase Tetap Lainnya sebesar Rp4.805.634.732,18 terdapat pada:
         a) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp740.000,00 berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp690.000,00, Tanda Penghargaan Bidang Olahaga sebesar Rp50.000,00;
         b) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah berupa Bahan Kartografi sebesar Rp1.910.000,00;
         c) Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berupa Pahatan sebesar Rp825.000,00;
         d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp17.986.037,00 berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp17.422.600,00 dan Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya sebesar Rp563.437,00;
         e) Dinas Ketahanan Pangan berupa Bahan Kartografi sebesar Rp350.000,00;
         f) Dinas Lingkungan Hidup berupa Bahan Kartografi sebesar Rp200.000,00;

g) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp3.790.000,00 berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp650.000,00 dan Barang Kerajinan sebesar Rp3.140.000,00;

h) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.687.948.305,56 berupa Buku Umum sebesar Rp2.054.709.391,77, Buku Filsafat sebesar Rp383.800,00, Buku Agama sebesar Rp72.174.300,00, Buku Ilmu Sosial sebesar Rp88.466.349,66, Buku Ilmu Bahasa sebesar Rp121.246.451,10, Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam sebesar Rp157.071.128,51, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp3.314.542,00, Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga sebesar Rp699.517.610,86, Buku Geografi, Biografi, Sejarah sebesar Rp625.000,00, Serial sebesar Rp560.000,00, Buku Laporan sebesar Rp9.840.488,54, Audio Visual sebesar Rp21.581.806,98, Bentuk Mikro (Microform) sebesar Rp129.700,00, Bahan Kartografi sebesar Rp755.206.955,30, Naskah (Manuskrip) / Asli sebesar Rp710.186,00, Lukisan Dan Ukiran sebesar Rp8.663.440,00, Karya Musik sebesar Rp234.020,00, Karya Grafika (Graphic Material) sebesar Rp9.819.451,52, Three Dimensional Artefacs And Realita sebesar Rp2.529.229,55, Alat Musik sebesar Rp198.432.452,87, Lukisan sebesar Rp19.771.045,00, Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp879.000,00, Pahatan sebesar Rp103.928.341,00, Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp187.891.626,71, Barang Kerajinan sebesar Rp104.669.868,82, Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga sebesar Rp26.581.000,00, Algae Budidaya (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air) sebesar Rp133.800,00, Hewan Koleksi sebesar Rp1.192.100,00, Biota Perairan Koleksi sebesar Rp208.400,00, Tanaman Koleksi sebesar Rp30.119.378,89,Batuan Koleksi sebesar Rp5.557.440,48, Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp1.800.000,00;

i) Dinas Perhubungan berupa Barang Kerajinan sebesar Rp1.175.000,00;

j) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan berupa Buku Umum sebesar Rp76.880.000,00;

k) Dinas Pertanian berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp500.000,00;

l) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.014.121,62 berupa Buku Agama sebesar Rp805.510,70, Lukisan Dan Ukiran sebesar Rp1.643.000,00, Alat Musik sebesar Rp4.565.610,92;

m) Kecamatan Cibadak berupa Lukisan Dan Ukiran sebesar Rp800.000,00;

n) Kecamatan Cileles sebesar Rp2.900.000,00 berupa Bahan Kartografi sebesar Rp1.000.000, Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp100.000,00, Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga sebesar Rp1.800.000,00;

o) Kecamatan Cikulur berupa Pahatan sebesar Rp950.000,00;

p) Kecamatan Muncang sebesar Rp300.000,00 berupa Bahan Kartografi sebesar Rp150.000,00, Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah sebesar Rp150.000,00;

q) Kecamatan Rangkasbitung berupa Barang Kerajinan sebesar Rp495.000,00;

r) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Panggarangan berupa Barang Kerajinan sebesar Rp871.268,00.

d. Reklas sebesar Rp220.296.746,00 terdiri dari:

1) Reklas dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp104.196.400,00 dengan rincian berikut:

a) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp104.196.400,00 terdiri dari:

- Buku Umum sebesar Rp68.155.300,00;
- Buku Agama sebesar Rp 550.000,00;
- Buku Geografi, Biografi dan Sejarah sebesar Rp35.491.100,00.

2) Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap lainnya karena barang tersebut masuk dalam kategori aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa Buku Umum sebesar Rp114.075.346,00.

3) Reklas Beban Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp2.025.000,00 berupa Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga.

2. Mutasi kurang merupakan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 berasal dari:
   a. Penghapusan karena Penjualan Hewan Ternak Kerbau sebesar Rp35.329.087,00 sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490-BKAD/2024 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   b. Reklas ke sebesar Rp209.940.000,00 dengan rincian berikut:
      1) Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp208.940.000,00 terdapat pada:
         a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp8.800.000,00;
         b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp7.500.000,00;
         c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp192.640.000,00.
      2) Reklas Aset Tetap Lainnya ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000,00 karena barang tersebut masuk dalam kategori Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Alat kantor Lainnya;
   c. Reklas Aset Tetap Lainnya ke Beban Aset Tetap lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp2.025.000,00 berupa Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga;
   d. Reklas Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain Lainnya sebesar Rp145.360.151,00 tedapat pada:
      1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp98.861.587,00 berupa Hewan Ternak Potong;
      2) Dinas Pendidikan sebesar Rp45.123.564,00 berupa:
         a) Buku Umum sebesar Rp902.000,00;

b) Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp500.000,00;
c) Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga sebesar Rp11.650.000,00;
d) Bahan Kartografi sebesar Rp1.100.000,00;
e) Alat Musik sebesar Rp22.447.500,00;
f) Lukisan sebesar Rp72.500,00;
g) Pahatan sebesar Rp5.653.234,00;
h) Barang Kerajinan sebesar Rp2.573.330,00;
i) Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga sebesar Rp225.000,00.

3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp1.375.000,00 berupa Bahan Kartografi.

5.1.6.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses Pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh kewajibannya sehingga belum dapat dimanfaatkan. Nilai Perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.238.921.700,00 yang dapat dilihat pada Tabel 5.95 sebagai berikut:

Tabel 5.95
SALDO ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		28.417.786.788,00	96.593.056.978,00	(68.175.270.190,00)
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**28.417.786.788,00**	**96.593.056.978,00**	**(68.175.270.190,00)**
3	Mutasi Tambah		0,00	0,00	0,00
	a.	Pengadaan	0,00	76.768.158.110,00	(76.768.158.110,00)
	b.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	584.831.900,00	0,00	584.831.900,00
	d.	Koreksi	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	e.	Reklas	0,00	1.197.677.708,00	(1.197.677.708,00)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**1.584.831.900,00**	**77.965.835.818,00**	**(76.381.003.918,00)**
4	Mutasi Kurang				0,00

SALDO ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	584.831.900,00	0,00	584.831.900,00
	c.	Penghapusan	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	335.372.000,00	0,00	335.372.000,00
	e.	Reklas	26.843.493.088,00	146.141.106.008,00	(119.297.612.920,00)
	JUMLAH MUTASI KURANG		**27.763.696.988,00**	**146.141.106.008,00**	**(118.377.409.020,00)**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(26.178.865.088,00)**	**(68.175.270.190,00)**	**41.996.405.102,00**
5	Penyajian Aset Tetap		2.238.921.700,00	28.417.786.788,00	(26.178.865.088,00)
	Pengurangan		0,00	0,00	0,00
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		0,00	0,00	0,00
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		2.238.921.700,00	28.417.786.788,00	(26.178.865.088,00)
7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**2.238.921.700,00**	**28.417.786.788,00**	**(26.178.865.088,00)**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp2.238.921.700,00 terdapat pada:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp482.496.800,00 terdiri dari:
   a. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp269.412.800,00;
   b. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi sebesar Rp213.084.000,00 dengan rincian berikut:
      1) Puskesmas Cibeber sebesar Rp23.964.000,00;
      2) Puskesmas Cisungsang sebesar Rp23.348.000,00;
      3) Puskesmas Cikulur sebesar Rp24.283.000,00;
      4) Puskesmas Pamandegan sebesar Rp23.405.000,00;

5) Puskesmas Prabugantungan sebesar Rp23.405.000,00;
6) Puskesmas Cilograng sebesar Rp23.964.000,00;
7) Puskesmas Baros sebesar Rp23.095.000,00;
8) Puskesmas Cihara sebesar Rp23.535.000,00;
9) Puskesmas Kalanganyar sebesar Rp24.085.000,00;

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 194.462.000,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor terdiri dari:
   a. Penyusunan DED Pembangunan Kantor Kecamatan Lebakgedong Tahun 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 640/577.6-PPK/BAST/CK.DISPUPR/XII/2022 sebesar Rp98.231.000,00;
   b. Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Sekretariat Daerah Tahun 2022 sesuai BASTB Nomor 640/577.3-PPK/BAST/CK.DISPUPR/XII/2022 sebesar Rp96.231.000,00.
3. Dinas Sosial sebesar Rp20.926.200,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar berupa Perencanaan Teknis Pekerjaan Pemagaran Gedung Kantor Dinas Sosial Tahun 2020 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 460/2434.1-Dinsos/2020;
4. Dinas Perikanan sebesar Rp495.523.000,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan /Gedung Tempat Tinggal di Jl. Kampung semi/ Tanjong Desa Narimbangmulya RT/RW. 01/01 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 027/405-BAP/Diskan/2022;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp45.513.700,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, Perencanaan Gedung Laboratorium Kemetrologian Mandala Kecamatan Cibadak sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 510/739.1-PPK/Indag/2020 sebesar Rp45.513.700,00
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.000.000.000,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga hasil perolehan hibah tahun lalu Tanggal BASTP seharusnya 29 Desember 2023, namun pada saat itu belum di input karena Pengurus Barang belum mengetahui adanya CSR ini. Baru diketahui di tahun 2024. Sehingga

Tanggal dipakai adalah tanggal rekon triwulan 1 di tahun 2024. berupa asset tetap Bangunan Gedung Tempat Olahraga dengan Nomor BA.STSP-DISPORA/XII/2023/24-04-2024/6090.

Mutasi bertambah merupakan Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 berupa Koreksi Pencatatan Pengerjaan pengerukan tanah/pematangan lahan Tahun 2023 Tribun Timur Stadion Pasir Ona Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai BA.STSP-Dispora/XII/2023/29-12-2023.

Mutasi kurang merupakan pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 berasal dari:

1. Koreksi dikarenakan Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada BAB XII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan terdapat pada:
   a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp110.595.000,00 berupa:
      1) Perencanaan Penataan Taman Bermain Anak Pantai di Pantai Sawarna Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.8-Dispar/2017 sebesar Rp39.120.000,00;
      2) Perencanaan Teknis Pembangunan Panggung Pertunjukan/Kesenian Sawarna Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.2-Dispar/2017 sebesar Rp39.010.000,00;
      3) Perencanaan Teknis Pembangunan Panggung Kesenian Goa Lalay Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.1-Dispar/2017 sebesar Rp32.465.000,00.
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp224.777.000,00 berupa:
      1) Penyusunan DED Penataan Kawasan Perkantoran Ona (Disdik, BPMPD, DCK dan DLH) Tahun 2015 sebesar Rp94.978.000,00;
      2) Penyusunan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp103.039.000,00;
      3) Penyusunan DED Pembangunan Rumah Singgah tahun 2016 sebesar Rp26.760.000,00;

2. Reklas sebesar Rp26.843.493.088,00 terdiri dari:
   a. Reklas ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.570.714.700,00 terdiri dari;
      1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp771.874.000,00 berupa:
         a) Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp 40.965.000,00;
         b) Taman sebesar Rp118.057.000,00;
         c) Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp 612.852.000,00.
      2) RSUD Dr.Adjidarmo berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp18.106.994.700,00;
      3) Puskesmas Kalanganayar berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp9.756.200,00;
      4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp97.257.900,00;
      5) Sekretariat DPRD berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp102.333.000,00;
      6) Kecamatan Sajira berupa Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp431.169.900,00;
      7) Kecamatan Panggarangan berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp51.329.000,00.
   b. Reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.272.778.388,00 terdapat pada;
      1) Dinas Kesehatan sebesar Rp490.448.900,00 terdiri dari:
         a) Puskesmas Mandala sebesar Rp23.405.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
         b) Puskesmas Maja sebesar Rp22.745.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
         c) Puskesmas Cileles sebesar Rp 23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
         d) Puskesmas Cigemblong sebesar Rp 23.535.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
         e) Puskesmas Panggarangan sebesar Rp 23.535.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;

f) Puskesmas Citorek sebesar Rp 22.542.300,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
g) Puskesmas Binuangeun sebesar Rp23.348.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
h) Puskesmas Warunggunung sebesar Rp24.010.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
i) Puskesmas Cibadak sebesar Rp23.405.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
j) Puskesmas Leuwidamar sebesar Rp24.519.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
k) Puskesmas Cisimeut sebesar Rp24.595.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
l) Puskesmas Sajira sebesar Rp22.750.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
m) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
n) Puskesmas Muncang sebesar Rp22.745.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
o) Puskesmas Bojongmanik sebesar Rp22.750.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
p) Puskesmas Cirinten sebesar Rp23.238.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
q) Puskesmas Gunungkencana sebesar Rp22.942.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
r) Puskesmas Banjarsari sebesar Rp23.348.600,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
s) Puskesmas Bojongjuruh sebesar Rp23.348.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
t) Puskesmas Malingping sebesar Rp23.248.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik;
u) Puskesmas Parungsari sebesar Rp23.964.000,00 berupa Instalasi Air Buangan Domestik.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.782.329.488,00 berupa:
   a) Jalan Kabupaten sebesar Rp3.592.025.200,00;
   b) Jalan Desa sebesar Rp372.241.000,00;
   c) Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp1.752.665.965,00;
   d) Jembatan Pada jalan Desa sebesar Rp265.472.815,00;
   e) Jembatan Penyeberangan sebesar Rp585.249.800,00;
   f) Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp214.674.708,00.

5.1.6.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp5.597.535.451.119,03. Nilai akumulasi penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rincian dari akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada tabel 5.96 sebagai berikut:

Tabel 5.96
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Peralatan dan Mesin	729.914.566.448,30	642.855.649.158,92	87.058.917.289,38
2	Gedung dan Bangunan	658.383.864.369,39	576.735.586.879,35	81.648.277.490,04
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.209.237.020.301,34	3.940.993.911.254,64	268.243.109.046,70
JUMLAH		**5.597.535.451.119,03**	**5.160.585.147.292,91**	**436.950.303.826,12**

5.1.6.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 tidak mempunyai Dana Cadangan.

5.1.6.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan asset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Perolehan Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.256.140.502,00 dan nilai bukunya sebesar Rp50.118.695.644,88. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table 5.97 sebagai berikut:

Tabel 5.97
RINCIAN ASET LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tagihan Jangka Panjang	393.017.500,00	395.017.500,00	(2.000.000,00)
2	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(393.017.500,00)	(395.017.500,00)	2.000.000,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.021.034.000,00	2.248.130.700,18	(227.096.700,18)
4	Aset Tak Berwujud	2.458.300.090,47	2.174.031.465,53	284.268.624,94
5	Aset Lain-Lain	64.106.486.911,07	110.702.680.758,27	(46.596.193.847,20)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	27.277.302.000,00	27.028.040.000,00	249.262.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Lainnya	(45.744.427.356,66)	(63.737.210.197,24)	17.992.782.840,58
JUMLAH		**50.118.695.644,88**	**78.415.672.726,74**	**(28.296.977.081,86)**

5.1.6.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**.** Tagihan Jangka Panjang pada Tahun 2024 sebesar Rp393.017.500,00 dan disusutkan 100%, rincian dapat dilihat pada Tabel 5.98 sebagai berikut:

Tabel 5.98
RINCIAN TAGIHAN JANGKA PANJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR 2024 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	228.657.500,00	0,00	0,00	228.657.500,00

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2023 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR 2024 (Rp)
			TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	166.360.000,00	0,00	2.000.000,00	164.360.000,00
3	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(395.017.500,00)	2.000.000,00	0,00	(393.017.500,00)
JUMLAH		**395.017.500,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**393.017.500,00**

5.1.6.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pada Tahun 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.021.034.000,00 mengalami Perubahan dari Tahun 2023 terdapat pada:

1. Penambahan dikarenakan reklas Aset Tanah sebesar Rp97.380.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pengurangan sebesar Rp324.476.700,00 dikarenakan:
   a. Aset yang dipinjam pakai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Keluarga Berencana masa manfaatnya sudah berakhir dan direklas ke aset lain-lain sebagai aset rusak berat berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 sebesar Rp29.700.000,00;
   b. Penetapan aset Sesuai dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 032/Kep.477-BKAD/2023 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Sebagai Properti Investasi, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan Barang Milik Daerah sebagai Properti Investasi, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar di Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebesar Rp4.600.000,00;
      2) Tanah Kosong yang sudah Diperuntukan di Desa Sukasari Kecamatan Wanasalam sebesar Rp87.955.000,00;
      3) Tanah Kosong yang sudah Diperuntukan di Jl. Maja Pasar RT.003, RW. 001 Desa Maja Kecamatan Maja sebesar Rp88.580.000,00;
      4) Tanah Bangunan Gudang di Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebesar Rp8.800.000,00.

c. Rreklas ke Aset Tanah sebesar Rp104.841.700,00 terdapat pada:

1) Kecamatan Kalanganyar berupa sebagian tanah Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jl. KH. Moch Idrus KM. 03 Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar dengan luas tanah 232m^2 dari 11.560m2, untuk digunakan kegiatan operasional dan administrasi Kantor perkantoran Urusan Agama Kalanganyar selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalanganyar Tentang Pinjam Pakai Sebagaian Tanah Kecamatan Kalanganyar Nomor 032/16-BKAD/2022 dan 0005/KK.28.02.01/KS.00/01/2022 sebesar Rp3.516.380,00;
2) Kecamatan Malingping berupa sebagian tanah Kantor Pemerintah yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Malingping Kabupaten Lebak dengan luas tanah 819m^2 dari total luas tanah sebesar 1.500m^2, untuk digunakan kegiatan operasional dan administrasi Kantor perkantoran Urusan Agama Bayah selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Malingping Tentang Pinjam Pakai Tanah oleh MUI Kecamatan Malingping Nomor 032/375-BKAD/2022 dan 0001/MUI-KECMLP/V/2022 dengan nilai sebesar Rp28.665.000,00;
3) Kecamatan Bayah berupa sebagain tanah kantor Pemerintah yang berlokasi di Kampung Waru Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dengan luas tanah 206m^2 dari total luas tanah sebesar 5.000m^2 digunakan untuk kegiatan operasional dan administrasi kantor perkantoran Urusan Agama Bayah selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayah Tentang Pinjam Pakai Sebagaian Tanah Kecamatan Bayah Nomor 032/24-BKAD/2022 dan Nomor 0012/KK.28.02.01/KS.00/01/2022 dengan nilai sebesar Rp72.660.320,00.

Nilai Perolehan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.021.034.000,00 dapat dilihat pada Tabel 5.99 berikut:

Tabel 5.99
KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN (Rp)	TAHUN (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		2.248.130.700,00	2.366.930.700,00	(118.800.000,00)
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**2.248.130.700,00**	**2.366.930.700,00**	**(118.800.000,00)**
3	Mutasi Tambah				0,00
	a.	Pengadaan	0,00	0,00	0,00
	b.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	97.380.000,00	0,00	97.380.000,00
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**97.380.000,00**	**0,00**	**97.380.000,00**
4	Mutasi Kurang				0,00
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	c.	Penghapusan	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	324.476.700,00	118.800.000,00	205.676.700,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**324.476.700,00**	**118.800.000,00**	**205.676.700,00**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(227.096.700,00)**	**(118.800.000,00)**	**(108.296.700,00)**
5	Penyajian Aset Tetap		2.021.034.000,00	2.248.130.700,00	(227.096.700,00)
	Pengurangan				0,00
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		0,00	0,00	0,00
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		2.021.034.000,00	2.248.130.700,00	(227.096.700,00)
7	Akumulasi Penyusutan		1.789.216.400,02	1.419.483.976,27	369.732.423,75

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN (Rp)	TAHUN (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**231.817.599,98**	**828.646.723,73**	**(596.829.123,75)**

Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp2.021.034.000,00 terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan berupa Rumah Dinas Perawat Puskesmas Malingping yang berlokasi di Kampung Pasir Geleng RT 02 RW 01 Desa Sukamanah Kecamatan Malingping dengan nilai sebesar Rp63.864.000,00 berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten untuk kegiatan operasional dan administrasi perkantoran sementara selama satu tahun dengan Nomor 440/382-Dinkes/III/2022 dan Nomor MoU-001/HK.03/III/KPP BTN -2022;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebanyak 35 (tiga piluh lima) Unit kendaraan roda dua dengan nilai sebesar Rp364.250.000,00 merupakan Perjanjian Pinjam Pakai Antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Tentang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) Penunjang Kegiatan Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) selama 5 (lima) Tahun dengan Nomor 2666/HK.03.01/j/2018 dan Nomor 032/122-Pen/2018;
3. Sekretariat Daerah terdiri dari;
   a. Berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp519.670.000,00 untuk digunakan sebagai sarana penunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Lebak dengan Kepolisian Resort Lebak tentang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) dengan Nomor 028/4.676/Um.plk/2019
   b. Berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 (satu) Unit dengan nilai sebesar Rp536.625.000,00 untuk digunakan sebagai sarana penunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun, berdasarkan

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Kejaksaan Negeri Lebak Tetang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) dengan Nomor 028.6.2/4.292/Um.plk/2019;

c. Berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 (satu) unit untuk digunakan sebagai sarana penunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (Lima) tahun dengan nilai sebesar Rp536.625.000,00, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Komando Distrik Militer 0603/Lebak Tetang Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) dengan Nomor 028.6.2/4.291/Um.plk/2019 dan Nomor: 13/805/X/2019.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.789.216.400,02 terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp59.606.400,00 dari nilai perolehan sebesar Rp63.864.000,00
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keluarga Berencana sebesar Rp364.250.000,00 dari nilai perolehan sebesar Rp393.950.000,00;
3. Sekertariat Daerah sebesar Rp1.365.360.000,02 dari nilai perolehan sebesar Rp1.597.520.000,00;

5.1.6.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak bewujud (ATB) adalah aset non - moneter yang tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rsp2.458.300.090,47. Terhadap aset tak berwujud tersebut dilakukan akumulasi amortisasi kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Akumulasi Amortisasi dilakukan terhadap aset tidak berwujud dengan metode garis lurus. Nilai akumulasi amortisasi untuk Tahun 2024 sebesar Rp2.018.513.486,31 sehingga Nilai Buku Aset Tidak Berwujud periode 31 Desember 2024 sebesar Rp439.786.604,16. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar dapat dilihat pada Tabel 5.100 berikut:

Tabel 5.100
ASET TIDAK BERWUJUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		2.174.031.465,53	1.681.635.425,53	492.396.040,00
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**2.174.031.465,53**	**1.681.635.425,53**	**492.396.040,00**
3	Mutasi Tambah				0,00
	a.	Pengadaan	0,00	0,00	0,00
	b.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	43.038.624,94	0,00	43.038.624,94
	e.	Reklas	241.230.000,00	492.396.040,00	(251.166.040,00)
	f.	Penetapan Status			0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**284.268.624,94**	**492.396.040,00**	**(208.127.415,06)**
4	Mutasi Kurang				0,00
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	c.	Penghapusan	0,00	0,00	0,00
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		0,00	0,00	0,00
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**284.268.624,94**	**492.396.040,00**	**(208.127.415,06)**
5	Penyajian Aset Tetap		2.458.300.090,47	2.174.031.465,53	284.268.624,94
	Pengurangan				
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		0,00	0,00	0,00
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		2.458.300.090,47	2.174.031.465,53	284.268.624,94

ASET TIDAK BERWUJUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
7	Akumulasi Penyusutan	2.018.513.486,31	1.633.349.300,66	385.164.185,65
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	**439.786.604,16**	**540.682.164,87**	**(100.895.560,71)**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2024 sebesar Rp284.268.624,94 berasal dari:

1. Koreksi Aset (Reklas Aset Ektrakomtabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.038.624,94 berupa:
   a. Hak Cipta sebesar Rp68.387,86;
   b. Software sebesar Rp19.019.982,95;
   c. Karya Seni/Budaya sebesar Rp13.487.961,00;
   d. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.000.000,00;
   e. Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp8.462.293,13.
2. Reklas Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp241.230.000,00 berupa Software.

Rincian Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.458.300.090,47 terdapat pada:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp426.400.000,00 dengan nilai penyusutan sebesar Rp388.900.000,00 terdiri dari:
   a. Billing System RSUD dr. Adjidarmo sebesar Rp276.400.000,00 dengan nilai penyusutan sebesar Rp276.400.000,00;
   b. SIM Laboratorium (SIMLAB SINTASI) Basic sebesar Rp150.000.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp112.500.000,00.
2. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp75.787.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp75.787.000,00 berupa Aplikasi Website Informasi Kependudukan;
3. Dinas Perhubungan sebesar Rp191.870.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp191.870.000,00 berupa Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB);

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp45.000.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp45.000.000,00 berupa Pembuatan Program Digitalisasi Koleksi Ruang Banten (Media, system interkatif dan konten, kreatif ide dan manajemen, tim kurasi);
5. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.400.067.580,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp 1.043.743.884,72 terdiri dari :
   a. Aplikasi Info PBB sebesar Rp15.000.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp15.000.000,00;
   b. Aplikasi SIM PBB sebesar Rp 146.266.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp96.910.000,00;
   c. Aplikasi Host to Host sebesar Rp50.250.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp50.250.000,00;
   d. Aplikasi Penerimaan Asli Daerah Lainnya (PADL) sebesar Rp184.981.465,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp168.500.000,00;
   e. Aplikasi E-BPHTB & PPAT sebesar Rp 280.770.860,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp165.600.000,00;
   f. Aplikasi Retribusi sebesar Rp247.953.395,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp247.953.395,00;
   g. Aplikasi Cepleo (SPPT online) sebesar Rp 228.321.360,00 dengan nilai penyususstannya sebesar Rp142.441.823,34;
   h. Aplikasi Pajak Daerah sebesar Rp246.524.500,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp115.058.500,00.
6. Inspektorat Daerah sebesar Rp37.281.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp37.281.000,00 berupa Aplikasi Konsultasi Dana Desa (KADE);
7. Sekretariat Daerah sebesar Rp141.095.425,53 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp141.095.425,53 terdiri dari:
   a. Sistem Informasi Rencana Umum sebesar Rp12.715.425,53 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp12.715.425,53;
   b. Sistem Layanan Pengadaan Barjas sebesar Rp14.965.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp14.965.000,00;
   c. System Informasi Manajemen LPPD sebesar Rp38.940.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp38.940.000,00;

d. Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar Rp47.795.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp47.795.000,00;
e. Sistem Informasi Penilaian Kinerja Rekanan sebesar Rp26.680.000,00 dengan nilai penyusutannya sebesar Rp26.680.000,00;

8. Dinas Pendidikan sebesar Rp140.799.084,94 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp140.799.084,94, terdiri dari:
   a. Instalasi Komputer pada Sekolah sebesar Rp97.760.460,00 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp97.760.460,00;
   b. Hak Cipta sebesar Rp68.387,86 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp68.387,86;
   c. Software sebesar Rp19.019.982,95 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp19.019.982,95;
   d. Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya sebesar Rp13.487.961,00 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp13.487.961,00;
   e. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.000.000,00 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp2.000.000,00;
   f. Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp8.462.293,13 dengan nilai Penyusutannya sebesar Rp8.462.293,13.

5.1.6.5.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena kondisinya yang rusak berat dan piutang yang akan dilakukan proses penghapusan. Nilai Perolehan Aset Lain–lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp64.106.486.911,07 dan penyusutan Aset Lain–lain dilakukan terhadap asset yang kondisinya rusak berat, pemindah tanganan dan piutang yang akan dihapuskan. Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada table 5.101 berikut:

Tabel 5.101
ASET LAIN-LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024

NO	ASET LAIN-LAIN	TAHUN 2023	MUTASI		TAHUN 2024
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pemindahtanganan	14.711.117.772,00	0,00	14.711.117.772,00	0,00
2	Proses Tuntutan Ganti Rugi	100.755.000,00	0,00	0,00	100.755.000,00
3	Proses pemusnahan	265.750.200,00	0,00	0,00	265.750.200,00
4	Aset Rusak Berat	57.681.199.835,91	18.990.225.429,08	23.844.300.204,28	52.827.125.060,71
5	Lainnya	79.200.000,00	0,00	0,00	79.200.000,00
6	Proses Pemindahtanganan	6.190.946.000,00	0,00	0,00	6.190.946.000,00
7	Piutang yang akan dihapuskan	4.645.671.950,36	0,00	2.961.300,00	4.642.710.650,36
	Jumlah	**83.674.640.758,27**	**18.990.225.429,08**	**38.558.379.276,28**	**64.106.486.911,07**

Nilai Perolehan Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2024 sebesar dapat dilihat pada Tabel 5.102 berikut:

Tabel 5.102
ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) DAN LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
1	Audited Tahun N-1		72.838.022.807,91	66.908.702.269,29	5.929.320.538,62
2	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**72.838.022.807,91**	**66.908.702.269,29**	**5.929.320.538,62**
3	Mutasi Tambah				0,00
	a.	Pengadaan	0,00	0,00	0,00
	b.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	c.	Pindah Antar Perangkat Daerah	23.885.923.006,73	13.480.795.782,81	10.405.127.223,92
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	18.990.225.429,08	21.123.683.249,63	(2.133.457.820,55)
	f.	Penetapan Status	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**42.876.148.435,81**	**34.604.479.032,44**	**8.271.669.403,37**
4	Mutasi Kurang				0,00
	a.	Hibah	0,00	0,00	0,00
	b.	Pindah Antar Perangkat Daerah	23.885.923.006,73	13.480.795.782,81	10.405.127.223,92

ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) DAN LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN		TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	2		3	4	5
	c.	Penghapusan	38.555.417.976,28	15.119.362.711,01	23.436.055.265,27
	d.	Koreksi	0,00	0,00	0,00
	e.	Reklas	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)
	JUMLAH MUTASI KURANG		**62.441.340.983,01**	**28.675.158.493,82**	33.766.182.489,19
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(19.565.192.547,20)**	**5.929.320.538,62**	**(25.494.513.085,82)**
5	Penyajian Aset Tetap		53.272.830.260,71	72.838.022.807,91	(19.565.192.547,20)
	Pengurangan				0,00
	a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00	0,00
	b.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00	0,00
	c.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00	0,00
	d.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		0,00	0,00	0,00
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		53.272.830.260,71	72.838.022.807,91	(19.565.192.547,20)
7	Akumulasi Penyusutan		34.910.770.706,30	49.847.758.971,82	(14.936.988.265,52)
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2024		**18.362.059.554,41**	**22.990.263.836,09**	**(4.628.204.281,68)**

Rincian Aset Lain-lain (rusak berat) dapat dilihat pada tabel 5.103 berikut:

Tabel 5.103
ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan		Aset Tetap Lainnya		Aset Tidak Berwujud	
		Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pendidikan	718	2.517.548.570,92	134	14.364.076.843,77	1	25.000.000,00	55.065	1.855.841.897,48	2	93.636.000,00
2	Dinas Kesehatan	234	1.777.873.307,82	22	6.743.379.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51	1.297.329.726,67	0	0,00	2	4.334.369.754,00	0	0,00	0	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan		Aset Tetap Lainnya		Aset Tidak Berwujud	
		Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22	40.900.000,00	0	0,00	0	0,00	2	120.000,00	0	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	24.311.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Dinas Sosial	2	22.374.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	21	123.408.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	13	292.187.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	35.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	196	1.778.700.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	134.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36	247.977.632,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Dinas Perhubungan	7	162.749.000,00	1	64.291.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Dinas Penanaman Modal	10	48.345.581,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Dinas Kepemudaan Olahraga	2	8.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19	64.443.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	47.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Dinas Perikanan	540	8.338.580.490,00	0	0,00	0	0,00	62	1.326.815.999,00	0	0,00
22	Dinas Pertanian	232	1.968.484.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan		Aset Tetap Lainnya		Aset Tidak Berwujud	
		Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9	106.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	52.201.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	Sekretariat Daerah	66	951.009.798,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Sekretariat DPRD	5	118.055.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	73	490.657.122,17	0	0,00	0	0,00	11	1.375.000,00	2	124.099.200,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	56.208.655,56	0	0,00	0	0,00	1	31.532.500,00	0	0,00
29	Badan Pendapatan Daerah	14	90.977.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48.015.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	226.635.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Inspektorat Daerah	27	129.176.932,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Kecamatan Rangkasbitung	5	25.872.021,00	2	82.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Kecamatan Kalanganyar	2	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Kecamatan Cibadak	8	58.963.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	Kecamatan Warunggunung	4	31.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Kecamatan Cimarga	11	31.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Kecamatan Cikulur	14	86.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
38	Kecamatan Leuwidamar	9	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
39	Kecamatan Sajira	7	52.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
40	Kecamatan Maja	12	35.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
41	Kecamatan Curugbitung	7	30.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
42	Kecamatan Muncang	9	25.810.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Kecamatan Sobang	27	169.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
44	Kecamatan Bojongmanik	7	60.937.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45	Kecamatan Cirinten	3	41.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT)
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perangkat Daerah	Peralatan dan Mesin		Gedung dan Bangunan		Jalan, Irigasi dan Jaringan		Aset Tetap Lainnya		Aset Tidak Berwujud	
		Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)	Vol.	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Kecamatan Cipanas	29	194.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Kecamatan Lebakgedong	15	84.376.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	Kecamatan Gunungkencana	21	114.498.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49	Kecamatan Cileles	15	105.553.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50	Kecamatan Banjarsari	19	161.674.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
51	Kecamatan Cijaku	8	60.737.271,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	Kecamatan Cigemblong	7	63.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
53	Kecamatan Malingping	27	153.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	Kecamatan Wanasalam	71	357.519.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55	Kecamatan Panggarangan	14	88.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	Kecamatan Cihara	10	70.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Kecamatan Bayah	25	157.947.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	Kecamatan Cibeber	32	275.227.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59	Kecamatan Cilograng	18	99.026.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	94.078.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		**2834**	**23.997.722.616,46**	**159**	**21.254.347.293,77**	**3**	**4.359.369.754,00**	**55.141**	**3.215.685.396,48**	**5**	**265.750.200,00**

Rincian piutang yang akan dilakukan proses penghapusan sebesar Rp4.642.710.650,36 yaitu:

1. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp37.850.073,00 Pada Badan Pendapatan Daerah:
2. Piutang Lainnya sebesar Rp60.727.900,00 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
3. Piutang Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.601.335.084,00 pada Dinas Kesehatan (RSUD dr.Adjidarmo);
4. Piutang Retribusi Menara sebesar Rp89.427.616,00 dan Sewa Alat Berat sebesar Rp217.705.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5. Piutang Dana bergulir Penempatan TKI sebesar Rp465.479.000,00 pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
6. Piutang Pinjaman Bergulir kepada Badan Koperasi dan UMKM perorangan sebesar Rp148.851.604,00 pada Dinas Koperasi dan UMKM;
7. Piutang Kredit Peduli Lebak (KPL) sebesar Rp1.346.897.973,36 pada Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan. Pemerintah Kabupaten Lebak sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 telah melakukan Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memproses penyelesaian Piutang Program Kredit Peduli Lebak (KPL). Hasil pelaksanaan proses penyelesaian pada Tahun 2019 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Lebak Nomor 500/Kep.407-Ekon/2019 tentang Penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Program Kredit Peduli Lebak Tahun 2019;
8. Piutang *Race MillingPlant* (RMP) sebesar Rp674.436.400,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

5.1.6.5.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah dana yang disalurkan ke pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk non tunai. Dana ini disimpan di Bank Indonesia (BI) melalui fasilitas TDF yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp27.277.302.000,00 dengan rincian berikut:

1. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp17.940.590.000,00;
2. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp924.311.000,00;
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.661.861.000,00;
4. Dana Bagi Hasil Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp6.470.936.000,00;
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Landrent sebesar Rp46.021.000,00;
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara–Royalty sebesar

Rp233.583.000,00;

5.1.6.6 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau;
2. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 32/Kep.427-BKAD/2023 dan 32/Kep.428-BKAD/2024 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah sebagai Properti Investasi sebesar Rp189.935.000,00 dengan rincian berikut:

1. Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar di Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebesar Rp4.600.000,00;
2. Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan di Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam sebesar Rp87.955.000,00;
3. Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan di Desa Maja Kecamatan Maja sebesar Rp88.580.000,00;
4. Tanah Bangunan Kantor di Desa Cikotok Kecamatan Cibeber sebesar Rp8.800.000,00.

5.1.7 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lebak. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek sebesar Rp46.401.638.356,05 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.304.856.112,25 dan Utang Belanja sebesar Rp44.096.782.243,80.

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp2.304.856.112,25 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.347.003.300,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan terdiri dari:
   1) PT. Radja Udang sebesar Rp380.446.000,00 dengan Kontrak Nomor 032/75-BKAD/2024 dan 001/RUM-PMD/II/2024 periode Tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2028 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp304.356.800,00;
   2) CV. Arga Pratama sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan Kontrak Nomor 032/-BKAD/2024 periode Tanggal 2 April 2024 sampai dengan 2 April 2029 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp850.000.000,00;
   3) Djajadi Setiadi sebesar Rp16.505.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/973-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp14.304.333,33;
   4) Ondry sebesar Rp16.955.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/974-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp14.694.333,33;
   5) Ondry sebesar Rp13.080.000,00 dengan Kontrak Nomor direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp11.336.000,00;
   6) Jenny sebesar Rp38.645.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/975-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp33.492.333,33;
   7) Iing Ivana sebesar Rp12.535.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/992-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp10.863.666,67
   8) Aminah sebesar Rp5.285.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/990-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.580.333,33
   9) Krisnawaty Sentosa sebesar Rp5.485.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/976-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.753.666,67;
   10) Andri Kusuma sebesar Rp12.595.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/979-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp10.915.666,67;

11) Manda Nona Kusuma sebesar Rp10.565.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/978-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.156.333,33;
12) Anih Fatimah sebesar Rp11.170.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/991-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.680.666,67;
13) Shanty sebesar Rp31.520.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/ -Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp27.317.333,33;
14) Sam Adhiputera Wijaya sebesar Rp9.820.000,00 dengan Kontrak Nomor 55.12/993-Dishub/XI/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp8.510.666,67;
15) Tati Hartati sebesar Rp10.990.000,00 dengan Kontrak Nomor 032/288-BKAD/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.707.833,33;
16) Penyewaan Tower Pt.Xl sebesar Rp100.000.000,00 dengan Kontrak Nomor direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp15.000.000,00;
17) Outlet Burger Bangor sebesar Rp20.000.000,00 dengan Kontrak Nomor 032/1140-BKAD/2024 direklas menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp8.333.333,33.

b. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp739.536.148,33 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron selama 1 (satu) Tahun;
c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp198.166.666,67 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp22.666.666,67 dan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum atas sewa lahan untuk ATM BNI sebesar Rp48.000.000,00 dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa nomor SRG/01/1271A/2023 selama 3 (tiga) Tahun menjadi Pendapatan Diterima Dimuka Rp22.666.666,67 dan CV. sanding jaya sebesar Rp175.500.000,00 dengan Kontrak Nomor direklas menjadi Pendapatan

Diterima Dimuka sebesar Rp117.000.000,00 dan Rp58.500.500,00.

d. Dinas Perikanan sebesar Rp1.249.997,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri atas sewa bangsal pengolahan ikan Koperasi Mina Muasa Sejahtera Wanasalam sebesar Rp15.000.000,00 dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Gedung Bangsal Pengolahan Ikan nomor 253/118.a-Diskan/2022;

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp18.900.000,00 merupakan uang jaminan sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dari penyewa yang disetorkan ke rekening kas bendahara penerimaan sebelum penyewa tersebut menempatinya.

Rincian Utang Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 sebesar Rp44.096.782.243,80 dapat dilihat pada tabel 5.104 dan tabel 5.105 berikut:

Tabel 5.104
UTANG BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	20.460.000,00	0,00	20.460.000,00	0,00
2	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.733.635,00	0,00	15.733.635,00	0,00
3	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	292,00	0,00	292,00	0,00
4	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.039,00	0,00	82.039,00	0,00
5	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Restribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23.477.089,00	0,00	23.477.089,00	0,00
7	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel	968.625,00	6.866.650,00	(5.898.025,00)	(85,89)
8	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	22.680.000,00	166.031.250,00	(143.351.250,00)	(86,34)
9	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	0,00	805.000,00	(805.000,00)	(100,00)

UTANG BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
10	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	31.829.460,00	4.226.250,00	27.603.210,00	653,14
11	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	36.562.500,00	46.287.500,00	(9.725.000,00)	(21,01)
12	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	900.000,00	17.609.375,00	(16.709.375,00)	(94,89)
13	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	13.183.800,00	12.668.686,00	515.114,00	4,07
14	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	0,00	287.788,00	(287.788,00)	(100,00)
15	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	544.991.924,00	349.953.625,00	195.038.299,00	55,73
16	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	820.501.125,00	(820.501.125,00)	(100,00)
17	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	0,00	56.539.700,00	(56.539.700,00)	(58,30)
18	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.352.522.00	0,00	6.352.522.00	0,00
19	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	453.083.172,00	0,00	453.083.172,00	0,00
20	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.183.875,00	1.236.850,00	(52.975,00)	(4,28)
21	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.720.000,00	29.906.250,00	(2.186.250,00)	(7,31)
22	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	145.000,00	(145.000,00)	(100,00)
23	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.647.500,00	761.250,00	3.886.250,00	510,51
24	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH	44.687.500,00	8.337.500,00	36.350.000,00	435,98

UTANG BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
	atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				
25	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.540.000,00	3.171.875,00	(1.631.875,00)	(51,45)
26	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.925.000,00	2.281.937,00	(356.937,00)	(15,64)
27	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	51.838,00	(51.838,00)	(100,00)
28	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	79.575.650,00	63.035.125,00	16.540.525,00	26,24
29	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	160.714.375,00	(160.714.375,00)	(100,00)
30	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Administrasi	101.384.000,00	100.658.000,00	726.000,00	0,72
31	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Ahli	17.600.000,00	17.800.000,00	(200.000,00)	(1,12)
32	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00
33	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Telepon	7.437.535,00	6.988.815,00	448.720,00	6,42
34	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Air	2.055.280,00	3.631.628,00	(1.576.348,00)	(43,41)
35	Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan Listrik	1.212.406.668,00	1.297.559.297,00	(82.152.629,00)	(6,56)
36	Utang Belanja Jasa Kantor - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	136.977.872,80	165.953.703,00	(28.975.830,20)	(17,46)
37	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.162.313,00	942.296,00	8.220.017,00	872,34
38	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	618.240,00	53.760,00	564.480,00	1.050,00
39	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	688.800,00	67.200,00	621.600,00	925,00
40	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00

UTANG BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
	Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame				
41	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00
42	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.180.000,00	0,00	26.180.000,00	0,00
43	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	27.835.000,00	0,00	27.835.000,00	0,00
44	Utang Belanja Pegawai BLUD	110.451.299,00	0,00	110.451.299,00	0,00
45	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.094.169.787,00	18.186.560.781,00	22.907.609.006,00	125,96
46	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	15.352.850,00	0,00	15.352.850,00	0,00
JUMLAH		**44.096.782.243,80**	**21.531.634.429,00**	**22.565.147.814,80**	**104,80**

Tabel 5.105

UTANG BELANJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	OPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.436.474,00	9.526.920,00	(90.446,00)	(0,95)
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.665.686,00	3.560.223,00	105.463,00	2,96
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	35.870.844,80	19.126.486,00	16.744.358,80	87,55
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.250.764,00	3.357.528,00	(1.106.764,00)	(32,96)
5	Badan Pendapatan Daerah	1.039.242.654,00	1.409.255.342,00	(370.012.688,00)	(26,26)
6	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11.118.240,00	12.209.532,00	(1.091.292,00)	(8,94)
7	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14.049.553,00	15.843.078,00	(1.793.525,00)	(11,32)
8	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	17.921.558,00	20.084.208,00	(2.162.650,00)	(10,77)

UTANG BELANJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	OPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
9	Dinas Kepemudaan Olahraga	17.838.225,00	17.952.476,00	(114.251,00)	(0,64)
10	Dinas Kesehatan (Induk)	111.219.654,00	126.060.078,00	(14.840.424,00)	(11,77)
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.551.048,00	8.183.645,00	(1.632.597,00)	(19,95)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	5.554.558,00	5.078.471,00	476.087,00	9,37
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.710.038,00	10.567.137,00	2.142.901,00	20,28
14	Dinas Lingkungan Hidup	15.894.260,00	12.760.277,00	3.133.983,00	24,56
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.004.292,00	17.923.370,00	80.922,00	0,45
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.174.015,00	7.265.572,00	908.443,00	12,50
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	6.750.501,00	8.707.855,00	(1.957.354,00)	(22,48)
18	DINAS PENANAMAN MODAL Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.332.699,00	10.745.725,00	(4.413.026,00)	(41,07)
19	Dinas Pendidikan	11.887.580,00	26.939.374,00	(15.051.794,00)	(55,87)
20	Dinas Perhubungan	916.261.226,00	982.564.545,00	(66.303.319,00)	(6,75)
21	Dinas Perikanan	7.698.559,00	4.955.766,00	2.742.793,00	55,35
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	75.111.283,00	68.821.087,00	6.290.196,00	9,14
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.321.646,00	10.970.591,00	(2.648.945,00)	(24,15)
24	Dinas Pertanian	5.912.507,00	10.810.877,00	(4.898.370,00)	(45,31)
25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	11.264.515,00	8.187.768,00	3.076.747,00	37,58
26	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	14.711.433,00	14.836.982,00	(125.549,00)	(0,85)
27	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Tenaga Kerja	6.848.166,00	7.178.880,00	(330.714,00)	(4,61)
29	Inspektorat Daerah	26.701.421,00	8.628.836,00	18.072.585,00	209,44
30	Kecamatan Banjarsari	0,00	3.278.129,00	(3.278.129,00)	(100,00)
31	Kecamatan Bayah	3.551.237,00	4.280.241,00	(729.004,00)	(17,03)
32	Kecamatan Bojongmanik	738.738,00	817.794,00	(79.056,00)	(9,67)
33	Kecamatan Cibadak	1.048.500,00	1.046.064,00	2.436,00	0,23
34	Kecamatan Cibeber	996.948,00	962.013,00	34.935,00	3,63
35	Kecamatan Cigemblong	390.078,00	943.500,00	(553.422,00)	(58,66)

UTANG BELANJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	OPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
36	Kecamatan Cihara	934.502,00	2.056.402,00	(1.121.900,00)	(54,56)
37	Kecamatan Cijaku	1.069.569,00	1.812.561,00	(742.992,00)	(40,99)
38	Kecamatan Cikulur	886.859,00	1.173.945,00	(287.086,00)	(24,45)
39	Kecamatan Cileles	1.023.406,00	1.074.380,00	(50.974,00)	(4,74)
40	Kecamatan Cilograng	388.582,00	734.543,00	(345.961,00)	(47,10)
41	Kecamatan Cimarga	1.274.987,00	1.429.084,00	(154.097,00)	(10,78)
42	Kecamatan Cipanas	816.024,00	840.315,00	(24.291,00)	(2,89)
43	Kecamatan Cirinten	293.826,00	1.275.652,00	(981.826,00)	(76,97)
44	Kecamatan Curugbitung	276.534,00	1.053.442,00	(776.908,00)	(73,75)
45	Kecamatan Gunungkencana	1.157.850,00	1.256.049,00	(98.199,00)	(7,82)
46	Kecamatan Kalanganyar	1.089.066,00	982.434,00	106.632,00	10,85
47	Kecamatan Lebakgedong	517.218,00	1.533.700,00	(1.016.482,00)	(66,28)
48	Kecamatan Leuwidamar	815.117,00	804.541,00	10.576,00	1,31
49	Kecamatan Maja	82.511,00	366.810,00	(284.299,00)	(77,51)
50	Kecamatan Malingping	2.216.264,00	2.182.610,00	33.654,00	1,54
51	Kecamatan Muncang	987.750,00	2.341.521,00	(1.353.771,00)	(57,82)
52	Kecamatan Panggarangan	1.242.710,00	1.382.139,00	(139.429,00)	(10,09)
53	Kecamatan Rangkasbitung	12.028.885,00	6.782.912,00	5.245.973,00	77,34
54	Kecamatan Sajira	1.147.555,00	1.325.284,00	(177.729,00)	(13,41)
55	Kecamatan Sobang	258.155,00	802.619,00	(544.464,00)	(67,84)
56	Kecamatan Wanasalam	453.087,00	1.816.554,00	(1.363.467,00)	(75,06)
57	Kecamatan Warunggunung	1.558.055,00	894.012,00	664.043,00	74,28
58	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.534.876,00	7.060.515,00	(1.525.639,00)	(21,61)
59	Sekretariat Daerah	382.261.520,00	395.790.356,00	(13.528.836,00)	(3,42)
60	Sekretariat Dprd	34.800.909,00	34.870.898,00	(69.989,00)	(0,20)
JUMLAH		**2.887.144.717,80**	**3.345.073.648,00**	**(457.928.930,20)**	**(13,69)**

Rincian Utang Belanja BLUD dapat dilihat pada tabel 5.106 sebagai berikut:

Tabel 5.106
UTANG BELANJA BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	OPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Puskesmas Banjarsari	120.456.504,00	3.000.000,00	117.456.504,00	3.915,22
2	Puskesmas Baros	64.063.934,00	5.000.000,00	59.063.934,00	1.181,28
3	Puskesmas Bayah	171.793.446,00	7.150.000,00	164.643.446,00	2.302,71
4	Puskesmas Binuangeun	117.724.928,00	16.400.000,00	101.324.928,00	617,83
5	Puskesmas Bojongjuruh	63.304.693,00	3.100.000,00	60.204.693,00	1.942,09
6	Puskesmas Bojongmanik	101.986.672,00	4.000.000,00	97.986.672,00	2.449,67
7	Puskesmas Cibadak	74.586.839,00	4.000.000,00	70.586.839,00	1.764,67
8	Puskesmas Cibeber	97.584.131,00	1.500.000,00	96.084.131,00	6.405,61
9	Puskesmas Cigemblong	54.115.670,00	11.436.854,00	42.678.816,00	373,17
10	Puskesmas Cihara	105.438.137,00	11.350.000,00	94.088.137,00	828,97
11	Puskesmas Cijaku	87.933.242,00	10.150.000,00	77.783.242,00	766,34
12	Puskesmas Cikulur	107.209.333,00	7.500.000,00	99.709.333,00	1.329,46
13	Puskesmas Cileles	62.225.954,00	3.500.000,00	58.725.954,00	1.677,88
14	Puskesmas Cilograng	102.620.034,00	17.950.000,00	84.670.034,00	471,70
15	Puskesmas Cimarga	99.436.958,00	4.200.000,00	95.236.958,00	2.267,55
16	Puskesmas Cipanas	159.320.084,00	12.875.000,00	146.445.084,00	1.137,44
17	Puskesmas Cipeundeuy	57.749.484,00	8.400.000,00	49.349.484,00	587,49
18	Puskesmas Cirinten	81.602.865,00	5.164.613,00	76.438.252,00	1.480,04
19	Puskesmas Cisimeut	58.751.128,00	3.300.000,00	55.451.128,00	1.680,34
20	Puskesmas Cisungsang	59.621.614,00	0,00	59.621.614,00	0,00
21	Puskesmas Citorek	60.256.073,00	1.134.270,00	59.121.803,00	5.212,32
22	Puskesmas Curug bitung	110.578.503,00	7.000.000,00	103.578.503,00	1.479,69
23	Puskesmas Gunungkencana	82.877.778,00	8.200.000,00	74.677.778,00	910,70
24	Puskesmas Kalanganyar	74.032.649,00	8.250.000,00	65.782.649,00	797,37
25	Puskesmas Kolelet	105.764.448,00	5.600.000,00	100.164.448,00	1.788,65
26	Puskesmas Lebakgedong	53.610.809,00	2.200.000,00	51.410.809,00	2.336,85
27	Puskesmas Leuwidamar	61.750.016,00	10.750.000,00	51.000.016,00	474,42
28	Puskesmas Maja	190.755.531,00	277.530.556,00	(86.775.025,00)	(31,27)
29	Puskesmas Malingping	142.185.805,00	18.850.000,00	123.335.805,00	654,30
30	Puskesmas Mandala	64.281.924,00	1.000.000,00	63.281.924,00	6.328,19
31	Puskesmas Mekarsari	47.315.505,00	3.500.000,00	43.815.505,00	1.251,87
32	Puskesmas Muncang	76.144.170,00	7.000.000,00	69.144.170,00	987,77
33	Puskesmas Pajagan	70.008.272,00	4.200.000,00	65.808.272,00	1.566,86
34	Puskesmas Pamandegan	85.328.742,00	4.500.000,00	80.828.742,00	1.796,19
35	Puskesmas Panggarangan	119.021.300,00	8.400.000,00	110.621.300,00	1.316,92
36	Puskesmas Parungsari	56.536.129,00	7.800.000,00	48.736.129,00	624,82
37	Puskesmas Prabugantungan	61.418.351,00	5.500.000,00	55.918.351,00	1.016,70

UTANG BELANJA BLUD
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	OPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5=3-4	6
38	Puskesmas Rangkasbitung	169.788.535,00	7.400.000,00	162.388.535,00	2.194,44
39	Puskesmas Sajira	73.480.517,00	7.432.146,00	66.048.371,00	888,69
40	Puskesmas Sarageni	51.342.138,00	56.942.278,00	(5.600.140,00)	(9,83)
41	Puskesmas Sobang	70.581.445,00	1.800.000,00	68.781.445,00	3.821,19
42	Puskesmas Warunggunung	132.646.166,00	6.250.000,00	126.396.166,00	2.022,34
43	RSUD dr. Adjidarmo	37.402.407.070,00	17.585.345.064,00	19.817.062.006,00	112,69
JUMLAH		**41.209.637.526,00**	**18.186.560.781,00**	**23.023.076.745,00**	**126,594**

5.1.8 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan maupun penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan di bandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 di pengaruhi oleh Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar terdiri dari Koreksi Piutang, Koreksi Penyisihan Piutang, Koreksi Persediaan Koreksi Investasi, Koreksi Aset Tetap, Koreksi Akumulasi Penyusutan, Koreksi Aset Lainnya, dan Pendapatan Diterima Dimuka. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Tabel 5.107 berikut:

Tabel 5.107
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	**EKUITAS AWAL**	**4.498.806.391.706,13**	**4.673.297.997.068,87**
2	**SURPLUS/DEFISIT**	**(158.857.128.217,08)**	**(183.025.415.203,08)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :**	**(222.230.997.440,28)**	**8.533.809.840,34**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3	4
	Koreksi kas	0,00	6.800.000,00
	Koreksi Piutang	15.937.703.094,00	5.180.935.581,04
	Koreksi Penyisihan Piutang	4.983.835.996,49	935.881.205,66
	Koreksi Persediaan	19.799.900,00	0,00
	Koreksi Investasi	853.848.427,37	0,00
	Koreksi atas Aset Tanah	(1.166.313.875,00)	6.466.847.019,93
	Koreksi atas Aset Peralatan Mesin	1.181.671.869,52	(4.200.000.00)
	Koreksi Gedung dan Bangunan	(5.761.843.449,64)	81.059.615,00
	Koreksi Jalan Irigasi Dan Jembatan	23.936.435.547,86	40.947.450,00
	Koreksi Aset Tetap Kontruksi dalam Pekerjaan	4.869.634.731,74	0,00
	Koreksi atas Aset Aset Tetap Lainnya	664.628.000,00	155.325.000,00
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(262.854.382.849,11)	(2.688.183.005,83)
	Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	43.038.624,94	0,00
	Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(183.766.603,12)	(16.365.632,39)
	Koreksi atas Aset lain-lain	(45.000.000,00)	(71.000.000,00)
	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.701.953.522,00)	(1.554.237.393,00)
	Koreksi Pendapatan diterima Dimuka	(8.333.333,33)	0,00
	Pembulatan	(0,00)	(0,07)
4	**RKPPKD**	**0,00**	**0,00**
5	**LAIN-LAIN**	**0,00**	**0,00**
6	**EKUITAS AKHIR**	**4.117.718.266.048,78**	**4.498.806.391.706,13**

Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.117.718.266.048,68 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.498.806.391.706,13 mengalami penurunan sebesar Rp381.088.125.657,36 atau 8,47%. Penurunan tersebut disebabkan oleh:

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.498.806.391.706,13 yang merupakan ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 hasil audit BPK- RI.

2. Surplus/Defisit (LO)

Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 adalah defisit yaitu sebesar Rp158.857.128.217,08 merupakan defisit dari Laporan Operasional Tahun 2024.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas pada Tahun 2024. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp(222.230.997.440,28) dengan rincian sebagai berikut:

a. Koreksi Piutang sebesar Rp15.937.703.094,00 terdiri dari:
   1) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.872.024.928,00 karena ada penambahan ketetapan pajak tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:
      a) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp90.868.290,00;
      b) Piutang Pajak Mineral sebesar Rp2.798.208.541,00;
      c) Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp853.934.156,00;
      d) Piutang PBJT-Hotel sebesar Rp66.379.079,00;
      e) Piutang PBJT-Restoran sebesar Rp407.550.272,00;
      f) Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya sebesar Rp47.074.286,00;
      g) Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar Rp118.236.837,00;
      h) Piutang Denda Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp489.773.467,00.
   2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp57.687.666,00 adalah koreksi kurang catat Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
   3) Dinas Kesehatan sebesar Rp11.008.090.500,00 merupakan koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Adjidarmo yang belum

tercatat pada tahun sebelumnya;

4) Dinas Perhubungan sebesar Rp(100.000,00) merupakan koreksi Piutang Parkir Tepi Jalan Umum Jalan Raya Cipanas-Bogor sebesar Rp(100.000,00) yang sudah dibayarkan tahun 2023.

b. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp4.983.835.996,49 adalah koreksi akibat pemulihan penyisihan karena pembayaran dan penghapusan piutang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Kesehatan sebesar Rp228.418.672,89 adalah koreksi penyisihan piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Adjidarmo dan Puskesmas Tahun 2023, dengan rincian berikut:

a) Puskesmas Bayah sebesar Rp233.600,00;
b) Puskesmas Binuangeun sebesar Rp682.600,00;
c) Puskesmas Cibeber sebesar Rp111.500,00;
d) Puskesmas Cikulur sebesar Rp2.800.350,00;
e) Puskesmas Cimarga sebesar Rp261.700,00;
f) Puskesmas Cipanas sebesar Rp1.326.400,00;
g) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp93.400,00;
h) Puskesmas Kalangnyar sebesar Rp1.726.800,00;
i) Puskesmas Maja sebesar Rp220.600,00;
j) Puskesmas Mandala sebesar Rp320.000,00;
k) Puskesmas Warunggunung sebesar Rp654.000,00;
l) RSUD dr. Adjidarmo sebesar Rp219.984.722,89;
m) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.000,00.

2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah koreksi penyisihan piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan (Rumah Susun Sederhana Sewa) Tahun 2023 sebesar Rp384.670,00;

3) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah koreksi penyisihan piutang sebesar Rp4.302.652.831,61 merupakan koreksi penyisihan piutang bagi hasil sebesar Rp44.082.351,61 dan koreksi penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp4.258.570.480,00;

4) Badan Pendapatan Keuangan Daerah adalah koreksi penyisihan piutang sebesar Rp399.597.066,00 merupakan koreksi penyisihan piutang pajak sebesar dengan rincian berikut:
   a) Penyisihan Piutang PBJT-Hotel sebesar Rp127.719,87;
   b) Penyisihan Piutang PBJT-Restoran sebesar Rp58.659,10;
   c) Penyisihan Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya sebesar Rp180.075,00;
   d) Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp119.974,91;
   e) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.419.581,84;
   f) Penyisihan Piutang Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp308.520.348,11;
   g) Penyisihan Piutang Denda Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp89.170.707,17.
5) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp22.365.000,00 merupakan koreksi penyisihan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
6) Dinas Perhubungan sebesar Rp2.100.000,00 merupakan koreksi penyisihan Penyisihan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
7) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp28.317.756,00 merupakan koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan;

c. Koreksi Persediaan sebesar Rp19.799.900,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan belum tercatat tahun sebelumnya;
d. Koreksi Investasi sebesar Rp853.848.427,37 karena adanya koreksi ekuitas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya Tahun 2023;
e. Koreksi Aset Tetap Tanah sebesar Rp(1.166.313.875,00) dengan rincian berikut:
   1) Akibat Hasil Penetapan Status sebesar Rp120.426.200,00 berdasarkan Nomor Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/Kep.491-BKAD/2024 tanggal 31 Desember 2024, terdapat pada:
      a) Dinas Pendidikan Sebesar Rp112.817.200,00 terdiri dari:
         - Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp4.907.700,00 di

Kp. Bulakan Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar;

- Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp26.316.000,00 di Jalan Leuwidamar Km 15 Kp. Bondol Rt 01 Rw 01 Desa Girimukti Kecamatan Cimarga;
- Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan sebesar Rp18.396.000,00 di Kp. Kandangsapi Rt 03 Rw 01 Desa Kandangsapi Kecamatan Cijaku;
- Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan sebesar Rp60.929.500,00 di Jalan Raya Bayah Malingping Kp. Cimangpang Rt 01 Rw 03 Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan;
- Tanah Kosong yang sudah diperuntukan sebesar Rp2.268.000 di Kampung Sindang Sari Rt.001 Rw.001 Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam.

b) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.609.000,00 berupa Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama di Jalan Cihampelas Gang Margalaksana No 25 Desa Tamansari Kota Bandung.

2) Akibat dari Hibah Tahun lalu yang belum tercatat sebesar Rp(1.286.740.075,00) terdapat pada:

a) Dinas Kesehatan di Puskesmas Prabugantungan ke Pemerintahan Desa Prabugantungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 032/Kep.490-BKAD/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dan NPHD Nomor: 032/Perj.76-Dinkes/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp441.000,00 dan Puskesmas Muncang sebesar Rp540.000 berdasarkan NPHD Nomor 032/Perj.1321-BKAD/2024 dan Nomor 593/21/DS.CKR/XII/2024, Tanggal 19 Desember 2024 ke Desa Cikarang Kecamatan Muncang;

b) Sekretariat Daerah berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.285.759.075,00 Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor: 032/Kep.490-BKAD/2024 tanggal 31 Desemeber 2024 kepada:

- Pemerintah Provinsi Banten pada SMK Negeri 1 Cibeber sebesar Rp 929.960.000,00 karena tercatat Ganda;
- Politeknik Kesehatan sebesar Rp355.799.075,00 dengan NPHD Nomor 900.1/Perj.34/BKAD/XII/2024 dan Nomor: HK.03.01/2.3/10655/2022 Tanggal 30 Desember 2022.

f. Koreksi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.181.671.869,52 dengan rincian berikut:

1) Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Hibah Tahun sebelumnya belum tercatat pada Kecamatan Maja sebesar Rp2.490.000,00 dari BAST Hibah tahun 2023 dari Sdr. Edi Nurhedi, S.Sos., faktur pembelian dan pemasangan tanggal 26 Mei 2021. BAST 032/26-BKAD/2024 tanggal 24 Januari 2024 berupa Alat Kantor Lainnya dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp450.409.038,00 berupa:
   a) Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp65.115.038,00;
   b) Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp365.285.000,00;
   c) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp5.665.000,00;
   d) Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.067.000,00;
   e) Sumber Tenaga sebesar Rp3.047.000,00;
   f) Personal Computer sebesar Rp10.230.000,00.
2) Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena pembulatan pada Aplikasi Atisisbada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp(0,06);
3) Koreksi Aset Peralatan dan Mesin karena Kapitalisasi Aset yang tahun sebelumnya diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp728.772.831,58 terdapat pada:
   a) Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp126.950.000,00;
   b) Dinas Administrai Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Komputer Jaringan sebesar Rp 5.600.000,00;
   c) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Rambu Tidak Bersuar sebesar Rp 27.720.000,00;
   d) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.738.250,00 terdiri dari:
      - Puskesmas Mekarsari berupa Flood Lights sebesar Rp 8.700.000,00;
      - Puskesmas Pamandegan berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp5.500.000,00;
      - Puskesmas Muncang berupa Alat kantor Lainnya sebesar Rp6.500.000 dan Peralatan Studio Audio sebesar Rp4.300.000;
      - Puskesmas Cipanas berupa Rambu Tidak Bersuar sebesar

Rp1.738.250,00.

e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp92.787.000,00 berupa:
   - Compacting Equipment sebesar Rp72.787.000,00;
   - Alat Kantor Lainnya sebesar Rp10.000.000,00;
   - Sumur Pemboran sebesar Rp10.000.000,00.

f) Dinas Pendidikan sebesar Rp19.533.000,00 berupa;
   - Pompa sebesar Rp6.000.000,00;
   - Komputer Jaringan sebesar Rp1.500.000,00;
   - Transport And Storage Equipment For Liquid sebesar Rp4.800.000,00;
   - Peralatan Permainan sebesar Rp4.200.000,00.

g) Dinas Perhubungan berupa Ranbu Tidak Bersuar sebesar Rp420.944.581,58;

h) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp 8.500.000,00.

g. Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp(5.761.843.449,64) karena Pencatatan Hibah Tahun lalu dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor: 032/Kep.490-BKAD/ 2024 Tanggal 31 Desember 2024 pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Kesehatan, terdiri dari:

1) Puskesmas Banjarsari sebesar Rp184.714.952,93;
2) Puskesmas Bojongmanik sebesar Rp182.613.636,00;
3) Puskesmas Cibeber sebesar Rp367.379.450,28;
4) Puskesmas Cigemblong sebesar Rp182.999.336,00;
5) Puskesmas Cihara sebesar Rp290.777.300,00;
6) Puskesmas Cijaku sebesar Rp290.340.000,00;
7) Puskesmas Cileles sebesar Rp182.659.236,00;
8) Puskesmas Cilograng sebesar Rp612.878.000,00;
9) Puskesmas Cimarga sebesar Rp139.165.000,00;
10) Puskesmas Cipanas sebesar Rp183.123.344,00;
11) Puskesmas Cirinten sebesar Rp 138.900.000,00;
12) Puskesmas Cisungsang sebesar Rp151.298.900,00
13) Puskesmas Curugbitung sebesar Rp353.302.000,00;
14) Puskesmas Gunungkencana sebesar Rp159.129.000,00;

15) Puskesmas Kolelet sebesar Rp 456.087.487,43;
16) Puskesmas Maja sebesar Rp159.110.000,00;
17) Puskesmas Mekarsari sebesar Rp182.655.436,00;
18) Puskesmas Muncang sebesar Rp564.364.686,00;
19) Puskesmas Pamandegan sebesar Rp182.908.136,00;
20) Puskesmas Panggarangan sebesar Rp183.082.936,00;
21) Puskesmas Parungsari sebesar Rp174.019.797,00;
22) Puskesmas Prabugantungan sebesar Rp73.014.000,00;
23) Puskesmas Sarageni sebesar Rp184.252.130,00;
24) Puskesmas Sobang sebesar Rp183.068.686,00.

h. Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp23.936.435.547,86 terdapat pada:
   1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Jaringan Transmisi sebesar Rp6.000.000,00;
   2) Dinas Ketahanan Pangan berupa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp3.000.000,00;
   3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp350.744.067,80 berupa:
      a) Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp8.000.000,00;
      b) Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp13.000.000,00;
      c) Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp19.257.675,00;
      d) Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp181.371.100,00;
      e) Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp129.115.292,80;
   4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.975.685.879,59 berupa:
      a) Jalan Desa sebesar Rp841.398.500,80;
      b) Jembatan Pada Jalan Desa sebesar Rp3.626.199.845,00;
      c) Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp92.566.500,00;
      d) Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp1.633.054.194,76;
      e) Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp8.002.602.002,36;
      f) Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp94.319.700,00;

g) Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp1.783.164.936,67;
h) Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp58.958.050,00;
i) Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai sebesar Rp4.719.683.400,00;
j) Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp14.755.750,00;
k) Instalasi Air Sumber / Mata Air sebesar Rp20.288.400,00;
l) Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sebesar Rp70.226.700,00;
m) Instalasi Pusat Pengatur Listrik sebesar Rp9.617.900,00;
n) Jaringan Telepon Diatas Tanah sebesar Rp8.850.000,00;

5) Dinas Pendidikan sebesar Rp924.538.581,34 berupa:
a) Bangunan Waduk Irigasi sebesar Rp900.000,00;
b) Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp845.000,00;
c) Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp6.133.954,22;
d) Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp6.059.884,16;
e) Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air sebesar Rp3.800.000,00;
f) Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air sebesar Rp2.065.000,00;
g) Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku sebesar Rp1.052.000,00;
h) Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku sebesar Rp875.000,00;
i) Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku sebesar Rp4.200.000,00;
j) Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp874.723.407,00;
k) Bangunan Pelengkap Air Kotor sebesar Rp806.600,00;
l) Instalasi Air Permukaan sebesar Rp1.000.000,00;
m) Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp1.250.000,00;
n) Instalasi Pengolahan Sampah Organik sebesar Rp4.069.456,00;
o) Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp3.458.427,50;
p) Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebesar Rp20.000,00;
q) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg) sebesar Rp1.200.000,00;
r) Instalasi Pusat Pengatur Listrik sebesar Rp868.052,46;
s) Instalasi Lain sebesar Rp8.031.300,00;
t) Jaringan Transmisi sebesar Rp1.500.000,00;

u) Jaringan Distribusi sebesar Rp750.000,00;
v) Jaringan Pipa Gas Transmisi sebesar Rp930.500,00;

6) Dinas Perhubungan sebesar Rp685.950.315,95 berupa:
a) Jaringan Transmisi sebesar Rp13.237.900,00;
b) Jaringan Distribusi sebesar Rp672.712.415,95;

7) Dinas Perikanan sebesar Rp23.520.142,00 berupa:
a) Jalan Khusus sebesar Rp8.912.825,00;
b) Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp658.986,00;
c) Bangunan Pembawa Pasang Surut sebesar Rp442.236,00;
d) Instalasi Air Tanah Dangkal sebesar Rp1.230.043,00;
e) Jaringan Induk Distribusi sebesar Rp4.968.700,00;
f) Jaringan Transmisi sebesar Rp7.307.352,00;

8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa Jaringan Transmisi sebesar Rp5.000.000,00;

9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Instalasi Lain sebesar Rp803.433,00;

10) Dinas Pertanian sebesar Rp40.051.707,38 berupa:
a) Jalan Khusus sebesar Rp15.863.942,25;
b) Bangunan Pengambilan Irigasi sebesar Rp21.235.500,00;
c) Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp2.952.265,13;

11) Sekretariat Daerah sebesar Rp5.817.925,80 berupa :
a) Jaringan Distribusi sebesar Rp2.450.000,00;
b) Jaringan Telepon Diatas Tanah sebesar Rp3.367.925,80;

12) Kecamatan Gunungkencana berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp49.469.500,00;

13) Kecamatan Leuwidamar berupa Instalasi Air Permukaan sebesar Rp1.500.000,00;

14) Kecamatan Rangkasbitung berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp46.696.000,00;

15) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cipanas berupa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp18.600.000,00;

16) Koreksi Harga terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebesar Rp799.057.995,00 berupa:

a) Jalan Kabupaten sebesar Rp435.346.960,00;

b) Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp363.711.035,00.

i. Koreksi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp664.628.000,00 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga hasil perolehan hibah tahun lalu Tanggal BASTP seharusnya 29 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00, namun pada saat itu belum di input karena Pengurus Barang belum mengetahui adanya CSR ini. Baru diketahui di tahun 2024. Sehingga Tanggal dipakai adalah tanggal rekon triwulan 1 di tahun 2024 berupa Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Olahraga dengan Nomor:BA.STSP-DISPORA/XII/2023/24-04-2024/6090, dan dan Koreksi dikarenakan Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Perbup Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada BAB XII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan sebesar Rp(335.372.000,00) terdapat pada:

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp110.595.000,00 berupa:

a) Perencanaan Penataan Taman Bermain Anak Pantai di Pantai Sawarna Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.8-Dispar/2017 sebesar Rp39.120.000,00;

b) Perencanaan Teknis Pembangunan Panggung Pertunjukan/Kesenian Sawarna Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.2-Dispar/2017 sebesar Rp39.010.000,00;

c) Perencanaan Teknis Pembangunan Panggung Kesenian Goa Lalay Bayah Tahun 2017 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 900/531.1-Dispar/2017 sebesar Rp32.465.000,00.

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp224.777.000,00 berupa:

a) Penyusunan DED Penataan Kawasan Perkantoran Ona (Disdik, BPMPD, DCK dan DLH) Tahun 2015 sebesar Rp94.978.000,00;

b) Penyusunan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp103.039.000,00;

c) Penyusunan DED Pembangunan Rumah Singgah tahun 2016 sebesar Rp26.760.000,00;

j. Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.869.634.732,18 adalah hasil dari temuan Inspektorat Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp64.000.000,00 karena kapitalisasi aset tahun sebelumnya dan akibat dari penyesuaian dengan Aplikasi Atisisbada pada Dinas Perikanan sebesar Rp(0,44); terdiri dari:

1) Koreksi Pembukuan akibat dari kapitalisasi Aset tahun sebelumnya sebesar Rp64.000.000,00 hasil temuan dari Inspektorat Daerah berupa hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2) Koreksi kapitalisasi Aset Ekstrakompatabel ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.805.634.732,18 terdapat pada:
   a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp740.000,00 berupa:
      - Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp690.000,00;
      - Tanda Penghargaan Bidang Olahraga sebesar Rp50.000,00;
   b) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berupa Bahan Katografi sebesar Rp1.910.000,00;
   c) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Pahatan sebesar Rp825.000,00;
   d) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp17.986.037,00 berupa:
      - Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp17.422.600,00;
      - Alat Bercorak kebudayaan lainnya sebesar Rp563.437,00;
   e) Dinas Ketahanan Pangan berupa Bahan Kartografi sebesar Rp350.000,00;
   f) Dinas Lingkungna Hidup berupa Bahan Katografi sebesar Rp200.000,00;
   g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.790.000,00 berupa:
      - Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp650.000,00;
      - Barang kerajinan sebesar Rp3.140.000,00;

h) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.687.948.305,56 berupa:

- Buku umum sebesar Rp2.054.709.391,77;
- Buku Filsafah sebesar Rp383.800,00;
- Buku Agama sebesar Rp72.174.300,00;
- Buku Ilmu Sosial sebesar Rp88.466.349,66;
- Buku Ilmu Bahasa sebesar Rp121.246.451,10;
- Buku Matematika dan Pengetahuan Alam sebesar Rp157.071.128,51;
- Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp3.314.542,00;
- Buku arsitektur, Kesenian, Olahraga sebesar Rp699.517.610,86;
- Buku Geografi, Biografi, Sejarah sebesar Rp625.000,00;
- Serial sebesar Rp560.000,00;
- Buku Laporan sebesar Rp9.840.488,54
- Audio Visual sebesar Rp21.581.806,98;
- Bentuk Mikro (Microform) sebesar Rp129.700,00;
- Bahan Katografi sebesar Rp755.206.955,30;
- Naskah (Manuskrip) /Asli sebesar Rp710.186,00;
- Lukisan dan Ukiran sebesar Rp8.663.440,00;
- Karya Musik sebesar Rp234.020,00;
- Karya Grafika (Graphic Material) sebesar Rp9.819.451,52;
- Three Dimensional Artefacs and Realita sebesar Rp2.529.229,55;
- Alat Musik sebesar Rp198.432.452,87;
- Lukisan sebesar Rp19.771.045,00;
- Barang Bercorak Kesenian lainnya sebesar Rp879.000,00;
- Pahatan sebesar Rp103.928.341,00;
- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp287.891.626,71;
- Barang Kerajinan sebesar Rp104.669.868,82;
- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga sebesar Rp26.581.000,00;
- Algae Budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sebesar Rp133.800,00;
- Hewan Koleksi sebesar Rp1.192.100,00;

- Biota Perairan Koleksi sebesar Rp208.400,00;
- Tanaman Koleksi sebesar Rp30.119.378,89;
- Batuan Koleksi sebesar Rp5.557.440,48;
- Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp1.800.000,00;

i) Dinas Perhubungan berupa Barang Kerajinan sebesar Rp1.175.000,00;

j) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Umum sebesar Rp76.880.000,00;

k) Dinas Pertanian berupa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp500.000,00;

l) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.014.121,62 berupa:

- Buku Agama sebesar Rp805.510,70;
- Lukisan dan Ukiran sebesar Rp1.643.000,00;
- Alat Musik sebesar Rp4.565.610,92;

m) Kecamatan Cibadak berupa Lukisan dan Ukiran sebesar Rp800.000,00;

n) Kecamatan Cileles sebesar Rp2.900.000,00 berupa:

- Bahan Kartografi sebesar Rp1.000.000,00;
- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp100.000,00;
- Tanda Penghargaan Bidang Olahraga sebesar Rp1.800.000,00;

o) Kecamatan Cikulur berupa pahatan sebesar Rp950.000,00;

p) Kecamatan Muncang sebesar Rp300.000,00 berupa:

- Bahan Kartografi sebesar Rp150.000,00
- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah sebesar Rp150.000,00;

q) Kecamatan Rangkasbitung berupa Barang Kerajinan sebesar Rp495.000,00;

r) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Panggarangan berupa Barang Kerajinan sebesar Rp871.268,00.

3) Koreksi Saldo Awal akibat penyesuaian aplikasi Atisisbada pada Dinas Perikanan sebesar Rp(0,44).

4) Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(262.854.382.849,07) terdidri dari:

a) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar

Rp(41.415.433.078,19) terdiri dari:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp(13.236.395.920,70);
- Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(818.574.945,18);
- Dinas Kesehatan sebesar Rp(13.236.395.920,70);
- Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(818.574.945,18);
- Dinas Pendidikan sebesar Rp(16.059.420.016,81);
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanaham sebesar Rp(252.697.744,51);
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp(296.726.682,85);
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp(395.190.141,21);
- Dinas Sosial sebesar Rp(127.402.667,83);
- Dinas Tenaga Kerja Sebesar Rp(171.703.308,13);
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp(442.119.741,60);
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp(41.151.436,65);
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(1.619.420.500,66);
- Dinas Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp(349.093.050,62);
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp(125.567.424,90);
- Dinas Perhubungan sebesar Rp(1.298.574.232,37);
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp(712.056.163,15);
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp(144.395.956,13);
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp(269.884.639,35);
- Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp(123.121.770,57);

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp(203.245.593,21);
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp(473.031.740,28);
- Dinas Perikanan sebesar Rp(79.493.963,90);
- Dinas Pertanian sebesar Rp(529.237.225,09);
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp(29.680.162,49);
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(207.037.070,55);
- Sekretariat Daerah sebesar Rp(1.045.319.799,25);
- Sekretariat DPRD sebesar Rp(276.604.831,07);
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp(136.230.371,79);
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp(773.761.324,69);
- Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp(305.643.310,18);
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp(5.879.025,05);
- Inspektorat Daerah sebesar Rp(262.768.531,42);
- Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp(190.349.210,90);
- Kecamatan Kalanganyar sebesar Rp(6.692.446,66);
- Kecamatan Cibadak sebesar Rp(10.033.577,63);
- Kecamatan Warunggunung sebesar Rp(5.415.125,25);
- Kecamatan Cimarga sebesar Rp(2.484.603,33);
- Kecamatan Cikulur sebesar Rp(16.427.675,82);
- Kecamatan Leuwidamar sebesar Rp(12.624.425,83);
- Kecamatan Sajira sebesar Rp(9.059.177,07);
- Kecamatan Maja sebesar Rp(16.260.717,51);
- Kecamatan Curugbitung sebesar Rp(14.484.619,26);
- Kecamatan Muncang sebesar Rp(16.378.060,41);
- Kecamatan Sobang sebesar Rp(16.535.363,33);
- Kecamatan Bojongmanik sebesar Rp(13.645.357,66);
- Kecamatan Cirinten sebesar Rp(14.037.946,66)
- Kecamatan Cipanas sebesar Rp(6.991.029,99);
- Kecamatan Lebakgedong sebesar Rp(6.670.030,01);

- Kecamatan Gunungkencana sebesar Rp(14.470.163,58);
- Kecamatan Cileles sebesar Rp(11.482.274,06);
- Kecamatan Banjarsari sebesar Rp(21.955.280,00);
- Kecamatan Cijaku sebesar Rp(13.596.800,82);
- Kecamatan Cigemblong sebesar Rp(24.877.349,45);
- Kecamatan Malingping sebesar Rp(3.281.496,66);
- Kecamatan Wanasalam sebesar Rp(2.425.523,81);
- Kecamatan Cihara sebesar Rp(9.566.613,32);
- Kecamatan Panggarangan sebesar Rp(26.980.125,23);
- Kecamatan Bayah sebesar Rp(15.080.838,32);
- Kecamatan Cibeber sebesar Rp(9.266.979,16);
- Kecamatan Cilograng sebesar Rp(11.685.620,73);
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp(81.245.353,54).

b) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(29.969.875.196,80) terdiri dari:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp(1.320.994.507,72);
- Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(546.316.550,69);
- Dinas Pendidikan sebesar Rp(21.441.400.700,80);
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanaham sebesar Rp(547.760.222,82);
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp(20.185.520,77);
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp(22.243.470,26);
- Dinas Sosial sebesar Rp(37.814.110,70);
- Dinas Tenaga Kerja Sebesar Rp(111.973.373,47);
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp(122.459.603,56);
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp(8.074.184,77);
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(285.869.807,31);

- Dinas Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp(84.454.462,47);
- Dinas Perhubungan sebesar Rp(225.535.771,81);
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp(16.393.055,55);
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp(301.677.202,09);
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp(52.540.259,50);
- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp(379.218.811,43);
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp(699.373.348,16);
- Dinas Perikanan sebesar Rp180.482.371,26);
- Dinas Pertanian sebesar Rp(284.963.895,68);
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp(183.134.025,28);
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(1.595.468.188,58);
- Sekretariat Daerah sebesar Rp(500.541.922,40);
- Sekretariat DPRD sebesar Rp(61.139.259,01);
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp(26.760.756,25);
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp(51.093.405,83);
- Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp(8.056.127,13);
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp(55.718.458,03);
- Inspektorat Daerah sebesar Rp(26.102.636,06);
- Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp(48.736.858,55);
- Kecamatan Kalanganyar sebesar Rp(3.900.413,79);
- Kecamatan Cibadak sebesar Rp(17.787.901,52);
- Kecamatan Warunggunung sebesar Rp(3.639.909,22);
- Kecamatan Cimarga sebesar Rp(89.678.704,00);
- Kecamatan Cikulur sebesar Rp(8.047.283,83);
- Kecamatan Leuwidamar sebesar Rp(34.717.675,18);

- Kecamatan Sajira sebesar Rp(50.990.439,77);
- Kecamatan Maja sebesar Rp(19.214.618,29);
- Kecamatan Curugbitung sebesar Rp(16.586.633,68);
- Kecamatan Muncang sebesar Rp(8.482.102,92);
- Kecamatan Sobang sebesar Rp(47.793.145,11);
- Kecamatan Bojongmanik sebesar Rp(9.159.627,79);
- Kecamatan Cirinten sebesar Rp(37.181.904,54)
- Kecamatan Cipanas sebesar Rp(14.681.843,25);
- Kecamatan Gunungkencana sebesar Rp(46.655.661,59);
- Kecamatan Cileles sebesar Rp(19.642.703,30);
- Kecamatan Banjarsari sebesar Rp(25.731.484,97);
- Kecamatan Cijaku sebesar Rp(46.477.806,57);
- Kecamatan Cigemblong sebesar Rp(30.623.962,14);
- Kecamatan Malingping sebesar Rp(12.575.633,39);
- Kecamatan Wanasalam sebesar Rp(9.216.333,33);
- Kecamatan Cihara sebesar Rp(43.117.902,06);
- Kecamatan Panggarangan sebesar Rp(28.705.846,04);
- Kecamatan Bayah sebesar Rp(59.096.262,51);
- Kecamatan Cibeber sebesar Rp15.244.403,71);
- Kecamatan Cilograng sebesar Rp(9.424.755,46);
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp(15.017.370,90).

c) Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp(191.469.074.574,17) terdiri dari:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(177.230.515.740,26);
- Dinas Pendidikan sebesar Rp(617.182.664,40);
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp(107.934.349,82);
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp(542.112.133,44);
- Dinas Perhubungan sebesar Rp(983.259.707,91);
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp(638.175.617,80);
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp(803.433,00);

- Dinas Perikanan sebesar Rp(30.429.085,93);
- Dinas Pertanian sebesar Rp(34.418.866,71);
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(264.636.268,36);
- Sekretariat Daerah sebesar Rp(82.595.117,32)
- Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp(605.786.934,27);
- Kecamatan Leuwidamar sebesar Rp(400.000,00);
- Kecamatan Gunungkencana sebesar Rp(14.227.820,83).
- Dinas Kesehatan sebesar Rp(651.453.845,19);
- Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp(5.339.680.772,31);
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp(1.014.933.162,84);
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp(610.625,00);
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebesar Rp(3.264.995.027,64);
- Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp(34.411.162,22);
- Dinas Sosial sebesar Rp(366.666,67);
- Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp(599.156,25);
- Sekretariat DPRD sebesar Rp(9.546.416,00).

k. Koreksi Aset Tidak Berwujud karena kapitalisasi asset pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.038.624,94 berupa:
   1) Hak Cipta sebesar Rp68.387,86;
   2) Software sebesar Rp19.019.982,95;
   3) Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/ budaya sebesar Rp13.487.961,00;
   4) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.000.000,00;
   5) Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp8.462.293,13.

l. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(183.766.603,12) terdiri dari:
   1) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp(89.620.549,87);
   2) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp(17.367.854,17);

3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp(5.625.000,00);
4) Dinas Kesehatan sebesar Rp(31.250.000,00);
5) Dinas Pendidikan sebesar Rp(39.903.199,08);

m. Koreksi Aset Lain-lain sebesar Rp(45.000.000,00) terdapat pada:
1) Dinas Kesehatan di Puskesmas Cilograng sebesar Rp(45.000.000,00) karena Pencatatan Hibah Tahun lalu dengan NPHD Nomor 032/Perj.118-Dinkes/V/2023, Tanggal 29 Mei 2023;

n. Koreksi Akumulasi Aset Lainnya sebesar Rp(4.701.953.522,00) terdiri dari:
1) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp(4.569.281.910,61) terdiri dari:
a) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp(4.578.721,94);
b) Badan Penanggulangan Bencana daerah sebesar Rp(377.895,25);
c) Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp(29.156.597,96);
d) Dinas Kesehatan sebesar Rp(1.698.605.107,51);
e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(112.012.839,46);
f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp(7.625.014,67);
g) Dinas Pendidikan sebesar Rp(2.485.396.741,93);
h) Dinas Perhubungan sebesar Rp(23.680.647,25);
i) Dinas Perikanan sebesar Rp(178.806.910,76);
j) Inspektorat Daerah sebesar Rp(2.092.708,37);
k) Sekretariat Daerah sebesar Rp(281.245,50);
l) Kecamatan Bayah sebasar Rp(3.359.375,00);
m) Kecamatan Cipanas sebsar Rp(164.583,33);
n) Kevamatan Curugbitung sebesar Rp(1.123.333,33);
o) Kecamatan Lebakgedong sebesar Rp(667.708,33);
p) Kecamatan Maja sebesar Rp(412.500,00);
q) Kecamatan Malingping sebesar Rp(50.000,00);
r) Kecamatan Rangkasbitung sebesar Rp(15.190.000,03);
s) Kecamatan Sobang sebesar Rp(5.146.250,00);
t) Kecamatan Wanasalam sebesar Rp(553.729,99).

2) Koreksi Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp(155.707.909,49) terdiri dari:
   a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp(8.187.499,95);
   b) Dinas Kesehatan sebesar Rp(1.596.600,00);
   c) Sekretariat Daerah sebesar Rp(145.923.809,54).

o. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp8.333.333,33 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan dari Burger Bangor.

4. RK–PPKD

RK-PPKD sebesar Rp0,00

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.117.718.266.048,78 mengalami penurunan sebesar Rp381.088.125.657,36 atau 8,47 jika dibandingkan dengan Ekuitas Akhir pada Tahun 2023 sebesar Rp4.498.806.391.706,13. Nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai Ekuitas pada Neraca.

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasi Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pamerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan baris akrual atas pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kas

Pendapatan dan Belanja secara basis kas dapat terlihat pada Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar atau penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo akhir Kas Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp45.567.307.092,12, mengalami penurunan sebesar Rp28.762.073.060,08 atau 38,70% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp74.329.380.152,20.

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas dengan Kas di Neraca sebesar Rp18.900.000,00 perbedaan tersebut dikarenakan terdapat Kas Di Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp18.900.000,00 sabagai uang Jaminan sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dari penyewa yang di setorkan ke rekening kas bendahara penerimaan sebelum penyewa tersebut menempatinya;

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp167.888.739.911,92 mengalami kenaikan sebesar Rp43.096.802.309,92 atau 34,53% jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp124.791.937.602,00. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.097.209.331.504,92 merupakan kas masuk dari pendapatan daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.924.700.667.833,92 di luar Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.409.175.780,00, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp230.123.765.998,00, pendapatan Dana

Alokasi Khusus Non Fisik Dana BOSP-BOS Reguler sebesar Rp175.157.014.898,00, pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp6.947.500.000,00, Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOSP-BOP PAUD Reguler sebesar Rp18.599.400.000,00, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebesar Rp285.000.000,00, Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOSP-BOP PAUD Kesetaraan Reguler sebesar Rp8.382.300.000,00, DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp225.000.000,00, Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOK-BOK Puskesas sebesar Rp29.547.647.500,00, Dana Desa sebesar Rp356.799.183.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Tahun Anggaran 2024 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp950.000,00, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar Rp96.000,00, Dinas Perikanan sebesar Rp1.200.000,00, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp90.533.000,00, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp776.000,00, penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2023 disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2024 dan tidak dicatat sebagai pendapatan dikarenakan diakui sebagai pendapatan pada Tahun 2023 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp85.391.635,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp103.000,00, dan pembayaran piutang lainnya yang belum dicatat pada Lapran Arus Kas sebesar Rp7.288.788,00;

2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.929.320.591.593,00 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.209.255.340.354,00 dikurangi belanja pegawai dan Barang Jasa BLUD sebesar Rp232.189.320.273,00. Belanja Barang Dan Jasa BOS sebesar Rp143.412.864.911,00, Belanja Operasional Kesehatan Rp29.629.579.061,00, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp11.768.908.166,00, Belanja Hibah BOSP-BOP PAUD sebesar Rp18.884.400.000,00, ditambah Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.659.748.315,00, Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp21.919.382.330,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp123.978.493.005,00.

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 mengalami defisit sebesar Rp188.410.233.319,00. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp48.409.175.780,00 merupakan pencairan Dana Cadangan sebesar Rp47.000.000.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan (hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan Gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan) yang dikelompokan dalam Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.409.175.780;
2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp236.819.409.099,00 merupakan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 sebesar Rp267.154.805.102,00 dikurangi Belanja Modal BOS sebesar Rp26.940.238.760,00 dan Belanja Modal BLUD sebesar Rp6.083.657.243,00, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp2.688.500.000,00.

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp0,00.

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Beban, dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Saldo Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

Rincian saldo akhir Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari penjumlahan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris terdapat penurunan kas sebesar

Rp20.521.493.407,08 kemudian ditambahkan dengan Saldo Awal Kas di BUD/SiLPA LRA Tahun 2023 sebesar Rp49.964.716.165,00 sehingga Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.443.222.757,92;

2. Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabuoaten Lebak Tahun 2024 adalah sebesar Rp45.567.301.235,12 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp Rp29.443.222.757,92, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp93.555.000,00, Kas di BLUD sebesar Rp12.183.369.009,00, Kas di Kas BOS sebesar Rp11.278.386,20.

5.2.2 Piutang

Piutang Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.521.694.506,72, Rincian perolehan Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp 218.319.140,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	117.542.610,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	66.379.079,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(53.494.766,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	130.426.923,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	563.739.005,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(475.846.788,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	218.319.140,00

2. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp257.679.366,21 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	257.969.586,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	407.550.272,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(410.567.092,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	254.952.766,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	8.529.098.482,01
	Pembayaran Piutang	Rp.	(8.526.371.881,80)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	257.679.366,21

3. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp25.555.030,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	22.746.500,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	47.074.286,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(48.439.286,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	21.381.500,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	217.699.431,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(213.525.901,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	25.555.030,00

4. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	2.912.151.575,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(2.912.151.575,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	33.909.913.723,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(33.909.913.723,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

5. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp 9.044.499,91 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	8.944.500,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	118.236.837,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(118.236.837,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	8.944.500,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	525.676.374,91
	Pembayaran Piutang	Rp.	(525.576.375,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	9.044.499,91

6. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp75.722.797,60 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	76.718.639,60

	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	90.868.290,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(114.863.272,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	52.723.657,60
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	755.449.499,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(732.450.359,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	75.722.797,60

7. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	13.830.000,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(13.830.000,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp 3.104.097.748,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	317.010.367,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	2.798.208.541,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(2.870.700.508,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	244.518.400,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	32.924.437.101,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(30.064.857.753,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	3.104.097.748,00

9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar Rp60.831.275.925,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	45.445.996.742,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	853.934.156,00

	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(2.309.704.376,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	43.990.226.522,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	47.029.389.388,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(30.188.339.985,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 202	Rp.	60.831.275.925,00

10. Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	31.492.119.253,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(31.492.119.253,00)
	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

Piutang Retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.483.055.054,00, Rincian perolehan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Piutang Retribusi Jasa Umum

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp789.798.000,00 diperoleh dari:

a	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp	84.309.500,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp	84.309.500,00
b	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	789.798.000,00
	Pembayaran Piutang	Rp	(84.309.500,00)
c	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp	789.798.000,00

b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024 sebesar Rp13.239.719.527,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	11.008.171.700,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(81.200,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	12.082.681.741,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	147.978.304.253,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(146.821.266.467,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	13.239.719.527,00

c. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 sebesar Rp14.555.000,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	16.655.000,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(100.000,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	16.555.000,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	958.932.644,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(960.932.644,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	14.555.000,00

d. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 sebesar Rp26.383.296,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	26.383.296,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	26.383.296,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	0,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(0,00)

c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	26.383.296,00

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha

a. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp299.006.144,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	206.648.750,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	206.648.750,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	1.155.089.406,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(1.062.732.012,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	299.006.144,00

b. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan

Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp84.008.754,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	86.358.754,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(3.846.700,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	82.512.054,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	136.009.355,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(134.512.655,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	84.008.754,00

c. Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp29.584.333,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	44.730.000,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	57.687.666,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	102.417.666,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	521.546.500,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(594.379.833,00)

c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	29.584.333,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.723.382.124,64 dan Rp11.075.387.960,64, terdiri dari:

1. Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tahun 2024 Sebesar Rp971.720,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	971.720,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	0,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(0,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	971.720,00

2. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	0,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperolah pada Tahun 2024	Rp.	(0,00)
	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

3. Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2024 sebesar Rp9.970.164.004,64 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	9.916.484.219,64
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	489.773.467,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(686.093.682,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	9.720.164.004,64
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		

	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	836.233,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(836.233,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024 (	Rp.	9.720.164.004,64

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp3.000,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	3000,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	3000,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	0,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(3000,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024 (a+b)	Rp.	0,00

5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp2.246.400,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	2.246.400,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(0,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	2.246.400,00

5. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023	RSUD (Rp)	Puskesmas (Rp)	Jumlah (Rp)
	Piutang Per 31 Desember 2023	1.074.591.241,00	84.309.500,00	1.158.900.741,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(0,00)	(0,00)	(0,00)

	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	1.074.591.241,00	84.309.500,00	1.158.900.741,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024			
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Piutang	(1.074.591.241,00)	(84.309.500,00)	(1.158.900.741,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	0,00	0,00

Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.097.245.190,00 dan Rp8.816.470.322,00 terdiri dari:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

   Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp2.244.678.840,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	2.844.172.860,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	2.844.172.860,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	30.582.570.930,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(31.182.064.950,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	2.244.678.840,00

2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp1.787.989.500,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	2.203.927.530,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	2.203.927.530,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	27.259.521.600,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(27.675.459.630,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	1.787.989.500,00

3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	3.676.446.582,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	3.676.446.582,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	46.194.761.553,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(49.871.208.135,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024 sebesar Rp64.576.850,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	91.923.350,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	91.923.350,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	754.158.800,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(781.505.300,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	64.576.850,00

5. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok

Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024 sebesar Rp0,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	0,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	0,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	81.715.456.253,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(81.715.456.253,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	0,00

Piutang Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp122.917.520,00 dan Rp4.381.488.000,00. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2024 sebesar Rp122.917.520,00 diperoleh dari:

a.	Mutasi atas Piutang Tahun 2023		
	Piutang Per 31 Desember 2023	Rp.	4.381.488.000,00
	Penambahan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
	Pengurangan Ketetapan Tahun Sebelumnya	Rp.	(0,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum Tahun 2023	Rp.	4.381.488.000,00
b.	Mutasi atas Piutang Tahun 2024		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp.	0,00
	Pembayaran Piutang	Rp.	(4.258.570.480,00)
c.	Piutang Per 31 Desember 2024	Rp.	122.917.520,00

5.2.3 Penyisihan Piutang

Nilai Piutang Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp69.899.184.519,05 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp92.948.294.395,36 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp23.049.109.876,31. Rincian piutang, penyisihan piutang dan nilai bersih piutang dapat dilihat pada tabel 5.108 berikut:

Tabel 5.108
PENYISIHAN PIUTANG DAN NILAI BERSIH PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	JENIS PIUTANG	PIUTANG	PENYISIHAN	*NET REALIZABLE VALUE* (NRV)
1	2	3	4	5
Piutang Pajak Daerah		**64.521.694.506,72**	**16.536.833.910,99**	**47.984.860.595,73**
1.	Pajak Hotel	218.319.140,00	27.314.574,19	191.004.565,81
2.	Pajak Restoran	257.679.366,21	155.729.050,50	101.950.315,71
3.	Pajak Hiburan	25.555.030,00	14.376.617,65	11.178.412,35
4.	Pajak Parkir	9.044.499,91	8.184.950,00	859.549,91
5.	Pajak Air Tanah	75.722.797,60	45.682.495,69	30.040.301,91
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.104.097.748,00	182.754.796,74	2.921.342.951,26
7.	Pajak PBBP2	60.831.275.925,00	16.102.791.426,22	44.728.484.498,78
Piutang Pajak Retribusi Daerah		**14.483.055.054,00**	**691.795.063,19**	**13.791.259.990,81**
1.	Retribusi Pelayanan Parkir	14.555.000,00	14.555.000,00	0,00

PENYISIHAN PIUTANG DAN NILAI BERSIH PIUTANG
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	JENIS PIUTANG	PIUTANG	PENYISIHAN	*NET REALIZABLE VALUE* (NRV)
1	2	3	4	5
	di Tepi Jalan Umum			
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.029.517.527,00	371.534.302,39	13.657.983.224,61
3.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.383.296,00	26.383.296,00	0,00
4.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	299.006.144,00	184.969.194,00	114.036.950,00
5.	Retribusi Penyewaan Bangunan	84.008.754,00	82.519.537,50	1.489.216,50
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.584.333,00	11.833.733,30	17.750.599,70
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**9.723.382.124,64**	**5.677.077.156,18**	**4.046.304.968,46**
1.	Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan	9.720.164.004,64	5.677.061.065,58	4.043.102.939,06
2.	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	971.720,00	4.858,60	966.861,40
3.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	2.246.400,00	11.232,00	2.235.168,00
4.	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		**4.097.245.190,00**	**20.486.225,95**	**4.076.758.964,05**
1.	Bagi Hasil PKB	2.244.678.840,00	11.223.394,20	2.233.455.445,80
2.	Bagi Hasil BBNKB	1.787.989.500,00	8.939.947,50	1.779.049.552,50
3.	Bagi Hasil BBKB	0,00	0,00	0,00
4.	Bagi Hasil Air Permukaan	64.576.850,00	322.884,25	64.253.965,75
Piutang Lainnya		**122.917.520,00**	**122.917.520,00**	**0,00**
1.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	122.917.520,00	122.917.520,00	0,00
JUMLAH		**92.948.294.395,36**	**23.049.109.876,31**	**69.899.184.519,05**

5.2.4 Beban dibayar dimuka

Beban Dibayar Dimuka pemerintah kabupaten lebak pada tahun 2024 sebesar Rp560.716.426,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Dibayar Dimuka Badan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari:
   a. Asuransi kendaraan, dengan nilai kontrak yang sudah terealisasi sebesar Rp394.293.755,60,00. Selama periode berjalan Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memperoleh nilai manfaat sebesar Rp164.289.064,83 sehingga yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp230.004.690,77;
   b. Bangunan negara, dengan nilai kontrak yang sudah terealisasi sebesar Rp96.958.257,00. Selama periode berjalan Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memperoleh nilai manfaat sebesar Rp8.079.854,75 sehingga yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp88.878.402,25.
   c. Jembatan sementara, dengan nilai kontrak sebesar Rp168.000.000,00. Selama periode berjalan Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memperoleh nilai manfaat sebesar Rp0,00 sehingga yang menjadi Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp168.000.000,00.
2. Beban Dibayar Dimuka Badan Pendapatan Daerah berupa sewa gedung dan bangunan yang dipergunakan sebagai kantor UPT I, II dan III dengan nilai kontrak yang sudah terealisasi selama periode 5 Oktober 2023 s.d 4 Oktober 2024 sebesar Rp88.600.000,00. Selama periode berjalan Badan Pendapatan Daerah telah memperoleh nilai manfaat sebesar Rp14.766.666,67 sehingga yang menjadi beban dibayar dimuka sebesar Rp73.833.333,33.

5.2.5 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sebesar Rp2.304.856.112,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.363.503.264,00 pada Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Reklame yang sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp623.967.115,67, sehingga yang menjadi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp739.536.148,33;

2. Realisasi Sewa Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.675.596.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan Sewa Tanah yang sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp281.926.033,33, sehingga yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.347.003.300,00;
3. Realisasi Sewa Gedung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pendapatan Sewa Gedung yang sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.000.000,00, sehingga yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp22.666.666,67;
4. Realisasi Sewa Gedung Bangunan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp193.500.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pendapatan Sewa Gedung Bangunan Fasilitas Umum yang sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.000.000,00, sehingga yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp175.500.000,00;
5. Realisasi Sewa Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Perikanan. Pendapatan Sewa Tanah yang sudah menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.000.000,00, sehingga yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.249.997,00;
6. Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Bangunan tahun 2024 sebesar Rp18.900.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan Uang jaminan penghuni rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Wilayah Kabupaten Lebak tertuang dalam Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828, Staatsblad Nomor 226 Tahun 1828, Staatsblad Nomor 381 Tahun 1925 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini.

Dalam perkembangan selanjutnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka Wilayah Kabupaten Lebak yang semula masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi masuk ke dalam wilayah Provinsi Banten.

Berdasarkan rangkaian sejarah pembentukannya ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan berdasarkan Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828 yang merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) kabupaten di wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah ke dalam (Kewedanaan dan Kecamatan).

Kabupaten Lebak dengan Ibu kotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Pandeglang di sebelah barat. Secara geografi Kabupaten Lebak terletak pada posisi 105º25'-106º30' Bujur Timur dan 6º18'-7º00' Lintang Selatan, dengan luas wilayah daratan 330.507,18 Ha. Sedangkan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak yaitu 73,3 Km² dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km². Bagian utara Kabupaten Lebak berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Lebak memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0-1929 meter di atas permukaan air

laut. Bagian Utara dan Barat Kabupaten Lebak berupa dataran rendah hingga perbukitan bergelombang dan dibagian Selatan merupakan dataran rendah dari pesisir Samudera Hindia. Sedangkan wilayah Timur hingga Tenggara merupakan perbukitan hingga pegunungan yang merupakan bagian Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung yang ada di Kabupaten Lebak antara lain Gunung Halimun, Gunung Kendeng dan Gunung Endut.

Secara administrative Kabupaten Lebak terbagi atas 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibeber dengan luas 40.092 Ha (12,11%) diikuti oleh Kecamatan Cimarga dengan luas 18.711 Ha (5,65%) dan Kecamatan Panggarangan dengan luas 17.699 Ha (5,35%). Sedangkan untuk Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar dengan luas 2.890 Ha (0,87%). Jika dilihat dari kondisi jarak ibu kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung sebagai ibu kota Kabupaten Lebak, Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Cilograng sejauh 160 Km dan Kecamatan paling dekat adalah Kecamatan Rangkasbitung dengan jarak 1 Km.

Di Kabupaten Lebak terdapat Sungai terpanjang di Provinsi Banten yaitu Sungai Ciujung yang mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. Sedangkan sungai yang melintasi Kabupaten Lebak yang bermuara ke Samudera Hindia diantaranya Sungai Cibareo, Sungai Cisawarna, Sungai Cimadur, Sungai Cisiih, Sungai Cimancak, Sungai Cihara, Sungai Cipageran dan Sungai Cilangkahan.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak secara umum didominasi oleh perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan), pertambangan (galian pasir dan batu), Sebagian kecil Kawasan perumahan terutama wilayah Kecamatan Maja dan Rangkasbitung serta Kawasan industry di Kecamatan Rangkasbitung dan Bayah.

Kabupaten Lebak memiliki 170 objek daya tarik wisata (100 wisata alam, 25 wisata budaya, 17 wisata religi dan 28 wisata buatan) dan telah menetapkan enam objek wisata sebagai destinasi pariwisata unggulan atau *Six Fantastic* yang masuk dalam kalender wisata Tahunan nasional yaitu Seren Tahun Kasepuhan Citorek, Kebun Teh Cikuya, Baduy, Pantai Sawarna, Pantai Bagedur dan Museum Multatuli. Selain obyek wisata, Kabupaten Lebak juga memiliki 12 jenis Seni Motif Batik Lebak yang mencerminkan budaya Daerah Lebak yaitu motif SerenTaun,

Sawarna, Sadulur, Caruluk Saruntuy, Rangkasbitung, Leuit Sijimat, Gula Sakojor, Angklung Buhun, Batik Kahuripan Baduy, Pare Sapocong, Lebak Bertauhid dan Kalimaya.

Kabupaten Lebak memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0-1929 meter di atas permukaan air laut. Bagian Utara dan Barat Kabupaten Lebak berupa dataran rendah hingga perbukitan bergelombang dan dibagian Selatan merupakan dataran rendah dari pesisir Samudera Hindia. Sedangkan wilayah Timur hingga Tenggara merupakan perbukitan hingga pegunungan yang merupakan bagian Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung yang ada di Kabupaten Lebak antara lain Gunung Halimun, Gunung Kendeng dan Gunung Endut.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik potensi dan kebutuhan daerah maka ditetapkan Perangkat Daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan urusannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak terdiri dari 2 (Dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 23 (dua puluh tiga) Dinas, 5 (lima) Badan, 1 (satu) RSUD, 28 (dua puluh delapan) Kecamatan, 5 (lima) Kelurahan, 340 (tiga ratus empat puluh) Desa dan 4 (Empat) BUMD.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lebak padaTahun 2024 memiliki PNS sebanyak 12.240 pegawai. Uraian secara terperici PNS berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Eselon dapat dilihat pada tabel–tabel berikut:

Tabel 6.1
PNS KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	SD	67	3	70
2	SLTP	37	2	39
3	SLTA	444	129	573
4	D-1	2	5	7
5	D-II	97	94	191
6	D-III	443	1057	1.500
7	D-IV	35	116	151

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
8	S-1	3.927	4.992	8.919
9	S-2	478	308	786
10	S-3	4	0	4
JUMLAH		**5.534**	**6.706**	**12.240**

Sumber :BKPSDMKab.Lebak

Tabel 6.2
PNS KABUPATEN LEBAK BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2024

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAHP PNS		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
	Pembina Utama Madya	IV/d	3	0	3
	Pembina Utama Muda	IV/c	35	24	59
	PembinaTk.I	IV/b	405	401	806
	Pembina	IV/a	465	433	898
Jumlah GolonganIV			**908**	**858**	**1.766**
2	PenataTk.I	III/d	714	992	1.706
	Penata	III/c	486	560	1.046
	Penata Muda Tk.I	III/b	664	739	1.403
	Penata Muda	III/a	1.924	2.641	4.565
Jumlah Golongan III			**3.788**	**4.932**	**8.720**
3	PengaturTk.I	II/d	161	224	385
	Pengatur	II/c	493	673	1.166
	Pengatur MudaTk.I	II/b	47	8	55
	Pengatur Muda	II/a	72	9	81
Jumlah GolonganII			**773**	**914**	**1.687**
4	Juru Tk.I	I/d	2	0	2
	Juru	I/c	60	2	62
	Juru MudaTk.I	I/b	3	0	3
	Juru Muda	I/a	0	0	0
JumlahGolonganI			**65**	**2**	**67**
JUMLAH			**5.534**	**6.706**	**12.240**

Sumber : BKPSDM Kab.Lebak

Tabel 6.3
DATA ESELON DAN NON ESELON
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II	28	4	32
3	Eselon III	147	36	183
4	Eselon IV	227	83	310
	Jumlah Eselon	402	123	525
	Jabatan Non Eselon			
1	Jabatan Fungsional Umum	859	400	1.259
2	Jabatan Fungsional Tertentu Guru	3.249	4.395	7.644
3	Jabatan Fungsional Tertentu Non Guru	1.024	1.788	2.812
4	Jumlah Non Eselon	5.132	6.583	11.715
	Jumlah Total	**5.534**	**6.706**	**12.240**

Sumber : BKPSDM Kab.Lebak

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus melakukan peningkatan pelayanan perijinan sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan selama Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 33.453 perizinan, terdiri dari:

1. Perizinan yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) RBA/Berbasis Resiko sebanyak 31.540;
2. Perizinan Persetujuan Bangungan Gedung (PBG) diterbitkan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) sebanyak 180
3. Perizinan yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) Kabupaten Lebak sebanyak 1.723;
4. Perizinan yang diterbitkan melalui MPP digital Kabupaten Lebak sebanyak 10.

Dasar Hukum Penerbitan Perizinan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 mengatur Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

Perizinan sudah berbasis risiko dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan meliputi sektor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Informasi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;
2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) atau disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi 16 sektor :
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pertanian;
   c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
   e. Ketenaganukliran;
   f. Perindustrian;
   g. Perdagangan;
   h. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   i. Transportasi;
   j. Kesehatan, Obat, dan Makanan;
   k. Pendidikan dan Kebudayaan;
   l. Pariwisata;

m. Keagamaan;

n. Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi Elektronik;

o. Pertahanan dan Keamanan, dan

p. Ketenagakerjaan (Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 5 Tahun 2021).

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak menerbitkan perizinan sejumlah 33.453 izin dengan rincian sebagai berikut :

1. Perizinan yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sebanyak 31.540 didalamnya terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 25.206;
2. Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan melalui sistem Sistem Infomasi Bangunan Gedung (SIMBG) sebanyak 180; dan
3. Perizinan yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) Kabupaten Lebak sebanyak 1.723.

Rincian penerbitan perizinan selama Thun 2024 dapat dilihat Tabel 6.4 berikut:

Tabel 6.4
PENERBITAN PERIJINAN TAHUN 2024

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Data Penerbitan Nomor Induk Berusaha	17919	
2	Data Penerbitan Izin SPPL OSS RBA	11134	
3	Data Penerbitan Sertifikat Standar OSS RBA	1453	
4	Data Penerbitan Izin PKPLH OSS RBA (Terbit Otomatis)	599	
5	Data Penerbitan Izin PKKPR Darat (Terbit Otomatis)	117	
6	Data Penerbitan Sertifikat Standar izin apotik	29	
7	Data Penerbitan Sertifikat Standar izin Puskesmas	42	
8	Data Penerbitan Sertifikat Izin Klinik	16	
9	Data Penerbitan Sertifikat Izin Parkir	1	
10	Data Penerbitan Izin Reklame	3	
11	Data Penerbitan Izin SLHS	1	
12	Data Penerbitan Izin LPK	3	
13	Data Penerbitan Izin Tanda Daftar Gudang(TDG)	8	
14	Data Penerbitan Izin PKKPR Darat (Terbit Tersertifikasi	17	
15	Data PenerbitanSertifikasi Standar Izin PIRT	198	
JUMLAH IZIN OSS RBA		**31540**	
1	Data Penerbitan Izin PBG	174	
2	Data Penerbitan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)	6	

PENERBITAN PERIJINAN TAHUN 2024

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH IZIN SIMBG		**180**	
1	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratarium Medik (ATLM)	39	
2	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	27	
3	Surat Izin Praktik Tenaga Kebidanan	318	
4	Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan	380	
5	Surat Izin Praktik Apoteker	50	
6	Surat Izin Praktik Dokter Umum	167	
7	Surat Izin Praktik Dokter Umum Mandiri	17	
8	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan	7	
9	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	104	
10	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	55	
11	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	50	
12	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri	5	
13	Surat Izin Praktik Fisioterapi	7	
14	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri	4	
15	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	16	
16	Data Penerbitan Izin PAUD	54	
17	Surat Izin Praktik Dokter Internship	110	
18	Data Penerbitan Izin Trayek	7	
19	Data Penerbitan Izin PKBM	6	
20	Surat Izin Praktik Perawat Mandiri	26	
21	Data Penerbitan Izin SMP	3	
22	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)	2	
23	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri	2	
24	Surat Izin Praktik Elektromedis	5	
25	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIPTTD)	12	
26	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri	4	
27	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	1	
28	Surat Izin Praktik Nutrisionis	21	
29	Data Penerbitan Izin LKP	8	
30	Data Penerbitan Izin SD	3	
31	Surat Izin Praktik Radiografer	10	
32	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	2	
33	Surat Izin Praktik Sanitasi Lingkungan	8	
34	Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	4	
JUMLAH IZIN SIMPONIE		1723	
Data Perizinan di MPP digital		10	
JUMLAH IZIN MPP DIGITAL		10	
JUMH TOTAL IZIN KESELURUHAN		**33453**	

Sumber : DPM Kab. Lebak

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2024 banyak menghasilkan prestasi dengan mendapatkan berbagai penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional. Adapun penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lebak selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut:

Tabel 6.5
PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penghargaan Kabupaten Lebak atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas prestasi sebagai Penilaian Baik dalam Menerapkan Sistem Menit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023
2	Penghargaan Pj. Bupati Lebak pada Top Pembina BUMD Award 2024 atas peran dan kontribusi dalam membina dan mendukung BUMD	Top Business Top BUMD Awards 2023	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas prestasi sebagai Golden Trophy TOP BUMD Award 2023
3	Penghargaan Pemda Kabupaten Lebak atas implementasi komponen *take homepay* dalam penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi PNS terbaik tahun 2023	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas Pemda dengan Implementasi Komponen Take Home Pay dalam penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS terbauk Tahun 2023
4	Penghargaan Nomor: PP/15/PP/02.00/MK/2024 diberikan pada *event* Seba Baduy sebagai 110 *event* terpilih Karisma *Event* Nusantara 2024	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan Seba Baduy Sebagai 120 Event Terpilih Kharisma Event Nusantara Tahun 2024
5	Penghargaan Kabupaten Lebak atas pencapaian terbaik program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023 Kategori Kab/Kota Dengan Pembentukan Tim Koordinasi Kampung KB Tercepat Terbaik I	BKKBN Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	Penghargaan Terbaik 1 program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023
6	Penghargaan Digiwara Awards 2024 atas percepatan digitalisasi daerah kategori kabupaten terbaik ke-2 se-Provinsi Banten	BI Banten	Kabupaten Lebak	terbaik ke-2 Penghargaan Digiwara Awards 2024 atas percepatan digitalisasi daerah i
7	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD T.A. 2023	BPK RI	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan Atas Penilaian BPK RI LKPD Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) T.A 2023
8	Penghargaan Kepala BNN Provinsi Banten Nomor: KEP/090/VI/KA/HM.05/2024/BNNP Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak atas peran aktif pelaksanaan P4GN	BNN Provinsi Banten	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan Kepala BNN Provinsi Banten Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak atas peran aktif pelaksanaan

PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2024			P4GN di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2024
9	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Lebak kategori daerah dengan pengendalian laju inflasi terbaik di Banten	Radar Banten	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Lebak kategori daerah dengan pengendalian laju inflasi terbaik di Banten
10	Penghargaan Pemerintah Daerah sebagai Kategori Madya dalam Pencapaian *Universal Health Coverage*	Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	Bupati Kabupaten Lebak	Penghargaan Pemerintah Daerah sebagai Kategori Madya dalam Pencapaian *Universal Health Coverage*
11	Penghargaan diberikan kepada Bupati Lebak atas dukungan dan pembinaan terhadap 10 desa atau kelurahan binaan sadar hukum, menuju desa atau kelurahan sadar hukum	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Bupati Kabupaten Lebak	Penghargaan atas dukungan dan pembinaan terhadap 10 desa atau kelurahan binaan sadar hukum, menuju desa atau kelurahan sadar hukum
12	Penghargaan Nomor: 100.3.3.3/3657/BPD kepada Pemerintah Kabupaten Lebak atas pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan aset desa dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun 2023	Kementerian Dalam Negeri RI	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan aset desa dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun 2023
13	Penghargaan Nomor: 186/Pgm-HR.03.04/IX/2024 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai tonggak sejarah pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Banten	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan sebagai tonggak sejarah pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Banten
14	Penghargaan kepada Kabupaten Lebak meraih Juara 3 Lomba Video Kreatif Berwisata di Indonesia Kategori Kabupaten/Kota, tema *event* daerah	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Kabupaten Lebak	Penghargaan kepada Kabupaten Lebak meraih Juara 3 Lomba Video Kreatif Berwisata di Indonesia Kategori Kabupaten/Kota
15	Penghargaan Nomor: PP/72/PP.02.00/MK/2024 diberikan kepada Festival Seni Multatuli sebagai 110 *event* terpilih Karisma *Event* Nusantara 2024	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Festival Seni Multatuli	Penghargaan diberikan kepada Festival Seni Multatuli sebagai 110 *event* terpilih Karisma *Event* Nusantara 2024
16	Penghargaan Nomor: 2158.207/KPG.02.06/2024 dan Lencana diberikan kepada Gunawan Rusminto, A.P., M.Si., Pj. Bupati Lebak atas komitmen dan dedikasi dalam membina desa wisata sehingga Desa Sawarna menjadi Juara 1 Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2024 Kategori Sangat Tertinggal/Tertinggal/Berkembang	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI	Gunawan Rusminto, A.P., M.Si.	Penghargaan Juara 1 Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2024 Kategori Sangat Tertinggal/Berkembang

PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17	Penghargaan Nomor: 279 Tahun 2024 diberikan kepada Kabupaten Lebak kategori Dukungan Pimpinan Daerah Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2024 Atas Kinerja Tahun 2023	Gubernur Banten	Kabupaten Lebak	Penghargaan kategori Dukungan Pimpinan Daerah Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2024 Atas Kinerja Tahun 2023
18	Penghargaan Nomor: 347 Tahun 2024 dan Lencana dberikan kepada Gunawan Rusminto, A.P., M.Si., Pj. Bupati Lebak sebagai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024	Gubernur Banten	Gunawan Rusminto, A.P., M.Si	sebagai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024
19	Penghargaan berdasarkan SK Kepala BIG No. 167.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bhumandala Tahun 2024 atas keikutsertaannya dalam rangka Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi dengan predikat "KANAKA" (Medali Emas)	Badan Informasi Geospasial	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penetapan Penerima Penghargaan Bhumandala Tahun 2024 atas keikutsertaannya dalam rangka Penghargaan Bhumandala Nama Rupabumi dengan predikat "KANAKA" (Medali Emas)
20	Penghargaan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 387 Tahun 2024 diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Lebak sebagai daerah Kategori Green Industri	Gubernur Banten	Kabupaten Lebak	Penghargaan diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Lebak sebagai daerah Kategori Green Industri
21	Penghargaan diberikan kepada Museum Multatuli sebagai Nomine Anugerah Purwakalagrha Indonesia Museum Award 2024 kategori "Museum Komunikatif	Komunitas Jelajah	Museum Multatuli	Penghargaan diberikan kepada Museum Multatuli sebagai Nomine Anugerah Purwakalagrha Indonesia Museum Award 2024 kategori "Museum Komunikatif
22	Penghargaan diberikan kepada Bapelitbangda Kabupaten Lebak sebagai Juara 3 Banten SDGs Award 2024 kategori pemerintah kabupaten/kota atas program pengembangan Geopark Bayah Dome	Pemprov Banten	Bapelitbangda Kabupaten Lebak	sebagai Juara 3 Banten SDGs Award 2024 kategori pemerintah kabupaten/kota atas program pengembangan Geopark Bayah Dome
23	Penghargaan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) tahun 2024 dengan nilai 94,65 (Zona Hijau) / Kualitas Tertinggi	Ombudsman RI	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) tahun 2024

PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
24	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Lebak atas dukungan kepada Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Layanan Hukum yang Inklusif	Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan Pemerintah Kabupaten Lebak atas dukungan kepada Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Layanan Hukum yang Inklusif
25	Penghargaan Nomor: 009/Kep/KI-BANTEN/XII/2024 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai Badan Publik "Informatif" Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Provinsi Banten	Pemerintah Kabupaten Lebak	sebagai Badan Publik "Informatif" Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
26	Penghargaan Nomor KEP-123/WPB.11/2024 atas prestasi sebagai Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Realisasi Dana Desa Tercepat Tahun 2024	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas prestasi sebagai Peringkat Kedua Pemerintah Daerah dengan Realisasi Dana Desa Tercepat Tahun 2024
27	Penghargaan diberikan kepada H. Gunawan Rusminto, A.P.,.M.Si. sebagai *The Best Performance Leaderhsip* Kategori:Kepala Daerah Inspiratif	PT. Tangerang Pos Media Utama	Gunawan Rusminto, A.P., M.Si	Penghargaan sebagai *The Best Performance Leaderhsip* Kategori:Kepala Daerah Inspiratif
28	Penghargaan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 477 Tahun 2024 kepada Kabupaten Lebak sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Predikat "Sangat Baik" Tingkat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024	Gubernur Banten	Kabupaten Lebak	Penghargaan sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Predikat "Sangat Baik" Tingkat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024
29	Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atas pemberian Bantuan Biaya Operasional Siswa, Insentif Guru dan Sarana Prasarana pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Se-Kabupaten Lebak	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten	Pemerintah Kabupaten Lebak	Penghargaan atas pemberian Bantuan Biaya Operasional Siswa, Insentif Guru dan Sarana Prasarana pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Se-Kabupaten Lebak

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lebak

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Selain mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang telah dicapai terdapat juga beberapa permasalahan hukum Sengketa perdata yang perkaranya ada yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi, gugatan tidak diterima dan persidangan belum sampai pada putusan, masih berjalan. Permasalahan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2024 seperti terlihat padaTabel 6.6 berikut:

Tabel 6.6
PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Nomor Perkara : 17/Pdt.G/2022/ PN.Rkb	Gugatan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2023/PN.Rkb dengan obyek gugatannya yaitu Perbuatan Melawan Hukum dimana Bai Wirnasari Sebagai Penggugat Melawan; Roni efendi Bin H. Wiratna (Ahli Waris Alm Toni) Selanjutanya disebut sebagai.....Tergugat 1 1. Samanan selanjutnya 2. disebut sebagai.....Tergugat II; 3. H. IIP Zainal selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III 4. Sarno selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat !V 5. Kantaor Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lebak sebagai.....Turut Tergugat I 6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebagai.....Turut Tergugat II	Persidangan pertama yang dimulai pada tanggal 13 September 2023 dan putusan di bulan Februari 2024	Putusan persidangan pada tanggal 28 Februari 2024 dengan putusan menolak gugatan penggugat
2	Nomor Perkara : 18/Pdt.G/2023/ PN.Rkb	Gugatan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN. ,Rkb, dengan obyek gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum Umihani Binti Ahland kk (6 orang) sebagai Penggugat melawan ; 5. Idrus selanjutnya disebut sebagai Tergugat I 6. Adnani Bin Idrus selanjutnya disebut sebagai…….Tergugat II 7. Mamat Pejabat ex Officio Kepala Desa Pasir Tangkil selanjutnya disebut sebagai….Tergugat III 8. Kepala Desa Pasir Tankil selanjutnya disebut sebagai……Turut Tergugat II 9. Apipudin Pejabat ex Officio Kepala Desa Pasir Tangkil selanjutnya disebut sebagai…..Turut Tergugat II 10. Camat Warunggunung sebagai…..Turut Tergugat III 11. Kantor Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lebak sebagai…..Turut Tergugat IV 12. Edi Suhendi…….. Turut Tergugat V	Persidangan pertama yang dimulai pada tanggal 18 September 2023 dan putusan di bulan Januari	Putusan tanggal 10 Januari 2024 dengan Putusan Menolak gugatan penggugat

PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		13. PT Doharaja Medika……Turut Tergugat .Turut Tergugat IV 14. Burhanudin SH. Mkn…..Turut Tergugat VII 15. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sebagai….Turut Tergugat VIII		
3.	Register Nomor : 102/IX/KI BANTEN-PS/2023	Gugatan Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan register nomor 102/IX/KI Banten-PS/2023 antara Anggi Kurniadi sebagai Pemohon Terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagai Termohon Permohonan Informasi yang diminta yaitu salinan dokumen kontrak Belanja Modal Alat Pendingin Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBD dengan kode RUP 32300953	Persidangan pertama yang dimulai tanggal 14 Agustus 2024 dan langsung dibacakan amar Putusan	Amar putusan Tanggal 14 Agustus 2024 dengan putusan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon
4	Nomor Perkara : 125/IX/KI BANTEN-PS/2024	: Gugatan Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten perihal Permohonan Informasi dengan register nomor 125/IX/KI BANTEN-PS/2024 antara Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten sebagai Pemohon terhadap PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak sebagai Termohon	Pemohon melalui surat tertulis tanggal 16 Oktober 2024 yang ditunjukan Kepada Ketua KIP Banten perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik dalam perkara register nomor 125/IX/KI BANTEN-PS/2024 denga alas an Legal Standing termohon diatas waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tidak Terpenuhi	Menetapkan: 1. Menerima pencabutan dari Pemohon; 2. Menetapkan Pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Pemohon 3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 125/IX/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.
5.	Nomor Perkara : 125/IX/KI BANTEN-PS/2024 Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2024/ PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Kepemilikan Sertifikat Tanah Hak	Persidangan pertama yang dimulai pada tanggal 23 Desember 2024 dan sampai dengan akhir tahun 2024 masih berperoses	……

PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Milik atan nama Masyarakat seluas -_+ 856,25 M yang berlokasi di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak, yaitu perbuatan melawan hukum dimana siti yuyu Masyuroh (Penggugat I) dan Syaipullah Matin (Penggugat II) melawan : 1. Bupati Kabupaten Lebak Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**; 2. Kepala BKAD Kabupaten lebak selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**; 3. Samanan selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III**; 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV**; 5. Kantor Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lebak sebagai……**Turut Tergugat I**;		
6.	Nomor Perkara : 34/Pdt.G/2024/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2024/ PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu SPPT-PBB Nomor 36.02.130.008.009.01 520.0, atasnama J. Zulfikar (Penggugat) seluas 26.400. M2 Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, akan tetapi Penggugat tidak memiliki Tanah seluas 26.400 M2 di Desa Sukajaya, bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor : 4331/1981 tanggal 17 September 1981 seluas 26.400 M2 tercatat dan tertulis Nama Abdul Rachman Bin H. Muhamad Harun terletak di Kp. Pasir Luhur Rt.2/04 Desa Sukarame. Dengan Demikian Dinas Pendapatan Kabupaten Lebak, adanya kekeliruan dalam menerbitkan SPPT-PBB, tuntutannnya agar memperbaiki Nomor dan Letak Objek Pajak atas nama a quo Perbuatan melawan hukum atas nama Rachmiyati Binti		

PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Nomor Perkara : 18/Pdt.G/2023/ PN.Rkb	Abdurachmn Harun dkk (PI-7) melawan: 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat V**;		

Sumber: Bagian Hukum Setda Lebak

Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyaratat Kabupaten Lebak selama Tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel 6.7 berikut:

Tabel 6.7
REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Nomor Perkara : 27/Pid.B/2024/ PN.Rks Tindak Pidana Pengadilan Negeri	SUDENDI Als DENDI Bin SAYUTI (Alm), dengan putusannya: Menyatakan terdakwa Sudendi Als Dendi Bin Sayuti (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang di lakukan beberapa kali sebagaimana dalam (waan primair);	Menjatuhkan pidana kepada tetdakwa Sudendi Als Dendi Bin Sayuti (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;	Putusan persidangan pada tanggal 18 Maret 2024.
2.	Nomor Perkara : 04/Pid.B/2024/ PN.Rks Tindak Pidana Pengadilan Negeri	ANGGA ARDIANSYAH Als ANGGA Bin ANDRI dengan Putusannya: Menyatakan terdakwa Angga Ardiansyah Als Angga Bin Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencunan dalam keadaan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.	Putusan persidangan pada tanggal 5 Februari 2024.

REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		memberatkan yang di lakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;		
3.	Nomor Perkara : 23/Pid.B/2024/ PN.Rks Tindak Pidana Pengadilan Negeri	SALAMU Bin SANIP (Alm) dengan Putusannya: Menyatakan terdakwa Salamu Als Buyung Bin Sanip (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.	Putusan persidangan pada tanggal 19 Februari 2024.
4.	Nomor Perkara : 20/Pen.Pid/PH/2024/PN.RI	ANDA JUNAEDI Bin Maryadi dengan putusannya; Menyatakan terdakwa II Anda Junaedi Bin Maryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membelanjakan rupiah yang di ketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;	Putusan persidangan pada tanggal 20 Mei 2024
5.	Nomor Perkara : 13/Pdt.G/2023/ PN.Rkb	MAHDI, SATIBI, UJANG, DAN OMIK dengan putusannya: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;	Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari di tetapkan sejumlah Rp. 10.113.000,00 (sepuluh juta seratus tiga belas ribu rupiah);	Putusan persidangan pada tanggal 11 Juni 2024
6.	Nomor Perkara : 57/Pid.B/2024/ PN.Rkb	MUHDIN Bin H. SUPATMA dengan putusannya: Menyatakan terdakwa Muhdin Bin H. Supatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhdin Bin H. Supatma dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;	Putusan persidangan pada tanggal 22 Mei 2024

REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		sebagaimana dalam dakwaan tunggal;		
7.	Nomor Perkara : 56/Pid.B/2024/ PN.Rkb	DARIAH Binti DARSA dengan putusannya: Menyatakan terdakwa I Dariah Binti Darsa (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Sana Bin Mukra Muhdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Dariah Binti Darsa (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Sana Bin Mukra telah dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;	Putusan persidangan pada tanggal 20 Juni 2024
8.	Nomor Perkara : 7/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Rkb	M. RIJAL ZIBRAN SAPUTRA Als ZIBRAN Bin KAMSAIH dengan putusannya: Menyatakan Anak M. Rijal Zibran Saputra Als Zibran Bin Kamsaih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagimana dalam dakwaan alternative kesatu';	Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;	Putusan persidangan pada tanggal 16 Agustus 2024
9.	Nomor Perkara : 8/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Rkb	RAFLIE SYAHFAEL PUTRA Bin MUHAMAD AMING dengan putusannya: Menyatakan Anak Raflie Syahfael Putra Bin Muhamad Aming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul";	Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pengawasan dengan syarat-syarat sebagai berikut; a. Syarat Umum yaitu Anak di jatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim, bahwa Anak dinyatakan bersalah	Putusan persidangan pada tanggal 24 September 2024

REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; b. Syarat Khusus yaitu agar Anak melaksanakan wajib lapor diri kepada Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada penuntut umum selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, serta dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan; Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Lapas Serang selama 3 (tiga) Bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam	

REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;	
10.	Nomor Perkara : 132/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Rkb	RIAN Bin HENDAR dengan putusannya: Menyatakan terdakwa Rian Bin Muhamad Aming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Membebankan kepada terdakwa Rian Bin Hendar untuk membayar restitusi kepada Anak korban MIRNAWATI sejumlah Rp.40.268.000,00 (empat puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng sesuai Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.4318.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 21 Oktober 2024, yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika Para Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Para Terpidana dan	

REKAPITULASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024

NO	REGISTER PERKARA/ JENIS PERMASALAHAN HUKUM	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda maka dikenakan pidana kurungan pengganti masing-masing selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.	

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Manfaatnya meliputi berbagi sumber daya, pengalaman, dan pemecahan masalah bersama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Lebak. Kerjasama selama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.8 berikut:

Tabel 6.8
REKAPITULASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN MITRA KERJA SAMA TAHUN 2024

NO	NO.REG PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL	TENTANG	JANGKA WAKTU	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7
1	102/PKS.01/DISBUDPAR/TPKS/2024	29 Januari 2024	Pengembangan pembinaan & pendampingan program pengabdian kepada masyarakat	3 Tahun	Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana	DISBUDPAR Kab. Lebak
2	102/PKS.02/DISBUDPAR/TPKS/2024	29 Januari 2024	Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	3 Tahun	Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta	DISBUDPAR Kab. Lebak
3	102/PKS.03/BKPSDM/TPKS/2024	1 Februari 2024	Replikasi Sistem Aplikasi SIMASN dan Sistem Merit	3 Tahun	BKPSDM Kota Tangerang	BKPSDM Kabupaten Lebak

REKAPITULASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN MITRA KERJA SAMA TAHUN 2024

NO	NO.REG PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL	TENTANG	JANGKA WAKTU	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7
4	102/PKS.04/DISDIK/TPKS/2024	8 Maret 2024	Program Bantuan Pendidikan untuk Sekolah di Kabupaten Lebak	5 Tahun	PT. Astra Internasional Tbk & Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim	Dinas Pendidikan
5	102/PKS.05/TPKS/2024	20 Mei 2024	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan peraturan daerah Kab. Lebak tentang penataan wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebak	1 Tahun	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama (TPKS) Setda Lebak	UNPAD
6	102/PKS.06/SATPOLPP/TPKS/2024	11 Juli 2024	Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lainnya di Wilayah Perbatasan antara KAB. Sukabumi Prov. Jawa Barat dan Kab. Lebak Prov. Banten	3 Tahun	Satpol PP Kab. Lebak	Satpol PP Kab. Sukabumi
7	102/PKS.07/BAPPELITBANGDA/TPKS/2024	24 Juli 2024	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi	2 Tahun	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPELITBANGDA Kab. Lebak
8	102/PKS.08/NDA/BAP/BAPPELITBANGDA/TPKS/2024	24 Juli 2024	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Perjanjian Kerahasiaan)	2 Tahun	Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPELITBANGDA Kab. Lebak
9	102/PKS.09/RSUD dr.Adjidarmo/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	RSUD dr. Adjidarmo	Kejaksaan Negeri Lebak
10	102/PKS.10/DPUPR/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DPUPR	Kejaksaan Negeri Lebak
11	102/PKS.11/BKAD/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	BKAD	Kejaksaan Negeri Lebak
12	102/PKS.12/DISPERINDAG/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISPERINDAG	Kejaksaan Negeri Lebak

REKAPITULASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN MITRA KERJA SAMA TAHUN 2024

NO	NO.REG PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL	TENTANG	JANGKA WAKTU	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7
13	102/PKS.13/DINKES/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DINKES	Kejaksaan Negeri Lebak
14	102/PKS.14/DPMPTSP/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DPMPTSP	Kejaksaan Negeri Lebak
15	102/PKS.15/DISKOMINFO/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISKOMINFO	Kejaksaan Negeri Lebak
16	102/PKS.16/DISTAN/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISTAN	Kejaksaan Negeri Lebak
17	102/PKS.17/DINSOS/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DINSOS	Kejaksaan Negeri Lebak
18	102/PKS.18/DLH/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DLH	Kejaksaan Negeri Lebak
19	102/PKS.19/BPBD/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	BPBD	Kejaksaan Negeri Lebak
20	102/PKS.20/BKPSDM /TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	BKPSDM	Kejaksaan Negeri Lebak
21	102/PKS.21/DPRKPP/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DPRKPP	Kejaksaan Negeri Lebak
22	102/PKS.22/DINDIK/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DINDIK	Kejaksaan Negeri Lebak

REKAPITULASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN MITRA KERJA SAMA TAHUN 2024

NO	NO.REG PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL	TENTANG	JANGKA WAKTU	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7
23	102/PKS.23/DISPORA /TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISPORA	Kejaksaan Negeri Lebak
24	102/PKS.24/DISNAKER/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISNAKER	Kejaksaan Negeri Lebak
25	102/PKS.25/DISPUSAR/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISPUSAR	Kejaksaan Negeri Lebak
26	102/PKS.26/DISBUDPAR/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISBUDPAR	Kejaksaan Negeri Lebak
27	102/PKS.27/DINKOP UMKM/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DINKOP UMKM	Kejaksaan Negeri Lebak
28	102/PKS.28/DISNAKESWAN/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISNAKESWAN	Kejaksaan Negeri Lebak
29	102/PKS.29/INSPEKTORAT/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	INSPEKTORAT	Kejaksaan Negeri Lebak
30	102/PKS.30/DISHUB/ TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DISHUB	Kejaksaan Negeri Lebak
31	102/PKS.31/DPMD/TPKS/2024	7 Agustus 2024	Koordinasi dan Pendampingan Masalah Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun	DPMD	Kejaksaan Negeri Lebak
32	102/PKS.32/BAPENDA/TPKS/2024	8 Agustus 2024	Layanan Penerimaan pembayaran pajak daerah di kabupaten lebak	2 Tahun	BAPENDA	PT. POS

REKAPITULASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN MITRA KERJA SAMA TAHUN 2024

NO	NO.REG PERJANJIAN KERJASAMA	TANGGAL	TENTANG	JANGKA WAKTU	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7
33	102/PKS.33/BAPENDA/TPKS/2024	29 Agustus 2024	Integrasi dan pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	4 Tahun	BAPENDA	BPN
34	102/PKS.34/DISDUKCAPIL/TPKS/2024	3 Oktober 2024	Replikasi Inovasi Salam 3-O (Sistem Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Secara Online, Offline Dan Ojol)	5 Tahun	DISDUKCAPIL Kab. Lebak	DISDUKCAPIL Kota Tangerang Selatan
35	102/PKS.35/DPMPTSP/TPKS/2024	22 Oktober 2024	Penyelenggaraan pelayanan publik dalam Mall Pelayanan Publik Kab. Lebak	2 Tahun	DPMPTSP	Taspen
36	102/PKS.36/PEMKAB/TPKS/2024	28-Nov-24	Optimalisasi pemungutan pajak dan energi pemungutan opsen	5 Tahun	Pemprov Banten	Pemda Kab. Lebak
37	102/PKS.37/BKAD/TPKS/2024	31 Desember 2024	Penyimpanan dan pengelolaan KAS Daerah	1 Tahun	BKAD	PT. Bank Banten

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menyediakan informasi mengenai kebijakan, asumsi, prinsip akuntansi yang digunakan, posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dan mengungkapkan penjelasan secara keseluruhan dan memberikan informasi yang lengkap, handal dan relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2024 kepada pemangku kepentingan (stakeholder),

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 merupakan hasil dari konsolidasi 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah, 43 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 4 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.924.700.667.833,92 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp 2.977.907.290.281,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp2.997.766.952.106,00 atau 96,81% dari anggaran sebesar Rp3.096.519.744.303,00. Dengan demikian terdapat Defisit antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp73.066.284.272,08. Selain itu, realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp118.633.591.364,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp45.567.307.091,92;

2. Saldo Anggaran Lebih pada awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp74.300.954.022,00, Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiyaan Tahun Berjalan sebesar Rp74.322.091.364,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp45.567.307.091,92, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp21.137.342,00, dan Saldo Anggaran Lebih pada akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.567.307.091,92;
3. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp2.987.000.605.606,03, Beban sebesar Rp3.141.331.613.785,67, Defisit Dari Operasi sebesar Rp154.331.008.179,64, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.456.172.013,24, Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp5.982.292.050,68, Jumlah Defisit Non dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 4.526.120.037,44 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga Defisit sebesar Rp158.857.128.217,08;
4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp4.498.806.391.706,13, Defisit-LO sebesar Rp158.857.128.217,08, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp222.230.997.440,28 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp4.117.718.266.048,78;
5. Neraca Pemerintah Kabupaten Lebak 31 Desember 2024 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp4.164.119.904.404,83, Kewajiban sebesar Rp46.401.638.356,05, dan Ekuitas sebesar Rp4.117.718.266.048,78; dan
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp167.888.739.911,92, Aktivitas Investasi sebesar Rp(188.410.233.319,00), Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00, dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00, sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode Tahun 2024 sebesar Rp20.521.493.407,08, total saldo awal Kas sebesar Rp49.964.716.165,00, Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp93.555.000,00, Saldo Akhir Kas di Kas BLUD sebesar Rp12.183.369.009,00, Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp3.835.881.939,00, Saldo Akhir Kas di Kas bos sebesar Rp11.278.386,20, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar

Rp45.567.307.092,12.

Kendala dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Langkah perbaikan yang berkelanjutan. Berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2024 akan dijadikan sebagai motivasi dan penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program pembangunan, sinergitas dan kesinambungan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja dan mengetahui Tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan untuk mencapai mewujudkan *Good Governance* and *Clean Government.*

BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAMPIRAN I

"IKHTISAR LAPORAN REALISASI KEUANGAN DESA AKHIR TAHUN"

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
IKHTISAR LAPORAN REALISASI KEUANGAN DESA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	1,356,613,004	1,369,992,129	- 13,379,125	32,326,574	18,947,449	3,272,560,000		3,272,560,000	
2	MALINGPING	PAGELARAN	1,652,332,298	1,644,039,920	8,292,378	40,338,612	48,630,990	5,076,912,852		5,076,912,852	
3	MALINGPING	SUKARAJA	1,483,388,560	1,469,326,006	14,062,554	41,554,357	55,616,911	4,521,634,734		4,521,634,734	
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	1,374,377,699	1,396,677,852	- 22,300,153	76,583,505	54,283,352	3,919,978,654		3,919,978,654	
5	MALINGPING	BOLANG	1,606,528,705	1,605,205,656	1,323,049	45,829,816	47,152,865	4,953,255,575		4,953,255,575	
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	1,766,385,960	1,802,680,540	- 36,294,580	61,864,004	25,569,424	5,321,288,406		5,321,288,406	
7	MALINGPING	RAHONG	1,537,577,738	1,478,905,890	58,671,848	59,460,103	118,131,951	4,744,662,213		4,744,662,213	
8	MALINGPING	KADUJAJAR	1,635,847,958	1,642,291,093	- 6,443,135	69,900,297	63,457,162	4,231,317,931		4,231,317,931	
9	MALINGPING	KERSARATU	1,838,685,609	1,821,516,700	17,168,909	47,685,242	64,854,151	5,200,999,893		5,200,999,893	
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	1,538,401,614	1,564,822,050	- 26,420,436	81,283,267	54,862,831	3,518,174,621		3,518,174,621	
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	1,828,601,962	1,792,956,262	35,645,700	41,675,578	77,321,278	5,309,553,780		5,309,553,780	
12	MALINGPING	SUKAMANAH	1,633,184,814	1,626,608,909	6,575,905	14,052,159	20,628,064	4,363,092,324		4,363,092,324	
13	MALINGPING	SENANGHATI	1,502,962,994	1,469,222,676	33,740,318	22,019,156	55,759,474	4,063,940,563		4,063,940,563	
14	MALINGPING	SANGIANG	1,662,802,275	1,634,868,745	27,933,530	28,245,538	56,179,068	4,994,863,406		4,994,863,406	
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	1,928,110,433	1,926,368,857	1,741,576	1,963,723	3,705,299	3,700,240,170		3,700,240,170	
16	PANGGARANGAN	JATAKE	1,446,579,575	1,453,735,367	- 7,155,792	16,051,306	8,895,514	3,648,832,653		3,648,832,653	
17	PANGGARANGAN	SOGONG	1,408,549,611	1,409,271,329	- 721,718	9,920,496	9,198,778	5,282,634,600		5,282,634,600	
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	1,681,799,605	1,678,592,037	3,207,568	4,828,592	8,036,160	3,961,659,200		3,961,659,200	
19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	1,736,821,518	1,718,001,217	18,820,301	1,201,421	20,021,722	3,856,392,188		3,856,392,188	
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	1,809,982,411	1,849,377,222	- 39,394,811	50,815,484	11,420,673	4,860,728,485		4,860,728,485	
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	1,680,253,366	1,725,996,844	- 45,743,478	65,801,435	20,057,957	5,249,829,777		5,249,829,777	
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	1,474,980,978	1,491,291,960	- 16,310,982	33,436,128	17,125,146	7,015,058,980		7,015,058,980	
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	1,278,239,297	1,278,138,621	100,676	15,378,329	15,479,005	4,704,757,998		4,704,757,998	
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	1,476,183,977	1,462,969,045	13,214,932	2,889,408	16,104,340	3,990,335,032		3,990,335,032	
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	1,539,884,024	1,540,387,361	- 503,337	44,918,560	44,415,223	5,201,459,125		5,201,459,125	
26	BAYAH	BAYAH BARAT	1,774,028,451	1,791,680,815	- 17,652,364	58,985,252	41,332,888	3,493,174,686		3,493,174,686	
27	BAYAH	SAWARNA	1,781,435,224	1,794,666,310	- 13,231,086	33,642,698	20,411,612	3,524,698,518		3,524,698,518	
28	BAYAH	CIDIKIT	1,613,943,381	1,609,477,482	4,465,899	2,704,003	7,169,902	5,168,621,765		5,168,621,765	
29	BAYAH	SUWAKAN	1,460,895,052	1,458,934,095	1,960,957	7,282,656	9,243,613	3,512,151,519		3,512,151,519	
30	BAYAH	CIMANCAK	1,404,116,670	1,407,329,905	- 3,213,235	15,999,961	12,786,726	3,807,620,875		3,807,620,875	
31	BAYAH	DARMASARI	1,552,666,693	1,550,024,888	2,641,805	6,875,463	9,517,268	3,286,853,308		3,286,853,308	
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	1,759,441,547	1,763,356,178	- 3,914,631	6,609,034	2,694,403	3,860,333,848		3,860,333,848	
33	BAYAH	CISUREN	1,394,417,621	1,437,973,287	- 43,555,666	55,241,399	11,685,733	4,262,499,058		4,262,499,058	
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	1,284,587,772	1,286,628,299	- 2,040,527	16,989,011	14,948,484	3,700,653,177		3,700,653,177	
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	1,337,649,685	1,336,853,472	796,213	6,594,273	7,390,486	4,135,289,844		4,135,289,844	
36	BAYAH	PAMUBULAN	1,956,772,924	1,958,881,894	- 2,108,970	6,057,238	3,948,268	4,616,524,139		4,616,524,139	
37	CIPANAS	CIPANAS	1,788,335,981	1,787,206,438	1,129,543	10,667,647	11,797,190	4,920,520,963		4,920,520,963	
38	CIPANAS	GIRILAYA	1,938,481,250	1,936,783,785	1,697,465	14,340,226	16,037,691	5,376,590,213		5,376,590,213	
39	CIPANAS	MALANGSARI	1,647,894,359	1,581,383,412	66,510,947	14,515,494	81,026,441	3,056,584,012		3,056,584,012	
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	1,554,015,676	1,572,798,799	- 18,783,123	23,112,008	4,328,885	3,878,430,041		3,878,430,041	
41	CIPANAS	TALAGAHIYANG	1,393,958,718	1,398,001,412	- 4,042,694	5,983,009	1,940,315	3,079,993,009		3,079,993,009	
42	CIPANAS	LUHURJAYA	1,719,224,925	1,716,596,438	2,628,487	1,079,992	3,708,479	4,565,871,300		4,565,871,300	
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	1,401,511,312	1,412,839,723	- 11,328,411	15,651,240	4,322,829	4,463,369,000		4,463,369,000	
44	CIPANAS	GIRIHARJA	1,522,431,656	1,529,396,098	- 6,964,442	7,349,054	384,612	3,493,100,804		3,493,100,804	
45	CIPANAS	SUKASARI	1,522,537,540	1,557,907,741	- 35,370,201	38,329,029	2,958,828	4,963,307,069		4,963,307,069	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
46	CIPANAS	JAYAPURA	1.723.279.509	1.722.969.470	310.039	6.952.031	7.262.070	4.473.677.727		4.473.677.727	
47	CIPANAS	SIPAYUNG	1.628.847.917	1.610.457.377	18.390.540	11.279.811	29.670.351	4.548.311.142		4.548.311.142	
48	CIPANAS	BINTANGSARI	1.282.475.093	1.299.513.198	- 17.038.105	49.904.624	32.866.519	3.162.872.579		3.162.872.579	
49	CIPANAS	PASIRHAUR	1.486.362.933	1.490.353.510	- 3.990.577	10.564.101	6.573.524	6.011.341.269		6.011.341.269	
50	CIPANAS	HARUMSARI	1.511.181.954	1.516.935.136	- 5.753.182	14.374.353	8.621.171	4.089.385.800		4.089.385.800	
51	MUNCANG	PASIREURIH	1.451.391.738	1.471.682.198	- 20.290.460	21.587.863	1.297.403	4.250.364.455		4.250.364.455	
52	MUNCANG	CIMINYAK	1.415.786.914	1.398.421.730	17.365.184	3.830.009	21.195.193	4.722.997.952		4.722.997.952	
53	MUNCANG	MUNCANG	1.566.996.014	1.585.238.008	- 18.241.994	38.138.574	19.896.580	6.234.031.133		6.234.031.133	
54	MUNCANG	LEUWICOO	1.618.225.980	1.585.433.453	32.792.527	8.297.906	41.090.433	5.058.500.476		5.058.500.476	
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	1.526.624.277	1.527.743.642	- 1.119.365	8.683.270	7.563.905	3.435.034.425		3.435.034.425	
56	MUNCANG	CIKARANG	1.783.036.125	1.790.973.480	- 7.937.355	13.599.893	5.662.538	5.196.943.395		5.196.943.395	
57	MUNCANG	SUKANAGARA	1.636.946.843	1.698.571.819	- 61.624.976	66.058.375	4.433.399	3.992.358.823		3.992.358.823	
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	1.681.989.081	1.667.553.872	14.435.209	19.879.261	34.314.470	5.191.995.707		5.191.995.707	
59	MUNCANG	JAGARAKSA	1.492.915.748	1.490.362.544	2.553.204	6.368.387	8.921.591	3.613.159.166		3.613.159.166	
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	1.897.150.788	1.891.132.624	6.018.164	31.215.100	37.233.264	4.339.952.926		4.339.952.926	
61	MUNCANG	MEKARWANGI	1.547.084.965	1.565.133.704	- 18.048.739	67.825.532	49.776.793	3.868.686.659		3.868.686.659	
62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	1.625.573.075	1.650.130.777	- 24.557.702	50.378.520	25.820.818	4.296.131.491		4.296.131.491	
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	306.507.320	218.913.400	87.593.920	-	87.593.920	2.324.407.389		2.324.407.389	
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	2.051.657.595	2.055.350.246	- 3.692.651	6.336.671	2.644.020	5.180.852.068		5.180.852.068	
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	1.742.827.207	1.764.007.405	- 21.180.198	29.462.350	8.282.152	4.763.907.200		4.763.907.200	
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	2.091.146.965	1.976.315.490	114.831.475	- 94.971.942	19.859.533	5.930.140.455		5.930.140.455	
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHIANG	1.598.133.750	1.601.892.700	- 3.758.950	7.370.880	3.611.930	4.968.601.121		4.968.601.121	
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	1.714.752.814	1.718.088.800	- 3.335.986	6.401.156	3.065.170	6.416.097.936		6.416.097.936	
69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	2.085.599.472	2.098.749.800	- 13.150.328	15.985.235	2.834.907	3.571.202.526		3.571.202.526	
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	1.779.489.987	1.779.682.736	- 192.749	19.996.893	19.804.144	4.521.145.578		4.521.145.578	
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	1.419.269.607	1.290.468.212	128.801.395	- 125.214.984	3.586.411	4.757.763.800		4.757.763.800	
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	1.511.990.030	1.515.453.546	- 3.463.516	16.576.984	13.113.468	4.696.335.945		4.696.335.945	
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	1.701.153.087	1.707.607.127	- 6.454.040	12.298.535	5.844.495	4.110.588.523		4.110.588.523	
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	1.613.329.160	1.613.123.122	206.038	3.815.507	4.021.545	3.648.489.286		3.648.489.286	
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	1.313.559.537	1.326.590.500	- 13.030.963	17.205.170	4.174.207	3.197.933.000		3.197.933.000	
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	1.731.050.833	1.698.708.358	32.342.475	2.497.843	34.840.318	3.988.358.204		3.988.358.204	
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	1.518.286.545	1.520.956.220	- 2.669.675	11.197.225	8.527.550	5.895.223.048		5.895.223.048	
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	1.633.468.208	1.631.136.589	2.331.619	48.614.910	50.946.529	4.276.240.358		4.276.240.358	
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	1.748.978.973	1.748.458.085	520.888	34.346.779	34.867.667	4.166.454.845		4.166.454.845	
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	1.570.610.842	1.557.445.042	13.165.800	4.377.140	17.542.940	4.984.805.692		4.984.805.692	
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	1.582.516.925	1.552.689.993	29.826.932	12.175.845	42.002.777	5.608.458.817		5.608.458.817	
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	1.636.747.884	1.636.345.878	402.006	2.503.397	2.905.403	4.463.957.320		4.463.957.320	
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	1.404.034.807	1.407.985.572	- 3.950.765	7.653.226	3.702.461	5.176.525.804		5.176.525.804	
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	1.673.957.263	1.664.522.520	9.434.743	4.263.349	13.698.092	4.231.989.405		4.231.989.405	
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	1.438.186.175	1.441.228.001	- 3.041.826	8.373.627	5.331.801	4.718.104.615		4.718.104.615	
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	1.303.007.577	1.326.076.310	- 23.068.733	35.511.520	12.442.787	5.619.538.865		5.619.538.865	
87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	1.653.962.527	1.642.060.980	11.901.547	4.596.001	16.497.548	4.627.462.824		4.627.462.824	
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	1.667.296.434	1.658.417.475	8.878.959	17.595.138	26.474.097	6.621.471.666		6.621.471.666	
89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	1.590.657.682	1.590.228.200	429.482	5.317.108	5.746.590	4.492.900.822		4.492.900.822	
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	1.883.026.855	1.903.205.654	- 20.178.799	23.051.129	2.872.330	5.073.490.097		5.073.490.097	
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	1.607.716.076	1.611.000.805	- 3.284.729	28.175.348	24.890.619	4.212.676.700		4.212.676.700	
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	1.435.681.949	1.438.432.700	- 2.750.751	5.368.585	2.617.834	4.348.608.944		4.348.608.944	
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	1.388.474.525	1.398.816.632	- 10.342.107	13.612.422	3.270.315	4.651.205.745		4.651.205.745	
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	1.951.860.106	1.950.176.248	1.683.858	2.127.079	3.810.937	6.275.069.247		6.275.069.247	
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	1.347.406.454	1.343.064.181	4.342.273	1.729.451	6.071.724	4.459.225.405		4.459.225.405	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
96	BANJARSARI	KERTA	1.748.417.411	1.748.946.293	- 528.882	11.207.795	10.678.913	3.372.954.975		3.372.954.975	
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	1.593.310.296	1.590.167.670	3.142.626	1.225.137	4.367.763	3.758.759.500		3.758.759.500	
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	1.357.453.631	1.367.138.765	- 9.685.134	21.783.218	12.098.084	2.232.191.625		2.232.191.625	
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	1.566.094.060	1.570.730.502	- 4.636.442	14.037.475	9.401.033	3.977.856.800		3.977.856.800	
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	1.515.934.292	1.514.486.470	1.447.822	9.925.021	11.372.843	4.153.161.840		4.153.161.840	
101	BANJARSARI	KEUSIK	1.887.287.719	1.892.713.346	- 5.425.627	10.860.867	5.435.240	4.599.933.485		4.599.933.485	
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	1.517.208.819	1.523.271.655	- 6.062.836	9.956.373	3.893.537	3.672.010.140		3.672.010.140	
103	BANJARSARI	KUMPAY	1.488.155.563	1.497.854.778	- 9.699.215	15.331.050	5.631.835	4.187.127.427		4.187.127.427	
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	1.638.638.426	1.647.266.526	- 8.628.100	19.731.522	11.103.422	4.569.451.717		4.569.451.717	
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	1.442.958.434	1.446.929.446	- 3.971.012	7.355.049	3.384.037	3.593.225.477		3.593.225.477	
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	1.885.048.352	1.897.144.150	- 12.095.798	60.102.989	48.007.191	3.961.357.790		3.961.357.790	
107	BANJARSARI	CISAMPIH	1.955.816.035	1.970.688.713	- 14.872.678	22.542.613	7.669.935	6.220.092.713		6.220.092.713	
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	1.604.042.790	1.602.054.975	1.987.815	344.960	2.332.775	4.198.553.099		4.198.553.099	
109	BANJARSARI	TAMANSARI	1.729.224.003	1.721.755.992	7.468.011	19.291.928	26.759.939	2.765.478.800		2.765.478.800	
110	BANJARSARI	CIDAHU	1.793.310.098	1.795.720.372	- 2.410.274	7.734.207	5.323.933	2.761.666.074		2.761.666.074	
111	BANJARSARI	CIRUJI	1.785.849.235	1.783.630.165	2.219.070	5.975.821	8.194.891	5.142.019.115		5.142.019.115	
112	BANJARSARI	KADUHAUK	1.518.733.675	1.517.356.513	1.377.162	18.782.467	20.159.629	3.203.038.042		3.203.038.042	
113	BANJARSARI	LABANJAYA	1.665.575.647	1.659.056.909	6.518.738	1.133.414	7.652.152	4.357.156.000		4.357.156.000	
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	2.047.785.805	2.048.662.453	- 876.648	3.448.671	2.572.023	4.127.410.840		4.127.410.840	
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	1.540.651.892	1.554.887.272	- 14.235.380	37.738.837	23.503.457	4.452.415.612		4.452.415.612	
116	CILELES	PASINDANGAN	1.566.357.187	1.564.965.394	1.391.793	2.856.572	4.248.365	6.097.513.874		6.097.513.874	
117	CILELES	PARUNGKUJANG	2.189.845.198	2.189.024.186	821.012	1.866.110	2.687.122	4.759.671.356		4.759.671.356	
118	CILELES	CILELES	1.408.027.537	1.385.218.284	22.809.253	22.896.823	45.706.076	4.629.259.230		4.629.259.230	
119	CILELES	CIKAREO	1.642.054.170	1.642.378.653	- 324.483	5.857.421	5.532.938	4.792.613.762		4.792.613.762	
120	CILELES	CIPADANG	2.026.000.667	2.023.008.838	2.991.829	2.106.148	5.097.977	6.878.433.074		6.878.433.074	
121	CILELES	GUMURUH	1.830.324.829	1.830.433.623	- 108.794	2.477.027	2.368.233	3.629.785.378		3.629.785.378	
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	1.779.184.029	1.774.589.854	4.594.175	576.202	5.170.377	4.422.374.498		4.422.374.498	
123	CILELES	DAROYON	1.690.295.781	1.688.635.005	1.660.776	4.518.996	6.179.772	5.067.646.794		5.067.646.794	
124	CILELES	MARGAMULYA	1.786.759.888	1.784.041.444	2.718.444	7.814.004	10.532.448	6.492.383.811		6.492.383.811	
125	CILELES	MEKARJAYA	1.546.712.402	1.548.906.805	- 2.194.403	7.367.678	5.173.275	3.062.634.826		3.062.634.826	
126	CILELES	KUJANGSARI	1.496.409.179	1.501.333.930	- 4.924.751	9.394.677	4.469.926	4.245.434.726		4.245.434.726	
127	CILELES	BANJARSARI	2.074.766.748	2.074.384.427	382.321	2.278.490	2.660.811	4.868.242.266		4.868.242.266	
128	CIMARGA	SARAGENI	1.654.541.286	1.659.295.118	- 4.753.832	14.310.783	9.556.951	4.896.334.670		4.896.334.670	
129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	1.543.642.807	1.544.750.445	- 1.107.638	3.348.075	2.240.437	3.899.543.101		3.899.543.101	
130	CIMARGA	SUDAMANIK	1.631.917.282	1.644.987.987	- 13.070.705	25.302.391	12.231.686	4.025.378.177		4.025.378.177	
131	CIMARGA	TAMBAK	1.793.101.064	1.786.736.800	6.364.264	5.283.495	11.647.759	4.726.363.539		4.726.363.539	
132	CIMARGA	CIMARGA	1.520.245.602	1.540.981.747	- 20.736.145	47.051.635	26.315.490	4.549.497.013		4.549.497.013	
133	CIMARGA	KARYAJAYA	1.959.032.531	1.968.340.713	- 9.308.182	12.064.392	2.756.210	4.276.535.730		4.276.535.730	
134	CIMARGA	MARGAJAYA	1.750.924.092	1.689.041.684	61.882.408	20.570.935	82.453.343	2.961.723.649		2.961.723.649	
135	CIMARGA	JAYAMANIK	1.611.803.257	1.609.369.901	2.433.356	2.942.976	5.376.332	3.673.430.421		3.673.430.421	
136	CIMARGA	MARGALUYU	1.718.112.877	1.710.333.190	7.779.687	11.355.573	19.135.260	4.393.410.652		4.393.410.652	
137	CIMARGA	MARGATIRTA	1.575.703.226	1.566.765.161	8.938.065	4.861.179	13.799.244	4.339.854.781		4.339.854.781	
138	CIMARGA	INTENJAYA	2.007.748.615	2.005.750.500	1.998.115	-	1.998.115	4.954.590.690		4.954.590.690	
139	CIMARGA	MEKARJAYA	1.716.764.369	1.723.967.450	- 7.203.081	36.800.503	29.597.422	4.318.482.932		4.318.482.932	
140	CIMARGA	JAYASARI	1.374.108.680	1.369.369.250	4.739.430	6.355.370	11.094.800	5.554.725.344		5.554.725.344	
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	1.468.241.253	1.468.537.767	- 296.514	6.059.861	5.763.347	3.699.678.470		3.699.678.470	
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	1.822.997.313	1.821.189.120	1.808.193	3.438.688	5.246.881	4.975.396.506		4.975.396.506	
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	1.644.393.502	1.615.084.196	29.309.306	20.062.178	49.371.484	2.630.107.341		2.630.107.341	
144	CIMARGA	MEKARMULYA	1.503.893.647	1.500.184.970	3.708.677	15.441.680	19.150.357	3.879.316.663		3.879.316.663	
145	SAJIRA	MARAYA	2.052.095.116	2.051.877.520	217.596	18.401.897	18.619.493	5.741.127.734		5.741.127.734	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
146	SAJIRA	SAJIRA	1.569.355.175	1.574.311.058	- 4.955.883	36.541.223	31.585.340	4.069.821.126		4.069.821.126	
147	SAJIRA	SUKARAME	1.566.646.587	1.563.576.084	3.070.503	24.798.535	27.869.038	4.109.597.840		4.109.597.840	
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	1.579.988.952	1.615.588.622	- 35.599.670	118.741.412	83.141.742	4.476.419.474		4.476.419.474	
149	SAJIRA	PARUNGSARI	1.565.893.041	1.568.341.458	- 2.448.417	48.923.630	46.475.213	5.061.508.529		5.061.508.529	
150	SAJIRA	SINDANGSARI	1.634.316.607	1.627.427.760	6.888.847	6.721.285	13.610.132	4.331.787.247		4.331.787.247	
151	SAJIRA	MEKARSARI	1.476.959.516	1.471.784.740	5.174.776	2.139.786	7.314.562	5.826.928.023		5.826.928.023	
152	SAJIRA	SUKAMARGA	1.629.571.499	1.660.602.520	- 31.031.021	73.084.889	42.053.868	5.192.978.631		5.192.978.631	
153	SAJIRA	PAJAGAN	1.679.931.042	1.643.992.706	35.938.336	- 28.145.999	7.792.337	6.979.394.194		6.979.394.194	
154	SAJIRA	SUKAJAYA	1.433.284.116	1.455.778.902	- 22.494.786	29.680.991	7.186.205	4.235.755.045		4.235.755.045	
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	1.690.973.440	1.693.153.720	- 2.180.280	23.243.451	21.063.171	3.246.465.222		3.246.465.222	
156	SAJIRA	PAJA	1.260.382.176	1.157.588.140	102.794.036	- 93.117.108	9.676.928	4.412.797.647		4.412.797.647	
157	SAJIRA	MARGALUYU	1.812.078.183	1.800.370.300	11.707.883	17.601.814	29.309.697	5.137.973.171		5.137.973.171	
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	1.322.916.229	1.303.303.700	19.612.529	43.792.632	63.405.161	7.647.062.240		7.647.062.240	
159	SAJIRA	CIUYAH	1.619.948.442	1.638.089.107	- 18.140.665	26.260.188	8.119.523	3.404.007.336		3.404.007.336	
160	MAJA	TANJUNGSARI	1.398.926.741	1.405.678.528	- 6.751.787	49.218.967	42.467.180	5.982.704.232		5.982.704.232	
161	MAJA	MAJA	2.706.362.037	2.668.153.899	38.208.138	-	38.208.138	8.404.930.994		8.404.930.994	
162	MAJA	SANGIANG	1.434.784.086	1.437.864.020	- 3.079.934	33.677.353	30.597.419	4.514.552.731		4.514.552.731	
163	MAJA	BINONG	1.516.607.867	1.544.371.685	- 27.763.818	44.001.092	16.237.274	5.596.469.018		5.596.469.018	
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	1.367.676.703	1.366.244.156	1.432.547	31.415.583	32.848.130	5.808.155.610		5.808.155.610	
165	MAJA	MEKARSARI	1.567.678.203	1.563.762.890	3.915.313	39.202.894	43.118.207	5.969.862.024		5.969.862.024	
166	MAJA	PADASUKA	1.530.594.376	1.526.672.489	3.921.887	10.577.756	14.499.643	6.506.466.184		6.506.466.184	
167	MAJA	CURUGBADAK	1.849.739.187	1.788.258.452	61.480.735	93.021.064	154.501.799	5.582.618.272		5.582.618.272	
168	MAJA	SINDANGMULYA	1.623.059.650	1.619.066.680	3.992.970	34.010.350	38.003.320	5.111.253.294		5.111.253.294	
169	MAJA	CILANGKAP	1.453.430.371	1.466.268.280	- 12.837.909	43.290.553	30.452.644	4.539.529.350		4.539.529.350	
170	MAJA	PASIRKEMBANG	1.802.625.208	1.796.796.633	5.828.575	16.757.567	22.586.142	6.414.174.720		6.414.174.720	
171	MAJA	PASIRKECAPI	1.368.531.371	1.416.911.692	- 48.380.321	69.389.178	21.008.857	11.184.122.697		11.184.122.697	
172	MAJA	BUYUT MEKAR	1.487.054.319	1.517.728.513	- 30.674.194	60.201.330	29.527.136	4.751.226.385		4.751.226.385	
173	MAJA	MAJA BARU	1.497.264.215	1.462.201.855	35.062.360	62.951.145	98.013.505	4.286.447.558		4.286.447.558	
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	1.624.212.485	1.567.555.230	56.657.255	- 50.616.174	6.041.081	3.988.784.374		3.988.784.374	
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	1.591.986.265	1.456.814.447	135.171.818	- 96.974.465	38.197.353	5.796.756.849		5.796.756.849	
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	1.548.105.707	1.569.051.722	- 20.946.015	30.898.845	9.952.830	4.385.690.515		4.385.690.515	
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	1.635.589.971	1.643.398.300	- 7.808.329	27.274.436	19.466.107	2.913.988.983		2.913.988.983	
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	1.495.233.409	1.478.248.800	16.984.609	29.654.689	46.639.298	4.174.001.183		4.174.001.183	
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	1.718.554.583	1.704.682.872	13.871.711	23.341.703	37.213.414	4.617.658.424		4.617.658.424	
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	1.687.094.525	1.508.617.008	178.477.517	- 164.820.955	13.656.562	2.800.036.320		2.800.036.320	
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	1.801.935.359	1.821.480.460	- 19.545.101	35.299.294	15.754.193	2.914.749.716		2.914.749.716	
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANAH	1.426.715.446	1.431.732.661	- 5.017.215	25.691.667	20.674.452	4.299.498.620		4.299.498.620	
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	1.481.313.329	1.488.597.520	- 7.284.191	30.580.883	23.296.692	3.927.145.676		3.927.145.676	
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	1.758.554.233	1.760.166.428	- 1.612.195	21.782.642	20.170.447	3.389.660.264		3.389.660.264	
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	1.793.350.477	1.792.172.286	1.178.191	1.071.912	2.250.103	4.104.331.655		4.104.331.655	
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	1.666.852.059	1.664.939.769	1.912.290	823.793	2.736.083	6.010.700.447		6.010.700.447	
187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	1.438.676.451	1.434.706.680	3.969.771	478.293	4.448.064	3.066.521.400		3.066.521.400	
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	1.409.600.219	1.424.525.365	- 14.925.146	17.333.075	2.407.929	2.212.079.440		2.212.079.440	
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	1.506.510.296	1.502.428.114	4.082.182	1.418.495	5.500.677	3.678.116.846		3.678.116.846	
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	1.706.736.871	1.708.562.151	- 1.825.280	8.098.437	6.273.157	5.411.252.575		5.411.252.575	
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	1.580.954.378	1.596.889.995	- 15.935.617	18.585.094	2.649.477	6.929.064.650		6.929.064.650	
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	1.685.493.145	1.685.047.036	446.109	1.382.669	1.828.778	4.125.649.676		4.125.649.676	
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	1.676.192.838	1.682.910.044	- 6.717.206	8.768.783	2.051.577	4.028.210.108		4.028.210.108	
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	1.733.718.516	1.726.171.945	7.546.571	4.265.832	11.812.403	3.938.508.000		3.938.508.000	
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	1.826.760.015	1.822.910.183	3.849.832	3.755.230	7.605.062	4.337.469.600		4.337.469.600	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	1.461.729.900	1.459.160.298	2.569.602	1.960.232	4.529.834	2.945.571.660		2.945.571.660	
197	CIJAKU	MEKARJAYA	1.369.968.510	1.376.004.780	- 6.036.270	21.129.368	15.093.098	3.063.877.200		3.063.877.200	
198	CIJAKU	CIPALABUH	1.596.007.633	1.607.457.190	- 11.449.557	17.601.773	6.152.216	3.203.753.400		3.203.753.400	
199	CIJAKU	CIJAKU	1.511.507.591	1.519.021.902	- 7.514.311	11.284.719	3.770.408	4.135.426.100		4.135.426.100	
200	CIJAKU	CIBEUREUM	1.543.385.498	1.550.836.744	- 7.451.246	23.361.102	15.909.856	5.238.332.418		5.238.332.418	
201	CIJAKU	CIAPUS	1.727.108.761	1.741.141.887	- 14.033.126	17.181.243	3.148.117	3.818.794.497		3.818.794.497	
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	1.752.861.732	1.770.514.334	- 17.652.602	25.369.151	7.716.549	4.438.833.476		4.438.833.476	
203	CIJAKU	CIHUJAN	1.430.263.486	1.440.326.377	- 10.062.891	18.277.319	8.214.428	3.653.034.032		3.653.034.032	
204	CIJAKU	CIMENGA	1.577.451.221	1.575.422.762	2.028.459	13.569.720	15.598.179	4.261.919.512		4.261.919.512	
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	1.438.772.096	1.440.957.065	- 2.184.969	10.492.725	8.307.756	3.960.572.408		3.960.572.408	
206	CIJAKU	SUKASENANG	1.677.152.206	1.709.455.105	- 32.302.899	42.429.847	10.126.948	4.073.385.301		4.073.385.301	
207	CIKULUR	ANGGALAN	1.371.156.445	1.361.642.984	9.513.461	19.515.493	29.028.954	5.018.442.913		5.018.442.913	
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	1.389.593.113	1.421.227.194	- 31.634.081	66.344.615	34.710.534	4.740.699.710		4.740.699.710	
209	CIKULUR	SUKAHARJA	1.338.537.115	1.361.583.993	- 23.046.878	32.221.815	9.174.937	5.182.154.854		5.182.154.854	
210	CIKULUR	TAMANJAYA	1.377.928.916	1.390.059.955	- 12.131.039	18.941.587	6.810.548	4.950.035.324		4.950.035.324	
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	1.784.460.307	1.779.340.753	5.119.554	23.978.980	29.098.534	4.579.958.429		4.579.958.429	
212	CIKULUR	MUARADUA	1.815.486.837	1.828.844.880	- 13.358.043	20.390.689	7.032.646	4.399.100.879		4.399.100.879	
213	CIKULUR	CIKULUR	1.814.764.438	1.815.892.620	- 1.128.182	5.714.831	4.586.649	6.593.981.800		6.593.981.800	
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	1.753.089.117	1.763.977.160	- 10.888.043	15.649.854	4.761.811	5.716.328.299		5.716.328.299	
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	1.322.003.499	1.316.740.518	5.262.981	-	5.262.981	4.997.852.521		4.997.852.521	
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	1.753.706.871	1.758.062.380	- 4.355.509	10.066.651	5.711.142	5.593.054.427		5.593.054.427	
217	CIKULUR	PARAGE	1.298.226.159	1.307.843.742	- 9.617.583	21.548.216	11.930.633	5.072.587.985		5.072.587.985	
218	CIKULUR	SUKADAYA	1.468.272.885	1.551.590.209	- 83.317.324	93.546.530	10.229.206	5.060.568.379		5.060.568.379	
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	1.405.073.388	1.420.823.481	- 15.750.093	18.568.435	2.818.342	4.697.396.390		4.697.396.390	
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	1.712.763.792	1.707.009.584	5.754.208	858.698	6.612.906	6.045.306.917		6.045.306.917	
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	1.462.826.341	1.443.450.298	19.376.043	24.021.729	43.397.772	5.329.317.866		5.329.317.866	
222	CIBADAK	PANANCANGAN	1.340.992.119	1.347.399.788	- 6.407.669	28.337.152	21.929.483	4.411.767.373		4.411.767.373	
223	CIBADAK	CIBADAK	1.668.980.123	1.666.187.180	2.792.943	2.214.834	5.007.777	5.161.342.838		5.161.342.838	
224	CIBADAK	ASEM	1.497.224.344	1.500.883.377	- 3.659.033	8.305.120	4.646.087	3.560.392.815		3.560.392.815	
225	CIBADAK	CISANGU	1.636.551.577	1.635.426.279	1.125.298	3.205.933	4.331.231	5.040.447.271		5.040.447.271	
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	1.505.747.304	1.511.919.389	- 6.172.085	11.501.610	5.329.525	5.718.225.475		5.718.225.475	
227	CIBADAK	BOJONGCAE	1.491.292.007	1.512.457.200	- 21.165.193	33.005.857	11.840.664	5.961.675.255		5.961.675.255	
228	CIBADAK	MALABAR	1.748.835.402	1.752.364.660	- 3.529.258	9.290.570	5.761.312	5.840.460.063		5.840.460.063	
229	CIBADAK	PASAR KEONG	1.443.192.522	1.442.822.500	370.022	4.163.578	4.533.600	3.725.036.542		3.725.036.542	
230	CIBADAK	BOJONG LELES	1.478.036.949	1.501.395.515	- 23.358.566	29.467.449	6.108.883	5.649.443.827		5.649.443.827	
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	1.603.273.153	1.454.247.509	149.025.644	- 146.069.337	2.956.307	4.573.478.837		4.573.478.837	
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	1.582.441.617	1.573.347.200	9.094.417	4.955.808	14.050.225	5.009.287.878		5.009.287.878	
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	1.469.401.075	1.482.864.800	- 13.463.725	17.230.357	3.766.632	3.713.818.854		3.713.818.854	
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	1.668.222.388	1.670.182.231	- 1.959.843	5.474.188	3.514.345	3.388.124.849		3.388.124.849	
235	CIBEBER	CIBEBER	1.659.398.933	1.676.963.952	- 17.565.019	55.269.192	37.704.173	5.891.714.899		5.891.714.899	
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	1.539.483.079	1.540.445.504	- 962.425	11.032.514	10.070.089	4.698.802.940		4.698.802.940	
237	CIBEBER	CISUNGSANG	1.239.565.995	1.265.382.506	- 25.816.511	56.120.166	30.303.655	6.031.323.563		6.031.323.563	
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	1.280.515.138	1.285.742.540	- 5.227.402	28.711.826	23.484.424	4.973.913.225		4.973.913.225	
239	CIBEBER	KUJANGSARI	1.310.475.850	1.301.384.543	9.091.307	85.846.110	94.937.417	5.015.446.103		5.015.446.103	
240	CIBEBER	NEGLASARI	1.638.982.603	1.634.918.311	4.064.292	6.656.312	10.720.604	5.102.373.356		5.102.373.356	
241	CIBEBER	MEKARSARI	1.292.058.766	1.298.475.644	- 6.416.878	40.102.987	33.686.109	5.275.346.436		5.275.346.436	
242	CIBEBER	CIKOTOK	1.262.352.086	1.261.323.024	1.029.062	15.647.588	16.676.650	4.232.788.919		4.232.788.919	
243	CIBEBER	SUKAMULYA	1.326.153.076	1.329.604.016	- 3.450.940	23.984.553	20.533.613	4.740.961.519		4.740.961.519	
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	1.182.658.914	954.077.885	228.581.029	-	228.581.029	4.210.795.900		4.210.795.900	
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	1.463.213.390	1.496.467.253	- 33.253.863	67.053.520	33.799.657	4.184.223.604		4.184.223.604	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
246	CIBEBER	HEGARMANAH	1.437.462.024	1.441.554.695	- 4.092.671	20.258.419	16.165.748	5.706.172.832		5.706.172.832	
247	CIBEBER	SITUMULYA	1.370.211.356	1.396.038.395	- 25.827.039	73.036.772	47.209.733	4.809.583.498		4.809.583.498	
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	1.350.469.179	1.361.870.485	- 11.401.306	24.104.876	12.703.570	5.953.972.741		5.953.972.741	
249	CIBEBER	CIKADU	1.352.313.552	1.351.038.510	1.275.042	23.410.466	24.685.508	4.705.542.589		4.705.542.589	
250	CIBEBER	SINARGALIH	1.370.443.618	1.377.955.426	- 7.511.808	23.535.275	16.023.467	5.024.745.938		5.024.745.938	
251	CIBEBER	CIHAMBALI	1.492.519.295	1.529.195.185	- 36.675.890	45.319.150	8.643.260	5.535.051.763		5.535.051.763	
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	1.475.701.825	1.464.493.550	11.208.275	3.443.973	14.652.248	5.277.533.635		5.277.533.635	
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	1.313.686.442	1.299.841.698	13.844.744	46.430.255	60.274.999	4.590.595.900		4.590.595.900	
254	CIBEBER	WANASARI	1.414.846.402	1.397.434.894	17.411.508	6.734.866	24.146.374	3.509.026.560		3.509.026.560	
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	1.303.257.620	1.309.488.116	- 6.230.496	10.591.961	4.361.465	4.596.006.003		4.596.006.003	
256	CIBEBER	CIHERANG	1.343.630.701	1.400.996.204	- 57.365.503	77.014.595	19.649.092	4.642.038.481		4.642.038.481	
257	CILOGRANG	CILOGRANG	1.420.893.793	1.422.182.372	- 1.288.579	24.305.837	23.017.258	3.477.990.450		3.477.990.450	
258	CILOGRANG	CIBARENO	1.823.347.353	1.822.255.718	1.091.635	18.289.075	19.380.710	4.709.435.841		4.709.435.841	
259	CILOGRANG	CIKAMUNDING	1.499.944.476	1.532.397.421	- 32.452.945	88.126.128	55.673.183	3.802.954.381		3.802.954.381	
260	CILOGRANG	CIJENGKOL	1.942.964.777	1.946.321.270	- 3.356.493	40.299.360	36.942.867	3.866.370.912		3.866.370.912	
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	1.818.031.112	1.833.490.343	- 15.459.231	33.779.540	18.320.309	4.290.234.322		4.290.234.322	
262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	1.469.655.444	1.336.497.600	133.157.844	- 124.875.301	8.282.543	3.187.335.844		3.187.335.844	
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	1.446.435.123	1.439.794.900	6.640.223	13.856.213	20.496.436	3.731.260.769		3.731.260.769	
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	1.607.126.051	1.603.107.300	4.018.751	1.749.354	5.768.105	3.209.652.706		3.209.652.706	
265	CILOGRANG	CIREUNDEU	1.786.523.139	1.752.014.600	34.508.539	- 11.913.566	22.594.973	4.326.358.400		4.326.358.400	
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	1.316.162.263	1.374.938.495	- 58.776.232	77.516.321	18.740.089	5.296.379.267		5.296.379.267	
267	WANASALAM	WANASALAM	2.107.617.536	2.078.423.358	29.194.178	2.087.284	31.281.462	4.200.459.108		4.200.459.108	
268	WANASALAM	BEJOD	1.682.185.792	1.674.921.360	7.264.432	14.009.763	21.274.195	4.178.459.553		4.178.459.553	
269	WANASALAM	CILANGKAP	1.766.849.194	1.773.368.120	- 6.518.926	23.648.289	17.129.363	5.264.647.357		5.264.647.357	
270	WANASALAM	CIPEUCANG	1.442.035.862	1.439.319.800	2.716.062	49.836.274	52.552.336	4.173.082.916		4.173.082.916	
271	WANASALAM	MUARA	2.054.955.124	2.012.439.386	42.515.738	- 40.177.485	2.338.253	4.447.177.057		4.447.177.057	
272	WANASALAM	PARUNGPANJANG	1.746.677.507	1.759.141.284	- 12.463.777	18.182.606	5.718.829	6.087.339.318		6.087.339.318	
273	WANASALAM	CIKEUSIK	1.720.422.010	1.722.999.573	- 2.577.563	7.745.997	5.168.434	4.438.725.583		4.438.725.583	
274	WANASALAM	KATAPANG	1.741.402.509	1.768.830.300	- 27.427.791	37.040.098	9.612.307	4.653.683.913		4.653.683.913	
275	WANASALAM	CISARAP	1.657.133.488	1.671.951.942	- 14.818.454	29.511.259	14.692.805	3.818.755.099		3.818.755.099	
276	WANASALAM	SUKATANI	2.023.259.045	2.016.797.968	6.461.077	13.735.240	20.196.317	4.190.959.266		4.190.959.266	
277	WANASALAM	CIPEDANG	1.426.197.883	1.447.772.253	- 21.574.370	31.284.483	9.710.113	4.316.195.152		4.316.195.152	
278	WANASALAM	PARUNGSARI	1.716.096.790	1.712.305.088	3.791.702	36.171.052	39.962.754	5.383.488.355		5.383.488.355	
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	1.553.256.310	1.577.902.000	- 24.645.690	29.271.166	4.625.476	4.197.017.762		4.197.017.762	
280	SOBANG	CIPARASI	1.395.367.230	1.398.279.065	- 2.911.835	9.718.657	6.806.822	5.397.164.150		5.397.164.150	
281	SOBANG	SOBANG	1.582.249.137	1.601.020.595	- 18.771.458	35.737.121	16.965.663	5.297.520.524		5.297.520.524	
282	SOBANG	SUKAJAYA	1.391.419.483	1.408.147.675	- 16.728.192	38.124.522	21.396.330	6.193.216.029		6.193.216.029	
283	SOBANG	SINDANGLAYA	1.535.646.659	1.535.361.852	284.807	14.020.107	14.304.914	3.463.403.392		3.463.403.392	
284	SOBANG	SUKAMAJU	1.444.713.446	1.457.658.610	- 12.945.164	18.807.231	5.862.067	6.394.037.306		6.394.037.306	
285	SOBANG	HARIANG	1.665.907.654	1.680.106.449	- 14.198.795	32.671.489	18.472.694	5.530.986.000		5.530.986.000	
286	SOBANG	MAJASARI	1.459.617.899	1.461.338.952	- 1.721.053	8.191.592	6.470.539	4.738.920.600		4.738.920.600	
287	SOBANG	SINAR JAYA	1.587.963.881	1.579.237.485	8.726.396	13.019.657	21.746.053	5.710.485.600		5.710.485.600	
288	SOBANG	CIROMPANG	1.320.244.483	1.318.386.668	1.857.815	6.466.251	8.324.066	4.755.144.058		4.755.144.058	
289	SOBANG	SUKARESMI	1.644.634.394	1.652.878.801	- 8.244.407	16.160.126	7.915.719	6.086.161.500		6.086.161.500	
290	CURUG BITUNG	GURADOG	1.479.135.874	1.476.427.386	2.708.488	12.265.124	14.973.612	4.666.756.400		4.666.756.400	
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	1.387.602.116	1.386.751.414	850.702	1.724.273	2.574.975	5.000.022.500		5.000.022.500	
292	CURUG BITUNG	CANDI	1.421.301.139	1.411.198.871	10.102.268	19.673.497	29.775.765	5.024.794.000		5.024.794.000	
293	CURUG BITUNG	MAYAK	1.268.021.026	1.266.769.966	1.251.060	4.529.525	5.780.585	4.498.094.187		4.498.094.187	
294	CURUG BITUNG	CIPINING	1.513.371.372	1.538.082.085	- 24.710.713	33.312.016	8.601.303	3.932.161.406		3.932.161.406	
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	1.488.728.070	1.478.231.424	10.496.646	3.981.991	14.478.637	4.934.633.222		4.934.633.222	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	1.702.169.619	1.711.295.935	- 9.126.316	12.448.668	3.322.352	4.697.465.647		4.697.465.647	
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	1.698.075.204	1.690.137.285	7.937.919	3.945.536	11.883.455	3.328.940.954		3.328.940.954	
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	1.474.655.952	1.459.833.516	14.822.436	5.516.135	20.338.571	5.211.688.720		5.211.688.720	
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	1.270.458.593	1.241.899.669	28.558.924	4.633.098	33.192.022	3.259.851.346		3.259.851.346	
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	1.638.809.922	1.563.959.829	74.850.093	58.366.519	133.216.612	3.541.496.600		3.541.496.600	
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	1.984.894.689	1.963.660.348	21.234.341	15.646.180	36.880.521	5.681.707.900		5.681.707.900	
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	1.527.385.816	1.524.887.454	2.498.362	2.682.746	5.181.108	4.027.829.615		4.027.829.615	
303	KALANGANYAR	AWEH	1.429.391.187	1.414.400.542	14.990.645	2.127.899	17.118.544	3.107.717.848		3.107.717.848	
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	1.658.215.089	1.665.898.057	- 7.682.968	15.768.124	8.085.156	6.282.012.252		6.282.012.252	
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	1.968.264.833	1.866.055.533	102.209.300	151.633.227	253.842.527	3.881.770.100		3.881.770.100	
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	1.495.630.182	1.440.078.745	55.551.437	- 50.332.601	5.218.836	2.634.884.170		2.634.884.170	
307	LEBAK GEDONG	BANJARIRIGASI	1.574.327.694	1.577.313.852	- 2.986.158	8.674.298	5.688.140	10.470.303.560		10.470.303.560	
308	LEBAK GEDONG	CILADAEUN	1.543.818.857	1.546.664.261	- 2.845.404	5.667.797	2.822.393	4.392.400.700		4.392.400.700	
309	LEBAK GEDONG	LEBAKGEDONG	1.373.179.820	1.375.596.760	- 2.416.940	4.651.982	2.235.042	4.823.920.821		4.823.920.821	
310	LEBAK GEDONG	BANJARSARI	1.570.520.407	1.567.064.620	3.455.787	8.107.579	11.563.366	3.232.602.455		3.232.602.455	
311	LEBAK GEDONG	LEBAKSITU	1.509.292.957	1.516.033.211	- 6.740.254	10.155.177	3.414.923	4.619.458.600		4.619.458.600	
312	LEBAK GEDONG	LEBAKSANGKA	1.358.065.158	1.361.047.322	- 2.982.164	5.364.814	2.382.650	3.781.403.000		3.781.403.000	
313	CIHARA	PANYAUNGAN	1.427.985.056	1.432.700.900	- 4.715.844	8.681.627	3.965.783	3.497.090.718		3.497.090.718	
314	CIHARA	CIHARA	1.368.532.282	1.373.745.204	- 5.212.922	12.409.296	7.196.374	3.525.471.068		3.525.471.068	
315	CIHARA	CIPARAHU	1.803.718.936	1.814.156.780	- 10.437.844	18.822.042	8.384.198	5.175.490.596		5.175.490.596	
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	1.804.519.455	1.677.501.580	127.017.875	- 121.921.228	5.096.647	4.473.809.523		4.473.809.523	
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	1.420.261.305	1.418.723.180	1.538.125	11.170.409	12.708.534	4.105.643.527		4.105.643.527	
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	1.408.249.126	1.411.815.193	- 3.566.067	11.815.884	8.249.817	4.433.639.640		4.433.639.640	
319	CIHARA	MEKARSARI	1.521.870.984	1.525.285.071	- 3.414.087	16.293.202	12.879.115	4.581.759.750		4.581.759.750	
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	1.408.403.749	1.429.297.120	- 20.893.371	34.474.687	13.581.316	5.952.950.965		5.952.950.965	
321	CIHARA	BARUNAI	1.536.089.563	1.531.922.323	4.167.240	13.466.560	17.633.800	3.514.838.448		3.514.838.448	
322	CIRINTEN	DATARCAE	1.399.990.665	1.400.449.800	- 459.135	8.879.696	8.420.561	3.948.680.340		3.948.680.340	
323	CIRINTEN	CIRINTEN	1.692.520.761	1.685.009.646	7.511.115	20.542.867	28.053.982	4.303.331.000		4.303.331.000	
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	1.328.420.869	1.330.087.936	- 1.667.067	12.193.491	10.526.424	4.206.005.147		4.206.005.147	
325	CIRINTEN	KADUDAMAS	1.400.106.355	1.407.708.708	- 7.602.353	11.415.985	3.813.632	3.764.138.354		3.764.138.354	
326	CIRINTEN	BADUR	1.435.444.668	1.439.131.220	- 3.686.552	8.424.264	4.737.712	4.629.806.146		4.629.806.146	
327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	1.674.639.725	1.680.364.886	- 5.725.161	10.136.383	4.411.222	7.153.144.560		7.153.144.560	
328	CIRINTEN	NANGGERANG	1.591.593.024	1.593.410.678	- 1.817.654	10.049.546	8.231.892	4.328.145.435		4.328.145.435	
329	CIRINTEN	CEMPAKA	1.403.470.022	1.395.405.300	8.064.722	1.421.987	9.486.709	4.820.566.871		4.820.566.871	
330	CIRINTEN	KAROYA	1.293.585.326	1.291.518.116	2.067.210	11.532.933	13.600.143	4.743.267.714		4.743.267.714	
331	CIRINTEN	CIBARANI	1.370.519.318	1.386.545.838	- 16.026.520	25.989.933	9.963.413	5.069.689.052		5.069.689.052	
332	CIGEMBLONG	PEUCANGPARI	2.068.807.713	2.068.974.487	- 166.774	32.992.153	32.825.379	5.713.430.360		5.713.430.360	
333	CIGEMBLONG	CIBUNGUR	1.438.847.054	1.435.692.634	3.154.420	50.028.322	53.182.742	3.774.268.900		3.774.268.900	
334	CIGEMBLONG	MUGIJAYA	1.442.836.479	1.425.030.542	17.805.937	3.034.076	20.840.013	4.972.157.235		4.972.157.235	
335	CIGEMBLONG	CIKATE	1.464.999.878	1.436.030.096	28.969.782	-	28.969.782	5.341.683.145		5.341.683.145	
336	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	1.596.477.032	1.593.602.729	2.874.303	25.357.180	28.231.483	4.355.413.933		4.355.413.933	

NO	KECAMATAN	DESA	LAPORAN REALISASI ANGGARAN					LAPORAN KEKAYAAN DESA			KET
			PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	PEMBIAYAAN	SILPA	ASET	KEWAJIBAN	KEKAYAAN BERSIH	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
337	CIGEMBLONG	CIKADONGDONG	1.525.402.398	1.444.843.364	80.559.034	58.139.707	138.698.741	4.141.119.408		4.141.119.408	
338	CIGEMBLONG	CIKARET	1.483.943.464	1.477.476.483	6.466.981	54.172.227	60.639.208	4.104.820.430		4.104.820.430	
339	CIGEMBLONG	WANGUNJAYA	1.615.647.921	1.608.169.456	7.478.465	24.561.351	32.039.816	5.563.790.805		5.563.790.805	
340	CIGEMBLONG	CIKARATUAN	1.546.999.517	1.508.703.626	38.295.891	37.129.507	75.425.398	4.461.735.548		4.461.735.548	
JUMLAH			**538.481.680.129**	**537.473.972.103**	**1.007.708.026**	**6.081.133.124**	**7.088.841.150**	**1.565.912.120.966**	**-**	**1.565.912.120.966**	

Rangkasbitung, 13 Februari 2025
KEPALA DPMD KABUPATEN LEBAK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

OKTAVIANTO ARIEF AHMAD, S.IP.M.Si
NIP. 198310232005021002

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAMPIRAN II

"DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)"

TAHUN 2024

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 648/kep-202-DPRKPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LEBAK,

Menimbang :

a. bahwa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemberian bantuan stimulan rumah swadaya, perlu menetapkan daftar penerima bantuan stimulan rumah swadaya berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan

Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas rumah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dana bantuan Stimulan Rumah Swadaya disalurkan ke rekening penerima bantuan dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera (Perseroda), dengan Nomor Rekening giro Bank Jawa Barat dan Banten 0002819376001.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

Tembusan :
1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Pimpinan BPR Lebak Sejahtera, Tbk (Perseroda);
4. Yth. Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 648/ kep-202-DPRKPP/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : PASAR KEONG

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (7 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
1	1	UJANG HAERUDIN	LAKI-LAKI	3602182812580001	KP. CIPUTAT, RT/RW. 004 /001	20.000.000
2	2	MUHAMAD ISMAT	LAKI-LAKI	3602180407900004	KP. SENGKOL, RT/RW. 001/002	20.000.000
3	3	MADSURI	LAKI-LAKI	3602180101550009	KP. CIPUTAT, RT/RW. 004 /001	20.000.000

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
4	4	FITRIANI	PEREMPUAN	3602184608830002	KP. PASAR KEONG, RT/RW. 002 /001	20.000.000
5	5	ROSID RUDYATNA	LAKI-LAKI	3173020510760015	KP. CIPUTAT, RT/RW. 004 /001	20.000.000
6	6	ONAH	PEREMPUAN	3602186706560001	KP. SENGKOL P, RT/RW. 001/002	20.000.000
7	7	OMAN	LAKI-LAKI	3602180202700004	KP. IRIGASI, RT/RW. 003 /001	20.000.000

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : CIBADAK

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (7 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
8	1	MUHAMAD NUR	LAKI-LAKI	3602181405690003	KP. NYOMPLONG, RT/RW. 001 /001	20.000.000
9	2	MARTADINATA	LAKI-LAKI	3602182703640001	KP. NYOMPLONG, RT/RW. 001 /001	20.000.000
10	3	RIKA WATI	PEREMPUAN	3602185003800003	KP. NYOMPLONG, RT/RW. 001 /001	20.000.000
11	4	WAHYUDIN	LAKI-LAKI	3602050306830002	KP. NYOMPLONG, RT/RW. 001 /001	20.000.000
12	5	WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	3602184101640005	KP. NYOMPLONG, RT/RW. 001 /001	20.000.000
13	6	RINI ASTUTI	PEREMPUAN	3602184707870004	KP. BATURAMBANG, RT/RW. 001/004	20.000.000
14	7	MADSUKRI	LAKI-LAKI	3602181609730002	KP. BORONDONG, RT/RW. 002 /002	20.000.000

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : PANANCANGAN

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	No BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
15	1	SINTA ROSITA	EREMPUAN	3602186809830002	KP. GALIH NANGTUNG, RT/RW. 003/002	20.000.000
16	2	HENDRO PERMANA	LAKI-LAKI	3602182010970001	KP. GALIH NANGTUNG, RT/RW. 003/002	20.000.000
17	3	MARSATI	PEREMPUAN	3602184111570001	KP. PASIR EURIH, RT/RW. 002/001	20.000.000
18	4	ROSIDIN	LAKI-LAKI	3602181909780004	KP. PASIR EURIH, RT/RW. 002/001	20.000.000
19	5	SUKMANAH	PEREMPUAN	3602184704600002	KP. TALUN WETAN, RT/RW. 002/003	20.000.000

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : ASEM MARGALUYU

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
20	1	SARNA	PEREMPUAN	3602184308630001	KP. CIPURUT PASIR, RT/RW. 004/001	20.000.000
21	2	SAIYAH	PEREMPUAN	3602184101630018	KP. CIPURUT PASIR, RT/RW. 004/001	20.000.000
22	3	PULUNG	LAKI-LAKI	3602181504640002	KP. ASEM MASJID, RT/RW. 003/001	20.000.000
23	4	EMOT	PEREMPUAN	3602184311850004	KP. ASEM MASJID, RT/RW. 001/002	20.000.000
24	5	ENDI	LAKI-LAKI	3602183007890001	KP. DUKUH, RT/RW. 002/004	20.000.000

KECAMATAN : WARUNGGUNUNG

DESA : SINDANGSARI

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (7 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
25	1	SATRA	LAKI-LAKI	3602150508600001	KP. SINDANG SONO, RT/RW. 001/001	20.000.000
26	2	AAN ASNAWI	LAKI-LAKI	3602131002840003	KP. SINDANG SONO, RT/RW. 002/001	20.000.000
27	3	MUHIDIN	LAKI-LAKI	3602150209780002	Kp. KADU GULING, RT/RW. 006/002	20.000.000
28	4	SUMANTRI	LAKI-LAKI	3602151408830001	Kp. KOREHEK, RT/RW. 009/003	20.000.000
29	5	SUEB	LAKI-LAKI	3602151212730004	KP. PASIR GADUNG, RT/RW. 010/003	20.000.000
30	6	SUYATNA	LAKI-LAKI	3602151506760001	KP. SINDANG SONO, RT/RW. 002/001	20.000.000
31	7	SUJADRIYATNA	LAKI-LAKI	3602150911580001	KP. SINDANG SONO, RT/RW. 003/001	20.000.000

KECAMATAN : WARUNGGUNUNG

DESA : SUKARAJA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
32	1	ANANI	LAKI-LAKI	3602151906730001	KP. KASO KOBAT, RT/RW. 003/001	20.000.000
33	2	UNARIAH	PEREMPUAN	3602155007650007	KP. PANGASIH PASIR, RT/RW. 014/002	20.000.000
34	3	ABIDIN	LAKI-LAKI	3602151602820004	KP. CILOA, RT/RW. 024/003	20.000.000
35	4	NURHAYATI	PEREMPUAN	3602155407780002	KP. CILOA, RT/RW. 024/002	20.000.000
36	5	AAN WIJAYA	LAKI-LAKI	3602151211790004	KP. KASO CIBODAS, RT/RW. 006/001	20.000.000

KECAMATAN : CIKULUR

DESA : SUKADAYA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
37	1	ROSITA	PEREMPUAN	3602175204650001	Kp. CIBANGKUR KIDUL, RT/RW. 007/001	20.000.000
38	2	RUSLI	LAKI-LAKI	3602172004850002	Kp. CIBANGKUR LOR, RT/RW. 002/001	20.000.000
39	3	SUHERI	LAKI-LAKI	3602171007880012	Kp. CIBANGKUR, RT/RW. 009/002	20.000.000
40	4	JAMSARI	LAKI-LAKI	3602170807820002	Kp. CIBANGKUR, RT/RW. 004/001	20.000.000
41	5	ROHEMAH	PEREMPUAN	3602174303610002	Kp. CIBANGKUR LOR, RT/RW. 002/001	20.000.000

KECAMATAN : CIPANAS

DESA : SUKASARI

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (8 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
42	1	SANTAYA	LAKI-LAKI	3602040101860004	KP. MALANGNENGAH, RT/RW. 003/001	20.000.000
43	2	JAJA	LAKI-LAKI	3602042706730001	KP. MALANGNENGAH, RT/RW. 003/001	20.000.000
44	3	SUHAEMI	PEREMPUAN	3602044611550001	KP. MALANGNENGAH, RT/RW. 002/001	20.000.000
45	4	AAS	PEREMPUAN	3602045210850007	KP. MALANGNENGAH, RT/RW. 002/001	20.000.000
46	5	ISBAMA	LAKI-LAKI	3602041104690001	KP. KIDALKAM, RT/RW. 004/004	20.000.000
47	6	JUNAR	PEREMPUAN	3602047005730002	KP. KIDALKAM, RT/RW. 004/004	20.000.000
48	7	SAWINAH	PEREMPUAN	3602044910690001	KP. CIGEULIS, RT/RW. 004/002	20.000.000
49	8	UKMANAH	PEREMPUAN	3602045104600002	KP. CIGEULIS, RT/RW. 001/005	20.000.000

KECAMATAN : LEBAKGEDONG

DESA : BANJARSARI

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (10 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
50	1	WAWAN CARWAN	LAKI-LAKI	3604191405840003	KP. JAHA, RT/RW. 002/001	20.000.000
51	2	NURJAYA	LAKI-LAKI	3201350107900011	KP. CINYIRU, RT/RW. 003/001	20.000.000
52	3	JAMSUNA	LAKI-LAKI	3602250403740004	KP. CINYIRU, RT/RW. 003/001	20.000.000
53	4	YULIANTI	PEREMPUAN	3602255408930001	KP. CINYIRU, RT/RW. 003/001	20.000.000
54	5	ANO	LAKI-LAKI	3602251806880002	KP. CINYIRU, RT/RW. 003/001	20.000.000
55	6	SUPARMAN	LAKI-LAKI	3602250207890003	KP. CIGOBANG, RT/RW. 002/002	20.000.000
56	7	USMAN	LAKI-LAKI	3602251205550001	KP. CIGOBANG, RT/RW. 004/002	20.000.000
57	8	SARDI	LAKI-LAKI	3602252612820001	KP. CIGOBANG, RT/RW. 003/002	20.000.000
58	9	KIDIL	LAKI-LAKI	3602250611580001	KP. CIGOBANG, RT/RW. 001/002	20.000.000
59	10	SAMANI	LAKI-LAKI	3602111704620001	KP. CIGOBANG, RT/RW. 005/002	20.000.000

KECAMATAN : LEBAKGEDONG

DESA : LEBAKGEDONG

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
60	1	JANA	LAKI-LAKI	3602250412640001	Kp. PASIR GOMBONG, RT/RW. 017/004	20.000.000
61	2	SARPAH	PEREMPUAN	3602254812800001	Kp. PASIR GOMBONG, RT/RW. 017/004	20.000.000
62	3	M. ERWIN NUGRAHA	LAKI-LAKI	3602250507780001	Kp. BOJONG SARUNG, RT/RW. 003/001	20.000.000
63	4	ASAN	LAKI-LAKI	3602251109710002	Kp. BOJONG SARUNG, RT/RW. 007/001	20.000.000
64	5	HADIJAH	PEREMPUAN	3602255402700001	LEBAKGEDONG, RT/RW. 003/001	20.000.000

KECAMATAN : SOBANG

DESA : SINDANGLAYA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (10 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
65	1	YANTO	LAKI-LAKI	3602220705920003	KP. SIGOYOT, RT/RW. 002/001	20.000.000
66	2	SARWA	LAKI-LAKI	3602220101830002	KP. SIGOYOT, RT/RW. 002/001	20.000.000
67	3	SUANDI	LAKI-LAKI	3602221107670002	KP. CILELER, RT/RW. 003/001	20.000.000
68	4	JUHRI	LAKI-LAKI	3602221208930001	KP. SINDANGLAYA, RT/RW. 003/001	20.000.000
69	5	RUNTASA	LAKI-LAKI	3602222702760001	KP. PASIR EURIH, RT/RW. 001/002	20.000.000
70	6	SAPTA	LAKI-LAKI	3602220803730001	KP. SOBANG, RT/RW. 003/005	20.000.000
71	7	MADTOMI	LAKI-LAKI	3602220310730001	KP. SOBANG, RT/RW. 003/005	20.000.000
72	8	ARYANA	LAKI-LAKI	3602220504860007	KP. HEGARSARI, RT/RW. 001/001	20.000.000
73	9	SANGSANG	LAKI-LAKI	3602222209910002	KP. PASIR EURIH, RT/RW. 002/002	20.000.000
74	10	BAYU PERMANA	LAKI-LAKI	3602220811880001	KP. CIBEAS, RT/RW. 003/004	20.000.000

KECAMATAN : MALINGPING

DESA : SUKARAJA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (8 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
75	1	ROHMAN	LAKI-LAKI	3602011607720003	KP. SITUPOTONG, RT/RW. 008/004	20.000.000
76	2	JUHENAH	PEREMPUAN	3602015006590002	SITUPOTONG, RT/RW. 008/004	20.000.000
77	3	SAPRUDIN	LAKI-LAKI	3602011009550001	KP. SITUPOTONG, RT/RW. 008/004	20.000.000
78	4	JAHRI	LAKI-LAKI	3602011506800006	SITUPOTONG, RT/RW. 008/004	20.000.000
79	5	SOLEMAN	LAKI-LAKI	3602010706810001	KP. POLOTOT UTARA, RT/RW. 004/001	20.000.000
80	6	SUMAR	LAKI-LAKI	3602011011690005	SUKALAKSANA, RT/RW. 009/003	20.000.000
81	7	ANDA CAKRA SUGANDA	LAKI-LAKI	3602011712680004	KP. BINGLU, RT/RW. 007/004	20.000.000
82	8	WASJAN	LAKI-LAKI	3602010401750003	SUKALAKSANA, RT/RW. 009/003	20.000.000

KECAMATAN : MALINGPING

DESA : SUMBERWARAS

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
83	1	SUANDI	LAKI-LAKI	3602010304650004	KP. CIEDES, RT/RW. 011/004	20.000.000
84	2	ALINTA	LAKI-LAKI	3602011502650001	KP. CIEDES, RT/RW. 011/004	20.000.000
85	3	JUMAT	LAKI-LAKI	3602010403690003	KP. MALANG NENGAH, RT/RW. 005/002	20.000.000
86	4	FAHRUDIN	LAKI-LAKI	3602011809070001	KP. CIKARATON, RT/RW. 012/004	20.000.000
87	5	ACIP	LAKI-LAKI	3602012106910003	KP. CIKARATON, RT/RW. 012/004	20.000.000

KECAMATAN : GUNUNGKENCANA

DESA : CIAKAR

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
88	1	ARIPUDIN	LAKI-LAKI	3602080408850002	KP. CIBATUR, RT/RW. 013/003	20.000.000
89	2	NURDIN	LAKI-LAKI	3602082501780001	KP. PASIR DANGDER, RT/RW. 007/002	20.000.000
90	3	ENDIL	LAKI-LAKI	3602080204850003	KP. KADU NAKIM, RT/RW. 006/001	20.000.000
91	4	SAMIAN	LAKI-LAKI	3602082004670001	KP. GUNUNG DADAP, RT/RW. 015/003	20.000.000
92	5	ROHANAH	PEREMPUAN	3602084208850001	KP. GUNUNG DADAP, RT/RW. 015/003	20.000.000

KECAMATAN : GUNUNGKENCANA

DESA : CIMANYANGRAY

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
93	1	RENALDI	LAKI-LAKI	3602080501960002	KP. CITEUREUP, RT/RW. 002/002	20.000.000
94	2	IMAT ISNEN ROMDONA	LAKI-LAKI	3602080211960002	KP. CITEUREUP, RT/RW. 001/001	20.000.000
95	3	AMI	PEREMPUAN	3602086003730003	KP. LEUWI KOPO, RT/RW. 010/003	20.000.000
96	4	TATI	PEREMPUAN	3602086107800001	KP. CITEUREUP, RT/RW. 004/001	20.000.000
97	5	ARMIN	LAKI-LAKI	3602081309930001	KP. CITEUREUP, RT/RW. 002/001	20.000.000

KECAMATAN : CIRINTEN

DESA : KADUDAMAS

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
98	1	LILIS	PEREMPUAN	3604274402840093	KP. CILAYANG, RT/RW. 010/005	20.000.000
99	2	RISNA AMINUDIN	LAKI-LAKI	3602270601890002	KP. CILAYANG PASIR, RT/RW. 012/005	20.000.000
100	3	SURYADI	LAKI-LAKI	3602270107770001	KP. CIGINTUNG, RT/RW. 004/002	20.000.000
101	4	RUMSIAH	PEREMPUAN	3602274407500001	KP. CIGINTUNG, RT/RW. 004/002	20.000.000
102	5	SOLEH	LAKI-LAKI	3602271902790003	KP. CILAYANG PASIR, RT/RW. 012/005	20.000.000

KECAMATAN : LEUWIDAMAR

DESA : JALUPANGMULYA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (7 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
103	1	DADI SURAHMAN	LAKI-LAKI	3602060404790001	KP. CARINGIN, RT/RW. 017/004	20.000.000
104	2	ATANG	LAKI-LAKI	3602061106660002	KP. TUMBUK, RT/RW. 006/004	20.000.000
105	3	RAHMAT	LAKI-LAKI	3602061403830002	KP. IMPRES, RT/RW. 015/004	20.000.000
106	4	SITI	PEREMPUAN	3602065306760001	KP. JALUPANG, RT/RW. 012/003	20.000.000
107	5	PULUNG	LAKI-LAKI	3602062810810007	KP. CIGINTUNG, RT/RW. 011/003	20.000.000
108	6	UJANG	LAKI-LAKI	3602061605790001	KP. SUKAMAJU, RT/RW. 006/002	20.000.000
109	7	ENAY	PEREMPUAN	3602064701550002	KP. BABAKAN CIDENGDENG, RT/RW. 001/001	20.000.000

KECAMATAN : BOJONGMANIK

DESA : PASIRBITUNG

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
110	1	SAKUM	LAKI-LAKI	3602072708590001	KP. CIPATAT, RT/RW. 008/003	20.000.000
111	2	JUMAN	LAKI-LAKI	3602070505730001	KP. CIPATAT, RT/RW. 007/003	20.000.000
112	3	PIAH	PEREMPUAN	3602074206890002	KP. CIPATAT, RT/RW. 007/003	20.000.000
113	4	SANTANI	LAKI-LAKI	3602072006750002	KP. PASIR LEUNGSIR, RT/RW. 004/002	20.000.000
114	5	ODIH	LAKI-LAKI	3602070202790002	KP. PASIR LEUNGSIR, RT/RW. 004/002	20.000.000

KECAMATAN : RANGKASBITUNG

DESA : CIMANGEUNTEUNG

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
115	1	SAKIMAN	LAKI-LAKI	3602140106630001	KP. CIHEULANG, RT/RW. 003/001	20.000.000
116	2	JUNAEDI	LAKI-LAKI	3602141405800001	KP. CIPARADA, RT/RW. 007/002	20.000.000
117	3	SUHENDRA	LAKI-LAKI	3602141907890001	KP. CIPARADA, RT/RW. 007/002	20.000.000
118	4	SUEB	LAKI-LAKI	3602141506680001	KP. CIPARADA, RT/RW. 007/002	20.000.000
119	5	UJANG ENDANG SUPRIYADI	LAKI-LAKI	3602141303750003	KP. ANCOL, RT/RW. 013/004	20.000.000

KECAMATAN : MAJA

DESA : SINDANGMULYA

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (10 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
120	1	USIM	LAKI-LAKI	3602132104640003	KP. LEUWI TEUREUP, RT/RW. 003/003	20.000.000
121	2	EHA SULAEHA	PEREMPUAN	3602134711850003	KP. DENGUNG, RT/RW. 002/001	20.000.000
122	3	SAID	LAKI-LAKI	3602132804650001	KP. DENGUNG TIMUR, RT/RW. 003/001	20.000.000
123	4	HJ. SARI	PEREMPUAN	3602134208650001	KP. DENGUNG, RT/RW. 001/001	20.000.000
124	5	SAHRONI	LAKI-LAKI	3602130102730004	KP. CIBUNTU, RT/RW. 001/003	20.000.000
125	6	ADHI	LAKI-LAKI	3602131707680002	KP. DENGUNG, RT/RW. 002/001	20.000.000
126	7	JUMRI	LAKI-LAKI	3602132007890003	KP. CIBUNTU, RT/RW. 001/003	20.000.000
127	8	EMAH	PEREMPUAN	3602135203560001	KP. CIJALUR, RT/RW. 002/002	20.000.000
128	9	ISNAH	PEREMPUAN	3602134603800002	KP. CIBUNTU, RT/RW. 001/003	20.000.000
129	10	MURTASIAH	PEREMPUAN	3602135203700002	KP. BABAKAN MADANG, RT/RW. 006/003	20.000.000

KECAMATAN : BANJARSARI

DESA : GUNUNGSARI

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (8 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
130	1	NURJANAH	PEREMPUAN	3602094207850007	KP. CICADAS, RT/RW. 002/002	20.000.000
131	2	ASROP	LAKI-LAKI	3602090801820002	KP. CICADAS, RT/RW. 001/002	20.000.000
132	3	WARSAN	LAKI-LAKI	3602090905740002	KP. CICADAS, RT/RW. 001/002	20.000.000
133	4	SARMANAH	PEREMPUAN	3602094307690002	KP. PASIR AWI BEAS, RT/RW. 003/003	20.000.000
134	5	ENDANG	LAKI-LAKI	3602052010860001	KP. CICADAS, RT/RW. 002/002	20.000.000
135	6	SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	3602090605810001	KP. CICADAS, RT/RW. 002/002	20.000.000
136	7	IDIK MARSIDIK	LAKI-LAKI	3602090405810002	KP. PASIR AWI BEAS, RT/RW. 002/003	20.000.000
137	8	NATI	PEREMPUAN	3602095110880007	KP. PASIR BEAS, RT/RW. 002/003	20.000.000

KECAMATAN : CILELES

DESA : CIPADANG

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (7 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
138	1	YANA MULYANA	LAKI-LAKI	3602100305890003	KP. BANGKANANG, RT/RW. 006/002	20.000.000
139	2	ADE	LAKI-LAKI	3602100107750021	KP. BANGKANANG, RT/RW. 006/002	20.000.000
140	3	ARDI HERYANTO	LAKI-LAKI	3602100406750005	KP. PAMATANG WARU, RT/RW. 002/003	20.000.000
141	4	JUHAMAD	LAKI-LAKI	3602100203920002	CIAWI, RT/RW. 001/005	20.000.000
142	5	KARTANI	LAKI-LAKI	3602101712650002	KP. CANGKEUTEUK REBAH, RT/RW. 001/004	20.000.000
143	6	ATANG	LAKI-LAKI	3602100503710002	KP. MARGAWANA, RT/RW. 003/004	20.000.000
144	7	ONGGE SAEFUL	LAKI-LAKI	3602101606640002	KP. CINANGGUNG, RT/RW. 002/002	20.000.000

KECAMATAN : CILELES

DESA : PRABUGANTUNGAN

LOKASI : APBD TAHUN 2024 (5 PENERIMA)

NO URUT	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT	BESAR BANTUAN (Rp)
145	1	JUANTA	LAKI-LAKI	3602100306760002	KP. KOPI, RT/RW. 001/001	20.000.000
146	2	KAMSARI	LAKI-LAKI	3602100107770001	KP. KADU BEUREUM, RT/RW. 006/001	20.000.000
147	3	H. TARIMAN	LAKI-LAKI	3602101209540001	KP. TALAGA, RT/RW. 002/002	20.000.000
148	4	USUP	LAKI-LAKI	3602100509740002	KP. KADU CIKUR, RT/RW. 005/003	20.000.000
149	5	SUNJANA	LAKI-LAKI	3602100107690001	KP. KADU HUNI, RT/RW. 002/004	20.000.000

PJ BUPATI LEBAK,

IWAN KURNIAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAMPIRAN III

"ASURANSI KENDARAAN"

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/496-BKAD/SP/2024, 10 JULI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
Jabatan : PPK
Alamat : Jl. RT. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : PT. Bumiputera Muda 1967
yang dalam hal ini diwakili oleh : Subhi Nur Fuadi
Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

Daftar Produk PAKET OE7-P2407-9771201

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
71331-OE7-207888119 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA KIJANG INNOVA - 2008	1.0	IDR	475.653,79	-	17 Juli 2024	475.653,79
71331-OE7-207888516 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA / TGN 40 R - 2008	1.0	IDR	511.826,38	-	17 Juli 2024	511.826,38
71331-OE7-207868150 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - DAIHATSU XENIA 2010	2.0	IDR	339.490,75	-	17 Juli 2024	678.981,50
71331-OE7-207875875 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - DAIHATSU XENIA TAHUN 2010	1.0	IDR	297.236,42	-	17 Juli 2024	297.236,42
				-		

71331-OE7-207884901 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - RANGER DOUBLE CAB (4X2) FORD 2010	1.0	IDR	1.896.955,20		17 Juli 2024	1.896.955,20
71331-OE7-207864942 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI L300 2011	1.0	IDR	1.015.758,18	-	17 Juli 2024	1.015.758,18
71331-OE7-207866531 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - SUZUKI FUTURA 2011	1.0	IDR	1.241.731,81	-	17 Juli 2024	1.241.731,81
71331-OE7-207883773 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI STRADA GLX 2011	1.0	IDR	2.644.888,76	-	17 Juli 2024	2.644.888,76
71331-OE7-207886269 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - RANGER DC 2.5 L4 X4 MT 2011	1.0	IDR	2.322.03849	-	17 Juli 2024	2.322.038,49
71331-OE7-207891287 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - FORD RANGER DC 2.5 L 4X4 MT 2011	1.0	IDR	1.730.393,28	-	17 Juli 2024	1.730.393,28
71331-OE7-207859379 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 2012	1.0	IDR	1.741.579,72	-	17 Juli 2024	1.741.579,72
71331-OE7-207884768 Asuransi Kendaraan Bermotor -TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT 2012	1.0	IDR	425.797,06	-	17 Juli 2024	425.797,06
71331-OE7-207877011 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - AVANZA VELOZ 1.5 MT 2012	1.0	IDR	266.669,34	-	17 Juli 2024	266.669,34
71331-OE7-207876962 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT (2012)	1.0	IDR	327.802,55	-	17 Juli 2024	327.802,55
71331-OE7-207889354	1.0	IDR	312.519,01	-	17 Juli 2024	312.519,01

Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T 2012						
71331-OE7-207890805 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI STRADA DOUBLE CABIN 2012	1.0	IDR	3.911.455,22	-	17 Juli 2024	3.911.455,22
71331-OE7-207886972 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - VELOZ 5 SPEED M/T 2019	5.0	IDR	371.855,50	-	17 Juli 2024	1.859.277,50
71331-OE7-207877380 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH 1,5 G M/T (2013)	1.0	IDR	584.855,53	-	17 Juli 2024	584.855,53
71331-OE7-207869727 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA 2013	1.0	IDR	609.197,64	-	17 Juli 2024	609.197,64
71331-OE7-207886040 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX 2.0 M/T 2013	1.0	IDR	297.235,47	-	17 Juli 2024	297.235,47
71331-OE7-207886695 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - HILUX PICKUP M/T 2013	2.0	IDR	533.680,20	-	17 Juli 2024	1.067.360,40
71331-OE7-207878346 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX 2.5 G DC (4X4) M/T (2014)	1.0	IDR	1.966.356,00	-	17 Juli 2024	1.966.356,00
71331-OE7-207880840 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - HILUX DOUBLE CABIN (4X4) 2014	2.0	IDR	2.477.608,56	-	17 Juli 2024	4.955.217,12
71331-OE7-207881562 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA 2014	1.0	IDR	398.107,21	-	17 Juli 2024	398.107,21
71331-OE7-207887629 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - STRADA TRITON (4X4) M/P 2014	1.0	IDR	2.902.548,12	-	17 Juli 2024	2.902.548,12
71331-OE7-207890154	28.0	IDR	533.680,20	-	17 Juli 2024	14.943.045,60

	Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - ISUZU PANTHER - TBR 54F TURBO IM 2014						
	71331-OE7-207886911 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T - 2014	1.0	IDR	388.936,71	-	17 Juli 2024	388.936,71
	71331-OE7-207864905 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA (2015)	1.0	IDR	534.952,33	-	17 Juli 2024	534.952,33
	71331-OE7-207873303 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW RUSH (2015)	1.0	IDR	297.236,42	-	17 Juli 2024	297.236,42
	71331-OE7-207873966 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI TRITON 2.5L DC (2015)	1.0	IDR	3.060.868,92	-	17 Juli 2024	3.060.868,92
	71331-OE7-207875243 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - SUZUKI APV (2015)	1.0	IDR	275.839,85	-	17 Juli 2024	275.839,85
	71331-OE7-207877667 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA G M/T 2015	4.0	IDR	297.236,42	-	17 Juli 2024	1.188.945,68
	71331-OE7-207880165 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA G M/T 2015	2.0	IDR	364.483,61	-	17 Juli 2024	728.967,22
	71331-OE7-207885553 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T (2015)	4.0	IDR	400.457,94	-	17 Juli 2024	1.601.831,76
	71331-OE7-207858137 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA VELOZ 2016	1.0	IDR	3.112.652,90	-	17 Juli 2024	3.112.652,90
	71331-OE7-207863303 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2016	1.0	IDR	3.621.874,46	-	17 Juli 2024	3.621.874,46

71331-OE7-207865863 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T (2016)	2.0	IDR	522.892,27	-	17 Juli 2024	1.045.784,54
71331-OE7-207876466 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T (2016)	1.0	IDR	584.855,53	-	17 Juli 2024	584.855,53
71331-OE7-207888588 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA G 2016	4.0	IDR	548.341,43	-	17 Juli 2024	2.193.365,72
71331-OE7-207878675 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO 2016	1.0	IDR	859.265,78	-	17 Juli 2024	859.265,78
71331-OE7-207879298 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016	1.0	IDR	827.730,14	-	17 Juli 2024	827.730,14
71331-OE7-207891129 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - VELOZ 2016	1.0	IDR	353.874,97	-	17 Juli 2024	353.874,97
71331-OE7-207887298 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA E A/T 2016	1.0	IDR	479.738,63	-	17 Juli 2024	479.738,63
71331-OE7-207887978 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA G A/T 2016	1.0	IDR	483.806,40	-	17 Juli 2024	483.806,40
71331-OE7-207879258 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - SUZUKI CARRY PICK UP GC 415 T (4X2) M/T (2016)	2.0	IDR	1.110.412,80	-	17 Juli 2024	2.220.825,60
71331-OE7-207860434 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 (2017)	4.0	IDR	3.159.737,70	-	17 Juli 2024	12.638.950,80
71331-OE7-207861551	1.0	IDR	4.022.958,36	-	17 Juli 2024	4.022.958,36

Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA VENTURER 2.0 (2017)						
71331-OE7-207856023 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2017	1.0	IDR	6.982.174,79	-	17 Juli 2024	6.982.174,79
71331-OE7-208972336 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN TAHUN 2017	1.0	IDR	7.527.088,36	-	17 Juli 2024	7.527.088,36
71331-OE7-207860775 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA VELOZ 2017	1.0	IDR	2.682.247,35	-	17 Juli 2024	2.682.247,35
71331-OE7-207872536 ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR - VELOZ 1.5 2017	2.0	IDR	3.473.636,04	-	17 Juli 2024	6.947.272,08
71331-OE7-207862340 ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR - KIJANG INNOVA 2017	1.0	IDR	3.650.864,76	-	17 Juli 2024	3.650.864,76
71331-OE7-207875976 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - SUZUKI CARRY / GC 415 T (4 X 2) M/T (2017)	1.0	IDR	1.947.057,04	-	17 Juli 2024	1.947.057,04
71331-OE7-207877800 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HI ACE COMMUTER (2017)	1.0	IDR	775.172,64	-	17 Juli 2024	775.172,64
71331-OE7-207878822 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - SUZUKI GC 415V APV SDX MT (2017)	1.0	IDR	645.712,69	-	17 Juli 2024	645.712,69
71331-OE7-207881740 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - ISUZU NKR55 CO E2-1 (2017)	1.0	IDR	4.532.321,12	-	17 Juli 2024	4.532.321,12
71331-OE7-207883592	1.0	IDR	3.192.436,80	-	17 Juli 2024	3.192.436,80

Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - ISUZU TBR 54 PICK UP TURBO (2017)						
71331-OE7-207884033 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - DAIHATSU LUXIO 1.5 X M/T (2017)	1.0	IDR	414.455,12	-	17 Juli 2024	414.455,12
71331-OE7-207885674 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T 2017	1.0	IDR	432.988,70	-	17 Juli 2024	432.988,70
71331-OE7-207853951 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - DAIHATSU TERIOS 1.5 R 2018	1.0	IDR	3.851.901,49	-	17 Juli 2024	3.851.901,49
71331-OE7-207852457 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 2019	2.0	IDR	4.022.957,41	-	17 Juli 2024	8.045.914,82
71331-OE7-207858963 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL (2019)	3.0	IDR	5.448.433,21	-	17 Juli 2024	16.345.299,63
71331-OE7-207848706 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - APV 4.3 - 1.5 MT 2019	1.0	IDR	3.395.160,74	-	17 Juli 2024	3.395.160,74
71331-OE7-207845932 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA 2019	2.0	IDR	4.790.069,46	-	17 Juli 2024	9.580.138,92
71331-OE7-207850963 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH G 2019	1.0	IDR	4.119.949,21	-	17 Juli 2024	4.119.949,21
71331-OE7-207879792 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DC 2019	1.0	IDR	7.345.450,50	-	17 Juli 2024	7.345.450,50
71331-OE7-207881060 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G M/T DIESEL 2019	1.0	IDR	8.344.458,71	-	17 Juli 2024	8.344.458,71
71331-OE7-	1.0	IDR	3.557.802,22	-	17 Juli	

207881937 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA VELOZ 2019					2024	3.557.802,22
71331-OE7-207861535 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - INNOVA 2.0 V M/T 2019	2.0	IDR	4.790.069,46	-	17 Juli 2024	9.580.138,92
71331-OE7-207875864 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH 1.5 8 M/T 2019	1.0	IDR	4.119.949,21	-	17 Juli 2024	4.119.949,21
71331-OE7-207852540 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T (2019)	1.0	IDR	4.022.958,36	-	17 Juli 2024	4.022.958,36
71331-OE7-207877066 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI TRITON 2020	1.0	IDR	7.795.306,93	-	17 Juli 2024	7.795.306,93
71331-OE7-207844659 Asuransi Kendaraan Bermotor - MITSUBISHI TRITON DC (4X4) M/T 2021	1.0	IDR	11.728.977,42	-	17 Juli 2024	11.728.977,42
71331-OE7-207870196 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 MITSUBISHI TRITON 2.4L (4X4) M/T 4 WD 2021	1.0	IDR	8.371.886,03	-	17 Juli 2024	8.371.886,03
71331-OE7-207871543 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI XPANDER EXCEED 2021	1.0	IDR	4.043.518,24	-	17 Juli 2024	4.043.518,24
71331-OE7-207873318 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBHISI TRITON DC GLS (4X4) M/T 2021	1.0	IDR	8.077.632,70	-	17 Juli 2024	8.077.632,70
71331-OE7-207874724 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TRITON 2.4 GL DC GLS (4X4) M/T 2021	1.0	IDR	8.457.255,82	-	17 Juli 2024	8.457.255,82
71331-OE7-207847233	1.0	IDR	7.283.010,95	-	17 Juli 2024	7.283.010,95

Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V AT (2022)						
71331-OE7-207848811 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T (2022)	1.0	IDR	8.929.187,30	-	17 Juli 2024	8.929.187,30
71331-OE7-207854470 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - Toyota Landcruiser Prado (2022)	1.0	IDR	19.232.923,74	-	17 Juli 2024	19.232.923,74
71331-OE7-207855544 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL (2022)	1.0	IDR	4.667.540,27	-	17 Juli 2024	4.667.540,27
71331-OE7-207838558 Asuransi Kendaraan Bermotor - NISSAN LIVINA VE 1.5 A/T 2022	1.0	IDR	4.075.273,96	-	17 Juli 2024	4.075.273,96
71331-OE7-207853598 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - Ford Ranger XLT 2.2L (4X4) A/T DOUBLE CABIN 2022	1.0	IDR	12.007.224,42	-	17 Juli 2024	12.007.224,42
71331-OE7-207864012 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH 1.5 M/T 2022	1.0	IDR	4.139.457,04	-	17 Juli 2024	4.139.457,04
71331-OE7-207867295 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T 2022	1.0	IDR	9.455.940,02	-	17 Juli 2024	9.455.940,02
71331-OE7-207838013 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 GLX (4X4) M/T (2023)	1.0	IDR	5.255.495,96	-	17 Juli 2024	5.255.495,96
71331-OE7-207840920 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (2023)	1.0	IDR	4.964.535,74	-	17 Juli 2024	4.964.535,74
71331-OE7-	1.0	IDR		-	17 Juli	

207835469 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA ZENIX / 10R-BRXLBD 2.0 Q HV CVT TSS (2024)			5.727.322,93		2024	5.727.322,93
71331-OE7-207828974 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA INNOVA ZENIX / MAGA 10R-BRXLBD 2.0 CVT	1.0	IDR	4.964.535,74	-	17 Juli 2024	4.964.535,74
71331-OE7-207858224 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - RUSH 1.5 S M/T GR SPORT 2022	1.0	IDR	4.139.457,04	-	17 Juli 2024	4.139.457,04
71331-OE7-207823297 Asuransi Kendaraan Bermotor - Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport 2022	3.0	IDR	4.284.461,41	-	17 Juli 2024	12.853.384,23
71331-OE7-207882873 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH 1.5 G M/T 2019	1.0	IDR	4.790.069,46	-	17 Juli 2024	4.790.069,46
71331-OE7-207823272 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA RUSH 2017	1.0	IDR	3.081.262,41	-	17 Juli 2024	3.081.262,41
71331-OE7-207871688 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 2017	1.0	IDR	3.159.737,70	-	17 Juli 2024	3.159.737,70
71331-OE7-207863080 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX DC (2015)	1.0	IDR	1.927.028,88	-	17 Juli 2024	1.927.028,88
71331-OE7-207890171 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - KIJANG INNOVA G 2015	1.0	IDR	475.312,28	-	17 Juli 2024	475.312,28
71331-OE7-207891849 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA HILUX (4X4) M/T 2015	1.0	IDR	3.166.416,13	-	17 Juli 2024	3.166.416,13
71331-OE7-207886286 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 A/T (2015)	1.0	IDR	242.215,30	-	17 Juli 2024	242.215,30

71331-OE7-207881955 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - STRADA PICK UP 2011	1.0	IDR	2.163.717,69	-	17 Juli 2024	2.163.717,69
71331-OE7-207873272 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW AVANZA 1.5 VELOZ 2017	1.0	IDR	3.379.466,44	-	17 Juli 2024	3.379.466,44
71331-OE7-207887277 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T (2016)	1.0	IDR	475.312,28	-	17 Juli 2024	475.312,28
71331-OE7-207883469 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - DAIHATSU LUXIO 2019	1.0	IDR	3.316.686,39	-	17 Juli 2024	3.316.686,39

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Empat Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2) Penyedia memiliki kewajiban:
         a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
            d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

   b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
      1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
         a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
         b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 2 (dua) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. RT. Hardiwinangun No 7 Rangkabitunng

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada paling lambat tanggal 17 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

6. Harga
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
      2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
    b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
    a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
    b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
    b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
    d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
    a. pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan;
        2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
    d. Pembayaran di lakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank atas nama

14. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
        2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
    b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
        1) peringatan tertulis;
        2) denda; dan
        3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
            a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
            b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
    c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
        Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
    a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
        1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
            a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
            b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
            c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan

50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
    SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
    (Masa Pertanggungan Kendaraan menyesuaikan dengan periode kontrak sebelumnya sedangkan untuk kendaraan baru sesuai tanggal kontrak sebagaimana data terlampir).

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967 METERAI TEMPEL 5A3A2ALX247607215 SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG)

Nomor 027/497-BKAD/SPK/2024
Tanggal 10 Juli 2024

D a r i

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

K e p a d a

PT. Bumiputera Muda 1967
SELAKU PENYEDIA BARANG

Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pekerjaan
Pengadaan Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0052

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Nilai Kontrak

Rp. 394.293.755.64

(Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Empat Rupiah)

Waktu Pelaksanaan :
1 (satu) Tahun
Periode Tahun 2024 s s.d 2025

Sumber Dana
APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor 027/ 498 -BKAD/SPMK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Rt. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/498-BKAD/SPK/2023 Tanggal 10 Juli 2024, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : Subhi Nur Fuadi
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: 10 Juli 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waku penyelesaian : 1 (satu) Tahun
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Rangkasbitung, 10 Juli 2024

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 027/498-BKAD/SPMK//2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
PAKET PEKERJAAN : ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4
KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2024
MASA PERTANGGUNGAN : 1 TAHUN

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
1	TOYOTA/MAGA 10R- BRXLBD 2.0 CVT	A 1369 N	2024	343.400.000,00	MHFAAAAA0R0026873	M20ANB65893	ALL RISK	4.964.535,74	Disnaker	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
2	TOYOTA/MAGH 10R- BRXLBD 2.0 Q HV CVT TSS	A 1367 N	2024	523.175.000,00	MHFABBAA6R0418890	M20ANB69650	ALL RISK	5.727.322,93	Dinas Pendidikan	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
3	MITSUBISHI PAJERO Sport 2.5 GLX (4X4) 5 M/T	A 1328 N	2023	479.315.000,00	MK2KSWMDNPJOOO284	4D56UBK2244	ALL RISK	5.255.495,96	PUPR/Setda	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
4	TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT	A 1350 N	2023	452.268.000,00	MHFAAAAA9P0006618	M20ANA23983	ALL RISK	4.964.535,74	DP3KBP3A	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
5	Innova Zenix, Matic, type V, 2.0 CC, MVP	A 1326 N	2022	392.816.620,00	MHFAAAAA0N0003460	M20ANA11044	ALL RISK	7.283.010,95	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
6	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T	A 8135 N	2022	368.876.880,00	MROKB8CD1N1138357	2GD12955O8	ALL RISK	8.929.187,30	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
7	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1269 N	2019	191.250.000,00	MHKM5FB4JKK027306	2NRF956889	ALL RISK	4.022.957,41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
8	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1271 N	2019	191.250.000,00	MHKM5PB4JKK027323	2NRF957303	ALL RISK	4.022.957,41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
9	Toyota Landcruiser Prado 70 th	A 1322 N	2022	1.844.500.000,00	TRJ1500141966	2TR2452392	ALL RISK	19.232.923,74	Setda	14 Juli 2024 s.d 14
10	INOVA VENTURER 2.4 A/T DISEL	A 1303 N	2022	424.660.000,00	MHFAB3EM7N0026070	2GDD019369	ALL RISK	4.667.540,27	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
11	NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2019	A 1260 N	2019	497.250.000,00	MHFHB3FS0K0036303	2GDC615963	ALL RISK	5.448.433,21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
12	NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2019	A 9 N/A1088 QZ	2019	497.250.000,00	MMBGUKR10GHC234D8	4N15UAR6009	ALL RISK	5.448.433,21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
13	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2018	A 1243 N	2019	497.250.000,00	MHFGB8GS9J0880460	2GDC414948	ALL RISK	5.448.433,21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
14	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1196 N	2017	149.175.000,00	MHKM5FA4JHK031779	1NRF616388	ALL RISK	3.159.737,70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
15	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1197 N	2017	149.175.000,00	MHKM5FA4JHK032832	2NRF620392	ALL RISK	3.159.737,70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
16	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1198 N	2017	149.175.000,00	MHKM5FA4JHK032688	2NRF619834	ALL RISK	3.159.737,70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
17	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1201 N	2017	149.175.000,00	MHKM5FA4JHK031825	2NRF616368	ALL RISK	3.159.737,70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
18	TOYOTA INOVA VENTURER 2.0	A 1202 N	2017	191.250.000,00	MHFAW8EM3H0208368	1TRA381144	ALL RISK	4.022.958,36	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
19	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1320 N	2022	238.876.605,00	MHKE8FB3JNK075965	2NRG929756	ALL RISK	4.284.461,41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
20	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1319 N	2022	238.876.605,00	MHKE8FB3JNK075886	2NRG929264	ALL RISK	4.284.461,41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
21	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1318 N	2022	238.890.290,00	MHKE8FB3JNK075906	2NRG929468	ALL RISK	4.284.461,41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
22	NISSAN LIVINA VE 1.5 (4X2) A/T	A 1327 N	2022	226.950.000,00	MK2NDWHARNJ000408	4A91KAQ0104	ALL RISK	4.075.273,96	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
23	MITSUBISHI TRITON DC (4X4) M/T	A 8121 N	2021	486.795.000,00	MMBJJKL 10MH-038890	4N15UHL-6887	ALL RISK	11.728.977,42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
24	APV 4.3 - 1.5 EUA GL AB MT	A 9945 O	2019	160.650.000,00	MHYGDN42VKJ402565	G15AID434738	ALL RISK	3.395.160,74	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
25	Ford Ranger XLT DBL 2.2L (4X4) A/T DOUBLE CABIN	A 8134 N	2022	498.513.865,00	MNBUMFF80NW220480	P4AT4305187	ALL RISK	12.007.224,42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
26	RUSH 1,5 S M/T GR SPORT	A 1324 N	2022	230.613.500,00	MHKE8FA3JNK086837	2NRG919192	ALL RISK	4.139.457,04	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
27	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1272 N	2019	267.750.000,00	MHFGW8EM5K1029227	1TRA703515	ALL RISK	4.790.069,46	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
28	TOYOTA / RUSH 1.5 M/T (F800RE-GMGFJ)	A 1321 N	2022	230.613.500,00	MHKE8FA3JNKD85770	2NRG910769	ALL RISK	4.139.457,04	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
29	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL	A 8126 N	2022	391.062.004,10	MR0KB8CD5N113113 6	2GD51170205	ALL RISK	9.455.940,02	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
30	MITSUBISHI TRITON 2.4L DC GLS (4X4)	A 8124 N	2021	345.405.150,00	MMBJJKL10MH042129	4N15UHS5211	ALL RISK	8.371.886,03	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
31	MITSUBISHI XPENDER/ EXCEED	A 1299 N	2021	192.252.150,00	MK2NCLHANMJ002658	4A91KAJ4638	ALL RISK	4.043.518,24	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
32	MITSUBHISI / TRITON DC GLS (4X4) M/T	A 8123 N	2021	333.012.150,00	MMBJJKL10MH041951	4N15UHR8035	ALL RISK	8.077.632,70	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
33	MITSUBISHI / TRITON 2.4 GL DC GLS	A 8125 N	2021	349.000.650,00	MMBJJKL10MH042222	4N15UHS5376	ALL RISK	8.457.255,82	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
34	TOYOTA RUSH 1.5 8 M/T	A 1270 N	2019	229.500.000,00	MHKE8FA2JKK008703	2NRF956737	ALL RISK	4.119.949,21	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
35	MITSUBISHI NEW TRITON/	A 8117 N	2020	321.121.500,00	MMBJJKLIOKH060287	4HI5UGK4590	ALL RISK	7.795.306,93	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
36	DAIHATSU/LUXIO	B 1754 PQT	2019	156.825.000,00	MHKW3CA3JJK022142	3SZDGS2344	ALL RISK	3.316.686,39	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
37	TOYOTA / HILUX DC	A 8107 N	2019	302.175.000,00	MROEW8BB3K0208749	1TR-A659115	ALL RISK	7.345.450,50	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
38	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G	A 8104 N	2019	344.250.000,00	MR0KB8CB9K1122788	2GD-0734455	ALL RISK	8.344.458,71	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
39	TOYOTA AVANZA VELOZ	A 1266 N	2019	168.300.000,00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	ALL RISK	3.557.802,22	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
40	TOYOTA ALL NEW RUSH 1.5 G M/T VIN	A 1264 N	2019	267.750.000,00	MHKE8FA2JKK008278	2NRF922877	ALL RISK	4.790.069,46	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
41	TOYOTA RUSH 1.5 G A/T	A 1106 N	2017	145.350.000,00	MHFE2CK2JHK012674	3SZDGK5451	ALL RISK	3.081.262,41	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
42	NEW KIJANG INOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1261 N	2019	267.750.000,00	MHFGW8EMOK1028406	ITRA682532	ALL RISK	4.790.069,46	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
43	KIJANG INNOVA 2.0 MT	A 1263 N	2019	267.750.000,00	MHFGW8EMOK1028566	1TRA685307	ALL RISK	4.790.069,46	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
44	RUSH G 1,5 GM/T (F800RE-GMMFJ)	A 1268 N	2019	229.500.000,00	MHKE8FA2KK008579	2NRF949436	ALL RISK	4.119.949,21	Badan Kesbangpol	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
45	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T VIN 2019. WARNA PUTIH.	A 1267 N	2019	191.250.000,00	MHF11KF7030039586	7K0575252	ALL RISK	4.022.958,36	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
46	DAIHATSU TERIOS 9F800RG-GQMFJ)1,5 R A/T	A 1224 N	2018	214.200.000,00	MHKG8FB2J JK005356	2NRF730545	ALL RISK	3.851.901,49	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
47	TOYOTA KIJANG INOVA/ 2.0 VM/T	A 1262 N	2019	267.750.000,00	MHFGW8EM5K10284 96	1TRA681579	ALL RISK	4.790.069,46	Dispusker	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
48	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T	A 8180 N	2017	286.875.000,00	MHCTBR54BCK16422 5	E164225	ALL RISK	6.982.174,79	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
49	TOYOTA / DOUBLE CABIN	A 8159 N	2017	309.825.000,00	MR0DS8CDXH026289 0	2KDU972425	ALL RISK	7.527.088,36	Dinkop	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
50	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ	A 1003 N	2016	146.880.000,00	MHKM5FB4JGK00474 5	2NRF532766	ALL RISK	3.112.652,90	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
51	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ	A 1139 P/A1074 N	2012	61.773.750,00	MHKM1CB4JEK03390 3	DEM1205	ALL RISK	1.741.579,72	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
52	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1172 N	2017	97.155.000,00	MHKM5FA4JHKO2893 6	2NRF605096	ALL RISK	2.682.247,35	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
53	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM	A 1176 N	2017	149.175.000,00	MHKM5FA4ZHK02926 3	2NRF606619	ALL RISK	3.159.737,70	Setda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
54	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM	A 1175 N	2017	164.475.000,00	MHKM5FA4ZHK02917 0	2NRF606137	ALL RISK	3.473.636,04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
55	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM	A 1178 N	2017	164.475.000,00	MHKM5FA4ZHK02916 7	2NRF606140	ALL RISK	3.473.636,04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
56	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T TGN 40QA/T10M	A 1104 N	2017	202.725.000,00	MHFAW8EM0H020797 1	1TR A357299	ALL RISK	3.650.864,76	Bapenda	09 November 2024 s.d.
57	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1105 N	2017	159.885.000,00	MHKM5FB4JHK01471 7	2NRF620621	ALL RISK	3.379.466,44	BKAD	09 November 2024 s.d.
58	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	A 8566 P/A8050 N	2016	145.350.000,00	MR0DS8CD1G026156 2	2KD U875733	ALL RISK	3.621.874,46	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
59	MITSUBISHI L300 BC-R (4X2)	A 1144 P/A 1018 N	2012	86.400.000,00	MHMLOWV39CK0068 99	4D56CH27577	TLO	1.015.758,18	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
60	SUZUKI FUTURA ST 150	A 1036 P /A1145 N	2011	72.000.000,00	MHYESL415BJ512787	G15AID801180	TLO	1.241.731,81	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
61	TOYOTA HILUX DC	A 8910 R	2015	149.940.000,00	MR0FR2GXF0798751	2KDU724407	TLO	1.927.028,88	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
62	TOYOTA INOVA	A 1202 P/ A 17 N	2015	165.240.000,00	MHFXW43G2F409558 3	1TR8867029	TLO	534.952,33	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
63	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1205 P/ A1068 N	2016	109.440.000,00	MHKM5FA4JGKO1145 6	2NRF539586	TLO	522.892,27	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
64	TOYOTA NEW RUSH	A 1132 P/ A1164 N	2015	64.260.000,00	MHFE2CK2JFK009875	3SZDFL4932	TLO	297.236,42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
65	MITSUBISHI TRITON 2.5L DC	A 8564 P	2015	177.480.000,00	MHKM5FA4JKK06054 3	2NRF945648	TLO	3.060.868,92	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
66	SUZUKI/ APV	A 8556 P	2015	59.976.000,00	MHYGDN41TF	GI5AID353685	TLO	275.839,85	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14
67	SUZUKI/GC 415 T (4 X 2) M/T	A 8158 N	2017	140.400.000,00	MHYGDN41THJ44198 4	G15A1D402423	TLO	1.947.057,04	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
68	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T	A 1042 N	2016	180.000.000,00	MHFAW8EMAG02044 39	1TRA208285	TLO	584.855,53	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
69	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ	A 1140 P	2012	70.380.000,00	MHFXW42G6A215913 1	1TR6913764	TLO	312.519,01	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
70	TOYOTA KF 70 RUSH 1,5G M/T	A 1156 P	2013	180.000.000,00	MHFE2CJ2JDK041235	3SZ-DDZ9159	TLO	584.855,53	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
71	TOYOTA HI ACE COMMUTER	A 7011 N	2017	273.600.000,00	JTFSS22P3H0169036	2KD A951990	TLO	775.172,64	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
72	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8202 P/A8156 N	2014	153.000.000,00	MROFR22GXE078598	2KDS392040	TLO	1.966.356,00	Dinas Perkimtan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
73	SUZUKI/GC415V APV SDX MT	A 1108 N	2017	198.000.000,00	MHYGDN42VHJ41272 6	G15AID 406995	TLO	645.712,69	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
74	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8041 N	2016	86.400.000,00	MHYGDN41TGJ43197 5	G15AID388941	TLO	1.110.412,80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
75	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8042 N	2016	86.400.000,00	MHYGDN41TGJ43172 4	G15AID388922	TLO	1.110.412,80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
76	ISUZU/ NKR55 CO E2-1	A 7012 N	2017	262.800.000,00	MHCNKR55EHJ07369 3	M073693	TLO	4.532.321,12	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
77	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	A 8155 N	2017	248.400.000,00	MHCTBR54FHK17694 2	E176942	TLO	3.192.436,80	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
78	DAIHATSU / LUXIO 1.5 X M/T	A 1070 N	2017	129.600.000,00	MHKW3CA3JHK01766 5	3SZDGD5173	TLO	414.455,12	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
79	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1032 P	2010	72.720.000,00	MHKV1AA2JAK08016 2	DP24070	TLO	339.490,75	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
80	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ	A 1141 P/A1093 N	2012	90.000.000,00	MHKM1CA4JCK00361 0	DCN5276	TLO	425.797,06	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
81	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1033 P/ A1046 N	2010	72.720.000,00	MHKV 1AA2JAK080060	DP23865	TLO	339.490,75	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
82	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 1157 P/ A1229 N	2013	187.200.000,00	MHMXSXW40GD4502 36/ MHFXW40G4D450523 6	1 TR-7664722	TLO	609.197,64	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
83	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1211 P	2016	109.440.000,00	MHKM5FA4JGK01495 8	2NRF549181	TLO	522.892,27	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
84	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T	A 1007 N	2016	169.200.000,00	MHFAW8EM5G02032 83	1TRA111610	TLO	548.341,43	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
85	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1031 P/A1020 N	2010	64.260.000,00	MHKV1AA2JAK.08022 5	DP24102	TLO	297.236,42	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
86	TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.0 V A/T	A 1204 P / A1069 N	2016	169.200.000,00	MHFG EM8G1002730	1TR A057301	TLO	548.341,43	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
87	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ	A 1138 P/A1073 N	2012	58.140.000,00	MHKM1CA4JCKOO36 49	DCN3434	TLO	327.802,55	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
88	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1130 P/ A1132 N	2015	64.260.000,00	MHFXW42G1 F2302283	1TR 7923386	TLO	297.236,42	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
89	MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L	A 1120 P/A 1051 N	2016	302.400.000,00	MHBF3CG3FFJ-001461	MR20-635504B	TLO	859.265,78	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
90	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1125 P/A6 N	2015	64.260.000,00	MHFWX42G6 F2305115	1TR 7955712	TLO	297.236,42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
91	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1128 P/A8 N	2015	64.260.000,00	MHFXW42G2 F2302454	1TR 7925012	TLO	297.236,42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
92	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1126 P/ A1005 N	2015	64.260.000,00	MHFXW42G4 F2305291	1TR 7957357	TLO	297.236,42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
93	MITSUBISHI / PAJERO SPORT	A 1124 P/ A 1048 N	2016	291.600.000,00	MHBF3CG3FFJ-001463	MR20-634497B	TLO	827.730,14	Dinas Pertanian	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
94	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1127 P/A1131 N	2015	77.724.000,00	MHFXW42G XF2306364	1TR 7967874	TLO	364.483,61	Dinas Pariwisata	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
95	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1131 PA1134 N	2015	77.724.000,00	MHFXW42G2 F2303927	1TR 7942349	TLO	364.483,61	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
96	TOYOTA/HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T/MB	A 8999 R / A 8012 N	2014	192.780.000,00	MROFR22G2E077930 4	2KD S362601	TLO	2.477.608,56	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
97	TOYOTA / KIJANG INOVA G SILVER	A 1194 P/A 1017 N	2014	84.456.000,00	MHFXW42G4E229688 2	ITR 7858044	TLO	398.107,21	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
98	STRADA / PICK UP	A 8039 N	2011	125.460.000,00	FE403W90	WALTI235	TLO	2.163.717,69	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14
99	TOYOTA / HILUX 2.5G DOUBLE CABIN	A 8255 P/A8098 N	2014	192.780.000,00	MROFR22G3E0783	2KD S390195	TLO	2.477.608,56	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
100	MITSUBISHI/STRADA CR 2.8 AM DC GLX	A 8175 P/ A8044 N	2011	153.360.000,00	MMBJNKN70CD01730 4	4M40UAC8250	TLO	2.644.888,76	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
101	FORD/RANGER DOUBLE CAB (4X2)	A 8166 P / A8051 N	2010	147.600.000,00	MNBBSFE40AW91500 3	WLAT1244559	TLO	1.896.955,20	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
102	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1173 N	2017	91.440.000,00	MHKM5FA4JHKO2897 6	2NRF605333	TLO	432.988,70	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
103	FORD RANGER DC 2.5 L4 X4 MT	A 8164 P	2011	134.640.000,00	MHBD1CD1F6J017268	Z24-976815Y	TLO	1.730.393,28	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
104	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1147 P/ A1028 N	2012	79.200.000,00	MHKM1CA4JCK02329 9	DDB9094	TLO	371.855,50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
105	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1148 P/ A1029 N	2012	79.200.000,00	MHKM1CA4JCK02328 5	DDB8074	TLO	371.855,50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
106	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1149 P/ A1030 N	2012	79.200.000,00	MHKM1CA4JK023292	DDB9299	TLO	371.855,50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
107	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1146 P/ A1027 N	2012	79.200.000,00	MHKM1CA4JCK02151 1	DDA7398	TLO	371.855,50	Dinas PUPR	26 Agustus 2024 s.d.
108	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1150 P/ A1031 N	2012	79.200.000,00	MHKM1CA4JCK02328 7	DDB9259	TLO	371.855,50	Dinas Perkimtan	26 Agustus 2024 s.d.
109	MITSUBSHI STRADA TRITON (4X4) M/P	A 8199 P/A 8024 N	2014	168.300.000,00	MMBJNKB40ED02445 1	4D56UCES7709	TLO	2.902.548,12	Satpol PP	26 Agustus 2024 s.d.
110	KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T TGN 40 QM/T/ATTITUDE BLACK	A 1215 P/A 1289 N	2016	169.200.000,00	MHFAW8EM8GO2033 43	1TRA114616	TLO	548.341,43	Dinas Pendidikan	26 Agustus 2024 s.d.
111	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1151 P/ A1032 N	2012	67.320.000,00	MHKM1CA4JCK02307 7	DDB8003	TLO	266.669,34	Disperindag	26 Agustus 2024 s.d.
112	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1159 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32307 5	E323075	TLO	533.680,20	Rangkasbitung	26 Agustus 2024 s.d.
113	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1160 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32320 5	E3232O5	TLO	533.680,20	Cibadak	26 Agustus 2024 s.d.
114	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1161 P/A1154 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 7	E323097	TLO	533.680,20	Warunggunung	26 Agustus 2024 s.d.
115	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1162 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32310 0	E323100	TLO	533.680,20	Cikulur	26 Agustus 2024 s.d.
116	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1163 P/ A1143 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 3	E323193	TLO	533.680,20	Kalanganyar	26 Agustus 2024 s.d.
117	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1164 P/A1160 N	2014	111.600.000,00	MHCTBER54FEK3231 96	E323196	TLO	533.680,20	Cimarga	26 Agustus 2024 s.d.
118	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1165 P/A1153 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32308 4	E323084	TLO	533.680,20	Maja	26 Agustus 2024 s.d.
119	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1167 P/ A1146 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 1	E323191	TLO	533.680,20	Curugbitung	26 Agustus 2024 s.d.
120	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1168 P/ A1162 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 8	E323198	TLO	533.680,20	Sajira	26 Agustus 2024 s.d.
121	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1169 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 4	E323094	TLO	533.680,20	Leuwidamar	26 Agustus 2024 s.d.
122	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1170 P/A1179 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 1	E323091	TLO	533.680,20	Cipanas	26 Agustus 2024 s.d.
123	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1171 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32308 7	E323087	TLO	533.680,20	Bojongmanik	26 Agustus 2024 s.d.
124	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1172 P/A1161 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 9	E323099	TLO	533.680,20	Cirinten	26 Agustus 2024 s.d.
125	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1173 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FK323082	E323082	TLO	533.680,20	Lebakgedong	26 Agustus 2024 s.d.
126	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1174 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 8	E323098	TLO	533.680,20	Muncang	26 Agustus 2024 s.d.
127	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1175 P/ A1139 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32309 2	E323092	TLO	533.680,20	Cileles	26 Agustus 2024 s.d.
128	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1176 P/A1170 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 7	E323197	TLO	533.680,20	Sobang	26 Agustus 2024 s.d.
129	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1178 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 5	E323195	TLO	533.680,20	Gunungkencana	26 Agustus 2024 s.d.
130	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1179 P/A1138 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 4	E 323194	TLO	533.680,20	Banjarsari	26 Agustus 2024 s.d.
131	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1180 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32307 1	E323071	TLO	533.680,20	Cigemblong	26 Agustus 2024 s.d.
132	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1181 P/A 1150 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 9	E323199	TLO	533.680,20	Malingping	26 Agustus 2024 s.d.
133	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1182 P/ A1126 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32320 0	E323200	TLO	533.680,20	Wanasalam	26 Agustus 2024 s.d.
134	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1183 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32321 0	E323210	TLO	533.680,20	Cijaku	26 Agustus 2024 s.d.
135	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1184 P/A1151 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32308 1	E323081	TLO	533.680,20	Cihara	26 Agustus 2024 s.d.
136	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1185 P/ A1101 N	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32319 2	E323192	TLO	533.680,20	Panggarangan	26 Agustus 2024 s.d.
137	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1186 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32320 7	E323207	TLO	533.680,20	Bayah	26 Agustus 2024 s.d.
138	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1187 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32308 9	E323089	TLO	533.680,20	Cibeber	26 Agustus 2024 s.d.
139	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1189 P	2014	111.600.000,00	MHCTBR54FEK32307 4	E323074	TLO	533.680,20	Cilograng	26 Agustus 2024 s.d.
140	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1192 P/A1191 N	2016	75.600.000,00	MHKM1CA4JEK08206 1	DES0619	TLO	353.874,97	Bapenda	26 Agustus 2024 s.d.
141	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN	A 8187 P/A 8004 N	2013	64.260.000,00	MROAW12G7D004044 2	1TR 7608295	TLO	297.235,47	Bapenda	14 September 2024 s.d.
142	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN	A8184 P/ A8063 N	2013	75.600.000,00	MROAW12G2D003684	1TR 748844	TLO	533.680,20	Bapenda	14 September 2024 s.d.
143	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN	A 8188 P/A 8003 N	2013	75.600.000,00	MROAW12G7D004048 7	1TR 7608729	TLO	533.680,20	Bapenda	14 September 2024 s.d.
144	TOYOTA AVANZA	A 1213 P/A 1136 N	2016	129.600.000,00	MHKM5FA3JGK00165 4	2NRF534083	TLO	475.312,28	Setwan	14 September 2024 s.d.
145	TOYOTA AVANZA	A 1004 N	2016	147.600.000,00	MHKM5FA3JGK00187 6	2NRF538797	TLO	483.806,40	Setwan	14 September 2024 s.d.
146	TOYOTA INNOVA	A 1005 N	2016	169.200.000,00	MHJW8EM4G2309101	1TRA109288	TLO	548.341,43	Setwan	14 September 2024 s.d.
147	TOYOTA/KIJANG/INNOVA G (TGN 40R-	A 1191 P/A1218 N	2015	147.600.000,00	MHFXW42G3E228960 2	1TR 7802585	TLO	475.312,28	Disnaker	14 September 2024 s.d.

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
148	MITSUBISHI STRADA DOUBLE CABIN	A 8183 P	2012	226.800.000,00	MMBJNKB40DD00290 3	4056USDW368	TLO	3.911.455,22	Dinas PUPR	14 September 2024 s.d.
149	FORD RANGER DC 2.5 L 4X4 MT	A 8217 P	2011	154.080.000,00	MNBBSFE40BW92264 7	WLAT1254802	TLO	2.322.038,49	Bapelitbangda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
150	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8811 R/ A 8007 N	2015	183.600.000,00	MR0KS8CD4F1031188	2KD U795877	TLO	3.166.416,13	Dinas Ketapang	09 November 2024 s.d.
151	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R	A 1190 P/ A 13 N	2015	125.460.000,00	MHFXW43G2F409448 2	1TR8836641	TLO	400.457,94	Setda	09 November 2024 s.d.
152	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R	A 1135 P	2015	74.052.000,00	MHFXW43GXF409494 2	1TR8851393	TLO	400.457,94	Setda	09 November 2024 s.d.
153	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R	A 1134 P/A10 N	2015	74.052.000,00	MHFXW.426X6206188 7	1TR8832509	TLO	400.457,94	Setda	09 November 2024 s.d.
154	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 A/T VIN	A 1203 P	2015	53.244.000,00	MHKM5EB2JFK00057 1	1NR-F033596	TLO	242.215,30	Setda	09 November 2024 s.d.
155	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R	A 1201 P/ A 12 N	2015	74.052.000,00	MHFXW43GXF409491 1	1TR8850628	TLO	400.457,94	DP3KBP3A	09 November 2024 s.d.
156	NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1196 P/ A1016 N	2014	82.620.000,00	MHFXW42G3E229915 7	F10A1D200805	TLO	388.936,71	DPMPTSP	09 November 2024 s.d.
157	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1210 P/A 1149 N	2016	100.800.000,00	MHKM5FB4JGK00599 6	2NRF542335	TLO	479.738,63	Bapelitbangda	09 November 2024 s.d.
158	TOYOTA/TGN 40 R/MOPEN/MINI BUS	A 93 P / A 1157 N	2008	158.400.000,00	KHFXW42G28211645 0	1 TR 6559486	TLO	511.826,38	Diskerpus	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
159	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 45 R/ A 33 N	2008	147.600.000,00	MHPXW426X8211007 5	1TR-6515378	TLO	475.653,79	Badan Kesbangpol	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
Jumlah				**29.463.578.219,10**				**394.293.755,64**		

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Empat

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebak
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 198403302005021002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bumiputera Muda 1967

SUBHI NUR FUADI
Kepala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

ADENDUM KE - I

Kontrak Lumpsum
Pengadaan Barang
Nomor : 027/512-BKAD/2024
Atas

SURAT PESANAN

Kontrak Lumpsum
Pengadaan Jasa Lainnya

Nomor : 027/496-BKAD/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 Juli 2024), bertempat di Kecamatan Rangkasbitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
NIP	:	19840330 200502 1 002
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak
Berkedudukan di	:	Jl. RT. Hardiwangun No 7 Rangkasbitung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah* selanjutnya disebut **"PPK",** dengan:

Nama	:	Subhi Nur Fuadi
Jabatan	:	Kepala Cabang
Berkedudukan di	:	Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut "**Penyedia**".
Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Pesanan Nomor 027/496-BKAD/2024 Tanggal 10 Juli 2024
3. Permohonan Addendum Spesifikasi Barang Dari PPK Nomor : 027/511-BKAD/2024 Tanggal 11 Juli 2024

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/496-BKAD/2024, tanggal 10 Juli 2024 antara PPK dengan Penyedia.
2. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen.*

Maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan Adendum KE I ini, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

SEMULA :

1. 71331-OE7-207858963 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL (2019)
2. 71331-OE7-207878675 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO 2016
3. 71331-OE7-207879298 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016

MENJADI :

1. MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L (2016)
2. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2016)
3. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2015)

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah* selanjutnya disebut **"PPK".**

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum KE – 1 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pejabat Pembuat Komitemen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

DAFTAR ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

PAKET PEKERJAAN : ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4
KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2024
MASA PERTANGGUNGAN : 1 TAHUN

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
1	TOYOTA/MAGA 10R- BRXLBD 2.0 CVT	A 1369 N	2024	343,400,000.00	MHFAAAAA0R0026873	M20ANB65893	ALL RISK	4,964,535.74	Disnaker	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
2	TOYOTA/MAGH 10R- BRXLBD 2.0 Q HV CVT TSS	A 1367 N	2024	523,175,000.00	MHFABBAA6R0418890	M20ANB69650	ALL RISK	5,727,322.93	Dinas Pendidikan	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
3	MITSUBISHI PAJERO Sport 2.5 GLX (4X4) 5 M/T	A 1328 N	2023	479,315,000.00	MK2KSWMDNPJOOO 284	4D56UBK2244	ALL RISK	5,255,495.96	PUPR/Setda	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
4	TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT	A 1350 N	2023	452,268,000.00	MHFAAAAA9P0006618	M20ANA23983	ALL RISK	4,964,535.74	DP3KBP3A	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
5	Innova Zenix, Matic, type V, 2.0 CC, MVP	A 1326 N	2022	392,816,620.00	MHFAAAAA0N0003460	M20ANA11044	ALL RISK	7,283,010.95	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
6	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T	A 8135 N	2022	368,876,880.00	MROKB8CD1N1138357	2GD12955O8	ALL RISK	8,929,187.30	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
7	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1269 N	2019	191,250,000.00	MHKM5FB4JKK027306	2NRF956889	ALL RISK	4,022,957.41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
8	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1271 N	2019	191,250,000.00	MHKM5PB4JKK027323	2NRF957303	ALL RISK	4,022,957.41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
9	Toyota Landcruiser Prado 70 th aniversary limited	A 1322 N	2022	1,844,500,000.00	TRJ1500141966	2TR2452392	ALL RISK	19,232,923.74	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
10	INOVA VENTURER 2.4 A/T DISEL	A 1303 N	2022	424,660,000.00	MHFAB3EM7N0026070	2GDD019369	ALL RISK	4,667,540.27	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
11	NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2019	A 1260 N	2019	497,250,000.00	MHFHB3FS0K0036303	2GDC615963	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
12	MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L	A 9 N/A1088 QZ	2016	497,250,000.00	MMBGUKR10GHC234D8	4N15UAR6009	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
13	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2018	A 1243 N	2019	497,250,000.00	MHFGB8GS9J0880460	2GDC414948	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
14	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1196 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031779	1NRF616388	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
15	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1197 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032832	2NRF620392	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
16	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1198 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032688	2NRF619834	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
17	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1201 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031825	2NRF616368	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
18	TOYOTA INOVA VENTURER 2.0	A 1202 N	2017	191,250,000.00	MHFAW8EM3H0208368	1TRA381144	ALL RISK	4,022,958.36	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
19	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1320 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075965	2NRG929756	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
20	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1319 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075886	2NRG929264	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
21	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1318 N	2022	238,890,290.00	MHKE8FB3JNK075906	2NRG929468	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
22	NISSAN LIVINA VE 1.5 (4X2) A/T	A 1327 N	2022	226,950,000.00	MK2NDWHARNJ000408	4A91KAQ0104	ALL RISK	4,075,273.96	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
23	MITSUBISHI TRITON DC (4X4) M/T	A 8121 N	2021	486,795,000.00	MMBJJKL 10MH-038890	4N15UHL-6887	ALL RISK	11,728,977.42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
24	APV 4.3 - 1.5 EUA GL AB MT	A 9945 O	2019	160,650,000.00	MHYGDN42VKJ402565	G15AID434738	ALL RISK	3,395,160.74	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
25	Ford Ranger XLT DBL 2.2L (4X4) A/T DOUBLE CABIN	A 8134 N	2022	498,513,865.00	MNBUMFF80NW220480	P4AT4305187	ALL RISK	12,007,224.42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
26	RUSH 1,5 S M/T GR SPORT	A 1324 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNK086837	2NRG919192	ALL RISK	4,139,457.04	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
27	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1272 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1029227	1TRA703515	ALL RISK	4,790,069.46	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
28	TOYOTA / RUSH 1.5 M/T (F800RE-GMGFJ)	A 1321 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNKD85770	2NRG910769	ALL RISK	4,139,457.04	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
29	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T	A 8126 N	2022	391,062,004.10	MR0KB8CD5N1131136	2GD51170205	ALL RISK	9,455,940.02	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
30	MITSUBISHI TRITON 2.4L DC GLS (4X4) M/T DOUBLE CAB 4 WD WARNA HITAM,	A 8124 N	2021	345,405,150.00	MMBJJKL10MH042129	4N15UHS5211	ALL RISK	8,371,886.03	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
31	MITSUBISHI XPENDER/ EXCEED	A 1299 N	2021	192,252,150.00	MK2NCLHANMJ002658	4A91KAJ4638	ALL RISK	4,043,518.24	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
32	MITSUBHISI / TRITON DC GLS (4X4) M/T	A 8123 N	2021	333,012,150.00	MMBJJKL10MH041951	4N15UHR8035	ALL RISK	8,077,632.70	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
33	MITSUBISHI / TRITON 2.4 GL DC GLS (4X4) M/T	A 8125 N	2021	349,000,650.00	MMBJJKL10MH042222	4N15UHS5376	ALL RISK	8,457,255.82	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
34	TOYOTA RUSH 1.5 8 M/T	A 1270 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2JKK008703	2NRF956737	ALL RISK	4,119,949.21	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
35	MITSUBISHI NEW TRITON/	A 8117 N	2020	321,121,500.00	MMBJJKLIOKH060287	4HI5UGK4590	ALL RISK	7,795,306.93	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
36	DAIHATSU/LUXIO	B 1754 PQT	2019	156,825,000.00	MHKW3CA3JJK022142	3SZDGS2344	ALL RISK	3,316,686.39	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
37	TOYOTA / HILUX DC	A 8107 N	2019	302,175,000.00	MROEW8BB3K0208749	1TR-A659115	ALL RISK	7,345,450.50	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
38	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T DIESEL VIN 2019	A 8104 N	2019	344,250,000.00	MR0KB8CB9K1122788	2GD-0734455	ALL RISK	8,344,458.71	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
39	TOYOTA AVANZA VELOZ	A 1266 N	2019	168,300,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	ALL RISK	3,557,802.22	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
40	TOYOTA ALL NEW RUSH 1.5 G M/T VIN 2019	A 1264 N	2019	267,750,000.00	MHKE8FA2JKK008278	2NRF922877	ALL RISK	4,790,069.46	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
41	TOYOTA RUSH 1.5 G A/T	A 1106 N	2017	145,350,000.00	MHFE2CK2JHK012674	3SZDGK5451	ALL RISK	3,081,262.41	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
42	NEW KIJANG INOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1261 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028406	ITRA682532	ALL RISK	4,790,069.46	Dinas Lingkungan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
43	KIJANG INNOVA 2.0 MT	A 1263 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028566	1TRA685307	ALL RISK	4,790,069.46	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
44	RUSH G 1,5 GM/T (F800RE-GMMFJ)	A 1268 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2KK008579	2NRF949436	ALL RISK	4,119,949.21	Badan Kesbangpol	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
45	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T VIN 2019. WARNA PUTIH.	A 1267 N	2019	191,250,000.00	MHF11KF7030039586	7K0575252	ALL RISK	4,022,958.36	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
46	DAIHATSU TERIOS 9F800RG-GQMFJ)1,5 R A/T	A 1224 N	2018	214,200,000.00	MHKG8FB2J JK005356	2NRF730545	ALL RISK	3,851,901.49	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
47	TOYOTA KIJANG INOVA/ 2.0 VM/T	A 1262 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1028496	1TRA681579	ALL RISK	4,790,069.46	Dispusker	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
48	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T	A 8180 N	2017	286,875,000.00	MHCTBR54BCK164225	E164225	ALL RISK	6,982,174.79	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
49	TOYOTA / DOUBLE CABIN	A 8159 N	2017	309,825,000.00	MR0DS8CDXH0262890	2KDU972425	ALL RISK	7,527,088.36	Dinkop	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
50	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ	A 1003 N	2016	146,880,000.00	MHKM5FB4JGK004745	2NRF532766	ALL RISK	3,112,652.90	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
51	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1139 P/A1074 N	2012	61,773,750.00	MHKM1CB4JEK033903	DEM1205	ALL RISK	1,741,579.72	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
52	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1172 N	2017	97,155,000.00	MHKM5FA4JHKO28936	2NRF605096	ALL RISK	2,682,247.35	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
53	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1176 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4ZHK029263	2NRF606619	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
54	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1175 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029170	2NRF606137	ALL RISK	3,473,636.04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
55	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1178 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029167	2NRF606140	ALL RISK	3,473,636.04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
56	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T TGN 40QA/T10M	A 1104 N	2017	202,725,000.00	MHFAW8EM0H0207971	1TR A357299	ALL RISK	3,650,864.76	Bapenda	09 November 2024 s.d.
57	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1105 N	2017	159,885,000.00	MHKM5FB4JHK014717	2NRF620621	ALL RISK	3,379,466.44	BKAD	09 November 2024 s.d.
58	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	A 8566 P/A8050 N	2016	145,350,000.00	MR0DS8CD1G0261562	2KD U875733	ALL RISK	3,621,874.46	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
59	MITSUBISHI L300 BC-R (4X2)	A 1144 P/A 1018 N	2012	88,400,000.00	MHMLOWV39CK006899	4D56CH27577	TLO	1,015,758.18	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
60	SUZUKI FUTURA ST 150	A 1036 P /A1145 N	2011	72,000,000.00	MHYESL415BJ512787	G15AID801180	TLO	1,241,731.81	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
61	TOYOTA HILUX DC	A 8910 R	2015	149,940,000.00	MR0FR2GXF0798751	2KDU724407	TLO	1,927,028.88	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
62	TOYOTA INOVA	A 1202 P/ A 17 N	2015	165,240,000.00	MHFXW43G2F4095583	1TR8867029	TLO	534,952.33	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
63	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1205 P/ A1068 N	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGKO11456	2NRF539586	TLO	522,892.27	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
64	TOYOTA NEW RUSH	A 1132 P/ A1164 N	2015	64,260,000.00	MHFE2CK2JFK009875	3SZDFL4932	TLO	297,236.42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
65	MITSUBISHI TRITON 2.5L DC	A 8564 P	2015	177,480,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	TLO	3,060,868.92	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
66	SUZUKI/ APV	A 8556 P	2015	59,976,000.00	MHYGDN41TF	GI5AID353685	TLO	275,839.85	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
67	SUZUKI/GC 415 T (4 X 2) M/T	A 8158 N	2017	140,400,000.00	MHYGDN41THJ441984	G15A1D402423	TLO	1,947,057.04	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
68	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T	A 1042 N	2016	180,000,000.00	MHFAW8EMAG0204439	1TRA208285	TLO	584,855.53	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
69	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1140 P	2012	70,380,000.00	MHFXW42G6A2159131	1TR6913764	TLO	312,519.01	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
70	TOYOTA KF 70 RUSH 1,5G M/T	A 1156 P	2013	180,000,000.00	MHFE2CJ2JDK041235	3SZ-DDZ9159	TLO	584,855.53	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
71	TOYOTA HI ACE COMMUTER	A 7011 N	2017	273,600,000.00	JTFSS22P3H0169036	2KD A951990	TLO	775,172.64	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
72	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8202 P/A8156 N	2014	153,000,000.00	MROFR22GXE078598	2KDS392040	TLO	1,966,356.00	Dinas Perkimtan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
73	SUZUKI/GC415V APV SDX MT	A 1108 N	2017	198,000,000.00	MHYGDN42VHJ412726	G15AID 406995	TLO	645,712.69	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
74	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8041 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431975	G15AID388941	TLO	1,110,412.80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
75	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8042 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431724	G15AID388922	TLO	1,110,412.80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
76	ISUZU/ NKR55 CO E2-1	A 7012 N	2017	262,800,000.00	MHCNKR55EHJ073693	M073693	TLO	4,532,321.12	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
77	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	A 8155 N	2017	248,400,000.00	MHCTBR54FHK176942	E176942	TLO	3,192,436.80	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
78	DAIHATSU / LUXIO 1.5 X M/T	A 1070 N	2017	129,600,000.00	MHKW3CA3JHK017665	3SZDGD5173	TLO	414,455.12	Dinas Lingkungan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
79	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1032 P	2010	72,720,000.00	MHKV1AA2JAK080162	DP24070	TLO	339,490.75	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
80	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1141 P/A1093 N	2012	90,000,000.00	MHKM1CA4JCK003610	DCN5276	TLO	425,797.06	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
81	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1033 P/ A1046 N	2010	72,720,000.00	MHKV 1AA2JAK080060	DP23865	TLO	339,490.75	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
82	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 1157 P/ A1229 N	2013	187,200,000.00	W40GD450236/ MHFXW40G4	1 TR-7664722	TLO	609,197.64	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
83	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1211 P	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGK014958	2NRF549181	TLO	522,892.27	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
84	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T	A 1007 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM5G0203283	1TRA111610	TLO	548,341.43	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
85	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1031 P/A1020 N	2010	64,260,000.00	MHKV1AA2JAK 080225	DP24102	TLO	297,236.42	Dinas Lingkungan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
86	TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.0 V A/T	A 1204 P / A1069 N	2016	169,200,000.00	MHFG EM8G1002730	1TR A057301	TLO	548,341.43	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
87	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1138 P/A1073 N	2012	58,140,000.00	MHKM1CA4JCKOO3649	DCN3434	TLO	327,802.55	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
88	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1130 P/ A1132 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G1 F2302283	1TR 7923386	TLO	297,236.42	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
89	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1120 P/A 1051 I	2016	302,400,000.00	MHBF3CG3FFJ-001461	MR20-635504B	TLO	859,265.78	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
90	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1125 P/A6 N	2015	64,260,000.00	MHFWX42G6 F2305115	1TR 7955712	TLO	297,236.42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
91	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1128 P/A8 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G2 F2302454	1TR 7925012	TLO	297,236.42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
92	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1126 P/ A1005 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G4 F2305291	1TR 7957357	TLO	297,236.42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
93	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1124 P/ A 1048 N	2015	291,600,000.00	MHBF3CG3FFJ-001463	MR20-634497B	TLO	827,730.14	Dinas Pertanian	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
94	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1127 P/A1131 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G XF2306364	1TR 7967874	TLO	364,483.61	Dinas Pariwisata	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
95	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1131 PA1134 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G2 F2303927	1TR 7942349	TLO	364,483.61	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
96	TOYOTA/HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T/MB	A 8999 R / A 8012 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G2E0779304	2KD S362601	TLO	2,477,608.56	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
97	TOYOTA / KIJANG INOVA G SILVER	A 1194 P/A 1017 N	2014	84,456,000.00	MHFXW42G4E2296882	ITR 7858044	TLO	398,107.21	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
98	STRADA / PICK UP	A 8039 N	2011	125,460,000.00	FE403W90	WALTI235	TLO	2,163,717.69	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
99	TOYOTA / HILUX 2.5G DOUBLE CABIN	A 8255 P/A8098 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G3E0783	2KD S390195	TLO	2,477,608.56	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
100	MITSUBISHI/STRADA CR 2.8 AM DC GLX	A 8175 P/ A8044 N	2011	153,360,000.00	MMBJNKN70CD017304	4M40UAC8250	TLO	2,644,888.76	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
101	FORD/RANGER DOUBLE CAB (4X2)	A 8166 P / A8051 N	2010	147,600,000.00	MNBBSFE40AW915003	WLAT1244559	TLO	1,896,955.20	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
102	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1173 N	2017	91,440,000.00	MHKM5FA4JHKO28976	2NRF605333	TLO	432,988.70	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
103	FORD RANGER DC 2.5 L4 X4 MT	A 8164 P	2011	134,640,000.00	MHBD1CD1F6J017268	Z24-976815Y	TLO	1,730,393.28	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
104	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1147 P/ A1028 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023299	DDB9094	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
105	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1148 P/ A1029 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023285	DDB8074	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
106	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1149 P/ A1030 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JK023292	DDB9299	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d.
107	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1146 P/ A1027 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK021511	DDA7398	TLO	371,855.50	Dinas PUPR	26 Agustus 2024 s.d.
108	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1150 P/ A1031 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023287	DDB9259	TLO	371,855.50	Dinas Perkimtan	26 Agustus 2024 s.d.
109	MITSUBSHI STRADA TRITON (4X4) M/P	A 8199 P/A 8024 N	2014	168,300,000.00	MMBJNKB40ED024451	4D56UCES7709	TLO	2,902,548.12	Satpol PP	26 Agustus 2024 s.d.
110	KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T TGN 40 QM/T/ATTITUDE BLACK	A 1215 P/A 1289 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM8GD203343	1TRA114616	TLO	548,341.43	Dinas Pendidikan	26 Agustus 2024 s.d.
111	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1151 P/ A1032 N	2012	67,320,000.00	MHKM1CA4JCK023077	DDB8003	TLO	266,669.34	Disperindag	26 Agustus 2024 s.d.
112	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1159 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323075	E323075	TLO	533,680.20	Rangkasbitung	26 Agustus 2024 s.d.
113	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1160 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323205	E3232O5	TLO	533,680.20	Cibadak	26 Agustus 2024 s.d.
114	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1161 P/A1154 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323097	E323097	TLO	533,680.20	Warunggunung	26 Agustus 2024 s.d.
115	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1162 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323100	E323100	TLO	533,680.20	Cikulur	26 Agustus 2024 s.d.
116	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1163 P/ A1143 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323193	E323193	TLO	533,680.20	Kalanganyar	26 Agustus 2024 s.d.
117	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1164 P/A1160 N	2014	111,600,000.00	MHCTBER54FEK323196	E323196	TLO	533,680.20	Cimarga	26 Agustus 2024 s.d.
118	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1165 P/A1153 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323084	E323084	TLO	533,680.20	Maja	26 Agustus 2024 s.d.
119	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1167 P/ A1146 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323191	E323191	TLO	533,680.20	Curugbitung	26 Agustus 2024 s.d.
120	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1168 P/ A1162 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323198	E323198	TLO	533,680.20	Sajira	26 Agustus 2024 s.d.
121	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1169 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323094	E323094	TLO	533,680.20	Leuwidamar	26 Agustus 2024 s.d.
122	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1170 P/A1179 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323091	E323091	TLO	533,680.20	Cipanas	26 Agustus 2024 s.d.
123	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1171 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323087	E323087	TLO	533,680.20	Bojongmanik	26 Agustus 2024 s.d.
124	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1172 P/A1161 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323099	E323099	TLO	533,680.20	Cirinten	26 Agustus 2024 s.d.
125	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1173 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FK323082	E323082	TLO	533,680.20	Lebakgedong	26 Agustus 2024 s.d.
126	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1174 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323098	E323098	TLO	533,680.20	Muncang	26 Agustus 2024 s.d.
127	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1175 P/ A1139 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323092	E323092	TLO	533,680.20	Cileles	26 Agustus 2024 s.d.
128	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1176 P/A1170 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323197	E323197	TLO	533,680.20	Sobang	26 Agustus 2024 s.d.

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
129	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1178 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323195	E323195	TLO	533,680.20	Gunungkencana	26 Agustus 2024 s.d.
130	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1179 P/A1138 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323194	E 323194	TLO	533,680.20	Banjarsari	26 Agustus 2024 s.d.
131	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1180 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323071	E323071	TLO	533,680.20	Cigemblong	26 Agustus 2024 s.d.
132	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1181 P/A 1150 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323199	E323199	TLO	533,680.20	Malingping	26 Agustus 2024 s.d.
133	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1182 P/ A1126 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323200	E323200	TLO	533,680.20	Wanasalam	26 Agustus 2024 s.d.
134	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1183 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323210	E323210	TLO	533,680.20	Cijaku	26 Agustus 2024 s.d.
135	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1184 P/A1151 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323081	E323081	TLO	533,680.20	Cihara	26 Agustus 2024 s.d.
136	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1185 P/ A1101 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323192	E323192	TLO	533,680.20	Panggarangan	26 Agustus 2024 s.d.
137	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1186 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323207	E323207	TLO	533,680.20	Bayah	26 Agustus 2024 s.d.
138	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1187 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323089	E323089	TLO	533,680.20	Cibeber	26 Agustus 2024 s.d.
139	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1189 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323074	E323074	TLO	533,680.20	Cilograng	26 Agustus 2024 s.d.
140	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1192 P/A1191 N	2016	75,600,000.00	MHKM1CA4JEK082061	DES0619	TLO	353,874.97	Bapenda	26 Agustus 2024 s.d.
141	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A 8187 P/A 8004 N	2013	64,260,000.00	MROAW12G7D0040442	1TR 7608295	TLO	297,235.47	Bapenda	14 September 2024 s.d.
142	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A8184 P/ A8063 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G2D003684	1TR 748844	TLO	533,680.20	Bapenda	14 September 2024 s.d.
143	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A 8188 P/A 8003 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G7D0040487	1TR 7608729	TLO	533,680.20	Bapenda	14 September 2024 s.d.
144	TOYOTA AVANZA	A 1213 P/A 1136 N	2016	129,600,000.00	MHKM5FA3JGK001654	2NRF534083	TLO	475,312.28	Setwan	14 September 2024 s.d.
145	TOYOTA AVANZA	A 1004 N	2016	147,600,000.00	MHKM5FA3JGK001876	2NRF538797	TLO	483,806.40	Setwan	14 September 2024 s.d.
146	TOYOTA INNOVA	A 1005 N	2016	169,200,000.00	MHJW8EM4G2309101	1TRA109288	TLO	548,341.43	Setwan	14 September 2024 s.d.
147	TOYOTA/KIJANG/INNOVA G (TGN 40R-GKMDKD)	A 1191 P/A1218 N	2015	147,600,000.00	MHFXW42G3E2289602	1TR 7802585	TLO	475,312.28	Disnaker	14 September 2024 s.d.
148	MITSUBISHI STRADA DOUBLE CABIN	A 8183 P	2012	226,800,000.00	MMBJNKB40DD002903	4056USDW368	TLO	3,911,455.22	Dinas PUPR	14 September 2024 s.d.
149	FORD RANGER DC 2.5 L 4X4 MT	A 8217 P	2011	154,080,000.00	MNBBSFE40BW922647	WLAT1254802	TLO	2,322,038.49	Bapelitbangda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
150	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8811 R/ A 8007 N	2015	183,600,000.00	MR0KS8CD4F1031188	2KD U795877	TLO	3,166,416.13	Dinas Ketapang	09 November 2024 s.d.
151	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1190 P/ A 13 N	2015	125,460,000.00	MHFXW43G2F4094482	1TR8836641	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d.
152	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1135 P	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094942	1TR8851393	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d.
153	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1134 P/A10 N	2015	74,052,000.00	MHFXW.426X62061887	1TR8832509	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d.
154	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 A/T VIN	A 1203 P	2015	53,244,000.00	MHKM5EB2JFK000571	1NR-F033596	TLO	242,215.30	Setda	09 November 2024 s.d.
155	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1201 P/ A 12 N	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094911	1TR8850628	TLO	400,457.94	DP3KBP3A	09 November 2024 s.d.
156	NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1196 P/ A1016 N	2014	82,620,000.00	MHFXW42G3E2299157	F10A1D200805	TLO	388,936.71	DPMPTSP	09 November 2024 s.d.
157	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1210 P/A 1149 N	2016	100,800,000.00	MHKM5FB4JGK005996	2NRF542335	TLO	479,738.63	Bapelitbangda	09 November 2024 s.d.
158	TOYOTA/TGN 40 R/MOPEN/MINI BUS	A 93 P / A 1157 N	2008	158,400,000.00	KHFXW42G282116450	1 TR 6559486	TLO	511,826.38	Diskerpus	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
159	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 45 R/ A 33 N	2008	147,600,000.00	MHPXW426X82110075	1TR-6515378	TLO	475,653.79	adan Kesbangpo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
Jumlah				29,463,578,219.10				394,293,755.64		

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

ADENDUM KE - I

Kontrak Lumpsum
Pengadaan Barang
Nomor : 027/512-BKAD/2024
Atas

SURAT PESANAN

Kontrak Lumpsum
Pengadaan Jasa Lainnya

Nomor : 027/496-BKAD/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11 Juli 2024), bertempat di Kecamatan Rangkasbitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
NIP	:	19840330 200502 1 002
Jabatan	:	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Kabupaten Lebak
Berkedudukan di	:	Jl. RT. Hardiwangun No 7 Rangkasbitung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah* selanjutnya disebut **"PPK"**, dengan:

Nama	:	Subhi Nur Fuadi
Jabatan	:	Kepala Cabang
Berkedudukan di	:	Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **"Penyedia"**.
Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Pesanan Nomor 027/496-BKAD/2024 Tanggal 10 Juli 2024
3. Permohonan Addendum Spesifikasi Barang Dari PPK Nomor : 027/511-BKAD/2024 Tanggal 11 Juli 2024

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/496-BKAD/2024, tanggal 10 Juli 2024 antara PPK dengan Penyedia.
2. Telah diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen.*

Maka oleh karena itu berdasarkan keterangan para pihak diatas yang merupakan satu kesatuan dengan Adendum KE I ini, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

SEMULA :

1. 71331-OE7-207858963 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL (2019)
2. 71331-OE7-207878675 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO 2016
3. 71331-OE7-207879298 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016

MENJADI :

1. MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L (2016)
2. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2016)
3. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2015)

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor 027/Kep.01 – BKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang *Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah* selanjutnya disebut **"PPK".**

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum KE – 1 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pejabat Pembuat Komitemen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7
Telp/Fax : (0252) 5558871 e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/538 -BASTB/BKAD/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   Nip. : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Pasal 2

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 16 Juli 2024

PIHAK KEDUA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 19840330 200502 1 002

PIHAK PERTAMA,
PT. BUMIPUTRA MUDA 1967

SUBHI NUR FUADI
KEPALA CABANG

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7
Telp/Fax : (0252) 5558871 e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG (BAPB)
Nomor : 027/ 539-BAPB/BKAD/2024

Pada hari ini selasa tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan dibawah :

Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP : 19840330 200502 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 027/Kep.01-BKAD/2024, tanggal 02 Januari 2024 selaku Pejabat Pembuat Komitemen pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini telah memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bumiputra Muda 1967 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/512-SPK/BKAD/2024 Tanggal 11 Juli 2024 dengan daftar rincian barang dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Demikian Berita Acara Pemeriksaan barang ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 19840330 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN (BAPP)
Nomor : 027/540 -BAPP/BKAD/2024

Pada hari ini selasa tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   NIP : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung
   Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor : 027/496-SP/BKAD/2024 Tanggal 10 Juli 2024 dan Adendum Nomor : 027/511-BKAD/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan nilai sebesar Rp. 394.293.755,64 (Tiga Ratus Sembila Puluh Empat juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Koma Enam Puluh Empat Sen).
2. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 130-EXT/PMS/BMD-SRG/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 027/539-BAPB/BKAD/2024 Tanggal 16 Juli 2024 Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/538-BAPB/BKAD/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PT. BUMIPUTRA MUDA 1967 sebagai **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK KESATU** untuk Pengadaan Jasa Pertanggungan Pengadaan Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Angsuran Termyn	100 % x Rp. 394.293.755,64 ,-	= **Rp. 394.293.755,64**
Potongan Uang Muka		= -
Jumlah yang harus dibayar		= **Rp. 394.293.755,64**

Terbilang : Tiga Ratus Sembila Puluh Empat juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Empat Rupiah.

Demikian Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**PIHAK PERTAMA,**
	PT. BUMIPUTRA MUDA 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si	**SUBHI NUR FUADI**
NIP. 19840330 200502 1 002	**KEPALA CABANG**

ASURANSI UMUM
BUMIDA

Nomor : 130-EXT/PMS/BMD-SRG/VII/2024
Lampiran : -

Serang, 17 Juli 2024

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran
BKAD Kabupaten Lebak
Di
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan ini kami sampaikan bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Pengadaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027/496-SP/BKAD/2024 Tanggal 10 Juli 2024 dan Adendum Nomor : 027/511-BKAD/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan nilai sebesar Rp. 394.293.755,64 (Tiga Ratus Sembila Puluh Empat juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Koma Enam Puluh Empat Sen).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan pembayaran untuk paket pekerjaan tersebut melalui Bank Transfer Ke :

Nomor Rekening : 0070010016788
Atas Nama : Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
Nama Bank : Bank BJB

Demikian kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

PT. BUMIPUTRA MUDA 1967

SUBHI NUR FUADI
KEPALA CABANG

ASURANSI UMUM
BUMIDA

Dikeluarkan Oleh : SERANG

Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon Km. 2, Pertokoan Titan Arum Blok H
Telp :0254-218598; Fax : 0254-210115

ENDORSEMENT

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis

Nomor Polis	:	1024022124070016
Nama Tertanggung	:	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK
Alamat Tertanggung	:	Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung Kab. Lebak
Jangka Waktu Pertanggungan	:	11 Juli 2024 - 9 Nopember 2025
Endorsement / Lampiran No	:	1/1
Objek Pertanggungan	:	Terlampir
Nilai Pertanggungan	:	Terlampir

Dengan ini dicatat dan sepakat bahwa sejak 11 Juli 2024, kebijakan tersebut di atas direvisi sebagai berikut:

Perubahan data kendaraan

Semula :

1. 71331-OE7-207858963 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - TOYOTA NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL (2019)
2. 71331-OE7-207878675 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO 2016
3. 71331-OE7-207879298 Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 - MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016

Menjadi :

1. MITSUBISHI JEEP / PAJERO SPORT 2.4 L (2016)
2. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2016)
3. NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T (2016)

Hal lain dalam pertanggungan Polis ini tetap/tidak mengalami perubahan.

Serang, 11 Juli 2024

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Subhi Nur Fuadi
Kepala Cabang

-Lampiran ini harus dilekatkan pada Polis-

PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

003201101

ASURANSI UMUM
BUMIDA

LAMPIRAN KENDARAAN

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
1	TOYOTA/MAGA 10R- BRXLBD 2.0 CVT	A 1369 N	2024	343,400,000.00	MHFAAAAA0R0026873	M20ANB65893	ALL RISK	4,964,535.74	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
2	TOYOTA/MAGH 10R- BRXLBD 2.0 Q HV CVT TSS	A 1367 N	2024	523,175,000.00	MHFABBAA6R0418890	M20ANB69650	ALL RISK	5,727,322.93	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
3	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 GLX (4X4) 5 M/T	A 1328 N	2023	479,315,000.00	MK2KSWMDNPJOOO284	4D56UBK2244	ALL RISK	5,255,495.96	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
4	TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT	A 1350 N	2023	452,268,000.00	MHFAAAAA9P0006618	M20ANA23983	ALL RISK	4,964,535.74	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
5	INNOVA ZENIX, MATIC, TYPE V, 2.0 CC, MVP	A 1326 N	2022	392,816,620.00	MHFAAAAA0N0003460	M20ANA11044	ALL RISK	7,283,010.95	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
6	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T	A 8135 N	2022	368,876,880.00	MROKB8CD1N1138357	2GD12955O8	ALL RISK	8,929,187.30	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
7	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1269 N	2019	191,250,000.00	MHKM5FB4JKK027306	2NRF956889	ALL RISK	4,022,957.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
8	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1271 N	2019	191,250,000.00	MHKM5PB4JKK027323	2NRF957303	ALL RISK	4,022,957.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
9	TOYOTA LANDCRUISER PRADO 70 TH ANIVERSARY LIMITED	A 1322 N	2022	1,844,500,000.00	TRJ1500141966	2TR2452392	ALL RISK	19,232,923.74	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
10	TOYOTA INNOVA VENTURER 2.4 A/T DISEL	A 1303 N	2022	424,660,000.00	MHFAB3EM7N0026070	2GDD019369	ALL RISK	4,667,540.27	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
11	NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2019	A 1260 N	2019	497,250,000.00	MHFHB3FS0K0036303	2GDC615963	ALL RISK	5,448,433.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
12	MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L	A 9 N/A1088 QZ	2016	302,400,000.00	MMBGUKR10GHC234D8	4N15UAR6009	ALL RISK	5,448,433.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
13	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2018	A 1243 N	2019	497,250,000.00	MHFGB8GS9J0880460	2GDC414948	ALL RISK	5,448,433.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
14	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1196 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031779	1NRF616388	ALL RISK	3,159,737.70	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
15	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1197 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032832	2NRF620392	ALL RISK	3,159,737.70	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
16	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1198 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032688	2NRF619834	ALL RISK	3,159,737.70	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
17	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1201 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031825	2NRF616368	ALL RISK	3,159,737.70	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
18	TOYOTA INOVA VENTURER 2.0	A 1202 N	2017	191,250,000.00	MHFAW8EM3H0208368	1TRA381144	ALL RISK	4,022,958.36	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
19	TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT	A 1320 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075965	2NRG929756	ALL RISK	4,284,461.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
20	TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT	A 1319 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075886	2NRG929264	ALL RISK	4,284,461.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
21	TOYOTA RUSH 1.5 S A/T GR SPORT	A 1318 N	2022	238,890,290.00	MHKE8FB3JNK075906	2NRG929468	ALL RISK	4,284,461.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
22	NISSAN LIVINA VE 1.5 (4X2) A/T	A 1327 N	2022	226,950,000.00	MK2NDWHARNJ000408	4A91KAQ0104	ALL RISK	4,075,273.96	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
23	MITSUBISHI TRITON DC (4X4) M/T	A 8121 N	2021	486,795,000.00	MMBJJKL 10MH-038890	4N15UHL-6887	ALL RISK	11,728,977.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
24	APV 4.3 - 1.5 EUA GL AB MT	A 9945 O	2019	160,650,000.00	MHYGDN42VKJ402565	G15AID434738	ALL RISK	3,395,160.74	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
25	FORD RANGER XLT DBL 2.2L (4X4) A/T DOUBLE CABIN	A 8134 N	2022	498,513,865.00	MNBUMFF80NW220480	P4AT4305187	ALL RISK	12,007,224.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
26	RUSH 1,5 S M/T GR SPORT	A 1324 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNK086837	2NRG919192	ALL RISK	4,139,457.04	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
27	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1272 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1029227	1TRA703515	ALL RISK	4,790,069.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
28	TOYOTA / RUSH 1.5 M/T (F800RE-GMGFJ)	A 1321 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNKD85770	2NRG910769	ALL RISK	4,139,457.04	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
29	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T	A 8126 N	2022	391,062,004.10	MR0KB8CD5N1131136	2GD51170205	ALL RISK	9,455,940.02	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
30	MITSUBISHI TRITON 2.4L DC GLS (4X4) M/T DOUBLE CAB 4 WD WARNA HITAM,	A 8124 N	2021	345,405,150.00	MMBJJKL10MH042129	4N15UHS5211	ALL RISK	8,371,886.03	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
31	MITSUBISHI XPENDER/ EXCEED	A 1299 N	2021	192,252,150.00	MK2NCLHANMJ002658	4A91KAJ4638	ALL RISK	4,043,518.24	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
32	MITSUBHISI / TRITON DC GLS (4X4) M/T	A 8123 N	2021	333,012,150.00	MMBJJKL10MH041951	4N15UHR8035	ALL RISK	8,077,632.70	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
33	MITSUBISHI / TRITON 2.4 GL DC GLS (4X4) M/T	A 8125 N	2021	349,000,650.00	MMBJJKL10MH042222	4N15UHS5376	ALL RISK	8,457,255.82	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
34	TOYOTA RUSH 1.5 8 M/T	A 1270 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2JKK008703	2NRF956737	ALL RISK	4,119,949.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
35	MITSUBISHI NEW TRITON/	A 8117 N	2020	321,121,500.00	MMBJJKLIOKH060287	4HI5UGK4590	ALL RISK	7,795,306.93	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
36	DAIHATSU/LUXIO	B 1754 PQT	2019	156,825,000.00	MHKW3CA3JJK022142	3SZDGS2344	ALL RISK	3,316,686.39	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
37	TOYOTA / HILUX DC	A 8107 N	2019	302,175,000.00	MROEW8BB3K0208749	1TR-A659115	ALL RISK	7,345,450.50	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
38	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T DIESEL VIN	A 8104 N	2019	344,250,000.00	MR0KB8CB9K1122788	2GD-0734455	ALL RISK	8,344,458.71	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
39	TOYOTA AVANZA VELOZ	A 1266 N	2019	168,300,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	ALL RISK	3,557,802.22	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
40	TOYOTA ALL NEW RUSH 1.5 G M/T VIN	A 1264 N	2019	267,750,000.00	MHKE8FA2JKK008278	2NRF922877	ALL RISK	4,790,069.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
41	TOYOTA RUSH 1.5 G A/T	A 1106 N	2017	145,350,000.00	MHFE2CK2JHK012674	3SZDGK5451	ALL RISK	3,081,262.41	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
42	NEW KIJANG INOVA 2.0 V M/T VIN	A 1261 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028406	ITRA682532	ALL RISK	4,790,069.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
43	KIJANG INNOVA 2.0 MT	A 1263 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028566	1TRA685307	ALL RISK	4,790,069.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
44	RUSH G 1,5 GM/T (F800RE-GMMFJ)	A 1268 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2KK008579	2NRF949436	ALL RISK	4,119,949.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
45	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T VIN	A 1267 N	2019	191,250,000.00	MHF11KF7030039586	7K0575252	ALL RISK	4,022,958.36	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
46	DAIHATSU TERIOS 9F800RG- GQMFJ)1,5 R A/T	A 1224 N	2018	214,200,000.00	MHKG8FB2J JK005356	2NRF730545	ALL RISK	3,851,901.49	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
47	TOYOTA KIJANG INOVA/ 2.0 V M/T	A 1262 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1028496	1TRA681579	ALL RISK	4,790,069.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
48	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T	A 8180 N	2017	286,875,000.00	MHCTBR54BCK164225	E164225	ALL RISK	6,982,174.79	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
49	TOYOTA / DOUBLE CABIN	A 8159 N	2017	309,825,000.00	MR0DS8CDXH0262890	2KDU972425	ALL RISK	7,527,088.36	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
50	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ	A 1003 N	2016	146,880,000.00	MHKM5FB4JGK004745	2NRF532766	ALL RISK	3,112,652.90	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
51	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1139 P / A 1074 N	2012	61,773,750.00	MHKM1CB4JEK033903	DEM1205	ALL RISK	1,741,579.72	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
52	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1172 N	2017	97,155,000.00	MHKM5FA4JHK028936	2NRF605096	ALL RISK	2,682,247.35	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
53	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RMGMSFJ	A 1176 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4ZHK029263	2NRF606619	ALL RISK	3,159,737.70	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
54	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RMGMSFJ	A 1175 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029170	2NRF606137	ALL RISK	3,473,636.04	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
55	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RMGMSFJ	A 1178 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029167	2NRF606140	ALL RISK	3,473,636.04	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
56	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T TGN40QA/T10M	A 1104 N	2017	202,725,000.00	MHFAW8EM0H0207971	1TR A357299	ALL RISK	3,650,864.76	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
57	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1105 N	2017	159,885,000.00	MHKM5FB4JHK014717	2NRF620621	ALL RISK	3,379,466.44	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
58	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	A 8566 P / A 8050 N	2016	145,350,000.00	MR0DS8CD1G0261562	2KD U875733	ALL RISK	3,621,874.46	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
59	MITSUBISHI L300 BC-R (4X2)	A 1144 P / A 1018 N	2012	86,400,000.00	MHMLOWV39CK006899	4D56CH27577	TLO	1,015,758.18	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
60	SUZUKI FUTURA ST 150	A 1036 P / A 1145 N	2011	72,000,000.00	MHYESL415BJ512787	G15AID801180	TLO	1,241,731.81	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
61	TOYOTA HILUX DC	A 8910 R	2015	149,940,000.00	MR0FR2GXF0798751	2KDU724407	TLO	1,927,028.88	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
62	TOYOTA INOVA	A 1202 P / A 17 N	2015	165,240,000.00	MHFXW43G2F4095583	1TR8867029	TLO	534,952.33	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
63	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F654RM - GMSFJ	A 1205 P / A 1068 N	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGK011456	2NRF539586	TLO	522,892.27	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
64	TOYOTA NEW RUSH	A 1132 P / A 1164 N	2015	64,260,000.00	MHFE2CK2JFK009875	3SZDFL4932	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
65	MITSUBISHI TRITON 2.5L DC	A 8564 P	2015	177,480,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	TLO	3,060,868.92	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
66	SUZUKI/ APV	A 8556 P	2015	59,976,000.00	MHYGDN41TF	GI5AID353685	TLO	275,839.85	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
67	SUZUKI/GC 415 T (4 X 2) M/T	A 8158 N	2017	140,400,000.00	MHYGDN41THJ441984	G15A1D402423	TLO	1,947,057.04	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
68	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T	A 1042 N	2016	180,000,000.00	MHFAW8EMAG0204439	1TRA208285	TLO	584,855.53	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
69	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1140 P	2012	70,380,000.00	MHFXW42G6A2159131	1TR6913764	TLO	312,519.01	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
70	TOYOTA KF 70 RUSH 1,5G M/T	A 1156 P	2013	180,000,000.00	MHFE2CJ2JDK041235	3SZ-DDZ9159	TLO	584,855.53	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
71	TOYOTA HI ACE COMMUTER	A 7011 N	2017	273,600,000.00	JTFSS22P3H0169036	2KD A951990	TLO	775,172.64	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
72	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8202 P / A 8156 N	2014	153,000,000.00	MROFR22GXE078598	2KDS392040	TLO	1,966,356.00	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
73	SUZUKI/GC415V APV SDX MT	A 1108 N	2017	198,000,000.00	MHYGDN42VHJ412726	G15AID 406995	TLO	645,712.69	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
74	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8041 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431975	G15AID388941	TLO	1,110,412.80	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
75	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8042 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431724	G15AID388922	TLO	1,110,412.80	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
76	ISUZU/ NKR55 CO E2-1	A 7012 N	2017	262,800,000.00	MHCNKR55EHJ073693	M073693	TLO	4,532,321.12	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
77	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	A 8155 N	2017	248,400,000.00	MHCTBR54FHK176942	E176942	TLO	3,192,436.80	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
78	DAIHATSU / LUXIO 1.5 X M/T	A 1070 N	2017	129,600,000.00	MHKW3CA3JHK017665	3SZDGD5173	TLO	414,455.12	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
79	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1032 P	2010	72,720,000.00	MHKV1AA2JAK080162	DP24070	TLO	339,490.75	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
80	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1141 P / A 1093 N	2012	90,000,000.00	MHKM1CA4JCK003610	DCN5276	TLO	425,797.06	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
81	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1033 P / A 1046 N	2010	72,720,000.00	MHKV 1AA2JAK080060	DP23865	TLO	339,490.75	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
82	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 1157 P / A 1229 N	2013	187,200,000.00	MHMXSXW40GD450236/ MHFXW40G4D4505236	1 TR-7664722	TLO	609,197.64	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
83	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F654RM - GMSFJ	A 1211 P	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGK014958	2NRF549181	TLO	522,892.27	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
84	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T	A 1007 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM5G0203283	1TRA111610	TLO	548,341.43	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
85	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDFJJ	A 1031 P / A 1020 N	2010	64,260,000.00	MHKV1AA2JAK.080225	DP24102	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
86	TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.0 V A/T	A 1204 P / A 1069 N	2016	169,200,000.00	MHFG EM8G1002730	1TR A057301	TLO	548,341.43	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
87	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1138 P / A 1073 N	2012	58,140,000.00	MHKM1CA4JCKOO3649	DCN3434	TLO	327,802.55	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
88	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1130 P / A 1132 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G1 F2302283	1TR 7923386	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
89	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1120 P/A 1051 N	2016	180,000,000.00	MHBF3CG3FFJ-001461	MR20-635504B	TLO	859,265.78	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
90	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1125 P / A 6 N	2015	64,260,000.00	MHFWX42G6 F2305115	1TR 7955712	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
91	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1128 P / A 8 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G2 F2302454	1TR 7925012	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
92	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1126 P / A 1005 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G4 F2305291	1TR 7957357	TLO	297,236.42	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
93	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1124 P/ A 1048 N	2015	160,000,000.00	MHBF3CG3FFJ-001463	MR20-634497B	TLO	827,730.14	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
94	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1127 P / A 1131 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G XF2306364	1TR 7967874	TLO	364,483.61	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
95	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1131 P / A 1134 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G2 F2303927	1TR 7942349	TLO	364,483.61	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
96	TOYOTA/HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T/MB PENUMPANG/MINI BUS	A 8999 R / A 8012 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G2E0779304	2KD S362601	TLO	2,477,608.56	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
97	TOYOTA / KIJANG INOVA G SILVER	A 1194 P / A 1017 N	2014	84,456,000.00	MHFXW42G4E2296882	ITR 7858044	TLO	398,107.21	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
98	STRADA / PICK UP	A 8039 N	2011	125,460,000.00	FE403W90	WALTI235	TLO	2,163,717.69	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
99	TOYOTA / HILUX 2.5G DOUBLE CABIN	A 8255 P / A 8098 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G3E0783	2KD S390195	TLO	2,477,608.56	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
100	MITSUBISHI/STRADA CR 2.8 AM DC GLX	A 8175 P/ A 8044 N	2011	153,360,000.00	MMBJNKN70CD017304	4M40UAC8250	TLO	2,644,888.76	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
101	FORD/RANGER DOUBLE CAB (4X2)	A 8166 P / A 8051 N	2010	147,600,000.00	MNBBSFE40AW915003	WLAT1244559	TLO	1,896,955.20	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
102	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1173 N	2017	91,440,000.00	MHKM5FA4JHKO28976	2NRF605333	TLO	432,988.70	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
103	FORD RANGER DC 2.5 L4 X4 MT	A 8164 P	2011	134,640,000.00	MHBD1CD1F6J017268	Z24-976815Y	TLO	1,730,393.28	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
104	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1147 P / A 1028 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023299	DDB9094	TLO	371,855.50	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
105	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1148 P / A 1029 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023285	DDB8074	TLO	371,855.50	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
106	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1149 P / A 1030 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JK023292	DDB9299	TLO	371,855.50	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
107	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1146 P / A 1027 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK021511	DDA7398	TLO	371,855.50	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
108	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1150 P / A 1031 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023287	DDB9259	TLO	371,855.50	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
109	MITSUBSHI STRADA TRITON (4X4) M/P	A 8199 P / A 8024 N	2014	168,300,000.00	MMBJNKB40ED024451	4D56UCES7709	TLO	2,902,548.12	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
110	KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T TGN 40 QM/T/ATTITUDE BLACK MICA/2016	A 1215 P / A 1289 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM8GO203343	1TRA114616	TLO	548,341.43	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
111	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/'T	A 1151 P / A1032 N	2012	67,320,000.00	MHKM1CA4JCK023077	DDB8003	TLO	266,669.34	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
112	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1159 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323075	E323075	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
113	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1160 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323205	E3232O5	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
114	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1161 P / A 1154 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323097	E323097	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
115	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1162 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323100	E323100	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
116	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1163 P/ A 1143 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323193	E323193	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
117	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1164 P / A 1160 N	2014	111,600,000.00	MHCTBER54FEK323196	E323196	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
118	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1165 P / A 1153 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323084	E323084	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
119	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1167 P / A 1146 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323191	E323191	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
120	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1168 P / A 1162 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323198	E323198	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
121	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1169 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323094	E323094	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
122	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1170 P / A 1179 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323091	E323091	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
123	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1171 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323087	E323087	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
124	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1172 P / A 1161 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323099	E323099	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
125	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1173 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FK323082	E323082	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
126	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1174 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323098	E323098	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
127	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1175 P / A 1139 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323092	E323092	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
128	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1176 P / A 1170 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323197	E323197	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
129	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1178 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323195	E323195	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
130	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1179 P / A 1138 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323194	E 323194	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
131	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1180 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323071	E323071	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
132	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1181 P / A 1150 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323199	E323199	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
133	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1182 P / A 1126 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323200	E323200	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
134	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1183 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323210	E323210	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
135	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1184 P / A 1151 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323081	E323081	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
136	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1185 P / A 1101 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323192	E323192	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
137	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1186 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323207	E323207	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
138	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1187 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323089	E323089	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
139	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1189 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323074	E323074	TLO	533,680.20	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
140	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1192 P / A 1191 N	2016	75,600,000.00	MHKM1CA4JEK082061	DES0619	TLO	353,874.97	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
141	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN10R-TRMDKD)	A 8187 P / A 8004 N	2013	64,260,000.00	MROAW12G7D0040442	1TR 7608295	TLO	297,235.47	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
142	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN10R-TRMDKD)	A8184 P / A 8063 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G2D003684	1TR 748844	TLO	533,680.20	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
143	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN10R-TRMDKD)	A 8188 P / A 8003 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G7D0040487	1TR 7608729	TLO	533,680.20	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
144	TOYOTA AVANZA	A 1213 P / A 1136 N	2016	129,600,000.00	MHKM5FA3JGK001654	2NRF534083	TLO	475,312.28	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
145	TOYOTA AVANZA	A 1004 N	2016	147,600,000.00	MHKM5FA3JGK001876	2NRF538797	TLO	483,806.40	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
146	TOYOTA INNOVA	A 1005 N	2016	169,200,000.00	MHJW8EM4G2309101	1TRA109288	TLO	548,341.43	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
147	TOYOTA/KIJANG/INNOVA G (TGN 40R-GKMDKD)	A 1191 P / A 1218 N	2015	147,600,000.00	MHFXW42G3E2289602	1TR 7802585	TLO	475,312.28	14 September 2024 s.d. 14 September 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	JAMINAN (Sesuai Surat Pesanan)	NILAI PREMI	PERIODE PERTANGGUNGAN
148	MITSUBISHI STRADA DOUBLE CABIN	A 8183 P	2012	226,800,000.00	MMBJNKB40DD002903	4056USDW368	TLO	3,911,455.22	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
149	FORD RANGER DC 2.5 L 4X4 MT	A 8217 P	2011	154,080,000.00	MNBBSFE40BW922647	WLAT1254802	TLO	2,322,038.49	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
150	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8811 R / A 8007 N	2015	183,600,000.00	MR0KS8CD4F1031188	2KD U795877	TLO	3,166,416.13	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
151	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1190 P / A 13 N	2015	125,460,000.00	MHFXW43G2F4094482	1TR8836641	TLO	400,457.94	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
152	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1135 P	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094942	1TR8851393	TLO	400,457.94	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
153	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1134 P / A 10 N	2015	74,052,000.00	MHFXW.426X62061887	1TR8832509	TLO	400,457.94	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
154	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 A/T VIN	A 1203 P	2015	53,244,000.00	MHKM5EB2JFK000571	1NR-F033596	TLO	242,215.30	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
155	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1201 P / A 12 N	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094911	1TR8850628	TLO	400,457.94	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
156	NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1196 P / A 1016 N	2014	82,620,000.00	MHFXW42G3E2299157	F10A1D200805	TLO	388,936.71	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
157	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1210 P / A 1149 N	2016	100,800,000.00	MHKM5FB4JGK005996	2NRF542335	TLO	479,738.63	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
158	TOYOTA/TGN 40 R/MOPEN/MINIBUS	A 93 P / A 1157 N	2008	158,400,000.00	KHFXW42G282116450	1 TR 6559486	TLO	511,826.38	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
159	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 45 R / A 33 N	2008	147,600,000.00	MHPXW426X82110075	1TR-6515378	TLO	475,653.79	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
JUMLAH				**29,014,728,219.10**				**394,293,755.64**	

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Empat

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bumiputera Muda 1967

SUBHI NUR FUADI
Kepala Cabang

DAFTAR ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

PAKET PEKERJAAN : ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4
KEGIATAN : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2024
MASA PERTANGGUNGAN : 1 TAHUN

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
1	TOYOTA/MAGA 10R-BRXLBD 2.0 CVT	A 1369 N	2024	343,400,000.00	MHFAAAAA0R0026873	M20ANB65893	ALL RISK	4,964,535.74	Disnaker	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
2	TOYOTA/MAGH 10R-BRXLBD 2.0 Q HV CVT TSS	A 1367 N	2024	523,175,000.00	MHFABBAA6R0418890	M20ANB69650	ALL RISK	5,727,322.93	Dinas Pendidikan	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
3	MITSUBISHI PAJERO Sport 2.5 GLX (4X4) 5 M/T	A 1328 N	2023	479,315,000.00	MK2KSWMDNPJOOO284	4D56UBK2244	ALL RISK	5,255,495.96	PUPR/Setda	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
4	TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT	A 1350 N	2023	452,268,000.00	MHFAAAAA9P0006618	M20ANA23983	ALL RISK	4,964,535.74	DP3KBP3A	11 Juli 2024 s.d 11 Juli 2025
5	Innova Zenix, Matic, type V, 2.0 CC, MVP	A 1326 N	2022	392,816,620.00	MHFAAAAA0N0003460	M20ANA11044	ALL RISK	7,283,010.95	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
6	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) M/T	A 8135 N	2022	368,876,880.00	MROKB8CD1N1138357	2GD12955O8	ALL RISK	8,929,187.30	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
7	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1269 N	2019	191,250,000.00	MHKM5FB4JKK027306	2NRF956889	ALL RISK	4,022,957.41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
8	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ 1,5 A/T, TYPE F54VA/T21M	A 1271 N	2019	191,250,000.00	MHKM5PB4JKK027323	2NRF957303	ALL RISK	4,022,957.41	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
9	Toyota Landcruiser Prado 70 th aniversary limited	A 1322 N	2022	1,844,500,000.00	TRJ1500141966	2TR2452392	ALL RISK	19,232,923.74	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
10	INOVA VENTURER 2.4 A/T DISEL	A 1303 N	2022	424,660,000.00	MHFAB3EM7N0026070	2GDD019369	ALL RISK	4,667,540.27	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
11	NEW FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2019	A 1260 N	2019	497,250,000.00	MHFHB3FS0K0036303	2GDC615963	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
12	MITSUBISHI JEEP/PAJERO SPORT 2.4 L	A 9 N/A1088 QZ	2016	302,400,000.00	MMBGUKR10GHC234D8	4N15UAR6009	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
13	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL VIN 2018	A 1243 N	2019	497,250,000.00	MHFGB8GS9J0880460	2GDC414948	ALL RISK	5,448,433.21	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
14	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1196 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031779	1NRF616388	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
15	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1197 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032832	2NRF620392	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
16	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1198 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK032688	2NRF619834	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
17	TOYOTA VELOZ 1.5	A 1201 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4JHK031825	2NRF616368	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
18	TOYOTA INOVA VENTURER 2.0	A 1202 N	2017	191,250,000.00	MHFAW8EM3H0208368	1TRA381144	ALL RISK	4,022,958.36	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
19	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1320 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075965	2NRG929756	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
20	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1319 N	2022	238,876,605.00	MHKE8FB3JNK075886	2NRG929264	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
21	Toyota Rush 1.5 S A/T Gr Sport	A 1318 N	2022	238,890,290.00	MHKE8FB3JNK075906	2NRG929468	ALL RISK	4,284,461.41	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
22	NISSAN LIVINA VE 1.5 (4X2) A/T	A 1327 N	2022	226,950,000.00	MK2NDWHARNJ000408	4A91KAQ0104	ALL RISK	4,075,273.96	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
23	MITSUBISHI TRITON DC (4X4) M/T	A 8121 N	2021	486,795,000.00	MMBJJKL 10MH-038890	4N15UHL-6887	ALL RISK	11,728,977.42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
24	APV 4.3 - 1.5 EUA GL AB MT	A 9945 O	2019	160,650,000.00	MHYGDN42VKJ402565	G15AID434738	ALL RISK	3,395,160.74	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
25	Ford Ranger XLT DBL 2.2L (4X4) A/T DOUBLE CABIN	A 8134 N	2022	498,513,865.00	MNBUMFF80NW220480	P4AT4305187	ALL RISK	12,007,224.42	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
26	RUSH 1,5 S M/T GR SPORT	A 1324 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNK086837	2NRG919192	ALL RISK	4,139,457.04	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
27	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1272 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1029227	1TRA703515	ALL RISK	4,790,069.46	DPMD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
28	TOYOTA / RUSH 1.5 M/T (F800RE-GMGFJ)	A 1321 N	2022	230,613,500.00	MHKE8FA3JNKD85770	2NRG910769	ALL RISK	4,139,457.04	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
29	HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T	A 8126 N	2022	391,062,004.10	MR0KB8CD5N1131136	2GD51170205	ALL RISK	9,455,940.02	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
30	MITSUBISHI TRITON 2.4L DC GLS (4X4) M/T DOUBLE CAB 4 WD WARNA HITAM,	A 8124 N	2021	345,405,150.00	MMBJJKL10MH042129	4N15UHS5211	ALL RISK	8,371,886.03	BPBD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
31	MITSUBISHI XPENDER/ EXCEED	A 1299 N	2021	192,252,150.00	MK2NCLHANMJ002658	4A91KAJ4638	ALL RISK	4,043,518.24	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
32	MITSUBHISI / TRITON DC GLS (4X4) M/T	A 8123 N	2021	333,012,150.00	MMBJJKL10MH041951	4N15UHR8035	ALL RISK	8,077,632.70	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
33	MITSUBISHI / TRITON 2.4 GL DC GLS (4X4) M/T	A 8125 N	2021	349,000,650.00	MMBJJKL10MH042222	4N15UHS5376	ALL RISK	8,457,255.82	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
34	TOYOTA RUSH 1.5 8 M/T	A 1270 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2JKK08703	2NRF956737	ALL RISK	4,119,949.21	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
35	MITSUBISHI NEW TRITON/	A 8117 N	2020	321,121,500.00	MMBJJKLIOKH060287	4HI5UGK4590	ALL RISK	7,795,306.93	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
36	DAIHATSU/LUXIO	B 1754 PQT	2019	156,825,000.00	MHKW3CA3JJK022142	3SZDGS2344	ALL RISK	3,316,686.39	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
37	TOYOTA / HILUX DC	A 8107 N	2019	302,175,000.00	MROEW8BB3K0208749	1TR-A659115	ALL RISK	7,345,450.50	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
38	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T DIESEL VIN 2019	A 8104 N	2019	344,250,000.00	MR0KB8CB9K1122788	2GD-0734455	ALL RISK	8,344,458.71	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
39	TOYOTA AVANZA VELOZ	A 1266 N	2019	168,300,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	ALL RISK	3,557,802.22	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
40	TOYOTA ALL NEW RUSH 1.5 G M/T VIN 2019	A 1264 N	2019	267,750,000.00	MHKE8FA2JKK008278	2NRF922877	ALL RISK	4,790,069.46	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
41	TOYOTA RUSH 1.5 G A/T	A 1106 N	2017	145,350,000.00	MHFE2CK2JHK012674	3SZDGK5451	ALL RISK	3,081,262.41	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
42	NEW KIJANG INOVA 2.0 V M/T VIN 2019	A 1261 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028406	ITRA682532	ALL RISK	4,790,069.46	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
43	KIJANG INNOVA 2.0 MT	A 1263 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EMOK1028566	1TRA685307	ALL RISK	4,790,069.46	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
44	RUSH G 1,5 GM/T (F800RE-GMMFJ)	A 1268 N	2019	229,500,000.00	MHKE8FA2KK008579	2NRF949436	ALL RISK	4,119,949.21	Badan Kesbangpol	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
45	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T VIN 2019. WARNA PUTIH.	A 1267 N	2019	191,250,000.00	MHF11KF7030039586	7K0575252	ALL RISK	4,022,958.36	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
46	DAIHATSU TERIOS 9F800RG-GQMFJ)1,5 R A/T	A 1224 N	2018	214,200,000.00	MHKG8FB2J JK005356	2NRF730545	ALL RISK	3,851,901.49	Bapenda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
47	TOYOTA KIJANG INOVA/ 2.0 VM/T	A 1262 N	2019	267,750,000.00	MHFGW8EM5K1028496	1TRA681579	ALL RISK	4,790,069.46	Dispusker	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
48	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 2.4G (4X4) M/T	A 8180 N	2017	286,875,000.00	MHCTBR54BCK164225	E164225	ALL RISK	6,982,174.79	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
49	TOYOTA / DOUBLE CABIN	A 8159 N	2017	309,825,000.00	MR0DS8CDXH0262890	2KDU972425	ALL RISK	7,527,088.36	Dinkop	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
50	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ	A 1003 N	2016	146,880,000.00	MHKM5FB4JGK004745	2NRF532766	ALL RISK	3,112,652.90	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
51	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1139 P/A1074 N	2012	61,773,750.00	MHKM1CB4JEK033903	DEM1205	ALL RISK	1,741,579.72	BKAD	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
52	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1172 N	2017	97,155,000.00	MHKM5FA4JHK028936	2NRF605096	ALL RISK	2,682,247.35	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
53	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1176 N	2017	149,175,000.00	MHKM5FA4ZHK029263	2NRF606619	ALL RISK	3,159,737.70	Setda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
54	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1175 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029170	2NRF606137	ALL RISK	3,473,636.04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
55	TOYOTA AVANZA VELOZ 1 .5 F654RM GMSFJ	A 1178 N	2017	164,475,000.00	MHKM5FA4ZHK029167	2NRF606140	ALL RISK	3,473,636.04	Setwan	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
56	KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T TGN 40QA/T10M	A 1104 N	2017	202,725,000.00	MHFAW8EM0H0207971	1TR A357299	ALL RISK	3,650,864.76	Bapenda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
57	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1105 N	2017	159,885,000.00	MHKM5FB4JHK014717	2NRF620621	ALL RISK	3,379,466.44	BKAD	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
58	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN	A 8566 P/A8050 N	2016	145,350,000.00	MR0DS8CD1G0261562	2KD U875733	ALL RISK	3,621,874.46	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
59	MITSUBISHI L300 BC-R (4X2)	A 1144 P/A 1018 N	2012	86,400,000.00	MHMLOWV39CK006899	4D56CH27577	TLO	1,015,758.18	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
60	SUZUKI FUTURA ST 150	A 1036 P /A1145 N	2011	72,000,000.00	MHYESL415BJ512787	G15AID801180	TLO	1,241,731.81	Disdukcapil	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
61	TOYOTA HILUX DC	A 8910 R	2015	149,940,000.00	MR0FR2GXF0798751	2KDU724407	TLO	1,927,028.88	Dinas Perikanan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
62	TOYOTA INOVA	A 1202 P/ A 17 N	2015	165,240,000.00	MHFXW43G2F4095583	1TR8867029	TLO	534,952.33	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
63	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1205 P/ A1068 N	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGKO11456	2NRF539586	TLO	522,892.27	Diskominfo	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
64	TOYOTA NEW RUSH	A 1132 P/ A1164 N	2015	64,260,000.00	MHFE2CK2JFK009875	3SZDFL4932	TLO	297,236.42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
65	MITSUBISHI TRITON 2.5L DC	A 8564 P	2015	177,480,000.00	MHKM5FA4JKK060543	2NRF945648	TLO	3,060,868.92	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
66	SUZUKI/ APV	A 8556 P	2015	59,976,000.00	MHYGDN41TF	GI5AID353685	TLO	275,839.85	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
67	SUZUKI/GC 415 T (4 X 2) M/T	A 8158 N	2017	140,400,000.00	MHYGDN41THJ441984	G15A1D402423	TLO	1,947,057.04	Disperindag	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
68	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T	A 1042 N	2016	180,000,000.00	MHFAW8EMAG0204439	1TRA208285	TLO	584,855.53	Inspektorat	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
69	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1140 P	2012	70,380,000.00	MHFXW42G6A2159131	1TR6913764	TLO	312,519.01	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
70	TOYOTA KF 70 RUSH 1,5G M/T	A 1156 P	2013	180,000,000.00	MHFE2CJ2JDK041235	3SZ-DDZ9159	TLO	584,855.53	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
71	TOYOTA HI ACE COMMUTER	A 7011 N	2017	273,600,000.00	JTFSS22P3H0169036	2KD A951990	TLO	775,172.64	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
72	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8202 P/A8156 N	2014	153,000,000.00	MROFR22GXE078598	2KDS392040	TLO	1,966,356.00	Dinas Perkimtan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
73	SUZUKI/GC415V APV SDX MT	A 1108 N	2017	198,000,000.00	MHYGDN42VHJ412726	G15AID 406995	TLO	645,712.69	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
74	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8041 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431975	G15AID388941	TLO	1,110,412.80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
75	SUZUKI PICK UP GC 415 T (4X2) M/T	A 8042 N	2016	86,400,000.00	MHYGDN41TGJ431724	G15AID388922	TLO	1,110,412.80	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
76	ISUZU/ NKR55 CO E2-1	A 7012 N	2017	262,800,000.00	MHCNKR55EHJ073693	M073693	TLO	4,532,321.12	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
77	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	A 8155 N	2017	248,400,000.00	MHCTBR54FHK176942	E176942	TLO	3,192,436.80	DP3KBP3A	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
78	DAIHATSU / LUXIO 1.5 X M/T	A 1070 N	2017	129,600,000.00	MHKW3CA3JHK017665	3SZDGD5173	TLO	414,455.12	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
79	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDF.JJ	A 1032 P	2010	72,720,000.00	MHKV1AA2JAK080162	DP24070	TLO	339,490.75	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
80	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1141 P/A1093 N	2012	90,000,000.00	MHKM1CA4JCK003610	DCN5276	TLO	425,797.06	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
81	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDF.JJ	A 1033 P/ A1046 N	2010	72,720,000.00	MHKV 1AA2JAK080060	DP23865	TLO	339,490.75	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
82	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 1157 P/ A1229 N	2013	187,200,000.00	MHMXSXW40GD450236	1 TR-7664722	TLO	609,197.64	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
83	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ M/T F 654RM - GMSFJ	A 1211 P	2016	109,440,000.00	MHKM5FA4JGK014958	2NRF549181	TLO	522,892.27	DPMPTSP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
84	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V M/T	A 1007 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM5G0203283	1TRA111610	TLO	548,341.43	Dinas Kesehatan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
85	DAIHATSU/MOPEN./F600RV-GMDF.JJ	A 1031 P/A1020 N	2010	64,260,000.00	MHKV1AA2JAK.080225	DP24102	TLO	297,236.42	Dinas Lingkungan Hidup	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
86	TOYOTA/KIJANG INNOVA 2.0 V A/T	A 1204 P / A1069 N	2016	169,200,000.00	MHFG EM8G1002730	1TR A057301	TLO	548,341.43	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
87	TOYOTA/MOPEN /NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT	A 1138 P/A1073 N	2012	58,140,000.00	MHKM1CA4JCKOO3649	DCN3434	TLO	327,802.55	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
88	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1130 P/ A1132 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G1 F2302283	1TR 7923386	TLO	297,236.42	Setda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
89	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1120 P/A 1051 N	2016	180,000,000.00	MHBF3CG3FFJ-001461	MR20-635504B	TLO	859,265.78	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
90	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1125 P/A6 N	2015	64,260,000.00	MHFWX42G6 F2305115	1TR 7955712	TLO	297,236.42	Bapelitbangda	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
91	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1128 P/A8 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G2 F2302454	1TR 7925012	TLO	297,236.42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
92	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1126 P/ A1005 N	2015	64,260,000.00	MHFXW42G4 F2305291	1TR 7957357	TLO	297,236.42	Setwan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
93	NISSAN / ALL NEW X-TRAIL 2.0 M/T	A 1124 P/ A 1048 N	2015	160,000,000.00	MHBF3CG3FFJ-001463	MR20-634497B	TLO	827,730.14	Dinas Pertanian	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
94	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1127 P/A1131 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G XF2306364	1TR 7967874	TLO	364,483.61	Dinas Pariwisata	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
95	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1131 PA1134 N	2015	77,724,000.00	MHFXW42G2 F2303927	1TR 7942349	TLO	364,483.61	Satpol PP	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
96	TOYOTA/HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T/MB	A 8999 R / A 8012 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G2E0779304	2KD S362601	TLO	2,477,608.56	Dinas Sosial	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
97	TOYOTA / KIJANG INOVA G SILVER	A 1194 P/A 1017 N	2014	84,456,000.00	MHFXW42G4E2296882	1TR 7858044	TLO	398,107.21	BKPSDM	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
98	STRADA / PICK UP	A 8039 N	2011	125,460,000.00	FE403W90	WALTI235	TLO	2,163,717.69	Dishub	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
99	TOYOTA / HILUX 2.5G DOUBLE CABIN	A 8255 P/A8098 N	2014	192,780,000.00	MROFR22G3E0783	2KD S390195	TLO	2,477,608.56	Dinas PUPR	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
100	MITSUBISHI/STRADA CR 2.8 AM DC GLX	A 8175 P/ A8044 N	2011	153,360,000.00	MMBJNKN70CD017304	4M40UAC8250	TLO	2,644,888.76	Dinas Peternakan	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
101	FORD/RANGER DOUBLE CAB (4X2)	A 8166 P / A8051 N	2010	147,600,000.00	MNBBSFE40AW915003	WLAT1244559	TLO	1,896,955.20	Dispora	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
102	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1173 N	2017	91,440,000.00	MHKM5FA4JHKO28976	2NRF605333	TLO	432,988.70	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
103	FORD RANGER DC 2.5 L4 X4 MT	A 8164 P	2011	134,640,000.00	MHBD1CD1F6J017268	Z24-976815Y	TLO	1,730,393.28	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
104	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1147 P/ A1028 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023299	DDB9094	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
105	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1148 P/ A1029 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023285	DDB8074	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
106	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1149 P/ A1030 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JK023292	DDB9299	TLO	371,855.50	Setda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
107	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1146 P/ A1027 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK021511	DDA7398	TLO	371,855.50	Dinas PUPR	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
108	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1150 P/ A1031 N	2012	79,200,000.00	MHKM1CA4JCK023287	DDB9259	TLO	371,855.50	Dinas Perkimtan	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
109	MITSUBSHI STRADA TRITON (4X4) M/P	A 8199 P/A 8024 N	2014	168,300,000.00	MMBJNKB40ED024451	4D56UCES7709	TLO	2,902,548.12	Satpol PP	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
110	KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T TGN 40 QM/T/ATTITUDE BLACK	A 1215 P/A 1289 N	2016	169,200,000.00	MHFAW8EM8GO203343	1TRA114616	TLO	548,341.43	Dinas Pendidikan	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
111	NEW AVANZA VELOZ / 5 SPEED M/T	A 1151 P/ A1032 N	2012	67,320,000.00	MHKM1CA4JCK023077	DDB8003	TLO	266,669.34	Disperindag	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
112	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1159 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323075	E323075	TLO	533,680.20	Rangkasbitung	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
113	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1160 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323205	E3232O5	TLO	533,680.20	Cibadak	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
114	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1161 P/A1154 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323097	E323097	TLO	533,680.20	Warunggunung	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
115	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1162 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323100	E323100	TLO	533,680.20	Cikulur	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025

NO	MERK/ TYPE /	NO POLISI	TAHUN	HARGA PENGURANGAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	Cover	Total Premi	KET.	Masa Pertanggungan
116	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1163 P/ A1143 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323193	E323193	TLO	533,680.20	Kalanganyar	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
117	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1164 P/A1160 N	2014	111,600,000.00	MHCTBER54FEK323196	E323196	TLO	533,680.20	Cimarga	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
118	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1165 P/A1153 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323084	E323084	TLO	533,680.20	Maja	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
119	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1167 P/ A1146 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323191	E323191	TLO	533,680.20	Curugbitung	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
120	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1168 P/ A1162 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323198	E323198	TLO	533,680.20	Sajira	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
121	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1169 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323094	E323094	TLO	533,680.20	Leuwidamar	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
122	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1170 P/A1179 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323091	E323091	TLO	533,680.20	Cipanas	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
123	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1171 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323087	E323087	TLO	533,680.20	Bojongmanik	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
124	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1172 P/A1161 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323099	E323099	TLO	533,680.20	Cirinten	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
125	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1173 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FK323082	E323082	TLO	533,680.20	Lebakgedong	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
126	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1174 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323098	E323098	TLO	533,680.20	Muncang	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
127	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1175 P/ A1139 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323092	E323092	TLO	533,680.20	Cileles	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
128	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1176 P/A1170 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323197	E323197	TLO	533,680.20	Sobang	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
129	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1178 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323195	E323195	TLO	533,680.20	Gunungkencana	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
130	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1179 P/A1138 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323194	E 323194	TLO	533,680.20	Banjarsari	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
131	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1180 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323071	E323071	TLO	533,680.20	Cigemblong	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
132	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1181 P/A 1150 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323199	E323199	TLO	533,680.20	Malingping	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
133	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1182 P/ A1126 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323200	E323200	TLO	533,680.20	Wanasalam	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
134	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1183 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323210	E323210	TLO	533,680.20	Cijaku	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
135	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1184 P/A1151 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323081	E323081	TLO	533,680.20	Cihara	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
136	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1185 P/ A1101 N	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323192	E323192	TLO	533,680.20	Panggarangan	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
137	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1186 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323207	E323207	TLO	533,680.20	Bayah	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
138	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1187 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323089	E323089	TLO	533,680.20	Cibeber	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
139	ISUZU/PANTHER/TBR 54F TURBO IM	A 1189 P	2014	111,600,000.00	MHCTBR54FEK323074	E323074	TLO	533,680.20	Cilograng	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
140	NEW AVANZA VELOZ / 1,5 M/T	A 1192 P/A1191 N	2016	75,600,000.00	MHKM1CA4JEK082061	DES0619	TLO	353,874.97	Bapenda	26 Agustus 2024 s.d. 26 Agustus 2025
141	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A 8187 P/A 8004 N	2013	64,260,000.00	MROAW12G7D0040442	1TR 7608295	TLO	297,235.47	Bapenda	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
142	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A8184 P/ A8063 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G2D003684	1TR 748844	TLO	533,680.20	Bapenda	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
143	TOYOTA HILUX PICKUP 2.0 L M/T (TGN 10R-TRMDKD)	A 8188 P/A 8003 N	2013	75,600,000.00	MROAW12G7D0040487	1TR 7608729	TLO	533,680.20	Bapenda	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
144	TOYOTA AVANZA	A 1213 P/A 1136 N	2016	129,600,000.00	MHKM5FA3JGK001654	2NRF534083	TLO	475,312.28	Setwan	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
145	TOYOTA AVANZA	A 1004 N	2016	147,600,000.00	MHKM5FA3JGK001876	2NRF538797	TLO	483,806.40	Setwan	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
146	TOYOTA INNOVA	A 1005 N	2016	169,200,000.00	MHJW8EM4G2309101	1TRA109288	TLO	548,341.43	Setwan	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
147	TOYOTA/KIJANG/INNOVA G (TGN 40R-GKMDKD)	A 1191 P/A1218 N	2015	147,600,000.00	MHFXW42G3E2289602	1TR 7802585	TLO	475,312.28	Disnaker	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
148	MITSUBISHI STRADA DOUBLE CABIN	A 8183 P	2012	226,800,000.00	MMBJNKB40DD002903	4056USDW368	TLO	3,911,455.22	Dinas PUPR	14 September 2024 s.d. 14 September 2025
149	FORD RANGER DC 2.5 L 4X4 MT	A 8217 P	2011	154,080,000.00	MNBBSFE40BW922647	WLAT1254802	TLO	2,322,038.49	Bapelitbangda	8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2025
150	TOYOTA HILUX 2.5G DOUBLE CABIN (4X4) M/T	A 8811 R/ A 8007 N	2015	183,600,000.00	MR0KS8CD4F1031188	2KD U795877	TLO	3,166,416.13	Dinas Ketapang	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
151	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1190 P/ A 13 N	2015	125,460,000.00	MHFXW43G2F4094482	1TR8836641	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
152	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1135 P	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094942	1TR8851393	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
153	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1134 P/A10 N	2015	74,052,000.00	MHFXW.426X62061887	1TR8832509	TLO	400,457.94	Setda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
154	TOYOTA GRAND NEW AVANZA 1.3 A/T VIN	A 1203 P	2015	53,244,000.00	MHKM5EB2JFK000571	1NR-F033596	TLO	242,215.30	Setda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
155	TOYOTA KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN VIN 2015 TGN 40 R GKMDKD	A 1201 P/ A 12 N	2015	74,052,000.00	MHFXW43GXF4094911	1TR8850628	TLO	400,457.94	DP3KBP3A	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
156	NEW KIJANG INNOVA G M/T	A 1196 P/ A1016 N	2014	82,620,000.00	MHFXW42G3E2299157	F10A1D200805	TLO	388,936.71	DPMPTSP	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
157	TOYOTA AVANZA 1.5 VELOZ A/T	A 1210 P/A 1149 N	2016	100,800,000.00	MHKM5FB4JGK005996	2NRF542335	TLO	479,738.63	Bapelitbangda	09 November 2024 s.d. 09 November 2025
158	TOYOTA/TGN 40 R/MOPEN/MINI BUS	A 93 P / A 1157 N	2008	158,400,000.00	KHFXW42G282116450	1 TR 6559486	TLO	511,826.38	Diskerpus	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
159	TOYOTA KIJANG INNOVA	A 45 R/ A 33 N	2008	147,600,000.00	MHPXW426X82110075	1TR-6515378	TLO	475,653.79	Badan Kesbangpol	14 Juli 2024 s.d 14 Juli 2025
Jumlah				**29,014,728,219.10**				**394,293,755.64**		

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bumiputera Muda 1967

SUBHI NUR FUADI
Kepala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAMPIRAN IV

"ASURANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN"

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/1274-BKAD/SP/2024, 12 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
Jabatan : PPK
Alamat : Jl. RT. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : PT. Bumiputera Muda 1967
yang dalam hal ini diwakili oleh : Subhi Nur Fuadi
Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

Daftar Produk PAKET OE7-P2412-11263720

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
71334-OE7-229113996 JASA ASURANSI JAMINAN STRUKTUR PEKERJAAN TEKHNIK SIPIL SETELAH SELESAI DIBANGUN (JEMBATAN, JALAN TOL, DERMAGA)	1	IDR	Rp 168.000.000	18 Desember 2024	Rp. 168.000.000
Jumlah					Rp

	168.000.000

Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2) Penyedia memiliki kewajiban:
         a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
            d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

   b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
      1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
         a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
         b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
            d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
            d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
            d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
         d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
         e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
      2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
         a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
         b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
         f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 18 Desember (18/12/2024) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
   Jl. RT. Hardiwinangun No 7 Rangkabitunng

4. Tanggal Barang Diterima
   Barang diterima pada paling lambat tanggal 18 Desember 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
   b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

      Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
   d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
   e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

6. Harga
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
   b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
   c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian

nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
   2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
   a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
   b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
   a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
   b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
   a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
   b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
   d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
    a. pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan;
        2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
    d. Pembayaran di lakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank atas nama

14. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
        2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
    b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
        1) peringatan tertulis;
        2) denda; dan
        3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
            a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
            b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
    c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
        Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
    a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
        1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
(Masa Pertanggungan Kendaraan menyesuaikan dengan periode kontrak sebelumnya sedangkan untuk kendaraan baru sesuai tanggal kontrak sebagaimana data terlampir).

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian METERAI TEMPEL 507A9AMX002299621 ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	Untuk dan atas nama ~~Penyedia~~ PT. Bumiputera Muda 1967 CABANG SERANG SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG)

Nomor 027/1275-BKAD/SPK/2024
Tanggal 12 Desember 2024

D a r i

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

K e p a d a

PT. Bumiputera Muda 1967
SELAKU PENYEDIA BARANG

Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pekerjaan
Pengadaan Asuransi Jembatan Sementara (Bailey)

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0052

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Nilai Kontrak
Rp. 168.000.000,-
(Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah)

Waktu Pelaksanaan :
1 (satu) Tahun
Periode 12 Desember 2024 s.d 12 Desember 2025

Sumber Dana
APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor 027/ 1276 -BKAD/SPMK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Rt. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1274-BKAD/SPK/2024 Tanggal 12 Desember 2024, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : Subhi Nur Fuadi
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: 12 Desember 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waku penyelesaian : 1 (satu) Tahun
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Rangkasbitung, 12 Desember 2024

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

ASURANSI UMUM
BUMIDA

Nomor : 532-EXT/BMD-SRG/XII/2024 Rangkasbitung, 18 Desember 2024
Lampiran : -

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran
BKAD Kabupaten Lebak
Di
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan ini kami sampaikan bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Polis Pengadaan Jasa Asuransi Jembatan Sementara (Bailey) , Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027/1274-BKAD/SP/2024 Tanggal 12 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan pembayaran untuk paket pekerjaan tersebut melalui Bank Transfer Ke :

Nomor Rekening : 0070010016788
Atas Nama : Asuransi BumiPutera Muda 1967
Nama Bank : Bank BJB

Demikian kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

PT. BUMIPUTERA MUDA 1967

SUBHI NUR HUADI
KEPALA CABANG

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/ 1291 -BASTB/BKAD/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang PT. Bumiputera Muda 1967
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   Nip. : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Jembatan Sementara (Bailey)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Pasal 2

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 18 Desember 2024

PIHAK KEDUA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 19840330 200502 1 002

PIHAK PERTAMA,
PT. BUMIPUTERA MUDA 1967

SUBHI NUR FUADI
KEPALA CABANG

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG (BAPB)
Nomor : 027/1292 -BAPB/BKAD/2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan dibawah :

Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP : 19840330 200502 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 027/Kep.01-BKAD/2024, tanggal 02 Januari 2024 selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini telah memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bumiputera Muda 1967 berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1274-/BKAD/SP/2024 Tanggal 12 Desember 2024 dengan daftar rincian barang dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Jembatan Sementara (Bailey)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Demikian Berita Acara Pemeriksaan barang ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 19840330 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN (BAPP)
Nomor : 027/ -BAPP/BKAD/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   NIP : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung
   Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang PT. Bumiputera Muda 1967
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor : 027/1274-BKAD/SP/2024 Tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 532-EXT/BMD-SRG/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 027/1292-BAPB/BKAD/2024 Tanggal 18 Desember 2024 Pengadaan Jasa Asuransi Jembatan Sementara (Bailey) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/1291-BAPB/BKAD/2024 tanggal 18 Desember 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 sebagai **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK KESATU** untuk Pengadaan Jasa Pertanggungan Asuransi Jembatan Sementara (Bailey) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Angsuran Termyn	100 % x Rp. Rp. 168.000.000,00 ,-	= **Rp.** 168.000.000,00
Potongan Uang Muka		= -
Jumlah yang harus dibayar		= **Rp. 168.000.000,00**

Terbilang : Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah.

Demikian Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Jembatan Sementara (Bailey) ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**PIHAK PERTAMA,**
	PT. BUMIPUTERA MUDA 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si	**SUBHI NUR FUADI**
NIP. 19840330 200502 1 002	**KEPALA CABANG**

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

LAMPIRAN V

"ASURANSI GEDUNG DAN BANGUNAN"

TAHUN 2024

Nomor : /BKU/ XI/2024
Kode Rek : 5.1.02.02.02.0008

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

ADE FATHUROHMAN, S.AP, MSi
NIP. 19840330 200502 1002

No.

Telah terima dari **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Uang sejumlah **Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah**

Untuk pembayaran Pembayaran Belanja Asuransi Gedung dan Inventaris Kantor Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Periode 14 November 2024 s.d 14 November 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LIESNA HALIMUTUSA, SE.,MM
NIP. 19860528 201001 2 003

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rangkasbitung, November 2024

Rp. **96.958.257,-**

INDRA SUHADA
NIP. 19830104 200801 1002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/1154-BKAD/SP/2024, 14 NOVEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
Jabatan : PPK
Alamat : Jl. RT. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Penyedia : PT. Bumiputera Muda 1967
yang dalam hal ini diwakili oleh : Subhi Nur Fuadi
Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RincianBarang

Daftar Produk PAKET OE7-P2411-10953697

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
71334-OE7-225608013 ASURANSI GEDUNG MUSEUM	1	IDR	Rp 2.049.839,00	22/11/2024	Rp 2.049.839,00
71334-OE7-225169035 Asuransi Bangunan Gedung Pemda dan Inventaris (Rumah Dinas Bupati, Mess dan Gedung PKK)	1	IDR	Rp 51.704.534,00	22/11/2024	Rp 51.704.534,00
71334-OE7-225610942 ASURANSI GEDUNG DAN INVENTARIS KANTOR PEMDA (Sekretariat Dewan)	1	IDR	Rp 1.740.720,00	22/11/2024	Rp 1.740.720,00
71334-OE7-225632609 ASURANSI GEDUNG PEMDA DAN INVENTARIS PEMDA	1	IDR	Rp 4.520.268,00	22/11/2024	Rp 4.520.268,00

(Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)					
71334-OE7-225614115 ASURANSI GEDUNG DAN INVENTARIS KANTOR (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)	1	IDR	Rp 6.798.777,00	22/11/2024	Rp 6.798.777,00
71334-OE7-225601152 ASURANSI GEDUNG PEMDA DAN INVENTARIS KANTOR (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	1	IDR	Rp 14.091.113,00	22/11/2024	Rp 14.091.113,00
71334-OE7-225623919 ASURANSI GEDUNG DAN INVENTARIS (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	1	IDR	Rp 4.320.831,00	22/11/2024	Rp 4.320.831,00
71334-OE7-225628548 ASURANSI KANTOR BANGUNAN DAN INVENTARIS PEMDA (DPMPTSP)	1	IDR	Rp 5.681.809,00	22/11/2024	Rp 5.681.809,00
71334-OE7-225618769 ASURANSI GEDUNG PEMDA DAN INVENTARIS KANTOR PEMDA (BKAD)	1	IDR	Rp 6.050.366,00	22/11/2024	Rp 6.050.366,00
Jumlah					Rp 96.958.257,00

Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia
      1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
      2) Penyedia memiliki kewajiban:
         a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
         b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
         c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
         d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
         e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
            d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
            d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
   a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
   b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
   c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
      d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
   e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
   a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
   b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
   f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 November 2024 (22/11/2024) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
   Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
   Jl. RT. Hardiwinangun No 7 Rangkabitunng

4. Tanggal Barang Diterima
   Barang diterima pada paling lambat tanggal 22 November 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
   b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

      Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
   c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
   d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

6. Harga
   a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
   b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
   c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
   a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
   b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
      2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP
   a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
   b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
    a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
    b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
    a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
    b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
    a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
    a. pembayaran hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
        1) penyedia telah mengajukan tagihan;
        2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
        3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
    c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
    d. Pembayaran di lakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank atas nama

14. Sanksi
    a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
        1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
        2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
        3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
    b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
        1) peringatan tertulis;
        2) denda; dan
        3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
            a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
            b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
    c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
        Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
    a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
    b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
   a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
   b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
   c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
   d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
   e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
   f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
   a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
   b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
   c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau

berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
(Masa Pertanggungan Kendaraan menyesuaikan dengan periode kontrak sebelumnya sedangkan untuk kendaraan baru sesuai tanggal kontrak sebagaimana data terlampir).

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967 METERAI TEMPEL 5F7B5ALX388016711 SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG)

Nomor 027/1155-BKAD/SPK/2024
Tanggal 14 November 2024

D a r i

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

K e p a d a

PT. Bumiputera Muda 1967
SELAKU PENYEDIA BARANG

Kegiatan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pekerjaan
Pengadaan Asuransi Gedung dan Inventaris Kantor

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0052

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Nilai Kontrak
Rp. 96.958.257,-
(Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

Waktu Pelaksanaan :
1 (satu) Tahun
Periode 14 November 2024 s.d 14 November 2025

Sumber Dana
APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor 027/ 1156 -BKAD/SPMK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Ade Fathurohman, S.AP.,M.Si
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat : Jl. Rt. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1155-BKAD/SPK/2024 Tanggal 14 November 2024, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : Subhi Nur Fuadi
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Ruko Titan Arum, Jalan Raya Cilegon, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: 14 November 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waku penyelesaian : 1 (satu) Tahun
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Rangkasbitung, 14 November 2024

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Untuk dan atas nama Penyedia PT. Bumiputera Muda 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si NIP. 19840330200502 1 002	SUBHI NUR FUADI Kepala Cabang

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/1172-BASTB/BKAD/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   Nip. : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Gedung Dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Pasal 2

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rangkasbitung, 20 November 2024

PIHAK KEDUA, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PIHAK PERTAMA, PT. BUMI PUTRA MUDA 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si	**SUBHI NUR FUADI**
NIP. 19840330 200502 1 002	**KEPALA CABANG**

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
RANGKASBITUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG (BAPB)
Nomor : 027/ 1173-BAPB/BKAD/2024

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan november tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan dibawah :

Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP : 19840330 200502 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 027/Kep.01-BKAD/2024, tanggal 02 Januari 2024 selaku Pejabat Pembuat Komitemen pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, dengan ini telah memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bumiputra Muda 1967 berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/1154-/BKAD/SP/2024 Tanggal 14 November 2024 dengan daftar rincian barang dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	URAIAN	KUANTITAS	KET.
1.	Polis Pengadaan Jasa Asuransi Gedung Dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR)	1 Berkas	Baik Sesuai Surat Perjanjian/ Kontrak

Demikian Berita Acara Pemeriksaan barang ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
NIP. 19840330 200502 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Rd. Tumenggung Hardiwinangun No. 7 Telp/Fax : (0252) 5558871
e-mail : bkad@lebakkab.go.id
R A N G K A S B I T U N G

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN (BAPP)
Nomor : 027/1180 -BAPP/BKAD/2024

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si
   NIP : 19840330 200502 1 002
   Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Alamat : Jl. R.T. Hardiwinangun No. 7 Rangkasbitung
   Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : SUBHI NUR FUADI
   Jabatan : Kepala Cabang
   Alamat : Jl. Raya Serang Cilegon KM 2 Serang 42117 Pertokoan Titan Arum Blok H
   Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor : 027/1154-BKAD/SP/2024 Tanggal 14 November 2024 sebesar Rp. 96.958.257,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
2. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 429-EXT/BMD-SRG/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor : 027/539-BAPB/BKAD/2024 Tanggal 20 November 2024 Pengadaan Jasa Asuransi Asuransi Gedung dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/1172-BAPB/BKAD/2024 tanggal 20 November 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PT. BUMIPUTRA MUDA 1967 sebagai **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran pekerjaan dari **PIHAK KESATU** untuk Pengadaan Jasa Pertanggungan Pengadaan Pengadaan Jasa Asuransi Gedung dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR) pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Angsuran Termyn	100 % x Rp. Rp. 96.958.257,00 ,-	= **Rp.** 96.958.257,00
Potongan Uang Muka		= -
Jumlah yang harus dibayar		= **Rp. 96.958.257,00**

Terbilang : Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Rupiah.

Demikian Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi Gedung dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR) ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	**PIHAK PERTAMA,**
	PT. BUMI PUTRA MUDA 1967
ADE FATHUROHMAN, S.AP., M.Si	**SUBHI NUR FUADI**
NIP. 19840330 200502 1 002	**KEPALA CABANG**

ASURANSI UMUM
BUMIDA

Nomor : 429-EXT/BMD-SRG/XI/2024 Rangkasbitung, 20 November 2024
Lampiran : -

Kepada Yth:
Kuasa Pengguna Anggaran
BKAD Kabupaten Lebak
Di
Tempat

Perihal : Permohonan Pembayaran

Dengan ini kami sampaikan bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Pengadaan Jasa Asuransi Gedung Dan Inventaris Kantor Property All Risk (PAR), Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027/1154-BKAD/SP/2024 Tanggal 14 November 2024 dengan nilai sebesar Rp. 96.958.257,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan pembayaran untuk paket pekerjaan tersebut melalui Bank Transfer Ke :

Nomor Rekening : 0070010016788
Atas Nama : Asuransi Bumi Putra Muda 1967
Nama Bank : Bank BJB

Demikian kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya.

PT. BUMI PUTRA MUDA 1967

CABANG SERANG

SUBHI NUR FUADI
KEPALA CABANG